



KOLABORASI PERDAGANGAN DAN LOGISTIK UNTUK MEMAJUKAN PANGAN NASIONAL

TRADE AND LOGISTICS COLLABORATION TO ADVANCE NATIONAL FOOD

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini, kondisi mendatang, dan lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PPI” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Adakalanya kata “Perusahaan” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia secara umum.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements by applicable laws and regulations, except for historical matters. Such statements involve prospective risks, uncertainties and could cause actual developments to differ materially from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of the Company and the business environment in which the Company conducts business activities. The Company does not guarantee that the documents that have been confirmed as valid will bring certain results as expected.

This Annual Report contains the words “PPI” and “Company” which are defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Occasionally the word “Company” is also used for convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in general.





Tentang Laporan Tahunan

About the Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan tema “Kolaborasi Perdagangan dan Logistik untuk Memajukan Pangan Nasional”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta serta perkembangan bisnis perseroan sepanjang tahun 2022 serta masa depan keberlanjutan bisnis PPI.

Laporan Tahunan 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PPI dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi PPI kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang PPI melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, isi laporan ini berasal dari analisis internal serta sumber dokumen dan narasumber yang dapat dipercaya. Beberapa bagian dari laporan ini memuat data dan informasi tentang pandangan ke depan, yang bersifat *forward-looking statement*, seperti target, harapan, perkiraan, estimasi, prospek, atau proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha PPI di masa mendatang.

Sebelum dimuat di dalam Laporan, perseroan telah mempertimbangkan kepastian data dan informasi yang bersifat *forward-looking statement* dengan matang. Meski demikian, PPI tidak dapat menjamin data dan informasi tersebut benar dan akurat serta dapat terpenuhi seluruhnya. Para pembaca perlu memahami bahwa PPI menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi kinerja operasional dan kondisi usaha yang akan datang.

Welcome to the 2022 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia with the theme “Trade and Logistics Collaboration to Advance National Food”. The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on facts and the company’s business developments throughout 2022 and the future of PPI’s business sustainability.

The 2022 Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is a source of comprehensive documentation containing information on PPI’s performance in a year. The information contains complete documentation describing the profile of the company; operational, marketing, and financial performance; information on the duties, roles, and structural functions of the company’s organization that applies the concept of best practices and principles of corporate governance.

The main objective of preparing this Annual Report is to increase the disclosure of PPI’s information to the relevant authorities as well as to become an annual book that helps build a sense of pride and solidarity among employees. In addition, this Annual Report also aims to build the understanding and trust of shareholders and other stakeholders about PPI through the provision of appropriate, balanced, and relevant information.

This report is a form of transparency and accountability of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in presenting material data and information regarding the performance and corporate governance to stakeholders. In general, the contents of this Report are derived from internal analysis as well as reliable documents and sources. Several parts of this Report contain forward-looking data and information, such as targets, expectations, approximations, estimations, prospects, or projections of PPI’s operational performance and business conditions in the future.

Before being included in the Report, the company has carefully considered the certainty of data and information that are forward-looking statements. However, PPI cannot guarantee that the data and information are true and accurate and can be fully fulfilled. Readers need to understand that PPI faces various risks and uncertainties caused by various factors, such as changes in the economic, social and political situation in Indonesia. This, of course, may affect operational performance and future business conditions.

Laporan Tahunan ini memuat kata “PPI”, adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia secara umum yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

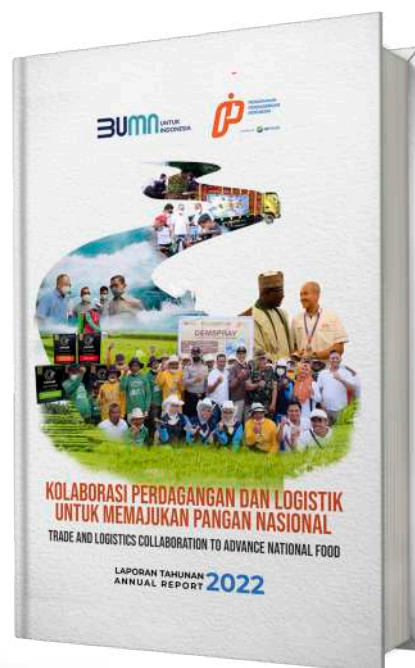
Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain dalam edisi cetak, Laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi PPI www.ptppi.co.id

This Annual Report contains the word “PPI”, sometimes the word “we” is used on the basis of convenience to refer to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in general, which is defined as PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which carries out its main business activities in the domestic and international trading business sector. The mentions of the currency units such as “Rupiah”, “Rp” or IDR, refer to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Rupiah.

The report is made in two languages, namely Indonesian and English. Apart from the printed edition, the similar report can be accessed through PPI’s official website www.ptppi.co.id

KOLABORASI PERDAGANGAN DAN LOGISTIK UNTUK MEMAJUKAN PANGAN NASIONAL

TRADE AND LOGISTICS COLLABORATION TO ADVANCE NATIONAL FOOD





Tema Laporan Tahunan 2022

Theme of the 2022 Annual Report

Kolaborasi Perdagangan dan Logistik untuk Memajukan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari yang menarik perhatian dunia. Berbagai konflik di seluruh belahan dunia telah membawa dampak pada krisis ekonomi, energi, dan pangan yang terjadi di berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, ketahanan pangan nasional merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Demi mewujudkan ketahanan pangan nasional, PPI turut berkolaborasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan sektor pangan nasional. Dengan semangat dan komitmen untuk Indonesia, PPI bertekad untuk bersama-sama mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Trade and Logistics Collaboration to Advance National Food

Food security is one of the world's major concerns, as conflicts around the world have led to economic, energy and food crises in many countries. Therefore, national food resilience is important for a country. In order to realize national food security, PPI also collaborates in facing the complex challenges of the national food sector. With passion and commitment to Indonesia, PPI is determined to jointly support national food security, so as to improve the welfare of farmers and all Indonesian people as a whole.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2019

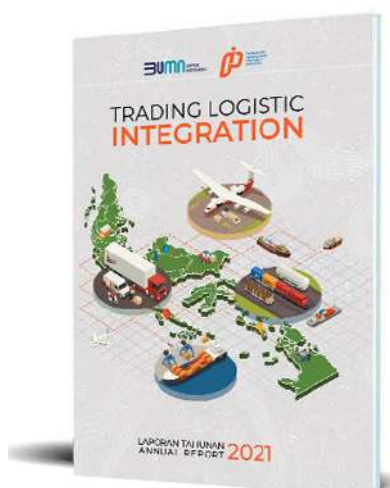
Memperluas Usaha Mengoptimalkan Pertumbuhan

Expanding Business Optimizing Growth



2020

GROWING & CARING WITH SOCIETY



2021

TRADING LOGISTIC INTEGRATION



Daftar Isi

Table of Content

01	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	90	Maksud dan Tujuan Perseroan Company Purpose and Objectives
02	Tentang Laporan Tahunan About The Annual Report		Identitas dan Logo Perusahaan Corporate Identity and Logo
04	Tema Laporan Tahunan 2022 Theme of the 2022 Annual Report	91	Struktur Organisasi Organizational Structures
05	Kesinambungan Tema Theme Continuity	92	Manajemen dan Pejabat Perusahaan Management and Corporate Officers
06	Daftar Isi Table of Contents	95	Profil Dewan Komisaris Profil of the Board of Commissioners
10	Capaian Penting 2022 2022 Important Achievements	100	Profil Direksi Profile of the Board or Directors
11	Ikhtisar Kinerja 2022 2022 Performance Highlights	105	Sumber Daya Manusia Human Resources
20	Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2022 Awards and Certifications in 2022	122	Rencana Pengembangan SDM Tahun 2023 HR Development Plan 2023
25	Kerjasama PPI dengan Mitra PPI Cooperation with Business Partner	127	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition
26	Peristiwa Penting Tahun 2022 Important Events in 2022	128	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structures
2	Laporan Manajemen Management Report	129	Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama List of Subsidiaries and Joint Ventures
42	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	134	Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology
47	Laporan Direksi Report of the Board of Directors		Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Other Securities Issuance Chronology
3	Profil Perusahaan Company Profile	137	Peta Jaringan Perdagangan PPI dan Saluran Distribusi PPI Trade Network Map and Distribution Channels
56	Identitas Perusahaan Corporate Identity	138	Daftar Alamat Kantor Office Address List
57	Riwayat Singkat Brief History	140	Informasi Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website
60	Jejak Langkah Milestones	141	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri Industrial Association Membership
64	Bidang Usaha, Produk, dan Layanan Line of Business, Products, and Services	142	Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal Education and/or Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit in 2022
66	Produk dan Komoditi Perdagangan PPI Trade Products and Commodities		
84	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Cultural Values		
88	Sasaran dan Strategi Perusahaan Company Target and Strategy		
89	5 Prioritas Strategi BUMN 5 SOE Priority Strategies		

4	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis
162	Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional PPI Trade Products and Commodities
164	Prospek Usaha Business Prospect
165	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment
175	Tinjauan Keuangan Financial Overview
177	Liabilitas Liabilities
180	Analisis Laba Rugi Profit/Loss Analysis
185	Analisis Arus Kas Cash Flows Analysis
187	Analisis Rasio Keuangan Financial Ratios Analysis
188	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level
190	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy
200	Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional Comparison between Target, Realization, and Projection of Operational
203	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Ekspansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
208	Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations That are Significant to the Company
208	Dampak Perubahan Harga terhadap Perusahaan Impact of Price Changes on the Company
208	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

209	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
211	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity
5	Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Functions
214	Sumber Daya Manusia Human Resources
224	Teknologi Informasi Information Technology
6	Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance
232	Pernyataan Komitmen Penerapan GCG Statement of GCG Implementation Commitment
234	Landasan Penerapan GCG Legal Basis of GCG Implementation
234	Prinsip-prinsip GCG dan Implementasinya GCG Principles and Their Implementation
236	Maksud dan Tujuan Penerapan GCG GCG Implementation Purpose and Objective
236	Roadmap GCG PPI PPI GCG Roadmap
237	Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2022 Efforts to Improve the Quality Of GCG Implementation in 2022
238	Penilaian GCG oleh Pihak Eksternal GCG Assessment by External Party
241	Skor GCG Perseroan Company GCG Score
242	Rencana Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2022 GCG Quality Improvement Plan in 2022
242	Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism
243	Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama Dan Pengendali Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu Information About Direct And Indirect Majority And Controlling Shareholders
244	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
252	Dewan Komisaris Board of Commissioners
262	Independensi Dewan Komisaris Independency of the Board of Commissioners
263	Komisaris Independen Independent Commissioner
264	Rapat Dewan Komisaris Meeting of the Board of Commissioners



266	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2022
268	Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris Decrees of the Board of Commissioners
272	Direksi Board Of Directors
276	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
282	Independensi Direksi Independence of the Board of Directors
283	Rapat Direksi Meeting of the Board of Directors
295	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
303	Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi Remuneration Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors
308	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
309	Profil Sekretaris Dewan Komisaris Profile of the Secretary of the Board of Commissioners
321	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
326	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee
329	Profil Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Profile of Risk Management Committee
333	Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meeting
335	Organ Pendukung di Bawah Direksi Supporting Organs Under the Board of Directors
351	Akuntan Publik Public Accountant
356	Manajemen Risiko Risk Management
365	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
377	Perkara Penting Tahun 2022 Legal Cases In 2022
377	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
377	Pedoman Etika Perusahaan Corporate Ethics Guidelines
382	Sistem Pelaporan Pelanggaran Corporate Ethics Guidelines

388	Kebijakan Anti-Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption And Gratuity Control Policy
390	Kebijakan Kickbacks dan Anti-Penyuapan Kickbacks and Anti-Bribery Policy
390	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik Provision Of Funds For Social and Political Activities
390	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Management Of State Officials Wealth Reports
392	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency Of Bad Governance Practices
394	Kebijakan Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Perusahaan Policy On Company Information Classification And Management
394	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Governance
395	Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Commitment to Fulfilling The Rights Of Creditors
395	Kebijakan Seleksi Pemasok Supplier Selection Policy
7 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Corporate Social Responsibility (CSR)	
400	Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Policy
400	Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Activity Implementation Objective
401	Dasar Hukum Legal Basis
401	Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Scope of Corporate Social Responsibility
402	Strategi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility Activity Strategy
402	Struktur Pengelola Manager Structure
403	Realisasi Anggaran Biaya Cost Budget Realization
403	Tanggung Jawab Sosial Terkait Dengan Hak Asasi Manusia Social Responsibility Related to Human Rights
405	Tanggung Jawab Sosial Terkait Dengan Operasi yang Adil Social Responsibility Related to Fair Operations
406	Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya Activities Implemented and Achievements

-
- 407** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TJSL)
Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER)
-
- 414** Tanggung Jawab Sosial Terkait Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Social Responsibility Related to Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety (OHS)
-
- 421** Tanggung Jawab Sosial Terkait Sosial Dan Kemasyarakatan
Social Responsibility Related to Social and Community
-
- 427** Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan Atau Konsumen
Social Responsibility to Customers or Consumers
-

8

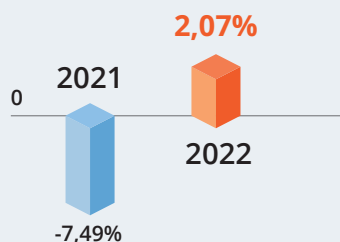
Laporan Keuangan
Audited Financial Report



Capaian Penting 2022

2022 Important Achievements

Margin Laba Bersih
Net Profit Margin
%



PPI berhasil kembali mencatatkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi

PPI managed to record another positive performance amidst the various challenges it faced



Ikhtisar Kinerja 2022

2022 Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan | Overview of Financial Performance

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position							
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020	2019	2018
	%	Nominal					
Aset Lancar Current Assets	19,57%	616.102	616.102	823.271	922.092	885.678	436.171
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	0,37%	13.195	3.600.947	3.587.751	3.266.699	3.194.812	2.864.888
Jumlah Aset Total Assets	3,95%	174.344	4.585.367	4.411.022	4.188.791	4.080.491	3.301.059
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	29,37%	180.972	797.075	616.102	515.484	526.616	143.978
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	(5,44%)	(54.793)	952.689	1.007.482	990.254	962.023	1.007.780
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7,77%	126.179	1.749.764	1.623.584	1.505.739	1.488.639	1.151.759
Jumlah Ekuitas Total Equity	1,73%	48.165	2.835.603	2.787.437	2.683.052	2.591.851	2.149.301

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income							
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020	2019	2018
	%	Nominal					
Pendapatan Revenues	22,11%	428.694	2.367.519	1.938.824	3.972.598	2.047.951	1.496.513
Beban Usaha Operating Expenses	19,87%	78.516	(316.584)	(395.100)	(3.804.021)	(208.769)	(173.177)
Lab (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	162,92%	209.915	81.069	(128.846)	168.575	15.670	5.543
Pendapatan (beban) Non-usaha – bersih Non-operating Income (Expenses) – net	89,40%	43.889	(5.206)	(49.094)	(14.326)	(165.150)	139.708



Lab a Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	142,63%	253.803	75.863	(177.940)	154.249	(149.480)	145.250
Beban Pajak Penghasilan Income Tax	(182,01%)	(59.419)	(26.774)	32.645	(45.480)	50.398	(34.784)
Lab a Bersih Tahunan Berjalan Profit for the Year	133,79%	194.384	49.089	(145.295)	108.769	(99.082)	110.466
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(100,37%)	(247.581)	(924)	246.656	(13.129)	(10.786)	2.493
Lab a Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	(52,48%)	(53.197)	48.165	101.361	95.639	(109.868)	112.959

dalam juta Rp | in millions of Rp

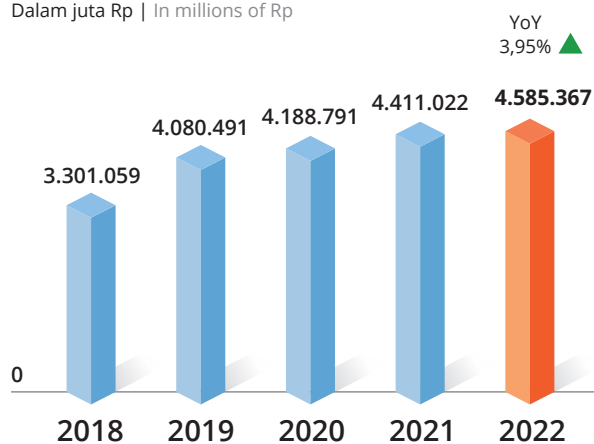
Laporan Arus Kas Statements of Cash Flow							
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020	2019	2018
	%	Nominal					
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	74,11%	55.175	(19.273)	(74.448)	377.516	(6.467)	(71.088)
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	105,77%	102.026	5.565	(96.461)	(107.775)	39.734	38.168
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	(80,59%)	(91.652)	22.067	113.719	(135.470)	(61.596)	4.022
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	114,62%	65.550	8.359	(57.191)	134.271	(28.329)	(28.898)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	(24,84%)	(57.191)	173.059	230.250	95.979	124.308	153.206
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	4,83%	8.359	181.418	173.059	230.250	95.979	124.308

Rasio Keuangan Financial Ratios						
Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020	2019	2018
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio						
Rasio lancar Current Ratio	%	123,50%	133,63%	178,88%	168,18%	302,94%
Rasio cepat Quick Ratio	%	111,33	87	110,4	90,82	110,5
Rasio kas Cash Ratio	%	22,76%	28,09%	44,90%	35,69%	57,60%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio						
Rasio utang terhadap aset Debt to assets ratio	%	38,16%	36,81%	35,95%	36,48%	34,89%
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio	%	61,71%	58,25%	56,12%	57,44%	53,59%
Rasio Aktivitas Activity Ratio						
Collection periods	Hari Days	65	5,7	11,8	16,22	18,58
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	66,2	12,39	12,95	13,27	17,26
Perputaran persediaan Inventory turnover	Kali Times	15	14	10,5	23,43	43,28
Perputaran total aset Total assets turnover	Kali Times	54,13	45,09	96,08	63,42	46,04
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio						
Imbalan atas Aset Return to Assets (ROA)	%	1,07%	(3,29%)	2,60%	(2,43%)	3,35%
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	1,73%	(5,21%)	4,05%	(3,82%)	5,14%
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	3,28%	(5,3%)	4,8%	(104,73%)	0,54%
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin (OPM)	%	3,42%	(6,65%)	4,24%	0,77%	0,37%
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	16,80%	13,7%	13%	10,96%	11,94%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	2,07%	(7,49%)	2,74%	(4,84%)	7,38%
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	5,53	(4,2)	5,1	1,56	1,57



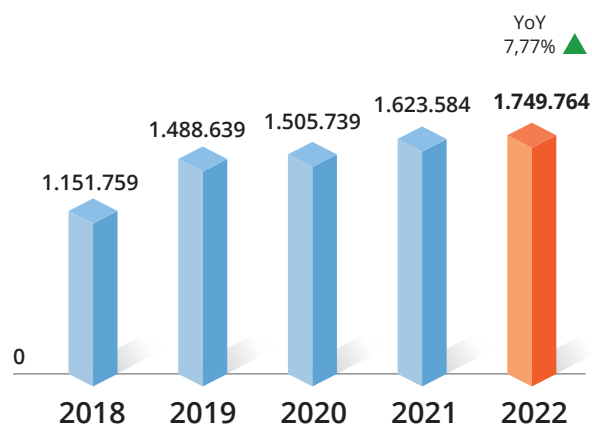
Jumlah Aset | Total Assets

Dalam juta Rp | In millions of Rp



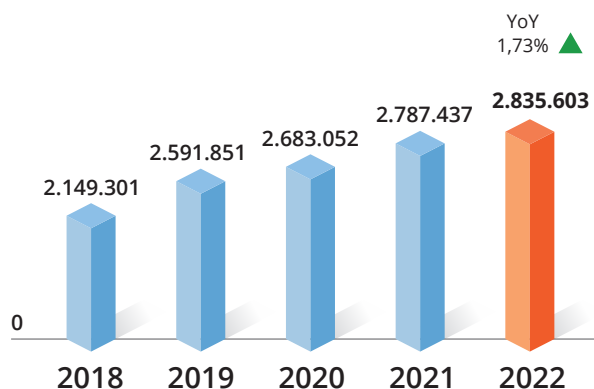
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities

Dalam juta Rp | In millions of Rp



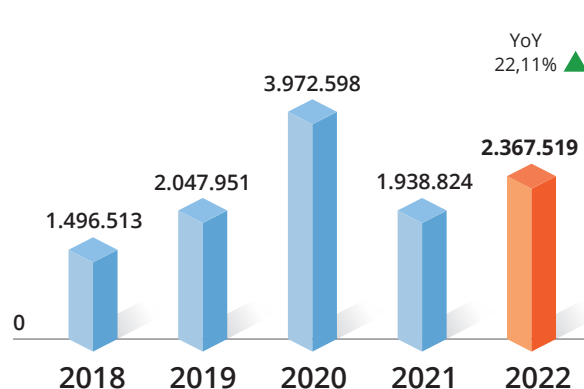
Jumlah Ekuitas | Total Equity

Dalam juta Rp | In millions of Rp



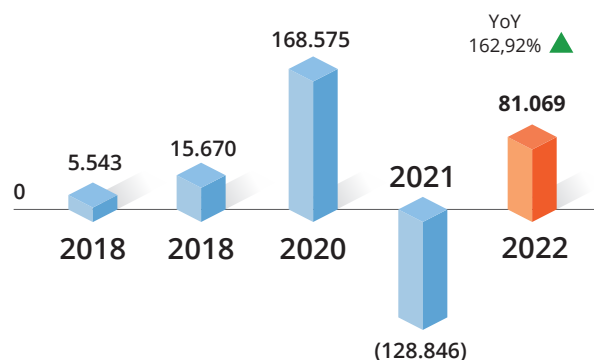
Pendapatan Usaha Bersih | Net Revenues

Dalam juta Rp | In millions of Rp



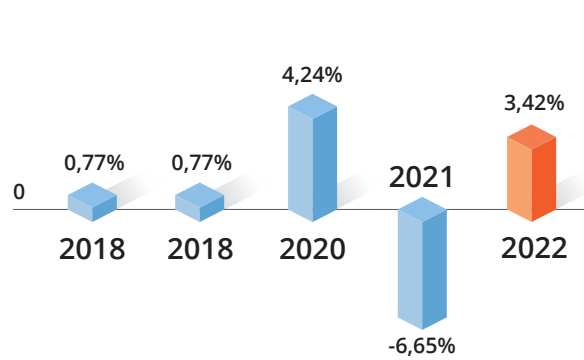
Laba Usaha | Operating Profit

Dalam juta Rp | In millions of Rp



Margin Laba Usaha | Net Operating Margin

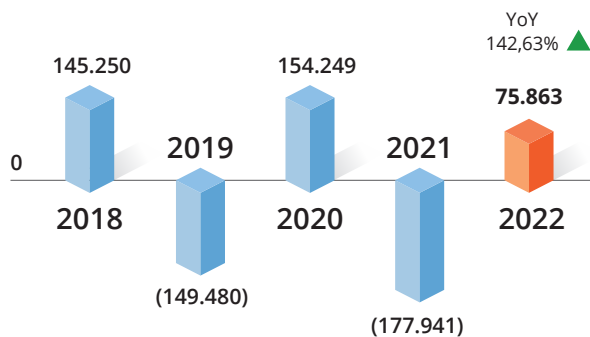
Dalam % | In %



Laba Sebelum Pajak Penghasilan

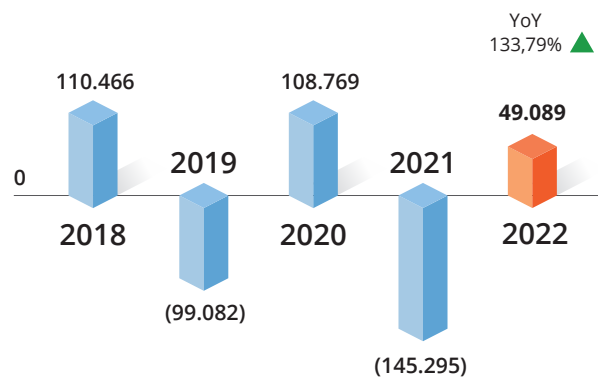
Profit Before Income Tax

Dalam juta Rp | In millions of Rp



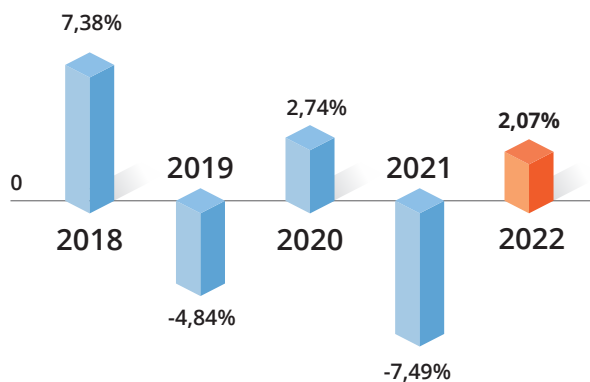
Laba Tahun Berjalan | Profit for the Year

Dalam juta Rp | In millions of Rp



Margin Laba Bersih | Net Profit Margin

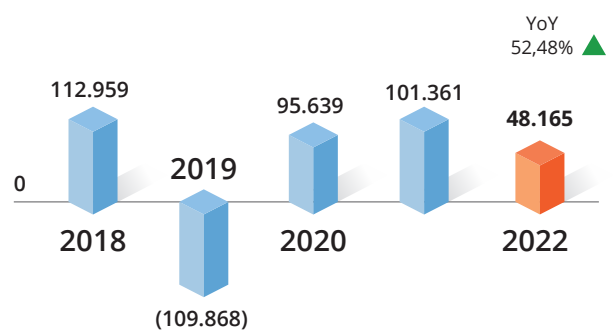
Dalam % | In %



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

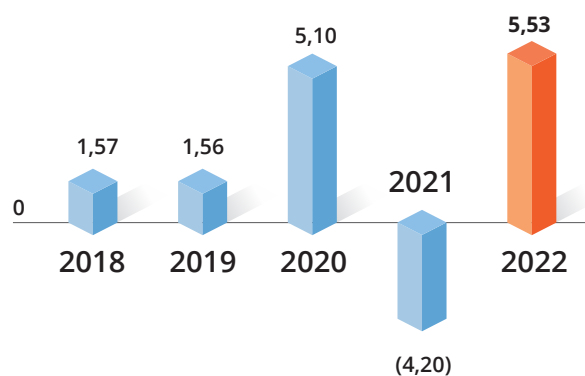
Total Comprehensive Income for the Year

Dalam juta Rp | In millions of Rp



Margin EBITDA

Dalam % | In %

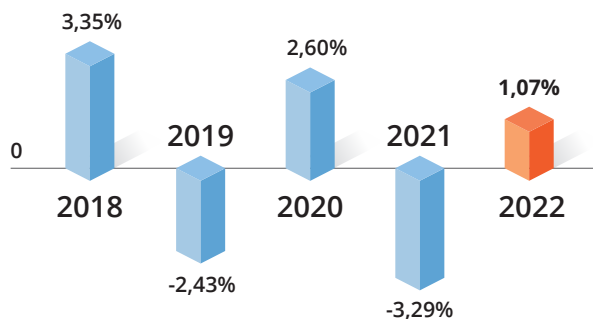




Tingkat Pengembalian Aset

Return on Assets (ROA)

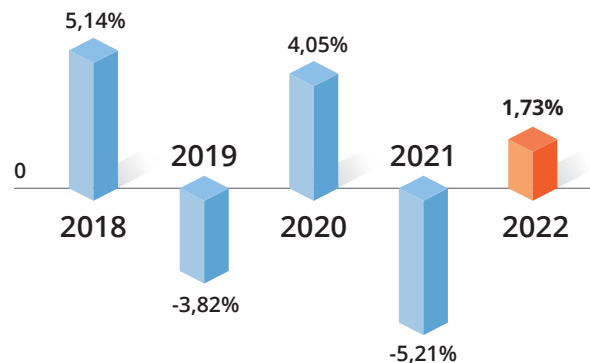
Dalam % | In %



Tingkat Pengembalian Ekuitas

Return on Equity (ROE)

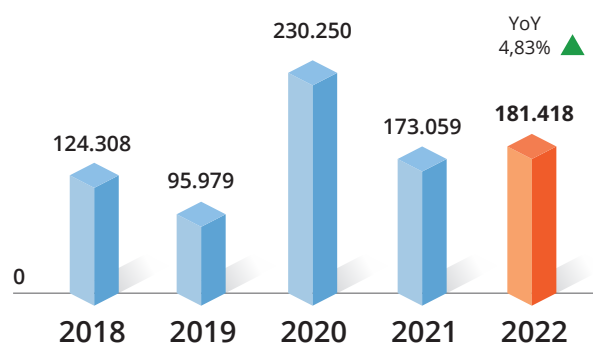
Dalam % | In %



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

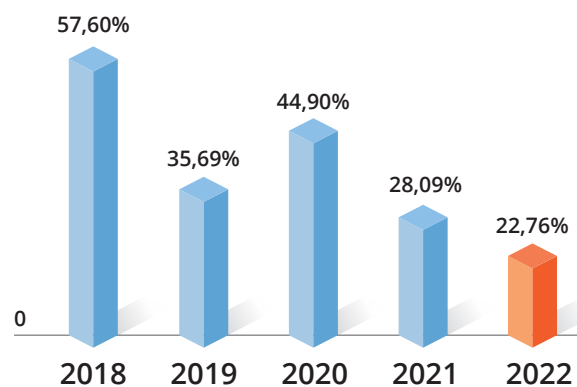
Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Dalam juta Rp | In millions of Rp



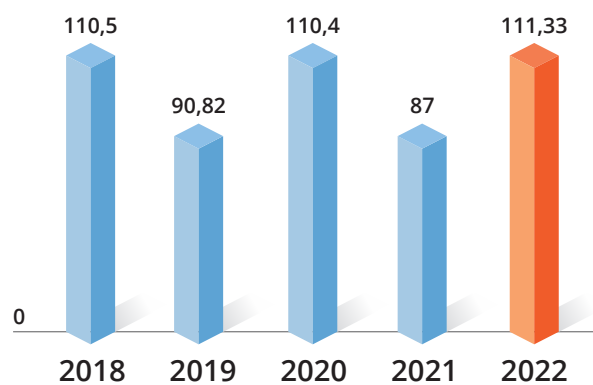
Rasio Kas | Cash Ratio

Dalam % | In %



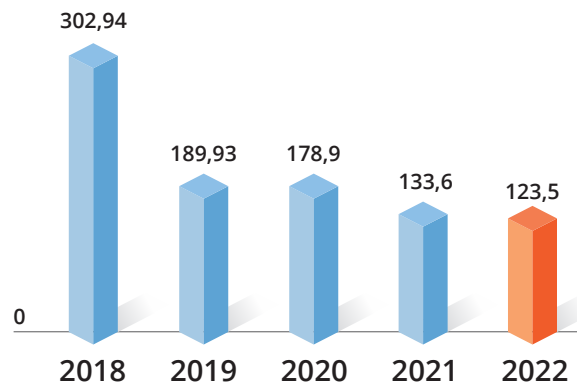
Rasio Cepat | Quick Ratio

Dalam % | In %



Rasio lancar | Current ratio

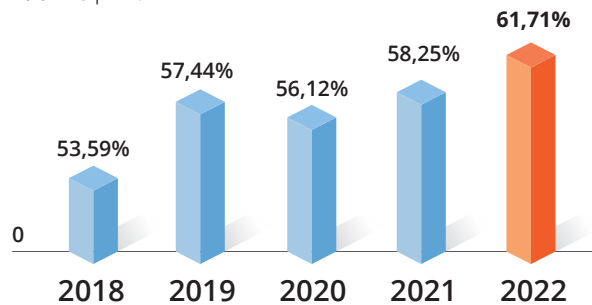
Dalam % | In %



Rasio Utang terhadap Ekuitas

Debt to Equity ratio (DER)

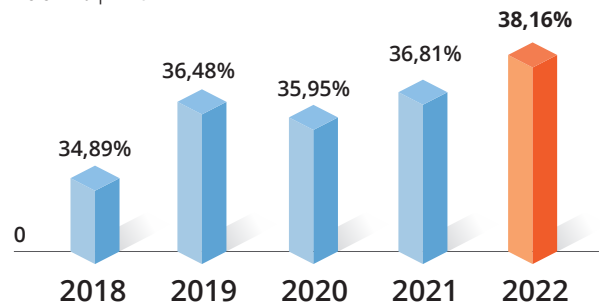
Dalam % | In %



Rasio Utang terhadap Aset

Debt to Assets ratio (DAR)

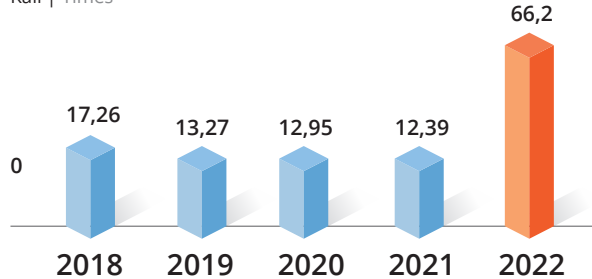
Dalam % | In %



Perputaran Utang

Average Payment Turnover

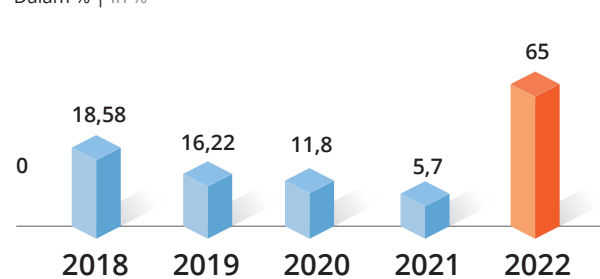
Kali | Times



Rata-rata pengumpulan piutang

Average collection period

Dalam % | In %



Ikhtisar Kinerja Operasional | Operational Performance Highlight

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Pendapatan per Segmen Usaha Revenue per Business Segment					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Lokal (Perdagangan Dalam Negeri) Local (Domestic Trade)	24,09%	190,20	979,80	789,60	829,24
Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional) Import & Export (International Trade)	6,28%	31,90	540,00	508,10	1.930,02
Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain) Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business)	36,34%	34,20	128,30	94,10	101,79

Ikhtisar Dividen

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2022 dan 2021, Perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen atas laba bersih Perusahaan tahun 2021 dan 2020.

Dividends Overview

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2022 and 2021, the Company decided not to distribute dividends on the Company's net profit in 2021 and 2020.

Ikhtisar Saham

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, PPI tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum. Oleh karena itu, PPI tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham.

Share Overview

As of December 31, 2022, PPI has not taken any corporate actions related to public share offering. Therefore, PPI does not have information related to share overview.



Ikhtisar Obligasi dan/atau Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2022, PPI tidak melakukan penerbitan obligasi atau efek lainnya. Oleh karenanya, tidak ada yang dapat disajikan terkait dengan hal tersebut dalam Laporan Tahunan 2022 ini.

Aksi Korporasi

Pada tanggal 7 Januari 2022 secara resmi terbentuk Holding BUMN Pangan dengan PT RNI (Persero) sebagai induk holding. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Akta Inbreng saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar terjadi perubahan antara lain:

1. Menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebanyak 942.744 (sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) lembar saham yang seluruhnya senilai Rp3.725.494.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah)
2. Status PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Pemegang Saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Pembentukan Holding Pangan bertujuan untuk mewujudkan 3 objektif utama:

1. Mendukung ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatkan inklusivitas petani, peternak, dan nelayan;
3. Menjadi perusahaan berkelas dunia.

PT PPI diharapkan dapat berperan sebagai *aggregator* dan *integrator* untuk BUMN Produsen Holding Pangan. Sementara penyedia jasa logistik dilakukan oleh anak perusahaan PT PPI yaitu PT BGR Logistik Indonesia.

Overview of Bonds and/or Other Securities

As of December 31, 2022, PPI has not issued any bonds or other securities. Therefore, nothing can be presented related to this matter in this 2022 Annual Report.

Corporate Actions

On January 7, 2022, the Food SOE Holding was officially formed, with PT RNI (Persero) as the holding parent. This was marked by the signing of the Deed of Inbreng of Government shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs, including PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari and PT Garam.

Based on Deed No. 2 dated January 7, 2022 concerning Amendments to the Articles of Association, there were changes, among others:

1. Approved the transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to be used as additional capital participation of the Republic of Indonesia in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) totaling 942,744 (nine hundred forty-two thousand seven hundred forty-four) shares, totaling Rp3,725,494,000,000.00 (three trillion seven hundred twenty-five billion four hundred ninety-four million rupiah).
2. The status of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) changed to a Limited Liability Company that is fully subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. The shareholders of the Company are the Republic of Indonesia and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

The establishment of the Food Holding aims to realize 3 main objectives:

1. Supporting national food security;
2. To increase the productivity of farmers, ranchers, and fishermen;
3. To become a world-class company.

PT PPI is expected to act as an aggregator and integrator for the Food Holding Producer SOEs. While the logistics service provider is carried out by PT PPI's subsidiary, PT BGR Logistik Indonesia.



HOLDING



Peningkatan peran pendampingan dan kapasitas offtake dengan model kerjasama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM.

Increasing the role of mentoring and offtake capacity with cooperation models with farmers, breeders, fishermen, and MSMEs.

53.000 Ton

163.000 Ton

Pengembangan Produk Ritel Minyak Gorengan, Telur, Teh, Tepung Terigu, Air Mineral, Kecap, dll.

Retail Product Development of fried oil, eggs, tea, wheat flour, mineral water, soy sauce, etc.

PPI bertindak sebagai agen penjualan dari produsen, kedepannya PPI melakukan off-take terhadap semua produk dari produsen untuk manual lagi ke customer

PPI acts as a sales agent of the manufacturer, in the future PPI off-takes all products from the manufacturer to sell again to the customer.

Sumber: Kejadian Bersama Pembentukan Holding BUMN Industri Pangan
Source: Joint Event on the Establishment of Food Industry SOE Holding



Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2022

Awards and Certifications in 2022

Penghargaan Tahun 2022 | 2022 Award



24 Maret 2022 | March 24, 2022

Penghargaan | Award

Anugerah BUMN Ke11 Tahun 2022 | The 11th SOE Award 2022

Kategori | Category

- Terbaik Kedua Kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Second Best Good Corporate Governance (GCG) Category
- CEO BUMN Terbaik Kategori CEO Support Service Excellent (Nina Sulistyowati – Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
Best SOE CEO Category CEO Support Service Excellent (Nina Sulistyowati - President Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)

Penyelenggara | Organizer

Anugerah BUMN Ke11 Tahun 2022 | The 11th SOE Award 2022

Penerima | Recipient

Nina Sulistyowati (Direktur Utama PPI) | (President Director of PPI)



25 Maret 2022 | March 25, 2022

Penghargaan | Award

PR Indonesia Award (PRIA) 2022

Kategori | Category

Bronze Winner Public Relations Indonesia Awards 2022 Kategori BUMN sub Kategori Corporate PR

Bronze Winner of Public Relations Indonesia Awards 2022 BUMN Category sub Category Corporate PR

Penyelenggara | Organizer

PR Indonesia

Penerima | Recipient

Noverita Anggraeny (Sekretaris Perusahaan PPI) | (PPI Corporate Secretary)



30 Maret 2022 | March 30, 2022

Penghargaan | Award

Digitech Award 2022

Kategori | Category

The best Digital Technology Project in Trading Industries
The Best Chief Information Technology Officer (Tri Wahyundo Hariyatno)

Penyelenggara | Organizer

Business News Indonesia

Penerima | Recipient

Nina Sulistyowati (Direktur Utama PPI) | (President Director of PPI)
Tri Wahyundo Hariyatno (Direktur Operasi PPI) | (PPI Operations Director)



22 Juni 2022 | June 22, 2022

Penghargaan | Award

Marketeers OMNI Brand of the Year

Kategori | Category

Penghargaan Brands Of The Year 2022 untuk Warung Pangan
Brands Of The Year 2022 Award for Warung Pangan

Penyelenggara | Organizer

Marketeers

Penerima | Recipient

Nina Sulistyowati (Direktur Utama PPI) | (President Director of PPI)



27 Juli 2022 | July 27, 2022

Penghargaan | Award

GRC & Performance Excellence Awards

Kategori | Category

The Best GRC for Corporate Governance dengan predikat five star silver.
The Best GRC for Corporate Governance dengan predikat five star silver.

Penyelenggara | Organizer

Business News Indonesia

Penerima | Recipient

Andry Tanudjaja (Direktur Komersial & Pengembangan PPI)
(PPI Commercial & Development Director)



12 Agustus 2022 | August 12, 2022

Penghargaan | Award

Marketeers SME Enabler Award 2022

Kategori | Category

Trade Sector Enabler untuk platform Warung Pangan
Trade Sector Enabler for Warung Pangan platform

Penyelenggara | Organizer

Marketeers

Penerima | Recipient

Rifki Steovani (Kepala Divisi Retail & E-commerce)
(Head of Retail & E-commerce Division)



27 Oktober 2022 | October 27, 2022

Penghargaan | Award

The Economics BUMN Forum 2022

Kategori | Category

Best Printed Company Profile in trading company

Penyelenggara | Organizer

Majalah The Economics

Penerima | Recipient

Noverita Anggraeny (Sekretaris Perusahaan PPI)
(PPI Corporate Secretary)



30 November 2022 | November 30, 2022

Penghargaan | Award

Human Capital & Performance Awards 2022

Kategori | Category

- Predikat 4 star diamond "The Best Digital Transformation Strategy"
Predicate 4 star diamond "The Best Digital Transformation Strategy"
- Predikat 4 star diamond "The Best Reward and Recognition Strategy".
Predicate 4 star diamond "The Best Reward and Recognition Strategy".

Penyelenggara | Organizer

Business News Indonesia

Penerima | Recipient

Arnoldo Victori (Kepala Divisi SDM & Umum)
(Head of HR & General Division)



Sertifikasi Tahun 2022 | 2022 Certification



Sertifikasi | Certification

SNI ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3)

Pemberi Sertifikasi | Certifier

PT Sucofindo

Masa Berlaku S.D. | Validity Period

Januari 2020 – Januari 2023

Perusahaan | Company

PT PPI Cabang Medan



Sertifikasi | Certification

SNI ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan)

PT PPI Cabang Medan

Pemberi Sertifikasi | Certifier

PT Sucofindo

Masa Berlaku S.D. | Validity Period

Januari 2020 – Januari 2023

Perusahaan | Company

PT PPI Cabang Medan



Sertifikasi | Certification

Scoring Sertifikasi CSMS di PT Patra Trading "Lolos High Risk"

Pemberi Sertifikasi | Certifier

PT Patra Trading

Masa Berlaku S.D. | Validity Period

April 2022 – April 2024

Perusahaan | Company

PT PPI



Sertifikasi | Certification

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
PP 50 Tahun 2012 Kategori Tingkat Awal 64 Kriteria

Pemberi Sertifikasi | Certifier

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Masa Berlaku S.D. | Validity Period

November 2022 – November 2025

Perusahaan | Company

PT PPI



Sertifikasi | Certification

SNI ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

Pemberi Sertifikasi | Certifier

PT Sucofindo

Masa Berlaku S.D. | Validity Period

Agustus 2020 – Agustus 2023

Perusahaan | Company

PT PPI



Kerjasama PPI dengan Mitra

PPI Cooperation with Business Partner

Sepanjang tahun 2022, PPI menjalin kerja sama kemitraan baik dengan sesama BUMN, Anak Perusahaan BUMN maupun mitra usaha lain yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Berikut adalah kerja sama yang telah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses penandatanganan, antara lain:

Throughout 2022, PPI established partnerships with other SOEs, SOE Subsidiaries and other business partners in the country and overseas. The following are agreements that have been signed or are in the process of being signed:

Kerja Sama Antar – BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Cooperation with Other State-Owned Enterprises and SOE Subsidiaries Overview			
No.	Nama Mitra Usaha Business Partner	Jenis Kerja Sama Type of Cooperation	Produk/Jasa Product/Service
1	PT Pertamina Retail	Kerjasama operasi Joint operation	SPBU Gas Station
2	PIHC – PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Pupuk Fertilizer
3	PT Indofarma Tbk	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Produk Obat Generik Generic Drug Product
4	PT Bio Farma	Kerjasama kedistributoran Distributorship cooperation	Vaksin Serum, Diagnostik Kit & Alat Kesehatan Serum Vaccines, Diagnostic Kit & Medical Devices
5	PT Petrokimia Gresik	Kerjasama Kedistributoran Pupuk Fertilizer Distributorship cooperation	Pupuk Fertilizer

Kerjasama BUMN dengan Mitra Usaha Lain (Swasta) Cooperation of SOEs with Other Business Partners (Private)			
No.	Nama Mitra Usaha Business Partner	Jenis Kerja Sama Type of Cooperation	Produk/Jasa Product/Service
1	PT Inti Everspring Indonesia	Produksi Production	Pestisida Pesticide
2	PT Widatra Bhakti	Distributor Distributor	Famasi Pharmacy
3	PT Satoria Pharma	Distributor Distributor	Famasi Pharmacy
4	Borochemie International Pte Ltd	Pemasok Supplier	Bahan Kimia Berbahaya Hazardous Chemicals
5	Unilever	Distributor Distributor	Produk Konsumsi Consumption Product



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

7 Januari 2022 | January 7, 2022



Penandatanganan Inbreng Holding Pangan **Signing of Food Holding Inbreng**

PPI secara resmi tergabung dalam Holding BUMN Pangan bersama Sang Hyang Seri, Perindo, Berdikari, Garam dan PT RNI sebagai Induk Holding BUMN. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan.

PPI is officially incorporated in the Food SOE Holding together with Sang Hyang Seri, Perindo, Berdikari, Salt and PT RNI as the Parent SOE Holding. This was marked by the signing of the Deed of Inbreng of Government Shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs.

12 Januari 2022 | January 12, 2022



Launching Holding BUMN Pangan, PPI Resmi Jadi Member ID Food Trading & Logistik

Launching SOE Food Holding, PPI is Officially a Member of ID Food Trading & Logistics

PPI resmi tergabung dalam Holding BUMN Pangan bersama Sang Hyang Seri, Perindo, Berdikari, Garam, dan RNI sebagai Induk Holding BUMN Pangan. Holding BUMN Pangan meluncurkan identitas baru dengan nama ID FOOD bersama Menteri BUMN RI Erick Thohir dan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi

PPI is officially incorporated in the Food SOE Holding together with Sang Hyang Seri, Perindo, Berdikari, Salt, and RNI as the Parent of the Food SOE Holding. Holding SOE Food launches a new identity under the name ID FOOD with Indonesian SOE Minister Erick Thohir and Indonesian Minister of Trade Muhammad Lutfi.



18 Januari 2022 | January 18, 2022



PPI Menjalin Kerja Sama Distribusi dan Pemasaran Produk Ritel dengan PT Perkebunan Nusantara 3

PPI Establishes Distribution and Marketing Cooperation for Retail Products with PT Perkebunan Nusantara 3

PTPN 3 akan menjadi pemasok produk dan PPI akan mendistribusikan produk tersebut ke *end user* masyarakat Indonesia.

PTPN 3 will be the product supplier and PPI will distribute the products to end users in Indonesia.

30 Januari 2022 | January 30, 2022



Pelepasan Ekspor Kopi PPI ke Mesir Perdana Tahun 2022 oleh Menteri Erick Tohir

Release of PPI Coffee Export to Egypt Inaugural in 2022 by Minister Erick Tohir

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan ekspor kopi perdana tahun 2022 sebanyak 130 ton ke Mesir, yang dilepas langsung oleh Menteri BUMN Erick Tohir di Lampung.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia carried out the first coffee export in 2022 as much as 130 tons to Egypt, which was released directly by SOE Minister Erick Tohir in Lampung.

15 Februari 2022 | February 15, 2022



Pengiriman Perdana Minyak Goreng ke Anggota Warteg Kharisma Bahari

First Delivery of Cooking Oil to Members of Warteg Kharisma Bahari

PPI melalui Warung Pangan melakukan pengiriman perdana minyak goreng kemasan sebanyak 5.256 liter untuk puluhan rumah makan warung tegal (warteg) Kharisma Bahari di Kawasan Jabodetabek.

PPI through Warung Pangan made the first delivery of 5,256 liters of packaged cooking oil for dozens of Kharisma Bahari street food stalls (warteg) in the Jabodetabek area.



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

9 **Maret 2022** | March 9, 2022



Lewati Target Penjualan Pupuk, PPI Member ID Food Diganjar Hadiah Mobil Operasional oleh Petrokimia Gresik

Passing Fertilizer Sales Target, PPI Member ID Food Rewarded with Operational Car by Petrokimia Gresik

PPI Member ID Food sebagai distributor Utama PT Petrokimia Gresik Jatim 3 meraih *reward* atas target kinerja penjualan tahun 2021 terhadap produk Pupuk Nonsubsidi (NPK Plus, Urea, ZA, Nitrat, Ningrat dan Nitalite) yang diberikan oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) berupa satu unit mobil Daihatsu Terrios di PPI Cabang Surabaya.

PPI Member ID Food as the main distributor of PT Petrokimia Gresik Jatim 3 received a reward for the 2021 sales performance target for Nonsubsidized Fertilizer products (NPK Plus, Urea, ZA, Nitrate, Ningrat and Nitalite) given by Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) in the form of a Daihatsu Terrios car at PPI Surabaya Branch.

9 **Maret 2022** | March 9, 2022



Menteri Perdagangan Tinjau Pendistribusian Minyak Goreng oleh PPI ke Pedagang Pasar Sekitar Jakarta

Minister of Trade Reviews Distribution of Cooking Oil by PPI to Market Traders Around Jakarta

Menteri Lutfi didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati, dan Direktur Komersial & Pengembangan PPI Andry Tanudjaja memantau pendistribusian minyak goreng yang dilakukan oleh PPI di Pasar Kebayoran Lama.

Minister Lutfi was accompanied by Head of the National Food Agency Arief Prasetyo Adi, Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade Oke Nurwan, Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade Indrasari Wisnu Wardhana, President Director of PPI Nina Sulistyowati, and Director of Commercial & Development of PPI Andry Tanudjaja monitored the distribution of cooking oil carried out by PPI at Kebayoran Lama Market.

23 **Maret 2022** | March 23, 2022



PPI Menjalinkan Kerja Sama dengan Kultur Kopi **PPI Collaborates with Kultur Kopi**

PT Kultur Kopi Indonesia akan masuk menjadi bagian ekosistem bisnis kopi dengan perannya dalam proses *grading* dan *roasting*. Proses pengolahan ini dimaksudkan untuk menambah nilai jual kopi Indonesia, serta upaya memenuhi permintaan pasar kopi Eropa.

PT Kultur Kopi Indonesia will enter the coffee business ecosystem with its role in the grading and roasting process. This processing is intended to increase the selling value of Indonesian coffee and meet the demands of the European coffee market.

25 **Maret 2022** | March 25, 2022



PPI Menerima penghargaan dalam kegiatan PR Indonesia Award (PRIA) 2022

PPI Received an award in the PR Indonesia Award (PRIA) 2022 activity

PPI mendapatkan Bronze Winner Public Relations Indonesia Awards 2022 Kategori BUMN sub Kategori Corporate PR pada puncak rangkaian The 7th PR Indonesia Awards (PRIA) 2022.

PPI received the Bronze Winner of the Public Relations Indonesia Awards 2022 BUMN Category sub Category Corporate PR at the culmination of the 7th PR Indonesia Awards (PRIA) 2022 series.

16 **April 2022** | April 16, 2022



PPI Lakukan Kunjungan Kerja ke Turki **PPI Conducts Working Visit to Turkey**

Pihak PPI bertemu dengan diaspora dan beberapa mitra kerja yakni Turk Barter International dan Borochemie sekaligus mengunjungi pabrik borax.

PPI met with the diaspora and several partners, namely Turk Barter International and Borochemie, as well as visiting the borax factory.



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

25 April 2022 | April 25, 2022



Laksanakan Gerakan Bersih (Memberi dan Mengasihi), PPI Salurkan Santunan untuk Anak Yatim dan Tenaga Pendukung

Carrying Out the Clean Movement (Giving and Loving), PPI Distributes Donations to Orphans and Support Personnel

PPI memberikan bantuan paket sembako untuk rekan-rekan pendukung di lingkungan Kantor Pusat maupun cabang PPI di seluruh Indonesia dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah.

PPI provides food packages for supporting colleagues in the Head Office environment and PPI branches throughout Indonesia, with the hope of helping to meet the needs ahead of Eid al-Fitr 1443 Hijri.

14 Mei 2022 | May 14, 2022



Wakil Menteri I BUMN Tinjau Mitra Warung Pangan PPI

First Deputy Minister of Soes Reviews PPI Food Stall Partners

Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N Mansury tinjau Mitra Warung Pangan PPI bersama Direksi PPI, ID Food dan Nusindo di Jakarta Timur. Peninjauan ini dititikberatkan pada ketersediaan stok dan harga minyak goreng sesuai HET pemerintah Rp14.000,- di pasar-pasar tradisional dan mitra-mitra Warung Pangan yang dijadikan pilot project distribusi minyak goreng curah di DKI.

Deputy Minister of SOE 1 Pahala N Mansury reviewed PPI's Warung Pangan Partners with the Directors of PPI, ID Food and Nusindo in East Jakarta. The review focused on the availability of stock and the price of cooking oil in accordance with the government's price ceiling of Rp14,000 in traditional markets and Warung Pangan partners who are used as a pilot project for bulk cooking oil distribution in DKI.



25 Mei 2022 | May 25, 2022



PPI Bantu Mitra UMKM melalui Program Bedah Warung Pangan

PPI Helps MSME Partners through Food Stall Surgery Program

Bedah Warung Mitra Warung Pangan ini menjadi program CSR PPI sebagai bentuk integrasi dengan ekosistem utama yang menghasilkan *creating shared terarah* sesuai road map perusahaan dan terukur dampak serta akuntabilitas.

Bedah Warung Mitra Warung Pangan is a PPI CSR program as a form of integration with the main ecosystem that results in creating shared direction according to the company's road map and measurable impact and accountability.

19 Juni 2022 | June 19, 2022



HUT PPI Ke-19 dan Soft Launching Produk Baru PPI

PPI 19th Anniversary and Soft Launching of PPI New Products

Dalam rangka HUT ke-19 dan komitmen PPI yang terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan portofolio produk pangan yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat, PPI mengadakan soft launching produk terbaru produk minyak goreng, beras, dan sabun pencuci piring.

In the framework of its 19th anniversary and PPI's commitment to continuously strive to realize national food security through the development of a portfolio of affordable and quality food products for the community, PPI held a soft launching of the latest cooking oil, rice, and dishwashing soap products.

22 Juni 2022 | June 22, 2022



PPI Mendapatkan Penghargaan Brands of the Year 2022 dalam Kegiatan Marketeers OMNI Brand of the Year

PPI Received the Brands of the Year 2022 Award at the Marketeers OMNI Brand of the Year Event.

PPI Member Of ID Food raih Marketeers Omni Brands of The Year 2022 untuk brand aplikasi Warung Pangan.

PPI Member Of ID Food wins Marketeers Omni Brands of The Year 2022 for Warung Pangan app brand.



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

22 Juni 2022 | June 22, 2022



PPI Menjalin Kerjasama Ekspor Beras ke Tiongkok, Arab Saudi dan Brunei Darussalam

PPI Establishes Rice Export Cooperation to China, Saudi Arabia and Brunei Darussalam

Dalam gelaran Hari Krida Pertanian Nasional 2022, PPI Member of ID Food turut ambil peran dalam rencana ekspor beras sebanyak 100.000 ton dan komoditas pertanian ke Tiongkok dan Brunei Darussalam di Sukoharjo.

During the 2022 National Agriculture Krida Day, PPI Member of ID Food took part in the plan to export 100,000 tons of rice and agricultural commodities to China and Brunei Darussalam in Sukoharjo.

11 Juli 2022 | July 11, 2022



PPI Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H/2022 M

PPI Carries Out Slaughtering of Sacrificial Animals on Eid Al-Adha 1443 H/2022 M

Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati menyerahkan secara simbolis kepada ketua DKM Masjid Al-Mubaarok PPI Wahyu Riyadi satu ekor hewan kurban kepada panitia penyembelihan hewan kurban yang dikoordinir oleh Binrohis PPI, dengan disaksikan oleh pejabat PPI lainnya.

PPI President Director Nina Sulistyowati symbolically handed over one sacrificial animal to the head of the DKM Al-Mubaarok PPI Mosque Wahyu Riyadi to the sacrificial animal slaughter committee coordinated by Binrohis PPI, witnessed by other PPI officials.

29 Juli 2022 | July 29, 2022



PPI Kembali Gandeng Bio Farma dalam Pemberian Vaksin Influenza.

PPI Again Collaborates with Bio Farma in Administering Influenza Vaccines.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menggandeng Bio Farma dalam pelaksanaan pemberian vaksin influenza untuk karyawan PPI, yang dilaksanakan di Graha PPI, Jakarta.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) collaborated with Bio Farma in the implementation of the influenza vaccine for PPI employees, which was held at Graha PPI, Jakarta.

19 Agustus 2022 | August 19, 2022



PPI Jogja Gelar Pelatihan Entrepreneur untuk UMKM. PPI Jogja Holds Entrepreneur Training for MSMEs.

PPI bersama Santripreneur Indonesia mengadakan pelatihan entrepreneur, yakni Pelatihan *Packaging Product* dalam rangka mendukung dan mengembangkan kemandirian UMKM Indonesia yang diikuti oleh 50 UMKM dari wilayah Jogja.

PPI together with Santripreneur Indonesia held entrepreneur training, namely Product Packaging Training in order to support and develop the independence of Indonesian MSMEs which was attended by 50 MSMEs from the Jogja area.

22 Agustus 2022 | August 22, 2022



PPI Palembang Menjadi Distributor Utama Retail Management PUSRI

PPI Palembang Becomes the Main Distributor of PUSRI Retail Management

PPI menjadi Distributor utama CCM yang merupakan program langsung dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Penandatanganan SPJB dan BJP Distributor Utama Provinsi Sumsel Retail Management Distributor Utama dilaksanakan oleh Branch Manager PPI Palembang

PPI became the main distributor of CCM which is a direct program from PT Pupuk Indonesia (Persero). The signing of SPJB and BJP Main Distributor of South Sumatra Province Retail Management Main Distributor was carried out by PPI Palembang Branch Manager.

24 Agustus 2022 | August 24, 2022



Sinergi Warung Pangan PPI & Nasabah Mekaar, Giatkan Inklusivitas UMKM

Synergy between PPI Food Stalls & Mekaar Customers, Promoting MSME Inclusiveness

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia member of ID Food (PPI) melakukan transformasi sinergi pengembangan Program Warung Pangan kepada nasabah Mekaar PT Permodalan Nasional Madani di Jakarta.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, a member of ID Food (PPI), transformed the synergy of developing the Warung Pangan Program to PT Permodalan Nasional Madani's Mekaar customers in Jakarta.



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

29 Agustus 2022 | August 29, 2022



PPI Laksanakan Kick Off Meeting Implementasi SMK3

PPI Holds SMK3 Implementation Kick Off Meeting

PPI melaksanakan Kick Off Meeting Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan PPI bersama PT Jeap Karya Asih yang diselenggarakan offline dan online yang dihadiri oleh insan PPI.

PPI held a Kick Off Meeting for the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in the PPI environment with PT Jeap Karya Asih which was held offline and online which was attended by PPI people.

30 Agustus 2022 | August 30, 2022



PPI Kembali Serap Panen Livebird di Jawa Barat.

PPI Reabsorbs Livebird Harvest in West Java.

PPI melakukan serapan produk livebird (ayam hidup) dari peternak, lalu melakukan proses pemotongan dengan mitra RPH yang telah tersertifikasi halal, NKV, dan COA. Setelah itu PPI melakukan proses penyimpanan dan pendistribusian dengan SOP yang tepat. Penjualan produk segar dan beku dalam bentuk karkas, boneless dan produk sampingan sesuai permintaan.

PPI absorbs livebird products (live chickens) from farmers, then carries out the slaughtering process with slaughterhouse partners that have been certified halal, NKV, and COA. Afterward, PPI carries out the storage and distribution process with the right SOP. Sales of fresh and frozen products in the form of carcasses, boneless, and by-products on demand.

2 September 2022 | September 2, 2022



PPI Salurkan Bantuan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ke Sekolah di Sulawesi Tengah.

PPI Distributes Information and Communication Technology Equipment to Schools in Central Sulawesi.

PPI Distributes Information and Communication Technology Equipment to Schools in Central Sulawesi.

PPI menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada bidang Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK berupa peralatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu PC desktop, proyektor, dan printer ke SMPN 30 Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

PPI distributed TJSL in the fields of Education, Environment and MSE Development in the form of information and communication technology equipment, namely desktop PCs, projectors, and printers to SMPN 30 Sigi Regency, Central Sulawesi.

3 September 2022 | September 3, 2022



PPI Berpartisipasi dalam Pameran Pasar Kopi di Eropa.

PPI Participates in Coffee Market Exhibition in Europe.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berpartisipasi dalam pameran Pasar Kopi yang digelar Roemah Indonesia BV dan Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara, di Posthoornkerk, Amsterdam, Belanda. Di dalam rangkaian kegiatan di Amsterdam, PPI juga melaksanakan penandatanganan MoU dengan ESRO Food Group B.V. dan Amirage International B.V. ihwal ekspor dan impor produk dan atau komoditi untuk pemenuhan kebutuhan di Eropa.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia participated in the Coffee Market exhibition held by Roemah Indonesia B.V. and the Nusantara Coffee Project Management Office (PMO), in Posthoornkerk, Amsterdam, the Netherlands. In a series of activities in Amsterdam, PPI also signed an MoU with ESRO Food Group B.V. and Amirage International B.V. regarding the export and import of products and/or commodities to fulfill needs in Europe.

4 September 2022 | September 4, 2022



Kunjungan ke Pelanggan dalam Rangka Hari Pelanggan Nasional

Visiting Customers on the Occasion of National Customer Day

Pada peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun ini, PPI hadir dan menyapa pelanggan secara langsung di beberapa lokasi sebagai perwujudan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan.

On this year's National Customer Day commemoration, PPI was present and greeted customers directly in several locations as a manifestation of gratitude for the trust given by customers.



Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

5 September 2022 | September 5, 2022



PPI Gandeng PITC untuk Jajaki Pasar Filipina.

PPI Partners with PITC to Explore Philippine Market.

PPI bersama Philippine International Trading Corporation (PITC) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding kerja sama ihwal perdagangan produk dan/atau komoditi. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Nina Sulistyowati selaku Direktur Utama PPI dan Emmie Liza Perez-Chiong, DMD selaku President & CEO PITC, di Fairmont Hotel, Jakarta.

PPI and the Philippine International Trading Corporation (PITC) signed a Memorandum of Understanding of cooperation regarding trade in products and/or commodities. The signing was represented by Nina Sulistyowati as President Director of PPI and Emmie Liza Perez-Chiong, DMD as President & CEO of PITC, at Fairmont Hotel, Jakarta.

9 September 2022 | September 9, 2022



Penerapan ERP pada Second Wave Transformasi Trading Logistics Terdigitalisasi PPI Group.

ERP Implementation in PPI Group's Second Wave of Digitalized Trading Logistics Transformation.

Penerapan ERP merupakan wujud implementasi kepemimpinan teknologi dan juga sebagai implementasi penerapan prinsip GCG (Good Corporate Governance) di perusahaan. PPI secara bertahap telah melakukan verifikasi data pencatatan antara data manual (WSLK) yang sudah ter-entry di ERP D365 oleh seluruh Cabang PPI. Hal tersebut juga dilakukan berkenaan dengan rencana PPI untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Tutup Buku Tahun 2022 dengan full implementasi ERP D365.

ERP implementation is a form of technology leadership implementation and also an implementation of the implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles in the company. PPI has gradually verified the recording data between manual data (WSLK) that has been entered in ERP D365 by all PPI Branches. This is also done in connection with PPI's plan to conduct a Financial Statement Audit and Close Book in 2022 with the full implementation of ERP D365.

6 September 2022 | September 6, 2022



Warung Pangan PPI Ikuti *Business Matching* dan Pameran Produk Hebitren.

PPI through Warung Pangan has participate in Business Matching and Hebitren exhibition.

PPI melalui Warung Pangan juga menjalin kerja sama dengan Hebitren untuk suplai barang kebutuhan pesantren, salah satunya seperti yang telah tersedia di WP Mart Pondok Pesantren Minhajurrosyidiin, Jakarta Timur.

PPI through Warung Pangan also collaborates with Hebitren to supply goods for pesantren needs, one of which is available at WP Mart Pondok Pesantren Minhajurrosyidiin, East Jakarta.

20 September 2022 | September 20, 2022



PPI Helat Demspray, Penyuluhan Budidaya Padi, dan Serahkan Bantuan Pertanian untuk Petani Malang.

PPI Holds Demspray, Rice Cultivation Counseling, and Donates Agricultural Aid to Malang Farmers.

PPI menyelenggarakan demo spray Dharmabas untuk mengendalikan hama di lahan padi sekaligus menyerahkan bantuan alat pertanian di Desa Ngenep, Kecamatan Karang Ploso, Malang, Jawa Timur. PPI juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani tentang Budidaya Tanaman Padi dan Perlindungan Tanaman dari Organisme Pengganggu Tanaman. Dalam kegiatan tersebut juga, PPI memberikan TJSL berupa alat pertanian kepada Kelompok Tani Sri Mulyo Kecamatan Karang Ploso.

PPI held a demo of Dharmabas spray to control pests in rice fields as well as handing over agricultural equipment assistance, in Ngenep Village, Karang Ploso District, Malang, East Java. PPI also provided socialization and education to farmers about Rice Cultivation and Plant Protection from Plant Disturbing Organisms. In this activity, PPI also provided TJSL in the form of agricultural tools to the Sri Mulyo Farmer Group, Karang Ploso District.

19 Oktober 2022 | October 19, 2022



PPI Mengikuti Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 di ICE BSD

PPI Participates in the Organization of Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 at ICE BSD.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Member of ID Food (PPI) berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 yang berlangsung pada 19 Oktober - 23 Oktober 2022, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. PPI juga melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama pihak Mesir ihwal ekspor kopi ke Pasar Mesir.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Member of ID Food (PPI) participated in Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 which took place on October 19 - October 23, 2022, at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. PPI also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Egyptian side regarding coffee exports to the Egyptian Market.





Peristiwa Penting 2022

2022 Significant Event

30 November 2022 | November 30, 2022



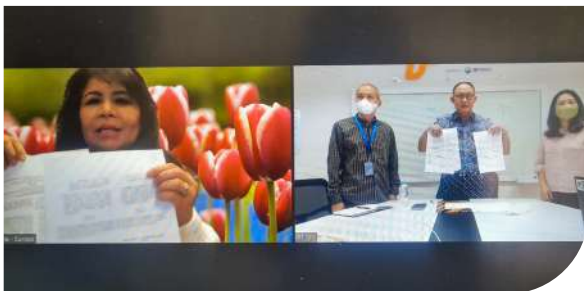
PPI dan Starbucks Jalin Kolaborasi Strategis, Wujudkan Gerai Pertama di Tegal.

PPI and Starbucks Establish Strategic Collaboration, Realize First Outlet in Tegal.

PPI diwakili oleh Divisi Manajemen Aset menghadiri *grand opening* gerai Starbucks pertama di kota Tegal. Gerai Starbucks tersebut menggunakan aset milik PPI yang berlokasi di Jl. AR Hakim No.124 Tegal. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal baik secara bisnis perusahaan maupun eksternal.

PPI represented by Asset Management Division attended the grand opening of the first Starbucks outlet in Tegal city. The Starbucks outlet uses PPI's assets located at Jl. AR Hakim No.124 Tegal. This cooperation is expected to be able to make an optimal contribution both in the company's business and externally.

6 Desember 2022 | December 6, 2022



Perluas Jaringan Internasional, PPI Gandeng KQ1000 Ihwal Representative Office di Belanda.

Expanding International Network, PPI Collaborates with KQ1000 Ihwal Representative Office in the Netherlands.

PPI dan KQ1000 menandatangani nota kesepahaman perihal ekspor dan impor produk dan/atau komoditi secara virtual. Kerja sama dibuat sebagai langkah awal dalam menjajaki pasar masing-masing negara dengan menyiapkan produk/komoditi yang berluang untuk diekspor maupun diimpor.

PPI and KQ1000 signed a memorandum of understanding regarding the virtual export and import of products and/or commodities. The cooperation was made as a first step in exploring each country's market by preparing products/commodities that have the opportunity to be exported and imported.

15 Desember 2022 | December 15, 2022



PPI Kembali Gelar Demspray, Penyuluhan Budidaya Padi, dan Serahkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian untuk Petani Demak.

PPI Holds Demspray, Rice Cultivation Counseling, and Donates Agricultural Production Facilities for Demak Farmers.

PPI menyelenggarakan demo spray untuk mengendalikan hama di lahan padi sekaligus menyerahkan bantuan alat pertanian dan pestisida merek Dharmabas 500 EC dan Dharmafur 3 GR di Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Selain pengendalian hama, PPI juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Kelompok Tani Marganing Tani, Tengahing Ambangun, Tani Sejati, dan Kalining Sejati. Keempat Kelompok ini tergabung dalam Gapoktan Tani Mulyo.

PPI held a spray demo to control pests in rice fields as well as handing over agricultural tools and pesticide assistance for the Dharmabas 500 EC and Dharmafur 3 GR brands, in Kalitengah Village, Mranggen District, Demak, Central Java. In addition to pest control, PPI also provides socialization and education to the Marganing Tani, Tengahing Ambangun, Tani Sejati, and Kalining Sejati Farmer Groups. These four groups are members of Gapoktan Tani Mulyo.

31 Desember 2022 | December 30, 2022



PPI dan Razeedland Agrotech Brunei Jajaki Kerja Sama.

PPI and Razeedland Agrotech Brunei Explore Cooperation.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan dilanjutkan dengan courtesy meeting dengan Razeedland Agrotech (B) SDN BHD Brunei Darussalam mengenai ekspor dan impor produk komoditi. Dalam penandatanganan tersebut, PPI diwakili oleh Nina Sulistyowati selaku Direktur Utama dan Razeedland Agrotech diwakili oleh Pengiran Razeed Petra Al Haj selaku Group Chairman Razeedland Agrotech.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) and continued with a courtesy meeting with Razeedland Agrotech (B) SDN BHD Brunei Darussalam regarding the export and import of commodity products. At the signing, PPI was represented by Nina Sulistyowati as President Director, and Razeedland Agrotech was represented by Pengiran Razeed Petra Al Haj as Group Chairman of Razeedland Agrotech.

2

Laporan Manajemen

Management Report

Menyajikan informasi mengenai laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi mencakup penerapan Tata Kelola Perusahaan, hasil usaha, kinerja keuangan, pemetaan terhadap tantangan, kendala dan prospek usaha.

Presenting information on the report of monitoring by the Board of Commissioners and the Directors including implementation of corporate governance, the operations results, financial performance, mapping on the challenges, constraints and prospects.



PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD





Laporan Dewan Komisaris

Report Of The Board Of Commissioners



Bara Krishna Hasibuan

Komisaris Utama

President Commissioner

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Stakeholders,

Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah. Sepanjang tahun 2022 yang penuh dengan tantangan, PT PPI telah berhasil meningkatkan performanya secara signifikan. Pada kesempatan ini, kami atas nama Dewan Komisaris, dengan penuh kebanggaan mempersembahkan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan selama tahun buku 2022.

With all humility, we express our gratitude to God Almighty for His abundant blessings and grace. Throughout the challenging year of 2022, PT PPI has managed to significantly improve its performance. On this occasion, we, on behalf of the Board of Commissioners, proudly present the Board of Commissioners' supervisory report on the Company's performance during fiscal year 2022.



Penilaian atas Kinerja Direksi

Pada 2022, Direksi telah menentukan strategi khususnya untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka mengembalikan/ memulihkan ekonomi nasional sekaligus mensukseskan terwujudnya transformasi Holding Pangan.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengevaluasi kinerja Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan dengan baik. Serangkaian strategi yang telah dipersiapkan dan dilaksanakan secara efektif tercermin dalam prestasi keuangan dan operasional yang berhasil dicapai oleh Perseroan.

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tugas dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan arahan dari Pemegang Saham.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dalam menghadapi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan meningkat pada tahun 2023, Dewan Komisaris dengan keyakinan penuh menilai bahwa rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi untuk masa depan akan membawa prospek bisnis yang cerah bagi perusahaan.

Penggabungan PT BGR ke dalam PT PPI merupakan sinergi strategis yang dinilai memiliki potensi besar dalam menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi BUMN Holding Pangan yang menargetkan untuk menjadi perusahaan produksi pangan terbaik di tingkat nasional pada tahun 2024, serta menjadi eksportir terkemuka makanan premium. Selain itu, BUMN Holding Pangan juga memiliki misi untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan berkualitas tinggi, serta meningkatkan kapasitas negara dalam memproduksi pangan berkualitas dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Performance Assessment of the Board of Directors

In 2022, the Board of Directors has determined a specific strategy to support the Government Program in order to restore the national economy as well as the successful realization of the Food Holding transformation.

Throughout 2022, the Board of Commissioners has evaluated the performance of the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities in managing the Company well. A series of strategies that have been prepared and implemented effectively are reflected in the financial and operational achievements made by the Company.

The performance assessment of the Board of Directors is based on the achievement of performance targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the duties and obligations set out in the prevailing laws and regulations, as well as the provisions of the Company's Articles of Association and the direction of the Shareholders.

Views on Business Prospect

In the face of Indonesia's economic growth prospects which are expected to increase in 2023, the Board of Commissioners with full confidence assesses that the work plan that has been prepared by the Board of Directors for the future will bring bright business prospects for the company.

The merger of PT BGR into PT PPI is a strategic synergy that is considered to have great potential in generating long-term benefits for the community. This is in line with the vision of the Food Holding SOE which targets to become the best food production company at the national level by 2024, as well as a leading exporter of premium food. In addition, BUMN Holding Pangan also has a mission to make Indonesia self-sufficient in food, increase public awareness of high-quality food consumption, and increase the country's capacity to produce quality food on a large scale to meet domestic and foreign needs.



Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sebuah keniscayaan yang menjadi pedoman bagi PPI dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis, PPI diharapkan untuk melakukan pengelolaan bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata tetapi juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PPI telah dilengkapi dengan perangkat GCG yang diinternalisasikan kepada seluruh insan PPI. Dalam penerapannya, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas pada kegiatan bisnis perusahaan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengawasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk komitmen PPI dalam pembangunan yang berkelanjutan. Program TJSL dijalankan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan dalam memberikan manfaat pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum serta tata kelola.

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh BUMN dipandang sebagai upaya yang strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan dilakukan dengan berpegang pada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan program TJSL BUMN yang terukur, berdampak dan berkelanjutan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terkait.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melakukan evaluasi terhadap praktik Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan, yang dilakukan melalui assessment dengan metode dan prosedur yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK-16/S.MBU tanggal 6 Juni 2012, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Miliki Negara.

Asesmen dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 30 hari sejak tanggal 1 Februari 2023 dan berhasil mencapai skor 76,15 dari 100, yang menempatkannya pada kategori predikat Baik. Perseroan yakin bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang lebih baik di masa depan.

Views on Good Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a necessity that guides PPI in carrying out its business activities. In the face of increasingly fierce competition in the business world, PPI is expected to carry out business management that is not only focused on profit alone, but also management that is trustworthy, transparent and accountable.

To realize this, PPI has been equipped with GCG tools that are internalized to all PPI people. In its application, the Board of Commissioners acts as a supervisor of the company's business activities carried out with GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

In addition, the Board of Commissioners also oversees the Social and Environmental Responsibility (CSR) program as a form of PPI's commitment to sustainable development. The TJSL program is carried out with principles that are integrated, directed, and measurable in impact, and can be accounted for. This is part of the company's business approach in providing benefits in economic, social, environmental, and legal aspects as well as governance.

The implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (CSR) by SOEs is seen as a strategic effort in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is carried out by adhering to ISO 26000 as a guide for program implementation. The Company believes that the implementation of measurable, impactful and sustainable SOE CSR programs will provide significant benefits for all parties involved.

Throughout 2022, the Company evaluated the Corporate Governance practices implemented, which was carried out through an assessment with methods and procedures in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs number SK-16/S.MBU dated June 6, 2012, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The assessment was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for 30 days from February 1, 2023 and managed to achieve a score of 76.15 out of 100, which placed it in the Good predicate category. The Company is confident that the results of this evaluation will serve as motivation to continue improving its.



Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2022, there have been changes in the composition of the Board of Commissioners as follows:

Dewan Komisaris Board Of Commissioners			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Training Organizer
Periode per 02 Desember 2021 - 22 Desember 2022 Period as of December 02, 2021 - December 22, 2022			
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 No. SK-93/MBU/03/2021 dated March 19, 2021	November 2020 - Desember 2022 November 2020 - December 2022
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 No. SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021	Desember 2021 - Sekarang December 2021 - Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 - Sekarang April 2020 - Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 - Sekarang April 2020 - Present
Periode per 22 Desember 2022 - sekarang Period as of December 22, 2022 - Present			
Bara Krishna Hasibuan	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-291/MBU/XII/2022 dan No.105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 No. SK-291/MBU/XII/2022 SK-291/MBU/XII/2022 and No. 105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022 dated December 22, 2022.	Desember 2022 - Sekarang December 2022 - Present



Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No. SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 No. SK-385/MBU/12/2021 dated De- cember 02, 2021	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present

Apresiasi

Dewan Komisaris dengan penuh hormat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas kepemimpinan dan kebijaksanaannya dalam menetapkan strategi bisnis perseroan. Tak lupa, rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang mereka tunjukkan sehingga PPI dapat mencapai kinerja pada tahun ini.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Pemangku Kepentingan: pelanggan, mitra bisnis, dan semua pihak yang terkait atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PPI sepanjang tahun ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Appreciation

The Board of Commissioners respectfully expresses its highest appreciation to the Board of Directors for its leadership and wisdom in setting the company's business strategy. In addition, sincere gratitude is extended to the management and all employees for their dedication and hard work that enabled PPI to achieve its performance this year.

We would also like to express our deepest gratitude to all Stakeholders: customers, business partners, and all related parties for the support and trust given to PPI throughout the year. May God Almighty always bestow His grace upon us all.





Laporan Direksi

Report Of The Board Of Directors

“Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sehingga Perseroan mampu mempertahankan, menyediakan dan melayani kepentingan pelanggan, karyawan dan stakeholder lainnya.”

“The Company is committed to constantly improving the corporate values to the shareholders and other stakeholders, to allow us maintain, provide, and serve the interests of the customers, employees, and other stakeholders.”



Nina Sulistyowati

Direktur Utama
President Director

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Stakeholders,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi dapat menyampaikan Laporan Tahunan 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola Perseroan selama satu periode tahun buku.

Praise and gratitude to the Almighty God, on this occasion we on behalf of the Board of Directors can submit the 2022 Annual Report as a form of our accountability to the Shareholders and all stakeholders in managing the Company during one period of the financial year.



Di tengah ketatnya persaingan industri bisnis modern saat ini, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sehingga perusahaan akan terus mempertahankan, menyediakan dan melayani kepentingan pelanggan, karyawan, dan *stakeholder* lainnya.

Direksi yang didukung Dewan Komisaris senantiasa memotivasi semua jajaran perusahaan untuk bekerja keras dalam mencapai target-target perusahaan. Guna mencapai visi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Terkemuka, perseroan senantiasa berpegang pada tema dari Holding Pangan pada tahun lalu dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020 – 2024.

In the midst of intense competition in today's modern business industry, the Company is committed to always increasing the value of the company to shareholders and other stakeholders so that the company will continue to maintain, provide and serve the interests of customers, employees, and other stakeholders.

The Board of Directors, supported by the Board of Commissioners, constantly motivates all levels of the company to work hard in achieving the company's targets. In order to achieve PT Perusahaan Perdagangan Indonesia's vision to become a Trusted and Leading World Class National Trading Company, the company always adheres to the theme of the Food Holding last year and the Company's Long Term Plan 2020 - 2024.

Kinerja PPI Tahun 2022

PPI's Performance in 2022

Kebijakan Strategis

Sejak tahun lalu, PT PPI berada pada Fase Penguatan sebagai bagian dari langkah perusahaan dalam jangka Panjang untuk menjadi "Flagship Trading Company of Indonesia" yang mendukung 5 formulasi prioritas Kementerian BUMN dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada Tahun 2022, PPI terus fokus pada bisnis perdagangan produk-produk yang memiliki kontribusi laba lebih besar dan tidak melakukan akselerasi bisnis yang terlalu signifikan melalui program kerja yang bertitik tolak dari 3 (tiga) pilar utama yaitu:

- Pendalaman pangsa pasar terhadap produk-produk Pangan eksisting, yaitu produk Pupuk dan Pestisida, produk konsumsi dan bahan pokok serta produk-produk Non-Pangan meliputi produk Bahan Kimia Berbahaya dan produk Farmasi serta Alat Kesehatan;
- Melakukan integrasi, konsolidasi Proses Bisnis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
- Melakukan transformasi aspek Keuangan serta Sumber Daya Manusia berdasarkan *core value* AKHLAK.

Strategic Policy

Since last year, PT PPI has been in the Strengthening Phase as part of the company's long-term steps to become the "Flagship Trading Company of Indonesia" which supports the 5 priority formulations of the Ministry of SOEs in supporting the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) which aims to realize an independent, advanced, just and prosperous Indonesian society through accelerated development in various fields by emphasizing the building of a solid economic structure based on competitive advantages in various regions supported by quality and competitive human resources.

In 2022, PPI continues to focus on the business of trading products that have a greater profit contribution and does not accelerate the business too significantly through a work program that starts from 3 (three) main pillars, namely:

- Deepening market share of existing Food products, namely Fertilizer and Pesticide products, consumer products and staples as well as Non-Food products including Hazardous Chemical products and Pharmaceutical products and Medical Devices;
- Integration, consolidation of Business Processes by utilizing Information Technology;
- Transforming the Financial aspects and Human Resources based on the core value of AKHLAK.



Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan yang Ditargetkan

Aset PPI tahun 2022 tercatat sebesar Rp4,56 triliun, terealisasi 105,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4,35 triliun. Jumlah tersebut juga tumbuh jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,95% dari Rp4,41 triliun. Sementara nilai ekuitas pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,84 triliun terealisasi 107,98% dari target yang telah ditetapkan yang sebesar Rp2,63 triliun. Dibandingkan dengan ekuitas tahun 2021, jumlah tersebut tumbuh 1,73%.

Pendapatan PPI tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,37 triliun atau tercapai 79,27% dari target yang sebesar Rp2,99 triliun. Namun, pendapatan PPI tumbuh jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 22,11%. Laba bersih tahun 2022 dibukukan sebesar Rp49,09 miliar atau tercapai 72,15% dari target yang sebesar Rp68,04 miliar. Meski demikian jumlah laba bersih tahun 2022 tumbuh 133,79% dibandingkan dengan tahun 2021 di mana Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp145,30 miliar.

Kendala yang dihadapi

Di tahun 2022, PPI masih menghadapi banyak tantangan yang belum dapat di selesaikan pada periode sebelumnya dan saat ini PPI masih terus berproses dalam menyusun strategi untuk mengatasinya, di antaranya: faktor ekonomi global yaitu meningkatnya harga gas dunia dan berdampak perang Rusia dan Ukraina berimplikasi terhadap peningkatan harga energi dan disrupsi rantai pasok global yang memengaruhi bisnis pupuk, pestisida, ekspor, dan bahan kimia.

Sebagian dari pengajuan Surat Persetujuan Impor tahun 2022 masih dalam proses di Kemenperin dan Kemendag. Perubahan Permendag No. 47 Tahun 2019 menjadi No. 07 Tahun 2022 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada bulan Februari 2022 yang mengubah skema pendistribusian Bahan Berbahaya. Selain itu, pemanfaatan jasa PT BLI di anggota holding pangan juga belum optimal, serta berbagai kendala lainnya.

Meski demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk mengatasi setiap kendala yang muncul dengan cara yang terbaik dan diharapkan setiap kendala yang dihadapi dapat segera teratasi dan Perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang dalam pasar yang semakin kompetitif.

Comparison between Achieved and Targeted Results

PPI's assets in 2022 were recorded at IDR 4.56 trillion, realized 105.45% of the predetermined target of IDR 4.35 trillion. This amount also grew when compared to 2021 by 3.95% from IDR 4.41 trillion. Meanwhile, the equity value in 2022 was recorded at IDR 2.84 trillion, realized 107.98% of the predetermined target of IDR 2.63 trillion. Compared to equity in 2021, this amount grew by 1.73%.

PPI's revenue in 2022 was recorded at IDR2.37 trillion or 79.27% of the target of IDR2.99 trillion. However, PPI's revenue grew when compared to 2021 by 22.11%. Net profit in 2022 was recorded at IDR 49.09 billion or 72.15% of the target of IDR 68.04 billion. However, the total net profit in 2022 grew 133.79% compared to 2021 where the Company posted a net loss of IDR145.30 billion.

Obstacles encountered

In 2022, PPI still faces many challenges that have not been resolved in the previous period and currently PPI is still in the process of developing strategies to overcome them, including: global economic factors, namely increasing world gas prices and the impact of the war in Russia and Ukraine which has implications for increasing energy prices and global supply chain disruptions that affect the fertilizer, pesticide, export and chemical businesses.

Some of the 2022 Import Approval Letter applications are still in process at the Ministry of Industry and Ministry of Trade. The amendment of MOT Regulation No. 47/2019 to No. 07/2022 and effective since its promulgation in February 2022 which changes the distribution scheme of Hazardous Materials. In addition, the utilization of PT BLI's services in food cluster members has not been optimal, as well as various other obstacles.

Nevertheless, the Company remains committed to overcoming any obstacles that arise in the best possible way and it is hoped that any obstacles faced can be resolved immediately and the Company can continue to grow and develop in an increasingly competitive market.



Prospek Usaha PPI

Meskipun ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat, Indonesia diprediksi sebagai negara yang mampu tumbuh kuat. Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh di angka 5,0%. Hal ini didorong oleh penguatan dari sisi produksi maupun konsumsi. PPI secara optimis dapat memegang peranan penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia dan menggerakkan roda perdagangan nasional saat ini dan di masa yang akan datang.

PPI akan melakukan peningkatan bisnis perdagangan ke tingkat internasional melalui inovasi pembukaan *Representative Office* (RO) di Australia. Jumlah RO di tingkat internasional tercatat 3 kantor perwakilan di mancanegara yaitu di Belanda, Dubai, dan Australia. PPI akan terus melakukan ekspor produk berkualitas global sebagai strategic initiative PPI.

PPI terus bertransformasi sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan umum dan khususnya program produk secara komersial dan terukur. Dengan meningkatkan kepiawaian dalam bertransaksi antarlintas negara dan menjalin kemitraan dengan memberikan layanan terintegrasi yang sejalan dengan High Level Roadmap yang dilakukan mulai tahun 2022.

Adanya penggabungan PPI dan BGR Logistics juga turut meningkatkan efisiensi logistik pangan di Indonesia, mengurangi food loss pada rantai produsen, meningkatkan penetrasi bisnis *trading* dan logistik hingga peningkatan pada keterjangkauan pembelian produksi nelayan dan petani hingga ke daerah pelosok di Indonesia dengan mengutamakan mutu dan kualitas produk pangan.

Penerapan Pratik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perseroan terus dilakukan dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG. Hasil asesmen penerapan GCG tahun buku 2022 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil mencapai skor 76,15 dari 100 dan termasuk dalam kategori predikat baik.

Seluruh insan PPI menyatakan kesungguhan dan komitmen kuat untuk selalu mengedepankan standar etika tertinggi dalam membangun relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut tercantum dalam Pakta Integritas yang setiap awal tahun wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

PPI's Business Prospects

Although the global economy is expected to slow down in 2023, Indonesia is predicted to be a country that is able to grow strongly. Based on the International Monetary Fund (IMF) report, Indonesia's economy is predicted to grow at 5.0%. This is driven by the strengthening of both production and consumption. PPI is optimistic that it can play an important role in growing the Indonesian economy and driving the wheels of national trade now and in the future.

PPI will increase its trade business to the international level through the innovation of opening a Representative Office (RO) in Australia. The number of ROs at the international level is recorded at 3 representative offices in foreign countries, namely in the Netherlands, Dubai and Australia. PPI will continue to export global quality products as PPI's strategic initiative.

PPI continues to transform as a company that conducts general trading and especially product programs in a commercial and measurable manner. By increasing expertise in cross-border transactions and establishing partnerships by providing integrated services in line with the High-Level Roadmap carried out starting in 2022.

The merger of PPI and BGR Logistics also helped increase the efficiency of food logistics in Indonesia, reduce food loss in the producer chain, increase the penetration of the trading and logistics business to increase the affordability of purchasing fishermen and farmers' production to remote areas in Indonesia by prioritizing the quality and quality of food products.

Implementation of Good Corporate Governance Practices

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company continues with various efforts aimed at improving the quality of GCG implementation. The results of the assessment of the implementation of GCG for the fiscal year 2022 conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) managed to achieve a score of 76.15 out of 100 and included in the good predicate category.

All PPI people express their seriousness and strong commitment to always prioritize the highest ethical standards in building relationships with various parties, both internal and external. This commitment is stated in the Integrity Pact which at the beginning of each year must be signed by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees.



Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2022

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan komposisi Direksi PPI, kami berharap dengan komposisi Direksi saat ini yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, kompetensi dan pengalaman yang tepat, dapat terus membawa PPI untuk berkinerja dan berkontribusi yang positif pada tahun berikutnya.

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2022

In 2022 there will be no change in the composition of the PPI Board of Directors, we hope that with the current composition of the Board of Directors consisting of various scientific backgrounds, competencies and appropriate experience, it can continue to bring PPI to perform and contribute positively in the following year.

Direksi Board of Directors			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	No: SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 No. SK- 92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No. SK-221/MBU/07/2021	Juli 2021 – Sekarang July 2021 – Present
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No. SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 No. SK- 92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No. SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 April 2020 No. SK-381/MBU/12/2021 dated April 2, 2020	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present

Apresiasi

Atas nama Direksi, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan, serta para pemasok, mitra, dan kolaborator atas kerja sama dan dukungannya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusinya kepada Perseroan sehingga pada tahun 2022 ini dapat meraih kinerja yang optimal. Kami berharap Perusahaan dapat memberikan kinerja terbaik secara berkesinambungan di masa yang akan datang guna mempertahankan bahkan meningkatkan posisi Perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Appreciation

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude and appreciation to the Shareholders for their trust and support, to the Board of Commissioners for their continued direction and guidance, and to our suppliers, partners and collaborators for their cooperation and support.

We would also like to thank all employees for their hard work, dedication, and contribution to the Company so that in 2022 we can achieve optimal performance. We hope that the Company can provide the best performance continuously in the future to maintain and even improve the Company's position in the midst of increasingly fierce competition.



Surat Pernyataan Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2022

Statement Letter of Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2022

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the year 2022 has been contained in full, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, 15 Juni 2023 | 15 June 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Bara Krishna Hasibuan

Komisaris Utama | President Commissioner

Setiawan Wangsaatmaja

Komisaris
Commissioner

Hamli

Komisaris | Commissioner

Muhammad Kapitra Ampera

Komisaris | Commissioner

Direksi Board of Directors

Nina Sulistyowati

Direktur Utama | President Director

Wien Irwanto

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum
Director of Finance, Risk Management,
HC & General Affairs

Andry Tanudjaja

Direktur Komersial & Pengembangan
Director of Commercial & Development

Tri Wahyundo Hariyatno

Direktur Operasi | Director of Operations



3

Profil Perusahaan

Company Profile





PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD





Identitas Perseroan | Corporate Identity



Nama Perusahaan

Company Name
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia



Alamat Kantor | Office Address

Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp: (021) 3862141 - Fax.: (021) 3862143

Domisili Usaha | Business Domicile

Jakarta, Indonesia

Website

www.ptppi.co.id



Dasar Hukum Pendirian Usaha

Legal Basis for Business Establishment

- Akta Pendirian 03 04 tanggal 9 Juni 2003
Deed of Establishment 03 04 dated June 9, 2003
- Akta Anggaran Dasar Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2008
Deed of Association Number 33 dated August 29, 2008
- Akta Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2021
Deed of Merger of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) Number 5 dated December 2, 2021
- Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 07 Januari 2022
Amendment to Articles of Association Number 2 dated January 07, 2022



Jaringan Kantor | Office Network

- Kantor Pusat PT PPI (Persero) di Jakarta Pusat
Head Office of PT PPI (Persero) in Jakarta Pusat
Kantor Cabang PT PPI (Persero) 32 Unit
32 units of Branch Offices of PT PPI (Persero)
- Trading House di Kantor Pusat
Trading House at the Head Office
- Representative Office di Australia, Dubai, dan Belanda
Representative Office in Australia, Dubai, and Netherlands

Jumlah Karyawan | Number of Employees

1.460 Karyawan di tahun 2022

1.437 Karyawan di tahun 2021

449 Karyawan di tahun 2020

Nama Singkat

Short Name
PPI

Tanggal Berdiri

Date of Establishment
19 Juni 2003 | June 19, 2003

Email

ppi.info@ptppi.co.id

Media Sosial | Social Media

Twitter : @PPITradelogs

Instagram : PPITradelogs

Youtube : PPITradelogs

Tiktok : PPITradelogs

Facebook : PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Bidang Usaha | Line of Business

Perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional
Domestic and international trade

Ruang Lingkup Usaha | Scope of Business

Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang.

Export, import, inter-island activities, local trade, distribution, representation and agency, retail, and procurement of goods.



Modal Dasar | Basic Capital

Rp1.175.877.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Rp1,175,877,000,000 (one trillion one hundred and seventy-five billion eight hundred and seventy-seven million rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid-up Capital

Rp156.200.000.000 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).

Rp156,200,000,000 (one hundred and fifty six billion two hundred million rupiah)

"Pemegang Saham" | "Shareholders"

Kepemilikan saham perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

The company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs.



Riwayat Singkat

Brief History



Pada masa kolonial, Pemerintah Belanda telah mendirikan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, berupa kantor cabang suatu perusahaan asing, perusahaan lokal yang mewakili perusahaan luar negeri, agen tunggal, perusahaan yang sudah berdiri dari perusahaan induknya di luar negeri, dan perusahaan berbadan hukum dengan anak perusahaan yang berdomisili di Hindia-Belanda.

Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, yang terbesar adalah *The Big Five*, dengan keunggulan manajemen dan jaringan pemasaran ke seluruh pelosok dengan tujuan untuk mengeksport rempah-rempah ke Eropa.

Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan perdagangan tersebut menjadi perusahaan milik negara. *The Big Five* menjadi cikal bakal perusahaan dagang dan disebut Niaga pada tahun 1950-an.

During the colonial period, the Dutch Government had established a wide variety of companies engaged in trade, in the form of branch offices of foreign companies, local companies representing foreign companies, sole agents, established companies from parent companies abroad, and incorporated companies with subsidiaries domiciled in the Dutch East Indies.

Among these companies, the largest was The Big Five, with its superior management and marketing network to all corners with the aim of exporting spices to Europe.

Later, after Indonesian independence, the Indonesian government nationalized all these trading companies into state-owned enterprises. The Big Five became the forerunner of trading companies and were called Niaga in the 1950s.



Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi bertanggung jawab untuk perdagangan dan pendistribusian komoditi dasar seperti makanan pokok (beras, tepung, jagung, dan lain-lain) di samping rempah-rempah tradisional. Mereka juga bertanggung jawab untuk perdagangan dan distribusi komoditas produk-produk pertanian (pupuk dan pestisida, bahan kimia dan lain-lain) dan produk konsumen (tekstil, otomotif, dan lain-lain). Untuk itu, pemerintah memberikan hak khusus untuk beroperasi dalam jangka peraturan, modal, dan aset.

Pada bulan Juni 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan tiga perusahaan niaga yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero), menjadi satu perusahaan niaga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT PPI) yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2003 yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi manajemen, memaksimalkan keuntungan, integrasi bisnis dan meningkatkan kepemilikan aset.

Pada 2 Desember 2021 PPI dan PT BGR Logistik Indonesia resmi bergabung berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, SH Nomor 3 yang disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHUAH.01.10-0014967 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Saat ini, PPI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis perdagangan domestik, internasional, pergudangan dan logistik yang terdigitalisasi, melalui tahapan inisiatif strategis dengan memperbaiki fundamental (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) dan seterusnya.

Informasi Perubahan Nama

Hingga akhir 2022, PPI tidak pernah melakukan perubahan nama.

The nationalized companies were responsible for trading and distributing basic commodities such as staple foods (rice, flour, corn, etc.) in addition to traditional spices. They were also responsible for the trade and distribution of agricultural commodities (fertilizers and pesticides, chemicals, etc.) and consumer products (textiles, automobiles, etc.). For this, the government grants special rights to operate in terms of regulations, capital, and assets.

In June 2003, the Government of Indonesia decided to merge three trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero) and PT Pantja Niaga (Persero), into one trading company, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT PPI) which was effective from March 31, 2003 based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2003 aimed at improving management efficiency, maximizing profits, business integration and increasing asset ownership.

On December 2, 2021 PPI and PT BGR Logistik Indonesia officially merged based on the Notarial Deed of Aulia Taufani, SH Number 3 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights Number AHUAH.01.10-0014967 concerning Acceptance of Notification of Merger of the Company (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Currently, PPI is a company engaged in the business of domestic and international trade, warehousing and digitized logistics, through the stages of strategic initiatives by improving fundamentals (2021), *Unlock The Value* (2022-2023), *World Class Company* (2024) and so on.

Information on Name Change

Until the end of 2022, PPI has never changed its name.





Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR)



Laporan Keuangan
Audited Financial Report





Jejak Langkah

Milestones

1950

Pemerintah Indonesia menasionalisasikan seluruh perusahaan perdagangan menjadi perusahaan milik negara dan disebut sebagai Niaga.

The Indonesian government nationalized all trading companies into state-owned companies and called them Commerce.

1961

- Perubahan nama PN Bhakti, PN Sedjati, dan PN Sinar Bhakti menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 75/1961, PP No. 90/1961, PP No.71/1967, PP No.74/1961;

Changes in the names of Bhakti, PN Sedjati, and PN Sinar Bhakti to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 75/1961, 90/1961. PP No.71/1967, PP No.74/1961;

- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Cipta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; dan

Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Cipta Niaga as stated in PP No. 78/1961, PP No. 76/1961; and

- Perubahan nama PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, dan PN Tulus menjadi PT Aneka Bhakti dan PT Pantjta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.

Changes in the names of PN Marga Bhakti, PN Tri Bhakti, and PN Tulus to PT Aneka Bhakti and PT Pantjta Niaga as stated in PP No. 73/1961, PP No. 77/1961, PP No.72/1961.

1966

Perubahan nama PT Aneka Niaga II menjadi PN Kerta Niaga, PT Pembangunan menjadi PT Cipta Niaga, dan PT Aduma Niaga III berubah menjadi PT Dirga Niaga. Seluruh perubahan tercantum di dalam PP No. 7/1966.

Change in the name of PT Aneka Niaga II to PN Kerta Niaga, PT Pembangunan to PT Cipta Niaga, and PT Aduma Niaga III to PT Dirga Niaga. All changes are stated in PP No. 7/1966.

1965

Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Niaga III tercantum di dalam Keputusan Menteri. PDN No. 002/1965 dan Keputusan Menteri. PDN No. 010/1965.

Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Niaga III as stated in the Ministerial Decree. PDN No. 002/1965 and Ministerial Decree. PDN No. 010/1965.

1964

- Perubahan nama PN Budi Bhakti menjadi PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti menjadi PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti menjadi PN Dharma, dan PN Fadjar Bhakti menjadi PN Satya Niaga telah dituangkan di dalam PP 31/1964 dan PP 30/1964;

Changes in the name of PN Budi Bhakti to PT Aduma Niaga I, PN Sedjati Bhakti to PT Aneka Niaga II, PN Sinar Bhakti to PN Dharma, and PN Fadjar Bhakti to PN Satya Niaga as stated in PP 31/1964 and PP 30/1964;

- Perubahan nama PN Djaya Bhakti menjadi PT Pembangunan Aneka Niaga II telah dituangkan di dalam PP No. 30/1964.

Change in the name of PN Djaya Bhakti to PT Pembangunan Aneka Niaga II as stated in PP No. 30/1964.



1970

- Perubahan nama PN Kerta Niaga menjadi PT Kerta Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 32/1970;
Change in the name of PN Kerta Niaga to PT Kerta Niaga as stated in PP No. 32/1970;
- Perubahan nama PN Dharma menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 22/1970;
Change in the name of PN Dharma to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 22/1970;
- Perubahan nama PT Satya Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam RUPSLB PT Dharma Niaga Tanggal 6 April 1970.
Change in the name of PT Satya Niaga to PT Dharma Niaga as stated in the EGMS of PT Dharma Niaga on April 6, 1970.

1971

- Perubahan nama PT Aduma Niaga I menjadi PT Aduma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 52/1971;
Change in the name of PT Aduma Niaga I to PT Aduma Niaga as stated in PP No. 52/1971;
- Perubahan nama PN Satya Niaga menjadi PT Satya Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 10/1971;
Change in the name of PN Satya Niaga to PT Satya Niaga as stated in PP No. 10/1971;
- Perubahan nama PT Aneka Niaga I menjadi PT Aneka Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.73/1971;
Change in the name of PT Aneka Niaga I to PT Aneka Niaga as stated in PP No.73/1971;
- Perubahan nama PN Dirga Niaga menjadi PT Dirga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 36/1971;
Change in the name of PN Dirga Niaga to PT Dirga as stated in PP No. 36/1971;
- Perubahan nama PT Pantja berubah menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.37/1971; dan
Change in the name of PT Pantja to PT Pantja Niaga as stated in PP No.37/1971; and
- Perubahan nama PN Pembangunan Niaga I menjadi PT Pembangunan Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No.47/1971.
Change in the name of PN Pembangunan Niaga I to PT Pembangunan Niaga as stated in PP No.47/1971.

2003

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Niaga atau perusahaan perdagangan, yaitu PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), dan PT Pantja Niaga (Persero) menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PT PPI") atau Indonesia Trading Company (ITC). Hal ini tercantum di dalam PP No. 22/2003.

Merger of 3 (three) Commerce Companies or trading companies, namely PT Tjipta Niaga (Persero), PT Dharma Niaga (Persero), and PT Pantja Niaga (Persero) to become PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ("PT PPI") or Indonesia Trading Company (ITC). This is stated in PP No. 22/2003.

1998

Perubahan nama PT Kerta Niaga menjadi PT Dharma Niaga sebagaimana tertuang di dalam PP No. 28/1998.
Change in the name of PT Kerta Niaga to PT Dharma Niaga as stated in PP No. 28/1998.

1982

Penggabungan PT Dirga Niaga dan PT Pembangunan Niaga menjadi PT Pantja Niaga sebagaimana tertuang di dalam Keputusan RUPSLB No. 17/1982.

Merger of PT Dirga Niaga and PT Pembangunan Niaga into PT Pantja Niaga as stated in the EGMS Resolution No. 17/1982.



2015

Melakukan perubahan logo perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan ITC (*Indonesia Trading Company*) menjadi Perusahaan Perdagangan Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan dari Kementerian BUMN Nomor S-28/MBU/01/2015 pada tanggal 14 Januari 2015.

Change in the Company logo, previously known as ITC (Indonesia Trading Company) to become Perusahaan Perdagangan Indonesia in accordance with the Approval Letter from the Ministry of SOE Number S-28/MBU/01/2015 on January 14, 2015.

2017

Bekerjasama dengan partner Zhong Ni, PPI meresmikan Representative Office di China.

In collaboration with partner Zhong Ni, the PPI inaugurated a Representative Office in China.

2018

- Pertama kali menerapkan Sistem *Information and Communication Technology (ICT)* yang dimulai dengan pemberlakuan sistem ERP di tahun 2017.

Implemented the Information and Communication Technology (ICT) System for the first time starting with the implementation of the ERP system in 2017.

- PPI mengeskpor komoditi Arang Batok Kelapa ke Sri Lanka dengan sumber pasokan komoditi berasal dari area Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatera Selatan.

PPI exported Coconut Shell Charcoal commodity to Sri Lanka with commodity supply sources coming from West Java, East Java, Sulawesi and South Sumatra.

- PPI memproduksi Dharmafur kemasan 1 kg untuk segmen petani/rumah tangga dengan luasan lahan kecil.

PPI produced Dharmafur packs of 1 kg for the farmer/household segment with a small land area.

2019

- Bekerjasama dengan *partner* Elhamd Trading Company, PPI meresmikan *Representative Office* di Mesir.

In collaboration with partner Elhamd Trading Company, PPI inaugurated the Representative Office in Egypt.

- Bekerjasama dengan *partner* Ascent Hi-Tech Corp, PPI meresmikan *Representative Office* di Taiwan.

In collaboration with partner Ascent Hi-Tech Corp, PPI inaugurated the Representative Office in Taiwan.

- PPI mengeluarkan produk baru dengan brand sendiri, yaitu Panganesia. Berkolaborasi dengan produsen minyak goreng di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera Utara, dan mulai memasarkan produk minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter dengan brand Minyak Goreng Panganesia.

PPI issued a new product with its own brand, namely Panganesia. Collaborated with cooking oil producers in a number of areas, especially in North Sumatra, and began marketing 1 liter and 2 liter packaged cooking oil products under the Panganesia Cooking Oil brand.

- PPI Bekerjasama dengan produsen beras di sejumlah sentra produksi beras dan memasarkan produk beras premium kemasan 5 kg dengan brand Beras Panganesia.

PPI collaborated with rice producers in a number of rice production centers and marketed premium 5 kg packaged rice products under the Panganesian Rice brand.

- PPI merintis peluang bisnis baru berupa pengembangan usaha kopi beserta produk turunannya dan meluncurkan produk KOPI COVARE.

PPI pioneered new business opportunities by developing the coffee business and its derivative products and launching the KOPI COVARE product.

- PPI meresmikan 15 BUMN *Shop* yang beroperasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

PPI inaugurated 15 SOE Shops operating in a number of regions in Indonesia



2020

- Bekerjasama dengan *partner* Al Buraq Investment & Hongkong Star Food, PPI meresmikan Representative Office di Dubai.

In collaboration with partner Al Buraq Investment & Hongkong Star Food, PPI inaugurated the Representative Office in Dubai.

- Bekerjasama dengan *partner* Legacy Singapura Holding Pte Ltd, PPI meresmikan *Representative Office* di Singapura.

In collaboration with partner Legacy Singapore Holding Pte Ltd, PPI inaugurated the Representative Office in Singapore.

2021

Penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksha ke dalam PT Perusahaan pada tanggal 2 Desember 2021 dan PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT BGR Logistik Indonesia ke dalam PPI pada 15 September 2021.

Signing of the Deed of Merger of PT Bhanda Ghara Reksha into PPI on December 2, 2021 and PP Number 97 of 2021 concerning the Merger of PT BGR Logistik Indonesia into the PPI on September 15, 2021

2022

Pada tanggal 7 Januari 2022 secara resmi terbentuk Holding BUMN Pangan, dengan PT RNI (Persero) sebagai induk holding. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan penandatanganan Akta Inbreng saham Pemerintah antara PT RNI (Persero) dan kelima BUMN Pangan, di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam.

On January 7, 2022, the Food SOE Holding was officially formed, with PT RNI (Persero) as the holding parent. This was marked by the signing of the Deed of Inbreng of Government shares between PT RNI (Persero) and the five Food SOEs, including PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari and PT Garam.





Bidang Usaha, Produk, dan Layanan

Line Of Business, Products, and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI, maka dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI menjalankan kegiatan usaha utama dan pendukung sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Hasil pertanian serta produk turunannya berikut alat-alat pertanian;
- Hasil kehutanan serta produk turunannya berikut alat-alat eksploitasi hutan;
- Hasil perkebunan serta produk turunannya berikut alat-alat perkebunan;
- Bahan-bahan untuk konstruksi;
- Alat-alat untuk konstruksi
- Alat-alat kesehatan dan laboratorium.

Kegiatan Usaha Pendukung:

Produksi Barang-Barang yang Mendukung Perdagangan. Selain menjalankan kegiatan usaha utama, perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi pergudangan, perkantoran, pertokoan, pemanfaatan lahan, transportasi, properti, dan pariwisata, serta melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha Dijalankan Di Tahun 2022

Melalui eskalasi paradigma perusahaan dalam era baru industri perdagangan global, PPI secara berkelanjutan menciptakan ekosistem bisnis secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan bersama mulai dari sumber pasokan (hulu), proses nilai tambah (produksi dan pengolahan), dan secara agresif membuka jaringan distribusi (hilir) baik pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan *market share*.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PPI Nomor 3 Tahun 2021, perseroan menjalankan usaha di bidang Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar. Untuk mencapai hal tersebut, PPI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Business Activities Based On The Articles Of Association

As stated in PPI's Articles of Association, in order to achieve the above purpose and objectives, PPI carries out the following main and supporting business activities:

Main Business Activities:

Perdagangan Internasional & Perdagangan Dalam Negeri

- Agricultural products and their derivatives including agricultural equipment;
- Forestry products and their derivative products as well as forest exploitation equipment;
- Plantation products and their derivative products as well as plantation equipment;
- Materials for construction;
- Construction equipment;
- Medical and laboratory equipment.

Supporting Business Activities:

Production of Goods that Support Trade. In addition to carrying out its main business activities, the Company can also carry out business activities to optimize the utilization of resources which include warehousing, offices, shops, land use, transportation, property, and tourism, as well as carrying out government assignments in accordance with the principles of corporate management and laws and regulations.

Business Activities In 2022

Through the escalation of the Company's paradigm in the new era of the global trade industry, PPI continuously creates a comprehensive business ecosystem by taking into account common interests starting from the source of supply (upstream), value added processes (production and processing), and aggressively opening distribution network (downstream) in both domestic and foreign markets to increase market share.

Based on the Deed of Amendment to PPI's Articles of Association Number 3 of 2021, the Company operates in the fields of Agriculture, Fisheries, Processing Industry, and Wholesale Trade. To achieve this, PPI carries out the following business activities:



- Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan YBDI
- Perikanan
- Pertambangan Batu Bara dan Lignit
- Industri Makanan
- Industri Minuman
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- Treatment Air Limbah
- Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
- Konstruksi Bangunan Sipil
- Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- Penyediaan Akomodasi
- Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI
- Aktivitas Jasa Informasi
- Real Estate
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
- Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
- Crop Farming, Livestock, Hunting and Related Activities
- Fishery
- Coal and Lignite Mining
- Food industry
- Beverage Industry
- Industry of Chemicals and Chemical Products
- Wastewater Treatment
- Collection, Treatment and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities
- Waste and Other Waste Remediation and Management Activities
- Civil Building Construction
- Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles
- Wholesale Trade, Non-Motorized Vehicle
- Warehousing and Transport Support Activities
- Provision of Accommodation
- Programming Activities, Computer Consulting, and Related Activities
- Information Services Activities
- Real Estate
- Head Office Activities and Management Consulting
- Lease and Lease Without Option
- Office Administration Activities, Office Support Activities, and Other Business Support Activities.

Informasi Pengungkapan Bidang Usaha Di Dalam Laporan Keuangan Tahun 2022

Informasi tentang kegiatan usaha di atas juga telah tercantum dalam Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Disclosure Information In The Financial Statements In 2022

Information about the above business activities has also been disclosed in the Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the fiscal year ending December 31, 2022.





Produk dan Komoditi Perdagangan

Trade Products and Commodities

Produk

PPI memiliki konsep dalam pengembangan produk dan komoditi yang diperdagangkan dengan menggunakan prinsip integrasi vertikal di mana perusahaan bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM serta produsen-produsen bahan kimia, pestisida dan obat-obatan yang kemudian dilakukan proses nilai tambah untuk menghasilkan produk akhir berkualitas dan siap dipasarkan melalui saluran distribusi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, aktivitas logistik dan pergudangan sebagai portofolio anak perusahaan perseroan, menjadikan *supply chain* ekosistem pangan lebih efektif dan efisien.

Pestisida

Komitmen untuk menjadi sahabat petani Indonesia, perseroan terus berinovasi mengembangkan sebuah solusi yang dibutuhkan petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Menjawab hal tersebut, perseroan memiliki produk unggulan pestisida yang terbagi menjadi insektisida dan herbisida yaitu Dharmabrand terdiri dari Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, dan Dharmafur 3G yang merupakan golongan insektisida, serta Dharmapara 276SL, dan Dharmara 480SL sebagai golongan herbisida.

Product

PPI has a concept in developing traded products and commodities using the principle of vertical integration, in which the Company cooperates with farmers, ranchers, fishermen, and MSMEs as well as producers of chemicals, pesticides and medicines. Then adding value processes are carried out to produce quality final products which are ready to be marketed through distribution channels within the country and overseas.

In addition, logistics and warehousing activities as a portfolio of the Company's subsidiaries make the food ecosystem supply chain more effective and efficient.

Pesticide

Committed to collaborating with Indonesian farmers, the Company continuously innovates to develop a solution needed by farmers to increase agricultural production. Responding to this, the Company has superior pesticide products which are divided into insecticides and herbicides, namely Dharmabrand consisting of Dharmasip 50EC, Dharmasan 600EC, Dharmabas 500EC, and Dharmafur 3G which are insecticides, as well as Dharmapara 276SL, and Dharmara 480SL as herbicides.





Jenis Pestisida | Types of Pesticides



**DHARMASIP
50EC**

Insektisida piretroid berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan berwarna kuning muda pucat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, tomat, dan kedelai.

Pyrethroid insecticide with active ingredient Cypermethrin 50 g/l which functions as a contact and gastric poison, in the form of a pale light yellow concentrate that can be emulsified to control pests on chili, onion, cabbage, tomato, and soybean plants.



**DHARMASAN
600EC**

Insektisida organofosfat berbahan aktif fentoat 600 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning pucat yang dapat membentuk emulsi dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai merah, kapas, kedelai, lada, tebu, dan tembakau.

Organophosphate insecticide with active ingredient fentoate 600 g/l which functions as a contact poison in the form of a pale yellow concentrate that can form an emulsion in water to control pests on shallots, red chilies, cotton, soybeans, pepper, sugarcane, and tobacco.



**DHARMABAS
500EC**

Insektisida karbamat berbahan aktif BPMC 500 g/l yang bekerja sebagai racun kontak berbentuk pekatan kuning yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, bawang merah, cabai merah, tebu, kakao, dan teh.

Carbamate insecticide with active ingredient BPMC 500 g/l which functions as a contact poison in the form of a yellow concentrate that can be emulsified in water to control pests on rice, shallots, red chili, sugarcane, cocoa, and tea plants.



**DHARMAFUR
3G**

Insektisida karbamat berbahan aktif karbofuran 3% berbentuk granul yang bekerja sebagai racun kontak dan lambung yang sistemik berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman kedelai, bawang merah, dan cabai.

Carbamate insecticide with active ingredients 3% carbofuran in the form of granules that functions as systemic contact and stomach poison in purple granular form to control pests on soybeans, shallots, and chilies.



**DHARMAPA-
RA 276SL**

Herbisida terbatas berbahan aktif paraquat diklorida 247 g/l bekerja sebagai racun kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma umum pada per tanaman kelapa sawit (TBM).

Limited herbicide with the active ingredient paraquat dichloride 247 g/l which functions as a post-growth contact poison, in the form of a blue-green solution in water, to control common weeds in oil palm plantations (TBM).



**DHARMARA
480SL**

Herbisida sistemik purna tumbuh berbahan aktif isopropil amina glifosat 480 g/l setara dengan Glifosat 356 g/l, yang berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan dan tidak selektif terhadap tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma) sasaran pada per tanaman kelapa sawit (TBM).

Post-emergence systemic herbicide with the active ingredient isopropyl amine glyphosate 480 g/l equivalent to Glyphosate 356 g/l, which is in the form of a yellowish aqueous solution and is not selective against targeted cultivated plants (weeds) in oil palm plantations (TBM).



Pupuk

PPI sebagai distributor pupuk subsidi dan non subsidi bekerja sama dengan pabrikan pupuk BUMN dan swasta di antaranya PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Tetap Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco dan PT Wilmar untuk menyalurkan kebutuhan pupuk bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat. PPI menyediakan kebutuhan pupuk untuk agen, kios dan end-user yang tersebar di setiap kantor cabang seluruh Indonesia.

Fertilizer

PPI as a distributor of subsidized and nonsubsidized fertilizers cooperates with state-owned and private fertilizer manufacturers including PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, Pupuk Sriwidjaya, PT Meroke Fixed Jaya, Multimas Chemindo, PT Sasco and PT Wilmar to distribute fertilizer for agricultural businesses which include Food Crops Farmers, Livestock and People's Plantations. PPI provides fertilizer for agents, kiosks and end-users spread across every branch office throughout Indonesia.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer

Keterangan Description

Pupuk KCL | KCL Fertilizer

Pupuk KCL atau yang sering disebut sebagai MOP (Muriate of Potash) merupakan salah satu jenis pupuk tunggal yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu mengandung 60% K₂O sebagai Kalium klorida. Ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap klorida atau tanah dengan klorida rendah. Selain itu, Pupuk KCL dapat diaplikasikan untuk semua jenis tanah.

KCL fertilizer or often referred to as MOP (Muriate of Potash) is a single type of fertilizer that has a high concentration containing 60% K₂O as Potassium chloride. This is a fertilizer containing potassium which is very suitable for all types of plants that are tolerant to chloride or soils with low chloride. In addition, KCL fertilizer can be applied to all types of soil.

Pupuk NPK | NPK Fertilizer

Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki kandungan unsur hara Nitrogen (N), Fosfat (P) dan Kalium (K). Pupuk majemuk NPK adalah pupuk yang mengandung setidaknya 5 unsur hara yang terdiri dari 3 unsur hara makro yaitu N, P, dan K serta 2 unsur hara mikro. Setiap jenis pupuk atau merk memiliki presentase atau komposisi kandungan yang berbeda-beda, yang ditandai dengan angka seperti NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 atau NPK 12-12-12. Angka-angka tersebut adalah presentase kandungan unsur hara makro yang ada di dalamnya, sedangkan kandungan unsur hara mikro sangat sedikit sehingga umumnya tidak ditulis pada kemasan.

NPK fertilizer is a type of fertilizer which contains nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium (K) nutrients. NPK compound fertilizer is fertilizer that contains at least 5 nutrients consisting of 3 macro nutrients, namely N, P, and K and 2 micro nutrients. Each type of fertilizer or brand has a different percentage or composition of content, which is indicated by numbers such as NPK 16-16-16, NPK 15-15-15 or NPK 12-12-12. These numbers are the percentage of macro nutrients in it, while the content of micro nutrients is very small so they are generally not written on the packaging.



Jenis Pupuk Types of Fertilizer	Keterangan Description
Pupuk Urea Urea Fertilizer	Pupuk Urea merupakan zat yang membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk Urea dibuat secara kimiawi dengan kandungan kadar nitrogen yang cukup tinggi. Pupuk Urea membuat daun tanaman lebih hijau, rimbun, dan segar. Nitrogen juga membantu tanaman sehingga mempunyai banyak zat hijau daun (klorofil). Dengan adanya zat hijau daun yang berlimpah, tanaman akan lebih mudah melakukan fotosintesis. Pupuk Urea juga mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah kandungan protein di dalam tanaman, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, baik untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman usaha perkebunan, tanaman di sekitar peternakan dan juga tanaman di sekeliling usaha perikanan. Urea fertilizer is a substance that helps plant growth. Urea fertilizer is made chemically with fairly high nitrogen. Urea fertilizer makes plant leaves greener, lush, and fresher. Nitrogen also helps plants to have a lot of green leaf substance (chlorophyll). In the presence of abundant leaf green matter, plants will carry out photosynthesis more easily. Urea fertilizer also accelerates plant growth, increases protein content in plants, can be used for all types of plants, including for food crops, horticultural crops, plantation crops, plants around livestock and also plants around fishing businesses.
Pupuk ZA ZA Fertilizer	Pupuk ZA adalah pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen bagi tanaman. Pupuk ZA mudah menyerap air karena ion sulfat sangat mudah larut dalam air sedangkan ion amonium lebih lemah, pupuk ini berpotensi menurunkan pH tanah yang terkena aplikasinya. Pupuk ZA memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi serta nilai gizi hasil panen dan pakan ternak karena peningkatan kadar protein pati, padi, gula, lemak, vitamin, dan lain-lain; memperbaiki rasa dan warna hasil panen; tanaman lebih sehat dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan (hama, penyakit, kekeringan); kandungan nitrogennya hanya separuhnya dari pupuk urea, sehingga biasanya pemberiannya dimaksudkan sebagai sumber pemasok hara belerang pada tanahtanah yang miskin unsur ini, maka Pupuk ZA merupakan pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan unsur hara belerang. ZA fertilizer is an artificial chemical fertilizer designed to provide additional nitrogen nutrients to plants. ZA fertilizer easily absorbs water because the sulfate ion is very easily soluble in water while the ammonium ion is weaker. This fertilizer has the potential to lower the pH of the soil affected by its application. ZA fertilizer improves quality and increases production and nutritional value of crop yields and animal feed due to increased levels of protein, starch, rice, sugar, fat, vitamins, and others; improve the taste and color of crops; plants are healthier and more resistant to environmental disturbances (pests, diseases, drought); Its nitrogen content is only half that of urea fertilizer, so it is usually given as a source of sulfur nutrient supply in soils that are poor in this element, so ZA fertilizer is the best choice to meet the needs of sulfur nutrients.



Bahan Berbahaya

PPI sebagai importir dan distributor bahan kimia berbahaya di Indonesia melalui harmonisasi *supply and demand* yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi rantai pasok bahan kimia berbahaya. PPI memiliki produk prioritas Bahan Kimia Berbahaya, yaitu:

Hazardous Chemicals

As an importer and distributor of hazardous chemicals in Indonesia through harmonization of supply and demand supported by information and communication technology systems for the supply chain of hazardous chemicals, PPI has priority products for Hazardous Chemicals, namely:

Jenis Bahan Berbahaya Types of Hazardous Chemicals	Keterangan Description
Borax Pentahydrate 	Borax Pentahydrate adalah padatan yang berbentuk kristal berfungsi sebagai pupuk untuk meningkatkan kualitas buah dan mempercepat pertumbuhan; sebagai <i>fluxing agent</i> untuk efisiensi pada ruang pembakaran pada industri kaca dan keramik; dan sebagai pengawet dalam industri kayu dan pengolahan kertas. Borax Pentahydrate is a crystalline solid that functions as a fertilizer to improve fruit quality and accelerate growth; as a fluxing agent for efficiency in combustion chambers in the glass and ceramics industry; and as a preservative in the wood and paper processing industries.
Sodium Cyanide 	Sodium Cyanide adalah senyawa padat berwarna putih yang dapat larut dalam air, berfungsi sebagai bahan pembantu ekstraksi emas, perak, dan tembaga, serta sebagai bahan pengikat dalam proses pelapisan logam. Sodium Cyanide is a white solid compound that is soluble in water, and serves as an auxiliary material for the extraction of gold, silver, and copper, as well as a binder in metal plating processes.
MDEA 	MDEA adalah cairan kuning jernih yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemurnian gas Carbon Dioxide (CO₂) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) dalam industri pengolahan gas bumi. MDEA is a clear yellow liquid that functions as an ingredient used for the purification of Carbon Dioxide (CO₂) and Hydrogen Sulfide (H₂S) gases in the natural gas processing industry.
TEA 	TEA adalah senyawa kimia organik kental dengan bau amonia yang berfungsi sebagai zat pengemulsi dalam industri <i>consumer goods</i>, pewarna tekstil, dan bahan pelapis anti korosi dan anti karat untuk industri besi dan baja. TEA is an organic chemical compound, thick with ammonia odor, which functions as an emulsifier in the consumer goods industry, textile dyes, and anti-corrosion and anti-rust coating materials for the iron and steel industry.
Potassium Chlorate 	Potassium Chlorate adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin dan oksigen yang berbentuk kristal putih, berfungsi sebagai bahan oksidator dalam industri kembang api, korek api, peledak dan antiseptik. Potassium Chlorate is a compound containing potassium, chlorine and oxygen in the form of white crystals, which functions as an oxidizing agent in the fireworks, matches, explosives and antiseptic industries.



Bahan Bangunan | Hazardous Chemicals

Produk Products	Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
	Semen Cement	PPI mendistribusikan semen Portland Jenis I, semen jenis ini adalah semen hidrolis yang proses pembuatannya mencampurkan beberapa unsur di antaranya terak, gypsum, dan bahan anorganik yang apabila diberi air akan membentuk pasta semen dan kemudian menjadi kaku dan keras. Jenis semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen ini di antaranya untuk konstruksi bangunan rumah pemukiman, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, landasan pacu pesawat terbang, dan lain-lain. Karakteristiknya cocok digunakan di lokasi pembangunan kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat rendah. Semen yang didistribusikan oleh PPI merupakan sinergi dengan hasil produk Semen Indonesia Grup (SIG) untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua PPI menghadirkan semen dengan harga yang lebih terjangkau khususnya daerah Pegunungan Tengah Papua. PPI distributes Portland cement Type I. This type of cement is hydraulic cement with manufacturing process mixing several elements including slag, gypsum, and inorganic materials, which when given water will form a cement paste and then become stiff and hard. This type of cement is used for general building construction which does not require special requirements for heat hydration and initial compressive strength. The uses of this cement include the construction of residential houses, high-rise buildings, roads, bridges, airplane runways, and others. Its characteristics are suitable for use in construction sites that are far from the coast and have low sulfate levels. The cement distributed by PPI is a synergy with the products of the Semen Indonesia Group (SIG) for the Indonesian regions. For the Papua region, PPI provides cement at a more affordable price, especially in the Central Highlands of Papua.



Produk Products	Jenis Bahan Bangunan Types of Construction Materials	Keterangan Description
	Aspal Asphalt	Aspal merupakan salah satu bahan bangunan yang acapkali digunakan dalam sebuah proyek konstruksi jalan atau sirkulasi, yang fungsi utamanya sebagai bahan pengikat dan pelapis permukaan tanah yang penggunaannya dicampur dengan senyawa lain seperti bitumen dan mineral. Aspal akan mengikat batuan dan komponen lain agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Aspal yang didistribusikan PPI adalah jenis asphalt 60/70 yang difokuskan untuk aplikasi konstruksi jalan. Ada dua jenis aspal yang didistribusikan yaitu aspal Pertamina dan aspal Iran. Aspal Pertamina didistribusikan PPI Cabang Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram, dan Ambon yang meliputi Timika dan Manokwari. Sedangkan aspal Iran didistribusikan Cabang Palu dan Ambon. Asphalt is one of the building materials that is often used in road construction or circulation projects with the main function as a binder and soil surface coating which is used by mixing it with other compounds such as bitumen and minerals. Asphalt will bind rocks and other components so that they are not separated from the road surface. Asphalt distributed by PPI is asphalt 60/70 which is focused on road construction applications. There are two types of asphalt distributed, namely Pertamina asphalt and Iranian asphalt. Pertamina's asphalt is distributed by the PPI Jogja, Solo, Madiun, Cirebon, Manado, Purwokerto, Palu, Mataram and Ambon branches which include Timika and Manokwari. Meanwhile, the Iranian asphalt is distributed by the Palu and Ambon branches.

Transamin

Transamin adalah obat anti pendarahan berbahan baku Asam Traneksamat pertama di Indonesia. PPI merupakan pemegang lisensi dari Daiichi-Sankyo untuk mendistribusikan produk Transamin.

Transamin merupakan pilihan yang terbukti aman dan efektif menangani pendarahan dengan menghambat aktivitas dari activator plasminogen dan plasmin, mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet dan aktivitas faktor koagulasi serta mencegah kerapuhan dinding pembuluh darah. Transamin memiliki 4 jenis yakni Transamin Kapsul 250 mg, Transamin Tablet 500 mg, Transamin Injeksi 250 mg, dan Transamin Injeksi 500 mg.

Transamin is the first anti-bleeding drug made from Tranexamic Acid in Indonesia. PPI is the licensee of Daiichi-Sankyo to distribute Transamin products.

Transamin is a proven safe and effective option to treat bleeding by inhibiting the activity of plasminogen and plasmin activator, preventing fibrin degradation, increasing platelet aggregation and activity of coagulation factors and preventing fragility of blood vessel walls. Transamin has 4 types, namely Transamin Capsules 250 mg, Transamin Tablets 500 mg, Transamin Injection 250 mg, and Transamin Injection 500 mg.



Farmasi dan Alat Kesehatan

PPI sebagai Pedagang Besar Farmasi dengan izin dan sertifikat distribusi oleh Kementerian Kesehatan yang tersebar di 32 Kantor Cabang bekerja sama dalam mendistribusikan produk farmasi dan alat kesehatan dari PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, dan PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribusi merupakan proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat setelah proses pembuatannya. Dalam proses pendistribusiannya, PPI menjamin kualitas produk mulai dari pengadaan, penyimpanan, peraturan dan registrasi produk hingga sampai ke tangan konsumen sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) perlu diterapkan pada fasilitas distribusi termasuk apotek agar mutu obat dapat terjaga sampai obat dikonsumsi oleh pasien.

Pharmaceutical and Medical Devices

PPI as a Pharmaceutical Wholesaler with a license and distribution certificate by the Ministry of Health spread across 32 Branch Offices cooperates in distributing pharmaceutical products and medical devices from PT Bio Farma, PT Indofarma, PT Sanbe Farma, PT Satoria Pharma, PT MJB Pharma, PT Widatra Bhakti, PT Harsen Laboratories, Pyramid Pharma, and PT Otto Pharmaceutical Industries.

Distribution is an important process in maintaining the efficacy, safety, and quality of a drug after the manufacturing process. In the distribution process, PPI guarantees product quality starting from procurement, storage, regulation and product registration until it reaches consumers in accordance with the Good Drug Distribution Method (CDOB) which needs to be applied to distribution facilities including pharmacies so that drug quality can be maintained until the drug is consumed by the patients.





Covare

Hadir dengan koneksi antara secangkir kopi dan petani yang berkomitmen untuk menghasilkan kualitas terbaik. Covare menjadi sebuah pilihan tepat untuk kenikmatan secangkir kopi. Melalui pendampingan proses panen, pengelolaan pasca panen, pembelian *green bean*, hingga pemasaran, Covare hadir untuk memenuhi kebutuhan kopi masyarakat.

Covare tersedia dalam bentuk *roasted coffee* dan *drip coffee* dengan lima varian yaitu, Papua Wamena, Sumatera Toba, Aceh Gayo, Sumatera Mandailing, dan Papua Blend.

Coming with a connection between a cup of coffee and farmers who are committed to producing the best quality, Covare is the right choice for the enjoyment of a cup of coffee. With the assistance in the harvest process, post-harvest management, purchasing green beans, and marketing, Covare is present to meet the coffee needs of the community.

Covare is available in the form of roasted coffee and drip coffee with five variants, namely, Papua Wamena, Sumatra Toba, Aceh Gayo, Sumatra Mandailing, and Papua Blend.



Gula

PPI adalah distributor Gula Kristal Putih (GKP) dan telah menerima penugasan pemerintah untuk pengadaan GKP dalam memenuhi kebutuhan GKP dalam negeri serta sebagai stabilisator harga GKP di Indonesia. Gula merupakan salah satu bahan pokok yang memberikan rasa manis pada setiap hidangan sebagai pelengkap rasa makanan, kadar ICUMSA GKP yang disalurkan oleh PPI berkisar antara 81 IU - 200 IU sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sugar

PPI is a distributor of White Crystal Sugar (GKP) and has received a government assignment to procure GKP to meet domestic GKP needs and as a stabilizer for GKP prices in Indonesia. Sugar is one of the staple ingredients that gives a sweet taste to every dish as a complement to the taste of food. The ICUMSA GKP levels distributed by the PPI range from 81 IU - 200 IU according to the Indonesian National Standard (SNI).



Kopi

PPI merupakan salah satu eksportir komoditas kopi. Kopi adalah jenis minuman hasil seduhan biji tanaman kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis ini menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kopi dapat diproses menjadi minuman dan produk-produk dengan segudang manfaat untuk kesehatan, terdapat dua jenis varietas kopi yang populer di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta. Adapun perbedaan antara Kopi Robusta dan Kopi Arabica diklasifikasikan berdasarkan tempat hidup, aroma dan cita rasa, proses menanam, perawatan dan ukuran biji kopi.

Kopi Arabika tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat dengan bentuk biji kopi yang lonjong. Adapun Kopi Robusta tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-900, idealnya 400-800 meter dari permukaan laut. Rasa Kopi Robusta cenderung lebih pahit dan kasar dengan ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan Arabika dengan bentuk bulat.

Berikut ini adalah jenis-jenis kopi yang tumbuh di Indonesia:

- **Kopi Aceh**, yang tersebar di sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera merupakan penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia, dengan kualitas yang baik dengan cita rasa unik, keunikan kopi ini berasal dari karakteristik aroma dan rasa kopinya yang khas. Perkebunan Kopi Aceh berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl.
- **Kopi Sumatera**, merupakan salah satu varietas kopi yang memiliki tekstur halus dan cita rasa paling berat dan kompleks di antara beragam kopi lainnya. Ketinggian pertumbuhan Kopi Sumatera berada pada 800 - 1500 mdpl.
- **Kopi Sulawesi**, mempunyai karakter rasa unik dengan aroma yang kuat dan rasa yang sedikit gurih, biji buah yang tebal serta keasaman yang rendah. Petumbuhan kopi ini berada di ketinggian 1500 - 1900 mdpl.
- **Kopi Jawa**, memiliki ukuran biji yang lebih kecil, dengan kandungan kafein yang rendah, serta rasa dan aroma yang nikmat. Kopi Jawa memiliki karakteristik aroma tipis rempah dengan kekentalan dan keasaman medium dan rasa yang seimbang, dengan ketinggian tanaman 1000 - 1500 mdpl.
- **Kopi Papua**, terkenal memiliki rasa yang seimbang dan lembut, dengan rasa asam dan aroma yang khas bernuansa coklat dan floral yang harum. Kopi ini terletak disepanjang lembah yang mengelilingi Kota Wamena pada ketinggian 1200 - 1600 mdpl yang merupakan tanah vulkanik dengan suhu mencapai 15°C saat malam hari.

Coffee

PPI is one of the exporters of coffee commodities. Coffee is a type of beverage that is brewed from the coffee plant. Indonesia is one of the largest coffee producers in the world. This plant that grows in the tropics is a leading commodity in Indonesia. Coffee can be processed into beverages and products with a myriad of health benefits. There are two types of coffee varieties that are popular in Indonesia, namely Arabica and Robusta coffee. The differences between Robusta Coffee and Arabica Coffee are classified based on where they grow, the aroma and taste, the growing process, the treatment and size of coffee beans.

Arabica coffee grows well at an altitude of 1000 - 2000 meters above sea level, has a slightly sour taste and a color that is not too thick with an oval shape of coffee beans. The Robusta coffee grows well at an altitude of 0-900, ideally 400-800 meters above sea level. The taste of Robusta coffee tends to be more bitter and coarse with a smaller bean size than Arabica with a round shape.

The following are the types of coffee that grow in Indonesia:

- **Aceh coffee**, spread along the Bukit Barisan on the island of Sumatra, is the best producer of arabica coffee in Indonesia, with good quality and a unique taste. The uniqueness of this coffee comes from the characteristic aroma and taste of the coffee. Aceh Coffee Plantations are located at an altitude of 1000 to 1200 meters above sea level.
- **Sumatran coffee** is one of the coffee varieties that has the smoothest texture and the heaviest and most complex taste among various other coffees. Sumatran coffee plants are located at 800 - 1500 meters above sea level.
- **Sulawesi coffee** has a unique taste with a strong aroma and slightly savory taste, thick fruit seeds and low acidity. This coffee plant is located at an altitude of 1500 - 1900 meters above sea level.
- **Javanese coffee** has a smaller bean size, with low caffeine as well as a delicious taste and aroma. Javanese coffee has a thin aroma of spices with medium viscosity and acidity and a balanced taste, with a plant height of 1000 - 1500 meters above sea level.
- **Papuan coffee** is known to have a balanced and soft taste, with a sour taste and a distinctive aroma of fragrant chocolate and floral nuances. This coffee is located along the valley that surrounds Wamena City at an altitude of 1200 - 1600 meters above sea level which is on the volcanic soil with temperatures reaching 15°C at night.



Beras

PPI melakukan perdagangan komoditas beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dan luar negeri. Beras adalah hasil olahan dari tanaman pertanian padi dan merupakan komoditas pangan serta dijadikan makanan pokok bagi bangsa Asia. Beras diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yakni beras putih, beras ketan dan beras merah. Beras memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, pottasium, seng, berbagai vitamin dan serat, adapun kandungan gizi ini berbeda-beda berdasarkan jenis berasnya.

Rempah-Rempah

Indonesia sebagai negara tropis dianugerahi tanah subur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dengan berbagai manfaat salah satunya rempah-rempah. PPI memiliki komoditi andalan ekspor yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan bagian tumbuhan yang beraroma dan berasa kuat yang digunakan sebagai produk obat tradisional, produk kecantikan, farmasi, bumbu masakan, parfum, sabun, dan lain-lain.

Rice

PPI trades in rice commodities to meet domestic and foreign rice needs. Rice is a processed product of the rice agricultural plant, which is a food commodity that is used as a staple food for the Asian countries. Rice is classified by types into white rice, glutinous rice and brown rice. Rice has nutritional content consisting of carbohydrates, protein, fat, water, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, various vitamins and fiber, while the nutritional content varies based on the type of rice.

Herbs And Spices

As a tropical country, Indonesia is blessed with fertile soil overgrown with various kinds of plants with various benefits, one of which are herbs and spices. PPI has a mainstay of export commodities, namely herbs and spices. They are parts of plants that have a strong aroma and taste that are used as traditional medicinal products, beauty products, pharmaceuticals, cooking spices, perfumes, soaps, and others.



Rempah-rempah | Types of Herbs and Spices



Pala
Nutmeg

Tanaman pala memiliki daun elips yang ramping, buah seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri. Berasal dari: Ternate, Banda, Siau, Manado, dan Halmahera, tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 500- 700 meter, di atas permukaan laut.

Nutmeg plant has slender elliptical leaves, fruit like lemon, yellow in color, and has a distinctive aroma because it contains essential oils. It Coming from Ternate, Banda, Siau, Manado, and Halmahera, it grows well in areas that have an altitude of 500-700 meters, above sea level.



Kapulaga
Cardamom

Kapulaga dinominasikan sebagai salah satu rempah-rempah termahal di dunia setelah kunyit dan vanila. Berasal dari Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Kapulaga dapat tumbuh pada ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh secara optimal dari 300 hingga 500 m di atas permukaan laut.

Cardamom is nominated as one of the most expensive spices in the world after turmeric and vanilla. It grows in West Java and South Sumatra. Cardamom can grow at an altitude of 200-1000 meters above sea level and can grow optimally from 300 to 500 meters above sea level.



Lada Hitam
Black Pepper

Lada hitam adalah buah mentah dari tanaman Piper ningrum yang telah dikeringkan. Selain digunakan sebagai bumbu masak, lada hitam telah dikonsumsi turun-temurun untuk mengobati gejala gangguan pencernaan maupun kondisi lainnya, termasuk: perut kembung, sakit perut, anoreksia, ulkus peptikum, nyeri perut, kram, diare, sembelit, bronkitis dan kanker.

Black pepper is the unripe fruit of the Piper ningrum plant that has been dried. Apart from being used as a cooking spice, black pepper has been consumed for generations to treat symptoms of indigestion and other conditions, including: flatulence, stomach pain, anorexia, peptic ulcer, stomach pain, cramps, diarrhea, constipation, bronchitis and cancer.



Lada Putih
White Pepper

Lada putih adalah rempah-rempah bercita rasa pedas dan mempunyai warna putih. Lada putih biasa dijual dalam bentuk butiran mentah atau sudah ditumbuk, yang didapatkan dari tanaman lada atau piper albi linn dan memberikan efek hangat dan pedas ketika dikonsumsi. Lada putih menjadi primadona dalam berbagai masakan dan menjadi item wajib di dapur.

White pepper is a spice that has a spicy taste and has a white color. White pepper is usually sold in the form of raw or ground granules, which is obtained from the pepper plant or piper albi linn and gives a warm and spicy effect when consumed. White pepper is excellent in various dishes and is a mandatory ingredient in the kitchen.



Cengkeh
Clove

Cengkeh adalah kuncup bunga aromatic dari pohon di keluarga Myrtaceae, Syzygium aromaticum. Mereka adalah asli Kepulauan Maluku (dari Maluku) di Indonesia, dan umumnya digunakan sebagai rempahrempah. Cengkeh tersedia sepanjang tahun karena musim panen yang berbeda di berbagai negara.

Cloves are the aromatic flower buds of a tree in the family of Myrtaceae, Syzygium aromaticum. They are native to the Maluku Islands (from the Maluku) in Indonesia, and are commonly used as a spice. Cloves are available all year round due to different harvest seasons in different countries.



Kelapa dan Turunannya

Indonesia adalah penghasil nomor satu kelapa di dunia. Kelapa memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, buah hingga daun. Kelapa yang dihasilkan menjadi salah satu komoditi ekspor PPI. Kelapa disebut-sebut sebagai 'tanaman kehidupan' atau *the tree of life* karena semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan dengan beragam kegunaan yang berbeda-beda. Di Indonesia, kelapa menjadi komoditas penting yang menjadi kekayaan negeri. Kelapa memiliki berbagai diversifikasi produk, antara lain: Arang Kelapa, Minyak Kelapa, Santan Kelapa, Sabut Kelapa, dan Gula Kelapa.

Coconut and Its Derivatives

Indonesia is the number one producer of coconut in the world. Coconut has economic value that can be utilized from roots, stems, fruits to leaves. The Coconuts produced has become one of PPI's export commodities. Coconut is called the 'plant of life' or the tree of life because all parts of the coconut can be used for a variety of different uses. In Indonesia, coconut is an important commodity that becomes the wealth of the country. Coconut has a variety of product diversification, including: Coconut Charcoal, Coconut Oil, Coconut Milk, Coconut Coir, and Coconut Sugar.



Minyak Kelapa Sawit Dan Turunannya

Minyak kelapa sawit atau crude palm oil adalah salah satu komoditi ekspor PPI. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, industri farmasi, dan dapat digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel.

Crude Palm Oil And Its Derivatives

Crude palm oil is one of PPI's export commodities. Crude palm oil is one of the most consumed and produced oils in the world. Crude palm oil is used as raw material for cooking oil, margarine, soap, cosmetics, steel industry, wire, radio, pharmaceutical industry, and can be used as a source of biofuel or biodiesel.



Kakao

PPI memiliki komoditi ekspor yaitu biji kakao. Biji kakao atau biji coklat adalah biji buah pohon kakao (*Theobroma cacao*) yang telah melalui proses fermentasi dan pengeringan dan siap diolah. Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan bubuk kakao (coklat), bubuk kakao digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kue, es krim, makanan ringan, susu, dan lain-lain. Dalam bahasa keseharian masyarakat kita menyebutnya coklat. Karakter rasa coklat adalah gurih, dengan aroma yang khas sehingga disukai banyak orang.

Cocoa

PPI has an export commodity, namely cocoa beans. Cocoa beans are the fruit seeds of the cocoa tree (*Theobroma cacao*) that have gone through a fermentation and drying process and are ready to be processed. Cocoa beans are the basic ingredient for making cocoa powder (chocolate). Cocoa powder is used as an ingredient in cakes, ice cream, snacks, milk, and others. We usually call it chocolate. The character of the chocolate taste is savory, with a distinctive aroma that is liked by many people.



Teh

PPI memiliki komoditi ekspor teh. Teh adalah jenis minuman yang dihasilkan oleh daun tanaman teh. Teh menjadi salah satu andalan komoditas ekspor di Indonesia dan menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi dunia. Wilayah Indonesia yang memproduksi teh adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Teh memiliki beragam rasa, warna, aroma dan jenis yang bervariasi, di antaranya:

- **White Tea** merupakan teh yang berasal dari daun the termuda yang masih menggulung di bagian pucuk daun pohon teh. Teh putih memiliki antioksidan paling tinggi dibanding jenis teh lainnya. Teh putih memiliki cita rasa yang ringan, sangat segar dan lembut.

Tea

PPI has tea export commodities. Tea is a type of beverage produced by the leaves of the tea plant. Tea is one of the mainstays of export commodities in Indonesia and is the most consumed beverage in the world. The regions in Indonesia that produce tea are West Java, Central Java and North Sumatra. Tea has a variety of different flavors, colors, aromas and types, including:

- **White Tea** is tea that comes from the youngest tea leaves that are still rolled up at the top of the tea tree. White tea has the highest antioxidants than other types of tea. White tea has a mild taste, which is very fresh and soft.



- **Black Tea** merupakan jenis teh yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, teh hitam disebut juga teh merah karena warnanya yang terkadang kemerahan. Teh hitam didapat dari proses oksidasi yang tinggi sehingga menghasilkan kafein yang lebih banyak, dan memiliki cita rasa yang cenderung lebih kuat, asam dan agak pahit.
- **Green Tea** dikenal sebagai teh khas Jepang karena lebih mudah ditemukan. Teh Hijau tidak mengalami proses oksidasi, kandungan kafeinnya lebih rendah dari teh hitam dan lebih tinggi dari teh putih, memiliki rasa yang ringan dan rasa pahit yang cukup kuat.

- **Black Tea** is the type of tea most consumed by Indonesian citizens. Black tea is also called red tea because the color is sometimes reddish. Black tea is obtained from a high oxidation process so that it produces more caffeine, and has a taste that tends to be stronger, sour and slightly bitter.
- **Green Tea** is known as a typical Japanese tea because it is easier to find. Green tea does not undergo an oxidation process. The caffeine content is lower than black tea and higher than white tea. It has a mild and strong bitter taste.



Garam

Indonesia memiliki potensi produksi sumber daya laut yang besar berupa garam. Garam menjadi salah satu bumbu utama yang menambah cita rasa masakan dan menjadi kebutuhan pokok serta sebagai bahan baku berbagai macam kebutuhan industri. PPI memiliki komoditas garam konsumsi dengan kandungan NaCl 87% yang telah diperkaya dengan yodium.

Tubuh manusia membutuhkan garam dalam jumlah yang cukup agar bisa bekerja optimal, berikut ini manfaat konsumsi garam bagi tubuh:

- Membantu kinerja tiroid yang mengontrol metabolisme seluruh tubuh.
- Menjaga tingkat hidrasi dan keseimbangan elektrolit agar setiap organ berfungsi dengan baik.
- Menjaga kestabilan tekanan darah.

Kementerian Kesehatan menyarankan batas aman konsumsi garam perhari bagi orang dewasa dengan kondisi fisik sehat adalah 1 sendok teh garam, setara 5 gram garam, atau 2.000 miligram natrium. Untuk itu, pastikan konsumsi garam atau natrium setiap hari tidak melebihi batas aman.

Salt

Indonesia has a large potential for the production of marine resources in the form of salt. Salt is one of the main spices that adds to the taste of food and is a basic need as well as a raw material for various industrial needs. PPI has commodity salt consumption with a NaCl content of 87% which has been enriched with iodine.

The human body needs salt in sufficient quantities in order to work optimally. Here are the benefits of consuming salt for the body:

- Helping thyroid function which controls metabolism throughout the body.
- Maintaining hydration levels and electrolyte balance for each organ to function properly.
- Maintaining stable blood pressure.

For adults with a healthy physical condition, the Ministry of Health recommends a safe limit of salt consumption per day, namely 1 teaspoon of salt, or equivalent to 5 grams of salt, or 2,000 milligrams of sodium. Thus, make sure the consumption of salt or sodium every day does not exceed the safe limit.



Ikan

Perikanan adalah salah satu sektor andalan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. PPI sebagai *offtaker* produk perikanan dari BUMN Holding Pangan menyediakan produk-produk ikan segar dan ikan beku untuk pasar dalam dan luar negeri.

Fish

Fisheries are one of the mainstay sectors in Indonesia, both capture fisheries and aquaculture. PPI as fishery product *offtaker* from SOE Food Holding, provides fresh and frozen fish products for domestic and foreign markets.



Warung Pangan

Aplikasi Warung Pangan adalah aplikasi *mobile* yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN, dan dikembangkan oleh PPI yang bekerjasama dengan BUMN Holding Pangan, UMKM, serta jaringan supplier lainnya untuk membeli dan menjual produk pangan dengan harga bersaing dan kualitas terbaik kepada masyarakat luas. Warung Pangan hadir sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan.

Warung Pangan hadir dengan berbagai fitur, meliputi:

1. WP Asik
2. WP Fund
3. WP Entrepreneur
4. Mitra Get Mitra
5. Mitra Prioritas
6. Bayar Nanti

Warung Pangan

The Warung Pangan application is a mobile application initiated by the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Ministry of SOEs, and developed by PPI in collaboration with SOE Food Holding, MSMEs, and other supplier networks to buy and sell food products at competitive prices and of the best quality to the wider community. Warung Pangan is present as a solution to empower millions of sellers and consumers to participate in building the future of commerce.

Warung Pangan comes with various features, including:

1. WP Asik
2. WP Fund
3. WP Entrepreneur
4. Mitra Get Mitra
5. Mitra Prioritas
6. Bayar Nanti



Waste Integrated Solution

PPI menyediakan layanan pengelolaan terpadu limbah berbahaya B3 yang meliputi, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengelolaan limbah Non-B3.

- Pengelolaan Limbah B3 Memberikan solusi terpadu penanganan limbah B3 yang terkoneksi dengan *Sistem Manifest Elektronik (FestTronik)* KLHK yang menghubungkan antara penghasil limbah, pengangkut limbah, dan pengelola akhir limbah yang termonitor dan terintegrasi langsung dengan sistem KLHK.
- Pengelolaan Limbah Non B3 Menjawab tantangan dari limbah Non B3 yang dihasilkan dari limbah industri dan rumah tangga melalui aplikasi online lapak limbah (ALITA – Angkutan Limbah Logistik Industri dan Rumah Tangga).

Berikut ini berbagai jenis limbah yang telah dikelola secara terpadu :

1. Electronic dan electric waste (pembangkit listrik, distribusi listrik, rumah tangga hingga industri).
2. Fly ash dan bottom ash dari pembangkit listrik atau pabrik pupuk.
3. Daur ulang minyak goreng bekas menjadi Bio Diesel 50.
4. Pengolahan oli Bekasi dan limbah rumah sakit yang bekerjasama dengan mitra terpercaya.

Unit Pengantongan Pupuk

Unit Pengantongan Pupuk (UPP) adalah salah satu rangkaian kegiatan distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan end-user, yang bertugas untuk melakukan *finishing* proses pupuk yang telah diproduksi. PPI melalui portofolio anak perusahaan PT BGR Logistik Indonesia, menyediakan Unit Pengantongan Pupuk di beberapa area di Indonesia yang menggunakan controlling gudang secara terintegrasi untuk gudang lokal dengan *Warehouse Management System (WMS)* dan trucking melalui *Fleet Management System (FMS)*.

Waste Integrated Solution

PPI provides integrated hazardous waste management services which include collection, transportation, utilization, and management of Non-Hazardous waste.

- Hazardous Waste Management It provides an integrated solution for handling hazardous waste that is connected to the KLHK Electronic Manifest System (Fest Tronik) connecting waste producers, waste transporters, and final waste managers which is monitored and integrated directly with the KLHK system.
- Non Hazardous Waste Management It responds to the challenges of Non-Hazardous waste generated from industrial and household waste through the online application for waste stalls (ALITA – Transport for Industrial and Household Logistics Waste).

The following are various types of waste that have been managed in an integrated manner:

1. Electronic and electric waste (power generation, electricity distribution, household to industry).
2. Fly ash and bottom ash from power plants or fertilizer factories.
3. Recycling used cooking oil into Bio Diesel 50.
4. Bekasi oil processing and hospital waste in collaboration with trusted partners.

Fertilizer Packing Unit

The Fertilizer Packing Unit (UPP) is one of a series of fertilizer distribution activities from the producer to the end-user, which is tasked with finishing the fertilizer process that has been produced. PPI, through its subsidiary portfolio, PT BGR Logistik Indonesia, provides Fertilizer Packing Units in several areas in Indonesia that use integrated warehouse control for local warehouses with the *Warehouse Management System (WMS)* and trucking through the *Fleet Management System (FMS)*.



Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, And Cultural Values

Penetapan Visi Dan Misi Oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022 telah meninjau dan menyetujui bahwa Visi, Misi & Nilai-Nilai Budaya PPI yang digunakan sampai dengan saat ini masih selaras dengan potensi dan perkembangan bisnis PPI.

Perubahan terakhir atas Visi & Misi PPI dilakukan pada tahun 2022 dan telah disetujui perubahannya oleh Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Direksi No. 08/DUA/SKD/PPI/III/2022.

Vision And Mission Determination By Key Management

The Board of Commissioners and the Board of Directors who served during the fiscal year 2022 have reviewed and agreed that PPI's Vision, Mission & Cultural Values used in the present are still in line with the Company's business potential and development.

The last amendment to PPI's Vision & Mission was carried out in 2022 and the amendment was approved by the Shareholders through the Decree of the Board of Directors No. 08/DU/SKD/PPI/III/2022.





Visi | Vision

Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Terkemuka.

To be a trusted and leading worldclass national trading company.



Misi | Mission



1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan international.

To conduct general and specialized trading for food and non-food products from upstream to downstream targeting domestic and international markets.

2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.

Provide quality products, competitive prices, and usefulness to ensure customer satisfaction and establish sustainable partnerships.

3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.

Designing an integrated ecosystem that serves to support the main business in trading.

4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.

Build operational excellence through the utilization of information technology systems (data analytics) to support efficient and innovative business processes.

5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.

Ensure optimal asset utilization and relevant supporting infrastructure development with effective investment.

6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.

Improve the productivity, agility and quality of human resource performance through the development of employee capabilities and competencies.



Tagline Perusahaan

"Quality Tradelog For Everyone"

Corporate Tagline

"Quality Tradelog For Everyone"

Nilai Utama | Core Values

Core Values – Akhlak

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta anak perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan perubahan nilai-nilai perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan anak perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Core Values – Akhlak

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding Guidelines for Cultural Work of State-Owned Enterprises and their subsidiaries, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia has changed the Company's values into AKHLAK.

AKHLAK is the Core Values developed by the Ministry of SOEs in the context of the welfare of the community, with general goals for the benefit of the nation and state, and has specific goals for each SOE and its subsidiaries. The description of these values is as follows:



Amanah Trustworthy

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Trustworthy means adhering the trust given, with the expected behavior as follows:

- Fulfilling promises and commitments
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions taken
- Adhering to moral and ethical values



Kompeten Competent

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent means continuing to learn and develop capabilities, with the following expected behaviors:

- Improving self-competence to respond to dynamic challenges
- Helping others learn
- Completing tasks of the highest quality.



Harmonis Harmonious

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious means caring for each other and respecting differences, with the following expected behaviors:

- Respecting everyone regardless of background
- Helping others
- Building a conducive work environment.



Loyal Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal means being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State, with the expected behavior as follows:

- Maintaining the reputation of other employees, leaders, SOEs and the State
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal
- Obeying the leaders as long as it is not against the law and ethics.



Adaptif Adaptive

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Adaptive means continuing to innovate and being enthusiastic in moving or facing change, with the expected behaviors as follows:

- Adapting to be better quickly
- Continuously improving following technological developments
- Acting proactively



Kolaboratif Collaborative

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

Collaborative means building a synergistic collaboration with the expected behaviors as follows:

- Providing opportunities for various parties to contribute
- Being open to work together to generate added value
- Mobilizing the use of various resources for common goals

Filosofi Perdagangan

Trade Philosophy

Komersial

Sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang keuntungannya diutamakan untuk pertumbuhan usaha dan tujuan stabilisasi harga.

Commercial

As a Limited Liability Company, it aims to carry out trading activities where the profits are prioritized for business growth and price stabilization purposes.

Terukur

Setiap kebijakan dan strategi perdagangan PPI dilaksanakan secara terukur termasuk dalam menetapkan margin keuntungan agar dapat memberikan manfaat kepada setiap stakeholder.

Measurable

Every PPI trading policy and strategy is implemented sequentially, including setting profit margins to provide benefits to each stakeholder.

Sasaran dan Strategi Perusahaan

Company Target and Strategy

Sasaran Perusahaan

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 ditargetkan mencapai total aset sebesar Rp 4.348,5 miliar, total liabilitas sebesar Rp1.722,6 dan total ekuitas sebesar Rp2.625,9 miliar;
2. EBITDA sebesar Rp 126 Miliar;
3. Laporan laba rugi setelah pajak konsolidasi tahun 2021 sebesar Rp 68 Miliar;
4. Total skor Tingkat Kesehatan Perusahaan sebesar 78,5 atau Sehat (A).

Company Target

1. The consolidated financial position report as of December 31, 2022 is targeted to reach total assets of Rp 4,348.5 billion, total liabilities of Rp 1,722.6 and total equity of Rp 2,625.9 billion;
2. EBITDA of IDR 126 Billion;
3. The consolidated statement of profit or loss after tax for 2021 amounted to IDR 68 Billion;
4. The total score of the Company Health Level is 78.5 or Healthy (A).



Strategi Perusahaan

1. Restrukturisasi hutang dan keuangan;
2. *Inbreng* pembentukan holding;
3. Eksekusi merger PPI - BGR;
4. Kerjasama *sales agent* produk anggota holding;
5. Memperluas jaringan distribusi melalui kerja sama dengan UMKM/BUMDES;
6. Akuisisi dan pengembangan aplikasi Warung Pangan;
7. Membangun jaringan perdagangan dan distribusi ke *new market* (*modern, e-commerce* dan ekspor);
8. Pembentukan *Supply Chain* untuk industri FMCG;
9. Optimalisasi penjualan produk non-pangan;
10. Pengembangan jasa trading & logistik untuk produk lain (*Waste Integrated Solution*);
11. Optimalisasi *marketing* dan *sales process*;
12. Konsolidasi & restrukturisasi organisasi;
13. Sentralisasi *support services* (HR, Legal, IT, dsb);
14. Rasionalisasi aset duplikasi PPI & BGR;
15. Digitalisasi SCM Holding pangan;
16. Membangun kapabilitas data *analytics* untuk *arbitrage trading*;
17. Optimalisasi pemanfaatan aset & *footprint* distribusi (optimalisasi utilisasi Gudang, *cold storage*);
18. Mendirikan *trading hub / rep office*;
19. Integrasi & pengembangan talenta (IFFLI, *corporate culture index*, *talent program* wanita & milenial);
20. Strategi pengelolaan aset;
21. *Research & development*;
22. Pemenuhan aspek SAL.

Company Strategy

1. Debt and financial restructuring;
2. Inbreng establishment of holding;
3. PPI - BGR merger execution;
4. Cooperation with sales agents of cluster members' products;
5. Expanding distribution network through cooperation with MSMEs/BUMDES;
6. Warung Pangan app acquisition and development;
7. Build trade and distribution networks to new markets (*modern, e-commerce* and export);
8. Establishment of Supply Chain for FMCG industry;
9. Optimization of non-food product sales;
10. Development of trading & logistics services for other products (*Waste Integrated Solution*);
11. Optimization of marketing and sales process;
12. Organizational consolidation & restructuring;
13. Centralization of support services (HR, Legal, IT, etc.);
14. Rationalization of PPI & BGR duplicative assets;
15. SCM Holding food digitalization;
16. Building data analytics capabilities for arbitrage trading;
17. Optimization of asset utilization & distribution footprint (optimization of Warehouse utilization, cold storage);
18. Establish trading hub / rep office;
19. Talent integration & development (IFFLI, corporate culture index, women & millennial talent program);
20. Asset management strategy;
21. Research & development;
22. Fulfillment of SAL aspects.

5 Prioritas Strategi BUMN

5 SOE Priority Strategies

PPI dalam mencanangkan rencana Strategis Korporasi yang akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan sebagai BUMN yang profesional, mandiri, unggul dan berdaya saing, serta berkontribusi maksimal pada internalisasi 5 (lima) Strategi Prioritas BUMN, antara lain:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan;
2. Inovasi Model Bisnis Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada *core business*.

PPI has launched a Corporate Strategic plan which will serve as a guideline in achieving its goals as a professional, independent, superior and competitive SOE, as well as contributing maximally to the internalization of 5 (five) SOE Priority Strategies, including:

1. Economic and Social Value for Indonesia Increasing economic value and social impact, especially in the fields of food security, energy, and health;
2. Business Model Innovation Restructuring the business model by developing ecosystem, collaboration, developing stakeholder need, and focusing on core business.



3. Kepemimpinan Teknologi Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelligence, dan lain-lain;
4. Peningkatan Investasi Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat;
5. Pengembangan Talenta Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

3. Technology Leadership Leading globally in strategic technology and institutionalizing digital capabilities such as data management, advanced management, big data, artificial intelligence, and others;
4. Investment Increase Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem;
5. Talent Development Educating and training the workforce, developing quality human capital for Indonesia, professionalizing governance and HC selection system.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Company Purpose and Objectives

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar PPI, adapun maksud dan tujuan pendirian PPI adalah melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PPI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PPI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

As stated in article 3 of PPI's Articles of Association, the purpose and objective of establishing PPI is to conduct business in the trade sector in general, as well as to optimize the utilization of PPI's resources to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/ pursue profits in order to increase the value of PPI by implementing the principles of a Limited Liability Company.

Identitas dan Logo Perusahaan

Corporate Identity and Logo



Penjelasan Logo

- Simbol “P” pada logo menunjukkan PPI merupakan perusahaan perdagangan terpercaya di Indonesia.
- Warna **Orange** melambangkan dinamis dan bijaksana.
- Warna **Biru** melambangkan percaya diri, kemandirian, teknologi, dan tanggung jawab.

Penjelasan Logo

- The “P” symbol in the logo indicates that PPI is a trusted trading company in Indonesia.
- Orange color symbolizes dynamism and wisdom.
- Blue color symbolizes confidence, independence, technology, and responsibility.

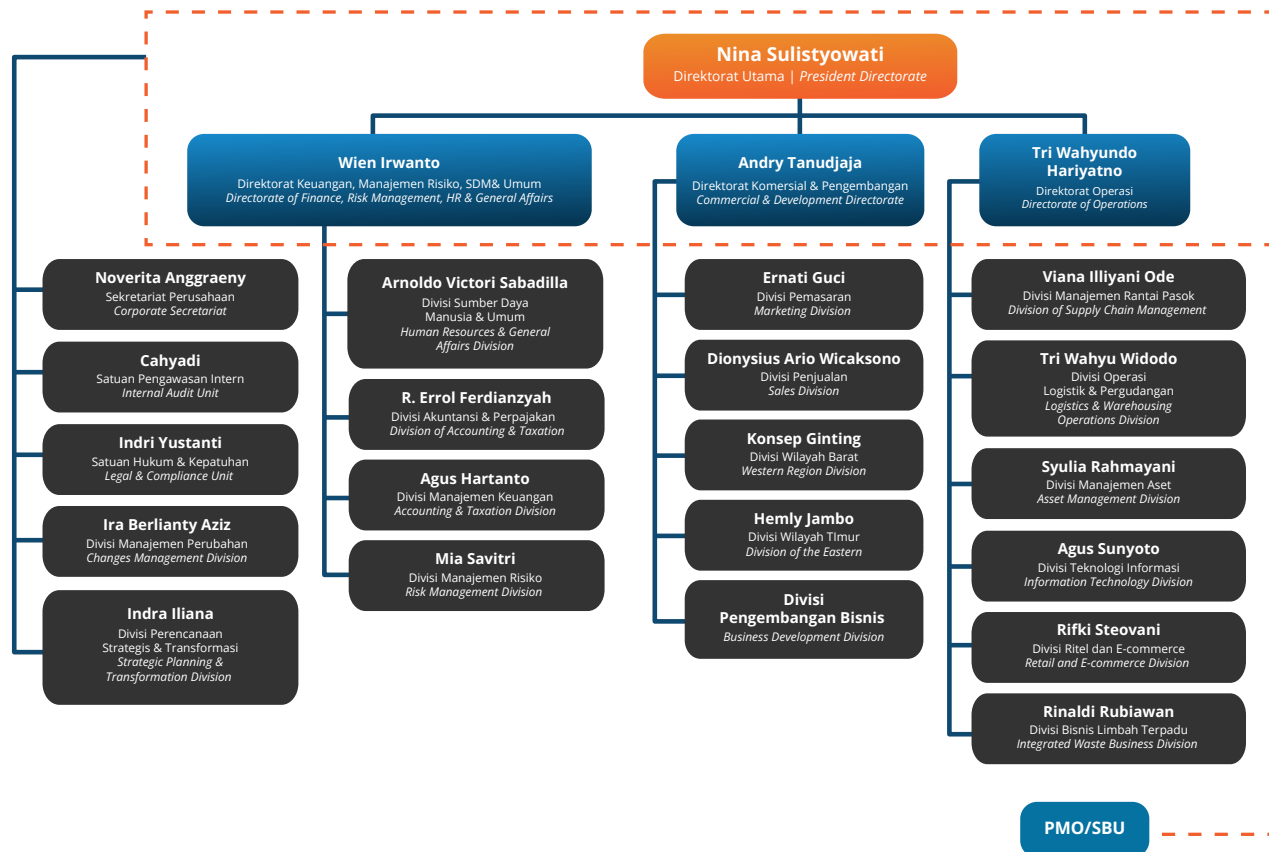


Struktur Organisasi

Organizational Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Nomor: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, susunan organisasi PPI adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 51/DU/SKD/PPI/XXI/2021 concerning Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, the organizational structure of PPI is as follows:





Manajemen dan Pejabat Perusahaan

Management and Corporate Officers

PPI melakukan pergantian komposisi Dewan Komisaris sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PPI tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

PPI changed the composition of the Board of Commissioners in accordance with the resolution of the PPI General Meeting of Shareholders dated December 22, 2022 as follows:

Dewan Komisaris Board Of Commissioners			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
Periode per 02 Desember 2021 - 22 Desember 2022 Period as of December 02, 2021 - December 22, 2022			
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 No. SK-93/MBU/03/2021 dated March 19, 2021	November 2020 - Sekarang November 2020 - Present
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Presentt
Periode per 22 Desember 2022 – sekarang Period as of December 22, 2022 - present			
Bara Krishna Hasibuan	Komisaris Utama President Commissioner	No: SK-291/MBU/XII/2022 dan No:105/Kep.PS/ RNI.01/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022. No. SK-291/MBU/XII/2022 SK-291/MBU/XII/2022 and No:105/Kep.PS/RNI.01/ XII/2022 dated December 22, 2022.	Desember 2022 – Sekarang December 2022 – Present



Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present

Selama tahun 2022 PPI melakukan pergantian komposisi Direksi dengan susunan sebagai berikut:

During 2022 PPI changed the composition of the Board of Directors with the following composition:

Direksi Board of Directors			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	No: SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 No: SK- 92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No: SK-221/MBU/07/2021	Juli 2021 – Sekarang July 2021 – Present
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 No. SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No: SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 april 2020 No: SK-381/MBU/12/2021 dated April 2, 2020	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR)



Laporan Keuangan
Audited Financial Report





Profil Dewan Komisaris

Profile Of The Board Of Commissioners



BARA KRISHNA HASIBUAN

Komisaris Utama

President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia.
Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 1970.
Saat ini berusia 52 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Indonesia.
He was born in Jakarta, on August 20, 1970.
Currently 52 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-291/MBU/XII/2022 dan Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) nomor: 105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 selaku para Pemegang Saham tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- S1 dari Universitas Boston Amerika Serikat tahun (1994), kemudian dilanjutkan dengan mengambil gelar master jurusan ilmu politik di universitas yang sama;
- Magister Public Administration dari Harvard Kennedy School of Government.

Riwayat Karier

- Beliau pernah bekerja di Kongres Amerika Serikat, sbg anggota staff Komisi Hubungan Internasional House of Representatives (DPR) (2002-2003);
- Direktur Utama di HD Asia Advisory (2005-2010);
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 Komisi 7 membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pendidikan tinggi;
- Anggota Dewan Penasehat USINDO (the United States Indonesia Society) yg berbasis di Washington DC.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau juga menjadi Anggota Staff Khusus Menteri Perdagangan RI.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-291/MBU/XII/2022 and Decree of the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) number: 105/Kep.PS/RNI.01/XII/2022 dated December 22, 2022 as Shareholders regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Education History

- Bachelor's degree from Boston University USA in (1994), then continued by taking a master's degree majoring in political science at the same university;
- Master of Public Administration from Harvard Kennedy School of Government.

Career History

- He has worked in the United States Congress, as a staff member of the International Relations Commission of the House of Representatives (DPR) (2002-2003);
- President Director at HD Asia Advisory (2005-2010);
- Member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) for the period 2014-2019 Commission 7 in charge of energy, mineral resources, environment and higher education;
- Member of the Advisory Board of USINDO (the United States Indonesia Society) based in Washington DC.

Concurrent Position

Currently, he is also a Member of the Special Staff of the Indonesian Minister of Trade.

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, or the majority/ controlling shareholders.



HAMLI

Komisaris

Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.
Beliau lahir di Sampang, tanggal 4 Juli 1962.
Saat ini berusia 60 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.
He was born in Sampang, July 4, 1962.
Currently 60 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November (1987);
- Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999).

Education Background

- Bachelor of Engineering, majoring in Chemical Engineering from Sepuluh November Institute of Technology (1987);
- Master of Economics from University of Indonesia (1999).

Riwayat Karier

- Letnan Satu Polisi (1 Mei 1989);
- Perwira Unit Balistik Metalurgi Forensik, Bareskrim Polri (1989-1995);
- Perwira Unit Bahan Peledak Forensik, Bareskrim Polri (1995-1999);
- Kepala Sub-Bagian Program dan Anggaran, Bareskrim Polri (1999-2001);
- Kepala Sub-Bidang Senjata Api dan Bahan Peledak, Bareskrim Polri (2001-2003);
- Kepala Bagian Perencanaan Puslabfor, Bareskrim Polri (2003-2005);
- Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Bareskrim Polri (2005-2009);
- Analis Utama, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2009-2010);
- Kepala Bidang Fisika Forensik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri (2010);

Career History

- First Lieutenant of Police (May 1, 1989);
- Forensic Metallurgy Ballistics Unit Officer, Criminal Investigation Unit (1989-1995);
- Forensic Explosives Unit Officer, Criminal Investigation Unit (1995-1999);
- Head of Program and Budget Sub-Division, Criminal Investigation Unit (1999-2001);
- Head of Firearms and Explosives Sub-Division, Criminal Investigation Unit (2001-2003);
- Head of Planning Section of Puslabfor, Criminal Investigation Unit (2003-2005);
- Deputy Head of Forensic Laboratory, Denpasar Branch, Criminal Investigation Unit (2005-2009);
- Principal Analyst, Forensic Laboratory Center, National Police Criminal Investigation Unit (2009-2010);
- Head of Forensic Physics Division, Forensic Laboratory Center, Criminal Investigation Unit of the National Police (2010);



- Kepala Bagian Operasi - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2010-2014);
- Analis Kebijakan Bidang Penindakan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2014-2015);
- Kepala Bidang Pencegahan - Densus 88 Anti-Terror, Polri (2015-2017).

Rangkap Jabatan

- Direktur Pencegahan BNPT (2017 - sekarang);
- Dosen/Pengajar (2010 - sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

- Head of Operations Section - Densus 88 Anti-Terror, National Police (2010-2014);
- Policy Analyst for Enforcement - Densus 88 Anti-Terror, Police (2014-2015);
- Head of Prevention Section - Densus 88 Anti-Terror, Police (2015-2017).

Concurrent Position

- Director of Prevention BNPT (2017 - present);
- Lecturer/Teacher (2010 - present).

Affiliation Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors, or the majority/ controlling shareholders.





SETIAWAN WANGSAATMAJA

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung, Indonesia.
Beliau lahir di Bandung, pada tanggal 26 Agustus 1963.
Saat ini berusia 59 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in Bandung, Indonesia.
He was born in Bandung, on August 26, 1963.
Currently 59 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor: SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Lingkungan ITB (1989);
- Magister Sanitary Engineering IHE DELFT (1994);
- Magister Environmental Engineering Asian Institute of Technology (1997);
- Doktor Teknik Lingkungan ITB (2004).

Riwayat Karier

- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2008 -2013);
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013 – 2020);
- Sekretaris Daerah - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2020 – Sekarang).

Rangkap Jabatan

Sekretaris Daerah Jawa Barat (2020 – sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number: SK-385/MBU/12/2021 dated December 02, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners Company (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Educational Background

- Bachelor of Environmental Engineering, ITB (1989);
- Master of Sanitary Engineering, IHE DELFT (1994);
- Master of Environmental Engineering, Asian Institute of Technology (1997);
- Doctor of Environmental Engineering, ITB (2004).

Professional Experience

- Head of the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) - West Java Government (2008 -2013);
- Deputy for Apparatus Human Resources – Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (2013 – 2020);
- Regional Secretary - Regional Government of West Java (2020 – Present).

Concurrent Position

Regional Secretary of West Java (2020 – present)

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.



MUHAMMAD KAPITRA AMPERA

Komisaris Independen

Commissioner Independent

Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.
Beliau lahir di Padang, pada tanggal 20 Mei 1966.
Saat ini berusia 56 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.
He was born in Padang, on May 20, 1966.
Currently 56 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham di dalam RUPS PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum – Jurusan Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991);
- Magister Hukum – Jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2005);
- Doktor Hukum – Jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2016).

Riwayat Karier

Beliau merupakan seorang ahli hukum yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki Firma Hukum bernama M. Kapitra Ampera & Associates. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Harian Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI).

Rangkap Jabatan

- Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) (Oktober 2018-sekarang);
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (Oktober 2018-April 2020).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the shareholder in the GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) No. SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Education Background

- Bachelor of Law – Majoring in Criminal Law from Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991);
- Master of Law – Department of Constitutional Law from Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2005);
- Doctor of Law – Department of Constitutional Law from Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (2016).

Career History

He is a legal expert who works as a lawyer and owns a Law Firm named M. Kapitra Ampera & Associates. Currently he also serves as the Chief Executor of Association of Indonesian Lawyers Advocates (HAPI).

Concurrent Position

- Expert Staff to the Head of the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) (October 2018-present);
- Independent Commissioner of PT Bank Syariah Mandiri (October 2018-April 2020).

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.



Profil Direksi

Profile Of The Board Of Directors



NINA SULISTYOWATI

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, Indonesia.
Beliau lahir di Bandung, pada tanggal 6 Juni 1964.
Saat ini berusia 58 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in Bekasi, Indonesia.
She was born in Bandung, on June 6, 1964.
Currently 58 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Padjadjaran, Bandung (1988);
- Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2009).

Riwayat Karier

- VP Strategic Planning & Business Development Dit. Marketing PT Pertamina (Persero) (Januari 2011 – April 2017);
- Pj. Direktur Utama PT Pertamina Lubricants (10 – 12 April 2017);
- Direktur Marketing & IT PT Garuda Indonesia (selanjutnya nomenklatur disesuaikan menjadi Direktur Niaga Domestik) (April 2017 – September 2018);
- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Januari 2019 – Juni 2020).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Educational Background

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Padjadjaran University, Bandung (1988);
- Master of Management from the Faculty of Economics at Gadjah Mada University (2009).

Professional Experience

- VP Strategic Planning & Business Development Dit. Marketing of PT Pertamina (Persero) (January 2011 – April 2017);
- Acting President Director of PT Pertamina Lubricants (April 10 – 12, 2017);
- Director of Marketing & IT of PT Garuda Indonesia (hereinafter the nomenclature was adjusted to become Director of Domestic Commerce) (April 2017 – September 2018);
- President Director of PT Pertamina Patra Niaga (January 2019 – June 2020).

Concurrent Position

She does not have any concurrent positions in other companies.

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.



WIEN IRWANTO

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum

Director of Finance, Risk Management, HC and General Affairs

Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia
Beliau lahir di Surabaya, pada tanggal 7 Juni 1972.
Saat ini berusia 50 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.
He was born in Surabaya, on June 7, 1972.
Currently 50 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan (1996);
- Magister Ekonomi – Jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2009).

Riwayat Karier

- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Portfolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2009);
- Kepala Sub-Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2009);
- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Transaksi, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI (2012);
- Kepala Sub-Direktorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI (2015-2016);

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-221/MBU/07/2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Education Background

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics at Parahyangan Catholic University (1996);
- Master of Economics – Department of Islamic Economics of the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2009).

Professional Experience

- Head of Sub-Directorate of Government Securities Portfolio Management, Directorate of Government Securities, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009);
- Head of Sub-Directorate of Financial Analysis and Government Securities Market, Directorate of Government Securities, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009);
- Head of Sub-Directorate of Transaction Management, Directorate of Sharia Financing, Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012);
- Head of Sub-Directorate of State Sharia Securities Transaction Management, Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2015-2016);



- Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II, Kementerian BUMN RI (2016-2019);
- Komisaris PT Mandiri Sekuritas (2019);
- Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I, Kementerian BUMN RI (2019);
- Direktur Komersil PTPN XII (2019-2020);
- Komisaris PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021).

- Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services & Consultants II, Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia (2016-2019);
- Commissioner of PT Mandiri Sekuritas (2019);
- Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I, Ministry of SOEs (2019);
- Commercial Director of PTPN XII (2019-2020);
- Commissioner of PT Rolas Nusantara Medika (2019-2021).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Concurrent Position

She does not have any concurrent positions in other companies.

Affiliation

He is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.





ANDRY TANUDJAJA

Direktur Komersial & Pengembangan

Director of Commercial & Development

Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.
Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 8 Juni 1971.
Saat ini berusia 51 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.
He was born in Jakarta on June 8, 1971.
Currently 51 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

D3 Pariwisata

Riwayat Karier

- Vice President PT Recapital, Jakarta (2003 – 2005);
- Vice President MF Global Pte Ltd, Singapura (2005 – 2008);
- Direktur Utama & Pemilik PT Finenz Indonesia, Jakarta (2009 – 2017);
- Direktur Utama & Pemilik PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010 – 2017).

Rangkap Jabatan

- Komisaris PT Finenz Indonesia, Jakarta (2017 – sekarang);
- Komisaris PT Dhanadipa Karya Adhika (2019 – sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-92/MBU/03/2021 dated March 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Educational Background

Diploma in Tourism

Professional Experience

- Vice President of PT Recapital, Jakarta (2003 – 2005);
- Vice President of MF Global Pte Ltd, Singapura (2005 – 2008);
- President Director & Owner of PT Finenz Indonesia, Jakarta (2009 – 2017);
- President Director & Owner of PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010 – 2017).

Concurrent Position

- Commissioner of PT Finenz Indonesia, Jakarta (2017 – present);
- Commissioner of PT Dhanadipa Karya Adhika (2019 – present).

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.



TRI WAHYUNDO HARIYATNO

Direktur Operasi
Director of Operations

Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.
Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 3 April 1972.
Saat ini berusia 50 tahun.

*Indonesian citizen, domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.
He was born in Jakarta on April 3, 1972.
Currently 50 years old.*

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 april 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2007).

Riwayat Karier

- General Manager Pemasaran PT Trans Pacific Jaya (2013 – 2014);
- Deputy Director Teknik dan Operasi PT Trans Pacific Jaya (2014-2016);
- General Manager Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi BGR (2016 – 2019);
- Vice President Supply Chain dan WIS BGR (2019);
- Direksi Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi (2019-2021).

Organisasi/Asosiasi yang Diikuti

- Anggota - ICIO-Community Chief Information Officer Indonesia (2021);
- Anggota - ISACA (Internal System Auditor and Control Association) (2017 – 2021);
- Anggota - Asosiasi Logistik Indonesia (2008).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Dewan Komisaris, Direksi lain, maupun dengan pemegang saham utama/pengendali.

Legal Basis for Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-381/MBU/12/2021 dated April 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Educational Background

Bachelor of Financial Management from the Faculty of Economics at the University of Indonesia (2007).

Professional Experience

- General Manager of Marketing of PT Trans Pacific Jaya (2013 – 2014);
- Deputy Director of Engineering and Operations of PT Trans Pacific Jaya (2014-2016);
- General Manager of Business Development and Information Technology of BGR (2016 – 2019);
- Vice President of Supply Chain and WIS of BGR (2019);
- Director of Business Development and Information Technology (2019-2021).

Organization/Association

- Member - ICIO-Community Chief Information Officer Indonesia (2021);
- Member - ISACA (Internal System Auditor and Control Association) (2017 – 2021);
- Member - Asosiasi Logistik Indonesia (2008).

Concurrent Position

She does not have any concurrent positions in other companies.

Affiliation

She is not affiliated with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the majority/controlling shareholders.



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Jumlah Karyawan

Per 31 Desember 2022, jumlah karyawan PPI tercatat sebanyak **1.460 orang** yang terdiri dari pegawai PPI sebanyak 527 orang dan pegawai PPI yang ditugaskan ke anak perusahaan sebanyak 933 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.437 orang.

Uraian lengkap mengenai demografi karyawan PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Number of Employees

As of December 31, 2022, the number of PPI employees on a consolidated basis with its subsidiaries was recorded at **1,460** people, consisting of 527 PPI employees and 933 PPI employees assigned to subsidiaries. This number has increased compared to the previous year of 1,437 people.

The description of PPI's employee demography for the last 3 (three) years is presented in the following tables:

Jumlah Karyawan Number of Employees					
Level Organisasi Organization Level	2022			2021	2020
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Total
Jumlah Karyawan Number of Employees	527	933	1.460	1.437	449

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Employee Composition by Position								
Level Organisasi Organization Level	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Kepala Divisi Head of Division	19	9	28	1,92	68	4,73	-	-
Kepala Cabang Head of Branch	31	18	49	3,36	32	2,23	-	-
Fungsional Utama Main Functional	6	-	6	0,41	-	-	-	-
Spesialis Utama Senior Specialist	-	1	1	0,07	6	0,42	-	0
Manager Manager	83	64	147	10,07	135	9,39	70	14,00



Fungsional Madya Intermediate Functional	1	-	1	0,07	-	-	-	-
Spesialis Madya Middle Specialist	-	21	21	1,44	20	1,39	1	0,20
Kepala Gudang Head of Warehouse	22	264	286	19,59	305	21,22	28	5,60
Asisten Manager Assistant Manager	78	107	185	12,67	153	10,65	55	11,00
Officer	154	413	567	38,84	568	39,53	-	-
Fungsional Muda Young Functional	4	-	4	0,27	-	-	-	-
Salesman	69	18	87	5,96	78	5,43	81	16,20
Apoteker Pharmacist	29	-	29	1,99	32	2,23	30	6,00
Kasir Cashier	27	18	27	1,85	40	2,78	27	5,40
Management Trainee	0	-	0	0,00	0	0,00	19	3,80
Tenaga Dasar Basic Staff	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Supir Driver	4	-	4	0,27	0	0,00	0	0,00
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00

* Pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur untuk jabatan *Senior Manager* telah diganti menjadi Kepala Divisi, *General Manager* menjadi 32 orang, *Asisten Senior Manager* menjadi *Manager*.

* In 2021, there were changes in the nomenclature, namely the position of Senior Manager which was changed to Division Head, General Manager to 32 people, Assistant Senior Manager to Manager.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan Employee Composition by Position Function								
Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Komersial Commercial	279	640	919	62,95	861	59,92	272	54,51
Non – Komersial Non-Commercial	248	293	541	37,05	576	40,08	227	45,49
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00



Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pria Male	338	795	1133	77,60	970	32,50	307	61,52
Wanita Female	189	138	327	22,40	467	67,50	192	38,48
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Educational Attainment

Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<SMA < High School	84	466	550	37,67	541	37,65	110	22,04
Diploma-1 Diploma	5	11	16	1,10	2	0,14	-	-
Diploma-2 Diploma	1	-	1	0,07	-	-	-	-
Diploma-3 Diploma	45	104	149	10,21	158	11,00	48	9,62
Strata-1 Bachelor's Degree	347	330	677	46,37	674	46,90	321	64,33
Strata-2 Master's Degree	44	22	66	4,52	61	4,24	29	5,81
Strata-3 Doctorate	1	-	1	0,07	1	0,07	-	-
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Educational Attainment

Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Tetap Permanent	485	873	1.358	93,01	1371	95,40	428	85,77
Tidak Tetap Non-Permanent	42	60	102	6,99	66	4,60	71	14,23
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang) Employee Composition by Age (person)

Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<25 tahun years old	7	5	12	0,82	34	2,37	10	2,00
25 – 36 tahun years old	254	449	703	48,15	699	48,64	230	46,09
37 – 45 tahun years old	141	242	383	26,23	348	24,22	102	20,44
46 – 50 tahun years old	57	116	173	11,85	185	12,87	64	12,83
51 – 55 tahun years old	67	115	182	12,47	169	11,76	92	18,44
>55 tahun years old	1	6	7	0,48	2	0,14	1	0,20
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00

Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Employee Composition by Term of Office

Keterangan Description	2022				2021		2020	
	PPI	PPI Penugasan di Anak Perusahaan PPI Assignment in Subsidiary	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<5 tahun years old	198	216	414	28,36	230	16,01	371	74,35
5-10 tahun years old	127	316	443	30,34	868	60,40	86	17,23
>10-15 tahun years old	94	205	299	20,48	173	12,04	42	8,42
>15-25 tahun years old	33	64	97	6,64	40	2,78	-	-
>25 tahun years old	75	132	207	14,18	126	8,77	-	-
Jumlah Total	527	933	1.460	100,00	1.437	100,00	499	100,00

Pengembangan Kompetensi Karyawan

PPI memberikan perhatian penuh terhadap program pengembangan kompetensi karyawan untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan luas sehingga diharapkan dapat mendukung daya saing perseroan di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Employee Competency Development

PPI pays full attention to employee competency development programs to ensure the availability of competent and knowledgeable human resources so that they are expected to support the company's competitiveness in the midst of increasingly fierce industry competition.



Untuk itu, PPI menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang diselenggarakan setiap tahun dimana subjek pelatihan dan peserta yang terlibat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan kebutuhan pengembangan organisasi. Dengan adanya program dan kegiatan pelatihan tersebut diharapkan seluruh karyawan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya sesuai bidang profesi masing-masing, serta terpacu untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Jenis program pengembangan SDM yang dilaksanakan PPI di tahun ini mengacu pada Program Kerja Divisi SDM Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Sasaran Tahun 2022 yaitu 6 (empat), meliputi:

- PPIjar
- In-house Training
- BoD Training Program
- Outbound
- Public Training
- Sertifikasi

Hingga akhir 2022, sebanyak 834 PKWTT, PKWT, OS, Magang, Anak Perusahaan, Pihak Eksternal, dan Direksi telah mengikuti kegiatan *In-House Training* dan pelatihan eksternal. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut telah menghabiskan total jam pelatihan sebesar 11.350 jam.

For this reason, PPI provides training and HR competency development programs that are held annually where the training subjects and participants involved are tailored to the needs of each individual and organizational development needs. With these training programs and activities, it is expected that all employees will be more motivated to improve their qualifications according to their respective professional fields, and be encouraged to improve their abilities, skills and knowledge so that they have a positive impact on company performance.

The types of HR development programs implemented by PPI this year refer to the 2022 HR Division Work Program which has been aligned with the 2022 Goals, namely 6 (six), including:

- PPIjar
- In-house Training
- BoD Training Program
- Outbound
- Public Training
- Certification

Until the end of 2022, a total of 834 PKWTT, PKWT, OS, Interns, Subsidiaries, External Parties, and Directors have participated in In-House Training activities and external training. All training activities have spent a total of 11,350 hours of training.

Durasi (Jam) Duration (Hours)			
Keterangan Description	Manajemen Management	PKWTT, PKWT, OS, Magang, Anak Perusahaan, Pihak Eksternal PKWTT, PKWT, OS, Internship, Subsidiary, External Party	Total
In-House Training & Pelatihan Eksternal	110 Jam (4 Direksi)	11.240 Jam (830 Orang)	11.350 Jam (834 Orang)
In-House Training & External Training	110 Hours (4 Directors)	11,240 Hours (830 People)	11,350 Hours (834 People)

Biaya Pengembangan Kompetensi SDM

PPI juga telah merealisasikan biaya investasi sebesar **Rp1.544.814,087** untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan, termasuk kegiatan Magang. Nominal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan sudah terjadi pemulihan dari Era Pandemi.

Secara rinci, program kompensasi karyawan yang dilakukan PPI pada tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

Employee Competency Development

PPI has also realized investment costs of **Rp1,544,814,087** to conduct employee training and development activities, including Internship activities. This nominal has increased compared to 2021 due to the recovery from the Pandemic Era.

In detail, the employee compensation programs carried out by PPI in 2022 include the following:





No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
1	Induction & Orientation - Hari 1	06 Januari 2022 January 06, 2022	In-House Training	Pengenalan karyawan PT Bhandha Graha Reksa (Persero) yang bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Introduction of PT Bhandha Graha Reksa (Persero) employees who joined PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	online
2	Induction & Orientation - Hari 2	07 Januari 2022 January 07, 2022	In-House Training	Pengenalan karyawan PT Bhandha Graha Reksa (Persero) yang bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Introduction of PT Bhandha Graha Reksa (Persero) employees who joined PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	online
3	Certified Risk Profesional	07 Januari 2022 January 07, 2022	Public Training	Peningkatan kompetensi karyawan yang menangani manajemen risiko di lingkungan IDFOOD group agar penerapan dapat sesuai sasaran. Increasing the competence of employees who handle risk management within the IDFOOD group so that the implementation can be on target.	online
4	Pengajuan dan Transisi Online Single Submission Versi 1.1 Menjadi Online Single Submission - Berbasis Risiko Submission and Transition of Online Single Submission Version 1.1 to Online Single Submission - Risk Based	12 Januari 2022 January 12, 2022	Public Training	- Pemahaman penerapan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Understanding of the implementation of risk-based business licensing based on the implementing regulations of the Job Creation Law. - Pemahaman implementasi OSS RBA Understanding of OSS RBA implementation.	online
5	PPIjar - Corporate Culture	14 Januari 2022 January 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait budaya Perusahaan sebagai bentuk penanaman kompetensi inti yang harus dimiliki seluruh karyawan. Refreshment related to the Company's culture as a form of instilling core competencies that must be possessed by all employees.	online



6	PPIjar-HSE Induction	18 Januari 2022 January 18, 2022	In-House Training	Refreshment bahaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan. Refreshment on occupational safety and health hazards for all employees.	online
7	Webinar "The Future of Work After Pandemic Era"	27 Januari 2022 January 27, 2022	Public Training	Mengetahui trend SDM terkait perubahan cara kerja dalam merancang strategi pengelolaan SDM pasca pandemi dan cara memanfaatkan dampak pandemi untuk dijadikan sebagai peluang dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Knowing HR trends related to changes in the way of working in designing post-pandemic HR management strategies and how to take advantage of the impact of the pandemic to serve as an opportunity to achieve the Company's vision and mission.	online
8	Seminar K3 OHS Seminar	11 Februari 2022 February 11, 2022	In-House Training	Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan budaya K3 untuk semua karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya K3 untuk diimplementasikan pada perilaku sehari-hari. Providing knowledge about the importance of implementing an OHS culture for all employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in order to increase awareness regarding the importance of OHS to be implemented in daily behavior.	online
9	PPIjar - BUMN Are you Ready for Disruption?	18 Februari 2022 February 18, 2022	In-House Training	Refreshment terkait perkembangan yang terjadi pada saat ini yang dilatarbelakangi oleh inovasi yang menimbulkan penyesuaian terhadap sistem dan tatanan bisnis Refreshment related to current developments that occur against the background of innovations that cause adjustments to business systems and arrangements.	online



10	Ujian Certified Internal Auditor (CIA) - Part 1 - Essentials of Internal Auditing	22 Februari 2022 February 22, 2022	Sertifikasi Certification	Persyaratan Certified Internal Auditor (CIA). Certified Internal Auditor (CIA) Requirements.	offline
11	CFO School	23 Februari 2022 February 23, 2022	Public Training	Pembekalan terkait: • Corporate Growth • Avoiding Financial Decision Making Traps Related briefings: • Corporate Growth • Avoiding Financial Decision Making Traps	online
12	PPIjar - Procurement	14 Maret 2022 March 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup organisasi. Refreshment related to the procedures for procurement of goods and services within the scope of the organization.	online
13	Sertifikasi Kompetensi Public Relations Tahun 2022 Public Relations Competency Certification in 2022	17 - 18 Maret 2022 March 17 - 18, 2022	Sertifikasi Certification	Agar tenaga humas semakin handal dengan berbagai kompetensi mengenai kehumasan dalam berprofesi dan membantu PPI menyiapkan ketenagakerjaan yang siap dihadapi MEA dengan percepatan penerapan SISLATERNAS yang menterpadukan pengembangan standar kompetensi dengan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi. In order for public relations personnel to be more reliable with various competencies regarding public relations in their profession and help PPI prepare employment that is ready to face the AEC by accelerating the implementation of SISLATERNAS which integrates the development of competency standards with competency-based training and competency certification.	online



14	Directorship Program “High Performance Boards”	22 - 25 Ma- ret 2022 March 22- 25, 2022	Public Training	Mendapatkan pembekalan terkait: • Dasar-dasar Manajemen Keuangan • Manajemen Risiko • Transformasi Bisnis Digital Terkemuka • Peran Business Judgment dalam Manajemen Korporasi BUMN • Kekuasaan, Politik, & Respon Krisis di Dewan Komisaris • Board Fundamental • Risk Management • Leading Digital Business Transformation • Business Judgment Role in BUMN Corporation Management • Power, Politics, & Crisis Response on the Board	online
15	Workshop PRIA 2022 - Kelas Strategic Public Relations PRIA 2022 Workshop - Strategic Public Relations Class	22 Maret 2022 March 22, 2022	Public Training	Dibutuhkan untuk memperdalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan program strategi PR untuk diterapkan di Perusahaan Needed to deepen the scientific trea- sures related to the PR strategy program to be applied in the company.	offline
16	Performance Management System	22 - 25 Ma- ret 2022 March 22- 25, 2022	Public Training	Mengetahui cara penyusunan KPI yang baik dan benar untuk mempelajari pengelolaan kinerja yang baik dan benar Know how to prepare good and cor- rect KPIs to learn good and correct performance management.	online
17	Outbond Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum Outbound Directorate of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs	25 - 27 Ma- ret 2022 March 25 - 27, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum. Building employee engagement in the Directorate of Finance, Risk Manage- ment, Human Resources, and General Affairs.	offline
18	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	28 Maret s.d 8 April 2022 March 28 to April 8, 2022	Sertifikasi Certification	Pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi (terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP). Fulfillment of standards and compe- tency certification (licensed by the National Professional Certification Agency/BNSP).	online



19	Privat Coaching The Power of Intuition In Leadership	24 Maret s.d 07 April 2022 March 24 to April 07, 2022	Public Training	• Mengembangkan afirmasi dan visualisasi. • Meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan menjaga kepekaan holistic dengan kecerdasan intuisi. • Meningkatkan kreatifitas mental melalui keseimbangan, komitmen, dan pengenalan diri guna pengambilan keputusan yang tepat. • Melatih intuisi sebagai kelengkapan diri dalam menjalankan bisnis Perusahaan. • Develop affirmations and visualizations. • Enhance quick thinking skills and maintain holistic sensitivity with intuitive intelligence. • Enhance mental creativity through balance, commitment, and self-recognition to make the right decisions. • Train intuition as self-sufficiency in running the Company's business.	offline
20	Certified Human Resources Program Basic 4.0	04 - 28 April 2022 April 04 - 28, 2022	Sertifikasi Certification	Untuk dapat melengkapi dan mendukung kinerja di posisi Asisten Manager di SDM PT PPI. To be able to complement and support the performance in the position of Assistant Manager in HR PT PPI.	online
21	PPIjar - Monitoring & Kontrol Penginputan di ERP D365 PPIjar - Monitoring & Controlling Inputs in ERP D365	12 April 2022 April 12, 2022	In-House Training	Refreshment terkait monitoring & kontrol penginputan di ERP D365. Refreshment related to monitoring & control of input in ERP D365.	online
22	Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Sistem OSS-RBA Technical Guidance on Filling in Investment Activity Reports in the OSS-RBA System	21 April 2022 April 21, 2022	In-House Training	Bimbingan Teknis Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Sistem OSS-RBA sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Technical Guidance on Submission of Investment Activity Reports on the OSS-RBA System in accordance with Investment Coordinating Board Regulation No. 5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Supervision.	online



23	Seminar dan Rakercab Ikatan Apoteker Indonesia Kota Cirebon 2022 Seminar and Rakercab of Indonesian Pharmacists Association of Cirebon City 2022	14 Mei 2022 May 14, 2022	Public Training	Memenuhi kebutuhan SKP pembela-jaran apoteker. Meeting the SKP learning needs of pharmacists.	offline
24	Teamwork Makes the Dream Work	03 - 04 Juni 2022 June 03 - 04, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Utama, Direktorat Operasi, dan Direktorat Komersial & Pengembangan. Building employee engagement of Main Directorate, Operations Directorate, and Commercial & Development Directorate.	offline
25	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	06 - 14 Juni 2022 June 06 - 14, 2022	Public Training	Memahami konsep komunikasi dan psikologi dalam audit. Understand the concepts of communication and psychology in auditing.	online
26	Upskilling Social Media Ranger Camp 2022	07 - 10 Juni 2022 June 07 - 10, 2022	Public Training	Untuk meningkatkan kemampuan dalam pembuatan konten share of voice pemberitaan korporasi. To improve the ability to create corporate news share of voice content.	offline
27	PPIjar - Respectful Workplace Policy	15 Juli 2022 July 15, 2022	In-House Training	Meningkatkan pemahaman mengenai cara dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif. Increase understanding of how to create a safe work environment, respect and protect human dignity, promote mutual respect, free from discrimination, exclusion, bullying and harassment and other forms of violence in order to create an inclusive, conducive and productive work environment.	online



28	PPIjar - International Commercial Term	22 Juli 2022 July 22, 2022	In-House Training	Memberikan pemahaman secara komprehensif terkait penjualan dan pembelian dalam perdagangan internasional. Provide a comprehensive understanding of selling and buying in international trade.	online
29	Pelatihan & Sertifikasi Human Capital Staff - Skema Staf Rekrutmen & Seleksi SDM Human Capital Staff Training & Certification - HR Recruitment & Selection Staff Scheme	23 Juni 2022 June 23, 2022	Sertifikasi Certification	• Menyusun uraian jabatan • Melakukan administrasi jaminan sosial • Melakukan proses rekrutmen • Melakukan proses seleksi • Compile job descriptions • Performing social security administration • Conduct the recruitment process • Conduct selection process	online
30	Pelatihan & Sertifikasi Human Capital Staff - Skema Staf Compensation & Benefits Human Capital Staff Training & Certification - Staff Compensation & Benefits Scheme	24 Juni 2022 June 24, 2022	Sertifikasi Certification	Meningkatkan pemahaman penyusunan uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, administrasi penerapan kebijakan SDM & penyusunan sistem remunerasi. Improve understanding of the preparation of job descriptions, social security administration, administration of HR policy implementation & preparation of remuneration systems.	online
31	Corporate Legal Acceleration Program	13 - 28 Juli 2022 July 13 - 28, 2022	Public Training	• Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi. • Peningkatan kemampuan atas kepatuhan perusahaan di bidang hukum (GCG, compliance). • Peningkatan pemahaman atas corporate legal dan permasalahan korporasi. Improved quality and effectiveness of litigation and non-litigation dispute resolution. Improved ability of the company's compliance in the field of law (GCG, compliance). Increased understanding of corporate legal and corporate issues.	online



32	Strategic Digital Marketing	28 - 29 Juli 2022 July 28 - 29, 2022	Public Training	- Menambah wawasan mengenai digital marketing. Add insight into digital marketing - Memperoleh strategi digital marketing yang efektif Obtain an effective digital marketing strategy	offline
33	Supervisor Development Program - Perencanaan Strategis Perusahaan Supervisor Development Program - Corporate Strategic Planning	03 Agustus 2022 August 03, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami gambaran dalam perencanaan Perusahaan dalam mencapai visi dan misi, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Understand and understand the overview of the Company's planning in achieving the vision and mission, both short-term, medium-term and long-term planning.	online
34	Supervisor Development Program - Pemasaran Supervisor Development Program - Marketing	09 Agustus 2022 August 09, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami proses bisnis pemasaran, mulai dari pemetaan pasar, analisa kebutuhan pasar, market intelligence, komunikasi dan promosi. Understand the marketing business process, from market mapping, market needs analysis, market intelligence, communication and promotion.	online
35	Supervisor Development Program - Penjualan Supervisor Development Program - Sales	10 Agustus 2022 August 10, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses penjualan yang meliputi: - Penjualan Umum - Penjualan Lain-lain Understand and understand the implementation of the sales process which includes: - General Sales - Other Sales	online
36	Supervisor Development Program - Pergudangan Supervisor Development Program - Warehousing	18 Agustus 2022 August 18, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses pergudangan yang meliputi: - Pengelolaan barang gudang - Stock point B2 - Sisdur Penghapusan Barang Rusak Understand and understand the implementation of the warehousing process which includes: - Management of warehouse goods - Stock point B2 - Damaged Goods Removal Procedure	online



37	Supervisor Development Program – Pengadaan Supervisor Development Program - Procurement	23 Agustus 2022 August 23, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses pengadaan yang meliputi: • Pengadaan lokal • Pengadaan impor • Pengadaan barang dan jasa bukan dagangan • Pengadaan lain-lain Understand and understand the implementation of the procurement process which includes: • Local procurement • Import procurement • Procurement of non-trade goods and services • Other procurement	online
38	Soft Skill for Secretary	23 Agustus 2022 August 23, 2022	Public Training	Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri. Improve competency and self-development.	online
39	Supervisor Development Program - Leadership	24 Agustus 2022 August 24, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami bagaimana berperan menjadi seorang leader yang baik, mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan mental yang menghalangi perilaku efektif sebagai seorang talenta BOD-3. Understand how to play the role of a good leader, able to identify mental barriers that hinder effective behavior as a talent BOD-3.	online
40	Supervisor Development Program - Akuntansi dan Perpajakan Supervisor Development Program - Accounting and Taxation	25 Agustus 2022 August 25, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses Akuntansi dan Perpajakan. Understand and understand the implementation of Accounting and Taxation processes.	online
41	Sertifikasi Kompetensi Public Relations Tahun 2022 Public Relations Competency Certification in 2022	26 Agustus 2022 August 26, 2022	Sertifikasi Certification	Untuk memahami standar pekerjaan sebagai public relation sehingga tim dari bagian Humas dapat semakin handal sesuai dengan kompetensinya. To understand the standard of work as public relations so that the team of the Public Relations department can be more reliable in accordance with its competence.	online



42	Brevet AB	27 - 28 Agustus 2022 August 27-28, 2022	Sertifikasi Certification	Demi kelancaran perpajakan Divisi SDM & Umum. For smooth taxation of HR & General Affair Division.	online
43	HR Supervisor Sertifikasi BNSP HR Supervisor BNSP Certification	20, 27 Agustus dan 3 September 2022 August 20, 27 and September 3, 2022	Public Training	• Peserta lebih memahami ketentuan dalam merancang SOP management sumber daya manusia Participants better understand the provisions in designing human resource management SOPs. • Peserta memahami teknik penyusunan kesepakatan kerja, menangani keluhan pekerja dan mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin Participants understand the techniques of drafting work agreements, handling worker grievances and managing the process of implementing disciplinary actions.	online
44	Workshop Strategi Penagihan Praktis dan Efektif Workshop on Practical and Effective Collection Strategies	03 September 2023 September 03, 2023	Public Training	Menambah pengetahuan dan wawasan menyelesaikan piutang macet Perusahaan. Add knowledge and insight into resolving the Company's bad debts.	online
45	Awareness SMK3	15 September 2022 September 15, 2022	In-House Training	Implementasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Implementation and certification of the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	online
46	Corporate Governance Workshop Series	20 - 22 September 2022 September 20 - 22, 2022	Public Training	Agar mendorong terciptanya tata kelola Perusahaan dengan baik dalam mencapai target-target Perusahaan. To encourage the creation of good corporate governance in achieving the Company's targets.	online
47	Brevet AB	22 - 26 September 2022 September 22-26, 2022	Sertifikasi Certification	Penyesuaian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perpajakan yang berlaku. Adjustment of financial statements in accordance with applicable accounting standards and applicable tax regulations.	online



48	PPIjar – Kopi PPIjar - Coffee	23 September 2022 September 23, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan secara komprehensif terkait pengenalan komoditas kopi yaitu berupa pengenalan kopi, proses penanaman kopi, pengolahan dan perdagangan kopi. Improve comprehensive knowledge related to the introduction of coffee commodities, namely in the form of coffee introduction, coffee planting process, coffee processing and trade.	online
49	Digital Transformation, Managing Business & Organization	26 - 30 September 2022 September 26 - 30, 2022	Public Training	- Memahami bisnis model digital Understand the digital business model - Memahami pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan bisnis Understand the utilization of technology to support business activities	online
50	E Procurement Academy BUMN Batch 3 E Procurement Academy SOE Batch 3	10 Oktober s.d 10 November 2022 October 10 to November 10, 2022	Public Training	Mengetahui kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa. Know the basic competencies of goods and services procurement.	online
51	CA Review (Profesional Level)	01 Oktober s.d 03 Desember 2022 October 01 to December 03, 2022	Public Training	Efisiensi proses bisnis khususnya di Divisi Akuntansi. Business process efficiency, especially in the Accounting Division.	online
52	Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi PBJP Level-1 Technical Guidance and Competency Test for Level-1 PBJP	06 - 09 Desember 2022 December 06 - 09, 2022	Sertifikasi Certification	Mereview peraturan pengadaan barang & jasa di Perusahaan dengan peraturan Pemerintah. Reviewing the Company's procurement regulations with Government regulations.	offline



53	Bimbingan Teknis dan Workshop Pengukuran Dampak Program TJSL Metode SROI. Technical Guidance and Workshop on Measuring the Impact of the TJSL Program using the SROI Method.	13 - 14 Oktober 2022 October 13-14, 2022	Public Training	Agar program TJSL yang dilakukan dapat lebih terukur dampaknya. In order for the TJSL program to be more measurable in its impact.	offline
54	Diskusi Hukum - Perlindungan Hukum Dari Kasus Korupsi dan Kewajiban Membayar Kerugian Bagi Manajemen Perusahaan yang Menerapkan Business Judgment Rule dan Fiduciary Duty. Legal Discussion - Legal Protection from Corruption Cases and Obligation to Pay Losses for Company Management that Apply the Business Judgment Rule and Fiduciary Duty.	14 Oktober 2022 October 14, 2022	Public Training	• Peningkatan kemampuan atas kepatuhan Perusahaan di bidang hukum (GCG, Compliance). Improved ability on the Company's compliance in the field of law (GCG, Compliance). • Peningkatan pemahaman atas corporate legal dan permasalahan korporasi. Increased understanding of corporate legal and corporate issues.	online
55	PPIjar - Produk Halal PPIjar - Halal Products	25 Oktober 2022 October 25, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan terhadap produk halal yang meliputi konsep dasar, dasar hukum, prosedur, dan isu praktikal Produk Halal. Increase knowledge of halal products which include basic concepts, legal basis, procedures, and practical issues of Halal Products.	online
56	CA Review (Profesional Level)	26 November s.d 04 Februari 2022 November 26 to February 04, 2022	Public Training	Sertifikasi dalam rangka menunjang kemampuan akuntansi secara menyeluruh. Certification in order to support comprehensive accounting skills.	online
57	E-Procement Academy BUMN Sertifikasi Nasional E-Procement Academy SOE National Certification	23 - 25 November 2022 November 23-25, 2022	Sertifikasi Certification	Mengetahui kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa Know the basic competencies of goods and services procurement	online



58	Trust Each Other, Empower One Another	21 - 22 November 2022 November 21 - 22, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Kantor Cabang, termasuk Divisi Wilayah Barat dan Timur Build employee engagement of Branch Offices, including Western and Eastern Divisions	offline
59	Managing Operational Risk	20 Desember 2022 December 20, 2022	In-House Training	Menyiapkan risk culture di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Setting up a risk culture at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Hybird
60	Managerial Risk Implementation	27 Desember 2022 December 27, 2022	In-House Training	Enterprise Risk Management Risk Management Issue Good Corporate Governance	Hybird

Rencana Pengembangan SDM Tahun 2023

HR Development Plan 2023

PPI telah menyusun rencana Program Kerja Anak Perusahaan dalam pengembangan SDM di antaranya:

PPI has developed a Subsidiary Work Program plan in HR development including:

Detail Kegiatan Activity Details	Program Kerja Work Program	Biaya Cost
Mandatory Program Pelatihan Mandatory Training Program		
Basic Development Program (BDP)	BDP, TAP, YTD, dan GDP:	-
Talent Acceleration Program (TAP)	1. Mengupdate data peserta training setiap bulan	-
Young Talent Development Program (YTD)	2. Menjembatani kebutuhan informasi mengenai training kepada karyawan	-
Group Development Program (GDP)	3. <i>Target learning hour</i> per karyawan tercapai 20 jam/tahun	-
	4. Tingkat kehadiran peserta per masing" kegiatan minimal 90% dari total karyawan yang diundang	
	1. Update trainee data every month	
	2. Bridging the need for information about training to employees	
	3. Target learning hour per employee reached 20 hours/year	
	4. Attendance rate of participants per each activity is at least 90% of the total invited employees	



Enhancement Program

Pendaftaran Skill Up Teknis Technical Skill Up Registration	Pendaftaran Skill Up Teknis: Mengikutsertakan 557 karyawan untuk diikutkan kedalam training skill up 2023 Technical Skill Up Registration: Enrolled 557 employees for skill up training in 2023.	Rp1,114,000,000
--	---	-----------------

Sertifikasi Certification	Sertifikasi: 1. Internal Audit sebanyak 7 karyawan dari Divisi SPI 2. SDM sebanyak 5 karyawan dari Divisi SDM dan Umum 3. Manajemen Risiko sebanyak 5 karyawan dari Divisi Manajemen Risiko 4. Pengadaan sebanyak 1 karyawan dari Divisi Manajemen Aset + 3 karyawan dari Divisi Manajemen Rantai Pasok 5. K3 sebanyak 1 dari Divisi Pengelolaan Bisnis Limbah Terpadu 6. target pembelajaran 20 jam/man power terpenuhi Certification: 1. Internal Audit as many as 7 employees from SPI Division 2. HR as many as 5 employees from the HR and General Division 3. Risk Management as many as 5 employees from Risk Management Division 4. Procurement as many as 1 employee from Asset Management Division + 3 employees from Supply Chain Management Division 5. K3 as many as 1 employee from Integrated Waste Business Management Division 6. Learning target of 20 hours/man power met	Rp154,000,000
------------------------------	--	---------------

Individual Development Program	Individual Development Program: 1. Target pembelajaran 20 jam/man power terpenuhi Individual Development Program: 1. Learning target of 20 hours/man power met	Rp1,325,000,000
--------------------------------	--	-----------------

Pelatihan Jabatan Position Training

Registrasi Pelatihan Jabatan Position Training Registration	Registrasi Pelatihan P2K, BMDP, MMDP, SMDP, dan DDP P2K, BMDP, MMDP, SMDP, and DDP Training Registration	-
Pelaksanaan P2K P2K Implementation	Pelaksanaan P2K untuk non-staf (BOD-4) sebanyak 4 karyawan Implementation of P2K for non-staff (BOD-4) as many as 4 employees	Rp40,739,788



Pelaksanaan P2K P2K Implementation	Pelaksanaan P2K untuk non-staf (BOD-4) sebanyak 4 karyawan Implementation of P2K for non-staff (BOD-4) as many as 4 employees	Rp40,739,788
Pelaksanaan BMDP BMDP Implementation	Pelaksanaan BMDP untuk karyawan staf / karyawan pimpinan (BOD-3) sebanyak 4 karyawan Implementation of BMDP for staff employees / leadership employees (BOD-3) as many as 4 employees	Rp49,299,980
Pelaksanaan MMDP MMDP Implementation	Pelaksanaan MMDP untuk BOD-2 sebanyak 4 karyawan Implementation of MMDP for BOD-2 as many as 4 employees	Rp59,601,916
Pelaksanaan SMDP SMDP Implementation	Pelaksanaan SMDP untuk (masa kerja di level BOD-1 1 tahun - 3 tahun) sebanyak 2 karyawan Implementation of SMDP for (tenure at BOD-1 level 1 year - 3 years) as many as 2 employees	Rp37,174,256
Pelaksanaan DDP DDP Implementation	Pelaksanaan DDP untuk BOD-1 (masa kerja level BOD-1 di atas 3 tahun) sebanyak 2 karyawan Implementation of DDP for BOD-1 (working period of BOD-1 level above 3 years) as many as 2 employees	Rp40,000,000

Executive Development Program

TNA Pengembangan Direksi dan Komisaris TNA of Directors and Commissioners Development	TNA Pengembangan Direksi dan Komisaris: 1. Memberikan masukan untuk isue yang terjadi di area direksi dan komisaris 2. Mengirimkan isu tersebut kepada Holding yang akan digunakan untuk penyusunan program pengembangan TNA of Directors and Commissioners Development: 1. Provide input for issues that occur in the area of directors and commissioners 2. Send the issues to the Holding which will be used for the preparation of the development program	-
Implementasi Program Pengembangan Direksi Implementation of the Board of Directors Development Program	Mengikutsertakan program pengembangan Direksi sebanyak 4 Direksi Participated in the Board of Directors development program as many as 4 Directors	Rp120,000,000
Implementasi Program Pengembangan Komisaris Implementation of Commissioner Development Program	Mengikutsertakan program pengembangan Komisaris sebanyak 4 Komisaris Participated in the Commissioner development program as many as 4 Commissioners	Rp100,000,000



RNI Framework Pelatihan

RNI Training Framework

Pemilihan SME untuk per masing-masing business proses

Selection of SMEs for each business process

Memetakan SME per unit bisnis untuk nanti bersama-sama membuat materi *training* sesuai dengan kompetensi teknis

Mapping SMEs per business unit to later jointly create training materials in accordance with technical competencies.

-

Training for Trainer

Membuat anggaran untuk pelatihan TOT guna mempersiapkan SME di masing-masing Perusahaan yang meliputi SME:

1. Akuntansi dan Keuangan
2. Manajemen Risiko
3. Perpajakan
4. Pemasaran
5. Penjualan
6. Pengadaan
7. *E-Commerce*
8. Aset
9. SDM

Establish a budget for TOT training to prepare SMEs in each of the Companies covering SMEs:

1. Accounting and Finance
2. Risk Management
3. Taxation
4. Marketing
5. Sales
6. Procurement
7. E-Commerce
8. Assets
9. HR

Rp49,500,000

Pelatihan untuk HC mengenai learning system

Training for HC on learning system

Menyiapkan anggaran untuk pelatihan HC terkait penyelenggaraan pelatihan untuk SME:

1. Akuntansi dan Keuangan
2. Manajemen Risiko
3. Perpajakan
4. Pemasaran
5. Penjualan
6. Pengadaan
7. *E-Commerce*
8. Aset
9. SDM

Prepare budget for HC training related to organizing training for SMEs:

1. Accounting and Finance
2. Risk Management
3. Taxation
4. Marketing
5. Sales
6. Procurement
7. E-Commerce
8. Assets
9. HR

Rp49,500,000



Pembuatan Syllabus Pelatihan Teknis Making syllabus for technical training	Pembuatan Syllabus Pelatihan Tekhnis: HC bersama-sama dengan SME menyusun syllabus pengembangan tekhnis sesuai kamus kompetensi tekhnis yang telah disusun Preparation of Technical Training Syllabus: HC together with SMEs develop the technical development syllabus as per the technical competency dictionary that has been prepared	Rp100,000,000
Pembuatan Materi Pelatihan Teknis Making Technical Training Materials	Pembuatan Materi Pelatihan Teknis: SME menyusun materi berdasarkan kompetensi teknis yang harus dikembangkan dimasing-masing bidang Preparation of Technical Training Materials: SMEs develop materials based on the technical competencies that must be developed in each field.	Rp100,000,000
Upload materi ke LMS (<i>Knowledge Management System</i>) Unggah materi ke LMS (Sistem Manajemen Pengetahuan)	Upload materi ke LMS (Knowledge Management System): HC meng-upload materi tekhnis ke LMS untuk self learning karyawan Upload materials to LMS (Knowledge Management System): HC uploads technical materials to the LMS for employee self learning.	Rp100,000,000
Lain-Lain Others	Engagment Program -Outbound Engagment Program -Teamwork setiap unit kerja Millenial Innovation Women Innovation Magang	Rp1,683,000,000 Rp530,000,000 Rp72,175,030 Rp72,175,030 Rp350,000,000

Estimasi Biaya Pelatihan | Estimated Training Costs

Rp5,846,166,000





Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Kepemilikan saham perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001 % dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian di dalam Laporan Tahunan 2022 ini PPI tidak menyajikan informasi mengenai:

1. Pemegang saham berdasarkan klasifikasi institusional;
2. Pemegang saham sampai tingkat individu;
3. Pemegang saham pengendali;
4. Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih;
5. Kepemilikan saham oleh Direksi & Dewan Komisaris; dan
6. Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar.

Berikut adalah uraian struktur kepemilikan saham PPI per 31 Desember 2022:

The company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs. The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (DPS) which is managed by the Corporate Secretary.

Therefore, in this 2022 Annual Report PPI does not present information regarding:

1. Shareholders by institutional classification;
2. Shareholders up to the individual level;
3. The controlling shareholder;
4. Shareholders with ownership of 5% or more;
5. Share ownership by the Board of Directors & Board of Commissioners; and
6. List of 20 Largest Shareholders.

The following is a description of PPI's share ownership structure as of December 31, 2022:

Struktur Kepemilikan Saham PPI per 31 Desember 2022

PPI's Share Ownership Structure

Nama Name	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Shares
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	942.744	1.000.000	Rp 942.744.000.000
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.000.000	Rp1.000.000

Hingga akhir tahun 2022, PPI tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

Until the end of 2022, PPI has not issued shares to be owned by the public, and has not traded its shares on any stock exchange.

Informasi Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci

Hingga 31 Desember 2022, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham PPI.

Information on Share Ownership by Key Management

As of December 31, 2022, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors have owned PPI's shares.



Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Information On Majority And Controlling Shareholders

No.	Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
1.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	942.744	99,9999%

Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure

Hingga tahun 2022, PPI tidak memiliki entitas asosiasi, *joint venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Adapun, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak yakni PT PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia dengan kepemilikan saham masing-masing 99,90%.

Until 2022, PPI does not have associate entities, joint ventures and Special Purpose Vehicles (SPV). Meanwhile, PPI has 2 (two) subsidiaries, namely PT PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia with 99.90% share ownership each.





Daftar Entitas Anak dan Ventura Bersama

List Of Subsidiaries and Joint Ventures

Entitas Anak

Hingga akhir tahun 2021, PPI tercatat memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT PPI Industri dan PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Subsidiary

Until the end of 2022, PPI has 2 (two) Subsidiaries, namely PT PPI Industri and PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem). The details are as follows:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri")

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri") pertama kali didirikan dengan nama PT Dharma Niaga Putera Steel berdasarkan Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H. No. 33 tanggal 18 September 1986. Selanjutnya, akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan termasuk di antaranya terkait perubahan nama PT Dharma Niaga Putera Steel menjadi PT PPI Industri sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 13 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notaris di Palembang.

Berdasarkan akta perubahan terakhir No. 38 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang, telah disetujui perubahan mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT PPI Industri. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHU-AH.01.03-0371005 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PPI Industri adalah salah satu entitas anak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri ("PPI Industri") was first established under the name PT Dharma Niaga Putera Steel based on the Notary Deed of Syamsul Hadi, S.H. No. 33 dated September 18, 1986. Subsequently, the deed of establishment was amended several times, including the change in the name of PT Dharma Niaga Putera Steel to PT PPI Industri as stated in the Deed No. 13 dated August 25, 2009 made before Henny Jeanne Pattinama, S.H., Notary in Palembang.

Based on the latest amendment deed No. 38 dated October 31, 2022 made before Kurnia Ariyani, S.H., Notary in Tangerang, the amendments to the Circular Resolution of the Shareholders of PT PPI Industri have been approved. The amendments to the Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights in a decree number AHU-AH.01.03-0371005 of 2020 dated August 27, 2020.

PPI Industri is one of the company's subsidiaries that carries out business activities in the general industrial sector in the manufacture of zinc and other building materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trade of zinc production.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)

Tahun Pendirian

Year of Establishment

1986

Tahun Pendirian

Year of Establishment

Akta Notaris Syamsul Hadi, S.H. No.33 tanggal 18 September 1986

Deed of Notary Syamsul Hadi, S.H. No.33 dated September 18, 1986



Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	18 September 1986 September 18, 1986
Domisili Domicile	Palembang
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Manufaktur dan Perdagangan Manufacture and Trade
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp.9.479.759.127
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Talang Kramat No.25 Kenten Talang Kelapa, Musi Banyuasin, PO.Box. 130 Palembang 30001 Sumatera Selatan, Indonesia Phone: (0711) 810573/810233 Fax: (0711) 810473

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PPI Industri tanggal 23 Maret 2022 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PPI Industri's Shareholders' Meeting dated March 23, 2022, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Wien Irwanto

Direksi | Board of Directors

Aswardi

Struktur Permodalan PPI Industri

Modal dasar PPI Industri adalah sebesar Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 800 saham prioritas dan 200 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

PPI Industri Capital Structure

The authorized capital of PPI Industri is Rp1,000,000,000 which is divided into 800 priority shares and 200 ordinary shares, each with a par value of Rp1,000,000 per share.



Kinerja PPI Industri

Ikhtisar kinerja PPI Industri selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PPI Industri's Performance

The summary of PPI Industry's performance throughout 2022 is as follows:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Dewan Komisaris Board of Commissioners	2022	2021	2020
Pendapatan Revenues	81.452	68.682	12.082
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	5.349	6.065	1.181
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	4.243	4.568	968

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem) didirikan Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan di PT TSV dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038- 00/BS/06/0819/0XI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta No 50 tanggal 14 Juli 2022, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia (BLI).

Berbagai layanan ditawarkan BLI seperti: *Freight Forwarding, Depo Container, EMKL/PPJK, dan Trucking/ Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Depo Container*, dan ke depan yaitu *shipping line & agency, Logistic Solution, Depo & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

Dalam 5 tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi *integrated digital logistics provider* bagi induk usaha/PPI.

Saat ini BLI mempunyai dua kantor cabang yaitu cabang Belawan & cabang Surabaya, 20 Divisi Regional; 2 UPP dan 2 Depo Yard yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan tersebut didukung dengan sistem penunjang

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) (previously known as PT Trisari Veem) was established based on notarial deed of Kurnia Ariani, S.H No.20 dated October 13, 2021. The entity increased its ownership in PT TSV by purchasing 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk totaling 1,000 shares with a value of Rp1,000,000 per share so that the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. The shares have been valued at market price based on the valuation calculation conducted by Public Appraisal Services Office Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038- 00/BS/06/0819/0XI/20 dated November 30, 2020.

Based on the latest deed of amendment by Vivi Novita Ranadireksi, S.H., M.Kn Notary in Jakarta No. 50 dated July 14, 2022, PT Trisari Veem changed its name to PT BGR Logistik Indonesia (BLI).

Various services are offered by BLI such as: *Freight Forwarding, Container Depot, EMKL / PPJK, and Trucking / Truck Trailer, Integrated Logistics Solution, Supply Chain Provider, Diversification Solution (Collateral Management Services, Record Management Services, Project Logistics), Container Depot*, and in the future, namely *shipping line & agency, Logistic Solution, Depot & Consolidation, Port Services & Stevedoring*.

In the next 5 years, BLI is projected to become an *integrated digital logistics provider* for the parent company/PPI.

Currently, BLI has two branch offices, namely Belawan & Surabaya branches, 20 Regional Divisions; 2 UPPs and 2 Depot Yards spread throughout Indonesia.

The service is supported by a supporting system that will



yang akan bermanfaat kepada para pengguna jasa BLI, seperti:

- Warehouse Integrated Application (WINA);
- Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);
- Depot Management and Agency (DENADA).

benefit BLI service users, such as:

- Warehouse Integrated Application (WINA);
- Fleet Integrated and Order Monitoring Applications (FIONA);
- Depot Management and Agency (DENADA).

PT BGR Logistik Indonesia ("BLI")

Tahun Pendirian Year of Establishment	1963
Tahun Pendirian Year of Establishment	Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S,H No.20 tanggal 13 Oktober 2021 Based on the Deed of Notary Kurnia Ariani, S,H No.20 dated October 13, 2021
Dimulainya Kegiatan Komersial Commencement of Commercial Activities	19 November 1963 November 19, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Utara
Status Status	Anak Perusahaan Subsidiary
Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa Pengurusan Transportasi Transportation Management Services
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,90%
Jumlah Aset Total Assets	Rp.131.159.531.470
Status Operasional Status of Operation	Beroperasi In operation
Alamat Address	Jl. Kalibesar Timur No. 5 – 7 Jakarta 11110 – Indonesia Telp: (021) 691 6666 Fax: (021) 690 3162 Email: info@bgrlogistics.id

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BGR Logistik Indonesia tanggal 13 Desember 2021 ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPI Industri adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Resolution of the PT BGR Logistik Indonesia Shareholders' Meeting dated December 13, 2021, the composition of the PPI Industri's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:



Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Eddi Santosa	Budi Susanto
Mochamad Aswin	Energy
Andry Tanudjaja	Syailendra

Direksi | Board of Directors

Struktur Permodalan BLI

Modal dasar BLI adalah sebesar Rp 5.000.000.000 yang terbagi atas 2 (dua) Pemegang saham yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memiliki 2.499 lembar saham dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri memiliki 1 lembar saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

BLI Capital Structure

The authorized capital of BLI is Rp 5,000,000,000 divided into 2 (two) shareholders, namely PT Perusahaan Perdagangan Indonesia owning 2,499 shares and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri owning 1 share, with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.

Kinerja BLI

Ikhtisar kinerja BLI selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BLI's Performance

The summary of BLI's performance throughout 2022 is as follows:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Dewan Komisaris Board of Commissioners	2022	2021	2020
Pendapatan Revenues	696.082.145.824	58.399.544.206	45.955.377.345
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	35.904.564.214	3.700.277.655	6.261.025.268
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	30.609.943.202	2.823.376.343	4.808.056.514

Ventura Bersama

Hingga akhir 2022, PPI tidak memiliki anak usaha dan atau penyertaan saham pada ventura bersama.

Joint Venture

Until the end of 2022, PPI has no subsidiaries and/or equity participation in joint ventures.





Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Hingga akhir tahun 2022, PPI belum pernah mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun. Oleh sebab itu, informasi terkait kronologi pencatatan saham tidak relevan untuk ditampilkan dalam Laporan Tahunan 2022.

Until the end of 2022, PPI did not list its shares on any stock exchange. Therefore, information related to the chronology of share listing is irrelevant to be presented in the 2022 Annual Report.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Other Securities Issuance Chronology

Hingga 31 Desember 2022, PPI tidak menerbitkan efek lain dalam bentuk apapun selain yang telah dijelaskan pada Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek, *corporate action*, perubahan jumlah efek, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Until December 31, 2022, PPI did not issue other securities in any form other than those described in the Chronology of Issuance and Listing of Shares above. Therefore, there is no information regarding the chronology of securities issuance, corporate actions, changes in the number of securities, the name of the stock exchange where other securities are listed, and the rating of securities.

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Supporting Professional Institutions of The Company

No.	Uraian Description	Nama dan Alamat Name and Address	Jenis & Bentuk Jasa Services	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee	Tugas & Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
1	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (UOB Plaza Building, 42nd Floor Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta Pusat 10230)	- Audit atas Laporan Keuangan PPI Audit of PPI Financial Statements - Audit Kepatuhan (PSA 62) Compliance Audit (PSA 62) - Audit Kinerja Performance Audit - Audit KPI KPI Audit - Audit atas Laporan Keuangan PKBL Audit of PKBL Financial Statements	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022	Rp.874.090.000,-	- Melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Entitas Anak Perusahaan Tahun Buku 2022 Conducting an audit of the Consolidated Financial Statements of PT PPI and Subsidiaries for the Financial Year 2022 - Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern Conducting compliance audits of laws and regulations and internal control systems



						• Melakukan jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI Performing review services on the PT PPI Performance Evaluation Report • Melakukan jasa review atas pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Performing review services on the achievement of Key Performance Indicators (KPI) • Melakukan audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2022. Conducting PKBL Financial audit for Financial Year 2022.
2	Konsultan Hukum Legal Consultant	Talita Rahma & Co	Penanganan Perkara Litigasi Litigation Case Settlement	Apabila diperlukan If required	Rp.150.000.000,-	Bantuan hukum penanganan perkara litigasi Legal Assistance for Litigation Case Settlement
		Hendrayanto & Partners	Penanganan Perkara Litigasi Litigation Case Settlement	Apabila diperlukan If required	Jasa Lawyer Rp. 1.700.000.000,- & Success Fee Rp. 1.050.000.000,- Lawyer Services Rp. 1,700,000,000,- & Success Fee Rp. 1,050,000,000,-	1. Melakukan Pendampingan Perkara Conducting Case Assistance 2. Membuat Update Laporan Perkara Update the case report
		Wahyu Purnomo & Partners	Penanganan Perkara Non Litigasi Non Litigation Case Handling	05 April 2021 - Sampai dengan Pekerjaan Selesai April 05, 2021 - Until the work is completed	Rp.2.800.000.000,-	1. Bantuan hukum penanganan perkara litigasi Legal Assistance for Litigation Case Settlement 2. Mengurai dan melakukan telaah terhadap semua Fakta Hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum Parse and conduct a review of all legal facts relating to legal issues 3. Menangani perkara hukum secara penuh Handle legal cases in full



			Penanganan Perkara Litigasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Cold Storage GD A Kelapa Gading	19 September 2017 - Sampai dengan Pekerjaan Selesai September 19, 2017 - Until the work is completed	Rp.120.000.000,-	1.Mewakili Perusahaan dalam Persidangan Representing the Company in Court 2.Melakukan Upaya penting lainnya guna kepentingan Perusahaan. Perform other important efforts for the benefit of the Company.
3	Notaris Notary	Nurhasana, SH. Jl. Mangga Besar Raya No. 1, Jakarta Barat	Pengesahan Notaris untuk Pengesahan Risalah RUPS PT PPI Tahun Buku 2021 Notary Attestation for the Ratification of the Minutes of the GMS of PT PPI for the Financial Year 2021	Agustus 2022 August 2022	Rp10.000.000	Pengesahan Notaris untuk pengesahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia No. 16 tanggal 30 Juni 2022 Notary approval for ratification of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Indonesian Trading Company No. 16th June 30th 2022
		Kurnia Ariyani, SH. Jl. Raden Saleh Raya No. 36 Karang Mulya, Kota Tangerang	Legalisir Dokumen Legalize Documents	Desember 2022 December 2022	Rp3.000.000	Legalisir dokumen untuk pengurusan izin lokasi Gudang Buduran, cabang PT PPI Surabaya Legalization of documents for the arrangement of location permits for the Buduran Warehouse, PT PPI Surabaya branch



Peta Jaringan Perdagangan PPI Dan Saluran

PPI Trade Network Map And Distribution Channels

Seluruh jaringan usaha berupa kantor-kantor cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Hal ini terus dikembangkan perseroan untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan, meningkatkan layanan sekaligus menangkap potensi industri pasar yang masih sangat besar di Indonesia.

The entire business network in the form of branch offices of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia spread across major cities in Indonesia. This is continuously developed by the Company to support trading business activities, improve services as well as capture the potential of the market industry which is still very large in Indonesia.



32 Cabang di seluruh Indonesia
32 Branches throughout Indonesia



1 Cafe Covare
1 Covare Cafes



3 Stockpoint
3 Stockpoints



6.210 Pelanggan
6.210 Costumers



Negara-negara partner ekspor
Export partner countries



Para pemasok dalam dan luar negeri
Domestic and foreign suppliers



90.000 Mitra Warung Pangan
90,000 Warung Pangan Partners



Daftar Alamat Kantor

Office Address List

Kantor Pusat | Head Office

Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, 10160
Telp. | Phone: (021) 3862141
Fax.: (021) 3862143

3 Kantor Perwakilan | 3 Representative Offices

- Australia | Australia
- Dubai | Dubai
- Belanda | Netherlands

Kantor Cabang | Branch Office

No.	Nama Cabang Name	Alamat Cabang Address
1	Ambon	Jl. Dr. Apituley 21/31, Maluku 97112. Telp. (0911) 344670, Fax. 343897
2	Balikpapan	Jl. Gajah Mada No. 22, Kalimantan Timur 76113, Telp. (0542) 410564, 424493, Fax. 422280
3	Banda Aceh	Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 181. Banda Aceh, 23126. Telp. (0651) 22231. 22093. 23080 Fax. 33150
4	Bandar Lampung	Jl. Jend. Sudirman No 22, Lampung. 35118, Telp. (0721) 266555, 266959, Fax. 266702
5	Bandung	Jl. Jawa No.12, Babakan Ciamis, Bandung 40117, Telp. (022) 4203696, 4204024, Fax. 4204027
6	Banjarmasin	Jl. R. Soeprapto No.53, Kalimantan Selatan 70114, Telp. (0511) 3352095, 3354102, Fax. 3352442, 3354157
7	Bengkulu	Jl. A. Yani No.28. Bengkulu 38116. Telp. (0736) 21024. Fax. 22130
8	Cirebon	Jl. Kebumen no. 1 Kel. Lemahwungkuk Kec. Lemahwungkuk Kata Cirebon, Jawa Barat 45111, Telp. (0231) 201153, 209765. Fax. 207368



9	Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 117, Denpasar-Bali. 80235,Telp. (0361) 222315,224104. Fax. 224104
10	Gorontalo	Jl.Cendrawasih No. 12,Gorontalo.96118.Telp. (0435) 821443 . 821042. Fax. 829944
11	Jakarta	Jalan Malaka No.7-9 DICE Jakarta, 11230,Telp.(021) 6927519, 6928030,Fax. 6911162
12	Jambi	Jl. Pangeran Hidayat No.30C Pal V Kata Baru,36128.Telp. (0741) 43246, Fax. 40269
13	Kendari	Jl. Budi Utomo RT.08 RW.03 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kata Kendari Sulawesi Tenggara 93117,Telp. (0401) 3122425. Fax.3122425
14	Kupang	Jl.Kakatua No.24 Bonipoi. Nusa Tenggara Timur 85221. Telp.(0380) 833617. 833294, Fax. 833294
15	Madiun	Jl. DR Sutomo No.33,Jawa Timur 63116,Telp. (0351) 452057, 454470, Fax. 495530
16	Makassar	Jl. Bali No.9 Kelurahan Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar 90173. Telp.(0411) 3635421. Fax. 3635361
17	Malang	Jl. Ahmad Yani Utara No.2,Jawa Timur 65126,Telp. (0341) 485995, Fax. 491864
18	Manado	Jl. Garuda no 16 Kel. Mahakeret Barat Kec. Wenang Manado,Telp. (0431) 862066, 862366. Fax. 863221
19	Mataram	Jl. T G H Saleh Hambali no 88 Bengkel Labuapi,Lombok Barat NTB 83361. Telp/Fax. (0370) 631288
20	Medan	Jl. Badur No.3 Sumatera Utara. 20151,Telp. (061) 4530933, 4156833, Fax. 4156722
21	Padang	Jl. Jend.Sudirman 37. Sumatera Barat 25215. Telp (0751) 23491. 22686,Fax. 23490
22	Palembang	Jl. Kap.A.Rivai No. 41, Sumatera Selatan 30134,Telp. (0711) 351164, 313348. Fax. 312963
23	Palu	Jl. Sungai Wera No. 4 Kel. Ujuna Kec.Palu Barat . Kade Pos 94222,Telp. (0451) 8204242. Fax. 424497
24	Pangkal Pinang	Jl. Hamidah No. 38. Taman Sari, Bangka Belitung 33121, Telp. (0717) 432557,Fax. 432779
25	Pare-Pare	Jl. Atletik No. 50 Kel. Kampung Baru. Kec.Baeukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan kode Post 91111 telp (0421) 25205, Fax. 25224
26	Pekanbaru	Jl. Nuri No.19 Sukajadi. Riau 26124,Telp. (0761) 25105. 22590, Fax. 853823
27	Pontianak	Jl. Kapten Marsan No. 3.Kalimantan Barat.78117.Telp. (0561) 732119. 734254,Fax. 734512
28	Purwokerto	Jl. Jend Sudirman No.347, Purwokerto 53116,Telp. (0281) 626935,636583. Fax. 626935, 636583
29	Semarang	Jl. Mpu Tantular No. 20, Semarang, Jawa Tengah, Telp. (024) 3546161,3545481, Fax. 3511482
30	Surabaya	Jl. Rajawali No.54. Jawa Timur 60176. Telp. (031) 3520041.3520262.Fax. 3520233
31	Surakarta	Jl. Letjend . Sutoyo No.52. Jawa Tengah 57136. Telp. (0271) 852323. 852755. Fax. 852755
32	Yogyakarta	Kompleks EMPLS. PT KAI Lempuyangan. Yogyakarta 55212. Telp. (0274) 547533,Fax. 586640



Covare Café



Covare Café & Workspace Jakarta

Jl. Abdul Muis No.8, RT.11/RW.8, Petojo Sel.,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160

Informasi Situs Web Perusahaan

Information On The Company's Website

PPI memiliki situs web resmi yang dapat digunakan oleh semua pihak yaitu <https://www.ptppi.co.id>

Seluruh informasi yang tersaji pada laman web ditampilkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web ini dioptimalkan penggunaannya sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan beragam informasi mengenai PPI kepada para pemangku kepentingan eksternal.

Pada prinsipnya, pengungkapan seluruh informasi umum perusahaan pada situs web memperhatikan 4 (empat) hal utama yang wajib diungkapkan, antara lain:

1. Informasi Umum Perseroan;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PPI has an official website that can be used by all parties, namely <https://www.ptppi.co.id>

All information presented on the web page is displayed in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The use of this website is optimized as an effective communication medium to convey information about PPI to external stakeholders.

In principle, the disclosure of all general information of the company on the website takes into account 4 (four) main things that must be disclosed, including:

1. General Information of the Company;
2. Information for Investors;
3. Information on Corporate Governance; and
4. Information on Corporate Social Responsibility

Pengelola Situs Web PPI

Pengelolaan dan pemutakhiran situs web PPI dilakukan secara profesional sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 13/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pengelolaan Website PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan dan Senior Manager Divisi Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan situs web perseroan. Perseroan juga membentuk Tim Admin Portal BUMN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/SKD/PPI/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Admin Portal BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Manager of PPI's Website

The management and updating of PPI's website is carried out in a professional manner as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 13/ DU/SKD/ POB/PPI/ IX/2018 dated September 30, 2018 concerning Standard Operating Procedures (POB) for Website Management of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Based on the Decree, the Board of Directors appointed the Corporate Secretary and Senior Manager of the Information Technology Division as the person in charge of managing the Company's website. The Company also established the SOE Portal Admin Team which was stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 28/DU/SKD/PPI/III/2017 dated March 16, 2017 regarding Establishment of the SOE Portal Admin Team for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Pemenuhan Informasi Pada Situs Web PPI

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa situs web PPI telah menyajikan informasi sebagai berikut:

Fulfillment of Information on PPI's website

Shortly, it can be concluded that PPI's website has provided the following information:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Note
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholder to the Individual End Owner	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	Tersedia pada situs web perseroan Available on the Company's website

Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri

Industrial Association Membership

Nama Asosiasi Association	Status	Lingkup Asosiasi Scope of Association
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce	Anggota Biasa Regular Member	Nasional National
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Mechanical and Electrical Technics Enterprises Association	Anggota Member	Provinsi Province
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN) Indonesian Supplier and Distributor Association	Anggota Member	Provinsi Province



Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit in 2022

Di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Kerja Audit Internal PPI telah mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan / pelatihan / seminar / lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan, antara lain:

Throughout 2022, the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and PPI's Internal Audit Unit participated in a number of educational / training / seminar / workshop activities aimed at improving the competence and capability of each individual in order to achieve the vision, mission, and the objectives of the company. The programs participated are as follows:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2022 Education and/or Training of the Board of Directors in 2022					
No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
1	CFO School	23 Februari 2022 February 23, 2022	Public Training	Pembekalan terkait: • Corporate Growth • Avoiding Financial Decision Making Traps Related briefings: • Corporate Growth • Avoiding Financial Decision Making Traps	online
2	Directorship Program "High Performance Boards"	22 - 25 Maret 2022 March 22-25, 2022	Public Training	Mendapatkan pembekalan terkait: • Board Fundamental • Risk Management • Leading Digital Business Transformation • Business Judgment Role in BUMN Corporation Management • Power, Politics, & Crisis Response on the Board Mendapatkan pembekalan terkait: • Dasar-dasar Manajemen Keuangan • Manajemen Risiko • Transformasi Bisnis Digital Terkemuka • Peran Business Judgment dalam Manajemen Korporasi BUMN • Kekuasaan, Politik, & Respon Krisis di Dewan	online



3	Outbond Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum	25 - 27 Maret 2022 March 25 - 27, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum. Building employee engagement in the Directorate of Finance, Risk Management, Human Resources, and General Affairs	offline
4	Privat Coaching The Power of Intuition In Leadership	24 Maret s.d 07 April 2022 March 24 to April 07, 2022	Public Training	• Mengembangkan afirmasi dan visualisasi • Meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan menjaga kepekaan holistic dengan kecerdasan intuisi • Meningkatkan kreatifitas mental melalui keseimbangan, komitmen, dan pengenalan diri guna pengambilan keputusan yang tepat • Melatih intuisi sebagai kelengkapan diri dalam menjalankan bisnis Perusahaan • Develop affirmations and visualizations • Enhance quick thinking skills and maintain holistic sensitivity with intuitive intelligence • Enhance mental creativity through balance, commitment, and self-recognition to make the right decisions • Train intuition as self-sufficiency in running the Company's business	offline
5	Teamwork Makes the Dream Work	03 - 04 Juni 2022 June 03 - 04, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Utama, Direktorat Operasi, dan Direktorat Komersial & Pengembangan. Building employee engagement of Main Directorate, Operations Directorate, and Commercial & Development Directorate	offline
6	Diskusi Hukum - Perlindungan Hukum Dari Kasus Korupsi dan Kewajiban Membayar Kerugian Bagi Manajemen Perusahaan yang Menerapkan <i>Business Judgment Rule</i> dan <i>Fiduciary Duty</i> Legal Discussion - Legal Protection from Corruption Cases and Obligation to Pay Losses for Company Management Applying the Business Judgment Rule and Fiduciary Duty	14 Oktober 2022 October 14, 2022	Public Training	• Peningkatan kemampuan atas kepatuhan Perusahaan di bidang hukum (GCG, Compliance) • Peningkatan pemahaman atas corporate legal dan permasalahan korporasi • Improved ability on the Company's compliance in the field of law (GCG, Compliance) • Increased understanding of corporate legal and corporate issues	online



Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretariat Perusahaan Tahun 2022

Education and/or Training of the Corporate Secretariat Division in 2022

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
1	Induction & Orientation - Hari 1	06 Januari 2022 January 06, 2022	In-House Training	Pengenalan karyawan PT Bhandra Graha Reksa (Persero) yang bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Introduction of PT Bhandra Graha Reksa (Persero) employees who joined PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	online
2	Induction & Orientation - Hari 2	07 Januari 2022 January 07, 2022	In-House Training	Pengenalan karyawan PT Bhandra Graha Reksa (Persero) yang bergabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Introduction of PT Bhandra Graha Reksa (Persero) employees who joined PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	online
3	Certified Risk Profesional	07 Januari 2022 January 07, 2022	Public Training	Peningkatan kompetensi karyawan yang menangani manajemen risiko di lingkungan IDFOOD group agar penerapan dapat sesuai sasaran Increasing the competence of employees who handle risk management within the IDFOOD group so that the implementation can be on target.	online
4	Pengajuan dan Transisi Online Single Submission Versi 1.1 Menjadi Online Single Submission - Berbasis Risiko Submission and Transition of Online Single Submission Version 1.1 to Online Single Submission - Risk Based	12 Januari 2022 January 12, 2022	Public Training	- Pemahaman penerapan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja - Pemahaman implementasi OSS RBA - Understanding of the implementation of risk-based business licensing based on the implementing regulations of the Job Creation Law - Understanding of OSS RBA implementation	online



5	PPIjar - Corporate Culture	14 Januari 2022 January 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait budaya Perusahaan sebagai bentuk penanaman kompetensi inti yang harus dimiliki seluruh karyawan. Refreshment related to the Company's culture as a form of instilling core competencies that must be possessed by all employees.	online
6	PPIjar-HSE Induction	18 Januari 2022 January 18, 2022	In-House Training	Refreshment bahaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan. Refreshment on occupational safety and health hazards for all employees.	online
7	Webinar "The Future of Work After Pandemic Era"	27 Januari 2022 January 27, 2022	Public Training	Mengetahui trend SDM terkait perubahan cara kerja dalam merancang strategi pengelolaan SDM pasca pandemi dan cara memanfaatkan dampak pandemi untuk dijadikan sebagai peluang dalam mencapai visi dan misi Perusahaan Knowing HR trends related to changes in the way of working in designing post-pandemic HR management strategies and how to take advantage of the impact of the pandemic to serve as an opportunity to achieve the Company's vision and mission.	online
8	Seminar K3 OHS Seminar	11 Februari 2022 February 11, 2022	In-House Training	Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan budaya K3 untuk semua karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya K3 untuk diimplementasikan pada perilaku sehari-hari Providing knowledge about the importance of implementing an OHS culture for all employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in order to increase awareness regarding the importance of OHS to be implemented in daily behavior.	online
9	PPIjar - Procurement	18 Februari 2022 February 18, 2022	In-House Training	Refreshment terkait perkembangan yang terjadi pada saat ini yang dilatar belakangi oleh inovasi yang menimbulkan penyesuaian terhadap sistem dan tatanan bisnis. Refreshment related to current developments that occur against the background of innovations that cause adjustments to business systems and arrangements.	online



10	Ujian Certified Internal Auditor (CIA) - Part 1 - Essentials of Internal Auditing	22 Februari 2022 February 22, 2022	Sertifikasi Certification	Persyaratan Certified Internal Auditor (CIA) Certified Internal Auditor (CIA) Requirements	offline
11	CFO School	23 Februari 2022 February 23, 2022	Public Training	Pembekalan terkait: - Corporate Growth - Avoiding Financial Decision Making Traps Related briefings: - Corporate Growth - Avoiding Financial Decision Making Traps	online
12	PPIjar - Procurement	14 Maret 2022 March 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup organisasi Refreshment related to the procedures for procurement of goods and services within the scope of the organization	online
13	Sertifikasi Kompetensi Public Relations Tahun 2022 Public Relations Competency Certification in 2022	17 - 18 Maret 2022 March 17 - 18, 2022	Sertifikasi Certification	Agar tenaga humas semakin handal dengan berbagai kompetensi mengenai kehumasan dalam berprofesi dan membantu PPI menyiapkan ketenagakerjaan yang siap dihadapi MEA dengan percepatan penerapan SISLATERNAS yang menterpadukan pengembangan standar kompetensi dengan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi In order for public relations personnel to be more reliable with various competencies regarding public relations in their profession and help PPI prepare employment that is ready to face the AEC by accelerating the implementation of SISLATERNAS which integrates the development of competency standards with competency-based training and competency certification.	online
14	Directorship Program "High Performance Boards"	22 Maret 2022 March 22, 2022	Public Training	Mendapatkan pembekalan terkait: - Board Fundamental - Risk Management - Leading Digital Business Transformation - Business Judgment Role in BUMN Corporation Management - Power, Politics, & Crisis Response on the Board	online



				Mendapatkan pembekalan terkait: • Dasar-dasar Manajemen Keuangan • Manajemen Risiko • Transformasi Bisnis Digital Terkemuka • -Peran Business Judgment dalam Manajemen Korporasi BUMN • -Kekuasaan, Politik, & Respon Krisis di Dewan Komisaris	
15	Workshop PRIA 2022 - Kelas Strategic Public Relations PRIA 2022 Workshop - Strategic Public Relations Class	22 Maret 2022 March 22, 2022	Public Training	Dibutuhkan untuk memperdalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan program strategi PR untuk diterapkan di Perusahaan Needed to deepen the scientific treasures related to the PR strategy program to be applied in the company.	offline
16	Performance Management System	22 - 25 Maret 2022 March 22-25, 2022	Public Training	Mengetahui cara penyusunan KPI yang baik dan benar untuk mempelajari pengelolaan kinerja yang baik dan benar Know how to prepare good and correct KPIs to learn good and correct performance management.	online
17	Outbond Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum Outbound Directorate of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs	25 - 27 Maret 2022 March 25 - 27, 2022	In-House Training	Membangun <i>engagement</i> karyawan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum Building employee engagement in the Directorate of Finance, Risk Management, Human Resources, and General Affairs	offline
18	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	28 Maret s.d 8 April 2022 March 28 to April 8, 2022	Sertifikasi Certification	Pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi (terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP) Fulfillment of standards and competency certification (licensed by the National Professional Certification Agency/BNSP)	online



19	Privat Coaching The Power of Intuition In Leadership	24 Maret s.d 07 April 2022 March 24 to April 07, 2022	Public Training	• Mengembangkan afirmasi dan visualisasi • Meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan menjaga kepekaan holistic dengan kecerdasan intuisi • Meningkatkan kreatifitas mental melalui keseimbangan, komitmen, dan pengenalan diri guna pengambilan keputusan yang tepat • Melatih intuisi sebagai kelengkapan diri dalam menjalankan bisnis Perusahaan • Develop affirmations and visualizations • Enhance quick thinking skills and maintain holistic sensitivity with intuitive intelligence • Enhance mental creativity through balance, commitment, and self-recognition to make the right decisions • Train intuition as self-sufficiency in running the Company's business	offline
20	Certified Human Resources Program Basic 4.0	04 - 28 April 2022 April 04 - 28, 2022	Sertifikasi Certification	Untuk dapat melengkapi dan mendukung kinerja di posisi Asisten Manager di SDM PT PPI To be able to complement and support the performance in the position of Assistant Manager in HR PT PPI	online
21	PPIjar - Monitoring & Kontrol Penginputan di ERP D365 PPIjar - Monitoring & Controlling Inputs in ERP D365	12 April 2022 April 12, 2022	In-House Training	Refreshment terkait monitoring & kontrol penginputan di ERP D365 Refreshment related to monitoring & control of input in ERP D365	online
22	Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Sistem OSS-RBA Technical Guidance on Filling in Investment Activity Reports in the OSS-RBA System	21 April 2022 April 21, 2022	In-House Training	Bimbingan Teknis Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Sistem OSS-RBA sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Technical Guidance on Submission of Investment Activity Reports on the OSS-RBA System in accordance with Investment Coordinating Board Regulation No. 5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Supervision.	online



23	Seminar dan Rakercab Ikatan Apoteker Indonesia Kota Cirebon 2022 Seminar and Rakercab of Indonesian Pharmacists Association of Cirebon City 2022	14 Mei 2022 May 14, 2022	Public Training	Memenuhi kebutuhan SKP pembelajaran apoteker. Meeting the SKP learning needs of pharmacists.	offline
24	Teamwork Makes the Dream Work	03 - 04 Juni 2022 June 03 - 04, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Utama, Direktorat Operasi, dan Direktorat Komersial & Pengembangan. Building employee engagement of Main Directorate, Operations Directorate, and Commercial & Development Directorate.	offline
25	Komunikasi dan Psikologi Audit Communication and Audit Psychology	06 - 14 Juni 2022 June 06 - 14, 2022	Public Training	Memahami konsep komunikasi dan psikologi dalam audit. Understand the concepts of communication and psychology in auditing	online
26	Upskilling Social Media Ranger Camp 2022	07 - 10 Juni 2022 June 07 - 10, 2022	Public Training	Untuk meningkatkan kemampuan dalam pembuatan konten share of voice pemberitaan korporasi. To improve the ability to create corporate news share of voice content.	offline
27	PPIjar - Respectful Workplace Policy	15 Juli 2022 July 15, 2022	In-House Training	Meningkatkan pemahaman mengenai cara dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif. Increase understanding of how to create a safe work environment, respect and protect human dignity, promote mutual respect, free from discrimination, exclusion, bullying and harassment and other forms of violence in order to create an inclusive, conducive and productive work environment.	online



28	PPIjar - International Commercial Term	22 Juli 2022 July 22, 2022	In-House Training	Memberikan pemahaman secara komprehensif terkait penjualan dan pembelian dalam perdagangan internasional Provide a comprehensive understanding of selling and buying in international trade.	online
29	Pelatihan & Sertifikasi Human Capital Staff - Skema Staf Rekrutmen & Seleksi SDM Human Capital Staff Training & Certification - HR Recruitment & Selection Staff Scheme	23 Juni 2022 June 23, 2022	Sertifikasi Certification	• Menyusun uraian jabatan • Melakukan administrasi jaminan sosial • Melakukan proses rekrutmen • Melakukan proses seleksi • Compile job descriptions • Performing social security administration • Conduct the recruitment process • Conduct selection process	online
30	Pelatihan & Sertifikasi Human Capital Staff - Skema Staf Compensation & Benefits Human Capital Staff Training & Certification - Staff Compensation & Benefits Scheme	24 Juni 2022 June 24, 2022	Sertifikasi Certification	Meningkatkan pemahaman penyusunan uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, administrasi penerapan kebijakan SDM & penyusunan sistem remunerasi Improve understanding of the preparation of job descriptions, social security administration, administration of HR policy implementation & preparation of remuneration systems	online
31	Corporate Legal Acceleration Program	13 - 28 Juli 2022 July 13 - 28, 2022	Public Training	• Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi • Peningkatan kemampuan atas kepatuhan perusahaan di bidang hukum (GCG, compliance) • Peningkatan pemahaman atas corporate legal dan permasalahan korporasi • Improved quality and effectiveness of litigation and non-litigation dispute resolution • Improved ability of the company's compliance in the field of law (GCG, compliance) • Increased understanding of corporate legal and corporate issues	online



32	Strategic Digital Marketing	28 - 29 Juli 2022 July 28 - 29, 2022	Public Training	• Menambah wawasan mengenai digital marketing • Memperoleh strategi digital marketing yang efektif • Add insight into digital marketing • Obtain an effective digital marketing strategy	offline
33	Supervisor Development Program - Perencanaan Strategis Perusahaan Supervisor Development Program - Corporate Strategic Planning	03 Agustus 2022 August 03, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami gambaran dalam perencanaan Perusahaan dalam mencapai visi dan misi, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Understand and understand the overview of the Company's planning in achieving the vision and mission, both short-term, medium-term and long-term planning.	online
34	Supervisor Development Program – Pemasaran Supervisor Development Program - Marketing	09 Agustus 2022 August 09, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami proses bisnis pemasaran, mulai dari pemetaan pasar, analisa kebutuhan pasar, market intelligence, komunikasi dan promosi. Understand the marketing business process, from market mapping, market needs analysis, market intelligence, communication and promotion.	online
35	Supervisor Development Program – Penjualan Supervisor Development Program - Sales	10 Agustus 2022 August 10, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses penjualan yang meliputi: • Penjualan Umum • Penjualan Lain-lain Understand and understand the implementation of the sales process which includes: • General Sales • Other Sales	online
36	Supervisor Development Program – Pergudangan Supervisor Development Program - Warehousing	18 Agustus 2022 August 18, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses pergudangan yang meliputi: • Pengelolaan barang gudang • Stock point B2 • Sisdur Penghapusan Barang Rusak Understand and understand the implementation of the warehousing process which includes: • Management of warehouse goods • Stock point B2 • Damaged Goods Removal Procedure	online



37	Supervisor Development Program – Pengadaan Supervisor Development Program - Procurement	23 Agustus 2022 August 23, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses pengadaan yang meliputi: • Pengadaan lokal • Pengadaan impor • Pengadaan barang dan jasa bukan dagangan • Pengadaan lain-lain Understand and understand the implementation of the procurement process which includes: • Local procurement • Import procurement • Procurement of non-trade goods and services • Other procurement	online
38	Soft Skill for Secretary	23 Agustus 2022 August 23, 2022	Public Training	Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri Improve competency and self-development	online
39	Supervisor Development Program - Leadership	24 Agustus 2022 August 24, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami bagaimana berperan menjadi seorang leader yang baik, mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan mental yang menghalangi perilaku efektif sebagai seorang talenta BOD-3 Understand how to play the role of a good leader, able to identify mental barriers that hinder effective behavior as a talent BOD-3	online
40	Supervisor Development Program - Akuntansi dan Perpajakan Supervisor Development Program - Accounting and Taxation	25 Agustus 2022 August 25, 2022	In-House Training	Mengerti dan memahami pelaksanaan proses Akuntansi dan Perpajakan Understand and understand the implementation of Accounting and Taxation processes	online
41	Sertifikasi Kompetensi Public Relations Tahun 2022 Public Relations Competency Certification in 2022	26 Agustus 2022 August 26, 2022	Sertifikasi Certification	Untuk memahami standar pekerjaan sebagai public relation sehingga tim dari bagian Humas dapat semakin handal sesuai dengan kompetensinya To understand the standard of work as public relations so that the team of the Public Relations department can be more reliable in accordance with its competence.	online
42	Brevet AB	27 - 28 Agustus 2022 August 27-28, 2022	Sertifikasi Certification	Demi kelancaran perpajakan Divisi SDM & Umum For smooth taxation of HR & General Affair Division	online



43	HR Supervisor Sertifikasi BNSP HR Supervisor BNSP Certification	20, 27 Agustus dan 3 September 2022 August 20, 27 and September 3, 2022	Public Training	1. Peserta lebih memahami ketentuan dalam merancang SOP management sumber daya manusia. 2. Peserta memahami teknik penyusunan kesepakatan kerja, menangani keluhan pekerja dan mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin. 1. Participants better understand the provisions in designing human resource management SOPs. 2. Participants understand the techniques of drafting work agreements, handling worker grievances and managing the process of implementing disciplinary actions.	online
44	Workshop Strategi Penagihan Praktis dan Efektif Workshop on Practical and Effective Collection Strategies	03 September 2023 September 03, 2023	Public Training	Menambah pengetahuan dan wawasan menyelesaikan piutang macet Perusahaan. Add knowledge and insight into resolving the Company's bad debts.	online
45	Awareness SMK3	15 September 2022 September 15, 2022	In-House Training	Implementasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Implementation and certification of the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	online
46	Corporate Governance Workshop Series	20 - 22 September 2022 September 20 - 22, 2022	Public Training	Agar mendorong terciptanya tata kelola Perusahaan dengan baik dalam mencapai target-target Perusahaan To encourage the creation of good corporate governance in achieving the Company's targets.	online
47	Brevet AB	22 - 26 September 2022 September 22-26, 2022	Sertifikasi Certification	Penyesuaian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perpajakan yang berlaku Adjustment of financial statements in accordance with applicable accounting standards and applicable tax regulations	online



48	PPIjar – Kopi PPIjar - Coffee	23 September 2022 September 23, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan secara komprehensif terkait pengenalan komoditas kopi yaitu berupa pengenalan kopi, proses penanaman kopi, pengolahan dan perdagangan kopi Improve comprehensive knowledge related to the introduction of coffee commodities, namely in the form of coffee introduction, coffee planting process, coffee processing and trade.	online
49	Digital Transformation, Managing Business & Organization	26 - 30 September 2022 September 26 - 30, 2022	Public Training	-Memahami bisnis model digital -Memahami pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan bisnis -Understand the digital business model -Understand the utilization of technology to support business activities	online
50	E Procurement Academy BUMN Batch 3 E Procurement Academy SOE Batch 3	10 Oktober s.d 10 November 2022 October 10 to November 10, 2022	Public Training	Mengetahui kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa Know the basic competencies of goods and services procurement	online
51	CA Review (Profesional Level)	01 Oktober s.d 03 Desember 2022 October 01 to December 03, 2022	Public Training	Efisiensi proses bisnis khususnya di Divisi Akuntansi Business process efficiency, especially in the Accounting Division	online
52	Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi PBJP Level-1 Technical Guidance and Competency Test for Level-1 PBJP	06 - 09 Desember 2022 December 06 - 09, 2022	Sertifikasi Certification	Mereview peraturan pengadaan barang & jasa di Perusahaan dengan peraturan Pemerintah Reviewing the Company's procurement regulations with Government regulations	offline
53	Bimbingan Teknis dan Workshop Pengukuran Dampak Program TJSL Metode SROI Technical Guidance and Workshop on Measuring the Impact of the TJSL Program using the SROI Method	13 - 14 Oktober 2022 October 13-14, 2022	Public Training	Agar program TJSL yang dilakukan dapat lebih terukur dampaknya In order for the TJSL program to be more measurable in its impact	offline



54	Diskusi Hukum - Perlindungan Hukum Dari Kasus Korupsi dan Kewajiban Membayar Kerugian Bagi Manajemen Perusahaan yang Menerapkan <i>Business Judgment Rule</i> dan <i>Fiduciary Duty</i> Legal Discussion - Legal Protection from Corruption Cases and Obligation to Pay Losses for Company Management that Apply the Business Judgment Rule and Fiduciary Duty	14 Oktober 2022 October 14, 2022	Public Training	Peningkatan kemampuan atas kepatuhan Perusahaan di bidang hukum (GCG, Compliance) Peningkatan pemahaman atas corporate legal dan permasalahan korporasi Improved ability on the Company's compliance in the field of law (GCG, Compliance) Increased understanding of corporate legal and corporate issues	online
55	PPIjar - Produk Halal PPIjar - Halal Products	25 Oktober 2022 October 25, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan terhadap produk halal yang meliputi konsep dasar, dasar hukum, prosedur, dan isu praktikal Produk Halal Increase knowledge of halal products which include basic concepts, legal basis, procedures, and practical issues of Halal Products.	online
56	CA Review (Profesional Level)	26 November s.d 04 Februari 2022 November 26 to February 04, 2022	Public Training	Sertifikasi dalam rangka menunjang kemampuan akuntansi secara menyeluruh Certification in order to support comprehensive accounting skills	online
57	E-Procement Academy BUMN Sertifikasi Nasional E-Procement Academy SOE National Certification	23 - 25 November 2022 November 23-25, 2022	Sertifikasi Certification	Mengetahui kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa Know the basic competencies of goods and services procurement	online
58	Trust Each Other, Empower One Another	21 - 22 November 2022 November 21 - 22, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Kantor Cabang, termasuk Divisi Wilayah Barat dan Timur Build employee engagement of Branch Offices, including Western and Eastern Divisions	offline



59	Managing Operational Risk	20 Desember 2022 December 20, 2022	In-House Training	Menyiapkan risk culture di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Setting up a risk culture at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Hybird
60	Managerial Implementation Risk	27 Desember 2022 December 27, 2022	In-House Training	Enterprise Risk Management Risk Management Issue Good Corporate Governance	Hybird

Pendidikan dan/atau Pelatihan Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan Tahun 2022

Education and/ or Training of the the Internal Audit Unit (IAU) in 2022

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Date	Jenis Pelatihan Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Bentuk Pelatihan Training Activity
1	PPIjar - Corporate Culture	14 Januari 2022 January 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait budaya Perusahaan sebagai bentuk penanaman kompetensi inti yang harus dimiliki seluruh karyawan. Refreshment related to the Company's culture as a form of instilling core competencies that must be possessed by all employees.	online
2	PPIjar-HSE Induction	18 Januari 2022 January 18, 2022	In-House Training	Refreshment bahaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan. Refreshment on occupational safety and health hazards for all employees.	online
3	Seminar K3 OHS Seminar	11 Februari 2022 February 11, 2022	In-House Training	Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan budaya K3 untuk semua karyawan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya K3 untuk diimplementasikan pada perilaku sehari-hari. Providing knowledge about the importance of implementing an OHS culture for all employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia in order to increase awareness regarding the importance of OHS to be implemented in daily behavior.	online



4	PPIjar - BUMN Are you Ready for Disruption?	18 Februari 2022 February 18, 2022	In-House Training	Refreshment terkait perkembangan yang terjadi pada saat ini yang dilatar belakangi oleh inovasi yang menimbulkan penyesuaian terhadap sistem dan tatanan bisnis. Refreshment related to current developments that occur against the background of innovations that cause adjustments to business systems and arrangements.	online
5	Ujian Certified Internal Auditor (CIA) - Part 1 - Essentials of Internal Auditing Certified Internal Auditor (CIA) Exam - Part 1 - Internal Audit Fundamentals	22 Februari 2022 February 22, 2022	Sertifikasi Certification	Persyaratan Certified Internal Auditor (CIA). Certified Internal Auditor (CIA) Requirements.	offline
6	PPIjar - Procurement	14 Maret 2022 March 14, 2022	In-House Training	Refreshment terkait tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup organisasi. Refreshment related to the procedures for procurement of goods and services within the scope of the organization.	online
7	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	28 Maret s.d 8 April 2022 March 28 to April 8, 2022	Sertifikasi Certification	Pemenuhan standar dan sertifikasi kompetensi (terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP). Fulfillment of standards and competency certification (licensed by the National Professional Certification Agency/BNSP).	online
8	Teamwork Makes the Dream Work	03 - 04 Juni 2022 June 03 - 04, 2022	In-House Training	Membangun engagement karyawan Direktorat Utama, Direktorat Operasi, dan Direktorat Komersial & Pengembangan. Building employee engagement of Main Directorate, Operations Directorate, and Commercial & Development Directorate.	offline



9	PPIjar - Respectful Workplace Policy	15 Juli 2022 July 15, 2022	In-House Training	Meningkatkan pemahaman mengenai cara dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif. Increase understanding of how to create a safe work environment, respect and protect human dignity, promote mutual respect, free from discrimination, exclusion, bullying and harassment and other forms of violence in order to create an inclusive, conducive and productive work environment.	online
10	PPIjar - International Commercial Term	22 Juli 2022 July 22, 2022	In-House Training	Memberikan pemahaman secara komprehensif terkait penjualan dan pembelian dalam perdagangan internasional. Provide a comprehensive understanding of selling and buying in international trade.	online
11	Awareness SMK3	15 September 2022 September 15, 2022	In-House Training	Implementasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Implementation and certification of the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	online
12	PPIjar - Kopi	23 September 2022 September 23, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan secara komprehensif terkait pengenalan komoditas kopi yaitu berupa pengenalan kopi, proses penanaman kopi, pengolahan dan perdagangan kopi. Increase comprehensive knowledge related to the introduction of coffee commodities, namely in the form of coffee introduction, coffee planting process, coffee processing and trade.	online



13	PPIjar - Produk Halal PPIjar - Halal Products	25 Oktober 2022 October 25, 2022	In-House Training	Meningkatkan pengetahuan terhadap produk halal yang meliputi konsep dasar, dasar hukum, prosedur, dan isu praktikal Produk Halal. Increase knowledge of halal products which include basic concepts, legal basis, procedures, and practical issues of Halal Products.	online
14	Managing Operational Risk	20 Desember 2022 December 20, 2022	In-House Training	Menyiapkan risk culture di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Setting up a risk culture at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.	Hybird
15	Managerial Risk Implementation	27 Desember 2022 December 27, 2022	In-House Training	Enterprise Risk Management Risk Management Issue Good Corporate Governance	Hybird



4

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD





Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional

Global and National Economic Review

PPI berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 22,11% dari Rp1,94 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,37 triliun pada tahun 2022. Seiring dengan kenaikan pendapatan, laba bersih PPI tahun 2022 melonjak 133,79% menjadi Rp49,09 miliar.

PPI managed to record revenue growth of 22.11% from IDR 1.94 trillion in 2021 to IDR 2.37 trillion in 2022. Along with the increase in revenue, PPI's net profit in 2022 jumped 133.79% to IDR 49.09 billion.

Perekonomian global berisiko tumbuh lebih rendah disertai dengan tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Penurunan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih besar pada tahun 2023 terutama di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok, bahkan disertai dengan risiko resesi di sejumlah negara maju. Volume perdagangan dunia juga tetap rendah. Di tengah perlambatan ekonomi, disrupsi pasokan meningkat sehingga mendorong harga energi bertahan tinggi. Tekanan inflasi global semakin tinggi seiring dengan ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme yang masih berlangsung, serta terjadinya fenomena *heatwave* di beberapa negara. Inflasi di negara maju maupun *emerging market* meningkat tinggi, bahkan inflasi inti berada dalam tren meningkat sehingga mendorong bank sentral di banyak negara melanjutkan kebijakan moneter agresif.

Perkembangan terkini menunjukkan kenaikan *Fed Fund Rate* yang lebih tinggi dan diperkirakan masih akan meningkat. Perkembangan tersebut mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS dan semakin tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, sehingga mengganggu aliran investasi portofolio dan tekanan nilai tukar di negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia.

Perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut dengan semakin membaiknya permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Konsumsi swasta tumbuh tinggi didukung dengan kenaikan pendapatan, tersedianya pembiayaan kredit, dan semakin kuatnya keyakinan konsumen, seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas.

Dorongan terhadap konsumsi rumah tangga juga didukung oleh kebijakan Pemerintah yang menambah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya kelompok bawah, dari dampak kenaikan inflasi sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM.

The global economy is at risk of lower growth accompanied by high inflationary pressures and global financial market uncertainty. The decline in economic growth is predicted to be greater in 2023, especially in the United States (US), Europe, and China, and even accompanied by the risk of recession in a number of developed countries. World trade volumes also remain low. Amid the economic slowdown, supply disruptions are increasing, pushing energy prices higher. Global inflationary pressures intensified along with geopolitical tensions, ongoing protectionist policies, and the occurrence of *heatwave* phenomena in several countries. Inflation in both developed and emerging market countries is rising, even core inflation is on an upward trend, prompting central banks in many countries to continue aggressive monetary policies.

Recent developments show a higher *Fed Fund Rate* increase and is predicted to increase. These developments have led to a stronger US dollar and higher uncertainty in global financial markets, disrupting portfolio investment flows and putting pressure on exchange rates in emerging market countries, including Indonesia.

The improvement in the national economy continued with improving domestic demand and continued positive export performance. Private consumption grew strongly on the back of rising incomes, availability of credit financing, and stronger consumer confidence, along with increased mobility.

The boost to household consumption was also supported by the Government's policy of increasing social assistance to maintain people's purchasing power, especially the lower income groups, from the impact of rising inflation as a consequence of the fuel subsidy transfer. The increase in domestic demand also occurred



Kenaikan permintaan domestik juga terjadi pada investasi, khususnya investasi non bangunan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tersebut tercermin pada perkembangan beberapa indikator dini pada Agustus 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang terus membaik.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tetap baik, khususnya CPO, batu bara, serta besi dan baja seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor CPO dan pelonggaran akses masuk wisatawan mancanegara. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera yang tetap tumbuh kuat. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Pertanian.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar pada 21 September 2022 terdepresiasi 1,03% (ptp) dibandingkan dengan akhir Agustus 2022. Perkembangan nilai tukar yang tetap terjaga tersebut ditopang oleh pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, serta langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia.

Nilai tukar Rupiah sampai dengan 21 September 2022 terdepresiasi 4,97% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India 7,05%, Malaysia 8,51%, dan Thailand 10,07%. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Tekanan inflasi meningkat didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta dampak dari penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69% (yoy) seiring dengan meningkatnya inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (*administered prices*) yang sebesar 6,84% (yoy) dan inflasi inti yang menjadi 3,04% (yoy).

Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) menurun menjadi 8,93% (yoy) sejalan dengan peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi. Tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh penyesuaian harga BBM subsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat akibat dampak lanjutan (*second round effect*) dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

in investment, especially non-building investment. The continued improvement in the domestic economy is reflected in the development of several early indicators in August 2022 and the latest Bank Indonesia survey results, such as consumer confidence, retail sales, and the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) which continue to improve.

From the external side, export performance is predicted to remain good, especially CPO, coal, and iron and steel in line with the strong demand of several major trading partners and the Government's policy to encourage CPO exports and relax access to foreign tourists. Spatially, the positive performance of exports was supported by all regions, especially Kalimantan and Sumatra, which continued to grow strongly. The improvement in the national economy is also reflected in the performance of major business fields, such as Processing Industry, Mining, and Agriculture.

With these developments, economic growth in 2022 is predicted to remain upwardly biased within Bank Indonesia's projection range of 4.5-5.3%. Rupiah exchange rate stability was maintained amidst increasing global financial market uncertainty. The exchange rate on September 21, 2022 depreciated by 1.03% (ptp) compared to the end of August 2022. The maintained exchange rate development was supported by domestic forex supply and positive perception on domestic economic outlook, as well as Bank Indonesia's stabilization measures.

The Rupiah exchange rate as of September 21, 2022 depreciated by 4.97% (ytd) compared to the level at the end of 2021, relatively better than the depreciation of the currencies of a number of other developing countries, such as India 7.05%, Malaysia 8.51%, and Thailand 10.07%. Going forward, Bank Indonesia continues to strengthen the policy of stabilizing the Rupiah exchange rate in accordance with its fundamental value to support efforts to control inflation and macroeconomic stability.

Inflationary pressures increased driven by high global energy and food prices, as well as the impact of domestic fuel price adjustments. Consumer Price Index (CPI) inflation in August 2022 was recorded at 4.69% (yoy) as administered prices inflation increased to 6.84% (yoy) and core inflation to 3.04% (yoy).

Meanwhile, volatile food inflation declined to 8.93% (yoy) in line with increased supply from production centers. CPI inflationary pressure is predicted to increase, driven by subsidized fuel price adjustments amid high global energy and food prices. Core inflation and inflation expectations are predicted to increase due to the second round effect of fuel price adjustments and stronger inflationary pressures from the demand side.



Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan mendorong inflasi tahun 2022 melebihi batas atas sasaran $3,0\pm 1\%$, dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh kedua 2023.

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022 Bank Indonesia, diolah

These various developments are predicted to push inflation in 2022 beyond the upper limit of the target of $3.0\pm 1\%$, and therefore stronger policy synergies between the Central and Regional Governments with Bank Indonesia on both the supply and demand sides are needed to ensure inflation returns to its target in the second half of 2023.

Source: Bank Indonesia Fourth Quarter 2022 Monetary Policy Review

Prospek Usaha

Business Prospect

Meskipun ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat, Indonesia diprediksi sebagai negara yang mampu tumbuh kuat. Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh di angka 5,0%. Hal ini didorong oleh penguatan dari sisi produksi maupun konsumsi. PPI secara optimis dapat memegang peranan penting dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia dan menggerakkan roda perdagangan nasional saat ini dan di masa yang akan datang.

PPI akan melakukan peningkatan bisnis perdagangan ke tingkat internasional melalui inovasi pembukaan *Representative Office* (RO) di Australia. Jumlah RO di tingkat internasional tercatat 3 kantor perwakilan di mancanegara yaitu di Belanda, Dubai, dan Australia. PPI akan terus melakukan ekspor produk berkualitas global sebagai *strategic initiative* PPI.

PPI terus bertransformasi sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan umum dan khususnya program produk secara komersial dan terukur. Dengan meningkatkan kepiawaian dalam bertransaksi antarlintas negara dan menjalin kemitraan dengan memberikan layanan terintegrasi yang sejalan dengan High Level Roadmap yang dilakukan mulai tahun 2022.

Adanya penggabungan PPI dan BGR Logistics juga turut meningkatkan efisiensi logistik pangan di Indonesia, mengurangi *food loss* pada rantai produsen, meningkatkan penetrasi bisnis trading dan logistik hingga peningkatan pada keterjangkauan pembelian produksi nelayan dan petani hingga ke daerah pelosok di Indonesia dengan mengutamakan mutu dan kualitas produk pangan.

Although the global economy is expected to slow down in 2023, Indonesia is predicted to be a country that is able to grow strongly. Based on the International Monetary Fund (IMF) report, Indonesia's economy is predicted to grow at 5.0%. This is driven by the strengthening of both production and consumption. PPI is optimistic that it can play an important role in growing the Indonesian economy and driving the wheels of national trade now and in the future.

PPI will increase its trade business to the international level through the innovation of opening a Representative Office (RO) in Australia. The number of ROs at the international level is recorded at 3 representative offices in foreign countries, namely in the Netherlands, Dubai and Australia. PPI will continue to export global quality products as PPI's strategic initiative.

PPI continues to transform as a company that conducts general trading and especially product programs in a commercial and measurable manner. By increasing expertise in cross-border transactions and establishing partnerships by providing integrated services in line with the High Level Roadmap carried out starting in 2022.

The merger of PPI and BGR Logistics also helped increase the efficiency of food logistics in Indonesia, reduce food loss in the producer chain, increase the penetration of the trading and logistics business to increase the affordability of purchasing fishermen and farmers' production to remote areas in Indonesia by prioritizing the quality and quality of food products.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

PPI mengelompokkan segmen usaha berdasarkan:

- Lokal (Perdagangan Dalam Negeri);
- Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional); dan
- Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain).

PPI memiliki segmentasi produk yang cukup luas yang mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, produk suplemen, bahan pokok, produk konsumen, bahan kimia, ekspor-impor komoditi, properti, retail, hingga *waste integrated solution* dan logistik.

Dari rentang produk tersebut, ada beberapa produk yang cukup terdampak terhadap situasi makro ekonomi global di mana terjadi peningkatan dari inflasi dan pelemahan kurs, ditambah situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis energi dan pangan, dan juga disrupsi pada rantai pasok global yang berdampak terhadap tingginya biaya logistik. Produk-produk yang terpengaruh kondisi di atas antara lain:

- Harga pupuk global mengalami peningkatan harga seiring dengan meningkatnya harga gas dunia yang berpengaruh pada peningkatan harga dan ketersediaan bahan baku produksi pupuk PIHC;
- Pelemahan nilai kurs, peningkatan biaya logistik, dan pelemahan daya beli di pasar global menyebabkan kendala pada realisasi potensi ekspor.

Berikut ialah uraian kinerja masing-masing segmen usaha Perseroan:

PPI categorizes its business segments based on:

- Local (Domestic Trade);
- Import & Export (International Trade); and
- Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business).

PPI has a fairly broad product segmentation covering various fields ranging from agriculture, supplement products, staples, consumer products, chemicals, commodity import-export, property, retail, to waste integrated solutions and logistics.

From this range of products, there are several products that are quite affected by the global macroeconomic situation where there is an increase in inflation and weakening exchange rates, plus the geopolitical situation between Russia and Ukraine which has caused an energy and food crisis, as well as disruption in the global supply chain which has an impact on high logistics costs. Products affected by the above conditions include:

- Global fertilizer prices increased in line with the increase in global gas prices which affected the price and availability of raw materials for PIHC's fertilizer production;
- Weakening exchange rate, increasing logistics costs, and weakening purchasing power in the global market caused constraints on the realization of export potential.

The following is a description of the performance of each of the Company's business segments:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Pendapatan per Segmen Usaha Revenue per Business Segment					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Lokal (Perdagangan Dalam Negeri) Local (Domestic Trade)	24,09%	190,20	979,80	789,60	829,24
Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional) Import & Export (International Trade)	6,28%	31,90	540,00	508,10	1.930,02
Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain) Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business)	36,34%	34,20	128,30	94,10	101,79



Segmen Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)

Pada segmen Perdagangan Dalam Negeri, perseroan menjual komoditas berupa pupuk dan pestisida, produk farmasi dan alat kesehatan, produk konsumsi dan bahan pangan, bahan bangunan serta produk dan alat pertanian.

Salah satu produk yang memiliki potensi luar biasa besar yang dimiliki oleh Perseroan, yakni produk pestisida dengan merek dagang Dharma. Keberadaan produk Dharmabrand dengan banyak varian telah dikenal oleh petani dan memiliki *customer loyalty* cukup tinggi.

Adapun hal lain yang juga menjadi fokus PPI dalam hal pengembangan adalah produk farmasi dan alat kesehatan. Pada lini produk tersebut, PPI memiliki produk Transamin yang sudah sejak lama diperdagangkan di pasar industri kesehatan. Sedangkan untuk produk farmasi, PPI telah menjalin kerja sama dengan prinsipal farmasi, di antaranya makloon.

Sementara untuk produk-produk konsumsi dan bahan pokok, PPI ditunjuk sebagai distributor utama. Kegiatan distribusi bahan pokok didukung oleh jaringan cabang yang besar di mana aktivitas perdagangan pada lini produk ini didominasi oleh beras, tepung terigu, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, PPI juga telah mengembangkan merek dagang Panganesia dengan produk beras dan minyak goreng.

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi Segmen Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)

Saat ini, perseroan telah bersinergi dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi yang tersebar di 24 wilayah di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan infrastruktur gudang yang dimiliki oleh PPI di sejumlah wilayah. Selain menjalin kerja sama dalam hal penyaluran pupuk subsidi, perseroan juga berperan sebagai distributor utama pupuk non-subsidi PT Petrokimia Gresik.

Kinerja Segmen Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)

Kinerja segmen usaha Perdagangan Dalam Negeri dilihat berdasarkan pencapaian jumlah penjualan komoditas di pasar lokal atau dalam negeri sepanjang tahun 2022.

Local Segment (Domestic Trade)

In the Domestic Trade segment, the company sells commodities such as fertilizers and pesticides, pharmaceutical products and medical devices, consumer products and food ingredients, building materials and agricultural products and tools.

One of the products that has tremendous potential owned by the Company, namely pesticide products with the Dharma trademark. The existence of Dharmabrand products with many variants has been recognized by farmers and has high customer loyalty.

Another thing that PPI also focuses on in terms of development is pharmaceutical products and medical devices. In this product line, PPI has Transamin products that have long been traded in the health industry market. As for pharmaceutical products, PPI has established cooperation with pharmaceutical principals, including makloon.

As for consumer products and staples, PPI is appointed as the main distributor. Staples distribution activities are supported by a large branch network where trading activities in this product line are dominated by rice, wheat flour, and other staples. In addition, PPI has also developed the Panganesia trademark with rice and cooking oil products.

Increase/Decrease in Local Segment Production Capacity (Domestic Trade)

Currently, the company has synergized with Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) in distributing subsidized fertilizers spread across 24 regions in Indonesia. This is supported by the availability of warehouse infrastructure owned by PPI in a number of regions. In addition to cooperating in the distribution of subsidized fertilizers, the company also acts as the main distributor of PT Petrokimia Gresik's non-subsidized fertilizers.

Local Segment Performance (Domestic Trade)

The performance of the Domestic Trade business segment is seen based on the achievement of the number of commodity sales in the local or domestic market throughout 2022.



Pendapatan Segmen Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)

Pada tahun 2022, PPI membukukan total pendapatan perdagangan dalam negeri sebesar Rp979,80 miliar, mengalami kenaikan 24,09% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp789,60 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya pendapatan produk konsumsi dan bahan pokok tahun 2022 sebesar 219,61% atau setara dengan Rp272,51 miliar.

Local Segment Revenue (Domestic Trade)

In 2022, PPI booked total domestic trade revenue of IDR979.80 billion, an increase of 24.09% compared to 2021 which amounted to IDR789.60 billion. This increase was mainly due to an increase in revenue from consumer products and staples in 2022 by 219.61% or equivalent to IDR272.51 billion.

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Penjualan Segmen Perdagangan Dalam Negeri Domestic Trade Segment Sales					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	%			
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	(0,92%)	(3,63)	391,10	394,73	385,52
Pupuk Non - Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	(31,81%)	(40,68)	87,20	127,88	140,10
Pestisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	(37,90%)	(19,10)	31,30	50,40	50,21
Pestisida Lainnya Other Pesticides	(31,40%)	(3,80)	8,30	12,10	15,43
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	(21,92%)	(15,10)	53,80	68,90	53,93
Produk Konsumsi dan Bahan Pokok Consumer Product And Staple	219,61%	272,51	396,60	124,09	170,28
Bahan Bangunan Construction Material	(0,85%)	(0,09)	10,50	10,59	12,17
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Product	10,00%	0,10	1,10	1,00	1,61
Total Perdagangan Dalam Negeri Total Domestic Trade	24,09%	190,20	979,80	789,60	829,24

Pada saat ini setidaknya 40,47% dari penjualan komoditas pada kelompok Perdagangan Dalam Negeri didominasi oleh penjualan produk konsumsi dan bahan pokok dengan nilai penjualan mencapai Rp907,21 miliar, produk pupuk subsidi dengan nilai penjualan Rp391,1 miliar dengan kontribusi 39,91%. Sementara 19,61% sisanya sebesar Rp199,20 miliar dikontribusikan oleh perdagangan pupuk non subsidi, pestisida Dharmabrand, pestisida lainnya, farmasi dan alkes, bahan bangunan, serta produk dan alat pertanian.

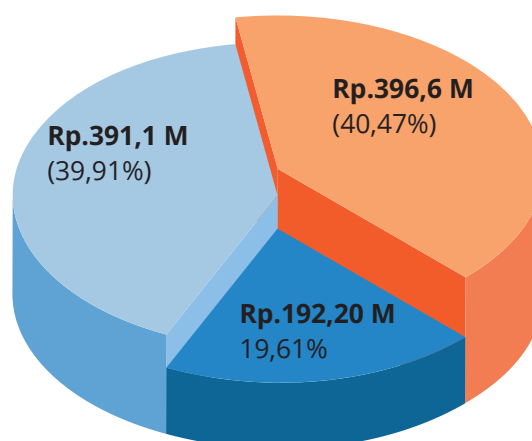
Currently, at least 40.47% of commodity sales in the Domestic Trade group are dominated by sales of consumer products and staples with a sales value of Rp907.21 billion, subsidized fertilizer products with a sales value of Rp391.1 billion with a contribution of 39.91%. While the remaining 19.61% of Rp199.20 billion was contributed by the trade of non-subsidized fertilizers, Dharmabrand pesticides, other pesticides, pharmaceuticals and medical devices, building materials, and agricultural products and tools.



Komposisi Pendapatan Segmen Perdagangan Dalam Negeri 2022

2022 Domestic Trade Segment Revenue Composition

- Produk Konsumsi dan Bahan Pokok
Consumer Product and Staple
- Pupuk Subsidi
Subsidized Fertilizer
- Lainnya | Others



Profitabilitas Segmen Lokal (Perdagangan Dalam Negeri)

Meski demikian, laba kotor segmen perdagangan dalam negeri mencatatkan penurunan laba kotor dari Rp73,13 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp51,80 miliar pada tahun 2022 atau turun 29,17%.

Profitability of Local Segment (Domestic Trade)

However, the gross profit of the domestic trade segment recorded a decrease in gross profit from IDR73.13 billion in 2021 to IDR51.80 billion in 2022 or a decrease of 29.17%.

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Laba Kotor Segmen Perdagangan Dalam Negeri | Gross Profit of Domestic Trade Segment

Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	%			
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	(29,32%)	(4)	10,10	14,29	14,5
Pupuk Non - Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	(32,11%)	(2)	4,80	7,07	6,47
Pestisida Dharmabrand Dharmabrand Pesticides	(63,50%)	(18)	10,40	28,49	15,19
Pestisida Lainnya Other Pesticides	(59,68%)	(1)	0,50	1,24	1,19
Farmasi dan Alkes Pharmaceuticals and Medical Devices	(49,81%)	(5)	5,20	10,36	5,76
Produk Konsumsi dan Bahan Pokok Consumer Product And Staple	83,04%	9	20,50	11,20	8,52
Bahan Bangunan Construction Material	(47,37%)	(0)	0,20	0,38	0,47
Produk dan Alat Pertanian Agricultural Product	0,00%	0	0,10	0,10	0,10
Laba Kotor Segmen Perdagangan Dalam Negeri	(29,17%)	(21)	51,80	73,13	52,19



Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)

Pada lini Perdagangan Internasional, PPI menjual komoditas produk impor yang diperoleh dari kegiatan impor berupa Bahan kimia Berbahaya (B2), produk pertanian, dan produk ekspor serta perdagangan lainnya. Selain itu, melalui lini usaha ini PPI juga menjual komoditas dari dalam negeri berupa kopi, teh, produk hortikultura dan produk ekspor lainnya ke pasar internasional atau pasar luar negeri.

Kinerja PPI berdasarkan lini Perdagangan Internasional dinilai berdasarkan realisasi penjualan komoditas produk ekspor di pasar internasional atau luar negeri, serta jumlah penjualan komoditas produk impor di pasar dalam negeri sepanjang 2021.

Berdasarkan kontribusi omset penjualan, maka Perdagangan Internasional menempati pareto pendapatan tertinggi dibandingkan segmen operasi lainnya.

Kinerja Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)

Secara menyeluruh, kinerja penjualan pada segmen komoditas Perdagangan Internasional mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 74% dibandingkan tahun sebelumnya, sama halnya dengan laba kotor membukukan penurunan sebesar 56%.

Pendapatan Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)

Selama tahun 2022, segmen perdagangan internasional membukukan total penjualan sebesar Rp540,0 miliar, meningkat 6,28% dari tahun 2021 yang sebesar Rp508,10 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari naiknya penjualan bahan kimia berbahaya sebesar Rp101,90 miliar dan produk ekspor naik sebesar Rp6,60 miliar. Di sisi lain penjualan produk impor mengalami penurunan sebesar Rp76,60 miliar.

Import & Export Segment (International Trade)

In the International Trade line, PPI sells imported product commodities obtained from import activities in the form of Hazardous Chemicals (B2), agricultural products, and other export and trade products. In addition, through this line of business PPI also sells commodities from within the country in the form of coffee, tea, horticultural products and other export products to international markets or foreign markets.

PPI's performance based on the International Trade line is assessed based on the realization of sales of export product commodities in the international or foreign market, as well as the number of sales of imported product commodities in the domestic market throughout 2021.

Based on the contribution of sales turnover, International Trade has the highest revenue pareto compared to other operating segments.

Import & Export Segment Performance (International Trade)

Overall, sales performance in the International Trade commodity segment experienced a sharp decline of 74% compared to the previous year, as well as gross profit posted a decline of 56%.

Import & Export Segment Revenue (International Trade)

During 2022, the international trade segment booked total sales of IDR540.0 billion, an increase of 6.28% from 2021 which amounted to IDR508.10 billion. This increase mainly came from an increase in sales of hazardous chemicals by IDR101.90 billion and export products increased by IDR6.60 billion. On the other hand, sales of imported products decreased by IDR76.60 billion.

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Penjualan Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional) Import & Export Segment Sales (International Trade)					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	%			
Bahan Kimia Berbahaya (B2) Hazardous Chemicals (B2)	30,19%	101,90	439,40	394,73	260,27
Produk Impor Imported Product	(46,65%)	(76,60)	87,60	164,20	1.700,31
Produk Ekspor Export Product	103,13%	6,60	13,00	6,40	1,82
Total Perdagangan Internasional Total International Trade	6,28%	31,90	540,00	508,10	1.930,02



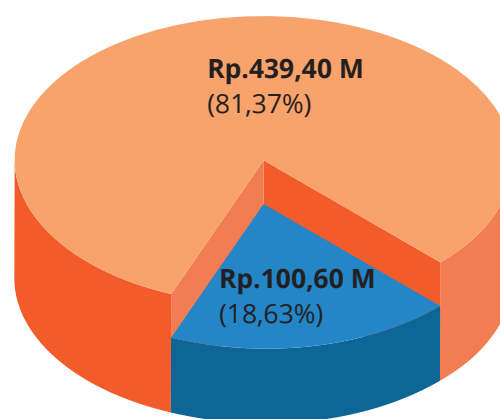
Sebanyak 81,37% dari total penjualan Perdagangan Internasional berasal dari penjualan produk bahan kimia berbahaya (B2) yang membukukan penjualan sebesar Rp439,40 miliar. Sementara 18,63% sisanya berasal dari produk impor dan produk ekspor.

81.37% of total International Trade sales came from sales of hazardous chemical (B2) products, which posted sales of Rp439.40 billion. While the remaining 18.63% came from imported and exported products.

Komposisi Pendapatan Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)

Revenue Composition of Import & Export Segment (International Trade)

- Bahan Kimia Berbahaya (B2)
Hazardous Chemicals (B2)
- Lainnya | Others



Profitabilitas Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional)

Seiring dengan naiknya pendapatan segmen impor & ekspor atau perdagangan internasional, laba kotor turut membukukan pertumbuhan 63,01% dari Rp69,20 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp112,80 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama berasal dari naiknya laba kotor produk bahan kimia berbahaya (B2).

Profitability of Import & Export Segment (International Trade)

Along with the increase in import & export or international trade segment revenue, gross profit also posted 63.01% growth from IDR69.20 billion in 2021 to IDR112.80 billion in 2022. This increase mainly came from the increase in gross profit of hazardous chemical (B2) products.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laba Kotor Segmen Impor & Ekspor (Perdagangan Internasional) Import & Export Segment Gross Profit (International Trade)					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Bahan Kimia Berbahaya (B2) Hazardous Chemicals (B2)	66,67%	37,60	94,00	56,40	36,09
Produk Impor Imported Product	42,86%	5,40	18,00	12,60	123,33
Produk Ekspor Export Product	300,00%	0,60	0,80	0,20	0,20
Perdagangan Internasional Lainnya Other International Trade	-	-	-	-	-
Total Perdagangan Internasional Total International Trade	63,01%	43,60	112,80	69,20	155,91



Segmen Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain)

Selain Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional, PPI memiliki potensi bisnis lain yang sifatnya sebagai pelengkap *core* bisnis yang sudah ada. Bisnis lainnya yang saat ini telah memberikan tambahan kontribusi pendapatan yaitu:

- Pendapatan Properti berbentuk persewaan aset serta pendapatan bagi hasil dari kerjasama optimalisasi tanah dan bangunan dengan pihak mitra bisnis;
- Pendapatan non-properti, khususnya pendapatan dari hasil pengoperasian 1 (satu) unit SPBU;
- Pengembangan bisnis Covare, livebird, dan retail (Toko Grosir Desa + Warung Pangan);
- Waste Integrated Solution; dan
- Kegiatan logistik dan pergudangan (ex-BGR).

Sepanjang tahun 2022, segmen Bisnis Lain menyumbang 32% terhadap total penjualan PPI, yakni sebesar Rp619,8 miliar (terrealisasi 45% dari target RKAP 2021). Sedangkan laba kotor pada segmen Bisnis Lain berkontribusi sebesar 52% dari total capaian laba kotor konsolidasi, yakni sebesar Rp137,90 miliar (terrealisasi 46% dari target RKAP 2022).

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi Segmen Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain)

Retail

Pada tahun 2022, fokus dari bisnis produk pangan online masih pada pembentukan jaringan *retail* di level UMKM (warung) dengan target perluasan jaringan Warung Pangan yang pada saat ini mencapai 90.179 mitra.

Pada bisnis retail, kerjasama untuk mendistribusikan produk milik Holding Pangan terus dilakukan melalui *weekly meeting* dengan Direksi ID Food. Upaya lainnya adalah peninjauan kerjasama melalui mitra Bukalapak, Youtap, dan Wahyoo, dan pada saat ini upaya menjangkau pasar B2B juga dilakukan melalui kerjasama dengan Muhammadiyah dan Baqoel.

Produk Pengembangan

Produk pengembangan melalui bisnis livebird, Covare, dan OkeMam. Pada saat ini, bisnis livebird PPI sudah mencapai 192 Ton. Untuk Covare, pada saat ini Café Covare Semarang masih dalam proses reaktivasi pencarian mitra dan untuk Café Covare Jakarta sudah kembali beroperasi pada bulan November 2022, untuk produk OkeMam masih dalam tahap pengembangan.

Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business) segments

In addition to Domestic Trade and International Trade, PPI has other business potential that is complementary to the existing core business. Other businesses that currently provide additional revenue contributions are:

- Property income in the form of asset rentals and profit sharing income from land and building optimization cooperation with business partners;
- Non-property income, especially income from the operation of 1 (one) gas station unit;
- Covare, livebird, and retail business development (Village Wholesale Store + Food Stall);
- Waste Integrated Solution; and
- Logistics and warehousing activities (ex-BGR).

Throughout 2022, the Other Business segment contributed 32% to PPI's total sales, amounting to IDR 619.8 billion (realized 45% of the 2021 RKAP target). Meanwhile, gross profit in the Other Business segment contributed 52% of the total consolidated gross profit achievement, which amounted to IDR137.90 billion (realized 46% of the 2022 RKAP target).

Increase/Decrease in Production Capacity of Property Rental Segment and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business)

Retail

In 2022, the focus of the online food product business is still on the establishment of a retail network at the MSME level (stalls) with the target of expanding the Warung Pangan network which currently reaches 90,179 partners.

In the retail business, cooperation to distribute products owned by the Food Cluster continues to be carried out through weekly meetings with the ID Food Board of Directors. Other efforts include exploring cooperation through partners Bukalapak, Youtap, and Wahyoo, and currently efforts to reach the B2B market are also being made through cooperation with Muhammadiyah and Baqoel.

Product Development

Product development through livebird, Covare, and OkeMam businesses. Currently, PPI's livebird business has reached 192 tons. For Covare, currently Café Covare Semarang is still in the process of reactivating the search for partners and for Café Covare Jakarta has resumed operations in November 2022, for OkeMam products are still in the development stage.



WIS

PLN sudah tidak menerapkan *single vendor*, beberapa wilayah yang menjadi target lepas ke vendor lain, dan terkait wilayah PLN baru masih melakukan inventarisasi barang-barang ATTB dan Non ATTB.

Untuk mendorong bisnis WIS, upaya yang dilakukan pada tahun 2022 sudah dilakukan canvassing ke seluruh unit PLN untuk meningkatkan kembali engagement dan pendekatan kepada Pertamina. Pada saat ini, sudah dijalin kerjasama dengan PLN UIKL Sulawesi, PLN UIW Kalimantan Barat, PLN UIP Kalimantan Bagian Barat, PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, dan juga penjajakan kerjasama dengan PLN UIK Sumatera Bagian Selatan, dan juga di luar PLN seperti PT Timah, Geodipa, PG Candi Baru, PT PGN, PG Rajawali, dan PT Pusri.

Kinerja Segmen Segmen Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain)

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2020, maka pendapatan dan laba kotor yang diperoleh dari segmen Bisnis Lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 47% dan 53%.

Pendapatan Segmen Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain)

Segmen bisnis lain tahun 2022 membukukan pendapatan sebesar Rp128,30 miliar, mengalami kenaikan 36,34% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp94,10 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari tumbuhnya pendapatan dari bisnis retail sebesar 435,06% atau naik 33,50% menjadi Rp41,20 miliar pada tahun 2022.

WIS

PLN has not implemented a single vendor, some targeted areas have been released to other vendors, and related to the new PLN area, it is still conducting an inventory of ATTB and Non ATTB items.

To encourage the WIS business, efforts made in 2022 have been canvassing all PLN units to increase engagement and approach to Pertamina again. Currently, cooperation has been established with PLN UIKL Sulawesi, PLN UIW West Kalimantan, PLN UIP West Kalimantan, PLN UIP East Kalimantan, and also exploring cooperation with PLN UIK South Sumatra, and also outside PLN such as PT Timah, Geodipa, PG Candi Baru, PT PGN, PG Rajawali, and PT Pusri.

Segment Performance of Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business) Segments

When compared to the 2020 performance achievement, the revenue and gross profit earned from the Other Business segment decreased by 47% and 53%, respectively.

Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business) Segment Revenue

The other business segment in 2022 posted revenue of IDR 128.30 billion, an increase of 36.34% compared to 2021 which amounted to IDR 94.10 billion. This increase mainly came from the growth of revenue from the retail business by 435.06% or 33.50% to IDR41.20 billion in 2022.

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Pendapatan Segmen Bisnis Lain Other Business Segment Revenue					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	%			
Properti Property	(4,09%)	(1,90)	44,50	46,40	15,79
Bisnis Lainnya Other Business	347,37%	6,60	8,50	1,90	43,63
Retail	435,06%	33,50	41,20	7,70	0,50
WIS	(10,24%)	(3,90)	34,20	38,10	41,87
Total Pendapatan Bisnis Lain Total Other Business Revenue	36,34%	34,20	128,30	94,10	101,79



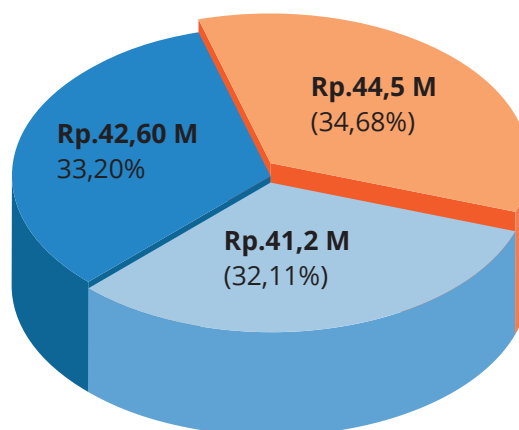
Sebanyak 34,68% dari total penjualan bisnis lain berasal dari penjualan properti dengan nilai penjualan sebesar Rp44,50 miliar. Sebanyak 32,11% dari total penjualan bisnis lain berasal dari penjualan retail dengan nilai penjualan Rp41,20 miliar. Sementara 33,20% sisanya berasal dari penjualan bisnis lainnya dan WIS dengan angka penjualan masing-masing sebesar Rp8,50 miliar dan Rp34,20 miliar pada tahun 2022.

34.68% of the total sales of other businesses came from property sales with sales value of Rp44.50 billion. 32.11% of total other business sales came from retail sales with sales value of Rp41.20 billion. While the remaining 33.20% came from sales of other businesses and WIS with sales figures of Rp8.50 billion and Rp34.20 billion respectively in 2022.

Komposisi Pendapatan Segmen Bisnis Lain

Revenue Composition of Other Business Segments

- Properti | Property
- Retail
- Lainnya | Others



Profitabilitas Segmen Segmen Penyewaan Properti dan Jasa Kepabeanaan & Angkutan dan SPBU (Bisnis Lain)

Seiring dengan naiknya pendapatan segmen bisnis lain, laba kotor turut membukukan pertumbuhan 27,19% dari Rp21,70 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp27,60 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada laba kotor bisnis retail.

Segment Profitability of Property Rental and Customs & Transportation Services and Gas Stations (Other Business) Segments

Along with the increase in other business segment revenues, gross profit also posted a 27.19% growth from IDR 21.70 billion in 2021 to IDR 27.60 billion in 2022. The highest growth occurred in the gross profit of the retail business.

dalam miliar Rp | in billions of Rp

Laba Kotor Segmen Bisnis Lain Gross Profit of Other Business Segments					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	%			
Properti Property	7,88%	1,60	21,90	20,30	15,57
Bisnis Lainnya Other Business	100,00%	0,10	0,20	0,10	1,73
Retail	308,33%	3,70	2,50	(1,20)	(0,09)
WIS	19,23%	0,50	3,10	2,60	4,86
Total Pendapatan Bisnis Lain ...	27,19%	5,90	27,60	21,70	22,07



Kinerja Anak Perusahaan Tahun 2021

Per 31 Desember 2022, PPI memiliki 2 (dua) entitas anak usaha yakni, PT PPI Industri (dahulu PT Dharma Niaga Putera Steel) dan PT BGR Logistik Indonesia (dahulu PT Tri Sari Veem).

Berikut kinerja entitas anak PT PPI dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Subsidiaries Performance in 2022

As of December 31, 2022, PPI has 2 (two) subsidiaries, namely, PT PPI Industri (formerly PT Dharma Niaga Putera Steel) and PT BGR Logistik Indonesia (formerly PT Tri Sari Veem).

The following is the performance of PT PPI's subsidiary entities over the past three years:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Kinerja Entitas Anak Performance of Subsidiaries Entity					
Entitas Anak Subsidiaries Entity	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Pendapatan Revenue					
PT BGR Logistik Indonesia	1.091,92%	637.682	696.082	58.400	45.955
PT. PPI Industri	18,59%	12.770	81.452	68.682	12.082
Total Entitas Anak Total Subsidiaries Entity	3.550,05%	756.232	777.534	21.302	45.955
Laba Kotor Gross Profit					
PT BGR Logistik Indonesia	984,31%	27.787	30.610	2.823	4.808
PT. PPI Industri	(7,11%)	(325)	4.243	4.568	968
Total Pendapatan Bisnis Lain Total Other Business Revenue	394,37%	27.803	34.853	7.050	12.482

PT PPI Industri

Kegiatan usaha PT PPI Industri adalah perindustrian umum dalam bidang pembuatan seng dan bahan bangunan lainnya; perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, tidak terbatas pada pengadaan bahan baku dan perdagangan hasil produksi seng.

Dalam perjalanannya, dikarenakan terkendala permodalan dan peralatan produksi yang sudah rusak, serta sebagai salah satu implementasi strategi *refocussing* bisnis PPI, maka pada saat ini perseroan telah mengaktifkan kembali PT PPI Industri sebagai distributor bahan kimia.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan pengurusan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan beban angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan barang-barang sampai dengan diterima oleh pemilik.

PT PPI Industri

PT PPI Industri's business activities are general industrialization in the field of zinc manufacturing and other building materials; trade related to industrial activities, not limited to the procurement of raw materials and trade in zinc products.

In its journey, due to capital constraints and damaged production equipment, and as one of the implementations of PPI's business refocussing strategy, the company has reactivated PT PPI Industri as a chemical distributor.

PT BGR Logistik Indonesia

PT BGR Logistik Indonesia was established with the intent and purpose of running a business in the field of transportation management services (freight forwarding) which includes receiving, storing, sorting, packing, marking, measuring, weighing document management, issuing transportation documents, calculating transportation costs, insurance claims for shipping goods, and settling bills for goods until they are received by the owner.



Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hijajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk di dalamnya adalah posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan.

The financial review described in this section refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2022 and 2021. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hijajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with the opinion that the financial statements are fairly presented in all material respects, including the financial position, financial performance and cash flows of the Company.

Analisis Posisi Keuangan

PPI membukukan pertumbuhan aset sebesar 3,95% pada tahun 2022 menjadi Rp3,60 triliun. Jumlah liabilitas juga tercatat naik 7,77% menjadi Rp1,75 triliun. Adapun ekuitas Perusahaan tumbuh 1,73% menjadi Rp2,84 triliun. Berikut adalah analisis posisi keuangan PPI tahun 2022:

Financial Position Analysis

PPI posted an asset growth of 3.95% in 2022 to Rp3.60 trillion. Total liabilities were also recorded to increase by 7.77% to Rp1.75 trillion. The company's equity grew 1.73% to IDR2.84 trillion. The following is an analysis of PPI's financial position in 2022:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
	%	Nominal			
Aset Lancar Total Current Assets	19,57%	161.149	984.420	823.271	922.092
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	0,37%	13.195	3.600.947	3.587.751	3.266.699
Jumlah Aset Total Assets	3,95%	174.344	4.585.367	4.411.023	4.188.791
Liabilitas Jangka Pendek Non-Current Liabilities	29,37%	180.972	797.075	616.103	515.484
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	(5,44%)	(54.793)	952.689	1.007.482	990.254
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7,77%	126.179	1.749.764	1.623.585	1.505.739
Jumlah Ekuitas Total Equity	1,73%	48.165	2.835.603	2.787.438	2.683.052
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas Total Liabilities And Equity	3,95%	174.344	4.585.367	4.411.023	4.188.791



Aset

PPI membukukan aset tahun 2022 sebesar Rp4,59 triliun, tumbuh 3,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,41 triliun. Peningkatan ini didukung oleh naiknya aset lancar dan aset tidak lancar.

Uraian perkembangan aset PPI selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Asset

PPI booked assets in 2022 of IDR4.59 trillion, growing 3.95% compared to 2021 which amounted to IDR4.41 trillion. This increase was supported by an increase in current assets and non-current assets.

A description of the development of PPI's assets during 2022 can be seen in the table below:

dalam juta Rp | in millions of Rp

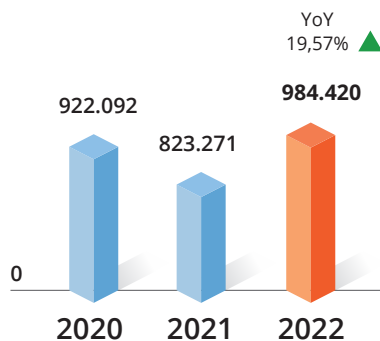
Aset Assets					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	4,83%	8.359	181.418	173.059	230.250
Deposito Berjangka Time Deposit	(86,26%)	(18.828)	3.000	21.828	1.400
Piutang usaha—bersih Trade receivables—net					
Pihak Berelasi Related Parties	(14,68%)	(26.793)	155.699	182.493	337.608
Pihak Ketiga Third Parties	73,50%	116.746	275.594	158.847	59.749
Piutang Lain-Lain Other Receivables	(2,82%)	(1.771)	60.967	62.738	59.749
Persediaan Inventories	30,21%	22.512	97.028	74.516	114.684
Uang Muka Advances	114,70%	60.826	113.857	53.031	27.128
Pajak Dibayar Di muka Prepaid Taxes	82,08%	25.173	55.841	30.668	54.197
Biaya Dibayar Di muka Prepaid Expenses	(64,13%)	(23.306)	13.036	36.342	31.606
Biaya Operasi dalam Proses Operation Costs in Process	(5,95%)	(1.769)	27.981	29.750	65.472
Aset Lancar Total Current Assets	19,57%	161.149	984.420	823.271	922.092
Asosiasi Associates	(19,67%)	(2.050)	8.373	10.422	10.624
Aset Tetap Fixed Assets	(7,74%)	(164.493)	1.959.995	2.124.488	2.369.500
Aset Tidak Berwujud Intangible assets	0,93%	182	19.706	19.524	10.921
Properti Investasi Investment Properties	19,81%	185.411	1.121.278	935.867	341.739
Aset Hak Guna Right of Use Assets	1.438,59%	6.867	7.344	477	693
Aset Keuangan Tidak Lancar lainnya Other Non-current Financial Assets	(100,00%)	(287)	0	287	287
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	(1,78%)	(668)	36.805	37.474	57.131
Aset Lain-lain Other Assets	(2,56%)	(11.766)	447.446	459.212	475.804
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	0,37%	13.195	3.600.947	3.587.751	3.266.699
Jumlah Aset Total Assets	3,95%	174.344	4.585.367	4.411.023	4.188.791



Aset Lancar

Total Current Assets

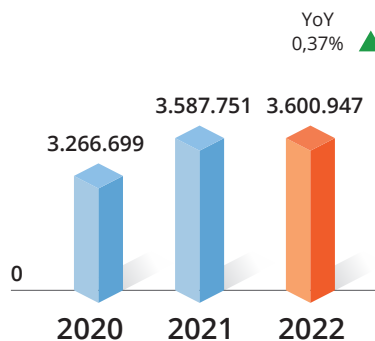
Rp-juta | Rp-millions



Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

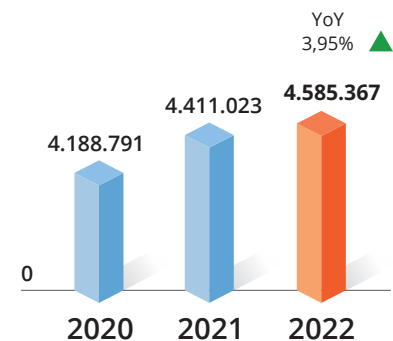
Rp-juta | Rp-millions



Jumlah Aset

Total Assets

Rp-juta | Rp-millions



Aset Lancar

Hingga akhir tahun 2022, aset lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp984,42 miliar, tumbuh 19,57% atau setara dengan Rp161,15 miliar dari Rp823,27 miliar pada tahun 2021. Kenaikan ini terutama didorong oleh naiknya piutang usaha, uang muka, persediaan, serta pajak di bayar di muka.

Current Asset

As of the end of 2022, the Company's current assets were recorded at Rp984.42 billion, growing by 19.57% or equivalent to Rp161.15 billion from Rp823.27 billion in 2021. This increase was mainly driven by the increase in trade receivables, advances, inventories, and prepaid taxes.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tercatat sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,37% dari semula Rp3,59 triliun menjadi Rp3,60 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini terutama karena tumbuhnya properti investasi sebesar Rp185,41 miliar, diimbangi oleh turunnya aset tetap sebesar Rp164,49 miliar.

Non-current Asset

Non-current assets recorded a slight increase of 0.37% from Rp3.59 trillion to Rp3.60 trillion in 2022. This increase was mainly due to the growth of investment properties by Rp185.41 billion, offset by a decrease in fixed assets by Rp164.49 billion.

Liabilitas

Liabilities

Terjadi kenaikan liabilitas tahun 2022 sebesar 7,77% dari Rp1,62 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,75 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya liabilitas jangka pendek sebesar 29,37%, diimbangi oleh turunnya liabilitas jangka panjang sebesar 5,44%.

Uraian perkembangan liabilitas PPI selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

There was an increase in liabilities in 2022 by 7.77% from Rp1.62 trillion in 2021 to Rp1.75 trillion. This increase was mainly due to an increase in short-term liabilities by 29.37%, offset by a decrease in long-term liabilities by 5.44%.

A description of the development of PPI's liabilities during 2022 can be seen in the table below:

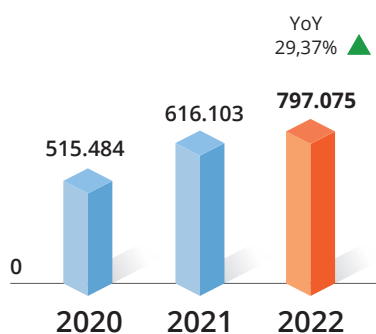


dalam juta Rp | in millions of Rp

Liabilitas Liabilities					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Utang Usaha Trade Payable					
Pihak Berelasi Related Parties	75,78%	22.469	52.120	29.650	237.952
Pihak Ketiga Third Parties	69,27%	124.895	305.191	180.296	-
Utang Pajak Tax Payables	(57,10%)	(9.398)	7.060	16.458	13.561
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Current Financial Liabilities	0,00%	0	57.878	57.878	13.369
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	917,35%	599	664	65	1.362
Beban Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	16,08%	9.561	69.005	59.445	130.295
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenues	23,12%	23.766	126.573	102.807	78.072
Utang Bank – Jangka Pendek Short Term Bank Loan	21,23%	30.436	173.802	143.366	22.850
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Current Portion of Long Term Liabilities	(7,94%)	(2.076)	24.061	26.137	18.022
Liabilitas Jangka Pendek Non-Current Liabilities	29,37%	180.972	797.075	616.103	515.484
Utang Jangka Panjang Long Term Payables	(1,23%)	(11.370)	913.848	925.218	938.090
Liabilitas sewa Lease liabilities	(95,73%)	(1.220)	54	1.274	2.015
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Benefits Obligation	(52,11%)	(42.204)	38.787	80.991	50.149
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	(5,44%)	(54.793)	952.689	1.007.482	990.254
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7,77%	126.179	1.749.764	1.623.585	1.505.739

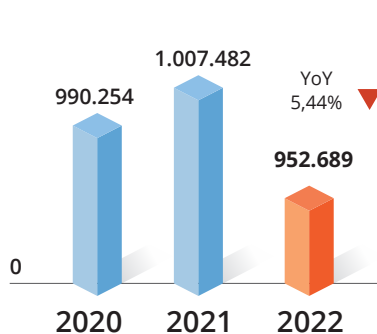
Liabilitas Jangka Pendek Non-Current Liabilities

Rp-juta | Rp-millions



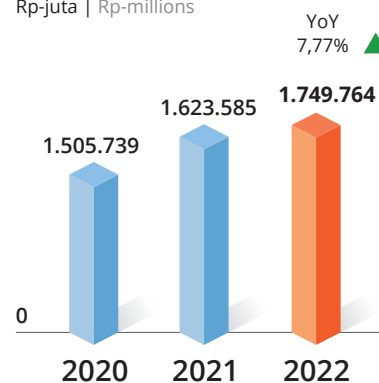
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

Rp-juta | Rp-millions



Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Rp-juta | Rp-millions





Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar Rp797,08 miliar pada tahun 2022, mengalami peningkatan 29,37% dari tahun lalu yang sebesar Rp616,10 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2022, PPI mencatatkan penurunan pada liabilitas jangka panjang sebesar 5,44% dari Rp1,01 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp952,69 miliar. Penurunan ini terjadi pada seluruh komponen liabilitas jangka panjang yaitu utang jangka panjang, liabilitas sewa, serta liabilitas imbalan pasca kerja.

Ekuitas

PPI mencatat kenaikan ekuitas sebesar 1,73% atau setara dengan Rp48,17 miliar dari Rp2,79 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,84 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini didorong oleh naiknya saldo laba seiring dengan tumbuhnya laba bersih PPI tahun 2022.

Current Liabilities

The Company's current liabilities amounted to Rp797.08 billion in 2022, an increase of 29.37% from last year which amounted to Rp616.10 billion. This increase was mainly due to the increase in third-party trade payables and short-term bank loans.

Non-current Liabilities

In 2022, PPI recorded a decrease in long-term liabilities by 5.44% from Rp1.01 trillion in the previous year to Rp952.69 billion. This decrease occurred in all components of long-term liabilities, namely long-term debt, lease liabilities, and post-employment benefit liabilities.

Equity

PPI recorded an increase in equity of 1.73% or equivalent to IDR 48.17 billion from IDR 2.79 billion in 2021 to IDR 2.84 billion in 2022. This increase was driven by an increase in retained earnings in line with the growth in PPI's net profit in 2022.

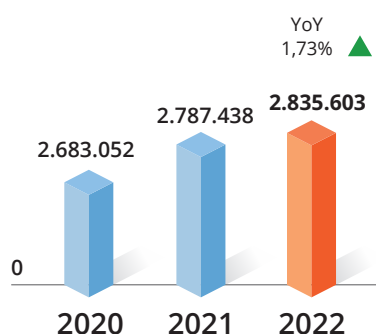
dalam juta Rp | in millions of Rp

Ekuitas Equity					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Modal Saham Share Capital	0,00%	0	942.745	942.745	942.745
Selisih Difference from					
Transaksi Restrukturisasi Restructuring Transactions of					
Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	0,00%	0	(231.042)	(231.042)	(114.116)
Saldo Laba Retained Earnings					
Telah ditentukan penggunaannya Appropriated					
Cadangan Umum General Reserves	0,00%	0	111.890	111.890	111.890
Cadangan Khusus Specific Reserves	0,00%	0	1.532	1.532	1.532
Belum ditentukan Penggunaannya Unappropriated	2,45%	48.132	2.010.439	1.962.307	1.735.671
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Total equity attributable to owner of the Entity	1,73%	48.132	2.835.564	2.787.432	2.677.722
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	591,84%	33	39	6	5.330
Jumlah Ekuitas Total Equity	1,73%	48.165	2.835.603	2.787.438	2.683.052



Jumlah Ekuitas Total Equity

Rp-juta | Rp-millions



Analisis Laba Rugi

Profit/Loss Analysis

PPI berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 22,11% dari Rp1,94 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,37 triliun pada tahun 2022. Seiring dengan kenaikan pendapatan laba bersih PPI tahun 2022 melonjak 133,79% menjadi Rp49,09 miliar.

PPI managed to record revenue growth of 22.11% from IDR 1.94 trillion in 2021 to IDR 2.37 trillion in 2022. Along with the increase in revenue, PPI's net profit in 2022 jumped 133.79% to IDR 49.09 billion.

Dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Pendapatan usaha Revenues	22,11%	428.694	2.367.519	1.938.825	3.972.598
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(17,77%)	(297.295)	(1.969.867)	(1.672.571)	(3.456.563)
Laba Kotor Gross Profit	49,35%	131.399	397.653	266.253	516.035
Beban Penjualan dan Distribusi Distribution and Selling Expenses	3,02%	490	(15.716)	(16.206)	(16.750)
Beban Umum dan Administrasi General and Administration Expenses	20,59%	78.026	(300.868)	(378.893)	(330.709)
Beban Usaha Operating Expenses	19,87%	78.516	(316.584)	(395.100)	(347.459)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	162,92%	209.915	81.069	(128.846)	168.575
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Income	0,00%	0	8.744	8.744	7.470
Beban Non-Usaha Non-Operating Expense	(13,62%)	(7.879)	(65.718)	(57.839)	(21.795)
Beban Non-Usaha – Bersih Non-Operating Expense – Net	89,40%	43.889	(5.206)	(49.095)	(14.326)

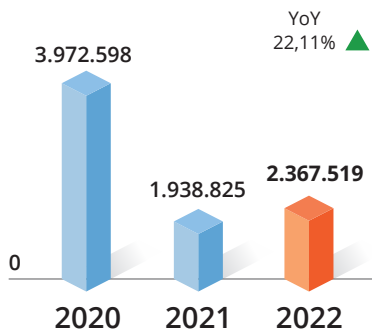


Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Income Tax	142,63%	253.803	75.863	(177.941)	154.249
Pajak Final Final Tax	(7,92%)	(1.207)	(16.445)	(15.237)	(15.115)
Pajak Kini Current Tax	(344,99%)	(7.003)	(9.033)	(2.030)	(18.726)
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(102,60%)	(51.209)	(1.296)	49.913	(11.641)
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak Total Tax Benefit (Expense)	(182,01%)	(59.419)	(26.774)	32.646	(45.480)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) For Current Year	133,79%	194.384	49.089	(145.295)	108.769
Program Imbalan Pasti Employee Benefits	58,01%	14.878	(10.768)	(25.646)	(15.999)
Perubahan nilai wajar asset Keuangan Changes in fair value of financial assets	-	(2.050)	(2.050)	-	-
Perubahan nilai wajar aset non keuangan Changes in fair value of non financial assets	(96,70%)	(330.607)	11.266	341.873	172
Rugi Loss	100,90%	70.197	628	(69.570)	2.697
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for Current Year	(100,37%)	(247.581)	(924)	246.657	(13.129)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) For Current Year	(52,48%)	(53.197)	48.165	101.362	95.639
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of The Entity	133,78%	194.375	49.085	(145.290)	106.620
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	191,42%	9	4	(5)	2.149
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income (Loss) Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk	(52,52%)	(53.235)	48.132	101.366	93.736
Kepentingan Non pengendali Non-controlling Interest	831,71%	38	33	(5)	1.903



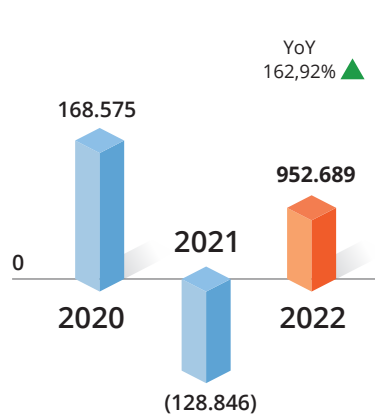
Pendapatan Usaha Bersih Net Revenues

Rp-juta | Rp-millions



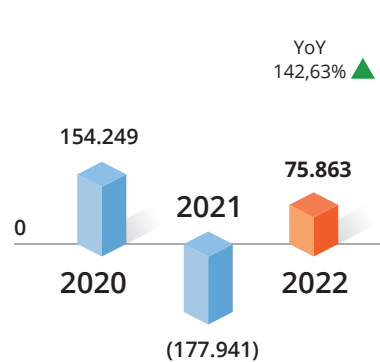
Laba Usaha Operating Profit

Rp-juta | Rp-millions



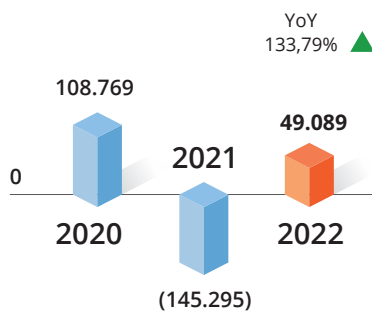
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax

Rp-juta | Rp-millions



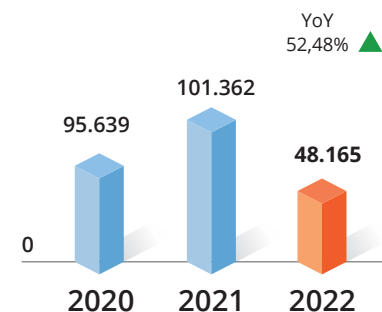
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year

Rp-juta | Rp-millions



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year

Rp-juta | Rp-millions



Pendapatan

PPI berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 22,11% dari Rp1,94 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,37 triliun pada tahun 2022.

Beban Pokok Penjualan

Seiring dengan tumbuhnya pendapatan Perusahaan, beban pokok pendapatan juga turut tumbuh dari Rp1,67 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,97 triliun pada tahun 2022. Perusahaan juga berhasil melakukan efisiensi terlihat dari pertumbuhan beban pokok pendapatan sebesar 17,77% yang lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan yakni sebesar 22,11%.

Income

PPI managed to record revenue growth of 22.11% from IDR1.94 trillion in 2021 to IDR2.37 trillion in 2022.

Cost of Revenues

Along with the growth of the Company's revenue, cost of revenue also grew from Rp1.67 trillion in 2021 to Rp1.97 trillion in 2022. The Company has also succeeded in making efficiency as seen from the growth in cost of revenue of 17.77% which is smaller than revenue growth of 22.11%.



Laba Bruto

Laba bruto dibukukan tumbuh 49,35% pada tahun 2022 menjadi Rp397,65 miliar. Pertumbuhan ini seiring dengan naiknya pendapatan usaha PPI. Laba bruto yang tumbuh lebih cepat dari pendapatan juga tak lepas dari keberhasilan PPI menekan beban pokok pendapatan tahun 2022.

Laba Usaha

Laba kotor PPI tahun 2022 tumbuh 49,35% dari Rp266,25 miliar pada tahun 2021, menjadi Rp397,65 pada tahun 2022. Pertumbuhan ini seiring dengan naiknya pendapatan PPI serta keberhasilan PPI menerapkan efisiensi terlihat dari keberhasilan menekan beban pokok pendapatan.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Setelah sempat mengalami kerugian pada tahun lalu, di tahun 2022 PPI kembali bangkit dan berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp75,86 miliar atau tumbuh 142,63% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan naiknya pendapatan Perusahaan.

Beban Pajak Penghasilan

PPI membukukan beban pajak tahun 2022 sebesar Rp26,77 miliar, meningkat 182,01% dari tahun sebelumnya di mana PPI membukukan manfaat pajak sebesar Rp32,65 miliar. Peningkatan beban pajak seiring dengan naiknya pendapatan sebelum pajak PPI.

Laba Tahun Berjalan

Seiring dengan kenaikan pendapatan, laba bersih PPI tahun 2022 melonjak 133,79% menjadi Rp49,09 miliar. Kemampuan PPI dalam menghasilkan laba turut meningkat menjadi 2,07% yang menandakan bahwa efisiensi yang diupayakan Perusahaan berjalan dengan baik.

Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan

PPI membukukan rugi komprehensif lain tahun 2022 sebesar Rp924 juta, jumlah tersebut mengalami penurunan 100,37% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 Perusahaan membukukan laba komprehensif lain sebesar Rp246,66 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena perubahan nilai wajar aset non keuangan.

Gross Profit

Gross profit was recorded to grow 49.35% in 2022 to Rp397.65 billion. This growth is in line with the increase in PPI's operating income. Gross profit, which grew faster than revenue, was also inseparable from PPI's success in reducing cost of revenue in 2022.

Operating Profit

PPI's gross profit in 2022 grew 49.35% from IDR 266.25 billion in 2021, to IDR 397.65 in 2022. This growth is in line with the increase in PPI's revenue and PPI's success in implementing efficiency as seen from the success in reducing the cost of revenue.

Profit Before Income Tax

After experiencing a loss last year, in 2022 PPI bounced back and managed to book a profit before tax of Rp 75.86 billion or grew 142.63% from the previous year. This increase was in line with the increase in the Company's revenue.

Income Tax Expense

PPI booked a tax expense of Rp26.77 billion in 2022, an increase of 182.01% from the previous year where PPI booked a tax benefit of Rp32.65 billion. The increase in tax expense is in line with the increase in PPI's pre-tax income.

Current Year Profit

Along with the increase in revenue, PPI's net profit in 2022 jumped 133.79% to Rp49.09 billion. PPI's ability to generate profits also increased to 2.07%, indicating that the efficiency pursued by the Company is running well.

Other Comprehensive Income for Current Year

PPI booked another comprehensive loss in 2022 of IDR 924 million, this amount decreased by 100.37% from the previous year whereas in 2021 the Company booked another comprehensive income of IDR 246.66 billion. This decrease was mainly due to changes in the fair value of non-financial assets.

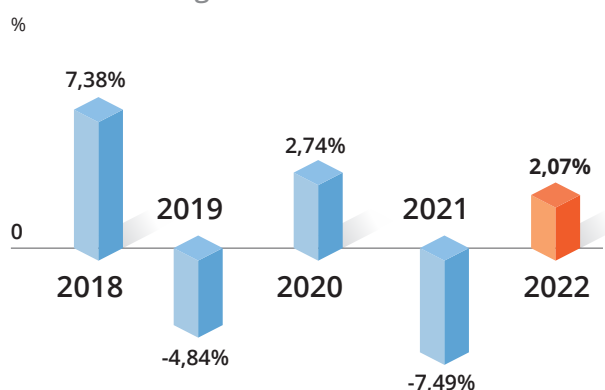


Dalam juta Rp | in millions of Rp

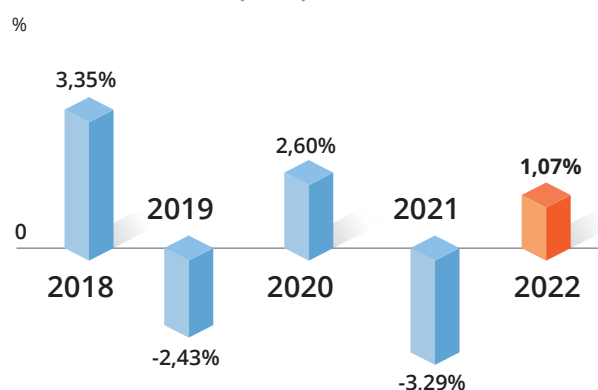
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Program Imbalan Pasti Employee Benefits	58,01%	14.878	(10.768)	(25.646)	15.999
Perubahan nilai wajar asset Keuangan Changes in fair value of financial assets	-	(2.050)	(2.050)	-	-
Perubahan nilai wajar asset non keuangan Changes in fair value of non financial assets	(96,70%)	(330.607)	11.266	341.873	172
Rugi Loss	100,90%	70.197	628	(69.570)	2.697
Laba Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(100,37%)	(247.581)	(924)	246.657	(13.129)

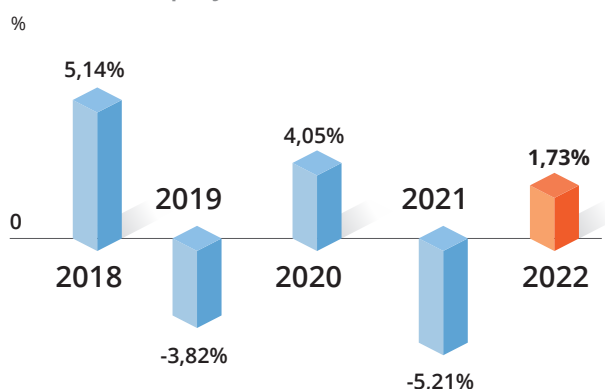
Margin Laba Bersih Net Profit Margin



Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets (ROA)



Tingkat Pengembalian Ekuitas Return on Equity (ROE)



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2022, PPI mencatat jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp48,17 miliar, mengalami penurunan 52,48% dibandingkan dengan tahun 2021

Total Comprehensive Income for The Current Year

In 2022, PPI recorded total comprehensive income of IDR48.17 billion, a 52.48% decrease compared to 2021 which amounted to IDR95.64 billion, this decrease was



yang sebesar Rp95,64 miliar, penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya laba komprehensif lain tahun berjalan terkait dengan perubahan nilai wajar aset non keuangan.

mainly due to a decrease in other comprehensive income for the year related to changes in the fair value of non-financial assets.

Jumlah Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan 52,52% pada tahun 2022 menjadi Rp48,13 miliar dari Rp101,37 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terkait dengan turunnya laba komprehensif tahun 2022.

Total Comprehensive Income attributable to Owners of the Parent Entity

Total comprehensive income attributable to owners of the parent entity decreased by 52.52% in 2022 to Rp48.13 billion from Rp101.37 billion in the previous year. This decrease was related to the decrease in comprehensive income in 2022.

Analisis Arus Kas

Cash Flows Analysis

Analisis Arus Kas

PPI membukukan kenaikan kas dan setara kas pada tahun 2022 sebesar 4,83% dari Rp173,06 miliar menjadi Rp181,42 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dan investasi diimbangi oleh turunnya kas yang diterima dari aktivitas pendanaan.

Cash Flows Analysis

PPI posted an increase in cash and cash equivalents in 2022 by 4.83% from Rp 173.06 billion to Rp 181.42 billion. This increase was due to the increase in net cash received from operating and investing activities offset by the decrease in cash received from financing activities.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Arus Kas Statement of Cashflows					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	26,01%	494.388	2.395.403	1.901.015	4.051.071
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payment to vendors and employees	(20,15%)	(392.725)	(2.341.463)	(1.948.737)	(3.629.711)
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya Cash payment to operational expenses and others	(41,18%)	(7.514)	(25.764)	(18.250)	(965)
Pembayaran pajak Tax payment	(459,76%)	(38.973)	(47.450)	(8.477)	(42.877)
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities	74,11%	55.175	(19.273)	(74.449)	377.516
Pembelian aset tetap Acquisition of fixed assets	84,19%	50.404	(9.465)	(59.869)	(101.431)
Penambahan properti investasi Addition of investment property	-	(463)	(463)	-	-
Penarikan (penempatan) deposito Withdrawal (placement) deposit	192,17%	39.256	18.828	(20.428)	16.167
Penambahan aset lain-lain Acquisition of other assets	2,62%	66	(2.450)	(2.516)	(15.440)

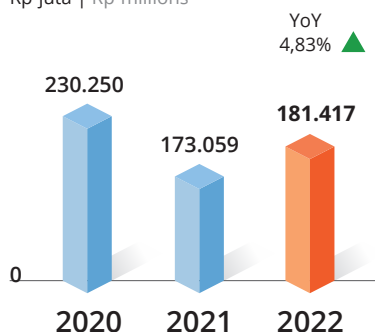


Penambahan aset tidak berwujud Acquisition of intangible assets	93,51%	12.763	(885)	(13.648)	(7.072)
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities	105,77%	102.026	5.565	(96.462)	(107.775)
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek lainnya Receipts (payments) of other current financial liabilities	(70,69%)	(85.197)	35.319	120.516	(144.611)
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka Panjang Receipts (payments) of long term payables	(176,33%)	(8.390)	(13.149)	(4.758)	9.523
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	94,94%	1.935	(103)	(2.038)	(283)
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities	(80,59%)	(91.652)	22.067	113.719	(135.470)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	114,62%	65.550	8.359	(57.191)	134.270
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalent At the beginning of the year	(24,84%)	(57.191)	173.059	230.250	95.979
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Cash And Cash Equivalents At The End Of The Year	4,83%	8.359	181.418	173.059	230.250

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Rp-juta | Rp-millions



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

PPI mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp19,27 miliar, berhasil ditekan hingga 74,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp74,45 miliar. Hal ini didorong oleh naiknya penerimaan kas dari pelanggan tahun 2022 seiring dengan naiknya pendapatan PPI.

Arus kas dari Aktivitas Investasi

PPI berhasil memperoleh kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp5,57 miliar pada tahun 2022, tumbuh 105,77% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2021 PPI mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp96,46. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh penarikan deposito, dan penambahan aset tidak berwujud yang lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Cash Flow from Operating Activities

PPI recorded net cash used for investing activities in 2022 of Rp19.27 billion, successfully reduced by 74.11% compared to the previous year which was recorded at Rp74.45 billion. This was driven by an increase in cash receipts from customers in 2022 in line with the increase in PPI's revenue.

Cash Flow from Investment Activities

PPI managed to obtain net cash from investing activities of IDR5.57 billion in 2022, growing 105.77% from the previous year where in 2021 PPI recorded net cash used for investing activities of IDR96.46. This growth was mainly driven by the withdrawal of deposits, and the addition of intangible assets which was smaller than the previous year.



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2022, PPI memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp22,07 miliar, mengalami penurunan 80,59%. Penurunan ini disebabkan karena penerimaan pinjaman pendek tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2021.

Cash Flow from Financing Activities

In 2022, PPI obtained net cash from financing activities of IDR 22.07 billion, a decrease of 80.59%. This decrease was due to the receipt of short-term loans in 2022 being smaller than in 2021.

Analisis Rasio Keuangan

Financial Ratios Analysis

PPI menggunakan berbagai rasio keuangan dasar berikut ini guna mengukur tingkat kesehatan dan kinerja Perseroan. Berikut adalah perbandingan rasio keuangan konsolidasian PPI dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

PPI uses the following basic financial ratios to measure the health and performance of the Company. The following is a comparison of PPI's consolidated financial ratios in the last 3 (three) years:

Rasio Keuangan Financial Ratios				
Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio lancar Current Ratio	%	123,50%	133,63%	178,88%
Rasio cepat Quick Ratio	%	111,33	87	110,4
Rasio kas Cash Ratio	%	22,76%	28,09%	44,90%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Rasio utang terhadap aset Debt to assets ratio	%	38,16%	36,81%	35,95%
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio	%	61,71%	58,25%	56,12%
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Collection periods	Hari Days	65	5,7	11,8
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	66,2	12,39	12,95
Perputaran persediaan Inventory turnover	Kali Times	15	14	10,5
Perputaran total aset Total assets turnover	Kali Times	54,13	45,09	96,08
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Imbalan atas Aset Return non Assets (ROA)	%	1,07%	(3,29%)	2,60%
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	1,73%	(5,21%)	4,05%
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	3,28%	(5,3%)	4,8%
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin (OPM)	%	3,42%	(6,65%)	4,24%
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	16,80%	13,7%	13%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	2,07%	(7,49%)	2,74%
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	5,53	(4,2)	5,1



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PPI senantiasa melakukan evaluasi dan menganalisis tingkat kesehatan keuangannya secara berkala untuk menjaga kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang akan jatuh tempo. Keandalan PPI dalam membayar utang-utangnya setidaknya tercermin dari hasil perhitungan rasio likuiditas berikut ini:

Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debt

PPI always evaluates and analyzes its financial health on a regular basis to maintain its ability to meet long-term and short-term obligations that will come due. PPI's reliability in paying its debts is at least reflected in the calculation of the following liquidity ratios:

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Rasio lancar Current Ratio	%	123,50%	133,63%	178,88%
Rasio cepat Quick Ratio	%	111,33	87	110,4
Rasio kas Cash Ratio	%	22,76%	28,09%	44,90%

Rasio likuiditas PPI cukup terjaga dengan baik pada tahun 2022. Rasio cepat mengalami kenaikan menjadi 111,33%. Adapun rasio lancar dan rasio kas sedikit mengalami penurunan masing-masing menjadi 123,50% dan 22,76%. Namun, rasio lancar dengan nilai di atas 100% tetap menandakan bahwa PPI memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajibannya, dikarenakan aktiva lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki.

PPI's liquidity ratio was fairly well maintained in 2022. The quick ratio increased to 111.33%. The current ratio and cash ratio decreased slightly to 123.50% and 22.76%, respectively. However, the current ratio with a value above 100% still indicates that PPI has a good ability to pay off its obligations, because its assets are greater than its liabilities.

Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Rasio utang terhadap aset Debt to assets ratio	%	38,16%	36,81%	35,95%
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio	%	61,71%	58,25%	56,12%

Adapun kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang juga dalam keadaan baik terlihat dari rasio utang terhadap aset yang sebesar 38,16% dan rasio utang terhadap ekuitas 61,71%.

The Company's ability to fulfill all its short and long-term obligations is also in good condition as seen from the debt-to-asset ratio of 38.16% and debt-to-equity ratio of 61.71%.



Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Aktivitas Lainnya

Selain menjaga rasio likuiditasnya, PPI juga mengoptimalkan kemampuannya dalam mengumpulkan piutang. Sepanjang tahun 2022, tingkat kolektibilitas piutang PPI tercatat sebesar 65 hari. Adapun perputaran utang PPI pada tahun 2022 sebesar 66 hari. Perputaran persediaan sebesar 15 kali serta perputaran total aset sebesar 54 hari.

Receivable Collectibility and Other Activity Ratios

In addition to maintaining its liquidity ratio, PPI also optimized its ability to collect receivables. Throughout 2022, PPI's accounts receivable collectibility rate was recorded at 65 days. PPI's debt turnover in 2022 amounted to 66 days. Inventory turnover was 15 times and total asset turnover was 54 days.

Rasio Aktivitas | Activity Ratio

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Collection periods	Hari Days	65	5,7	11,8
Perputaran Utang Debt Turnover	Hari Days	66,2	12,39	12,95
Perputaran persediaan Inventory turnover	Kali Times	15	14	10,5
Perputaran total aset Total assets turnover	Kali Times	54,13	45,09	96,08

Kemampuan Menghasilkan Laba

Di tahun 2022 PPI mampu bangkit ditunjukkan dari peningkatan pada seluruh rasio profitabilitas. Pada tahun 2022, imbalan atas aset tercatat sebesar 1,07%, imbalan kepada pemegang saham sebesar 1,73%, imbalan investasi sebesar 3,28%, margin laba usaha sebesar 3,42%, margin laba kotor sebesar 16,80%, margin laba bersih sebesar 2,07%, serta margin ebitda sebesar 5,53%.

Ability to Generate Profit

In 2022 PPI was able to rise as shown by an increase in all profitability ratios. In 2022, return on assets was recorded at 1.07%, return to shareholders at 1.73%, return on investment at 3.28%, operating profit margin at 3.42%, gross profit margin at 16.80%, net profit margin at 2.07%, and EBITDA margin at 5.53%.

Rasio Profitabilitas | Profitability Ratio

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Imbalan atas Aset Return non Assets (ROA)	%	1,07%	(3,29%)	2,60%
Imbalan kepada pemegang saham Return to Equity (ROE)	%	1,73%	(5,21%)	4,05%
Imbalan investasi Return on Investment (ROI)	%	3,28%	(5,3%)	4,8%
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin (OPM)	%	3,42%	(6,65%)	4,24%
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	16,80%	13,7%	13%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	%	2,07%	(7,49%)	2,74%
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	5,53%	(4,2%)	5,1%



Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Capital Structure Policy

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal PPI dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kebijakan struktur modal PPI bersifat fleksibel serta senantiasa memperhatikan faktor makro ekonomi baik global maupun nasional dan karakteristik risiko aset yang mendasarinya. PPI menilai kebijakan struktur modal yang solid sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PPI.

Dalam rangka menjaga fundamental struktur modal yang ada, PPI dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengelola pengembalian modal kepada pemegang saham, atau menjual aset untuk mengurangi utang. PPI memonitor kualitas permodalannya melalui rasio debt-to-equity agar nilai utangnya tidak melebihi aset yang dimiliki.

Struktur Permodalan

Berikut ini adalah komposisi struktur modal PPI selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Management Policy on Capital Structure

The management of PPI's capital structure is carried out in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association. PPI's capital structure policy is flexible and always pays attention to global and national macroeconomic factors and the risk characteristics of the underlying assets. PPI assesses that a solid capital structure policy is very important in supporting the sustainability of PPI's operations.

In order to maintain the fundamentals of the existing capital structure, PPI may adjust the amount of dividends paid to shareholders, manage the return of capital to shareholders, or sell assets to reduce debt. PPI monitors the quality of its capital through the debt-to-equity ratio so that the value of its debt does not exceed its assets.

Capital Structure

The following is the composition of PPI's capital structure over the past 3 (three) years:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Struktur Modal Capital Structure						
Uraian Description	2022		2021		2020	
	Juta Rp millions of Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp millions of Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)	Juta Rp millions of Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	797.075	17,38%	616.103	13,97%	515.484	12,31%
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	952.689	20,78%	1.007.482	22,84%	990.254	23,64%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.749.764	38,16%	1.623.585	36,81%	1.505.739	35,95%
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.835.603	61,84%	2.787.438	63,19%	2.683.052	64,05%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.585.367	100,00%	4.411.023	100,00%	4.188.791	100,00%



Struktur modal PPI sepanjang tahun 2021 terdiri atas Liabilitas sebesar Rp1,62 triliun atau 35,95% dari total modal dan Ekuitas sebesar Rp2,78 triliun atau sebesar 64,05% dari total modal. PPI tidak memiliki liabilitas lain terkait dengan permodalan karena PPI bukan merupakan entitas yang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh Pemerintah untuk memenuhi ketentuan permodalan.

Kesesuaian Pengungkapan dengan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi mengenai struktur modal PPI pada sub-bahasan ini sudah sesuai dengan Laporan Keuangan PPI Tahun Buku 31 Desember 2021.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen PPI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku agar cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada penerapannya, pembagian dividen ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan nominal yang dibayarkan senantiasa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain namun tidak terbatas pada tingkat kesehatan perusahaan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk kegiatan operasional, modal kerja, dan pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan lain.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, PPI tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Investasi Barang Modal dan Ikatan Material Terkait yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Sepanjang tahun 2022, PPI tidak mencatat adanya ikatan material untuk investasi barang modal.

Adapun Perusahaan melakukan investasi pada tahun 2022 berupa aset tetap yaitu bangunan, kendaraan, inventaris kantor, aset tidak berwujud, dan lain-lain.

Tujuan Investasi

Realisasi investasi pada tahun 2022 diarahkan untuk pengembangan usaha dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan menurut skala prioritas yang telah ditetapkan.

Until 2022, PPI's capital structure was dominated by equity, accounting for 61.84% or Rp2.84 trillion, while the remaining 38.16% represented liabilities amounting to Rp1.75 trillion. PPI does not have any other liabilities related to capitalization since PPI is not an entity required or mandated by the Government to fulfill capital requirements.

Disclosure Compliance with Financial Statements

The disclosure of information regarding PPI's capital structure in this subtopic is in accordance with PPI's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022.

Dividend Policy

PPI's dividend policy is in accordance with the applicable laws and regulations, especially Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in which the company is obliged to set aside a certain amount of net profit each financial year so that the reserve reaches at least 20% of the total issued and paid-up capital.

In its application, the distribution of dividends is determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) with the nominal paid always considering several things, including but not limited to the level of health of the company, the level of capital adequacy, the need for funds for operational activities, working capital, and business development, without reducing the right of the GMS to decide otherwise.

From 2017 to 2022, PPI does not distribute dividends to Shareholders.

Investment in Capital Goods and Related Material Ties Realized in the Last Financial Year

Throughout 2022, PPI did not record any material ties for investment in capital goods.

The Company made investments in 2022 in the form of fixed assets, namely buildings, vehicles, office inventory, intangible assets, and others.

Investment Objective

Investment realization in 2022 is directed at business development and is adjusted to the Company's financial condition according to a predetermined priority scale.



Sumber Pendanaan

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal tahun 2022 berasal dari pendanaan kas internal yang sudah dianggarkan di dalam RKAP Tahun 2022. Denominasi mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

Source of Funding

The source of funds used for capital expenditures in 2022 comes from internal cash funding that has been budgeted in the 2022 RKAP. The currency denomination used is Rupiah.

Investasi Barang Modal | Investment in Capital Goods

Uraian Description	2022	2021
Tanah/Sertifikasi Land/Sertification	-	2.282
Bangunan Building	7.121	18.916
Kendaraan Vehicle	1.347	3.260
Inventaris Kantor Office inventory	1.328	3.998
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	927	1.206
Lain – lain Others	3.655	9.190
Total Investasi Total Investment	14.378	38.852

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Sehingga tidak terdapat analisis lebih lanjut terkait dampak terhadap Perusahaan.

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Throughout 2022, no financial information has been reported that contains extraordinary and infrequent events. Therefore, there is no further analysis of the impact on the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tahun 2022 yang dianggap relevan, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK 57 “provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi” tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), “instrumen keuangan”;
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), “sewa”.

Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year

The Company has adopted the following accounting standards in 2022 which are considered relevant, but did not result in significant changes to the Group’s accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the financial statements in the current year:

- Amendment to PSAK 57 “provisions, contingent liabilities and contingent assets” on onerous contracts - cost of fulfilling the contract;
- PSAK 71 (Adjustment 2020), “financial instruments”;
- PSAK 73 (Adjustment 2020), “leases”.



Informasi Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

PPI tidak memiliki fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Material

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Adapun Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (catatan) seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

1. Seseorang atau anggota terdekat dari pihak keluarga dianggap berelasi terhadap entitas laporan keuangan jika orang tersebut:
 - Memiliki kendali atau kendali sebagian terhadap entitas laporan;
 - Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas laporan; dan
 - Seorang anggota dari manajemen kunci entitas laporan atau laporan induk perseroan.
2. Sebuah entitas berelasi terhadap entitas laporan jika terdapat kondisi sebagai berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Entitas yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - Satu Entitas adalah entitas asosiasi atau ventura sebagian dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura sebagian yang merupakan anggota suatu Entitas, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas adalah ventura sebagian dari pihak ketiga yang sama;
 - Suatu entitas adalah ventura sebagian dari pihak ketiga adalah sebuah entitas lain adalah perseroan dari pihak ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan sebagian oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a;
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf a memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil Perusahaan kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).

Material Information After the Date of the Accountant Report

PPI has no material facts that occurred after the date of the audited financial statements.

Information on Material Transactions that Contain Conflicts of Interest and/or Transaction with Affiliated/Material Parties

During 2022, there were no transactions containing conflicts of interest, so there is no information disclosed.

The Company conducts transactions with related parties. All transactions with related parties have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements (notes) as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures as follows:

1. A person or a close member of a family is considered to be related to a financial reporting entity if that person:
 - Has control or joint control over the reporting entity;
 - Has significant influence over the reporting entity; and
 - Is a member of the key management of the reporting entity or the parent company.
2. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions exist:
 - The entity and the reporting entity are members of the same entity (meaning a parent, subsidiary, subsequently related to another entity);
 - One entity is an associate or partial venture of the other entity (or an associate or partial venture that is a member of an entity of which the other entity is a member);
 - Both entities are partial ventures of the same third party;
 - One entity is a partial venture of a third party is another entity is a company of a third party;
 - The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or another entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - An entity controlled or partially controlled by a person identified in (a);
 - The person identified in (a) has significant influence over the Entity or key personnel of the Entity (or a parent of the Entity).



Transaksi Material dengan Pihak Berelasi/ Afiliasi

Dalam aktivitas bisnisnya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai persyaratan komersial normal, sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dan sifat transaksi antara Perseroan dengan pihak berelasi tercantum pada tabel sebagai berikut:

Material Transaction with Affiliated/Related Parties

In its business activities, the Company conducts various transactions with related parties that are not conflict of interest transactions.

All transactions with related parties are conducted at arm's length in accordance with normal commercial terms, as are transactions with unrelated parties.

The nature of the relationship and nature of transactions between the Company and related parties are listed in the following table:

Sifat Hubungan dan Transaksi Pihak Berelasi Relationship and Transaction Nature of Related Parties	
Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Pertamina Patra Niaga	Transaksi kerja sama operasional SPBU Gas station operational cooperation transaction
PT Pupuk Indonesia Holding Company	Transaksi kerja sama kedistributoran pupuk Fertilizer distribution cooperation transaction
PT Indofarma Tbk	Transaksi kerja sama kedistributoran produk obat generik Cooperation transaction for the distribution of generic medicine products
PT Bio Farma	Transaksi kerja sama kedistributoran vaksin serum, diagnostik kit dan alat kesehatan Cooperative transactions in the distribution of vaccine serum, diagnostic kits and medical devices

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties for 2022 and 2021 are as follows:

Dalam Rp | in Rp

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Balances and Transactions with Related Parties		
Uraian Description	2022	2021
Penjualan Sales		
Pupuk dan Pestisida Fertilizer and Pesticides		
Badan Usaha Milik Desa Village-Owned Enterprise	3.472.741.956	5.094.647.265
Dinas pertanian dan Peternakan Department of Agriculture and Livestock	8.143.717.553	2.669.587.271
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	-	2.250.907.636
PT Dahana	1.987.627.750	1.317.854.548
PT Petrosida Gresik	98.000.000	1.640.920.001
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	149.000.000



Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Research and Assessment of Agricultural Technology	-	15.340.909
PT Pertani (Persero)	-	-
Jumlah Total	13.702.087.259	13.138.257.630
Produk Farmasi Pharmaceutical Products		
PT Pertani (Persero)	-	-
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Regional Water Company	89.832.012	60.381.819
Jumlah Total	89.832.012	60.381.819
Bahan Kimia Berbahaya Hazardous Chemicals		
RSUD Cideres	577.462.270	26.875.813.842
Dinas Kesehatan Department of Health	2.086.475.889	3.351.615.809
PT Kimia Farma Tbk	128.213.608	248.006.451
PT Rajawali Nusindo Indonesia	2.823.977	716.768.114
PT Pertamina (Persero)	388.669.021	164.451.683
Dinas pertanian dan Peternakan Department of Agriculture and Livestockaa	-	58.209.091
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia The Ministry of Defense of the Republic of Indonesiaaaa	-	61.818.100
Jumlah Total	3.183.644.765	31.476.683.090
Produk Konsumsi Consumer Products		
Kementerian Sosial Republik	-	646.956.400
Indonesia Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia	-	266.995.545
Dinas Sosial Social service	-	218.911.556
Dinas Pangan Food service	304.783.220	194.640.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Department of Industry and Commerce	329.057.500	34.950.227
Perum Bulog Perum Bulog	572.220.000	11.454.545
Kepolisian Resor (POLRES) Police Department	-	3.518.181
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.954.547
PT Reksa Multi Usaha	22.530.500	-
Jumlah Total	1.228.591.220	1.379.381.001
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik Rent, Warehousing and Logistics Products		
PT Petrokimia Gresik	157.301.030.294	178.667.945.182
PT Pupuk Kalimantan Timur	64.879.679.379	74.731.905.367
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	35.944.271.628	32.843.001.160
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19.108.108	25.939.826.588



PT Pupuk Iskandar Muda	25.043.873.641	20.156.980.995
PT Rajawali Nusindo	1.523.758.834	17.079.583.082
PT Pembangkitan Jawa Bali	-	14.032.510.500
PT Wijaya Karya Beton	1.705.194.451	10.229.040.892
PT Timah, Tbk	-	7.557.828.052
Jumlah Total	286.416.916.335	381.238.621.818
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik Rent, Warehousing and Logistics Products		
PT Petrokimia Gresik	157.301.030.294	178.667.945.182
PT Pupuk Kalimantan Timur	64.879.679.379	74.731.905.367
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	35.944.271.628	32.843.001.160
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19.108.108	25.939.826.588
PT Pupuk Iskandar Muda	25.043.873.641	20.156.980.995
PT Rajawali Nusindo	1.523.758.834	17.079.583.082
PT Pembangkitan Jawa Bali	-	14.032.510.500
PT Wijaya Karya Beton	1.705.194.451	10.229.040.892
PT Timah, Tbk	-	7.557.828.052
Badan Nasional Penanggulangan Bencana National Agency for Disaster Countermeasure	-	
PT Pupuk Kujang	11.429.092.022	7.487.240.462
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	5.422.101.336
PT Perkebunan Nusantara VIII	5.437.287.928	-
PT Semen Padang Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	174.689.840	5.286.250.916
Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	3.933.795.580	4.074.321.080
PT Len Industri (Persero)	-	3.884.950.278
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi	1.085.471.662	3.646.195.504
Kementerian Sosial The Ministry of Social	-	3.788.434.516
PT Perum Pembangunan Nasional	-	-
Yayasan Bumh Untuk Indonesia	1.593.091.500	-
PT Pembangunan Perumahan Presisi	79.500.000	-
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	-
Lainnya Others	50.967.337.095	7.862.291.384
Jumlah Total	361.117.181.962	422.690.407.294
Penjualan Pihak Berelasi Related Parties Total Sales	379.321.337.216	468.745.708.114
Persentase terhadap Total Penjualan Percentage to Total Sales	16,02%	24,18%



Pembelian | Purchase

Pupuk dan Pestisida | Fertilizer and Pesticides

PT Petro Kimia Gresik	190.369.663.092	252.108.336.626
PT Pupuk Kalimantan Timur	110.060.366.558	120.317.046.563
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	60.251.213.434	44.114.823.328
PT Pupuk Indonesia Pangan	-	22.937.302.831
PT Petrosida Gresik	6.309.142.676	7.461.907.403
PT Pupuk Kujang	40.650.663.530	10.589.042.510
PT Pupuk Iskandar Muda	15.567.722.960	16.185.014.671
PT Mega Eltra	1.241.216.216	3.198.549.474
PT Pertani	248.544.600	1.485.227.273
Jumlah Total	424.698.533.066	478.397.250.679

Produk Pertanian | Agriculture Products

PT Pertani	-	11.997.500
Jumlah Total	-	11.997.500

Produk Konsumer | Consumer Products

Perum Bulog	403.025.115	108.450.120
PT Rajawali Nusindo	6.823.716.903	35.886.908
PT Garam	59.082.000	2.350.920
PT Pertani	649.079.054	33.630.000
Jumlah Total	7.498.903.072	180.317.948

Farmasi | Pharmacy

PT Biofarma (Persero)	1.450.824.132	86.011.317
PT Indofarma Global Medica	11.902.942	737.129.416
PT Kimia Farma	-	681.406.838
PT Kimia Farma Trading & Distribution	1.664.426.766	1.271.710.710
PT Pyridam Farma	-	614.315.253
Jumlah Total	3.127.153.840	3.390.573.534

Produk Bahan Bangunan | Building Material Products

PT Semen Padang	8.924.804.037	8.175.749.820
Jumlah Total	8.924.804.037	8.175.749.820

Stasiun Pompa Bensin umum | General Petrol Pump Station

PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)	21.933.705.256	18.583.250.116
Jumlah Total	21.933.705.256	18.583.250.116

Pembelian Pihak Berelasi | Total Purchase Related Parties

Persentase terhadap Total Pembelian Percentage to Total Purchase	34,33%	62,73%
--	---------------	---------------



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PPI bukan merupakan perusahaan terbuka dan belum melakukan penawaran umum sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sepanjang tahun 2022.

Kontribusi Kepada Negara

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPI berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Tahun 2022, Jumlah setoran PPh Badan di tahun 2022 sebesar Rp209,95 miliar, mengalami peningkatan 12,26% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp187,03 miliar. Peningkatan ini seiring dengan naiknya pendapatan Perusahaan.

Realization of the Use of Funds from the Public Offering-

PPI is not a public company and has not conducted a public offering, so there is no information regarding the total proceeds, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds as of the date of the GMS approval of the realization of the use of proceeds from the public offering throughout 2022.

Contributions to the State

Responsibility for tax payment obligations is a reflection of state obligations in the field of taxation in national development. Therefore, PPI is committed to fulfilling the obligation to pay taxes, as a taxpayer and as a tax withholder.

In 2022, the amount of Corporate Income Tax deposits in 2022 amounted to IDR209.95 billion, an increase of 12.26% compared to 2021 which amounted to IDR187.03 billion. This increase was in line with the increase in the Company's revenue.

Dalam juta Rp | in millions of Rp

Kontribusi Pajak PPI (PPh Badan) PPI Tax Contribution (Corporate Income Tax)					
Uraian Description	YoY 2021-2022		2022	2021	2020
	%	Nominal			
Pajak Kini—tahun berjalan Tax—current year	12,26%	22.922	209.951	187.029	128.851

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun Mendatang

Comparison between Target, Realization, and Projection of Financial

Setiap tahun, PPI menyusun komitmen rencana kerja dan anggaran yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu, PPI menjadikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas operasional di sepanjang tahun ini. Penyusunan proyeksi tersebut senantiasa mempertimbangkan analisa faktor internal dan faktor eksternal, serta mengamati peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap lini usaha PPI.

Every year, PPI prepares a work plan and budget commitment that is mutually agreed between the Board of Commissioners and the Board of Directors. For this reason, PPI makes the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as the basis for implementing all operational activities throughout this year. The preparation of these projections always considers analyzing internal and external factors, as well as observing opportunities and challenges that affect PPI's business lines.



Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Keuangan

Secara ringkas, berikut ini dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi RKAP Tahun 2022, serta proyeksi tahun 2023 mendatang.

Comparison between Target, Realization, and Projection of Financial

In summary, the following can be seen in comparison between the target and realization of the 2022 RKAP, as well as projections for the upcoming 2023.

dalam juta Rp, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rp, unless otherwise stated

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Keuangan Comparison between Target, Realization, and Projection of Financial				
Uraian Description	Proyeksi 2023 2023 Projection	Pencapaian 2022 (%) 2022 Achievement (%)	Realisasi 2022 2022 Realization	Target 2022 2022 Target
Jumlah Aset Total Assets	3.162	105,45	4.585.367	4.348.543
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.736,20	107,98	2.835.603	2.625.947
Pendapatan Revenues	2.881,84	79,27	2.367.519	2.986.469
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Income (Loss) for Current Year	41.43	72,15	49.089	68.038

Aset PPI tahun 2022 tercatat sebesar Rp4,56 triliun, terealisasi 105,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4,35 triliun. Jumlah tersebut juga tumbuh jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,95% dari Rp4,41 triliun. Sementara nilai ekuitas pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,84 triliun terealisasi 107,98% dari target yang telah ditetapkan yang sebesar Rp2,63 triliun. Dibandingkan dengan ekuitas tahun 2021, jumlah tersebut tumbuh 1,73%. Adapun Perusahaan menetapkan proyeksi 2023 untuk aset dan ekuitas masing-masing sebesar Rp3,16 triliun dan Rp3,74 triliun.

Pendapatan PPI tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,37 triliun atau tercapai 79,27% dari target yang sebesar Rp2,99 triliun. Namun, pendapatan PPI tumbuh jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 22,11%. Laba bersih tahun 2022 dibukukan sebesar Rp49,09 miliar atau tercapai 72,15% dari target yang sebesar Rp68,04 miliar. Meski demikian jumlah laba bersih tahun 2022 tumbuh 133,79% dibandingkan dengan tahun 2021 di mana Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp145,30 miliar. Adapun Perusahaan memproyeksikan pendapatan dan laba bersih tahun 2023 akan dibukukan sebesar Rp2,88 triliun dan Rp41,43 miliar.

PPI's assets in 2022 were recorded at IDR 4.56 trillion, realized 105.45% of the predetermined target of IDR 4.35 trillion. This amount also grew when compared to 2021 by 3.95% from IDR 4.41 trillion. Meanwhile, the equity value in 2022 was recorded at IDR 2.84 trillion, realized 107.98% of the predetermined target of IDR 2.63 trillion. Compared to equity in 2021, this amount grew by 1.73%. The Company set 2023 projections for assets and equity at IDR 3.16 trillion dan IDR 3.74 trillion respectively.

PPI's revenue in 2022 was recorded at Rp2.37 trillion or 79.27% of the target of Rp2.99 trillion. However, PPI's revenue grew when compared to 2021 by 22.11%. Net profit in 2022 was recorded at IDR 49.09 billion or 72.15% of the target of IDR 68.04 billion. However, the total net profit in 2022 grew 133.79% compared to 2021 where the Company posted a net loss of IDR 145.30 billion. The Company projects that revenue and net profit in 2023 will be recorded at IDR 2.88 trillion dan IDR 41.43 billion.



Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional

Comparison between Target, Realization, and Projection of Operational

Key Performance Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator Utama Perusahaan (*Key Performance Indicators/ "KPI"*) Konsolidasian per 31 Desember 2021 tercermin dari matriks penilaian KPI PPI, di mana penetapan perspektif, indikator serta pembobotannya telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN. Berdasarkan pengukuran Indikator Utama Perusahaan, sampai dengan tahun 2022 PPI mendapatkan skor 83,40.

Key Performance Indicator (KPI) and Company Sound Level

The Consolidated Key Performance Indicators ("KPIs") as of December 31, 2021 are reflected in PPI's KPI assessment matrix, where the determination of perspectives, indicators and their weighting has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs and Criteria for Assessing SOE Superior Performance. Based on the measurement of the Company's Key Indicators, until 2022 PPI received a score of 83.40.

Key Performance Indicator (KPI)					
KPI 2022	Satuan Unit	2022			
		Target 2022 2022 Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Nilai Ekonomi Sosial – Financial Economic Social - Financial Value		30			18,40
EBITDA	Rp miliar Rp billions	5	64,72	51%	2,57
ROIC Against WACC	%	5	(3,70)	86%	4,29
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	2,5	3,90	56%	1,41
Interest Bearing Debt to Invested Capital	Kali Times	2,5	0,08	80%	2,00
Penyusunan Kajian dan Implementasi Transformasi Keuangan Holding Pangan Preparation of Study and Implementation of Food Holding Financial Transformation	Waktu Times	2,5	85	85%	2,13
Jumlah Stockpoint (hub dan spoke) Number of Stockpoints (hub and spoke)	Jumlah Quantity	5	31	50%	2,50



Jumlah Jenis produk yang diekspor Number of product types exported	Produk Product	5	1	20%	1,00
Jumlah warung pangan Number of warung pangan	Mitra Partner	2,5	90.179	100,2%	2,50
Inovasi Model Bisnis		20			22,00
Jumlah distributor terdaftar bahan berbahaya (DT-B2) Jumlah distributor bahan berbahaya yang terdaftar (DT-B2)	Jumlah Quantity	5	17	110%	5,50
Produk Holding Pangan yang dijual melalui PPI Food Cluster products sold through PPI	Jumlah Quantity	5	6	110%	5,50
Sinergi BUMN SOE Synergy	Jumlah Perusahaan Number of Companies	5	6	110%	5,50
Pengelolaan Kegiatan Logistik anggota holding pangan Management of Logistics Activities of Food Cluster Members	Jumlah Perusahaan Number of Companies	5	3	110%	5,50
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership		20			21,00
Implementasi Sistem Konsolidasi Keuangan Holding Pangan Implementation of Food Cluster Financial Consolidation System	Waktu Times	5	100	100%	5,00
Implementasi Enterprise Resource Planing (ERP) Implementasi Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning/ERP)	Waktu Times	5	Juli (5 Modul)	110%	5,50
Implementasi Aplikasi Sales Force Sales Force Application Implementation	Jumlah Cabang Number of Branches	5	32	110%	5,50
Implementasi Aplikasi Pendukung Lainnya yang Terintegrasi dengan ERP Implementation of Other Supporting Applications Integrated with ERP	Waktu Times	5	Oktober	100%	5,00
Peningkatan Investasi Increased Investment		20			11,00



Pelaksanaan optimalisasi 10 (sepuluh) titik aset baru Implementation of optimization of 10 (ten) new asset points	Titik Aset Asset Point	10	7	70%	7,00
Kerja sama aset jangka panjang Long-term asset cooperation	Titik Aset Asset Point	10	2	40%	4,00
Pengembangan Talenta Talent Development		10			11,00
Milenial (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent) Millennial (<= 42 years old) in Nominated Talent)	%	5	47	110%	5,50
Perempuan dalam Nominated Talent Women in Nominated Talent	%	5	25	110%	5,50
Total Bobot KPI Total KPI Weight		100			83,40

Tingkat Kesehatan/Kinerja Perusahaan Konsolidasian tahun 2022 telah menempatkan Tingkat Kesehatan PPI Tahun 2022 dengan total skor sebesar “65,3” atau masuk dalam kelompok perusahaan “SEHAT” kategori “A”.

The Health Level / Performance of the Consolidated Company in 2022 has placed PPI's Health Level in 2022 with a total score of “65.3” or in the “HEALTHY” company group category “A”.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level		
Uraian Description	Bobot Weight	Skor 2022 Score 2022
Aspek Keuangan Financial Aspect		
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	20	4,0
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	15	3,0
Rasio Kas Cash Ratio	5	4,0
Rasio Lancar Current Ratio	5	4,0
Collection Period Collection Period	5	5,0
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	5	5,0
Perputaran Total Asset Total Asset Turnover	5	4,0
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva Ratio of Own Capital to Total Assets	10	8,0
Total Skor Aspek Keuangan Total Score of Financial Aspects	70	37,0



Aspek Operasional | Operational Aspect

Jumlah mitra warung pangan Number of warung pangan partners	6	6,0
---	---	-----

Jumlah stockpoint (hub & spoke) Number of stockpoints (hub & spoke)	6	5,3
--	---	-----

Jumlah Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT B2) Number of Registered Distributors of Hazardous Materials (DT B2)	3	3,0
--	---	-----

Total Skor Aspek Operasional Total Operational Aspect Score	15	14,3
---	----	------

Aspek Administrasi | Administration Aspect

Laporan Perhitungan Tahunan Annual Calculation Report	3	3,0
---	---	-----

Rancangan RKAP Tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran The draft Annual RKAP must have been received 60 days before entering the fiscal year.	3	3,0
---	---	-----

Laporan Periodik (Triwulan, Semester, Tahunan) Periodic Reports (Quarter, Semester, Annual)	3	3,0
--	---	-----

Kinerja PKBL PKBL Performance	6	5,0
---------------------------------	---	-----

Total Skor Aspek Administrasi Total Score of Administrative Aspects	15	14,0
---	----	------

Total Skor Total Score	100	65,3
---------------------------------	------------	-------------

TINGKAT KESEHATAN Soundness Level	SEHAT A HEALTHY A	
--	----------------------------	--

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition or Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan aktivitas terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, dan akuisisi. Sehingga tidak ada informasi yang disajikan.

In 2022, the Company did not conduct activities related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, and acquisition. Therefore, there is no information presented.

Restrukturisasi Utang

Program Restrukturisasi Utang Tahun 2022 merupakan kelanjutan program restrukturisasi hutang tahun-tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan RUPS. Per 31 Desember 2022, perkembangan Program restrukturisasi Hutang adalah sebagai berikut:

Debt Restructuring

The 2022 Debt Restructuring Program is a continuation of the previous years' debt restructuring programs that have been approved by the GMS. As of December 31, 2022, the development of the Debt restructuring Program is as follows:



1. Restrukturisasi Utang Eks BPPN

Liabilitas eks BPPN merupakan hasil Restrukturisasi Hutang (Kredit Eks BDN, Exim dan Bank Tamara) yang dituangkan dalam Perjanjian Pokok Restrukturisasi Hutang, Perjanjian Pembayaran Tunai dan Pinjaman Berjangka serta Perjanjian Obligasi yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH dan dituangkan dalam akta notaris No. 14/L/2002, 15/L/2002 dan 16/L/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang isi pokok perjanjian adalah bahwa saldo liabilitas yang disepakati bersama per 30 September 2002 (tanggal pengalihan) adalah sebesar Rp436.546.439.765 dan USD.16,282,652.50 dengan kurs USD1 = Rp9.264,- atau setara dengan Rp150.842.492.760, sehingga jumlah liabilitas seluruhnya adalah sebesar Rp587.388.932.525,27.

Jumlah Liabilitas Eks BPPN tersebut direstrukturisasi dengan pola sebagai berikut:

I. Tranche A: Pembayaran Tunai sebesar Rp45.000.000.000

Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun sejak penandatanganan PRH dan sumber pelunasannya berasal dari hasil penjualan aset non produktif milik Perusahaan.

II. Tranche B: Pinjaman Berjangka/Term Loan sebesar Rp22.000.000.000

Jangka waktu pinjaman 9 tahun dengan *grace* periode 1 tahun sejak penandatanganan PRH, tingkat bunga adalah 3% di atas tingkat bunga rata-rata dari tingkat deposito berjangka 3 bulan Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB dan Citibank.

III. Tranche C: Obligasi/Straight Bond sebesar Rp520.388.932.525

Jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga yang berlaku adalah zero coupon dan yield to maturity menggunakan rate Sertifikat Bank Indonesia Semesteran atau sebesar 13,12%. Jumlah sertifikat obligasi yang diterbitkan adalah 1.040 lembar sertifikat obligasi dengan nilai nominal masing-masing Rp500.000.000, dan satu lembar sertifikat obligasi dengan nominal Rp388.932.525.

Atas Liabilitas tersebut, PT PPI telah melakukan sejumlah langkah penyelesaian sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 135/PMK.06/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan yang menjadi payung hukum pembayaran dalam bentuk aset (*asset settlement*).

1. Ex IBRA Debt Restructuring

Ex IBRA liabilities are the result of Debt Restructuring (Ex BDN, Exim and Bank Tamara Loans) as outlined in the Debt Restructuring Principal Agreement, Cash Payment Agreement and Term Loan and Bond Agreement made before Notary Lenny Janis Ishak, SH and set forth in notarial deeds No. 14/L/2002, 15/L/2002 and 15/L/2002. 14/L/2002, 15/L/2002 and 16/L/2002 dated October 17, 2002, in which the principal contents of the agreements are that the agreed balance of liabilities as of September 30, 2002 (transfer date) amounted to Rp436,546,439,765 and USD.16,282,652.50 at an exchange rate of USD1 = Rp9,264, - or equivalent to Rp150,842,492,760, so that the total liabilities amounted to Rp587,388,932,525.27.

The amount of ex IBRA liabilities was restructured with the following pattern:

I. Tranche A: Cash Payment amounting to Rp45,000,000,000

The maximum loan period is 1 year since the signing of the PRH and the source of repayment comes from the proceeds of the sale of non-productive assets owned by the Company.

II. Tranche B: Term Loan amounting to Rp22,000,000,000.

The loan period is 9 years with a grace period of 1 year from the signing of the PRH, the interest rate is 3% above the average interest rate of the 3-month time deposit rate of Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB and Citibank.

III. Tranche C: Bonds/Straight Bonds amounting to Rp520,388,932,525.

Term of 10 years, the applicable interest rate is zero coupon and yield to maturity using the Semesterly Bank Indonesia Certificate rate or 13.12%. The number of Bond Certificates issued is 1,040 Bond Certificates with a nominal value of Rp500,000,000 each, and one bond certificate with a nominal value of Rp388,932,525.

For these liabilities, PT PPI has taken a number of settlement steps until the issuance of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 135 / PMK.06 / 2018 dated September 21, 2018 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance number 71 / PMK.06 / 2015 concerning Management of ex-management assets of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) by the Minister of Finance which is the legal umbrella for payment in the form of assets (*asset settlement*).



Sesuai rapat pembahasan tanggal 5 September 2019 di Kementerian BUMN yang dihadiri oleh pihak kreditur telah disepakati bahwa penyelesaian Hutang Eks BPPN akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Pembayaran dengan pencairan deposito jaminan telah selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp77.346.808.914,-;
2. *Asset settlement*, sampai dengan bulan Januari 2020 proses *debt to asset swap* telah dilaksanakan dari penentuan 17 titik aset yang akan dijadikan *asset settlement*, persetujuan Direksi dan pakta integritas, rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pengajuan surat permohonan persetujuan *debt to asset swap* kepada Kementerian BUMN;
3. PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2021 sebesar nilai sisa kewajiban Pokok.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian A. Restrukturisasi Hutang di atas, berdasarkan RKAP 2020 Revisi dan arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, PT PPI (Persero) telah mengajukan surat permohonan penyelesaian seluruh hutang kepada pemerintah yaitu hutang Eks BPPN, hutang Rekening Dana Investasi (RDI) dan hutang Bappenas sebesar Rp. 907 Miliar dengan skema *Debt to equity swap* melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2021 kepada Kementerian BUMN dengan surat Nomor: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan diperbaharui dengan surat Nomor: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Melalui Surat Direksi PPI No.291/DU/Eks/PPI/XI/2020 Tanggal 16 Nopember 2020, PT PPI telah membuat permohonan persetujuan pemegang saham terhadap konversi hutang ex BPPN menjadi tambahan PMN Non Tunai dan telah disetujui Menteri BUMN sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-1141/MBU/12/2020 Tanggal 11 Desember 2020 dan selanjutnya agar diproses lebih lanjut ke Kementerian Keuangan melalui APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Adapun usulan konversi adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Piutang Negara (Eks BPPN) sebesar Rp587.388.932.525,27 dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara;
- b. Penghapusan atas Utang Non Pokok (Bunga dan denda) sebesar Rp22.271.894.583,15;

In accordance with the discussion meeting on September 5, 2019 at the Ministry of BUMN which was attended by creditors, it was agreed that the settlement of Ex IBRA Debt would be carried out in 3 stages, namely:

1. Payment by disbursement of security deposits, which has been completed on October 11, 2019 with an amount of Rp77,346,808,914;
2. Asset settlement, until January 2020 the debt to asset swap process has been carried out from determining 17 points of assets that will be used as asset settlement, approval of the Board of Directors and integrity pact, recommendations from the Board of Commissioners and submission of a letter requesting approval of debt to asset swap to the Ministry of BUMN;
3. Non-cash PMN for Fiscal Year 2021 amounting to the remaining value of the principal obligation.

As explained in section A. Debt Restructuring above, based on the 2020 Revised RKAP and the direction of the Ministry of SOEs as the shareholder, PT PPI (Persero) has submitted a letter requesting the settlement of all debts to the government, namely Ex-BPN debts, Investment Fund Account (RDI) debts and Bappenas debts amounting to Rp. 907 billion with a Debt to Asset Swap scheme. 907 billion with a Debt to equity swap scheme through additional Non-Cash State Capital Injection (PMN) for Fiscal Year 2021 to the Ministry of SOEs with letter Number: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 dated January 16, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Injection in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and updated with letter Number: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 dated May 28, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Injection in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Through PPI Board of Directors Letter No.291/DU/Eks/PPI/XI/2020 dated November 16, 2020, PT PPI has made a request for Shareholder approval for the conversion of ex IBRA debt into additional Non-Cash PMN and has been approved by the Minister of SOEs as stated in Letter No. S-1141/MBU/12/2020 dated December 11, 2020 and then for further processing to the Ministry of Finance through the 2021 State Budget Amendment.

The proposed conversions are as follows:

- a. The principal of State Receivables (Ex IBRA) amounting to IDR 587,388,932,525.27 is converted into State Capital Participation;
- b. Write-off of Non Principal Debts (Interest and penalties) amounting to Rp22,271,894,583.15;



c. Implikasi pajak penghasilan (PPh Badan) yang terjadi diajukan untuk dapat ditanggung oleh Pemerintah (DTP).

c. Income tax implications (Corporate Income Tax) that occur are proposed to be borne by the Government (DTP).

2. Restrukturisasi Hutang Rekening Dana Investasi (RDI)

Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri BUMN RI dengan Surat Nomor S-215/MBU/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan Surat Menteri Keuangan RI dengan Surat Nomor 699/MK.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017, pada tanggal 10 November 2017 telah ditandatangani perjanjian perubahan (amandemen) perjanjian pinjaman nomor AMA-186/RDI-006/DSMI/2017, AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 dan AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 dengan skema restrukturisasi berupa penjadwalan kembali dengan pembayaran cicilan selama 20 tahun dan tingkat bunga 0%.

Berdasarkan amandemen perjanjian di atas, sampai dengan Per 31 Maret 2022 PT PPI (Persero) telah melakukan komitmen pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali cicilan sejumlah Rp14.406.628.900,-

Sampai dengan 30 Juni 2022, belum ada pelaksanaan pembayaran Hutang RDI. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian A. Restrukturisasi Hutang di atas, berdasarkan RKAP 2020 perihal Revisi dan arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, PT PPI (Persero) telah mengajukan surat permohonan penyelesaian seluruh hutang kepada pemerintah yaitu hutang Eks BPPN, hutang Rekening Dana Investasi (RDI) dan hutang Bappenas sebesar Rp. 907 Miliar dengan skema *Debt to equity swap* melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2021 kepada Kementerian BUMN dengan surat Nomor: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan diperbaharui dengan surat Nomor: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Melalui Surat Direksi PPI No.248/DU/Eks/PPI/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020, PT PPI telah membuat permohonan kepada KBUMN terhadap konversi dan penghapusan hutang RDI menjadi tambahan PMN Non Tunai dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN sebagaimana termaktub dalam Surat permohonan Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan No. S-296/MBU/Wk1/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020 perihal rekomendasi konversi dan Penghapusan Hutang RDI serta usulan untuk memasukkan memasukkan penghapusan Hutang tersebut dalam APBN TA 2021.

2. Restructuring of Investment Fund Account (RDI) Debt

Based on the Approval Letter of the Minister of SOEs with Letter Number S-215/MBU/2017 dated March 24, 2017 and the Letter of the Minister of Finance with Letter Number 699/MK.05/2017 dated August 31, 2017, on November 10, 2017 an amendment to the loan agreement number AMA-186/RDI-006/DSMI/2017, AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 and AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 with a restructuring scheme in the form of rescheduling with installment payments for 20 years and 0% interest rate was signed.

Based on the amendment of the above agreement, until March 31, 2022 PT PPI (Persero) has made a payment commitment of 7 (seven) installments totaling Rp14,406,628,900.

As of June 30, 2022, there has been no payment of RDI Debt. As explained in section A. Debt Restructuring above, based on the 2020 Revised RKAP and the direction of the Ministry of BUMN as the shareholder, PT PPI (Persero) has submitted a letter requesting the settlement of all debts to the government, namely Ex IBRA debts, Investment Fund Account (RDI) debts and Bappenas debts amounting to IDR. 907 billion with a Debt to equity swap scheme through additional Non-Cash State Capital Injection (PMN) for Fiscal Year 2021 to the Ministry of SOEs with letter Number: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 dated January 16, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Injection in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and updated with letter Number: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 dated May 28, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Injection in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Through PPI Board of Directors Letter No.248/DU/Eks/PPI/X/2020 dated October 2, 2020, PT PPI has made a request to KBUMN for the conversion and elimination of RDI debt into additional Non-Cash PMN and has been followed up by the Ministry of SOEs as stated in the Ministry of SOEs request letter to the Ministry of Finance No. S-296/MBU/Wk1/10/2020 dated October 8, 2020 regarding recommendations for the conversion and elimination of RDI debt and proposals to include the elimination of debt in the



3. Restrukturisasi Utang Bappenas

Hutang Bappenas berasal dari pemanfaatan sebagian dana Non-Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 sebesar JPY.3.000.000.000 (tiga Miliar Yen Jepang) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia yang berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia untuk mengimpor kedelai yang disalurkan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai penyalur.

Dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan Perusahaan pada bulan September 2003, dana hibah tersebut menjadi hutang Perusahaan yang harus dilunasi kepada pihak Bappenas dengan nominal pada saat jatuh temponya adalah sebesar Rp32.687.544.117 dimana nilai tunai hutang tersebut pada tanggal 14 Mei 2003 adalah sebesar Rp28.429.724.127. Hingga tanggal 31 Desember 2004, Perusahaan telah mengangsur ke Bappenas sebesar Rp9.000.000.000 dan terhutang sejak tahun 2005, Perusahaan tidak melakukan angsuran lagi. Sisa hutang per 31 Desember 2020 pasca rekonsiliasi dengan pihak kreditur tercatat sebesar Rp23.687.544.118,-

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian A perihal rekonstruksi hutang diatas, berdasarkan RKAP 2020 Revisi dan arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham, PT PPI (Persero) telah mengajukan surat permohonan penyelesaian seluruh hutang kepada pemerintah yaitu hutang Eks BPPN, hutang Rekening Dana Investasi (RDI) dan hutang Bappenas sebesar Rp. 907 Miliar dengan skema *Debt to equity swap* melalui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2021 kepada Kementerian BUMN dengan surat Nomor: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan diperbaharui dengan surat Nomor: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai dalam rangka restrukturisasi keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Adapun usulan konversi adalah mengajukan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari utang Bappenas sebesar Rp23.687.544.118,00 dikonversikan menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

FY 2021 State Budget.

3. Bappenas Debt Restructuring

Bappenas debt originated from the utilization of part of the 2001 Non-Project Type Grand Assistance (NPTGA) funds amounting to JPY.3,000,000,000 (three billion Japanese Yen) from the Government of Japan to the Government of Indonesia based on a cooperation agreement between the Government of Indonesia to import soybeans distributed by a party appointed by the Government of Indonesia as a distributor.

In the cooperation agreement between the Government of Indonesia, in this case the National Development Planning Agency (Bappenas), and the Company in September 2003, the grant funds became the Company's debt to be repaid to Bappenas with a nominal amount at maturity of Rp32,687,544,117 where the cash value of the debt on May 14, 2003 amounted to Rp28,429,724,127. Up to December 31, 2004, the Company has made installments to Bappenas amounting to Rp9,000,000,000 and since 2005, the Company has not made any installments. The remaining debt as of December 31, 2020 after reconciliation with creditors, was recorded at Rp23,687,544,118.

As explained in section A. Debt Restructuring above, based on the 2020 Revised RKAP and the direction of the Ministry of BUMN as the shareholder, PT PPI (Persero) has submitted a letter requesting the settlement of all debts to the government, namely Ex-BPN debts, Investment Fund Account (RDI) debts and Bappenas debts amounting to Rp. 907 billion with a Debt to equity swap scheme through additional Non-Cash State Capital Injection (PMN) for the 2021 Fiscal Year to the Ministry of BUMN with letter Number: 11/DU/Eks/PPI/I/2020 dated January 16, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Participation in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and updated with letter Number: 126/DU/Eks/PPI/V/2020 dated May 28, 2020 regarding the Proposal for Non-Cash State Capital Participation in the context of financial restructuring of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

The conversion proposal is to propose that the settlement of State Receivables originating from Bappenas debt amounting to Rp23,687,544,118.00 be converted into additional State Capital Participation (PMN).



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations That are Significant to the Company

Berikut adalah perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan:

- Terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada bulan Juli yang mengatur pengurangan jenis pupuk bersubsidi menjadi hanya Urea dan NPK cukup berdampak terhadap kinerja pendapatan pupuk bersubsidi khususnya pada periode Juli – Desember;
- Perubahan Permendag No 47 Tahun 2019 menjadi No 07 Tahun 2022 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada bulan Februari 2022 yang mengubah skema pendistribusian Bahan Berbahaya.

The following are changes in laws and regulations that have a significant impact on the Company:

- The issuance of MOA No. 10 of 2022 concerning Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector in July which regulates the reduction of subsidized fertilizer types to only Urea and NPK has quite an impact on the performance of subsidized fertilizer revenues, especially in the July - December period;
- The amendment of MOT 47/2019 to 07/2022, which came into effect in February 2022, changes the distribution scheme of hazardous materials.

Dampak Perubahan Harga terhadap Perusahaan

Impact of Price Changes on the Company

Tidak terdapat perubahan harga dari layanan atau produk Perusahaan sepanjang tahun 2022.

There were no changes in the prices of the Company's services or products during 2022.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

PPI hingga akhir tahun 2022 belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise* di dalam Laporan Tahunan 2022 ini.

Until the end of 2022, PPI did not have a share ownership program for employees and/or management. Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and its realization, time period, requirements for eligible employees and/or management as well as the exercise price in this 2022 Annual Report.



Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Tahun 2022 bagi perekonomian Indonesia merupakan tahun yang penuh optimisme pemulihan pasca Pandemi COVID-19, namun tetap dengan kewaspadaan. PPI telah melakukan penyesuaian terhadap inisiatif strategis dan program kerja yang dijalankan di tahun ini agar tetap selaras dengan dinamika bisnis dan faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar kendali.

The year 2022 for the Indonesian economy is a year full of optimism for recovery after the COVID-19 Pandemic, but still with caution. PPI has made adjustments to the strategic initiatives and work programs carried out this year to stay in line with business dynamics and external factors that occur beyond control.

Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

PT PPI menargetkan B2B sebagai segmen pasar penjualan produk – produk utamanya. Namun sejatinya, PT PPI tidak membatasi segmen pasar. Semua potensi yang dapat dikembangkan dari berbagai segmen pasar maka tidak menutup kemungkinan penajakan pengembangan potensi penjualan terhadap segmen pasar tersebut.

Kondisi persaingan pada lingkup bisnis PT PPI semakin berkembang dan dikatakan cukup ketat. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya produk serupa di pasaran seiring dengan peningkatan dan perkembangan kebutuhan pelanggan atas produk tersebut. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada industri pestisida yang hingga saat ini sudah memiliki banyak merk pesaing serta kandungan bahan aktif yang semakin mutakhir.

PT PPI melakukan berbagai program promosi serta optimalisasi penjualan produk melalui *distribution channel* di antaranya Kantor Cabang PT PPI, Distributor, Kios / Pengecer, Penjualan Online melalui Aplikasi Warung Pangan, atau penajakan peluang kerja sama dengan berbagai Instansi. Tidak hanya di dalam negeri, PT PPI juga mengoptimalkan penjualan produk ke luar negeri melalui *representative office* yang berlokasi di Tiongkok, Mesir, dan Taiwan.

Market Segments and Competitive Conditions

PT PPI targets B2B as the sales market segment for its main products. But in fact, PT PPI does not limit market segments. All potential that can be developed from various market segments does not rule out the possibility of exploring the development of sales potential for these market segments.

Competition conditions in the scope of PT PPI's business are growing and are said to be quite tight. This can be seen from the development of similar products on the market along with the increase and development of customer needs for these products. One example can be seen in the pesticide industry, which until now has many competing brands and the content of active ingredients that are increasingly sophisticated.

PT PPI conducts various promotional programs and optimizes product sales through distribution channels including PT PPI Branch Offices, Distributors, Kiosks / Retailers, Online Sales through the Warung Pangan Application, or exploring opportunities for cooperation with various Agencies. Not only domestically, PT PPI also optimizes product sales abroad through representative offices located in China, Egypt and Taiwan.

Posisi Produk di Pasar

Produk – produk yang diperdagangkan oleh PT PPI memiliki posisi yang cukup kuat meskipun di beberapa lini produk bukan pilihan utama di pasaran. Hal tersebut mengingat PT PPI telah hadir melayani kebutuhan para pelanggan selama puluhan tahun. Untuk itu PT PPI harus terus berkembang dan berinovasi agar terus dapat menjadi pilihan utama para pelanggan.

Product Position in the Market

The products traded by PT PPI have a fairly strong position even though in some product lines they are not the first choice in the market. This is because PT PPI has been serving the needs of customers for decades. For this reason, PT PPI must continue to develop and innovate in order to continue to be the first choice of customers.



Positioning Produk terhadap Pasar dan Konsumen

PT PPI menyampaikan pesan ke dalam ingatan pelanggan sebagai perusahaan yang sudah melayani kebutuhan pelanggan puluhan tahun dengan produk – produk yang berkualitas dan layanan prima.

Salah satu strategi yang digunakan PT PPI untuk mencapai *brand image* tersebut adalah melalui optimalisasi Kantor Cabang, distributor, dan Aplikasi Warung Pangan.

Penjualan melalui kantor Cabang memiliki beberapa layanan unggulan seperti *one day service delivery*. Dengan layanan tersebut PT PPI melalui Kantor Cabang memastikan pasokan stok bahan pokok & pangan, pupuk & pestisida, serta Farmasi & Alkes selalu tersedia untuk para pelanggan. Kemudian PT PPI sebagai Importir terdaftar B2 didukung oleh Distributor Terdaftar B2, memastikan kebutuhan pelanggan akan bahan kimia berbahaya dapat selalu terpenuhi. Disisi lainnya, pelanggan dimanjakan dengan kemudahan memesan produk – produk PT PPI. Melalui Aplikasi Warung Pangan, para pelanggan akan merasakan kemudahan memesan Produk PT PPI secara *online*.

Pangsa Pasar

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, PPI terus berupaya memperluas pangsa pasar yang menjadi indikator bahwa PPI mampu bersaing dengan baik di tengah persaingan. Dengan strategi bisnis, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, pada tahun 2022 PPI berhasil memperluas pangsa pasar menjadi 15,69%.

Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

Pelanggan bahan pokok & pangan bertambah 106%, Pelanggan Farmasi & Alat Kesehatan bertambah 10%, Pelanggan Bahan Kimia Berbahaya bertambah 25%.

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2022, PPI menerapkan strategi pemasaran yang terealisasi melalui aktivitas berikut ini, antara lain:

1. Untuk mengenali target pasar yang tepat, PPI melakukan kajian potensi komoditi dan melakukan analisis pasar untuk memperoleh target yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga didukung dengan aktivitas survei kepuasan pelanggan untuk memperoleh umpan balik dari konsumen;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media dan pendistribusian *marketing tools*, PPI turut melakukan kunjungan kios/pelanggan secara langsung untuk meninjau pasar dan konsumen secara berkala dan berkelanjutan;
3. Memanfaatkan pemasaran produk melalui berbagai aktivitas publikasi untuk membentuk citra produk berdasarkan keunggulan masing-masing komoditas;

Product Positioning towards Market and Consumers

PT PPI conveys a message into the customer's memory as a company that has been serving customer needs for decades with quality products and excellent service.

One of the strategies used by PT PPI to achieve this brand image is through the optimization of Branch Offices, distributors, and Warung Pangan Application.

Sales through Branch offices have several superior services such as one day service delivery. With this service, PT PPI through the Branch Office ensures that the supply of staples & food, fertilizers & pesticides, as well as Pharmaceuticals & Medical Devices is always available for customers. Then PT PPI as a B2 registered importer supported by B2 Registered Distributors, ensures that customer needs for hazardous chemicals can always be met. On the other hand, customers are spoiled with the ease of ordering PT PPI products. Through the Warung Pangan Application, customers will find it easy to order PT PPI Products online.

Market Share

In the midst of increasingly fierce business competition, PPI continues to strive to expand market share which is an indicator that PPI is able to compete well in the midst of competition. With business strategies, technology utilization, product innovation, in 2022 PPI managed to expand its market share to 15.69%.

This is evidenced by the increase in the number of customers with the following details:

Basic food & food customers increased by 106%, Pharmaceutical & Medical Devices customers increased by 10%, Hazardous Chemicals customers increased by 25%.

Marketing Strategy

In 2022, PPI implemented a marketing strategy that was realized through the following activities, among others:

1. To identify the right target market, PPI conducts commodity potential studies and conducts market analysis to obtain specific targets according to the needs of the community. This is also supported by customer satisfaction survey activities to obtain feedback from consumers;
2. Optimizing the use of social media and the distribution of marketing tools, PPI also conducts direct kiosk/customer visits to review the market and consumers on a regular and ongoing basis;
3. Utilizing product marketing through various publication activities to form a product image based on the advantages of each commodity;



4. Mengembangkan program promosi pada produk Dharmabrand dengan menggandeng petani Indonesia melalui pemberian pelatihan pertanian dan aktivitas promosi lainnya;
5. Mendukung program penugasan pemerintah dengan menjaga ketersediaan stok melalui rantai pasok pangan;
6. Melakukan sinergi kerja sama dengan berbagai mitra strategis dalam upaya ekspansi pasar ekspor;
7. Mengoptimalkan seluruh jaringan distribusi PPI baik domestik dan internasional melalui *Representative Office* di wilayah strategis.

4. Develop promotional programs on Dharmabrand products by cooperating with Indonesian farmers through the provision of agricultural training and other promotional activities;
5. Support government assignment programs by maintaining stock availability through the food supply chain;
6. Synergize cooperation with various strategic partners in an effort to expand the export market;
7. Optimizing the entire PPI distribution network both domestically and internationally through Representative Offices in strategic areas.

Realisasi dan Capaian Strategi Pemasaran

Sampai dengan tahun 2022 Perusahaan telah melaksanakan program-program pemasaran sebagai berikut:

1. Kajian analisa potensi komoditi Bahan Pokok & Pangan, Bahan Kimia Berbahaya, Pestisida;
2. Pantauan Perkembangan Harga Bahan Pokok & Pangan;
3. Program operasi pasar distribusi minyak goreng curah;
4. Peluncuran ekspor kopi dan *Kick Off* PMO kopi nusantara;
5. Penyusunan Skema Strata Harga Komoditi Dharmabrand & Cover Area Wilayah Distribusi Cabang;
6. Kunjungan dan pembagian *marketing tools* ke kios berupa poster, brosur, kaos dan topi yang berada di wilayah Kendari, Banjarmasin, Jambi, Bandung dan Malang;
7. Mengikuti *event*/pameran ID Food di KPUPR JCC Senayan dan Panen Raya di Lapangan Banteng;
8. Program Promosi Dharmabrand (Dharmafest), Demspray di Semarang dan Malang;
9. Survei kepuasan pelanggan.

Marketing Strategy Realization and Achievement

Until 2022, the Company has implemented the following marketing programs:

1. Study on commodity potential analysis of Basic Materials & Food, Hazardous Chemicals, Pesticides;
2. Monitoring the Price Development of Basic Materials & Food;
3. Bulk cooking oil distribution market operation program;
4. Launching of coffee exports and Kick Off of PMO for Indonesian coffee;
5. Preparation of Dharmabrand Commodity Price Strata Scheme & Cover Area of Branch Distribution Area;
6. Visits and distribution of marketing tools to kiosks in the form of posters, brochures, t-shirts and hats located in Kendari, Banjarmasin, Jambi, Bandung and Malang;
7. Participated in ID Food event/exhibition at KPUPR JCC Senayan and Panen Raya at Lapangan Banteng.
8. Dharmabrand Promotion Program (Dharmafest), Demspray in Semarang and Malang;
9. Customer satisfaction survey.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Sampai dengan tahun 2022, Perusahaan tidak mengalami hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya.

Manajemen menilai bahwa PPI memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelangsungan usaha Perusahaan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan.

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PPI di antaranya adalah kinerja dan kondisi.

Until 2022, the Company does not experience any matters that have a significant effect on its business continuity.

Management assesses that PPI has better growth potential in the coming years. This indicates that the Company's business continuity can be guaranteed properly and sustainably.

The assumptions that form the basis of management in believing the continuity of PPI's business include performance and conditions.

5

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Functions

Menyajikan informasi tentang kinerja penunjang operasional Perusahaan yang mencakup Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi.

Presents information on the Company's operational support performance which includes Human Resources, Information Technology.





PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD

BUMN UNTUK
INDONESIA



PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD 





Sumber Daya Manusia

Human Resources

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin tidak menentu, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal menjadi krusial dalam merealisasikan visi dan misi PPI. Setiap insan yang menjadi bagian dari PPI merupakan harta yang tidak ternilai, sehingga terus-menerus harus ditingkatkan dalam kompetensinya dan sikap profesional yang kompetitif.

In the face of increasingly uncertain business dynamics, the existence of reliable Human Resources (HR) is crucial in realizing PPI's vision and mission. Every person who is part of PPI is an invaluable treasure, so it must be continuously improved in its competence and competitive professional attitude.

Program pengembangan SDM PPI yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan nilai-nilai inti PPI (integritas, disiplin, fleksibilitas, kerja sama tim, dan perbaikan berkelanjutan) diaplikasikan dalam setiap tindakan sehari-hari untuk memperkuat kesiapan PPI dalam menghadapi tantangan bisnis yang muncul.

Selain itu, integrasi fungsi karyawan dengan strategi bisnis PPI menjadi kunci dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sebagai elemen sentral dalam organisasi, PPI memahami betul pentingnya memotivasi SDM untuk mencapai kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, PPI menyelenggarakan program pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang sistematis dan intensif, serta menerapkan sistem pengembangan karier yang terstruktur.

PPI menegaskan komitmennya untuk terus mengelola SDM secara sejalan dengan visi dan misi PPI, sehingga siap menghadapi era globalisasi dan merealisasikan visi dan misi perusahaan dengan sukses.

PPI's HR development program, which is prepared based on needs analysis and PPI's core values (integrity, discipline, flexibility, teamwork, and continuous improvement), is applied in every daily action to strengthen PPI's readiness to face emerging business challenges.

In addition, the integration of employee functions with PPI's business strategy is key in achieving business targets set by shareholders and stakeholders. As a central element in the organization, PPI fully understands the importance of motivating human resources to achieve their best performance. Therefore, PPI organizes systematic and intensive HR capacity and competency development programs, and implements a structured career development system.

PPI affirms its commitment to continue managing HR in line with PPI's vision and mission, so that it is ready to face the globalization era and realize the company's vision and mission successfully.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Kebijakan mengenai pengelolaan SDM PPI mengacu pada kebijakan terkait pengelolaan SDM PPI, baik dari regulator maupun produk PPI, yang diadopsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUTK);

HR Management Policy

Policies regarding PPI HR management refer to policies related to PPI HR management, both from regulators and PPI products, which are adopted as follows:

1. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUTK);



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: Bersama (PKB) antara
4. Perjanjian Kerja Perusahaan Perdagangan Indonesia PT (Persero) dengan Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Periode 2021-2023;
5. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: tentang 112/DirUmum&SDM/SKD/PPI/XI/2009 Penerimaan Pegawai;
6. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 tentang Penilaian Kinerja Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Kebijakan pengelolaan SDM menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penerapan *reward* and punishment sampai dengan program pensiun.

Sepanjang tahun 2022, PPI menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan SDM. Dengan adanya shifting pada gaya bekerja tersebut, PPI melalui "Divisi SDM dan Umum" berkomitmen akan terus melakukan kajian dan merumuskan kebijakan organisasi yang relevan agar dapat mengakomodasi disrupsi yang sedang terjadi sehingga roda bisnis PPI tetap dapat berjalan dengan baik di tahun-tahun mendatang. Selama penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan PPI, kegiatan organisasi tetap berjalan dengan baik dan lancar disertai dengan terlaksananya efisiensi biaya perusahaan.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Divisi SDM ialah pengembangan rencana dan strategi terkait pengelolaan dan pengembangan SDM, serta pelaksanaan program SDM untuk mencapai tujuan PPI.

2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment;
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2021 concerning Wages: Collective Bargaining Agreement (CLA) between
4. Work Agreement between PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) and the Workers Union of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Period 2021-2023;
5. Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Number: about 112/DirUmum&HR/SKD/PPI/XI/2009 Employee Recruitment;
6. Regulation of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 002/DIRSTUM/PERDIR/PPI/IX/2014 concerning Guidelines for the Implementation of Education and Training of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
7. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Number: 43/DU/PERDIR/PPI/X/2020 concerning Performance Assessment of Employees of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

HR management policies guide the implementation of HR planning activities, recruitment, competency development, performance appraisal, implementation of rewards and punishments to retirement programs.

Throughout 2022, PPI implemented Work From Home (WFH) and Work From Office (WFO). This is certainly a challenge in terms of HR management. With this shift in working style, PPI through the "HR and General Division" is committed to continuing to conduct studies and formulate relevant organizational policies in order to accommodate the disruptions that are happening so that PPI's business wheels can continue to run well in the coming years. During the implementation of Work From Home (WFH) in the PPI environment, organizational activities continue to run well and smoothly along with the implementation of company cost efficiency.

Scope and Responsibility

The duties and responsibilities of the HR Division are the development of plans and strategies related to HR management and development, as well as the implementation of HR programs to achieve PPI's goals.



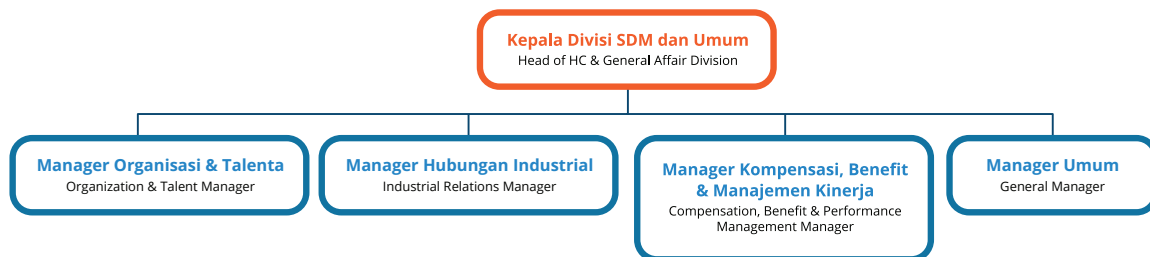
Struktur Pengelolaan SDM

Divisi SDM dan Umum adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan SDM dan eksekusi seluruh program dan kegiatan SDM di PPI. Hal ini tercantum di dalam Surat Keputusan Direksi No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) tanggal 10 Desember 2021.

Divisi SDM dan Umum sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan kompetensi SDM PPI secara keseluruhan. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum. Divisi ini berperan sebagai pelaku keseluruhan pengelolaan perencanaan, perencanaan kebijakan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

Per 31 Desember 2022, jumlah personil Divisi SDM dan Umum sebanyak 1.460 orang yang terdiri dari pegawai PPI yang berkerja di PPI dan pegawai PPI yang ditugaskan ke PT BGR LI.

Berikut adalah struktur organisasi pengelola SDM di PPI:



HR Management Structure

The HR and General Division is the work unit responsible for the running of HR management and the execution of all HR programs and activities at PPI. This is stated in the Decree of the Board of Directors No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 concerning Determination of the Organizational Structure of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dated December 10, 2021.

The HR and General Division is the party in charge and responsible for managing PPI's overall HR competencies. Structurally, this division is directly responsible to the Director of Finance, Risk Management, Human Resources and General Affairs. This division acts as the overall management of planning, policy planning, and human resource development to achieve the Company's goals and objectives.

As of December 31, 2022, the number of HR and General Division personnel is 1,460 people consisting of PPI employees who work at PPI and PPI employees assigned to PT BGR LI.

The following is the organizational structure of HR management in PPI:

Tata Kelola SDM

HR Governance

Perencanaan SDM

PPI memandang bahwa implementasi perencanaan SDM yang tepat dapat menghasilkan bibit-bibit pegawai unggul yang bertalenta dan profesional. Hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis PPI dalam merealisasikan visi, misi, dan target tahunan, serta untuk mendukung keberlangsungan bisnis PPI di masa mendatang, sehingga PPI harus memastikan ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, PPI melakukan koordinasi dengan Departemen Divisi SDM dan Umum.

Hasil perencanaan SDM tersebut berupa daftar kebutuhan pekerja yang menjadi acuan pelaksanaan rekrutmen pekerja dan memudahkan proses penempatan pekerja menjadi lebih tepat.

HR Planning

PPI views that the implementation of proper HR planning can produce talented and professional employees. This is an integral part of PPI's business strategy in realizing the vision, mission and annual targets, as well as to support PPI's business continuity in the future, so PPI must ensure the availability of workers in accordance with business needs.

In planning the needs of workers in accordance with applicable regulations, PPI coordinates with the HR and General Division Department.

The results of HR planning are in the form of a list of worker needs that serve as a reference for the implementation of worker recruitment and facilitate the process of placing workers to be more precise.



Pengelolaan SDM

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selalu menilai kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja dengan melakukan analisa kebutuhan jumlah maupun keahlian tenaga kerja selama 5 tahun ke depan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisa kebutuhan SDM adalah anggaran kebutuhan SDM, strategi dan perkembangan PPI sesuai business plan, jumlah tenaga kerja yang pensiun, jenis pekerjaan dan ketersediaan finansial.

Dalam melakukan evaluasi, selalu memperhatikan kebutuhan kapasitas tenaga kerja menggunakan pendekatan jumlah karyawan dibandingkan dengan target penjualan sesuai RKAP maupun RJP yang terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Dalam menilai kebutuhan ini tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan level jabatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, fungsi jabatan, status karyawan dan masa kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan formasi jabatan yang ada.

Rekrutmen Karyawan

Sejalan dengan perkembangan bisnis PPI, PPI merekrut karyawan yang berkualitas dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kompetensi yang unggul. PPI selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kewajaran dalam sistem rekrutmen, serta mempertimbangkan kompetensi calon karyawan. PPI percaya pada filosofi equal opportunity dan diversity, sehingga membuka peluang bagi karyawan dari latar belakang yang berbeda untuk bergabung dengan Perusahaan.

Program rekrutmen PPI dilaksanakan secara menyeluruh, di mana setiap calon karyawan akan dievaluasi secara ketat dari berbagai aspek latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, media sosial, dan kesehatan. Seleksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Kami melakukan perencanaan SDM untuk mengetahui berapa banyak karyawan baru yang dibutuhkan dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi kosong. Hal ini bertujuan agar strategi bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik di jangka pendek dan panjang. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hal ini, Divisi SDM dan Umum bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait untuk memetakan kebutuhan karyawan secara lengkap.

PPI berfokus penjangkaran karyawan dari internal Perusahaan terlebih dahulu melalui promosi atau mutasi dengan memerhatikan kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan.

HR Management

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia always assesses the needs of workforce capability and capacity by analyzing the needs of the number and expertise of the workforce for the next 5 years.

Factors considered in analyzing HR needs are the budget for HR needs, strategy and development of PPI according to the business plan, the number of workers who retire, the type of work and financial availability.

In conducting evaluations, always pay attention to labor capacity needs using the approach of the number of employees compared to sales targets according to the RKAP and RJP consisting of permanent and non-permanent employees.

In assessing these needs, the workforce is grouped based on position level, education, age, gender, position function, employee status and length of service. To meet short-term labor needs, it is adjusted to the needs of the organization and existing position formations.

Employee Recruitment

In line with PPI's business development, PPI recruits qualified employees who can adapt to changes and have superior competencies. PPI always upholds the principles of openness, equality, and fairness in the recruitment system, and considers the competence of prospective employees. PPI believes in the philosophy of equal opportunity and diversity, thus opening opportunities for employees from different backgrounds to join the Company.

PPI's recruitment program is carried out thoroughly, where each prospective employee will be evaluated strictly from various aspects of background, education, work experience, social media, and health. Selection is carried out in accordance with the required number and qualifications.

We conduct HR planning to find out how many new employees are needed and what criteria must be met to fill vacant positions. This is so that the Company's business strategy can run well in the short and long term. To get a complete picture of this, the HR and General Division works closely with related work units to map out complete employee needs.

PPI focuses on recruiting employees from within the Company first through promotions or transfers by taking into account the quality and abilities needed.



Namun, PPI juga membuka kesempatan untuk merekrut melalui jalur fresh graduate dan profesional (pro-hire). Keputusan untuk menerima atau menolak karyawan didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pada setiap kandidat, dengan mempertimbangkan kriteria yang diperlukan untuk mengisi posisi vacant.

Setelah dipilih, kandidat karyawan PPI akan diberikan program pengenalan (induction program) untuk memperkenalkan siklus bisnis Perusahaan, nilai-nilai budaya dan tata kelola Perusahaan, peluang pengembangan karier, serta tugas dan tanggung jawab mereka sebagai karyawan di PPI.

Sepanjang tahun 2022, PPI telah merekrut sebanyak 31 karyawan baru yang terdiri dari 4 orang dari jalur pro-hire dan 27 orang dari jalur reguler. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan organisasi Perusahaan di masa pandemi COVID-19.

Kebijakan Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

PPI berkeyakinan bahwa program pengembangan karier karyawan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa dihindari di dalam proses pengelolaan SDM agar regenerasi organisasi tetap terjaga. Oleh sebab itu, PPI telah menerapkan sebuah sistem manajemen pengembangan karier berjenjang (tier system) sebagai salah satu upaya retensi yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan berkualitas menempati berbagai posisi strategis di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan mengacu pada Sistem BSC (Balance Score Card) untuk setiap tingkatan, mulai dari KPI korporat hingga KPI individu. Selanjutnya hasil penilaian KPI tersebut digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam memberikan *reward* and punishment dan juga digunakan sebagai bahan penilaian dalam menentukan jenjang karier karyawan (carrier planning) mengacu pada kompetensi serta bakat yang dimiliki karyawan sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perseroan.

PPI membuka peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan agar mereka termotivasi untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu di PPI sebagai bagian dari pengembangan karier masing-masing.

However, PPI also opens opportunities to recruit through fresh graduates and professionals (pro-hire). The decision to accept or reject employees is based on a thorough evaluation conducted on each candidate, taking into account the criteria needed to fill vacant positions.

Once selected, PPI employee candidates will be given an induction program to introduce the Company's business cycle, cultural values and corporate governance, career development opportunities, and their duties and responsibilities as employees at PPI.

Throughout 2022, PPI has recruited 31 new employees consisting of 4 people from the pro-hire route and 27 people from the regular route. This number has been adjusted to the Company's organizational development needs during the COVID-19 pandemic.

Performance Appraisal and Career Development Policy

PPI believes that employee career development programs are one of the important things that cannot be avoided in the HR management process so that organizational regeneration is maintained. Therefore, PPI has implemented a tiered career development management system as one of the retention efforts aimed at preparing qualified employees to occupy various strategic positions in the future.

Employee performance assessment is carried out by referring to the BSC (Balance Score Card) System for each level, starting from corporate KPIs to individual KPIs. Furthermore, the results of the KPI assessment are used by management as a basis for providing rewards and punishments and are also used as an assessment material in determining employee career paths (carrier planning) referring to the competencies and talents of employees so as to create quality human resources and in accordance with the needs of the company.

PPI opens equal opportunities and opportunities to every employee so that they are motivated to continue to develop their potential so that they can occupy a certain position or position in PPI as part of their respective career development.



Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan meyakini ketersediaan SDM yang andal dan berkompetensi sangat dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan usaha jangka panjang. Oleh sebab itu, perseroan menaruh perhatian besar terhadap program pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan berkesinambungan.

Program pelatihan karyawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kegiatan pelatihan dan program sertifikasi karyawan. Semua model pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara internal (in-house training) maupun eksternal. Pelatihan internal berarti pelatihan tersebut dilakukan di dalam lingkungan perusahaan.

Pada prinsipnya, program pengembangan kompetensi karyawan dapat diikuti oleh semua karyawan. Kendati demikian, manajemen tetap memperhatikan analisis kebutuhan program pelatihan atau pengembangan potensi SDM masing-masing karyawan (training need analysis) untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syaratlah yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Setelah sesi pelatihan berakhir, manajemen akan mengevaluasi para peserta untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk menentukan jenjang karier dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Dengan adanya program pengembangan kompetensi karyawan, perseroan optimis dapat membentuk generasi karyawan yang memiliki kinerja yang lebih efektif dengan semangat kompetitif, dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi dengan tempat kerja. Uraian lebih lanjut mengenai daftar kegiatan pengembangan dan pelatihan karyawan selama tahun 2022 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengangkatan Karyawan Tetap, Promosi, Mutasi dan Demosi

Pada prinsipnya perusahaan menyelenggarakan pengangkatan pegawai tetap, promosi, rotasi, mutasi dan demosi berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Pengangkatan pegawai tetap dan promosi dilakukan melalui pertimbangan bahwa karyawan tersebut digolongkan sebagai talent terbaik perseroan.

Employee Training and Development

The Company believes that the availability of reliable and competent human resources is needed to support long-term business continuity. Therefore, the Company pays great attention to comprehensive and sustainable HR competency development programs.

Employee training programs can be conducted in various ways, such as training activities and employee certification programs. All training models can be carried out internally (in-house training) or externally. Internal training means that the training is conducted within the company.

In principle, employee competency development programs can be followed by all employees. However, management still pays attention to the needs analysis of training programs or the development of each employee's HR potential (training need analysis) to ensure that every eligible employee is prioritized to attend the training held. After the training session ends, management will evaluate the participants to measure the effectiveness of the training implementation. The results of the evaluation will be used as a basis for management to determine the career path and level of further training needs of employees.

With the employee competency development program, the company is optimistic that it can form a generation of employees who have more effective performance with a competitive spirit, and have higher loyalty to the workplace. A further description of the list of employee development and training activities during 2022 can be seen in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

Permanent Employee Appointment, Promotion, Transfer and Demotion

In principle, the company organizes permanent employee appointments, promotions, rotations, mutations and demotions based on the principles of Good Corporate Governance. The appointment of permanent employees and promotions are carried out through consideration that the employee is classified as the company's best talent.



Namun, untuk promosi itu sendiri dilakukan dengan memberikan peran, tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai antar-cabang atau wilayah kegiatan, didalamnya termasuk rotasi. Namun, rotasi itu sendiri lebih memfokuskan pemindahan tugas dan tanggung jawab antar fungsi dan/atau unit kerja dalam satu Direktorat dan/atau antar Direktorat. Di sisi lain, demosi itu sendiri merupakan bentuk pemindahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah dengan disertai penurunan grade. Berikut merupakan detail pegawai demosi, mutasi, rotasi, promosi serta pengangkatan karyawan tetap pada tahun 2022:

However, the promotion itself is carried out by providing higher roles, duties and responsibilities. Meanwhile, mutation is the movement of employees between branches or areas of activity, including rotation. However, the rotation itself focuses more on the transfer of duties and responsibilities between functions and/or work units within one Directorate and/or between Directorates. On the other hand, demotion itself is a form of transferring employees to lower positions with a decrease in grade. The following are details of employee demotions, mutations, rotations, promotions and permanent employee appointments in 2022:

Data Rotasi dan/atau Mutasi Tahun 2022

Rotation and/or Mutation Data for 2022

Kategori Category	2022
Demosi Demotion	0
Mutasi Mutations	35
Pengangkatan Karyawan Tetap Appointment of Permanent Employees	17
Rotasi Rotation	24
Promosi Promotion	34
Total	110

Turnover Karyawan

Sepanjang tahun 2022, PPI melaksanakan proses rekrutmen sebagai tindak lanjut pemenuhan sumber daya di beberapa posisi serta adanya perputaran karyawan yang disebabkan masuknya masa pensiun, mengundurkan diri maupun penambahan personal dalam rangka menciptakan komposisi pegawai yang proporsional. Hingga akhir 2022, terdapat penambahan/pengurangan karyawan sebagai berikut:

Employee Turnover

Throughout 2022, PPI carried out a recruitment process as a follow-up to the fulfillment of resources in several positions as well as employee turnover due to retirement, resignation and personal additions in order to create a proportional employee composition. Until the end of 2022, there were additions/drops of employees as follows:

Alasan Keluar Reason for leaving	2022	2021	2020
Pensiun Normal Normal Pension	18	28	43
Pensiun Dini Early Retirement	4	5	1
Habis kontrak Contract expired	8	30	85
Meninggal Passed Away	2	2	1



Mengundurkan diri Resign	28	10	14
Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Misconduct	3	0	0
Jumlah Total	63	75	144

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Sebagai wujud komitmen PPI dalam memperlakukan karyawan sebagai aset penting bag perseroan, maka seluruh jajaran manajemen senantiasa mematuhi perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja terutama dalam hal ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) yang berlaku di wilayah masing-masing unit kerja Perseroan. Selain itu, perseroan juga telah menetapkan seperangkat kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas setiap karyawan, antara lain:

Remuneration and Employee Welfare

As a form of PPI's commitment in treating employees as important assets for the company, all levels of management always comply with the laws and regulations governing labor, especially in terms of the provisions of the Provincial / Regency / City Minimum Wage (UMP / K) applicable in the area of each work unit of the Company. In addition, the company has also established a set of compensation welfare programs and employee facilities to improve the welfare and productivity of each employee, among others:

Uraian Description	Tetap Permanent	Tidak Tetap Contract
Perawatan Pengobatan Treatment Care	✓	✓
Akomodasi & Transportasi Accommodation & Transportation	✓	✓
Kematian & Perhelatan Deaths & Occasions	✓	✓
Transport Lokal Local Transport	✓	✓
Pensiun/Pesangon Pension/Severance	✓	✓
Cuti Tahunan Annual Leave	✓	✓
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan BPJS Health and Employment	✓	✓
THR RFA	✓	✓

Reward dan Punishment

PPI memiliki sistem *reward* dan *punishment* yang diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pemberlakuan *Reward* dan *Punishment* bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. *Reward* diberikan untuk memotivasi pekerja dalam mencapai target kinerja secara optimal sehingga mendukung pencapaian sasaran PPI. Perseroan memberikan reward, baik bersifat finansial maupun non finansial, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan. Insentif performansi adalah salah satu bentuk *reward* yang diberikan perseroan kepada pekerja berdasarkan hasil Penilaian Performansi Bulanan dan pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI). Selain itu, perseroan juga memberikan apresiasi

Remuneration and Employee Welfare

PPI has a reward and punishment system that is clearly regulated in the Collective Labor Agreement (CLA).

The implementation of Reward and Punishment aims to improve the performance of each worker. Rewards are given to motivate workers to achieve optimal performance targets so as to support the achievement of PPI's goals. The Company provides rewards, both financial and non-financial, which are adjusted to the Company's capabilities. Performance incentives are one form of reward given by the Company to employees based on the results of the Monthly Performance Assessment and the achievement of Key Performance Indicator (KPI) targets. In addition, the company also provides appreciation for



bagi pekerja berkinerja istimewa berupa setiap 3 Bulan mendapatkan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) di mana penilaian tersebut dapat berdampak kepada besaran pemberian tunjangan kinerja.

Punishment diterapkan untuk mencegah segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh pekerja sehingga hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran aktivitas kerja dapat dihindari. Perseroan memberikan punishment sesuai tingkat dan jenis sanksi yang berlaku. Jenis sanksi yang berlaku meliputi teguran, surat peringatan dan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Sepanjang tahun 2022, perseroan telah memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan nominal uang kepada karyawan yang memiliki masa kerja 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 Tahun sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atas pengabdian dan dharma bakti karyawan pada perusahaan.

Program Persiapan Masa Pensiun

Persiapan Masa Pensiun tahun 2022 belum dilakukan dikarenakan tidak terdapat di RKAP. Pelatihan Masa Persiapan Pensiun adalah bentuk *reward* perusahaan atas dedikasi para karyawan melalui pembekalan pada aspek psikologis, kesehatan, keuangan, wirausaha dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan Persiapan Masa Pensiun tidak hanya sebatas virtual class, namun juga dilengkapi dengan kunjungan virtual.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

PPI memiliki SDM dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, perseroan menerapkan prinsip non-diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM serta memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karier tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Hubungan Industrial

PPI berupaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka, positif, dan progresif guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Untuk melaksanakan hubungan tersebut, PPI membentuk Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai wadah untuk berserikat dalam menyampaikan aspirasinya. Serikat Pekerja PPI memposisikan dirinya sebagai mitra dalam pelaksanaan hubungan industrial.

Secara umum kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan SDM (hubungan industrial) di Perseroan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perseroan melakukan sosialisasi dan melaksanakan program penggajian (remunerasi) serta memberikan fasilitas lainnya di luar remunerasi

workers with special performance in the form of every 3 months getting a Key Performance Indicator (KPI) Assessment where the assessment can have an impact on the amount of performance allowance.

Punishment is applied to prevent all forms of violations committed by workers so that things that hinder or disrupt the smooth running of work activities can be avoided. The Company provides punishment according to the level and type of sanctions that apply. The types of sanctions include reprimands, warning letters and other sanctions that are adjusted to the level of violation. Throughout 2022, the company has given awards in the form of Award Charter and nominal money to employees who have 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 years of service as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB) for their dedication and devotion to the company.

Retirement Preparation Program

Preparation for the Retirement Period in 2022 has not been carried out because it is not included in the RKAP. Retirement Preparation Training is a form of company reward for the dedication of employees through debriefing on psychological aspects, health, finance, entrepreneurship and so on. The implementation of the Retirement Preparation training is not only limited to virtual classes, but also equipped with virtual visits.

Gender Equality and Employment Opportunities

PPI has human resources from various backgrounds. Therefore, the company applies strict and consistent non-discrimination principles in HR management and has policies for recruitment, performance appraisal, remuneration and career development without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender and physical condition.

Industrial Relations

PPI strives to create a conducive, open, positive, and progressive work climate in order to create harmonious, dynamic, and fair industrial relations. To implement this relationship, PPI established the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Workers Union as a forum for unionization in conveying their aspirations. The PPI Workers Union positions itself as a partner in the implementation of industrial relations.

In general, HR management and implementation activities (industrial relations) in the Company are carried out in accordance with the provisions agreed upon in the Collective Labor Agreement (CLA). The Company socializes and implements payroll programs (remuneration) and provides other facilities outside of remuneration aimed



yang bertujuan untuk mendukung tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pengelolaan SDM di Masa Pandemi COVID-19

Penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Manajemen Perusahaan yaitu :

- Optimalisasi jam kerja dengan pola WFH/WFO dengan waktu kerja;
- Membatasi interaksi langsung dengan rekan kerja (physical distancing);
- Minimalisasi tamu yang datang dan optimalisasi persyaratan kunjungan tamu ke kantor;
- Maksimalisasi rapat internal maupun eksternal dengan fasilitas daring;
- Wajib mengenakan masker apabila keluar rumah, termasuk saat bekerja di kantor;
- Melakukan pelaporan kondisi kesehatan pegawai maupun keluarga pegawai kepada Tim Task Force The New Normal apabila mengalami gejala COVID-19;
- Kooperatif dan jujur dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Task Force The New Normal dalam hal tracing penyebaran COVID-19.

Realisasi Program Kerja SDM Tahun 2022

Berikut ini merupakan realisasi program kerja SDM PPI tahun 2022, antara lain:

- Penggunaan sistem HRIS yang sebelumnya menggunakan MyOrange (pihak ketiga) menjadi MySiska (sistem yang dikembangkan PT PPI).
- Pelaksanaan pengembangan kapabilitas pegawai dalam bentuk PPI Development Program (talenta BOD-3 hingga talenta BOD; PPI Pembelajar (PPIJAR); outbound/ seminar/training/workshop/sertifikasi; pengembangan talenta milenial; blueprint knowledge management.

Rencana Fokus Pengembangan SDM Tahun 2023

PPI telah menyusun rencana dan strategi focus dalam pengembangan SDM di antaranya:

- Pengembangan kapabilitas SDM melalui BMDP (Staf), MMDP (BOD-2), SMDP (masa kerja BOD-1 sd 3 tahun), DDP (masa kerja BOD-1 di atas 3 tahun) dan Executive Development Program;
- Pemenuhan SDM Komersial;
- Pemenuhan kebutuhan SDM seperti pelaksanaan Analisa Beban Kerja;
- Pengesahan Peraturan Direksi tentang Grade Individu Pegawai;
- Pengembangan modul-modul SDM yang terintegrasi melalui HRIS (MySiska).

at supporting the welfare of employees and their families in accordance with established policies.

HR Management during the COVID-19 Pandemic

The implementation of health protocols that have been established by the Company Management are:

- Optimization of working hours with a WFH/WFO pattern with working time;
- Limiting direct interaction with coworkers (physical distancing);
- Minimization of incoming guests and optimization of guest visit requirements to the office;
- Maximize internal and external meetings with online facilities;
- Required to wear a mask when leaving the house, including when working in the office;
- Reporting the health conditions of employees and their families to The New Normal Task Force Team if they experience symptoms of COVID-19;
- Cooperative and honest in providing information needed by The New Normal Task Force Team in terms of tracing the spread of COVID-19.

Realization of HR Work Program in 2022

The following is the realization of the Company's HC work program in 2022, including:

- The use of an HRIS system that previously used MyOrange (third party) to MySiska (a system developed by PT PPI).
- Implementation of employee capability development in the form of PPI Development Program (BOD-3 talents to BOD talents; PPI Learners (PPIJAR); outbound / seminars / training / workshops / certifications; development of millennial talents; blueprint knowledge management.

HR Development Focus Plan for 2023

PPI has developed plans and strategies to focus on HR development including:

- HR capability development through BMDP (Staff), MMDP (BOD-2), SMDP (BOD-1 tenure up to 3 years), DDP (BOD-1 tenure above 3 years) and Executive Development Program;
- Commercial HR Fulfillment;
- Fulfillment of HR needs such as the implementation of Workload Analysis;
- Approval of the Board of Directors Regulation on Employee Individual Grade;
- Development of integrated HR modules through HRIS (MySiska).



Teknologi Informasi

Information Technology

PPI terus berupaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi guna membawa perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodasi perubahan di industri, di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya.

PPI continues to strive to utilize Information Technology to bring the company to achieve accelerated business growth, as well as being able to accommodate changes in the industry, in which PPI carries out its business activities.

Kebijakan Dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berperan penting untuk meningkatkan daya saing PPI. Untuk itu, PPI terus berupaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi guna membawa perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodasi perubahan di industri, di mana PPI menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, PPI memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dengan efektif.

PPI memiliki kebijakan dan tata kelola Teknologi Informasi yang menjadi dasar acuan Teknologi Informasi dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi perusahaan. Acuan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan Teknologi Informasi telah sesuai dengan pencapaian tujuan PPI. Tata kelola Teknologi Informasi terdiri dari struktur kebijakan dan kumpulan proses yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan Teknologi Informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya Teknologi Informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait Teknologi Informasi.

Secara garis besar, pengelolaan sistem Teknologi Informasi PPI mengacu pada:

1. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi informasi BUMN;
2. PER-03/MBU/02/2018 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 07/DO/SE/PPI/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;

Information Technology Policy and Governance

Optimizing the use of Information Technology (IT) plays an important role in increasing PPI's competitiveness. For this reason, PPI continues to strive to utilize Information Technology to bring the company to achieve accelerated business growth, as well as to accommodate changes in the industry in which PPI conducts its business activities. In addition, PPI utilizes Information Technology to provide the best service and minimize the business operational risks faced effectively.

PPI has an Information Technology policy and governance that serves as the basis for Information Technology reference in managing and developing the company's Information Technology. The reference aims to ensure that the application of Information Technology is in accordance with the achievement of PPI's objectives. Information Technology governance consists of a policy structure and a collection of processes that are useful for optimizing Information Technology benefits and opportunities, controlling the use of Information Technology resources, and managing Information Technology-related risks.

Broadly speaking, the management of PPI's Information Technology system refers to:

1. PER-02 / MBU / 2013 concerning Guidelines for the Preparation of SOE Information Technology Management;
2. PER-03/MBU/02/2018 concerning Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management of State-Owned Enterprises;
3. Circular Letter of the Board of Directors (SE) Number: 07/DO/SE/PPI/IV/2022 dated April 20, 2022 concerning the General Policy of Information Technology Governance (IT Governance) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;



4. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
5. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor 10/DO/SE/PPI/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Perkembangan dunia Teknologi Informasi yang sangat dinamis harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Teknologi Informasi sehingga dapat menunjang perkembangan Teknologi Informasi di dalam perusahaan. Untuk itu, PPI berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan internal dan eksternal, khususnya pelatihan yang bersifat teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki. Selain itu, perseroan juga menjadikan self learning and information seeking sebagai kompetensi dasar bagi SDM Teknologi Informasi.

Ruang Lingkup Dan Tanggung Jawab

Teknologi Informasi (TI) saat ini harus mampu berperan sebagai enabler bisnis bagi PT. PPI dalam pemanfaatan TI sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan bisnis perusahaan. Seluruh kegiatan pengelolaan TI mulai dari plan & organize, acquire & implement, delivery & support, sampai dengan monitor & evaluate harus dikelola dengan baik agar memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan guna mendukung visi dan misi perusahaan.

Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan strategi implementasi sistem informasi yang mendukung tujuan jangka panjang PPI. Selain itu, Divisi TI juga memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan, implementasi sistem informasi jangka panjang, dan inovasi dalam pengelolaan sistem informasi PPI.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi (2020 – 2024)

Penyelarasan strategi bisnis dan Teknologi Informasi menjadi penting untuk menjamin bahwa penentuan proyek-proyek Teknologi Informasi dan skala prioritasnya telah disusun dengan mengacu pada strategi dan kebutuhan bisnis PPI. Inisiatif strategis dan Kebijakan Teknologi Informasi juga diterapkan secara fleksibel sehingga diharapkan dapat mengikuti perubahan dan proses transformasi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

4. Circular of the Board of Directors (SE) Number 08/DO/SE/PPI/IV/2022 dated April 20, 2022 concerning Information Technology Policies and Procedures of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
5. Circular of the Board of Directors (SE) Number 10/DO/SE/PPI/VII/2022 dated July 27, 2022 concerning the issuance of Standard Operating Procedures for the Governance of the Information Technology Management Work Unit of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The development of the very dynamic world of Information Technology must be accompanied by an increase in the quality and competence of Information Technology HR so that it can support the development of Information Technology within the company. For this reason, PPI is committed to continuing to provide internal and external training, especially technical training that is in accordance with the needs of the company with the aim of increasing the competence of its human resources. In addition, the company also makes self learning and information seeking a basic competency for Information Technology HR.

Scope and Responsibility

Information Technology (IT) today must be able to act as a business enabler for PT. PPI in the utilization of IT is very influential on the sustainability of the company's business activities. All IT management activities ranging from plan & organize, acquire & implement, delivery & support, to monitor & evaluate must be managed properly in order to make the maximum contribution to the company to support the company's vision and mission.

The Information Technology Division (IT Division) has the responsibility to plan and develop information system implementation strategies that support PPI's long-term goals. In addition, the IT Division also provides direction in formulating policies, implementing long-term information systems, and innovations in the management of PPI's information systems.

Information Technology Development Roadmap (2020 - 2024)

The alignment of business strategy and Information Technology is important to ensure that the determination of Information Technology projects and their priority scale has been prepared with reference to PPI's strategy and business needs. Strategic initiatives and Information Technology Policies are also implemented flexibly so that they are expected to follow changes and transformation processes that may occur in the future.



Implementasi program dan kegiatan Teknologi Informasi PPI berpedoman Information Technology Master Plan (IT MP) 2020-2024 yang disusun terintegrasi. Dalam pelaksanaan roadmap program 5 tahunan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah menetapkan target utama yang diharapkan dapat terlaksana setiap tahunnya.

Dengan adanya dokumen rencana strategis tersebut, pengembangan Teknologi Informasi di PPI berjalan lebih terarah dan lebih berperan dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan bisnis serta terlibat di dalam transformasi proses bisnis PPI secara berkelanjutan. Berikut ini adalah roadmap pelaksanaan kegiatan Teknologi Informasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

The implementation of PPI Information Technology programs and activities is guided by the Information Technology Master Plan (IT MP) 2020-2024 which is compiled in an integrated manner. In implementing the 5-year program roadmap, the Information Technology Division has set the main targets that are expected to be implemented every year.

With this strategic plan document, the development of Information Technology in PPI is more focused and plays a more role in supporting and developing business activities and is involved in the transformation of PPI's business processes on an ongoing basis. The following is a roadmap for the implementation of Information Technology activities in the last 5 (five) years, namely:





Penanggung Jawab Pengelola Teknologi Informasi

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 perihal Penetapan Struktur Organisasi ditetapkan bahwa Divisi Teknologi Informasi adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi PPI.

Divisi Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi. Per 31 Desember 2022, jumlah personil Divisi Teknologi Informasi adalah sebanyak 10 orang PKWT dan 2 orang PKWT.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi di perseroan:



Investasi Di Bidang Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2022, Divisi Teknologi Informasi telah merealisasikan sejumlah investasi yang bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional Teknologi Informasi, di antaranya:

1. Implementasi Sales Force untuk 32 cabang;
2. Pilot Project Penguatan dan peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan data Teknologi Informasi (Sophos, Manage Engine, Backup Up Veeam);
3. Pembelian Lisensi perpetual Microsoft (server, windows dan office).

Party Responsible For Information Technology

Directors No. 51/DU/SKD/PPI/XII/2021 regarding the Determination of the Organizational Structure, it is stipulated that the Information Technology Division is a work unit responsible for the preparation and implementation of PPI's Information Technology development program.

The Information Technology Division is led by a Division Head who reports directly to the Operations Director. As of December 31, 2022, the number of personnel in the Information Technology Division is 10 permanent workers and 2 non-permanent workers.

The following is the organizational structure of the Information Technology management in the company:

Information Technology Investment

Throughout 2022, the Information Technology Division has realized a number of investments aimed at supporting Information Technology operational activities, including:

1. Sales Force implementation for 32 branches;
2. Pilot Project Strengthening and rejuvenation of Information Technology infrastructure and data security devices (Sophos, Manage Engine, Veeam Backup Up);
3. Purchase of Microsoft perpetual licenses (server, windows and office).



Realisasi Program Teknologi Informasi Tahun 2022

Di era globalisasi dan revolusi industri, teknologi memiliki peran sentral untuk meningkatkan daya saing yang kuat dalam kegiatan bisnis PPI. PPI terus mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan melakukan pemenuhan kebutuhan bisnis, pada saat yang sama tetap memperhatikan keamanan, keandalan, dan kapabilitas internal Teknologi Informasi PPI. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan bisnis yang lebih cepat, terpercaya dan dapat memberikan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

PPI mengimplementasikan realisasi program pengembangan Teknologi Informasi yang mengacu pada kebijakan internal yang berlaku. Sejalan dengan corporate plan, pengembangan Teknologi Informasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis PPI.

Adapun realisasi program Teknologi Informasi di lingkungan perseroan sepanjang tahun 2022, antara lain:

1. Pengembangan optimalisasi ERP;
2. Tata Kelola Teknologi Informasi berupa IT Maturity Level dengan skor 3.14;
3. Penerapan Kemandirian Email Corporate pada Anak Usaha PT BGR Logistik Indonesia;
4. Pilot Project penguatan & peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan data Teknologi Infomasi (Sophos, Manage Engine, Backup Up Veaam);
5. Pengembangan aplikasi : ADINDA (Aplikasi Nota Dinas Digital), MYSISKA (Sistem Interaksi Kepegawaian), MONALISA (Monitoring Aset, License, Software dan Aplikasi), ARKO (Aplikasi Rencana Kerja Online), PPIjar (PPI Belajar), PPI Access (Halaman untuk memudahkan mengakses ke Aplikasi-Aplikasi role pegawai), PPI News , MONITA (Sistem Monitoring Harga), ARLITA-VA (Aplikasi Rantai Pasok Logistik Terintegrasi (VA)), HELPDESK (Aplikasi Ticket untuk Permintaan, Issue, Incident), WARUNG PANGAN, MAUBELI (Aplikasi Untuk Belanja Diwarung Terdekat), KARIR (Aplikasi e-recruitment);
6. Pengembangan aplikasi pendukung ERP : Arlita-B2, Arlita-VA (Aplikasi Rantai Pasok Logistik Terintegrasi), SAMANTHA (Dashboard dan input komoditi) dan ELMIRA (Elektronik Mitra Registrasi).

Information Technology Program Realization In 2022

In the era of globalization and industrial revolution, technology has a central role to increase strong competitiveness in PPI's business activities. PPI continues to implement Information Technology by fulfilling business needs, while at the same time paying attention to the security, reliability and internal capabilities of PPI Information Technology. This effort is expected to optimize business development that is faster, more reliable and can provide services to all stakeholders.

PPI implements the realization of an Information Technology development program that refers to applicable internal policies. In line with the corporate plan, Information Technology development is also carried out on an ongoing basis to support PPI's business operations.

The realization of the Information Technology program within the company throughout 2022, among others:

1. ERP optimization development;
2. Information Technology Governance in the form of IT Maturity Level with a score of 3.14;
3. Implementation of Corporate Email Independence at PT BGR Logistik Indonesia Subsidiary;
4. Pilot Project strengthening & rejuvenation of Information Technology infrastructure and data security devices (Sophos, Manage Engine, Backup Up Veaam);
5. Application development: ADINDA (Digital Service Note Application), MYSISKA (Personnel Information System), MONALISA (Asset, License, Software and Application Monitoring), ARKO (Online Work Plan Application), PPIjar (PPI Learning), PPI Access (Page for easy access to employee role applications), PPI News, MONITA (Price Monitoring System), ARLITA-VA (Integrated Logistics Supply Chain Application (VA)), HELPDESK (Ticket Application for Request, Issue, Incident), WARUNG PANGAN, MAUBELI (Application for Shopping at Nearby Stalls), KARIR (e-recruitment application);
6. ERP supporting application development: Arlita-B2, Arlita-VA (Integrated Logistics Supply Chain Application), SAMANTHA (Dashboard and commodity input) and ELMIRA (Electronic Partner Registration).



Rencana Fokus Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2023

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ditahun 2023 akan fokus kepada :

1. Pengembangan Optimalisasi ERP;
2. Tata Kelola Teknologi Informasi berupa Information Technology Master Plan 2023-2027 yang selaras dengan holding;
3. Kesiapan INDI 4.0;
4. Optimalisasi Sales Force;
5. Penguatan & peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan data Teknologi Infomasi (Sophos, Manage Engine, Backup Up Veaam) untuk keseluruhan cabang;
6. Pengembangan Aplikasi : SINUR, KARIR, E-PROPOSAL, PPI Property, website Corporate, GPS Tracker, WINA-LITE;
7. Digitalisasi Gudang Stock Point;
8. Pengembangan kapasitas server.

Information Technology Development Plan For 2023

The Information Technology Development Plan in 2023 will focus on:

1. ERP Optimization Development;
2. Information Technology Governance in the form of Information Technology Master Plan 2023-2027 which is aligned with the holding company;
3. INDI 4.0 Readiness;
4. Sales Force Optimization;
5. Strengthening & rejuvenation of Information Technology infrastructure and data security devices (Sophos, Manage Engine, Backup Up Veaam) for all branches;
6. Application Development: SINUR, CAREER, E-PROPOSAL, PPI Property, Corporate website, GPS Tracker, WINA-LITE;
7. Digitalization of Stock Point Warehouse;
8. Server capacity development.



6

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Menyajikan informasi mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang di implementasikan oleh Perusahaan.

Providing information on the implementation of Good Corporate Governance implemented by the Company.





PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD





Bagi PPI, implementasi GCG tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, akan tetapi lebih dalam daripada itu, yakni merupakan praktik sukarela yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemauan tanpa paksaan oleh seluruh organ PPI demi terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan seluruh pemangku kepentingan.

For PPI, GCG implementation is not only a form of compliance with applicable laws and regulations, but deeper than that, namely a voluntary practice that is carried out with full awareness and willingness without coercion by all PPI organs in order to create sustainable added value for all stakeholders.

Pernyataan Komitmen Penerapan GCG

Statement Of GCG Implementation Commitment

Sebagai BUMN Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) senantiasa menjadi landasan bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Penerapan GCG secara konsisten dilakukan oleh seluruh elemen PPI dengan penuh kesadaran sebagai sebuah budaya kerja yang kuat untuk menghadirkan iklim bekerja yang profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bagi PPI, implementasi GCG tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, akan tetapi lebih dalam daripada itu yakni merupakan praktik sukarela yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kemauan tanpa paksaan oleh seluruh organ PPI demi terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan terbaik para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan pemangku kepentingan lainnya (karyawan, regulator, mitra kerja, dan lain-lain).

Penerapan GCG pada jangka panjang diyakini dapat memberikan return ekonomi yang maksimal bagi PPI dan Pemegang Saham, serta dapat mendukung terbentuknya citra dan reputasi positif di mata para Pemangku Kepentingan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan usaha

Untuk itu, PPI selalu berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya dari waktu ke waktu. seluruh insan PPI menyatakan kesungguhan dan komitmen kuat untuk selalu mengedepankan standar etika tertinggi dalam membangun relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Komitmen tersebut setidaknya tercantum dalam Pakta Integritas yang setiap awal tahun wajib ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.

As an SOE, the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) principles has always been the foundation for the Company in carrying out daily business activities. The implementation of GCG is consistently carried out by all elements of PPI with full awareness as a strong work culture to present a professional, accountable and responsible work climate. For PPI, the GCG implementation is not only a form of compliance with applicable laws and regulations, but deeper than that, namely a voluntary practice carried out with full awareness and willingness without coercion by all PPI organs in order to create sustainable added value for the benefit of the shareholders, society in general, and other stakeholders (employees, regulators, partners, and others).

The GCG implementation in the long term is viewed to be able to provide maximum economic returns for PPI and Shareholders, and to be able to support the formation of a positive image and reputation in the eyes of the Stakeholders. Thus, it can be concluded that the GCG implementation is one of the determining factors for business continuity.

For this reason, PPI always strives to improve the quality of its GCG implementation from time to time. All of PPI's personnel express their seriousness and strong commitment to always prioritizing the highest ethical standards in building relationships with various internal and external parties. This commitment is at least stated in the Integrity Pact which must be signed at the beginning of each year by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees.



Landasan Penerapan GCG

Legal Basis Of GCG Implementation

Penerapan GCG di lingkungan PPI berpedoman pada sejumlah regulasi normatif, baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007;
2. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

The implementation of GCG within PPI is guided by a number of normative regulations, both developed by national and international institutions, including the following:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies dated August 16, 2007. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs);
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
3. Decree of the Secretary of the Minister of SOE Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
4. Good Corporate Governance Guidelines issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasinya

GCG Principles and Their Implementation

Penerapan GCG pada lingkup PPI mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan GCG dalam ruang lingkup PPI, antara lain:

The GCG implementation in the scope of PPI refers to the 5 (five) basic principles issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in order to improve the quality of GCG implementation within the scope of PPI, including:

No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI scope
1	Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perseroan, yang mana pengungkapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Openness in the decision-making process and disclosure of relevant material information regarding the Company, the disclosure of which must still pay attention to the provisions of the applicable laws and regulations.	• Penerbitan Laporan Tahunan; • Penerbitan Laporan Keuangan Berkala; dan • Pemanfaatan situs web: www.ptppi.co.id untuk menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. • Issuance of the Annual Report; • Issuance of Periodic Financial Reports; and • Utilization of the website: www.ptppi.co.id to convey information to Shareholders and other Stakeholders.



No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI scope
2	Akuntabilitas Accountability	Menetapkan pembagian peran, fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban secara jelas terhadap seluruh organ PPI. Establishing a clear division of roles, functions and implementation of responsibilities for all PPI Organs.	• Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah tercantum di dalam Board Manual PPI; • Perseroan memiliki standar penilaian kinerja dengan indikator dan metode penilaian yang jelas dan objektif untuk seluruh Organ maupun karyawan. • The description of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been listed in PPI's Board Manual; • The Company has performance appraisal standards with clear and objective indicators and assessment methods for all organs and employees.
3	Pertanggungjawaban Responsibility	Menjamin kesesuaian antara kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensuring conformity between day-to-day business operations and applicable laws and regulations.	• Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial PPI (corporate social responsibility); dan • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan. • Complying with the provisions of PPI's Articles of Association and applicable laws and regulations; • Carrying out tax obligations properly and on time; • Carrying out PPI social responsibility activities; and • Carrying out information disclosure obligations in accordance with the aet regulations.



No.	Prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Implementasi di lingkup PPI Implementation in PPI scope
4	Independensi Independency	Pengelolaan PPI dilakukan secara mandiri dan profesional serta terbebas dari segala bentuk tindakan benturan kepentingan dan/ atau pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The management of PPI is carried out independently and professionally and free from any form of conflict of interest and/ or influence or pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations.	• Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara Organ PPI; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan perseroan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengambilan keputusan. • Mutual respect for rights, obligations, duties, authorities, and responsibilities among PPI's Organs; • Shareholders and the Board of Commissioners do not intervene in the management of the Company; • The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees always avoid conflicts of interest in decisionmaking process.
5	Kesetaraan Fairness	PPI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. PPI upholds the principles of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices of sound business operations.	• Seluruh Pemangku Kepentingan berhak memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlakuan yang setara; • Membuka kesempatan yang sama dan setara kepada setiap karyawan untuk berkarier dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. • All Stakeholders are entitled to receive benefits and equal treatment; • Opening equal and fair opportunities for every employee to have a career and carry out their duties regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.



Maksud dan Tujuan Penerapan GCG

GCG Implementation Purpose and Objective

Sebagai entitas BUMN mandiri yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PPI bertujuan untuk:

1. Memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tata Kelola yang baik.
2. Melaksanakan pemenuhan atau kepatuhan terhadap regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja PPI menuju *well governed company*.
3. Memberikan acuan dalam menentukan kebijakan dan sasaran Perusahaan dan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja PPI.

As an independent SOE entity that works professionally and responsibly, the implementation of GCG principles in PPI aims to:

1. Give reassurance to all stakeholders that the Company is managed and controlled to protect the interests of stakeholders in line with the laws and regulations and good governance.
2. Implement compliance with regulations but also as a necessity in improving PPI's performance towards a well-governed company.
3. Provide a reference in determining the Company's policies and targets and a significant contribution to the achievement of PPI's performance.

Roadmap GCG PPI

Company GCG Roadmap

PPI menerapkan praktik-praktik bisnis korporasi sehat tercermin melalui penyusunan peta jalan (roadmap) GCG yang dirancang secara terstruktur dan komprehensif. Manajemen menggunakan roadmap tersebut sebagai referensi utama untuk melakukan sejumlah perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap praktik dan regulasi tata kelola di PPI agar dapat berjalan lebih baik lagi di kemudian hari.

PPI implements sound corporate business practices as reflected in the preparation of a GCG roadmap that is designed in a structured and comprehensive manner. The management uses the roadmap as the main reference to make a number of improvements and quality improvements to governance practices and regulations in PPI so they can run even better in the future.





Sesuai dengan *roadmap* di atas, dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai PPI pada tahun 2022 mendatang adalah:

1. Meningkatkan kinerja PPI terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perseroan serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan *corporate value*, melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Tercapainya *stakeholder satisfaction* akibat peningkatan *corporate value* dan dividen perseroan.
5. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ PPI.
6. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan PPI kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
7. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat peningkatan nilai perusahaan.

Dengan demikian, target PPI untuk menjadi perusahaan *aggregator* pangan dan logistik yang berbasis digital terbesar di Indonesia dapat tercapai.

In accordance with the roadmap above, it can be seen that the objectives to be achieved by the Company in 2022 are as follows:

1. Increasing the Company's performance by creating a better decision-making process, increasing the Company's operational efficiency and increasing services to stakeholders.
2. Increasing corporate value, by improving financial performance and minimizing the risk of investment decisions containing conflicts of interest.
3. Increasing investor confidence.
4. Achievement of stakeholder satisfaction due to the increase in corporate value and dividends of the Company.
5. Directing and controlling the working relations of the Company's organs.
6. Increasing the accountability of PPI's management to the Shareholders while still taking into account the interests of the stakeholders.
7. Encouraging and supporting business development, management of company resources and risk management more effectively so as to increase company value.

Thus, PPI's target to become the largest digitalbased food and logistics aggregator company in Indonesia can be achieved.

Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2022

Efforts To Improve The Quality Of GCG Implementation In 2022

Sepanjang tahun 2022, PPI telah melakukan sejumlah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, antara lain melalui:

- Pemutakhiran Board Manual pada tanggal 28 Oktober 2021
- Pemutakhiran Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko pada tanggal 26 Maret 2021
- Pengesahan Kebijakan terkait Anak Perusahaan
- Menyusun Laporan Tahunan Sosialisasi Anti Gratifikasi & Whistleblowing System (WBS) tanggal 11 Mei 2021

Throughout 2022, PPI has made a number of efforts aimed at improving the quality of GCG implementation, including through:

- Updating the Board Manual on October 28, 2021
- Update of the Audit Committee and Risk Management Committee Charter on March 26, 2021
- Ratification of Policies related to Subsidiaries
- Compilation of Annual Report on Anti-Gratification & Whistleblowing System (WBS) Socialization on May 11, 2021



Penilaian GCG Oleh Pihak Eksternal

GCG Assessment By External Party

Sebagai entitas BUMN, PPI memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan tersebut, PPI memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen. Penilaian GCG dilakukan sebagai salah satu upaya PPI untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga PPI dapat mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan aspek perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen.

As an SOE entity, PPI has an obligation to implement mandated in the Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning GCG Implementation of GCG Practices in SOEs.

In accordance with the provisions stipulated in the regulation, PPI has an obligation to carry out measurements of the implementation of GCG on a regular basis, at least once every 2 years by an independent assessor. The GCG assessment is carried out as one of PPI's efforts to improve the quality of GCG implementation so that PPI can determine the level of adequacy of implementation and aspects of improvement that need to be followed up by management.

Dasar Pelaksanaan

Penilaian GCG PPI sebagai entitas BUMN mengacu pada sejumlah regulasi normatif, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;
2. Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep- 117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002; dan
3. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Legal Basis of the Implementation

PPI's GCG assessment as a state-owned entity refers to a number of normative regulations, among others:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
2. Decree of the Minister of State/Head of the Agency for Investment and Development of State-Owned Enterprises number KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 dated May 31, 2000 concerning Development of Good Corporate Governance Practices in State- Owned Enterprises (SOE), which was updated by Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number Kep- 117/M-MBU/2002, dated August 1, 2002; and
3. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

Kriteria yang Digunakan

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan PPI mengacu pada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Criteria Used

The method of measuring GCG implementation within PPI refers to the parameters developed by the Ministry of SOEs in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.



Hasil Penilaian GCG Tahun Buku 2022 GCG Assessment Results for Fiscal Year 2022

Prinsip Principle	Penjelasan Explanation
Periode Pelaksanaan Penilaian Assessment Period	Periode penerapan GCG di perseroan yang dinilai dalam pelaksanaan assessment GCG ini adalah periode tahun 2022 serta tahun sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Proses penilaian dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari The period of GCG implementation in the Company which is assessed in the implementation of this GCG assessment is the period of 2022 and the year before and after as long as it is related as the basis for making conclusions or assessments. The assessment process is carried out for 30 (thirty) days.
Pihak yang Melakukan Penilaian Assessor	BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP (Financial and Development Supervisory Agency)
Dasar Penunjukan Legal Basis of Appointment	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011
Kriteria yang Digunakan Criteria Used	Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara. Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number: SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.





Hasil Penilaian Penerapan GCG 2022

GCG Implementation Assessment Result 2022

Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter Evaluation Aspects/Indicators/ Parameters	Bobot Weight	Hasil Result	
		Skor Score	% Capaian % Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan. Commitment on Sustainable Corporate Governance Implementation.			
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Commitment on Sustainable Corporate Governance Implementation	7,00	5,041	72,01
Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders and General Meetings of Shareholders	9,00	7,538	83,75
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	27,263	77,89
Direksi Board of Directors	35,00	28,860	82,46
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information and Transparency Disclosure	9,00	7,450	82,78
Aspek Lainnya Other Aspect	5,00	0	0
Skor Keseluruhan Overall score	100,00	76,151	76,15%
Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter Evaluation Aspects/Indicators/ Parameters	BAIK GOOD		

Aspek penilaian pada tabel di atas meliputi 43 indikator penilaian dan 153 parameter pengujian. Pada tahun 2022, perseroan memperoleh skor 76,151 dari total bobot sebesar 100, mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021 sebesar 87,388. Berdasarkan hasil penilaian GCG di atas, PPI menerima sejumlah rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti pada masing-masing kriteria dengan ringkasan sebagai berikut:

The assessment aspect in the table above includes 43 assessment indicators and 153 test parameters. In 2022, the Company obtained a score of 76.151 out of a total weight of 100, has decreased from the results of the 2021 assessment the results of the 2021 assessment of 87.388. Based on the results of the GCG assessment above, PPI received a number of recommendations for improvement to be followed up on each criterion with a summary as follows:



Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Aspek Pengujian GCG GCG Testing Aspects	Jumlah Area Perbaikan Number of Improvement Areas	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	7	On Progress
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	23	On Progress
Direksi Board of Directors	20	On Progress
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	4	On Progress

Skor GCG Perseroan

Company GCG Score

Berikut ini adalah skor penilaian GCG PPI selama 5 (lima) tahun terakhir:

The following is PPI's GCG assessment score for the last 5 (five) years:

Tahun Year	Skor Penilaian GCG GCG Assessment Score	Parameter Parameters	Pelaksana Organizer
2022	76,15	SK-16/S. MBU/2012	BPKP
2021	87,34	SK-16/S. MBU/2012	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2020	85,18	SK-16/S. MBU/2012	PT Citra Solusi Manajemen
2019	82,07	SK-16/S. MBU/2012	PT Citra Solusi Manajemen
2018	80,60	SK-16/S. MBU/2012	Penilai Independen: Andry Maulidi S.si., MM



Rencana Peningkatan Kualitas GCG Tahun 2023

GCG Quality Improvement Plan In 2023

Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh pihak penilai akan ditindaklanjuti oleh PPI dalam bentuk rencana aksi perbaikan yang melibatkan para pihak berkepentingan. Oleh karena itu, PPI telah merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk mendorong kualitas penerapan GCG PPI, antara lain:

1. Menentukan *timeline* kerja atas rencana tindak lanjut hasil assessment GCG 2022 (perbaikan terhadap perangkat GCG);
2. Melakukan *assessment* untuk tahun buku berikutnya

All recommendations given by the assessor will be followed up by PPI in the form of a corrective action plan involving interested parties. Therefore, PPI has formulated corrective measures aimed at encouraging the quality of PPI's GCG implementation, including:

1. Determine the work timeline for the follow-up plan to the GCG assessment results in 2022 (improvement of GCG tools);
2. Conduct an assessment for the next financial year.

Struktur dan Mekanisme GCG

GCG Structure and Mechanism

Infrastruktur GCG

Berpedoman pada UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UU PT), organ-organ utama PPI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Mengacu pada Anggaran Dasar PPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organ memiliki peranan penting di dalam struktur dan mekanisme GCG serta menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan PPI.

Selain keberadaan organ utama di atas, PPI juga memiliki sejumlah organ pendukung di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

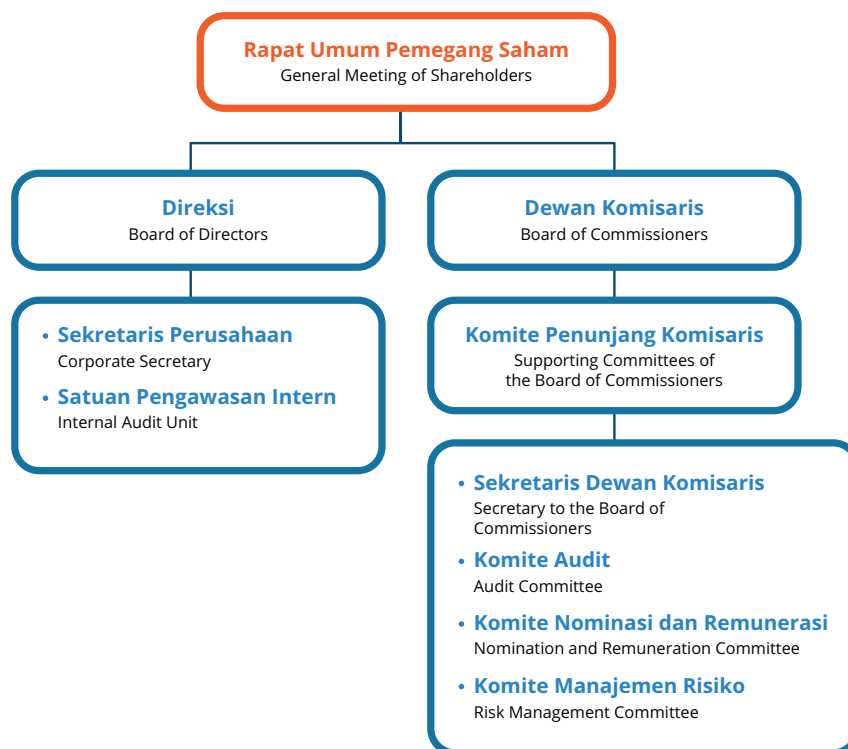
1. Organ pendukung Dewan Komisaris:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Manajemen Risiko
2. Organ pendukung Direksi:
 - a. Sekretaris Perusahaan
 - b. Satuan Pengawasan Intern

GCG Infrastructure

Referring to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the main organs of PPI consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Based on PPI's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, each organ has an important role in the structure and mechanism of GCG and carries out their respective functions, duties, and responsibilities for the benefit of PPI.

In addition to the main organs above, PPI also has a number of supporting organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Supporting organs of the Board of Commissioners:
 - a. Secretary to the Board of Commissioners
 - b. Audit Committee
 - c. Risk Management Committee
2. Supporting organs of the Board of Directors:
 - a. Corporate Secretary
 - b. Internal Control Unit



Soft Structure GCG

Penerapan GCG PPI didukung oleh eksistensi kebijakan/ pedoman internal yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan. Hingga akhir 2021, PPI telah menyusun dan mengesahkan sejumlah *Governance Soft Structure*, antara lain:

1. Anggaran Dasar PPI
2. *Code of Conduct*
3. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
4. Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah
5. Kebijakan Anti-Penyuapan
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
7. Piagam Dewan Komisaris
8. Piagam Direksi

Soft Structure GCG

PPI's GCG is supported by internal policies/ guidelines that are in line with the principles of corporate governance. Until the end of 2021, PPI compiled and ratified a number of Governance Soft Structures, including:

1. PPI's Articles of Association
2. Code of Conduct
3. Whistleblowing System Policy
4. Gift Acceptance and Giving Policy
5. Anti-Bribery Policy
6. Gratification Control Guidelines
7. Board of Commissioners Charter
8. Board of Directors Charter

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama Dan Pengendali Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Sampai Kepada Pemilik Individu

Information About Direct And Indirect Majority And Controlling Shareholders

Pengungkapan lebih lanjut mengenai komposisi dan informasi Pemegang Saham PPI sudah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

Further disclosure on the composition and information of PPI's Shareholders has been presented in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi PPI yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai batasan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPI. RUPS diselenggarakan setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Pada prinsipnya, RUPS berfungsi sebagai media formal bagi pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya dalam mengemukakan pendapat, memutuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan, dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kinerja PPI.

Mengacu pada pasal 20 Anggaran Dasar, PPI menjalankan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of PPI that has rights and authorities that are not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the limits specified in the laws and regulations and PPIs Articles of Association. GMS is held annually as a form of accountability to shareholders. In principle, the GMS functions as a formal medium for shareholders to exercise their rights in expressing opinions, deciding various strategic policies related to the management of the Company, and obtaining information related to PPI's performance.

Referring to article 20 of the Articles of Association, PPI conducts 2 (two) types of GMS, namely:

RUPS Tahunan | Annual GMS

Wajib diselenggarakan setiap tahun sebagai perwujudan tanggung jawab kepada para pemegang saham yang bertujuan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan perseroan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

It is mandatory to be held annually as an embodiment of responsibility to the shareholders which aims to discuss the annual report and annual calculations of the Company and is carried out no later than 6 (six) months after the fiscal year.

RUPS Lainnya | Other GMS

Yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

It can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine things that are not carried out at the Annual GMS.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar, RUPS Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, meliputi:

- RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan;
- RUPS tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Furthermore, based on the provisions of article 21 of the Articles of Association, the Annual GMS of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, includes:

- GMS regarding the approval of the annual report;
- Annual GMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham suatu perusahaan. Per 31 Desember 2022, kepemilikan saham Perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Kepemilikan saham tersebut telah dicatat dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

Shareholders

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of a company. As of December 31, 2022, the Company's share ownership is 99.99% owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and 0.0001% owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs. The share ownership has been recorded and administered in the Register of Shareholders (RoS) which is managed by the Corporate Secretary.



Hak-Hak Pemegang Saham

Berikut ini adalah hak-hak pemegang saham yang harus dan wajib dilindungi oleh PPI, antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
2. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
3. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;
5. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila Perusahaan dilikuidasi;
6. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah);
7. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perusahaan; dan
8. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Perlakuan yang Setara Bagi Pemegang Saham

Pemegang saham perseroan adalah kepemilikan tunggal yakni dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun tidak memiliki struktur kepemilikan saham hingga pemilik individu, PPI tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi pemegang saham sebagai bentuk kesadaran penuh atas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Kewenangan RUPS

Sebagaimana termaktub dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun yang menjadi area kewenangan RUPS, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

Shareholder Rights

The following are the rights of shareholders that must be protected by PPI, including:

1. Attending the GMS and voting in accordance with the classification and number of shares owned;
2. Receiving distribution of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares owned;
3. Obtaining material information about the Company in a timely and regular manner;
4. Granting power of attorney with substitution rights to individuals or legal entities to represent them in the GMS;
5. Receiving proportionally the remainder of the liquidation calculation if the Company is liquidated;
6. Filing a lawsuit to the District Court against a member of the Board of Directors whose mistake or negligence has caused a loss to the Company (Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights);
7. Viewing the Register of Shareholders and the Special Register during the Company's office hours; and
8. Holding a GMS in the event that the Board of Directors fails to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Equal Treatment for Shareholders

The Company's shareholders are sole proprietorship which is owned by the Government of the Republic of Indonesia. Although it does not have a share ownership structure to individual owners, PPI still upholds the principles of equality and justice for shareholders as a form of full awareness of the implementation of GCG principles.

GMS Authority

Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the GMS is a Company Organ that has authority that cannot be given to either Board of Commissioners or Board of Directors. The areas of authority of the GMS include:

1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Providing decisions needed to protect the Company's business interests in the long and short term in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;



3. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Giving approval to the Annual Report including ratifying the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;
4. Making decisions through an open, fair and accountable process; and
5. Implementing Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022

Selama tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 31 Januari 2022 dan 30 Juni 2022,. secara video conference melalui Zoom Meeting. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PPI Adapun keputusan dan realisasi RUPS 2022 adalah sebagai berikut:

2022 GMS Implementation

The Company's GMS was held on June 30, 2022, by video conference through Zoom Meeting. The GMS was attended by Shareholders, Board of Commissioners and Directors of PPI. The decisions and realization of the 2022 GMS are as follows:

Tanggal dan Tempat Date and Place	Keputusan Resolution	Status Pelaksanaan Implementation Status
RUPS Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022 GMS Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) Year 2022		
Lokasi: Place: • Ruang Rapat Lantai UG, Gedung Waskita Rajawali Tower (WRT), Jakarta Timur Meeting Room UG Floor, Waskita Rajawali Tower (WRT) Building, East Jakarta • Video Conference melalui Aplikasi Zoom Meeting Video Conference through the Zoom Meeting App	1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Ratified the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022 dengan total penyaluran sebesar Rp 3.665.000 Approved and ratified the Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility (RKA TJSL) for 2022 with a total distribution of Rp 3,665,000. 3. Menyetujui dan menetapkan KPI Direksi Perseoran Tahun 2022, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Approved and determined the KPIs of the Company's Board of Directors for 2022, as stated in the Management Contract for 2022 between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders.	Telah terealisasi Has been realized
Tanggal: Date: 31 Januari 2022 January 31, 2022		



4. Menyetujui dan menetapkan KPI Dewan Komisaris Tahun 2022, yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

To approve and determine the KPIs of the Board of Commissioners for the year 2022, as stated in the Management Contract for the year 2022 between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders.

5. Menetapkan Indikator Aspek Operasional yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Tahun 2022, dengan perhitungan skor 78,5 kategori "A (Sehat)"

Determine the Operational Aspect Indicators used in the assessment of the Company's health level in 2022, with a calculation score of 78.5 category "A (Healthy)".

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 Tahun 2022

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for the Financial Year 2021 Year 2022.

Lokasi: | Place:

Ruang Loyal III, Lantai 8, Kementerian BUMN Jakarta Pusat

Loyal Room III, 8th Floor, Ministry of SOEs, Central Jakarta

Tanggal: | Date:

31 Juni 2022

June 31, 2022

1. Menyetujui laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.

To approve the annual report on the condition and course of the Company during the Financial Year 2021, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year 2021

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk persetujuan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode sebelumnya.

To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2021 ended on December 31, 2021, including the approval of the Restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for the previous period.

3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021.

Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2021 and ratified the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2021.

Telah terealisasi

Has been realized



4. Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus/rugi bersih pada Tahun Buku 2021.

There is no determination on the Use of the Company's Consolidated Net Income because the Company experienced a minus profit / net loss in the 2021 Financial Year.

5. RUPS Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2022, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2021.

GMS Granted authority and power to the Holders of the most Series B Shares to determine for members of the Board of Directors and Board of Commissioners the amount of salary/honorarium along with facilities and other benefits for the Financial Year 2022, as well as tantiem/performance incentive/special incentive for the performance of the Financial Year 2021.

6. RUPS Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan

The GMS delegated the authority and power to the Holders of the most Series B Shares to appoint a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Financial Statements of the Company.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021, PPI menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS dan seluruh hasil keputusannya telah dilaksanakan di tahun 2021. Adapun agenda rapat dan hasil keputusan RUPS tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2021 GMS Implementation

In 2021, PPI held 2 (two) GMS and all of the resolutions were carried out in 2021. The agenda for the meeting and the resolutions of the 2021 GMS are as follows:

Tanggal dan Tempat Date and Place	Keputusan Resolution	Status Pelaksanaan Implementation Status
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 GMS Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021		
Lokasi: Place: Video Conference melalui Aplikasi Zoom Meeting Video Conference via Zoom Application Tanggal: Date: 30 Januari 2021 January 31, 2021	1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021. Approved the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 and the Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) for 2021.	Telah direalisasikan di tahun 2021 Were realized in 2021



2. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Established Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021 as set out in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders.

3. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.

Established Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2021 as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.

4. Menyetujui Indikator Aspek Operasional Tahun 2021 untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021.

Approved the 2021 Operational Aspect Indicators for the Measurement of the Company's Soundness Level in 2021.

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 GMS Ratification of the 2020 Annual Report

Lokasi: | Place:

Video Conference melalui
Aplikasi Zoom Meeting
Video Conference via Zoom
Application

Tanggal: | Date:

30 Juni 2021
June 31, 2021

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Approved the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2020, as well as granted full settlement and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and The Company's Board of Commissioners for the management and supervisory actions that had been carried out during the Fiscal Year 2020.

Telah direalisasikan di
tahun 2021

Were realized in 2021



2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Approved the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year 2020 and Ratified Financial Statements of PKBL for the Fiscal Year 2020, as well as granted full settlement and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision of the Partnership and Community Development Program that had been carried out during the Fiscal Year 2020.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Determined the use of the Company's Consolidated Net Income for the Fiscal Year 2020.

4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Tahun Buku 2020.

Determined the Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2021, as well as tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance in the Fiscal Year 2020.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.

Appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2021 and the Financial Statements for the Micro and Small Business (UMK) Funding Program for the Financial Year 2021.





Dewan Komisaris

Board Of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ utama perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat atau rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memastikan penerapan GCG PPI telah berjalan efektif dan berkelanjutan pada setiap tingkatan organisasi.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris PPI dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. *Level Performance*: Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta menyampaikan masukan/rekomendasi kepada RUPS.
2. *Level Conformance*: Dewan Komisaris melakukan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat yang diberikan telah dilakukan serta ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan telah dipatuhi dengan baik.

Dasar Hukum

Keberadaan dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah regulasi normatif yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/MPBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;

The Board of Commissioners is the main organ of the Company which is collectively responsible for carrying out the supervisory function of the general and/or specific management of the company in accordance with the provisions of the Articles of Association and laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners is also tasked with providing advice or recommendations to the Board of Directors regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as ensuring that the implementation of PPI's GCG has been effective and sustainable at every level of the organization.

The supervisory function of PPI's Board of Commissioners is carried out in 2 (two) levels, namely:

1. *Performance Level*: The Board of Commissioners provides direction and guidance to the Board of Directors and submits inputs/recommendations to the GMS.
2. *Conformance Level*: The Board of Commissioners carries out advanced monitoring activities to ensure that the advice given has been carried out and the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association have been properly complied with.

Legal Basis

The existence and procedures for the appointment or dismissal of PPI's Board of Commissioners refer to a number of applicable normative regulations, including:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the Minister of State for the Utilization of SOEs/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/MPBUMN/1999 concerning Management Reports of State-Owned Enterprises;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;



7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/ MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of GCG Practices in SOEs;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip GCG khususnya terkait pemisahan tugas dan wewenang secara jelas, maka Dewan Komisaris senantiasa menjadikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (Board Manual), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

Secara umum, isi pokok Board Manual sebagai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan Dewan Komisaris
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Komisaris Independen
7. Etika Jabatan Dewan Komisaris
8. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
9. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Organ Pendukung Dewan Komisaris
13. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners

In order to enforce the GCG principles, especially regarding the clear separation of duties and authorities, the Board of Commissioners always uses the Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules as a reference in carrying out its duties. The Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules have been regulated in the Board Manual which is stipulated based on the Decree of the Board of Directors Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning First Amendment to the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy on Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.

In general, the main contents of the Board Manual as guidelines and work procedures for the Board of Commissioners regulate the following matters:

1. Functions of the Board of Commissioners
2. Requirements of the Board of Commissioners
3. Composition and Membership
4. Term of office
5. Orientation and Competency Development Program
6. Independent Commissioner
7. Ethics of the Board of Commissioners
8. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
9. Rights and Authorities of the Board of Commissioners
10. Meeting of the Board of Commissioners
11. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
12. Supporting Organs of the Board of Commissioners
13. Accountability of the Board of Commissioners.



Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun ketentuan tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya sudah berakhir maka dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali periode jabatan berikutnya.

Per 31 Desember 2022, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PPI berjumlah 4 (empat) orang di mana 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen, atau setara 25% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi keanggotaan Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Sepanjang 2022, komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris mengalami beberapa kali perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of members of the Board of Commissioners is 5 (five) years from the date determined by the GMS appointing them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, but this provision does not reduce the right of the GMS to be able to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before the their term of office ends. For members of the Board of Commissioners whose term of office has ended, they can be reappointed by the GMS for the next 1 (one) term of office.

As of December 31, 2022, the number and composition of PPI's Board of Commissioners is 4 (four) people, of which 1 (one) is Independent Commissioners, or equivalent to 25% of the total members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of PPI's Board of Commissioners has complied with the prevailing laws and regulations. The position of each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner is equal.

Throughout 2022, the composition and term of office of the Board of Commissioners has changed several times in the following chronology:

Dewan Komisaris Board Of Commissioners			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
Periode per 19 Maret 2021 - 22 Desember 2022 Period as of March 19, 2021 - December 22, 2022			
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	No. SK-93/MBU/03/2021 tanggal 19 Maret 2021	November 2020 – Desember 2022 November 2020 – Desember 2022
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No: SK-385/ MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	No. SK-102/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present



Periode per 22 Desember 2022 - sekarang

Bara Krishna Hasibuan	Komisaris Utama President Commissioner	No: SK-291/MBU/ XII/2022 dan No:105/ Kep.PS/RNI.01/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022	Desember 2022 – Sekarang December 2022 – Present
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	No: SK-385/ MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present
Hamli	Komisaris Commissioner	No. SK-102/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	No. SK-102/ MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020	April 2020 – Sekarang April 2020 – Present

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Sebagaimana tercantum dalam Board Manual Dewan Komisaris, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegal, antara lain:

As stated in the Board Manual of the Board of Commissioners, the following is a collegial description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners:

Tugas | Duties

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Supervising management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Tanggung Jawab | Responsibilities

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi;
Researching and reviewing as well as signing the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors;



Tugas | Duties

2. Mematuhi Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Complying with the Articles of Association, General Meeting of Shareholders resolutions and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

3. Memantau dan memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di Perusahaan.

Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably in the Company.

4. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan.

Ensuring that the Board of Directors has established an effective internal control system to secure the Company's assets.

5. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.

Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation these policies.

6. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, kebijakan teknologi informasi, kebijakan pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan mutu dan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.

Tanggung Jawab | Responsibilities

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP;

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;

Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company;

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;

Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance;

6. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;

Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance;

7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan termasuk memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;

Researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report including providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if requested;

8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

Preparing the annual work plan and budget for the Board of Commissioners and including it in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);



Tugas | Duties

Ensuring that the Board of Directors has established risk management policies, information technology policies, HR management policies, accounting policies and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, policies for procurement of goods and services, and quality and service policies as well as supervising the implementation of these policies.

7. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ditetapkan Direksi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut dan penerapannya.

Supervising the policies on the management of subsidiaries/joint ventures that have been determined by the Board of Directors, including providing input on these policies and their implementation.

8. Melakukan penilaian dengan memberikan tanggapan tertulis terkait proses pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

Conducting an assessment by providing written responses related to the appointment process of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures to be further submitted to the GMS.

9. Memastikan bahwa Direksi telah mengungkapkan informasi penting perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Ensuring that the Board of Directors has disclosed important company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.

10. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab | Responsibilities

9. Membentuk Komite Audit;

Establishing an Audit Committee;

10. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/ imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;

Proposing the determination of the External Auditor to the GMS based on the proposal from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the proposed amount of honorarium/ remuneration for the External Auditor;

11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

Making the minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping a copy thereof;

12. Membuat Daftar Khusus yang di dalamnya memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya pada PPI maupun perusahaan lain;

Making a Special Register which contains information regarding the share ownership of Members of the Board of Commissioners and their families in PPI and other companies;

13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

Providing a report on the supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the GMS;

14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Carrying out other obligations to carry out the function of supervision and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.



Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Separation of Duties of the Board of Commissioners

Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Komisaris Utama President Commissioner	Koordinator atas seluruh bidang pengawasan. Coordinator for all areas of supervision.
Komisaris Commissioner	Koordinator Bidang Teknik, Umum dan Pengembangan dan Anggota Pengawasan 3 (tiga) bidang lainnya, serta Ketua Komite Audit. Coordinator for Engineering, General Affairs and Development and Supervisory Members for 3 (three) other fields, as well as Chairman of the Audit Committee.
Komisaris Commissioner	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Committee
Komisaris Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner

Hak dan Kewenangan

Secara garis besar, Dewan Komisaris PPI mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan, melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Menetapkan pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan komite-komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Rights and Authorities

In general, PPI's Board of Commissioners carries out the following duties and responsibilities:

1. Entering yards, buildings and offices used by the Company, viewing books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and other securities as well as examining the Company's assets.
2. If deemed necessary, the Board of Commissioners at the Company's expense for a limited period of time may request the assistance of experts to carry out examinations in accordance with their duties and authorities.
3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company.
4. Determining the separation of work and committee membership among the members of the Board of Commissioners and for the smooth functioning of the Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners and committees appointed by the Board of Commissioners can be assisted at the expense of the Company.



5. Dewan Komisaris melalui keputusan yang diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
6. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. The Board of Commissioners, through decisions taken in accordance with the procedures for making decisions by the Board of Commissioners, has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to the Company's Articles of Association, or there are indications of committing a loss to the Company or neglecting their obligations, or there is an urgent reason for the Company.
6. If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have a member of the Board of Directors, then the Board of Commissioners is temporarily required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
7. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive honorarium and allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS with due observance of the provisions stipulated in the Company's regulations and applicable laws and regulations.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah memenuhi ketentuan dan kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar PPI. Kriteria Dewan Komisaris PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PPI; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Criteria for Members of the Board of Commissioners

All members of PPI's Board of Commissioners have met the requirements and qualifications of individuals as members of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Article of Association. The criteria for PPI's Board of Commissioners, among others include:

1. Capable of carrying out legal actions.
2. Within 5 (five) years prior to the appointment never:
 - a. Been declared bankrupt;
 - b. Been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt; or
 - c. Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
3. Has a commitment to complying with the laws and regulations;
4. Has knowledge and/or expertise in the fields required by PPI; and
5. Meets other requirements as stipulated in the Limited Liability Company Law, capital market regulations and other applicable laws.



Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Dewan Komisaris PPI mengacu pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 14 hingga ayat 20.

Program Orientasi/ Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengenal seluruh aktivitas bisnis PPI dari hulu ke hilir. Untuk itu, perseroan menyediakan Program Orientasi/Pengenalan bagi anggota Komisaris baru agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai karakteristik, proses bisnis, serta kondisi-kondisi yang terjadi di PPI.

Dengan begitu, PPI berharap setiap anggota Komisaris baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimanahkandi manahkan di dalam Board Manual. Program Orientasi bagi anggota Komisaris baru, meliputi:

- Program Pengenalan Mempertimbangkan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham dan stakeholders, maka sangat dimungkinkan diantara Anggota Dewan Komisaris tersebut belum saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Dengan demikian, perseroan menilai keberadaan Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan.
- Program Peningkatan Kapabilitas Program Peningkatan Kapabilitas merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, PPI telah mengadakan program orientasi bagi Komisaris baru dengan uraian sebagai berikut:

- Program pengenalan tanggal 29 Desember 2022 untuk Bapak Bara Krishna Hasibuan sebagai Komisaris Utama

Seluruh kegiatan orientasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat, Graha PPI, Jakarta.

Mechanism of Appointment, Dismissal, and Resignation of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the shareholders through the GMS. The procedure for the appointment, dismissal, and resignation of PPI's Board of Commissioners refers to Article 13 of PPI's Articles of Association paragraphs 14 to 20.

Orientation/ Introduction Program for New Commissioners

As the main organ that carries out the supervisory function of the management of the company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is required to know all of PPI's business activities from upstream to downstream. To that end, the Company provides an Orientation/Introduction Program for new members of the Board of Commissioners so that they can gain a deeper and comprehensive understanding of the characteristics, business processes, and conditions that occur in PPI.

Thus, PPI hopes that each new member of the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities as well as possible as mandated in the Board Manual. Orientation Program for new members of the Board of Commissioners include:

- Introductory Program Considering the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders and stakeholders, it is very possible that the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. Thus, the Company considers the existence of the Introduction Program (Orientation) very important to be implemented.
- Competency Development Program The Competency Development Program is one of the important programs so that members of the Board of Commissioners can always update information about the latest developments of the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

Throughout 2022, PPI has held an orientation program for new Commissioners with the following description:

- Introduction program on 29 December 2022 for Mr. Bara Krishna Hasibuan as President Commissioner.

All orientation activities were held at the Head Office, Graha PPI, Jakarta.



Kebijakan Rangkap Jabatan

Merujuk pada Pasal 13 Anggaran Dasar PPI ayat 32, anggota Dewan Komisaris PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; dan
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

PPI melarang setiap Insan perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan benturan kepentingan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis perseroan yang berdampak pada objektivitas serta pertimbangan komersial.

Dewan Komisaris diamanatkan untuk menjaga profesionalisme dan independensinya sehingga wajib melakukan pengelolaan benturan kepentingan saat melaksanakan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Mengacu pada kebijakan Board Manual, anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Concurrent Position Policy

Referring to Article 13 of PPI's Articles of Association paragraph 32, members of PPI's Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Members of the Board of Directors in State- Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/ members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates; and
3. Other positions that may cause a conflict of interest.

Information on concurrent position of all members of the Board of Commissioners of PPI is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners sub-chapter, in this Annual Report.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

PPI prohibits every employee of the Company from being in a situation that creates a conflict of interest, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company defines a conflict of interest as a conflict of personal economic interest with the economic interest of the Company which has an impact on objectivity and commercial considerations.

The Board of Commissioners is mandated to maintain its professionalism and independence so that it is obliged to manage conflicts of interest when carrying out its supervisory function.

Therefore, the Board of Commissioners should always avoid activities that may trigger a conflict of interest either now or in the future. Referring to the Board Manual policy, members of the Board of Commissioners may not hold other positions as:

- a. Members of the Board of Directors in State- Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises.
- b. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Head/ Deputy Regional Head.
- c. Other positions that may cause a conflict of interest.



PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan PPI yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memegang jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by PPI, namely regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to hold concurrent positions in accordance with applicable laws and regulations in an effort to avoid potential conflicts of interest.

Independensi Dewan Komisaris

Independency of the Board of Commissioners

Masing-masing anggota Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang dapat memengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Dewan Komisaris tahun 2022.

Each member of the Board of Commissioners performs a supervisory function independently or is free from pressure, influence and/or conflicts of interest with other parties. This sincerity is stated in the independence statement sheet of the Board of Commissioners which is updated regularly. Members of the Board of Commissioners are obliged to report if there is a change in status that may affect their independence.

Throughout 2022, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners as stated on the independence statement of the Board of Commissioners for 2022.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris Declaration of Independence of the Board of Commissioners

Aspek Independensi Aspect of Independency	Bara Krishna Hasibuan	Setiawan Wangsaatmaja	Hamli	Muhammad Kapitra Ampera
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√



Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham utama yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan terbaik perusahaan.

Mengacu pada keputusan Menteri BUMN SK-102/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 dan SK-385/MBU/12/2021 tanggal 02 Desember 2021, komposisi Komisaris Independen PPI per 31 Desember 2021 berjumlah 1 (satu) orang, yakni Bapak Muhammad Kapitra Ampera. Dengan demikian, PPI telah memenuhi ketentuan UU PT yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib menempatkan minimal satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or majority shareholder which may affect his/her ability to act independently in the best interest of the Company.

Referring to the decisions of the Minister of SOEs SK-102/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 and SK-385/MBU/12/2021 dated December 2, 2021, the composition of PPI's Independent Commissioner as of December 31, 2021 consists of one person, namely Mr. Muhammad Kapitra Ampera. Thus, PPI has complied with the provisions of the Limited Liability Company Law which requires that each company must place at least one Independent Commissioner or at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen PPI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi perseorangan sebagai Komisaris Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PPI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PPI pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PPI;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPI, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama PPI; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PPI.

Criteria for Determining Independent Commissioners

All members of PPI's Independent Commissioners have met the requirements and individual qualifications as Independent Commissioners, including the following:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PPI within the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of PPI in the following period;
2. Does not own shares either directly or indirectly in PPI;
3. Has no affiliation with PPI, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the main shareholders of PPI; and
4. Has no business relationship either directly or indirectly related to PPI's business activities.

Profil Komisaris Independen

Profil lengkap Bapak Muhammad Kapitra Ampera selaku Komisaris Independen PPI dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of Independent Commissioner

The complete profile of Mr. Muhammad Kapitra Ampera as PPI's Independent Commissioner is presented in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report.



Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menghindari benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris independen senantiasa menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan prinsip GCG yang benar, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan kebijakan yang diambil baik secara individual maupun mufakat. Komisaris independen juga berkewajiban melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.

Statement of Independence of Independent Commissioners

Independent commissioners are committed to upholding independence, objectivity and fairness in carrying out their duties and responsibilities by avoiding conflicts of interest or preference for the interests of one party. Independent commissioners always maintain the Company's reputation by correctly applying GCG principles, which are reflected in attitudes, actions and policies taken individually and by consensus. Independent commissioners are also obliged to report if there is a change in status that affects their independence.

Rapat Dewan Komisaris

Meeting of the Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan), serta Rapat Dewan Komisaris bersama komite-komite.

Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings of the Board of Commissioners, Meetings of the Board of Commissioners inviting the Board of Directors (Joint Meeting), and Meetings of the Board of Commissioners with the committees.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Mengacu pada Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar PPI, Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan mengikuti rapat, maka rapat tetap dapat berlangsung dan Ketua Rapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling lama atau anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam hal usia.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan mekanisme tersebut disebut keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris.

Meeting Policy of the Board of Commissioners

Referring to Article 16 Paragraph (7) of PPI's Articles of Association, the Board of Commissioners Meeting must be held at least once every month and its implementation is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend or is unable to attend the meeting, the meeting can still take place and the Chairman of the Meeting is replaced by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and/or the longest serving member of the Board of Commissioners or the oldest member of the Board of Commissioners in terms of age.

The Board of Commissioners can also make valid decisions without holding a meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners have given their approval on the proposal submitted in writing and signed the agreement. Decisions made by this mechanism are called circular decisions. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Commissioners' Meeting.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2022, the Board of Commissioners held 13 internal meetings of the Board of Commissioners with the following description:



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	% Kehadiran
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama President ommissioner	13	13	100%
Bara Krishna Hasibuan **	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	13	13	100%
Hamli	Komisaris Commissioner	13	13	100%
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Commissioner Independent	13	13	100%

* Herman Heru Suprobo masih menjabat hingga 22 Desember 2022 | Herman Heru Suprobo is still in office until December 22, 2022

** Bara Krishna Hasibuan mulai menjabat pada 22 Desember 2022 | Bara Krishna Hasibuan took office on December 22, 2022

Agenda Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Agenda of the Board of Commissioners Meeting is as follows:

Tanggal Rapat	Bara Krishna Hasibuan
21 Januari 2022 January 21, 2022	1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPI Tahun 2022 PT PPI Company Work Plan and Budget Year 2022 2. Lain-Lain Others
26 Januari 2022 January 26, 2022	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPI Tahun 2022 PT PPI Company Work Plan and Budget 2022
5 April 2022 April 5, 2022	Pembahasan Persetujuan Kredit Novasi Bank BRI Discussion on Approval of BRI Bank Novation Credit
13 April 2022 April 13, 2022	Rapat Dewan Komisaris – Komite PT PPI PT PPI Board of Commissioners - Committee Meeting
22 Juni 2022 June 22, 2022	Pembahasan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Penjaminan Aset Tetap Unit Pengantungan Pupuk (UPP) di Medan dan Lampung (Atas Perubahan Availability Period) Discussion of Request for Approval from the Board of Commissioners to Guarantee Fixed Assets of Fertilizer Holding Units (UPP) in Medan and Lampung (for Changes in Availability Period).
28 Juni 2022 June 28, 2022	Pembahasan Tanggapan Dekom atas surat Direksi terkait Perpanjangan Fasilitas Pinjaman di Bank Mandiri Discussion of Dekom's response to the Board of Directors' letter regarding the extension of the loan facility at Bank Mandiri.
22 Juli 2022 July 22, 2022	1. Pembahasan kinerja bulan Mei -Juni 2022 Discussion of performance for May -June 2022 2. Rencana merger PT BLI & PT Berdikari Logistik. PT BLI & PT Berdikari Logistik merger plan.



2 September 2022 September 2, 2022	1. Pembahasan Perpanjangan Kredit KMK; Discussion on KMK Credit Extension; 2. Review Kandidat Talent Pool PT PPI Review of PT PPI Talent Pool Candidates
12 September 2022 September 12, 2022	Rapat Interview Talent Pool Talent Pool Interview Meeting
27 September 2022 September 27, 2022	1. Pembahasan Kinerja s.d bulan Agustus 2022 Discussion of Performance up to August 2022 2. Lain-lain Others
20 Oktober 2022 October 20, 2022	Pembahasan KMK KMK discussion
30 Oktober 2022 October 30, 2022	Pembahasan Hal-hal yang harus diperhatikan Direksi PT PPI Discussion of matters that must be considered by the Board of Directors of PT PPI
24 November 2022 November 24, 2022	Pembahasan KMK Permata KMK Permata Discussion

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022

Report on the Duty Implementation and Supervision of the Board of Commissioners in 2022

Dewan Komisaris telah menyampaikan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021 kepada Menteri BUMN selaku RUPS dengan tembusan kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: 06/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 23 April 2021 hal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PT PPI" Tahun Buku 2020. Berikut ini adalah ringkasan realisasi program kerja, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2021 berdasarkan parameter KPI Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

The Board of Commissioners has submitted the 2021 Board of Commissioners Work Program to the Minister of SOEs as the GMS with a copy to the Board of Directors through the Letter of the Board of Commissioners Number: Number: 06/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 23, 2021 regarding Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia /"PT PPI" for the Fiscal Year 2020. The following is a summary of the realization of the work program, as well as the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in 2021 based on the KPI parameters of the Board of Commissioners:

No.	Uraian Tugas Duty Description	Target	Realisasi Realization
1	Responsivitas terhadap usulan/permintaan persetujuan/ rekomendasi/tanggapan Dewan Komisaris Responsiveness to the proposal/request for approval/ recommendation/response of the Board of Commissioners	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized



2	Pengawasan implementasi Blue Print/Rencanan Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Supervision of the implementation of the Company's Blue Print/Long Term Plan (RJPP)	100 Minimal 1 kali Minimum once	Sudah Dilakukan Has Been Realized
3	Pengawasan implementasi RKAP Supervision of RKAP implementation	100 Minimal 12 kali Minimum 12 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
4	Pengawasan sistem pengendalian internal Supervision of Internal Control System	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
5	Pengawasan manajemen risiko Supervision of Risk Management	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
6	Pengawasan sistem teknologi informasi Supervision of information technology system	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
7	Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi) Supervision of HR policies and implementation (including training and remuneration)	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
8	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Supervision of accounting policies and preparation of financial statements	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
9	Pengawasan terhadap seleksi Kantor Akuntan Publik Supervision of the selection of Public Accounting Firms	100 Minimal 1 kali Minimum once	Sudah Dilakukan Has Been Realized
10	Pengawasan terhadap kebijakan pengadaan Supervision of procurement policies	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
11	Pengawasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan Supervision of quality and service policies	100 Minimal 4 kali Minimum 4 times	Sudah Dilakukan Has Been Realized
12	Pengawasan terhadap peraturan perundanganundangan dan perjanjian pihak ketiga Supervision of laws and regulations and third party agreements	100 Minimal 1 kali Minimum once	Sudah Dilakukan Has Been Realized
13	Tindak lanjut hasil assessment GCG Follow up on the results of the GCG assessment	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized
14	Peningkatan knowledge Dewan Komisaris Increase knowledge of the Board of Commissioners	100%	Sudah Dilakukan Has Been Realized



Selain menjalankan tugas-tugas di atas, Dewan Komisaris juga melaksanakan Kegiatan Rutin dan Non-Rutin pada tahun ini, di antaranya:

1. Kegiatan Rutin Dewan Komisaris
 - a. Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Organ Dewan Komisaris
 - b. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi
2. Kegiatan Non-Rutin Dewan Komisaris
 - a. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri
 - b. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris
 - c. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
 - d. Program suksesi kandidat calon Direksi PPI

In addition to carrying out the tasks above, the Board of Commissioners also carried out Routine and Non-Routine Activities this year, including:

1. Routine Activities of the Board of Commissioners
 - a. Internal Meeting of the Board of Commissioners with the Organs of the Board of Commissioners
 - b. Meeting of the Board of Commissioners that includes the Board of Directors
2. Non-routine Activities of the Board of Commissioners
 - a. Doing business trips in the country
 - b. Participating in education and training activities for the Board of Commissioners
 - c. Carrying out Focus Group Discussion (FGD) activities
 - d. Succession program for candidates for PPI's Board of Directors

Surat-Surat Keputusan Dewan Komisaris

Decrees of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris PPI mengemban 2 (dua) tugas pokok, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan dan/atau laporan tertulis atas laporan manajemen yang disusun pada basis triwulanan/ semesteran serta memberikan usulan kepada Menteri BUMN yang sudah disampaikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2022, Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan atas permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris berikut ini:

The Board of Commissioners of PPI carries out 2 (two) main tasks, namely carrying out the supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In carrying out its duties, the Board of Commissioners submits responses and/or written reports on management reports compiled on a quarterly/semester basis and provides proposals to the Minister of SOEs that have been submitted through the Decree of the Board of Commissioners of 2022, In addition, the Board of Commissioners has provided responses to issues of mutual concern between the Board of Directors and the Board of Commissioners through the following Decree of the Board of Commissioners:

Tanggal Date	Perihal Subject	Nomor Surat Letter Number
Surat Internal Dewan Komisaris Internal Letter of the Board of Commissioners		
12 Januari 2022 January 12, 2022	Tanggapan atas Usulan Susunan Direksi dan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri). Response to the Proposed Composition of Directors and Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri (PT PPI Industri)	01/Dk.Int/PTPPI/I/2022



31 Januari 2022 January 31, 2022	Tanggapan atas Penggantian KAP Audit Tahun Buku 2021 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia "PT PPI". Response to the Change of Audit Firm for the 2021 Financial Year of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia "PT PPI"	04/Dk.Int/PTPPI/I/2022
14 Februari 2022 February 14, 2022	Tanggapan atas Dasar Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Umum pada PT PPI dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 Response to the Basis for Appointment of KAP to conduct a General Audit of PT PPI and Subsidiaries for the 2021 Financial Year	07/Dk.Int/PTPPI/II/2022
05 April 2022 April 05, 2022	Persetujuan Penggunaan Aktiva Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Sebagai Agunan Pelaksanaan Novasi Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank BRI Approval of the Use of Fixed Assets of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) as Collateral for the Novation of Bank BRI Working Capital Credit Facility	12/Dk.Int/PTPPI/IV/2022
18 April 2022 April 18, 2022	Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Kerja Sama Covare. Follow-up on Covare Cooperation Issues.	14/Dk.Int/PTPPI/IV/2022
10 Juni 2022 June 10, 2022	Kelengkapan Dokumen (aset Semarang) Document Completeness (Semarang asset)	19/Dk.Int/PTPPI/VI/2022
15 Agustus 2022 August 15, 2022	Tindak Lanjut Implementasi PaDi UMKM periode Semester I/2022 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Follow-up on the Implementation of PaDi UMKM for Semester I/2022 at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)	29/Dk.Int/PTPPI/VIII/2022
13 Oktober 2022 October 13, 2022	Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja Supplier Financing di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Approval to Collect Fixed Assets for Supplier Financing Working Capital Credit Extension at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40/Dk.Int/PTPPI/X/2022
20 Oktober 2022 October 20, 2022	Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Approval to Collect Fixed Assets for Working Capital Credit Extension at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	42/Dk.Int/PTPPI/X/2022
04 November 2022 November 04, 2022	Hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi PT PPI Matters that must be considered and followed up by the Board of Directors of PT PPI	48/Dk.Int/PTPPI/XI/2022



10 November 2022 November 10, 2022	Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap untuk Perpanjangan Kredit Modal Kerja Revolving di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Approval to Collect Fixed Assets for the Extension of Revolving Working Capital Credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	49/Dk.Int/PTPPI/XI/2022
25 November 2022 November 25, 2022	Persetujuan Mengagunkan Aset Tetap Untuk Penarikan Kredit Modal Kerja Non Cash Loan di PT Bank Permata, Tbk Approval to Collect Fixed Assets for the Withdrawal of Non-Cash Loan Working Capital Credit at PT Bank Permata, Tbk.	53/Dk.Int/PTPPI/XI/2022
22 Desember 2022 December 22, 2022	- Arahan dan Catatan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP PT PPI Tahun 2023 - Surat Penyampaian RKA Dekom - Direction and Notes of the Board of Commissioners on the Draft RKAP PT PPI Year 2023 - Letter of Submission of RKA Board of Commissioners	57/Dk.Int/PTPPI/XII/2022
Surat Eksternal Dewan Komisaris Board of Commissioners External Letter		
28 Januari 2022 January 28, 2022	- Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - Usulan Aspek Operasional Tingkat Kesehatan Perusahaan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2022 - Board of Commissioners' Response to the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2022 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - Proposed Operational Aspects of the Company's Health Level in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Year 2022	01/Dk.Eks/PTPPI/I/2022 02/Dk.Eks/PTPPI/I/2022
18 Februari 2022 February 18, 2022	Usulan Top Talent PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Tahun 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Top Talent Proposal for 2022	03/Dk.Eks/PTPPI/II/2022
25 Februari 2022 February 25, 2022	Rekomendasi KAP untuk Audit Umum pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 Recommendation of PAF for General Audit of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) and Subsidiaries for Financial Year 2021	04/Dk.Eks/PTPPI/II/2022
07 Maret 2022 March 07, 2022	Kelengkapan Data Nominated Talent PT PPI Tahun 2022 Completion of PT PPI Nominated Talent Data for 2022	05/Dk.Eks/PTPPI/III/2022



30 Mei 2022 May 30, 2022	Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Proposed Determination of Income of Directors and Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	06/Dk.Eks/PTPPI/V/2022
10 Juni 2022 June 10, 2022	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2021 Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia for the Financial Year 2021	07/Dk.Eks/PTPPI/VI/2022
10 Juni 2022 June 10, 2022	• Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2021 • Feedback and Suggestions from the Board of Commissioners on the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Financial Year 2021	08/Dk.Eks/PTPPI/VI/2022
13 Juni 2022 June 13, 2022	Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun Buku 2022 Proposal of Public Accountant Firm (PAF) for Audit of Financial Year 2022	09/Dk.Eks/PTPPI/VI/2022
15 Juni 2022 June 15, 2022	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Board of Commissioners' Response to the Management Report for the First Quarter of 2022 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	10/Dk.Eks/PTPPI/VI/2022
28 Juli 2022 July 28, 2022	• Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Sampai Dengan Bulan Juni Tahun Buku 2022 • Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners • PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Up to June of Fiscal Year 2022	11/Dk.Eks/PTPPI/VII/2022
26 Agustus 2022 August 26, 2022	Tanggapan Kinerja Semester 1 Tahun 2022 Performance Feedback Semester 1 Year 2022	12/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2022
19 September 2022 September 19, 2022	Usulan Kandidat Talent Pool PT PPI Semester 2 Tahun 2022 PT PPI Talent Pool Candidate Proposal Semester 2 Year 2022	14/Dk.Eks/PTPPI/IX/2022



Penilaian atas Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite penunjang di bawah organ Dewan Komisaris, antara lain:

1. Komite Audit
2. Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris menggunakan kriteria dan indikator penilaian yang telah disepakati bersama dengan komite-komite dalam memberikan penilaian tahunan, seperti efektivitas pelaksanaan rapat komite, peran dan dukungan komite-komite terhadap implementasi tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Mengacu pada kriteria penilaian sebagaimana disebutkan di atas, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun 2022.

Performance Assessment of the Committees Under the Board of Commissioners

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting committees under the organs of the Board of Commissioners, including:

1. Audit Committee
2. Risk Management Committee

The Board of Commissioners uses assessment criteria and indicators that have been mutually agreed upon with the committees in providing annual assessments, such as the effectiveness of committee meetings, the role and support of the committees for the implementation of corporate governance, as well as compliance with applicable regulations.

Referring to the assessment criteria as mentioned above, the Board of Commissioners considers that the committees under the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities well throughout 2022.

Direksi

Board Of Directors

Direksi merupakan organ utama GCG yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud, tujuan, dan demi kepentingan terbaik PPI, serta bertugas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga wajib menjalankan keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan PPI sehingga visi, misi dan sasaran yang telah digariskan di dalam Anggaran Dasar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi wajib mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya. Masing-masing anggota Direksi memikul tugas dan tanggung jawab secara kolektif, akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya. Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

The Board of Directors is the main GCG organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company in accordance with the aims, objectives and best interests of PPI, and is tasked with representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, the Board of Directors is also required to carry out the decisions that have been taken at the General Meeting of Shareholders (GMS), and is responsible for the implementation and management of PPI so the vision, mission and targets outlined in the Articles of Association can be properly realized.

In carrying out its duties and obligations, the Board of Directors is required to fully devote all of its energy, thoughts, attention and dedication by taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. Each member of the Board of Directors assumes duties and responsibilities collegially, but they are still allowed to carry out their duties and make decisions in accordance with their respective duties and authorities. In principle, the implementation of tasks carried out by each member of the Board of Directors remains a shared responsibility.



Dasar Hukum

Keberadaan organ Direksi di dalam struktur GCG PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku berikut ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK- 16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Legal Basis

The existence of the Board of Directors within PPI's GCG structure is in accordance with the following applicable laws and regulations, including:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/MPBUMN/ 1999 concerning Management Reports of SOE Companies;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.





Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi wajib bertindak serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan independen dengan mengindahkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana diatur dalam Board Manual yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: dirubah menjadi:35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Board Manual PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pada prinsipnya, Board Manual mengatur tentang tata laksana kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perseroan.

Adapun isi Board Manual sebagai pedoman dan tata tertib kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Direksi
2. Persyaratan Direksi
3. Komposisi dan Keanggotaan
4. Masa Jabatan
5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Etika Jabatan Direksi
8. Tugas dan Kewajiban Direksi
9. Hak dan Wewenang Direksi
10. Rapat Direksi
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi
12. Rapat Direksi
13. Organ Pendukung Direksi
14. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi
15. Pertanggungjawaban Direksi

Board of Directors' Board Manual

All members of the Board of Directors are required to act and carry out their duties and responsibilities in a professional, accountable and independent manner by heeding the Guidelines and Work Rules of the Board of Directors as regulated in the Board Manual which has been stipulated based on the Decree of the Board of Directors Number: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 dated October 28, 2021 regarding the Board Manual of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

In principle, the Board Manual regulates effective work management between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistent manner, as well as becomes reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and the Company's mission.

The Board Manual as guidelines and work procedures for the Board of Directors regulates the following matters:

1. Functions of the Board of Directors
2. Requirements for the Board of Directors
3. Composition and Membership
4. Term of office
5. Orientation and Competency Development Program
6. Independence of the Board of Directors
7. Ethics of the Board of Directors
8. Duties and Responsibilities of the Board of Directors
9. Rights and Authorities of the Board of Directors
10. Meetings of the Board of Directors
11. Delegation of Authority Among Members of the Board of Directors
12. Meetings of the Board of Directors
13. Supporting Organs of the Board of Directors
14. Relations with Subsidiaries and Affiliates
15. Responsibilities of the Board of Directors





Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Periode menjabat Direksi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah dan komposisi Direksi PPI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah mempertimbangkan kebutuhan dan skala bisnis PPI demi terealisasinya visi, misi, dan rencana strategis PPI. Sepanjang tahun 2022, komposisi, dan masa jabatan Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan kronologis sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Directors

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years from the date determined by the GMS appointing them and ends at the close of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, but without prejudice to the right of the GMS to be able to dismiss the member of the Board of Directors at any time before the end of their term of office. Members of the Board of Directors whose term of office has ended may be reappointed according to the resolution of the GMS for the next 1 (one) term of office.

The number and composition of PPI's Board of Directors are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and have taken into account the needs and business scale of PPI for the realization of PPI's vision, mission and strategic plans. Throughout 2022, the composition and term of office of the Board of Directors underwent several changes in chronological order as follows:

Dewan Komisaris Board Of Commissioners			
Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Masa Jabatan
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	No: SK- 92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	No: SK-221/MBU/07/2021	Juli 2021 – Sekarang July 2021 – Present
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	No: SK-92/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021	Maret 2021 – Sekarang March 2021 – Present
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	No: SK-381/MBU/12/2021 tanggal 2 april 2020	Desember 2021 – Sekarang December 2021 – Present



Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal telah diamanatkan di dalam Board Manual dan Pasal 11 Anggaran Dasar PPI, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
3. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
4. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
5. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
6. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

The description of the duties and responsibilities of the Board of Directors collegially has been mandated in the Board Manual and Article 11 of PPI's Articles of Association, including the following:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and GMS resolutions.
2. Striving for and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives as well as its business activities.
3. Preparing the Company's Long Term Plan.
4. Devoting full energy, thoughts, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.
5. Complying with the Company's Articles of Association and laws and regulations and implementing the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.
6. Preparing the organizational structure of the Company along with details and duties.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing anggota Direksi diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara individu dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

Separation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Each member of the Board of Directors is mandated to carry out his duties and responsibilities individually by taking into account the background experience and competencies of each member of the Board of Directors, including the following:





Jabatan Position	Lingkup Tanggung Jawab Scope of Responsibilities
Direktur Utama President Director	Melaksanakan koordinasi tugas anggota-anggota Direksi lainnya dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satuan Pengawas Intern, Legal, Sekretaris Perusahaan, <i>Strategic Planning</i> , <i>Business Development</i> dan staf ahli/penasihat Perusahaan. Coordinating the duties of other members of the Board of Directors and being responsible for the activities of the Internal Audit Unit, Legal, Corporate Secretary, Strategic Planning, Business Development and expert staff/advisors of the Company.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	Menangani Pengembangan Bisnis dan mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling accounting and taxation, restructuring, financial control, HR and general affairs.
Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	Menangani bidang Produksi, Pengembangan Bisnis, mengembangkan strategi pemasaran dan <i>outsourcing</i> yang berkaitan dengan operasional bisnis. Handling the Production, Business Development, developing marketing and outsourcing strategies related to business operations.
Direktur Operasi Director of Operations	Melakukan bidang IT, Manajemen Aset dan pengendalian operasional PPI Carrying out IT, Asset Management and operational control of PPI.





Hak dan Kewenangan

Berikut ini adalah hak dan kewenangan Direksi PPI, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PPI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan.
8. Melakukan aktivitas di luar Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempertgunakan saran profesional.
11. Menerima gaji berikut tunjangan/fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
12. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

Rights and Authorities

The following are the rights and authorities of PPI's Board of Directors:

1. Establishing the Company's management policy.
2. Regulating the transfer of authorities of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company inside and outside the Court.
3. Regulating the transfer of authorities of the Board of Directors to one or several employees of PPI, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court.
4. Regulating the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations.
5. Appointing and dismissing Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
6. Appointing and dismissing the Corporate Secretary.
7. Giving reward and punishment to the Company's employees based on the Company's employment regulations.
8. Carrying out activities outside the Company that are not directly related to the interests of the Company, such as teaching activities, being the management of business associations and the like, only using a reasonable time and with the knowledge of the President Director or other Directors.
9. Obtaining leave in accordance with applicable regulations.
10. Using professional advice.
11. Receiving salary and other allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS.
12. If the Company achieves a profit level, the Board of Directors may receive incentives as a reward for their work performance, the amount of which is determined by the GMS.



13. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

13. Taking all other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS resolutions.

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan orang perseorangan sebagai anggota Direksi sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar PPI. Kriteria Direksi PPI, antara lain meliputi:

1. Cakap/mampu melaksanakan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit; atau
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan
5. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU PT, peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Criteria for Members of the Board of Directors

All members of the Board of Directors have complied with the provisions of an individual as a member of the Board of Directors as stated in PPI's Articles of Association. The criteria for the Board of Directors of PPI include:

1. Capable of carrying out legal actions.
2. Within 5 (five) years prior to the appointment has never:
 - a. Been declared bankrupt; or
 - b. Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board who is found guilty of causing Company or Public Company to be declared bankrupt; or
 - c. Been sentenced for committing a crime that is detrimental to the State's finances and/or related to the financial sector.
3. Has a commitment to complying with the laws and regulations;
4. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Company; and
5. Meets other requirements as stipulated in Laws and Regulations concerning Limited Liability Company, capital market regulations and other applicable laws.

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi PPI mengacu pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 13 hingga ayat 22.

Mechanism of Appointment, Dismissal and Resignation of the Board of Directors

The procedure for the appointment, dismissal, and resignation of PPI's Board of Directors refers to Article 10 of PPI's Articles of Association paragraphs 13 to 22.



Program Orientasi/Pengenalan Bagi Direksi Baru

PPI memiliki kebijakan orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai organisasi, aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, serta panduan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penanggung jawab program orientasi/pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Dengan adanya kebijakan ini, PPI berharap setiap anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana tercantum dalam Board Manual. Program Orientasi/ Pengenalan bagi anggota Direksi baru PPI, meliputi:

- a) Program Pengenalan Dalam rangka membentuk suatu tim kerja yang solid, maka Program Pengenalan (Orientasi) sangat penting untuk dilaksanakan agar seluruh Anggota Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dapat lebih saling mengenal.
- b) Program Peningkatan Kapabilitas Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business perseroan di bidang perdagangan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan PPI. Sepanjang tahun 2022, PPI tidak telah mengadakan program orientasi bagi Direksi baru.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Merujuk pada Pasal 10 Anggaran Dasar PPI ayat 34, anggota Direksi PPI diperbolehkan untuk memegang jabatan rangkap, kecuali untuk kriteria berikut ini:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

Orientation/Introduction Program for New Members of the Board of Directors

PPI has an orientation/introduction policy for new members of the Board of Directors so that those concerned get a more comprehensive understanding and knowledge of the organization, business activities, future plans of the Company, as well as work guidelines for the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Corporate Secretary acts as the person in charge of the orientation/introduction program for new members of the Board of Directors.

With this policy, PPI expects each new member of the Board of Directors to be able to carry out their duties and responsibilities as well as possible as stated in the Board Manual. Orientation/Introduction Program for new members of PPI's Board of Directors include:

- a) Orientation Program In order to form a solid work team, the Introduction Program (Orientation) is very important to be implemented so all members of the Board of Directors who come from various backgrounds can get to know each other better.
- b) Competency Development Program The Competency Development Program is important so the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Company's core business in the trade sector and are always ready to anticipate them for the sustainability and progress of PPI. Throughout 2022, PPI held an orientation program for new members of the Board of Directors.

Policy for Concurrent Positions of the Board of Directors

Referring to Article 10 of PPI's Articles of Association paragraph 34, members of PPI's Board of Directors are allowed to hold concurrent positions, except for the following criteria:

1. Members of the Board of Directors in State- Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/ institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, administrators and/ or candidates/legislative members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;



5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengungkapan informasi rangkap jabatan seluruh anggota Direksi PPI telah dilakukan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, di dalam Laporan Tahunan ini.

5. Other positions that may cause a conflict of interest.

Disclosure of concurrent positions of all members of PPI's Board of Directors has been presented in the Company Profile Chapter, the Board of Directors Profile sub-chapter, in this Annual Report.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Direksi wajib menjaga profesionalisme dan independensinya agar seluruh tindakan dan keputusan strategis yang diambil senantiasa demi kepentingan terbaik PPI. Berpedoman pada Board Manual PPI, Direksi hendaknya menghindari kegiatan ataupun aktivitas yang dapat memicu terjadinya benturan kepentingan baik di masa sekarang ataupun di waktu mendatang. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka anggota Direksi PPI tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
5. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

PPI mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi mematuhi aturan yang telah ditetapkan perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk memegang jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Directors

The Board of Directors is required to maintain professionalism and independence so that all strategic actions and decisions taken are always in the best interest of PPI. Referring PPI's Board Manual, the Board of Directors should avoid activities that may trigger a conflict of interest either now or in the future. To prevent conflicts of interest, members of PPI's Board of Directors may not hold other positions as:

1. Member of the Board of Directors in State- Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/ institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/ members and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidates; and
5. Other positions that may cause a conflict of interest

PPI requires Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to comply with the rules set by the Company, namely regarding the prohibition for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors from holding concurrent positions in accordance with applicable laws and regulations to avoid potential conflicts of interest.





Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar masing-masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen atau terbebas dari tekanan, pengaruh dan/ atau benturan kepentingan dengan pihak lain. Kesungguhan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan independensi Direksi yang selalu diperbarui secara berkala. Anggota Direksi berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya. Dalam rangka menjaga independensi Direksi, maka PPI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- 2) Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 3) Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- 4) Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan melaporkan apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya.
- 5) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 6) Setiap Anggota Direksi juga membuat Daftar Khusus yang di dalamnya dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi di dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana tercantum pada lembar pernyataan independensi Direksi tahun 2022.

The independence of the Board of Directors is one of the important factors that must be maintained so that each member of the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently or free from pressure, influence and/or conflicts of interest with other parties. This sincerity is stated in the independence statement of the Board of Directors which is updated regularly. Members of the Board of Directors are obliged to report if there is a change in status that affects their independence. In order to maintain the independence of the Board of Directors, PPI stipulates the following provisions:

- 1) Apart from the Board of Directors, any other party is prohibited from doing or interfering in the management of the Company.
- 2) The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflict of interest and free from any pressure from any party.
- 3) Members of the Board of Directors are prohibited from engaging in activities that may interfere with their independence in managing the Company.
- 4) Each member of the Board of Directors is required to make a statement letter free of conflict of interest and report any changes in status that affect their independence.
- 5) All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions which are prohibited by applicable laws and regulations.
- 6) Each Member of the Board of Directors also makes a Special Register in which information is recorded regarding the share ownership of Members of the Board of Directors and their families in the Company and in other companies in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

Until the end of 2022, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Directors in the decision-making process as stated on the independence statement of the Board of Directors for 2022.



Pernyataan Independensi Anggota Direksi Declaration of Independence of the Board of Directors

Aspek Independensi Aspect of Independency	Nina Sulistiyowati	Wien Irwanto	Andry Tanudjaja	Tri Wahyundo Hariyatno
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓	✓

Rapat Direksi

Meeting of the Board of Directors

Rapat Direksi PPI wajib diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai salah satu mekanisme formal bagi sesama anggota Direksi untuk berdiskusi, merencanakan, dan memantau penerapan strategi dan kebijakan PPI.

Meetings of PPI's Board of Directors must be held regularly at least once every month. Meeting of the Board of Directors serves as a formal mechanism for members of the Board of Directors to discuss, plan, and monitor the implementation of PPI's strategies and policies.

Kebijakan Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Meeting Policy of the Board of Directors

Meetings of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more Members of the Board of Directors, at the written request of one or more Members of the Board of Commissioners, or at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.



Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, namun dalam hal Direktur Utama berhalangan menghadiri rapat maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Kebijakan panggilan rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Pengambilan keputusan di dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat.

Selain melalui rapat Direksi, Direksi juga dapat mengambil keputusan strategis melalui keputusan sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah di dalam Rapat Direksi.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, rapat Direksi telah terselenggara sebanyak 46 kali dengan uraian sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors are chaired by the President Director, but in the event that the President Director is unable to attend the meeting, one of the Directors appointed by the President Director shall chair the meeting of the Board of Directors. If the President Director does not make an appointment, then one of the Directors who has served the longest in office as a Member of the Board of Directors shall chair the Meeting of the Board of Directors. In the event that the longest serving Director as a member of the Board of Directors is more than 1 (one) person, then the longest serving Director and the oldest in age shall act as chairperson of the meeting.

The policy for calling for a meeting of the Board of Directors is submitted in writing to each member of the Board of Directors within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter period if in an urgent situation without taking into account the date of the summons and the date of the meeting.

Decision making at the Board of Directors meeting is based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by majority vote mechanism. If the number of consenting and disconsenting votes is balanced, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting.

Apart from meeting the Board of Directors, the Board of Directors can also make strategic decisions through circular resolution. Decisions taken in this way have the same value as decisions taken legally at the Meeting of Board of Directors.

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2022, Meetings of Board of Directors were held 46 times with the following description:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	46	39	84%
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	46	38	82%



Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	46	38	82%
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	46	34	74%

Agenda Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

The agenda of the Board of Directors Meeting is as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5 Januari 2022 January 5, 2022	Tunjangan Akhir Tahun 2021 2021 Year-End Allowance
12 Januari 2022 January 12, 2022	Pembahasan SDM HR Discussion
18 Januari 2022 January 18, 2022	1. Pembahasan Aset (Pelepasan Aset Semarang, Penyelesaian aset RS Ridwan Meureksa, Selisih Luas Asset Denpasar PPI) Discussion of Assets (Semarang Asset Disposal, Ridwan Meureksa Hospital Asset Settlement, Denpasar PPI Asset Area Difference) 2. Paparan Program Kerja - Fungsional Madya Direktorat Komersial Work Program Exposure - Functional Directorate of Commercial 3. RKAP 2022 CWPB 2022 4. Pembahasan Visi Misi dan <i>Corporate Identity</i> Discussion of Vision, Mission and Corporate Identity
3 Februari 2022 February 3, 2022	1. Pembahasan SDM (Kasus Dr. Gustav, Kasus Edwin Lawrence, Usulan Kepala Divisi Korwil Timur dan Barat, Usulan Nama-nama <i>Talent Pool BOD-1</i>) HR Discussion (Dr. Gustav Case, Edwin Lawrence Case, Proposed Heads of East and West Regional Divisions, Proposed Names of Talent Pool BOD-1) 2. <i>Update</i> Program Migor, Gula, B2, KCL Program Update Cooking Oil, Sugar, B2, KCL 3. Prognosa Januari & Rencana Program Februari 2022 January Prognosis & February 2022 Program Plan 4. <i>Update</i> SPI atas hasil evaluasi penggunaan ERP D365 di PPI Update SPI atas hasil evaluasi penggunaan ERP D365 di PPI 5. Pembahasan Program Kerja Operasional & Komersil Februari 2022 Discussion of Operational & Commercial Work Program February 2022 a. Paparan Divisi Pengembangan Bisnis (Oke Mam, Live Bird dan Covare) Exposure of Business Development Division (Oke Mam, Live Bird and Covare) b. Paparan Divisi Pengelolaan Bisnis Limbah Terpadu Exposure of Integrated Waste Business Management Division



14 Februari 2022 February 14, 2022	1. RUPS PPI Industri Industrial PPI AGM 2. WIS 3. Minyak Goreng Cooking Oil 4. Real Januari dan Program Februari 2022 Real January and February 2022 Program
23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun 2023 PT PPI Cash State Capital Participation in 2023 PT PPI 2. Novasi RDI/SLA dan Eks BPPN Novation of RDI/SLA and Ex IBRA 3. <i>Update</i> Warung Pangan kepada Menteri BUMN Update on Warung Pangan to the Minister of SOEs 4. <i>Update</i> Perubahan KAP KAP Change Update 5. Kebutuhan Modal Anak Perusahaan Capital Requirement of Subsidiary
1 Maret 2022 March 1, 2022	Persiapan Rapat Gabungan Dekom Direksi : Preparation of the Joint Meeting of the Board of Directors a. Laporan Keuangan Periode Januari 2022 : <i>Monitoring</i> Pencapaian Per Lini Bisnis Financial Report for January 2022 Period: Monitoring Achievement per Business Line b. <i>Progress</i> Restrukturisasi Utang RDI & Eks BPPN Progress of RDI & Ex IBRA Debt Restructuring
2 Maret 2022 March 2, 2022	Potensi Bisnis Komoditi Baru New Commodity Business Potential
8 Maret 2022 March 8, 2022	1. <i>Progress</i> Temuan Audit Progress of Audit Findings 2. <i>Update</i> Tim <i>Task Force Account Receivable</i> (TFAR) Task Force Account Receivable (TFAR) Team Update 3. <i>Outstanding Pasca Merger</i>: Hutang Anak Perusahaan, Kasus Hukum Ex BGR Post Merger Outstanding: Subsidiary Debt, Ex BGR Legal Case
15 Maret 2022 March 15, 2022	1. Kinerja Ytd Februari 2022 Ytd performance February 2022 2. Pembahasan Minyak Goreng (<i>Dashboard</i> Migor, Penjurian Sayembara Migor, SK Tim Migor) Cooking Oil Discussion (Migor Dashboard, Migor Competition Judging, Migor Team Decree)
22 Maret 2022 March 22, 2022	1. <i>Operational Review</i> Distribusi Minyak Goreng Operational Review of Cooking Oil Distribution 2. Rencana Pengembangan Operasional Bisnis PPI-BGR LI di Batam Business Operation Development Plan of PPI-BGR LI in Batam 3. Pekerjaan Pengelolaan Data Kemenperin (Tim IT) Ministry of Industry Data Management Work (IT Team) 4. Pembahasan SDM HR Discussion



23 Maret 2022 March 23, 2022	Pembahasan Bisnis Minyak Goreng Discussion of Cooking Oil Business
5 April 2022 April 5, 2022	1. Pelaksanaan <i>Online Daily Sales Report</i> Implementation of Online Daily Sales Report 2. <i>Update</i> Distribusi Minyak Goreng Cooking Oil Distribution Update
13 April 2022 April 13, 2022	1. Laporan Keuangan Ytd Maret 2022 Financial Statement Ytd March 2022 2. Pembahasan SDM HR Discussion
19 April 2022 April 19, 2022	1. <i>Update Breakthrough Project</i> Breakthrough Project Update 2. <i>Update</i> Distribusi Minyak Goreng Cooking Oil Distribution Update
26 April 2022 April 26, 2022	1. Perubahan Struktur BOD-1 dan BOD-2 Structure Change of BOD-1 and BOD-2 2. Pembahasan Covare Covare Discussion 3. <i>Breakthrough</i> Project Minyak Goreng Cooking Oil Breakthrough Project
18 Mei 2022 May 18, 2022	Kinerja Ytd April 2022 Ytd Performance April 2022
23 Mei 2022 May 23, 2022	Pembahasan Distribusi Minyak Goreng Rakyat melalui Warung Pangan Discussion of People's Cooking Oil Distribution through Food Stalls
24 Mei 2022 May 24, 2022	1. Pembahasan Aset Asset Discussion 2. <i>Breakthrough</i> Project Kopi dan Hortikultura Breakthrough Project Coffee and Horticulture 3. <i>Update</i> HUT PT PPI PT PPI Anniversary Update 4. <i>Update</i> Migor Rakyat Migor Rakyat Update
8 Juni 2022 June 8, 2022	1. Pembahasan PKB Discussion of PKB 2. <i>Update Progress</i> Tindak Lanjut Temuan Audit Update on Follow-up Progress of Audit Findings
15 Juni 2022 June 15, 2022	1. Pembahasan Pendayagunaan Aset PT PPI oleh PT BGR LI Discussion on Utilization of PT PPI Assets by PT BGR LI 2. <i>Update Breakthrough Project</i> Breakthrough Project Update



27 Juni 2022 June 27, 2022	1. Pembahasan KMK Mandiri Independent KMK discussion 2. Pembahasan Penetapan PLH Dir Ops Discussion on the appointment of PLH Dir Ops
30 Juni 2022 June 30, 2022	1. Pembentukan Tim <i>Procedure Excellence</i> Establishment of Procedure Excellence Team 2. Pembahasan Permasalahan Covare atas Surat Tanggapan PT MOC Discussion of Covare's Issues on PT MOC's Response Letter
6 Juli 2022 July 6, 2022	1. Skema Utang Anak Perusahaan Subsidiary Debt Scheme 2. <i>Second Wave</i> Penggabungan BGR LI Second Wave of BGR LI Merger 3. <i>Stress test</i> dan skenario <i>plan</i> Stress test and scenario plan 4. Alokasi PMN Tunai Cash PMN allocation 5. Persetujuan Implementasi Mandiri <i>Virtual Account</i> Approval of Mandiri Virtual Account Implementation 6. <i>Update</i> Penyelesaian Permasalahan Covare Update on Covare Issue Resolution
11 Juli 2022 July 11, 2022	1. Pembahasan <i>Stress Test</i> Stress Test Discussion 2. Perhitungan Penghargaan Masa Kerja (Insentif Retensi Pegawai Tahun 2022) Calculation of Long Service Award (Employee Retention Incentive in 2022)
13 Juli 2022 July 13, 2022	1. Usulan Skema Pembayaran Termin V dan VI PT Nindya Karya (Persero) atas Pembangunan UPP Medan dan Lampung Eks PT BGR Proposed Payment Scheme for Terminals V and VI of PT Nindya Karya (Persero) for the Construction of UPP Medan and Lampung Ex PT BGR 2. Pembahasan PT Sari Gunung Polowijo Logisti Discussion of PT Sari Gunung Polowijo Logistik 3. <i>Update Stress Test</i> 4. <i>Update</i> Migor (Pujle, Simirah2 BLI, Nego harga olein, Kemasan minyak kita, Sharmila PTPN, Mamamia) Migor Update (Pujle, Simirah2 BLI, Negotiated olein price, Packaging our oil, Sharmila PTPN, Mamamia)
20 Juli 2022 July 20, 2022	Kinerja Ytd Juni 2022 / Semester 1 Tahun 2022 (Monitoring per Lini Bisnis) Performance ytd June 2022 / Semester 1 Year 2022 (Monitoring per Business Line)
29 Juli 2022 July 29, 2022	1. Pencapaian Juli dan Upaya Agustus 2022 July Achievements and August 2022 Efforts 2. Lain-lain Others 3. Pembahasan SDM HR discussion 4. Pembahasan SDM: Kandidat Kepala Divisi Manajemen Perubahan HR Discussion: Change Management Division Head Candidate



10 Agustus 2022 August 10, 2022	1. Pembahasan Struktur Organisasi Discussion of Organizational Structure 2. <i>Update follow-up</i> temua Update on follow-up findings 3. Pembahasan Prognosa Yte 2022 Discussion of Yte 2022 Prognosis 4. RJPP 5. Integrasi Berdikari Logistik dan BGR Logistik Indonesia Integration of Berdikari Logistik and BGR Logistik Indonesia 6. Agenda Lain-lain: Pembahasan PLH Dirut Other Agenda: Discussion of PLH President Director
11 Agustus 2022 August 11, 2022	<i>Update Breakthrough Project</i>
29 Agustus 2022 August 29, 2022	1. Analisa Cabang Branch Analysis 2. Agenda tambahan: Pembahasan rencana tindak lanjut <i>pending issues</i> Additional agenda: Discussion on follow-up plan for pending issues 3. Agenda Lain-lain: Pembahasan PLH Dirkombang Other agenda: Discussion on PLH Dirkombang
7 September 2022 September 7, 2022	Pembahasan RKAP 2023 Discussion of 2023 CWPB
14 September 2022 September 14, 2022	1. Penyelesaian Permasalahan Cafe Covare Cafe Covare Problem Solving 2. Penyelesaian Stok Minyak Goreng Settlement of Cooking Oil Stock 3. Penyelesaian Stok Gula Sugar Stock Settlement 4. RKAP 2023 CWPB 2023
22 September 2022 September 22, 2022	Kronologis Pengelolaan Limbah Non B3/Sampah di PLTU Indramayu Chronology of Non Hazardous Waste Management at PLTU Indramayu
26 September 2022 September 26, 2022	Pembahasan SDM HR Discussion
13 Oktober 2022 October 13, 2022	1. Konsep <i>New Covare</i> New Covare Concept 2. Rencana Development Sistem Resi Gudang Warehouse Receipt System Development Plan 3. Bisnis Rumput Laut Seaweed Business 4. PPI Industri Industrial PPI 5. Pembahasan SDM HR Discussion



18 Oktober 2022 October 18, 2022	1. Kinerja Ytd September 2022 Ytd performance September 2022 2. Program Sales Go To 2,9 T Sales Go To 2.9 T Program 3. Sosialisasi Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (P2K3) Socialization of Occupational Safety and Health Supervisor (P2K3)
3 November 2022 November 3, 2022	Pembahasan Hutang Usaha Accounts Payable Discussion
15 November 2022 November 15, 2022	1. Pembahasan Hasil Audit UPP Medan dan Lampung Discussion of Audit Results of UPP Medan and Lampung 2. Tanggapan Surat Nindya Karya Response to Nindya Karya's Letter 3. Pembahasan RKAP 2023 Discussion of CWPB 2023 4. Pembahasan SDM HR Discussion
21 November 2022 November 21, 2022	1. <i>Update</i> Potensi Penjualan s/d Desember 2022 Update on Sales Potential until December 2022 2. Penetapan PLH Direktur Utama Determination of PLH President Director 3. Penetapan PLH Direktur Komersial & Pengembangan Appointment of PLH Commercial & Development Director 4. KMK Bank Permata
6 Desember 2022 December 6, 2022	1. KMK Bank BRI 2. Usulan Skema Hutang Anak Perusahaan Proposed Subsidiary Debt Scheme 3. Modal Kerja BGR Logistik Indonesia Working Capital of BGR Logistik Indonesi 4. <i>Progress</i> Rumput Laut Seaweed Progress
8 Desember 2022 December 8, 2022	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Discussion of Proposed Organizational Structure
9 Desember 2022 December 9, 2022	1. Prognosa Penjualan sampai dengan Desember 2022. Sales forecast up to December 2022 2. PLH Direktur Komersial & Pengembangan PLH Commercial & Development Director
12 Desember 2022 December 12, 2022	Pembahasan Rumput Laut Seaweed Discussion
19 Desember 2022 December 19, 2022	Pembahasan SDM HR Discussion



26 Desember 2022
December 26, 2022

1. Tindaklanjut Penyelesaian Piutang PT Sarottama Dharma Kalpariksa
Follow-up of Receivables Settlement of PT Sarottama Dharma Kalpariksa
2. Rencana MOU dengan PT Global Putra Internasional
MOU Plan with PT Global Putra International
3. Rencana MOU dengan PT Pertamina Retail
MOU Plan with PT Pertamina Retail
4. Pembahasan RKAP 2023
Discussion of 2023 RKAP

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2022

Uraian lengkap mengenai daftar kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh seluruh anggota Direksi sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Competency Development Program of the Board of Directors in 2022

A complete description of the list of training and competency development activities that have been attended by all members of the Board of Directors throughout 2022 has been presented in the Company Profile Chapter.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Direksi PPI telah menjalankan serangkaian tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Manajemen yang sudah disepakati bersama pada awal tahun. Penyusunan Kontrak Manajemen Direksi mengacu pada Peraturan Menteri S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (KPI) dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, yang mana aturan tersebut berlaku surut sejak tahun buku 2021.

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2022 berdasarkan parameter KPI Direksi secara kolegal, antara lain sebagai berikut:

Report on Duty Implementation of the Board of Directors in 2022

Throughout 2022, the Board of Directors of PPI carried out a series of duties and responsibilities as stipulated in the Management Contract which was mutually agreed upon at the beginning of the year. The preparation of the Management Contract for the Board of Directors refers to the Ministerial Regulation S-08/S. MBU/2013 dated January 16, 2013 on Key Performance Indicators (KPI) and Annual Management Contract for the Board of Directors of SOEs, where the rules are retroactive since the fiscal year 2021.

The following is a summary of the realization of the duties and responsibilities of the Board of Directors in 2022 based on KPI parameters of the Board of Directors collegially:





No	Indikator Penilaian Assessment Indicators	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
A	Nilai ekonomi sosial dan Finansial Social and Financial economic value					
1	EBITDA	5,00	126	130,13	103,28	5,16
2	ROIC against WACC	5,00	(3,24)	0,56	(0,86)	5,50
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	2,50	2,20	1,57	71,48	1,79
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	2,50	0,1	0,05	54,02	1,35
5	Penyusunan Kajian dan Implementasi Transformasi Keuangan Holding Pangan Preparation of Study and implementation of Food Holding Financial Transformation	2,50	85	85	85	2,13
6	Jumlah Ketersediaan Stockpoint (Hub dan Spoke) Number of stockpoint availability (hub and spoke)	5,00	35	31	50	2,50
7	Jumlah Jenis Produk yang di Ekspor Number of product types exported	50	5	1	20	1,00
8	Jumlah Warung Pangan Number of Warung Pangan	2,50	90.000	90.179	100	2,50
Sub Jumlah Sub Amount		30,00				21,93
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation					
1	Jumlah Distributor Terdapat Bahan Berbahaya (DT-B2) Number of Distributors with Hazardous Materials (DT-B2)	5,00	9 (Peningkatan 1 DT-B2)	10	110	5,50
2	Produk Holding Pangan yang Dijual Melalui PPI Food Cluster products that are sold through PPI	5,00	5	6	110	5,50



3	Sinergi BUMN SOE Synergy	5,00	5	5	110	5,50
4	Pengelolaan Kegiatan Logistik Anggota Holding Pangan Management of logistics activities of food cluster members	5,00	3	3	110	5,50
Sub Jumlah Sub Amount		20,00				22,00
C	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership					
1	Implementasi Sistem Konsolidasian Keuangan Holding Pangan Implementation of food cluster financial consolidation system	5,00	Juli 2022 July 2022	Juli 2022 July 2022	100	5,00
2	Implementasi <i>Enterprise Resource Planning</i> (ERP) Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation	5,00	Agustus 2022 August 2022	Juli 2022 July 2022	110	5,50
3	Implementasi Aplikasi <i>Sales Force</i> Sales Force Application Implementation	5,00	32	32	110	5,50
4	Implementasi Aplikasi Pendukung Lainnya yang Terintegrasi dengan ERP Implementation of other supporting applications integrated with ERP	5,00	Semester 1 2022	Oktober 2022 October 2022	100	5,00
Sub Jumlah Sub Amount		20,00				21,00
D	Peningkatan Investasi Increased Investment					
1	Pelaksanaan Optimalisasi 10 (Sepuluh) Titik Aset Baru Implementation of optimization of 10 (ten) new asset points	10,00	10	10	110	11,00
2	Kerja sama Aset Jangka Panjang Long-term asset cooperation	10,00	2	2	40	4,00



Sub Jumlah Sub Amount		20,00			15,00	
E	Pengembangan Talenta Talent Development					
1	Milenial (≤ 42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i> Millennials (≤ 42 Years) in Nominated Talent	5,00	23	53	110	5,50
2	Perempuan dan Nominated Talent Female and Nominated Talent	5,00	18	27	110	5,50
Sub Jumlah Sub Amount		10,00			11,00	
Total (A+B+C+D+E)		100,00			90,93	

Keputusan Direksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan strategis dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan dan optimalisasi kinerja perseroan pada seluruh aspek bisnis. Seluruh keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Tahun 2022, antara lain:

Decisions of the Board of Directors

Throughout 2022, the Board of Directors made various strategic decisions to support the effectiveness of the management and optimization of the Company's performance in all business aspects. All of these decisions are contained in the Decree of the Board of Directors for 2022, including:

No	Surat Keputusan Decree	Perihal Matters
1	08/DU/SKD/PPI/III/2022	Perubahan Visi Misi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Changes in the Vision and Mission of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2	22/DU/SKD/PPI/V/2022	Pembentukan Tim Proyek Distribusi Migor Rakyat Melalui Aplikasi Warung Pangan PT PPI Formation of the People's Migor Distribution Project Team through the PT PPI Food Stall Application
3	25/DU/SKD/PPI/VI/2022	Pencabutan Surat Keputusan Izin Penghunian/Penempatan Terhadap Rumah Dinas yang Telah Dikeluarkan Oleh Perusahaan Pada Era Perusahaan Niaga Revocation of Occupancy/Placement Permit Decree for Service Houses that Have Been Issued by the Company in the Era of Commercial Companies
4	29/DU/SKD/PPI/VII/2022	Pembentukan Tim Integrasi PT Berdikari Logistik Indonesia Dan PT BGR Logistik Indonesia Establishment of Integration Team of PT Berdikari Logistik Indonesia and PT BGR Logistik Indonesia



5	27/DU/SKD/PPI/VII/2022	Pembentukan Tim <i>Task Force Procedure Excellence</i> PTPPI Formation of PTPPI Procedure Excellence Task Force Team
6	30/DU/SKD/PPI/VII/2022	Pemberian Insentif Retensi Pegawai PT PPI 2022 Provision of PT PPI Employee Retention Incentives 2022
7	36/DU/SKD/PPI/VII/2022	Penugasan Tim Internal Auditor SMK3 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Assignment of the SMK3 Internal Auditor Team of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
8	41/DU/SKD/PPI/X/2022	Pembentukan Tim Kelompok Kerja Transformasi PT PPI Establishment of PT PPI Transformation Working Group Team

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a relationship of checks and balances for the progress and health of the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with their respective functions are responsible for the Company's long-term business continuity. Things that must be done by the Board of Commissioners and the Board of Directors together in accordance with their respective functions, so as to achieve the continuity of the company's business in the long term are reflected in:

- Implementation of good internal control and risk management;
- The achievement of reasonable returns for shareholders;
- Stakeholders' interests are reasonably protected;
- Implementation of leadership and management succession at all levels of the organization;
- Fulfillment of GCG implementation.

Rapat Gabungan

Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi yang dilakukan secara berkala. Rapat gabungan diselenggarakan sebagai bentuk koordinasi guna membahas isu dan hal-hal strategis terkait pengelolaan

Joint Meeting

The Board of Commissioners holds joint meetings with the Board of Directors on a regular basis. Joint meetings are held as a form of coordination to discuss strategic issues and matters related to the management of the



perseroan, serta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi. Di dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dan Direksi umumnya membahas laporan kinerja PPI, mengambil keputusan strategis yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan Dewan komisaris, serta mendiskusikan masalah atau isu terkini yang sedang dihadapi PPI.

Kebijakan Rapat Gabungan

Pelaksanaan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat gabungan dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat gabungan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat gabungan bersama Direksi. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di dalam rapat gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Company, as well as a form of implementing the direct supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors. In the joint meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors generally discuss PPI's performance reports, make strategic decisions that require the approval or consideration of the Board of Commissioners, as well as discuss current problems or issues being faced by PPI.

Joint Meeting Policy

The joint meeting is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend, the joint meeting is chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. The decision-making mechanism in joint meetings is carried out by means of deliberation for consensus.

Meeting Frequency and Attendance

Throughout 2022, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) joint meetings with the Board of Directors. The agenda and level of attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the joint meeting are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris The Board of Commissioners				
Herman Heru Suprobo*	Komisaris Utama President ommissioner	15	15	100%
Bara Krishna Hasibuan **	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	15	15	100%
Hamli	Komisaris Commissioner	15	15	100%
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	15	13	87%
Direksi The Board of Directors				
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	15	14	93%



Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	15	15	100%
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	15	11	73%
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	15	12	80%

* Herman Heru Suprobo masih menjabat hingga 22 Desember 2022 | Herman Heru Suprobo is still in office until December 22, 2022

** Bara Krishna Hasibuan mulai menjabat pada 22 Desember 2022 | Bara Krishna Hasibuan took office on December 22, 2022

Agenda Rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut:

The Agenda of The Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors is as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
27 Januari 2022 January 27, 2022	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPI Tahun 2022 PT PPI Company Work Plan and Budget 2022
11 Februari 2022 February 11, 2022	1. Pembahasan <i>Update Talent Pool</i> PT PPI Discussion of PT PPI Talent Pool Update 2. Lain-lain Others
1 Maret 2022 March 1, 2022	1. Penjelasan Novasi RDI/SLA dan Hutang eks BPPN Explanation of RDI/SLA Novation and ex IBRA Debt 2. Laporan Kinerja Keuangan Januari 2022 Financial Performance Report January 2022 3. Laporan Keuangan s.d. Desember 2021 Financial Report up to December 2021 4. Lain-lain Others
28 Maret 2022 March 28, 2022	1. Pencapaian Kinerja Februari 2022 Performance Achievement February 2022 2. <i>Review BGR LI</i> Review of BGR LI 3. Tindak Lanjut Temuan Audit Follow-up of Audit Findings 4. Lain-lain Others



26 April 2022 April 26, 2022	1. Laporan Kinerja ytd Maret 2022 Performance Report ytd March 2022 2. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerjasama Covare Covare Cooperation Completion Follow-up
26 Mei 2022 May 26, 2022	Rapat Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Proposed Meeting for Determination of Income of Board of Directors and Board of Commissioners
30 Mei 2022 May 30, 2022	1. Laporan Kinerja ytd April 2022 Performance Report ytd April 2022 2. Lain-Lain Others
13 Juni 2022 June 13, 2022	Persiapan RUPS PT PPI TB 2021 Preparation for PT PPI TB GMS 2021
25 Juli 2022 July 25, 2022	1. Pembahasan Kinerja Bulan Mei-Juni 2022 Discussion of May-June 2022 Performance 2. Rencana erger PT BLI & PT Berdikari Logistik Merger plan of PT BLI & PT Berdikari Logistik
30 Agustus 2022 August 30, 2022	1. Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2022 Discussion of July 2022 Performance 2. Lain-lain Others
20 September 2022 September 20, 2022	Pembahasan Progress Kerjasama Covare Discussion of Covare Cooperation Progress
29 September 2022 September 29, 2022	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Agustus 2022 Discussion of Performance up to August 2022 2. Lain-lain Others
27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan September 2022 Discussion of Performance up to September 2022 2. Lain-lain Others
20 November 2022 November 20, 2022	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan Oktober 2022 Discussion of Performance up to October 2022 2. Lain-Lain Others
21 Desember 2022 December 21, 2022	1. Pembahasan Kinerja s.d Bulan November 2022 Discussion of Performance up to November 2022 2. Lain-Lain Others



Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2022

Sepanjang 2022, Dewan Komisaris telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan arahan kepada Direksi sehubungan dengan kinerja Direktorat Operasi, Direktorat Komersil, Direktorat Teknik dan Pengembangan, Direktorat Keuangan, SDM, dan Umum, serta kinerja Cabang dan Anak Perusahaan, kinerja penugasan dan aspek strategis lainnya.

Uraian lengkap mengenai saran dan rekomendasi tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan keberagaman komposisi dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman berkarier dari masing-masing kandidat, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompleksitas pengembangan bisnis perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, dan pemahaman mengenai sistem manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang cakap pada bidang yang dibutuhkan PPI serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman komposisi menjadi hal penting karena berperan besar dalam mendukung kepemimpinan, pengelolaan, pembidangan serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya latar belakang keberagaman tersebut diharapkan alternatif dan perspektif pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas sehingga dapat dihasilkan keputusan yang tepat dan solutif bagi perseroan.

Uraian lebih lengkap mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PPI berdasarkan latar belakang pendidikan dan karier profesional dapat dilihat pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah diulas pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Recommendations and Directions of the Board of Commissioners at the 2022 Joint Meeting

Throughout 2022, the Board of Commissioners submitted a number of recommendations and directions to the Board of Directors regarding the performance of the Operations Directorate, Commercial Directorate, Technical and Development Directorate, Finance, HR, and General Directorate, as well as Branch and Subsidiary performance, assignment performance and other strategic aspects.

A complete description of the suggestions and recommendations has been stated in the 2022 Board of Commissioners Supervisory Report.

Diversity of Composition of The Board Of Commissioners and Board of Directors

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors always pays attention to the diversity of composition by considering the background of expertise, knowledge, and career experience of each candidate, as well as paying attention to organizational needs and the complexity of the Company's business development.

The appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by considering the integrity, dedication, and understanding of the company's management system, having good knowledge and/or expertise in the fields needed by PPI and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on the laws and regulations.

The diversity of the composition is important because it plays a major role in supporting the management, management, division and implementation of the duties of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. With this diversity background, decision-making alternatives and perspectives are expected to consider broader aspects so that appropriate and solution decisions can be made for the Company.

A more complete description of the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI based on educational background and professional career is presented in the profiles of each of the Board of Commissioners and Board of Directors which have been reviewed in the Company Profile Chapter in this Annual Report.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatian kepada Direksi. Dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022, Dewan Komisaris secara umum telah menetapkan rencana kegiatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas kinerja Direksi.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegal berdasarkan evaluasi atas kinerja perusahaan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam RKAP di antaranya sebagaimana tergambar dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 08/DK.Eks/PPI/IV/2021 tanggal 30 April 2021 hal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Kinerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PT PPI" Tahun Buku 2020 (Audited).

Penilaian kinerja Direksi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, analisis Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta melalui kunjungan langsung Dewan Komisaris ke cabang. Di samping itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko juga melakukan penilaian terhadap berbagai aspek terkait kegiatan usaha perseroan. Hal tersebut tercermin di dalam laporan-laporan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dalam bentuk evaluasi atas pencapaian target-target KPI Dewan Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham.

Pihak Penilai

Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi PPI dilakukan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Performance Assessment Of The Board Of Commissioners and Board Of Directors

Board of Directors

Performance assessment of the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners as part of its duties and responsibilities in carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In the 2022 Board of Commissioners' Work Program, the Board of Commissioners has generally determined program plan to evaluate and provide an assessment of the performance of the Board of Directors.

In its implementation, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors collegially based on an evaluation of the Company's performance and the achievement of the targets set in the RKAP including as illustrated in the Letter of the Board of Commissioners Number: 08/DK.Ex/PPI/IV/2021 dated April 30, 2021 regarding Responses and Suggestions of the Board of Commissioners on the Performance of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/"PT PPI" for the Fiscal Year 2020(Audited).

Indirect evaluation of the performance of the Board of Directors is also carried out by the Board of Commissioners through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, analysis of the Board of Commissioners on reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and through direct visits by the Board of Commissioners to branches. In addition, the Board of Commissioners through the Audit Committee and the Risk Management Committee also conducts an assessment of various aspects related to the Company's business activities. This is reflected in the reports of the Audit Committee and the Risk Management Committee submitted to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners

In its implementation, the Board of Commissioners conducts measurements and assessments of the performance of the Board of Commissioners collegially in the form of evaluation of the achievement of the KPI targets of the Board of Commissioners for the period of 1 (one) fiscal year as stated in the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners which is submitted to the Minister of SOEs as the shareholder.

Assessor

The evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI is carried out by the shareholders through the GMS mechanism.



Hasil Penilaian

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pemberian skema kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menentukan keputusan pengangkatan kembali ataupun pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) aspek Dewan Komisaris PPI memperoleh skor sebesar 27,263 dari bobot skor maksimal 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 77,89%. Sementara itu, aspek Direksi mendapatkan skor 28,860 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 82,46%.

Assessment Results

The results of the performance appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors are used as a basis for consideration in terms of providing compensation schemes for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as for making the decision to reappoint or dismiss the relevant members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Based on the results of the 2021 GCG assessment carried out by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) PPI's Board of Commissioners aspect obtained a score of 27.263 out of a maximum score of 35,000 or equivalent to an achievement percentage of 77,89%. Meanwhile, the Board of Directors aspect got a score of 28.860 out of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 90.56%.

Aspek Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement	
		2021	2022
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	27,263	33,593
Direksi Board of Directors	35,00	28,860	31,695

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh pihak penilai. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor penilaian GCG pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2022.

In the table above, it can be concluded that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully committed to continuously improving the quality of GCG implementation by following up on any recommendations for improvement that have been given by the appraiser. This is reflected in the increase in the GCG assessment score on the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2022.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

- 1) Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;

Disclosure Of Affiliation Of The Board Of Commissioners, Board Of Directors, and Controlling Shareholders

Disclosing affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders as one of the criteria used to measure the independence of the Board of Commissioners and Board of Directors is presented in the table below, which includes:

- 1) Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;



- 2) Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 3) Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
- 4) Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- 5) Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Pada tabel pengungkapan hubungan afiliasi di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama/ pengendali.

- 2) Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
- 3) Affiliation between members of the Board of Directors and the Majority and/or controlling Shareholders;
- 4) Affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and
- 5) Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Majority and/or controlling Shareholders.

In following table, it can be seen that all members of PPI's Board of Commissioners and Board of Directors do not have family and financial relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and majority/controlling shareholders.

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bara Krishna Hasibuan*		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Setiawan Wangsaatmaja		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hamli		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhammad Kapitra Ampera		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nina Sulistyowati		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Wien Irwanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andry Tanudjaja		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tri Wahyundo Hariyatno		✓		✓		✓		✓		✓		✓

* Bara Krishna Hasibuan menjabat sejak 22 Desember 2022

* Bara Krishna Hasibuan has served since December 22, 2022

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pada periode tahun 2022, dewan komisaris dan dewan direksi tidak memiliki saham pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Share Ownership of Board of Commissioners and Directors

In the period 2022, the board of commissioners and the board of directors do not own shares in PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Remuneration Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan skema remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PPI menjadi kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS namun dengan tetap mengindahkan pedoman dan prosedur yang berlaku secara umum. Pada pelaksanaannya, rekomendasi terkait struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditinjau secara mendalam dan dibawa ke dalam RUPS agar mendapat persetujuan pemegang saham.

Indikator Penetapan Remunerasi

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut ini adalah sejumlah indikator utama yang menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan remunerasi Direksi, yaitu:

- 1) Faktor skala usaha
- 2) Faktor kompleksitas usaha
- 3) Tingkat inflasi
- 4) Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
- 5) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Selain mengacu pada regulasi di atas, pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan sejumlah indikator berikut ini, antara lain:

- 1) Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
- 2) Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perdagangan;
- 3) Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- 4) Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;

Policies and Procedures for Determining the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Determining the remuneration scheme for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PPI is the authority of the shareholders through the GMS mechanism, but with due observance of generally accepted guidelines and procedures. In practice, recommendations regarding the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are proposed by the Board of Commissioners for further in-depth review and brought to the GMS for shareholder approval.

Indicators for Determining the Remuneration

Referring to the Regulation of Minister of SOEs No. PER- 04/MBU/2014 as amended by the Regulation of Minister of SOEs No. SK-324/MBU/10/2021 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the following are a number of main indicators that become the basis for consideration in determining the remuneration of the Board of Directors:

- 1) Business scale factor
- 2) Business complexity factor
- 3) Inflation rate
- 4) Company's financial condition and capability
- 5) Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

In addition to referring to the above regulations, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors also considers the following indicators:

- 1) Remuneration is given in the event that the company makes a profit in the relevant fiscal year;
- 2) Remuneration is given with reference to the development of the trading industry market;
- 3) Remuneration is provided through the results of measuring the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
- 4) Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPI);



- 5) Prestasi kerja individu;
- 6) Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya; dan
- 7) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PPI.

- 5) Individual work performance;
- 6) Fairness with other peer companies; and
- 7) Consideration of PPI's long-term goals and strategies.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. SK-324/MBU/10/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adapun struktur remunerasi yang dibagikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PPI, antara lain sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 as amended by the Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State- Owned Enterprises (SOEs), the remuneration structure distributed to the Board of Commissioners and Board of Directors of PPI are as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the board of commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the board of directors
- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama - Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama - The salary of the President Commissioner is 45% of the President Director - The salary of the Commissioner is 90% of the President Commissioner	- Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama - Perhitungan gaji Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama - The salary of the President Director is as the main reference - The salary of the Director is 90% of the President Director
Tunjangan Allowance Rp.2.770.755.000	Tunjangan Allowance Rp.5.886.690.000
Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance	Fasilitas Facility Asuransi Kesehatan / Health Insurance
Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.	Tantiem Dewan Komisaris Tantiem of the Board of Commissioners Diusulkan kepada Pemegang Saham dan ditetapkan melalui RUPS. Proposed to the Shareholders and determined through the GMS.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, PPI telah membagikan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun buku 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Remuneration Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022

Throughout 2022, PPI provided remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance of the 2021 fiscal year with the following description:



		Remunerasi Bulanan (Dalam 1 Tahun) Monthly Remuneration (in 1 Year)				
Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tantiem Tahun Buku 2021 (Bersih) Tantiem for fiscal year 2021 (Net)	Remunerasi Total Tahun 2022 Total Remuneration in 2022
Dewan Komisaris The Board of Commissioners						
Herman Heru Suprobo	Komisaris Utama President Commissioner	659.250.000	131.850.000	64.800.000	27.300.000	751.350.000
Setiawan Wangsaatmaja	Komisaris Commissioner	593.325.000	118.665.000	58.320.000	2.590.000	654.235.000
Hamli	Komisaris Commissioner	593.325.000	118.665.000	58.320.000	30.940.000	682.585.000
Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen Commissioner Independent	593.325.000	118.665.000	58.320.000	30.940.000	682.585.000
Direksi The Board of Directors						
Nina Sulistyowati	Direktur Utama President Director	1.795.000.000	-	147.500.000	60.550.000	1.673.050.000
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum Director of Finance, Risk Management, HC & General Affairs	1.575.250.000	-	129.500.000	32.690.000	1.407.440.000
Andry Tanudjaja	Direktur Komersial & Pengembangan Director of Commercial & Development	1.575.250.000	-	129.500.000	51.450.000	1.426.200.000
Tri Wahyundo Hariyatno	Direktur Operasi Director of Operations	1.575.250.000	-	129.500.000	5.250.000	1.380.000.000



Jumlah Remunerasi Total Remuneration	Jumlah Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	Jumlah Direksi Total Remuneration for the Board of Directors
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	-	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar More than Rp1billion- Rp2 billion	-	4
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar More than Rp500 million – Rp1billion	4	-
Rp500 juta ke bawah Less than Rp500 million	-	-

Bonus Kerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/11/2020, ketentuannya sebagai berikut:

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
 - a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 70;
 - b. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:
 - Laba Setelah Pajak;
 - Pencapaian KPI;
 - BUMN yang melakukan investasi jangka Panjang secara agresif;
 - BUMN yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau

Incentive

Provision of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Regulation of Minister of SOE No. No. PER-12/MBU/11/2020 as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/11/2020. The conditions are as follows:

1. Tantiem/Incentives can be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners if:
 - a. Realization of the lowest soundness level score of 70;
 - b. Minimum KPI achievement of 80% (eighty percent);
 - c. The opinion issued by the auditor is at least Qualified (WDP);
 - d. The condition of the Company is not losing more than the previous year for the Company in a loss condition, or the company is not at a loss than before in a profit condition. The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.
2. Calculation of Tantiem/Incentives uses internal guidelines set by the Minister of SOEs with the following provisions:
 - a. The determination of Tantiem takes into account:
 - Profit After Tax;
 - Achievement of KPIs;
 - SOEs that make aggressive long-term investments;
 - SOEs that carry out government assignments; and/or



- Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.
 - b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan PPI.
3. Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
 - b. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.
- Other factors that can be accounted for in a professional manner.
 - b. Determination of Performance Incentives takes into account the improvement of PPI's performance and financial capability.
3. The composition of the amount of Tantiem/ Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners follows the position factors as follows:
- a. Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director;
 - b. President Commissioner: 45% of the President Director; and
 - c. Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.



Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris adalah pihak perseorangan yang berasal dari luar perseroan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam kesehariannya, Sekretaris Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat-nasihat dan berperan membantu jalannya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan jalannya pengurusan PPI oleh Direksi dan segenap jajarannya serta melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Keberadaan dan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PPI mengacu pada sejumlah ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku berikut ini, yaitu:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
3. Anggaran Dasar PPI.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Periode jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam masa waktu tertentu namun akan berakhir apabila Dewan Komisaris memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Secretary Of The Board Of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is an individual external party who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners regularly assists the Board of Commissioners in providing advice and plays a role in assisting the running of the supervisory function related to the management of PPI by the Board of Directors and all staff as well as carrying out administrative and secretarial tasks related to the activities of the Board of Commissioners.

Legal Basis

The existence and appointment of the Secretary to PPIs Board of Commissioners refers to the following applicable laws and regulations, namely:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. PP No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs;
3. Articles of Association of PPI.

Term of Office of Secretary of the Board of Commissioners

The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is not set for a certain period of time but will end if the Board of Commissioners dismisses the Secretary of the Board of Commissioners and/or the person concerned resigns as Secretary of the Board of Commissioners.





Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Arie Wijaya

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of The Board of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	Mei 2021 – Sekarang May 2021 - Present
Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia, berdomisili di DKI Jakarta, dan saat ini berusia 38 tahun. He is an Indonesian citizen, lives in DKI Jakarta and as of now, he is 38 years old.
Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK/PTPPI/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Based on Decree of the Board of Commissioners Number KEP-07/DK/PTPPI/V/2021 dated May 1, 2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	D3 - Sekolah Tinggi Akutansi Negara (2005)
Riwayat Karier Professional Experience	• Administrasi Keuangan (Mei - Oktober 2014) • Analis Akutabilitas Kinerja (Oktober 2014 - Oktober 2015) • Analis Keuangan (Oktober 2015 - Januari 2019) • Kepala Subbidang Sinergi BUMN (Januari 2019 - Juni 2020) • Pengendali Subfungsi (Juni 2020 - Desember 2020) • Subkordinator (Desember 2020 - Sekarang) • Sekretaris Dewan Komisaris PT PPI (2021 - sekarang) • Financial Administration (May - October 2014) • Performance Accountability Analyst (October 2014 - October 2015) • Financial Analyst (October 2015 - January 2019) • Head of SOE Synergy Sub-Sector (January 2019 - June 2020) • Sub-function Controller (June 2020 - December 2020) • Sub-Coordinator (December 2020 - present) • Secretary of the Board of Commissioners of PT PPI (.... - present)



Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, Sekretaris Dewan Komisaris PPI mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
3. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
5. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
6. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
7. Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.
8. Membuat risalah rapat atas pelaksanaan rapat-rapat rutin maupun non-rutin Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
11. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saransaran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.

Duties and Responsibilities

As stated in the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-001/DK/PTPPI/VII/2018, the Secretary of the Board of Commissioners of PPI carries out a number of main duties and responsibilities as follows:

1. Providing information for the needs of the Board of Commissioners in making decisions.
2. Preparing the necessary materials related to the Board of Directors' routine reports in managing the Company, such as: RKAP, Annual Report, Quarterly Reports, Internal Audit Reports, and other required reports.
3. Preparing the necessary materials or materials related to matters that must obtain a decision from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities carried out by the Board of Directors and all staff.
4. Preparing and coordinating the meeting agenda with the parties present at the meeting.
5. Preparing and sending meeting invitations to those who will attend the meeting.
6. Confirming the time, place, attendance, and other matters deemed necessary for the smooth running of the meeting.
7. Organizing Board of Commissioners meetings, both with other members of the Board of Commissioners and with the Board of Directors and staff or other parties.
8. Making minutes of meetings on the implementation of routine and non-routine meetings of the Board of Commissioners.
9. Submitting minutes of meetings to interested parties.
10. Preparing considerations, opinions, suggestions and other decisions from the Board of Commissioners for Shareholders, Board of Directors and parties related to the management of the Company.
11. Following up on every decision of the Board of Commissioners in the following ways:
 - a. Recording every decision made in decisionmaking forums and those in charge.
 - b. Monitoring and checking the progress of the implementation of the results of the meeting/ consideration of opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners.



- | | |
|--|---|
| <p>c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.</p> <p>12. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris maupun komite-komitennya.</p> <p>13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.</p> <p>14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumendokumen yang berada dalam penguasaan atau lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya.</p> <p>b. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah rapat Dewan Komisaris, baik internal maupun rapat bersama Direksi.</p> <p>c. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.</p> <p>d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris.</p> <p>e. Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan-bahan/ dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>c. Making efforts to encourage the implementation of follow-up on meeting decisions, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant person in charge.</p> <p>12. Organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, for the purposes of the Board of Commissioners and its committees.</p> <p>13. Implementing and coordinating correspondence and archiving activities.</p> <p>14. Implementing and coordinating the security of data and documents that are within the control or scope of work of the Board of Commissioners, in the following ways:</p> <p>a. Conducting and coordinating the administration of the results of meetings within the Board of Commissioners, with the Board of Directors and other parties.</p> <p>b. Conducting and coordinating the administration of the minutes of the Board of Commissioners meetings, both internally and jointly with the Board of Directors.</p> <p>c. Carrying out and coordinating the preparation of the schedule for the activities of the Board of Commissioners in carrying out the functions and equipment needed to carry out these activities.</p> <p>d. Leading, directing and coordinating the implementation of existing systems and procedures within the work environment of the Board of Commissioners.</p> <p>e. Performing and coordinating the administration of materials/documents/ reports provided by the Board of Directors to the Board of Commissioners.</p> |
|--|---|

Hak dan Kewenangan

Berdasarkan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Dewan Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

Rights and Authorities

Based on the approval and assignment from the Board of Commissioners, the authorities delegated to the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Establishing systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Commissioners.
2. Viewing the notes, minutes of the Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of providing information required by the Board of Commissioners.



3. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
5. Memasuki pekarangan-pekarangan dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perusahaan.
6. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsifungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perusahaan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan.
9. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat-pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/ pihak-pihak di luar Perusahaan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
10. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam atau di luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Requesting data/information/explanation needed by the Board of Commissioners from relevant parties inside and outside the Company for the purpose of carrying out the duties of the Board of Commissioners.
4. Reminding and asking for an explanation from the work unit/related parties for the delay in providing materials/reports/documents required by the Board of Commissioners.
5. Entering the yards and buildings used by the Company.
6. Representing the Board of Commissioners in dealing with parties outside the Company and/ or within the Company in accordance with the assigned assignments and policies determined by the Board of Commissioners.
7. Proposing a plan/work program for the Board of Commissioners in relation to the secretarial functions of the Board of Commissioners in the Company.
8. Proposing the agenda of the Board of Commissioners meetings with parties inside or outside the Company.
9. In accordance with the commands of the Board of Commissioners, inviting the Board of Directors/ other Company officials (with the knowledge of the Board of Directors), Committees of the Board of Commissioners/ parties outside the Company to attend the meeting held by the Board of Commissioners.
10. Attending meetings with parties inside or outside the Company in accordance with the policies previously determined by the Board of Commissioners.
11. Using the secretarial facilities of the Board of Commissioners to carry out their duties.

Realisasi Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2022

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris agar senantiasa berjalan optimal, maka sepanjang tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas pengawasannya dengan baik dan efektif, di antaranya, mengadakan rapat-rapat guna meninjau perkembangan kinerja PPI serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan.

Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi penasehatan,

Realization of the Work Program of the Secretary of the Board of Commissioners in 2022

In order to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to always runs optimally, throughout 2022, the Secretary of the Board of Commissioners carried out his supervisory duties properly and effectively, by holding meetings to review the development of PPI's performance and other problems faced by the Company.

In addition, the Secretary to the Board of Commissioners also assists the Board of Commissioners in carrying out



yakni dalam hal penyusunan surat-surat rekomendasi Dewan Komisaris baik yang ditujukan kepada Direksi maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Surat-surat Dewan Komisaris senantiasa meminta pendapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Komite Audit

Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan khususnya terkait proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG serta pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perseroan. Secara struktural, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan kedudukannya setara dengan komite-komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Dasar Hukum

Dasar pembentukan Komite Audit PPI mengacu pada regulasi normatif dan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
- Anggaran Dasar PT PPI;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
- Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola

its advisory function, namely in the preparation of letters of recommendation for the Board of Commissioners, both addressed to the Board of Directors and the Minister of SOEs as Shareholders. The Board of Commissioners' letters always ask for the opinion of the Audit Committee and the Risk Management Committee.

Audit Committee

The Audit Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners which is tasked with assisting the implementation of supervisory duties and responsibilities, particularly related to the financial reporting process, internal control system, audit process, GCG implementation and monitoring compliance with applicable laws and regulations in the Company. Structurally, the Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners and has an equal position with other committees under the Board of Commissioners. However, in carrying out its duties, the Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit (IAU).

Legal Basis

The basis for establishing PPI's Audit Committee refers to normative regulations and applicable laws and regulations, including:

- Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
- Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Government Regulation Number: 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
- Articles of Association of PT PPI;
- Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/MPBUMN/1999 concerning Management Reports of SOE Companies;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the



Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and

- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs.

Piagam Komite Audit

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Audit. Namun demikian, seluruh anggota Komite Audit PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Audit Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, PPI does not yet have an Audit Committee Charter. However, all members of PPI's Audit Committee continue to carry out their duties and responsibilities with integrity and in good faith.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseorangan sebagai anggota Komite Audit dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Qualifications and/or Criteria for Audit Committee

All members of PPI's Audit Committee have met the requirements or qualifications as members of the Audit Committee with the following general criteria:

1. Have high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and able to communicate well.
2. Have the ability and experience in the field of supervision and/or audit of accounting, finance and understand risk management.
3. Have knowledge of PPI's business processes.
4. Have sufficient time to carry out duties.
5. Not a person in the External Auditor, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and/or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Periode menjabat anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun,

Membership Composition and Term of Office

The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office of members of the Audit Committee who are not members of the Board of



sedangkan bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Saat ini, Komite Audit PPI terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya adalah pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan perseroan.

Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or Chairman of the Audit Committee who concurrently serves as a member of the Board of Commissioners, the term of office is the same as that of a member of the Board of Commissioners.

Currently, PPI's Audit Committee consists of 3 (three) members consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) others are independent or external parties (non-Commissioners) who have expertise, experience and other quality backgrounds required by the Company.

Sepanjang 2022, komposisi keanggotaan Komite Audit PPI sebagai berikut:

Throughout 2022, the composition of PPI's Audit Committee are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Hamli	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020
Helman Arif	Anggota Member	KEP-01/DK/PTPPI/II/2021
Reinhard Harianja	Anggota Member	KEP-11/DK/PTPPI/XII/2021

Profil Keanggotaan Komite Audit | Profile of Audit Committee

Hamli

Ketua Komite
Audit
Chairman of Audit
Committee

Profil lengkap Bapak Hamli selaku Ketua Komite Audit PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profile of Mr. Hamli as the Chairman of PPI's Audit Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Helman Arif

Anggota
Member

Periode Jabatan | Term of Office:

01 Maret 2017 - sekarang

Data Pribadi | Personal Data:

Warga Negara | Citizenship : Indonesia

Usia | Age : 44 years old

Domisili | Domicile : Depok, Jawa Barat

Dasar Pengangkatan | Legal Basis of Appointment:

KEP-05/DK/PTPPI/III/2017

Riwayat Pendidikan | Educational Background:

- 2006 - 2009 Magister Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
2006 - 2009 Master of Management, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia
- 1997 - 2001 Department of Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, majoring in Marketing.
1997 - 2001 Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, majoring in Marketing.
- 1994 - 1997 SMUN 2 Jombang | Senior High School 2 Jombang



Riwayat Karier | Professional Experience

- 2022 – Sekarang Kepala Subbidang Kemahasiswaan
2022 - Now Head of Subdivision of Student Affairs
- 2009 - Sekarang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
2009 - Present Lecturer Faculty of Economics and Business, University of Indonesia
- 2003 - 2009 Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
2003 - 2009 Assistant Lecturer Faculty of Economics and Business, University of Indonesia

**Reinhard
Harianja**

Anggota
Member

Periode Jabatan | Term of Office:

01 Juni 2020 | June 01, 2020

Data Pribadi | Personal Data:

Warga Negara | Citizenship : Indonesia

Usia | Age : 60 years old

Domisili | Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan | Legal Basis of Appointment:

KEP-03/DK/PTPPI/VI/2020

Riwayat Pendidikan | Educational Background:

- 1982 SMA Cendana Rumbai SLTA PEKANBARU
1982 Senior High School Cendana Rumbai SLTA PEKANBARU
- 1987 S1/Institut Pertanian Bogor TEKNIK PRODUKSI BOGOR
1987 Bachelor's Degree / Bogor Agricultural Institute BOGOR PRODUCTION ENGINEERING
- 1999 S2/Universitas Gadjah Mada MANAJEMEN PERBANKAN YOGYAKARTA
1999 Masters/University of Gadjah Mada BANKING MANAGEMENT YOGYAKARTA

Riwayat Karier | Professional Experience:

- 2023 - sekarang Asesor Kompetensi Panitia Tehnis Uji Kompetensi Ikatan Bankir Indonesia April
2023 - present Competency Assessor of the Technical Committee of the Indonesian Bankers Association Competency Test April
- 2020 - Sekarang Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
2020 - Present Member of Audit Committee of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
- 2018 - sekarang Pengajar Program Branch Manager dan Sekolah Staf Pimpinan Bank (SespiBank) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
2018 - present Lecturer of Branch Manager Program and Bank Leadership Staff School (SespiBank) Indonesian Banking Development Institute
- 2017 - sekarang Dosen Tidak Tetap Prodi Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya
2017 - present Non-permanent Lecturer of Applied Economics Master Program Atma Jaya Catholic University



Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit PPI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Hak dan Kewenangan

Komite Audit berwenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun auditor eksternal Perusahaan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit internal maupun eksternal Perusahaan bilamana diperlukan.
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
6. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melaksanakan fungsi audit eksternal.
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan perseroan, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Duties and Responsibilities

PPI's Audit Committee is tasked with and is responsible for:

1. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties;
2. Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring that there is an adequate evaluation procedure for all information issued by the Company; and
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Audit Committee is authorized to:

1. Access Company documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and necessary company resources.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Obtain the required information from the Company's internal auditors and external auditors.
4. Conduct special examinations on the results of the Company's internal and external audits if necessary.
5. Involve independent parties other than members of the Audit Committee to assist in carrying out their duties (if necessary).
6. Propose to the Board of Commissioners about the Public Accounting Firm that will be selected to carry out the external audit function.
7. Perform other authorities given by the Board of Commissioners based on the assignment letter from the Board of Commissioners.

Independence of Audit Committee Members

All members of PPI's Audit Committee are independent parties who have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/ or Controlling Shareholders or relationship with the Company, and do not have concurrent positions both inside and outside the Company in accordance with the provisions of the laws and regulations.



Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit Declaration of Independence of Audit Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Hamli	Helman Arif	Reinhard Harianja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Frekuensi rapat yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit di tahun 2022 sebanyak 24 pertemuan yang dihadiri bersama Dewan Komisaris dan Komite Nominasi, dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time every month. The frequency of meetings held by the Audit Committee in 2022 was 24 meetings attended by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Hamli	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	24	24	100%
Helman Arif	Anggota Member	24	24	100%
Reinhard Harianja	Anggota Member	24	24	100%



Agenda Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:
The agenda of the Audit Committee Meeting is as follows

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4 April 2022 April 4, 2022	Novasi Bank BRI Bank BRI Novation
12 April 2022 April 12, 2022	Novasi Bank Mandiri Bank Mandiri Novation
14 April 2022 April 14, 2022	Café Covare
19 April 2022 April 19, 2022	1. Laporan Kinerja Bulan Maret 2022 March 2022 Performance Report 2. Laporan Kinerja Sampai dengan Bulan Maret 2022 Performance Report up to March 2022
20 April 2022 April 20, 2022	Pembahasan Kinerja Maret 2022 Performance Review March 2022
24 Mei 2022 May 24, 2022	Pembahasan Kinerja April 2022 Performance Review April 2022
4 Juni 2022 June 4, 2022	Pembahasan Finalisasi Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2021 Discussion on Finalization of Dekom Supervision Report for 2021
6 Juni 2022 June 6, 2022	1. Pembahasan Lap Tugas Pengawasan Dekom 2021 Discussion of the 2021 Dekom Supervision Report 2. Rapat Laporan Audit 2021 2021 Audit Report Meeting
14 Juni 2022 June 14, 2022	Pembahasan Permohonan Persetujuan Penjaminan Aset Tetap UPP Medan & Lampung (Perpanjangan Availability Period) Discussion of Request for Approval of UPP Medan & Lampung Fixed Asset Guarantee (Availability Period Extension)
5 Juli 2022 June 15, 2022	1. Pembahasan kinerja bulan Mei -Juni 2022 Discussion of performance for May -June 2022 2. Rencana merger PT BLI & PT Berdikari Logistik PT BLI & PT Berdikari Logistik merger plan
4 Agustus 2022 August 4, 2022	Rapat Tematik terkait Piutang Thematic Meeting on Receivables
26 Agustus 2022 August 26, 2022	Rapat Komite Kinerja Juli 2022 July 2022 Performance Committee Meeting
31 Agustus 2022 August 31, 2022	Rapat Komite Tematik Piutang Internal Internal Receivables Thematic Committee Meeting
5 September 2022 September 5, 2022	Pembahasan KMK PPI Discussion of KMK PPI
20 September 2022 September 20, 2022	Rapat Komite Kinerja Agustus 2022 August 2022 Performance Committee Meeting
6 Oktober 2022 October 6, 2022	Pembahasan KMK KMK discussion
25 Oktober 2022 October 25, 2022	Rapat pembahasan Kinerja September 2022 September 2022 Performance discussion meeting
3 November 2022 November 3, 2022	Pembahasan KMK BRI BRI KMK Discussion
9 November 2022 November 9, 2022	Pembahasan KMK Permata KMK Permata Discussion
18 November 2022 November 18, 2022	Rapat pembahasan Kinerja Oktober 2022 October 2022 Performance discussion meeting



25 November 2022 November 25, 2022	Pembahasan KMK Permata KMK Permata Discussion
28 November 2022 November 28, 2022	Pembahasan Hasil Rakor PT PPI 23-24 November 2022 Discussion of PT PPI Coordination Meeting Results November 23-24, 2022
30 November 2022 November 30, 2022	Rapat Komite Kadiv RKAP 2023 Kadiv Committee Meeting RKAP 2023
20 Desember 2022 December 20, 2022	Rapat pembahasan Kinerja November 2022 November 2022 Performance discussion meeting

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

Kegiatan Rutin Komite Audit, meliputi:

1. Membahas dan memberi pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI yang tujuannya agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, dan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI, yaitu agar Komite Audit memahami pelaksanaan pekerjaan SPI yang akan dilakukan selama setahun ke depan.
2. Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.
3. Melakukan kegiatan pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP) yang ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Manajemen, SPI dan KAP.
4. Menelaah hasil capaian kinerja Perusahaan yang ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit dan kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kegiatan Non-Rutin Komite Audit, meliputi:

Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Audit dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Report on Duty Implementation of Audit Committee in 2022

Throughout 2022, the Audit Committee carried out the main tasks as stipulated in the Audit Committee Charter, including:

The routine activities of the Audit Committee include:

1. Discussing and providing views on the IAU Annual Work Plan and Program with the aim that the IAU Annual Work Plan and Program are in line with the supervisory direction of the Board of Commissioners, and as part of the supervisory function carried out by the Audit Committee on the duties of IAU so that the Audit Committee understands the implementation IAU work to be carried out over the next year.
2. Reviewing the Internal Audit Unit Inspection Report, which was followed up by the Audit Committee and IAU Coordination Meeting.
3. Carrying out monitoring activities on the performance of the external auditor (KAP) which is followed up by the Coordination Meeting of the Audit Committee with Management, IAU and KAP.
4. Reviewing the results of the Company's performance achievements which are followed up by the Internal Audit Committee Meeting and the contribution of the Audit Committee in the Internal Meeting of the Board of Commissioners or the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The non-routine activities of the Audit Committee include:

Carrying out domestic official trips in the context of official duties carried out by the Audit Committee from the position of the workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.



Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Audit Tahun 2022

Pada tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup kegiatan rutin berupa pembahasan dan pemberian pandangan terhadap Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI, yang bertujuan agar Rencana dan Program Kerja Tahunan SPI tersebut selaras dengan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan Komite Audit terhadap tugas SPI. Sepanjang tahun ini, Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komite Audit dan SPI.

Performance Assessment and Evaluation of the Audit Committee in 2022

In 2022, the Audit Committee carried out its duties effectively in accordance with applicable regulations including routine activities in the form of discussions and providing views on the IAU Annual Work Plan and Program, which aims to ensure that the IAU Annual Work Plan and Program are in line with the supervisory directives of the Board of Commissioners, as well as part of the supervisory function carried out by the Audit Committee on the duties of IAU. Throughout this year, the Audit Committee also reviewed the Internal Audit Unit Inspection Report, which was followed up through the Coordination Meeting of the Audit Committee and IAU.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris resmi membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2020. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI.

The Board of Commissioners officially established the Nomination and Remuneration Committee in 2020. This is in accordance with the direction of the Ministry of SOEs through the Decree of the Board of Commissioners Number: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 dated December 27, 2021 regarding Establishment of the Nomination and Remuneration Committee and Appointment of the Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT PPI.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, perseroan belum memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, seluruh anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Nomination and Remuneration Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, the Company does not yet have a Nomination and Remuneration Committee Charter. However, all members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI continue to carry out their duties and responsibilities with integrity and in good faith.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Periode menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Membership Composition and Term of Office

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who concurrently serve as members of the Board of Commissioners is the same as the term of office as members of the Board of Commissioners.

Berikut ini adalah susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PPI per 31 Desember 2022, yaitu:

The following is the composition of the membership of PPI's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2022, namely:



Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PPI per 31 Desember 2022

Composition of the membership of PPI's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Herman Heru Suprobo	Ketua Chairman	KEP-09/DK/PTPPI/III/2021
Hamli	Anggota Member	KEP-09/DK/PTPPI/III/2021
M. Kapitra Ampera	Anggota Member	KEP-09/DK/PTPPI/III/2021
Setiawan Wangsaatmaja	Anggota Member	KEP-09/DK/PTPPI/III/2021

Profil Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PPI merupakan anggota Dewan Komisaris sehingga profil masing-masing dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

Nomination and Remuneration Committee Membership Profile

All members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI are members of the Board of Commissioners so their respective profiles have been presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PPI adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PPI, serta tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun di luar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee of PPI are independent parties who have no financial, management, share ownership and/ or family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with PPI, and do not have concurrent positions both inside and outside the Company in accordance with the provisions of the legislation.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Declaration of Independence of the Nomination and Remuneration Committee Members

Aspek Independensi Aspect of Independency	Herman Heru Suprobo	Hamli	M. Kapitra Ampera	Setiawan Wangsaatmaja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors				



Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi

Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates

✓

✓

✓

✓

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite

Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee

✓

✓

✓

✓

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah

Does not serve as administrators of political parties, officials and government

✓

✓

✓

✓

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Frekuensi rapat yang telah dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 sebanyak 28 pertemuan yang dihadiri bersama Dewan Komisaris dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least 1 (one) time every month. The frequency of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee in 2022 was 28 meetings attended by the Board of Commissioners and the Audit Committee as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Herman Heru Suprobo	Ketua Chairman	28	28	100%
Hamli	Anggota Member	28	28	100%
M. Kapitra Ampera	Anggota Member	28	28	100%
Setiawan Wangsaatmaja	Anggota Member	28	28	100%



Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
The agenda of the Nomination and Remuneration Committee Meeting is as follows

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4 April 2022 April 4, 2022	Novasi Bank BRI Bank BRI Novation
12 April 2022 April 12, 2022	Novasi Bank Mandiri Bank Mandiri Novation
14 April 2022 April 14, 2022	Café Covare
18 April 2022 April 18, 2022	Mitigasi Risiko PT PPI Periode Maret 2022 PT PPI Risk Mitigation March 2022 Period
19 April 2022 April 19, 2022	1. Laporan Kinerja Bulan Maret 2022 March 2022 Performance Report 2. Laporan Kinerja Sampai dengan Bulan Maret 2022 Performance Report up to March 2022
20 April 2022 April 20, 2022	Pembahasan Kinerja Maret 2022 Performance Review March 2022
24 Mei 2022 May 24, 2022	Pembahasan Kinerja April 2022 Performance Review April 2022
31 Mei 2022 May 31, 2022	Pelepasan Aset Semarang Semarang Asset Disposal
4 Juni 2022 June 4, 2022	Pembahasan Finalisasi Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2021 Discussion on Finalization of Dekom Supervision Report for 2021
6 Juni 2022 June 6, 2022	1. Pembahasan Lap Tugas Pengawasan Dekom 2021 Discussion of the 2021 Dekom Supervision Report 2. Rapat Laporan Audit 2021 2021 Audit Report Meeting
9 Juni 2022 June 9, 2022	Telaah audit LM 2021 LM 2021 audit review
14 Juni 2022 June 14, 2022	Pembahasan Permohonan Persetujuan Penjaminan Aset Tetap UPP Medan & Lampung (Perpanjangan Availability Period) Discussion of Request for Approval of UPP Medan & Lampung Fixed Asset Guarantee (Availability Period Extension)
21 Juni 2022 June 21, 2022	Pembahasan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Penjaminan Aset Tetap Unit Pengantungan Pupuk (UPP) di Medan dan Lampung (Atas Perubahan Availability Period) Discussion of Request for Board of Commissioners Approval to Guarantee the Fixed Assets of Fertilizer Holding Units (UPP) in Medan and Lampung (for Changes in Availability Period)



5 Juli 2022 June 15, 2022	1. Pembahasan kinerja bulan Mei -Juni 2022 Discussion of performance for May - June 2022 2. Rencana <i>merger</i> PT BLI & PT Berdikari Logistik PT BLI & PT Berdikari Logistik merger plan
4 Agustus 2022 August 4, 2022	Rapat Tematik terkait Piutang Thematic Meeting on Receivables
26 Agustus 2022 August 26, 2022	Rapat Komite Kinerja Juli 2022 July 2022 Performance Committee Meeting
31 Agustus 2022 August 31, 2022	Rapat Komite Tematik Piutang Internal Internal Receivables Thematic Committee Meeting
5 September 2022 September 5, 2022	Pembahasan KMK PPI Discussion of KMK PPI
20 September 2022 September 20, 2022	Rapat Komite Kinerja Agustus 2022 Discussion of KMK PPI
6 Oktober 2022 October 6, 2022	Pembahasan KMK KMK discussion
25 Oktober 2022 October 25, 2022	Rapat pembahasan Kinerja September 2022 September 2022 Performance discussion meeting
3 November 2022 November 3, 2022	Pembahasan KMK BRI BRI KMK Discussion
9 November 2022 November 9, 2022	Pembahasan KMK Permata KMK Permata Discussion
18 November 2022 November 18, 2022	Rapat pembahasan Kinerja Oktober 2022 October 2022 Performance discussion meeting
25 November 2022 November 25, 2022	Pembahasan KMK Permata KMK Permata Discussion
28 November 2022 November 28, 2022	Pembahasan Hasil Rakor PT PPI 23-24 November 2022 Discussion of PT PPI Coordination Meeting Results November 23-24, 2022
30 November 2022 November 30, 2022	Rapat Komite Kadiv RKAP 2023 Kadiv Committee Meeting RKAP 2023
20 Desember 2022 December 20, 2022	Rapat pembahasan Kinerja November 2022 November 2022 Performance discussion meeting





Kebijakan Suksesi Direksi

Ketentuan dan kriteria seleksi bagi calon anggota Direksi PPI termasuk pengusulan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham secara umum telah dimuat di dalam *Board Manual*. Proses nominasi tersebut dimulai dengan melakukan *assessment* terhadap pejabat satu tingkat di bawah Direksi oleh lembaga independen yang telah direkomendasikan oleh pemegang saham. Secara umum, Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap proses nominasi calon anggota Direksi PPI melalui pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan *top talent* kepada Kementerian BUMN.

Board of Directors Succession Policy

The provisions and selection criteria for prospective members of PPI's Board of Directors including the nomination of candidates for members of the Board of Directors to Shareholders have generally been contained in the Board Manual. The nomination process begins with an assessment of officials one level below the Board of Directors by an independent institution that has been recommended by the shareholders. In general, the Board of Commissioners reviews the nomination process for candidates for members of PPI's Board of Directors through discussions carried out in the implementation of the Board of Commissioners Meeting. Furthermore, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners submits top talents to the Ministry of SOEs.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan manajemen risiko pada lingkup PPI. Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas pada setiap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko di perseroan.

The Risk Management Committee is one of the committees established by and responsible directly to the Board of Commissioners, and plays a role in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to the effectiveness of the implementation of risk management principles and policies within PPI. The Risk Management Committee is authorized to have full, free and unrestricted access to any company policies related to risk management in the Company.

Dasar Hukum

Dasar pembentukan Komite Manajemen Risiko mengacu pada regulasi normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Anggaran Dasar PT PPI;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN;

Legal Basis

The basis for establishing the Risk Management Committee refers to normative regulations and applicable laws and regulations, including:

1. Law Number: 19 of 2003 concerning SOEs;
2. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
4. Articles of Association of PT PPI;
5. Decree of the State Minister for the Utilization of SOE/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number: KEP-211/MPBUMN/1999 concerning Management Reports of SOE Companies;



6. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik GCG yang baik pada BUMN;
8. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Soundness Level Assessment;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good GCG Practices in SOEs;
8. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; and
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PPI belum memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko. Namun demikian, seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan penuh itikad baik.

Kualifikasi dan/atau Kriteria Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko PPI telah memenuhi persyaratan atau kualifikasi orang perseroan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dengan kriteria umum sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pengawasan dan/atau audit akuntansi, keuangan dan memahami manajemen risiko.
3. Memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis PPI.
4. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Auditor Eksternal, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PPI dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

Risk Management Committee Charter

As of the publication of this Annual Report, PPI does not yet have a Risk Management Committee Charter. However, all members of PPI's Risk Management Committee continue to carry out their duties and responsibilities with full integrity and in good faith.

Qualifications and/or Criteria for Risk Management Committee

All members of the Company's Risk Management Committee have met the requirements or qualifications as a member of the Risk Management Committee with the following general criteria:

1. Have high integrity and dedication, adequate knowledge and experience according to their educational background, and able to communicate well.
2. Have the ability and experience in the field of supervision and/or audit of accounting, finance and understand risk management.
3. Have knowledge of PPI's business processes.
4. Have sufficient time to carry out duties.
5. Not a person in the External Auditor, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services and or other consulting services to PPI within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control PPI within the last 2 (two) years before being appointed by the Board of Commissioners.



Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Periode menjabat Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar PPI. Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan bagi anggota dan/ atau Ketua Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris masa jabatannya adalah sama dengan masa tugasnya sebagai Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang lainnya merupakan pihak independen atau eksternal (non-Komisaris) yang memiliki latar belakang keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan PPI.

Membership Composition and Term of Office

The term of office of the Risk Management Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in PPI's Articles of Association. The term of office for members of the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, while for members and/or Chairman of the Risk Management Committee who concurrently serves as a member of the Board of Commissioners, the term of office is the same as their tenure as the Board of Commissioners.

The Risk Management Committee consists of at least 3 (three) members consisting of 1 (one) member of the Board of Commissioners and 2 (two) others who are independent or external parties (non-Commissioners) who have expertise, experience and other quality backgrounds required by PPI.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Composition of the membership of the Risk Management Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Setiawan Wangsaatmaja	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of of Risk Management Committee	KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021
Dilza Vierson	Anggota Member	KEP-02/DK/PTPPI/X/2019
Hertanta	Anggota Member	KEP-02/DK/PTPPI/X/2019



Profil Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Profile of Risk Management Committee

Setiawan Wangsaatmaja

Ketua Komite Manajemen Risiko

Chairman of of Risk Management Committee

Profil lengkap Bapak Setiawan Mangsaatwaja selaku Ketua Komite Manajemen Risiko PPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini.

The complete profile of Mr. Hamli as the Chairman of PPI's Audit Committee is presented in the Company Profile Chapter, Profile of the Board of Commissioners Sub-chapter, in this Annual Report.

Dilza Vierson

Anggota | Member

Periode Jabatan Term of Office

01 Juli 2020
July 01, 2020

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara | Citizenship : Indonesia
Usia | Age : 53 years old
Domisili | Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment

KEP-05/DK/PTPPI/VII/2020

Riwayat Pendidikan Educational Background

- 1995 S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Padang
1995 Bachelor's Degree College of Finance, Padang
- 2003 S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta
2003 Master's Degree, Ganesha College of Economics, Jakarta

Riwayat Karier Professional Experience

- 2020 – Sekarang Analis Hukum pada Asdep Bidang Peraturan Perundang-Undangan
2020 - Present Legal Analyst at the Undersecretariat for Legislative Regulations
- 2018 – 2020 Analis Hukum pada Biro Hukum
2018 - 2020 Legal Analyst at the Legal Bureau
- 2016 – 2018 Asisten Deputy Usaha Industri Agro dan Farmasi I
2016 - 2018 Assistant Deputy for Agro and Pharmaceutical Industry Business I
- 2015 – 2016 Kepala Bidang Privatisasi dan Sinergi BUMN
2015 - 2016 Head of BUMN Privatization and Synergy Division



Hertanta

Anggota | Member

Periode Jabatan Term of Office

01 Februari 2021
December 01, 2021

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara | Citizenship : Indonesia (WNI).
Usia | Age : 58 years old
Domisili | Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment

KEP-01/DK/PTPPI/II/2020

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Magister Manajemen (MM) - Finance
Master of Management (MM) - Finance
- Certified Risk Management (Level-5)
Certified Risk Management (Level-5)

Riwayat Karier Professional Experience

1. Kepala Divisi Manajemen Risiko (Th 2015-2017)
Head of Risk Management Division (Th 2015-2017)
2. Kepala Divisi Commercial Risk (Th 2017-2018)
Head of Commercial Risk Division (2017-2018)
3. Kepala Divisi Human Capital Strategy (Th 2018 – 2019)
Head of Human Capital Strategy Division (Th 2018 - 2019)
4. Kepala Divisi Internal Audit (Th 2019-2021)
Head of Internal Audit Division (Th 2019-2021)
5. Komisaris Utama PT BSP (Th 2019 – 2023)
President Commissioner of PT BSP (Th 2019 - 2023)

Independensi Komite Manajemen Risiko

Masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko diharuskan untuk menjaga sikap profesionalisme dan independensinya selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko. Untuk itu, masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah menyatakan sikap independensinya dalam pakta integritas yang sudah disepakati bersama.

Independence of Risk Management Committee

Each member of the Risk Management Committee is required to maintain professionalism and independence while carrying out their duties and responsibilities as stipulated in the Risk Management Committee Charter. To that end, each member of the Risk Management Committee has stated their independence in the integrity pact that has been mutually agreed upon.



Aspek Independensi Aspect of Independency	Setiawan Wangsaatmaja	Dilza Vierson	Hertanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliates	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Has no family relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or members of the Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengembangkan, menilai dan meningkatkan struktur, mekanisme, proses dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara berkelanjutan;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian
3. atas tata kelola manajemen risiko (*risk management governance*), termasuk risiko hukum (*legal risk*) perusahaan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas penerapan proses manajemen risiko oleh perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan menilai kemampuan manajemen risiko perusahaan;
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menemukan hubungan antara risiko yang telah ditetapkan perusahaan;

Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners in developing, assessing and improving the structure, mechanisms, processes and practices of good corporate governance (GCG) in a sustainable manner;
2. Assisting the Board of Commissioners in conducting the assessment
3. Responsibilities in terms of risk management governance, including the Company's legal risk;
4. Assisting the Board of Commissioners in evaluating the implementation of the risk management process by the Company;
5. Assisting the Board of Commissioners in assessing the Company's risk management capabilities;
6. Assisting the Board of Commissioners in finding the relationship between the risks that have been determined by the Company;



7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan tata kelola manajemen risiko, termasuk risiko hukum dan proses manajemen risiko perusahaan;
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;
9. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor unsur ketidakpastian dari risiko berupa adanya berbagai perubahan lingkungan di luar perusahaan yang berdampak kepada perusahaan;
10. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko atas usulan Direksi yang terkait dengan kerja sama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan dan kegiatan lain perusahaan sebagai bahan analisis dan evaluasi Dewan Komisaris dalam rangka memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan Direksi tersebut;
11. Membuat laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi penugasan;

Selain melaksanakan tugas-tugas di atas, Komite Manajemen Risiko juga menjalankan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Hak dan Kewenangan

Komite Manajemen Risiko memiliki hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Manajemen Risiko dapat bekerja sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat Manajemen khususnya fungsi yang menangani Manajemen Risiko, dan Unit- Unit Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komite Manajemen Risiko dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan

7. Providing input to the Board of Commissioners in the context of improving and developing risk management governance, including legal risk and corporate risk management processes;
8. Assisting the Board of Commissioners in assessing key risks, including legal risks faced by the company and ensuring that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor and control these risks;
9. Assisting the Board of Commissioners in monitoring the element of uncertainty from risk in the form of various environmental changes outside the Company that have an impact on the Company;
10. Assisting the Board of Commissioners in identifying the risks proposed by the Board of Directors related to investment cooperation, equity participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, disposal of company assets and other activities of the Company as material for analysis and evaluation of the Board of Commissioners in order to provide recommendations and approval of proposals the Board of Directors;
11. Preparing reports, both in writing and verbally, to the Board of Commissioners on matters related to the assignment material;

In addition to carrying out the tasks above, the Risk Management Committee also carries out special assignments given by the Board of Commissioners.

Rights and Authorities

The Risk Management Committee has the rights and authorities as follows:

1. Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Risk Management Committee can access records or information about the Company's employees, funds, assets and other resources related to the implementation of its duties.
2. In exercising its authority, the Risk Management Committee may cooperate with partners, namely other Committees of the Board of Commissioners, related teams at the Management level, especially the function that handles Risk Management, and Company Units related to following work procedures and in accordance with applicable regulations.
3. The Risk Management Committee may involve experts and/or consultants/independent parties to assist in carrying out its duties with the written



persetujuan tertulis Dewan Komisaris serta atas biaya Perusahaan (jika diperlukan).

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat tugas dari Dewan Komisaris.

approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company (if necessary).

4. Perform other authorities given by the Board of Commissioners based on the assignment letter from the Board of Commissioners.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Meeting

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Frekuensi rapat yang telah dilaksanakan oleh Komite Manajemen Risiko di tahun 2022 sebanyak 10 pertemuan adalah sebagai berikut:

The Risk Management Committee holds regular meetings at least 1 (one) time per month. The frequency of meetings that have been held by the Risk Management Committee in 2022 totaling 10 meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat	Kehadiran Rapat	% Kehadiran
Setiawan Wangsaatmaja	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of Risk Management Committee	10	10	100%
Dilza Vierson	Anggota Member	10	10	100%
Hertanta	Anggota Member	10	10	100%

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The agenda of the Risk Management Committee Meeting is as follows:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
24 Maret 2022 March 24, 2022	Pembahasan Manajemen Risiko bulan Februari 2022 Discussion on Risk Management in February 2022
18 April 2022 April 18, 2022	Pembahasan Manajemen Risiko bulan Maret 2022 Discussion on Risk Management in March 2022
20 Mei 2022 May 20, 2022	Pembahasan Manajemen Risiko bulan April 2022 April 2022 Risk Management Discussion
27 Juni 2022 June 27, 2022	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Mei 2022 Discussion of the Risk Mitigation Progress Committee as of May 2022
29 Juli 2022 July 29, 2022	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Juni 2022 Discussion of the Risk Mitigation Progress Committee as of June 2022
22 Agustus 2022 August 22, 2022	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Juli 2022 Discussion of the Risk Mitigation Progress Committee as of July 2022



27 September 2022 September 27, 2022	Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko per Agustus 2022 Discussion of the Risk Mitigation Progress Committee as of August 2022
06 Oktober 2022 06 October 2022	Koordinasi KMR Bersama Divisi MR, SPI, Legal mengenai temuan Audit terkat Piutang KMR Coordination with the MR, SPI, Legal Division regarding Audit findings related to Receivables
21 November 2022 November 21, 2022	Zoom Meeting Pembahasan Raker 2023 Zoom Meeting Discussion of Raker 2023
05 Desember 2022 December 05, 2022	Zoom Meeting Profil RKAP 2023 2023 RKAP Profile Zoom Meeting

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Kegiatan Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap: bidang pengawasan Dewan Komisaris yaitu: implementasi *Blue Print*/RJPP, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa rapat internal Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan Monitoring Kegiatan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG berupa pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi; dan
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Perusahaan yang menekankan pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2022.

Kegiatan Non-Rutin Komite Manajemen Risiko, meliputi:

1. Meninjau Ketentuan Internal PT PPI seperti *Standard Procedure Operational (SOP)*, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan lainnya;
2. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko melalui Diklat, *Workshop* atau Seminar terkait Implementasi GCG; dan

Report on Duty Implementation of Risk Management Committee in 2022

The Routine activities of the Risk Management Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners to supervise: the supervisory areas of the Board of Commissioners, namely: Blue Print/RJPP implementation, RKAP implementation, the Company's internal control system, the Company's risk management, the Company's information technology system, HR policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), laws and regulations and agreements with third parties;
2. Carrying out coordination activities of the Risk Management Committee in the Implementation of its Duties and Functions in the form of internal meetings of the Risk Management Committee and the Board of Commissioners;
3. Monitoring the Company's activities so it is in line with GCG principles in the form of providing input, advice, recommendations, or suggestions for approval from the Board of Directors; and
4. Carrying out the Company's performance evaluation activities that emphasize the implementation of the Company's Work Plan and Budget or RKAP 2022.

The Non-Routine Activities of the Risk Management Committee include:

1. Reviewing the Internal Provisions of PT PPI (such as Standard Operational Procedures (SOP), Activity Implementation Guidelines, and others);
2. Implementing Risk Management Committee Competency Development activities through Training, Workshops or Seminars related to GCG Implementation; and



3. Melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka tugas kedinasan yang dilakukan Komite Manajemen Risiko dari kedudukan tempat kerja ke tempat tujuan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

3. Conducting domestic official trips in the context of official duties carried out by the Risk Management Committee from the position of the workplace to other destinations within the territory of the Republic of Indonesia.

Penilaian dan Evaluasi atas Kinerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah membantu efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi *Blue Print/RJPP*, implementasi RKAP, sistem pengendalian internal perusahaan, manajemen risiko perusahaan, sistem teknologi informasi perusahaan, kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi), kebijakan pengadaan (termasuk pemasaran), kebijakan mutu dan layanan (termasuk riset), peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta melakukan *monitoring* terhadap seluruh kegiatan PPI agar senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Performance Assessment and Evaluation of the Risk Management Committee in 2022

Throughout 2022, the Risk Management Committee assisted the effectiveness of the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners on the implementation of the Blue Print/RJPP, the implementation of the RKAP, the Company's internal control system, the Company's risk management, the Company's information technology system, HR policies and implementation (including training and remuneration), procurement policies (including marketing), quality and service policies (including research), laws and regulations and agreements with third parties, as well as monitoring all of PPI's activities so they are always in line with GCG principles.

Organ Pendukung di Bawah Direksi

Supporting Organs Under the Board of Directors

Sekretariat Perusahaan

Sekretariat Perusahaan adalah salah satu organ penunjang Direksi yang menjalankan fungsi vital sebagai penghubung (*liaison*) antara perseroan dengan pihak eksternal terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra perusahaan, menjamin pemenuhan tanggung jawab perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi normatif lainnya yang relevan dengan bidang usaha perseroan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan Sekretaris Perusahaan setingkat dengan Kepala Divisi.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is one of the supporting organs of the Board of Directors that carries out a vital function as a liaison between the Company and external parties, especially in maintaining public perception of the Company's image, ensuring the fulfillment of corporate responsibilities and ensuring the Company's compliance with laws and regulations and other normative regulations relevant to the Company's line of business. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director. The position of the Corporate Secretary is at the same level as the Division Head.

Dasar Hukum

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

Legal Basis

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012.



Keorganisasian Sekretariat Perusahaan

Sesuai struktur organisasi, Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*) berada di bawah koordinasi Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan membawahi:

1. Humas dan Kelembagaan;
2. Sekretariat Direksi dan *BOD Support*; dan
3. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Corporate Secretariat Organization

In accordance with the organizational structure, the Corporate Secretary Bureau is under the coordination of the President Director and is directly responsible to the President Director. The appointment of the Corporate Secretary is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Based on the organizational structure, the Corporate Secretary is in charge of:

1. Public Relations & Institutions;
2. Secretariat Director and BOD Support; and
3. Social & Environmental Responsibility

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan | Corporate Secretary Organization



Humas dan Kelembagaan

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Bagian kehumasan mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Diseminasi informasi internal dan eksternal perusahaan
2. Meningkatkan citra positif dan penghubung komunitas antar lembaga
3. *Liasion Officer*.

Department of Public Relations

This department is led by a Department Head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of Public Relations carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Disseminating company internal and external information
2. Increasing the positive image and liaison inter-agency community
3. *Liaison Officer*.



Sekretariat Direksi dan BOD Support

Departemen ini dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Departemen Kelembagaan dan Implementasi GCG mengemban sejumlah tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Memantau penerapan GCG perusahaan;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kelembagaan; dan
3. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi kelembagaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Perusahaan. Bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan.

Department of Institutional and GCG Implementation

This department is led by a Department Head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of Institutional and GCG Implementation carries out a number of duties and responsibilities, including:

1. Monitoring the Company's GCG implementation;
2. Developing plans for programs and activities in the institutional sector; and
3. Organizing facilities and institutional coordination.

Department of CSR and PKBL

This department is led by a department head who reports directly to the Corporate Secretary. The Department of CSR & PKBL is in charge and responsible for the preparation of the Social Responsibility and Community Development Program.





Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Noverita Anggraeny

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Periode Jabatan Term of Office

14 Desember 2021 - Sekarang
December 14, 2021 - Present

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, dan saat ini berusia 50 tahun.
She is an Indonesian citizen, lives in South Tangerang and as of now, she is 50 years old.

Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi Nomor: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021.
Decree of the Board of Directors Number: 65/DU/SKD/PPI/XII/2021.

Riwayat Pendidikan Educational Background

- 1992 - 1998 : Universitas Trisakti Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Arsitektur
- 1998 - 2000 : Universitas Gadjah Mada Program Magister Management, Jurusan Manajemen Pemasaran
- 1992 - 1998 : Trisakti University, Faculty of Civil Engineering and Planning, in Architecture Engineering
- 1998 - 2000 : Gadjah Mada University, Master's Degree in Marketing Management

Riwayat Karier Professional Experience

- Sekretaris Perusahaan (Desember 2021 – sekarang)
- Vice President Departemen Manajemen Risiko (Agustus 2021 – Januari 2022)
- *Vice President* Satuan Tata Kelola Risiko dan Renstra (April 2021 – Agustus 2021)
- Senior Manajer *Domestic Purchasing* (Januari 2020 – April 2021)
- Corporate Secreary (December 2021 – present)
- Vice President of Risk Management Department (August 2021 – January 2022)
- Vice President of Risk Management and Strategic Plan Unit (April 2021 – August 2021)
- Senior Manajer of Domestic Purchasing (January 2020 – April 2021)



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mengemban tugas pokok yang berkaitan dengan jalannya kesekretariatan perusahaan dan administrasi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, promosi dan kemitraan perusahaan. Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk:

1. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan divisinya.
2. Membuat rencana program CSR.
3. Menyusun rencana promosi perusahaan.
4. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
5. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan tentang keterbukaan dan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
8. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
9. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.
10. Mengkoordinasikan pengurusan izin-izin usaha perusahaan komersil dan non-komersil.
11. Menyelenggarakan database dan penyimpanan dokumen perusahaan.
12. Membantu dan berperan secara aktif untuk kelancaran kegiatan divisi komersil (persyaratan tender, menyediakan *market tools*).
13. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak stakeholder.
14. Mengkoordinasikan proses penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
15. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
16. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi.
17. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi termasuk menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
18. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perusahaan.
19. Melakukan *update website* Perusahaan.
20. Membina hubungan baik dengan media massa.
21. Melaksanakan kegiatan *sponsorship* Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary carries out the main duties related to the running of the corporate secretariat and administration as well as other activities related to society, promotion and corporate partnerships. In general, the Corporate Secretary is tasked with:

1. Making a work plan and annual budget for the division.
2. Making a CSR program plan.
3. Developing a company promotion plan.
4. Creating and regularly updating Special Lists.
5. Creating and periodically updating the Shareholder Register.
6. Responsible for holding the GMS.
7. Ensuring that the Company complies with the provisions on disclosure of information in the Annual Report.
8. Organizing meetings within the Board of Directors, both routine and non-routine.
9. Organizing secretarial activities within the Board of Directors and the Company as well as its administration.
10. Coordinating the management of business permits for commercial and non-commercial companies.
11. Organizing a database and storage of company documents.
12. Assisting and playing an active role in the smooth operation of the commercial division (tender requirements, provide market tools).
13. Building mutually beneficial cooperation networks with various stakeholders.
14. Coordinating the process of preparing the Company's Long Term Plan (RJPP), Company's Work Plan and Budget (RKAP), Management Report, and Annual Report.
15. Communicating company and/or government policies to internal and external parties.
16. Coordinating report materials for Board of Directors Meetings.
17. Striving for the smooth implementation of the Board of Directors agenda, including attending Board of Directors Meetings and making Minutes of Board of Directors Meetings.
18. Carrying out secretarial activities of the Company.
19. Updating the Company's website.
20. Fostering good relations with the mass media.
21. Carrying out corporate sponsorship activities.



Hak dan Kewenangan

Sekretaris Perusahaan memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh *person in charge*.
4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/ informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan.
8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
9. Menghadiri rapat-rapat Direksi dengan pihakpihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2022

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas-tugas pokok dan merealisasikan sejumlah program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun, antara lain:

1. Melakukan pengkoordinasian penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulanan;

Rights and Authorities

The Corporate Secretary has the right and authority to:

1. Establish systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Directors and the Company.
2. View notes, minutes of the Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of providing information required by the Board of Directors.
3. Request a report on the progress of the implementation of the Board of Directors' decisions carried out by the person in charge.
4. Request data/information/explanation needed by the Board of Directors to relevant parties inside and outside the Company for the purposes of carrying out the duties of the Board of Directors.
5. Improve and request an explanation from the person in charge of the Company who is experiencing delays in the stages of the process of implementing the decisions of the Board of Directors.
6. Remind and ask for explanations from work units/related parties for the delay in providing materials/information/data required by the Board of Directors.
7. Represent the Board of Directors in dealing with parties outside the Company and or within the Company in accordance with the assignments given and the policies that have been determined.
8. Propose the agenda of the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company.
9. Attend the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company in accordance with pre-determined policies.
10. Use secretarial facilities to carry out their duties.

Duty Implementation of the Corporate Secretary in 2022

Throughout 2022, the Corporate Secretary carried out the main tasks and realized a number of work programs that had been set at the beginning of the year, including:

1. Coordinating the preparation of the Annual Report and Quarterly Report;



2. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan kepada Pemegang Saham yang senantiasa dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pemutakhiran informasi yang disajikan dalam website perseroan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Humas yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan;
4. Menyiapkan bahan-bahan untuk proses release dan penyampaian laporan-laporan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan informasi kepada stakeholder sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu dan muatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta kegiatan lainnya; Melakukan koordinasi dan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan RUPS/ LB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
7. Membuat, memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah-risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.

2. Submitting Quarterly and Annual Management Reports to Shareholders which are always carried out in a timely manner in accordance with the provisions;
3. Updating the information presented on the Company's website which in this case is carried out by the Public Relations Section under the coordination of the Corporate Secretary;
4. Preparing materials for the process of releasing and submitting reports to stakeholders in accordance with applicable regulations;
5. Providing information to stakeholders according to its designation while taking into account the timeliness and content in accordance with applicable regulations;
6. Coordinating the implementation of the Meetings of the Board of Directors as well as the Board of Directors and Board of Commissioners and other activities; Coordinating and arranging the stages of GMS/EGMS according to a predetermined schedule; and
7. Creating, maintaining and storing Company documents such as the Shareholder Register, the Special Register, the minutes of the GMS and the minutes of the Board of Directors' Meetings.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Uraian lengkap mengenai daftar program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Training and Competency Development Program of Corporate Secretary

A complete description of the list of training and competency development programs that the Corporate Secretary participated in in 2022 is presented in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

PPI memiliki organ Satuan Pengawas Intern (SPI) yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap unit-unit kerja lainnya. SPI menjalankan fungsi pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen dan objektif kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, sistem manajemen dan tata kelola Perusahaan.

Internal Audit Unit (IAU)

SPI has an Internal Audit Unit (IAU) which is structurally responsible directly to the President Director and works independently of other work units. IAU performs the function of providing assurance and consulting that is independent and objective to management in order to improve the quality of risk management processes, internal control, management systems and corporate governance.

Dasar Hukum

Keberadaan, pembentukan, dan komposisi SPI di perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi normatif lainnya berikut ini:

1. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Legal Basis

The existence, establishment, and composition of IAU in the Company refers to the following statutory provisions and other normative regulations:

1. The establishment of the IAU refers to Chapter VI of the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;



2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero);
3. Keputusan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 590/DU/SKD/PPI/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Internal Audit Charter.

2. Government Regulation no. 12 of 1998 concerning Companies (Persero);
3. Decree of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in State-Owned Enterprises (SOEs); and
4. Decree of the Board of Directors Number: 590/ DU/ SKD/PPI/X/2016 dated October 25, 2016 regarding Internal Audit Charter.

Kedudukan SPI dalam Struktur Organisasi

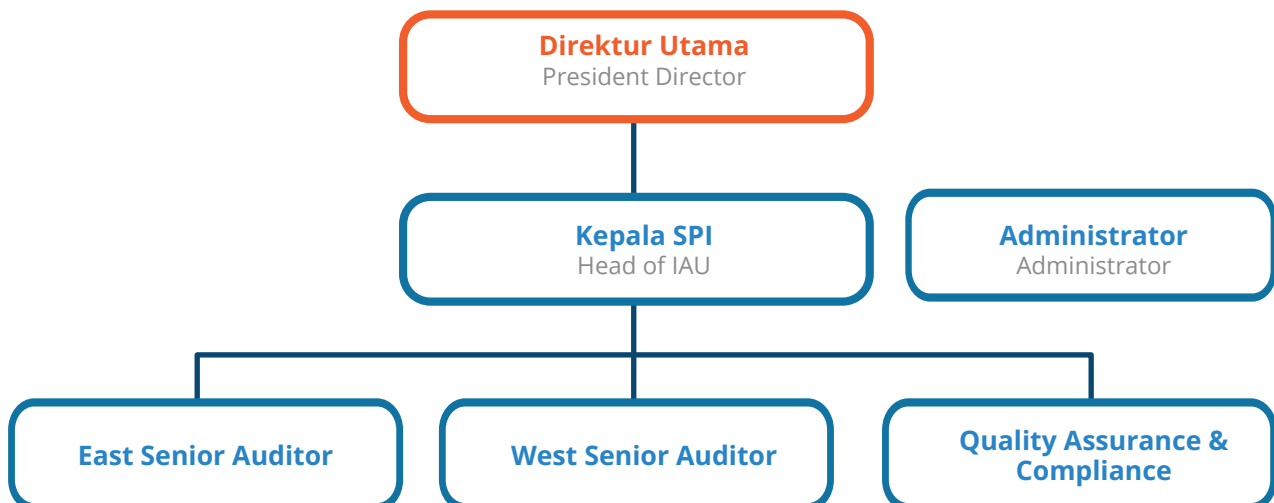
Secara struktur organisasi, SPI merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama sehingga Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun pada praktiknya, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Board Manual.

IAU Position in Organizational Structure

In organizational structure, IAU is a functional work unit that is under the direct supervision of the President Director so that the Head of IAU is directly responsible to the President Director. However, in practice, IAU also coordinates with the Audit Committee in carrying out its duties as stated in the Board Manual.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Organizational Structure of Internal Audit Unit



Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Flow of Appointment and Dismissal of the Head of IAU

The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.



Profil Kepala SPI | Head of IAU Profile



Cahyadi

Kepala SPI
Head of IAU

Periode Jabatan Term of Office

Juli 2021 - Sekarang | July 2021 - Present

Data Pribadi Personal Data

Warga Negara | Citizenship : Indonesian
Usia | Age : 40 years old
Domisili | Domicile : DKI Jakarta

Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021
Decree of the Board of Directors Number: 11/DU/SKD/PPI/VII/2021

Riwayat Pendidikan Educational Background

- S1 Akutansi
- Bachelor of Accounting

Riwayat Karier Professional Experience

- Ketua Tim Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2008 - 2020)
- Satuan Tugas Audit pada Direktorat Pengawasan Internal KPK (2020 - 2021)
- Kepala SPI PT PPI (2021 - sekarang)
- Head of the Audit Team at the KPK Internal Supervision Directorate (2008 - 2020)
- Audit Task Force at the Directorate of Internal Supervision of the KPK (2020 - 2021)
- Head of SPI PT PPI (2021 - present)



Keanggotaan Personil SPI

Kecukupan jumlah auditor internal atau personil SPI yang profesional dan memiliki kompetensi andal sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. Penentuan jumlah dan komposisi auditor perseroan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan ideal organisasi SPI dengan menilik rencana kebutuhan tenaga auditor.

Per 31 Desember 2022, jumlah auditor internal perseroan tercatat sebanyak 11 orang termasuk Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap 32 kantor cabang, 4 Direktorat, dan 2 Anak Perusahaan.

Sertifikasi Personil SPI

SPI menyusun rencana kerja pengembangan profesi secara berkelanjutan baik dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang audit internal ataupun sebagai wujud implementasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi auditor yang merupakan bagian dari kegiatan rutin SPI sebagaimana tertuang di dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pada akhir 2022, SPI perseroan tercatat memiliki sejumlah sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal perseroan, antara lain:

IAU Membership

Sufficient number of internal auditors or IAU personnel who are professional and have reliable competence is very much needed to assist the implementation of the functions and duties of IAU. Determination of the number and composition of the Company's auditors always considers the ideal needs of the IAU organization by considering the planned needs of auditors.

As of 31 December 2022, there were 11 internal auditors for the company, including the Head of the Internal Audit Unit with responsibility for conducting audits of 32 branch offices, 4 directorates and 2 subsidiaries.

IAU Certification

IAU prepares a work plan for continuous professional development either in order to obtain professional certification relevant to the field of internal audit or as a form of implementation of the implementation of a capacity development program for auditors which is part of IAU's routine activities as stated in the Annual Examination Work Program (PKPT).

At the end of 2022, the Head of the Company's IAU was recorded to have a number of relevant certifications in order to support the implementation of his duties and responsibilities as the Company's internal auditor,

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Cahyadi	Kepala SPI Head of IAUr	Fungsional Auditor, PIA, CFE, CRMO
David Nicholson	Manager Assurance 2 Assurance Manager 2	CA
Daeng Achmad ardiansyah	Manager Consulting Consulting Manager	Fungsional Auditor, CRMO
Dimas Adi Oetama S.	Asisten Manager Assurance 1 Assistant Assurance Manager 1	Fungsional Auditor Muda, Brevet A & B
Delfi Yandri	Asisten Manager Consulting Assistant Consulting Manager	CA, Asean CPA, Brevet A B C
Dian Auliawati Purnama	Asisten Manager Assurance 2 Assistant Assurance Manager 2	Fungsional Auditor Pertama, Brevet A & B



Tugas dan Tanggung Jawab

Lingkup tugas dan tanggung jawab SPI, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian strategi bisnis;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perusahaan;
4. Melakukan penugasan khusus lainnya sesuai penugasan dari Direktur Utama;
5. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama;
7. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah di rekomendasikan; dan
8. Menyusun dan menyempurnakan standar dan panduan SPI Perusahaan.

Hak dan Kewenangan

Agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor internal dapat berjalan efektif, maka seluruh personel SPI PPI berwenang untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit internal secara independen;
2. Memperoleh informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perusahaan dan anak Perusahaan/Divisi/ Unit Kerja serta memiliki akses tanpa batas ke semua fungsi, catatan, harta milik dan pegawai Perusahaan selama relevan dengan lingkup pemeriksaan;
3. Memperoleh informasi-informasi dari nara sumber profesional/pihak ahli berkaitan dengan proses audit Perusahaan dan Anak Perusahaan;
4. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik Perusahaan dan Anak Perusahaan;
5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama;

including:

Duties and Responsibilities

The scope of duties and responsibilities of IAU, among others, are as follows:

1. Developing strategies and audit work plans based on the results of the analysis of risks faced by the Company in achieving business strategies;
2. Conducting inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, marketing, information technology and other activities in achieving the mission, goals and strategies that have been set;
3. Conducting and contributing to the improvement of effective control by reviewing and evaluating internal control in all activity units within the Company;
4. Performing other special assignments according to the assignment from the President Director;
5. Providing suggestions for improvement and objective information on activities that are audited at all levels of management to improve systems, procedures, budgets and policies;
6. Preparing a report on audit results and submitting the report to the President Director;
7. Monitoring, analyzing and reporting on the implementation of the recommended follow-up improvements; and
8. Developing and improving the Company's IAU standards and guidelines.

Rights and Authorities

In order for the implementation of the duties and responsibilities of the internal auditors to be effective, all personnel of PPI's Internal Audit Unit are authorized to do the following:

1. Determining the strategy, scope, method and frequency of internal audit independently;
2. Obtaining information from all work units and employees within the Company and its subsidiaries/ Divisions/Work Units and unlimited access to all functions, records, property and employees of the Company as long as they are relevant to the scope of the examination;
3. Obtaining information from professional sources/ experts related to the audit process of the Company and its Subsidiaries;
4. Conducting a physical review of all assets belonging to the Company and its Subsidiaries;
5. Submitting the audit result report to the President



6. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); dan
7. Melakukan penugasan audit khusus sesuai penugasan Direktur Utama.

Independensi SPI

Seluruh personil SPI bekerja secara profesional, independen, dan objektif, serta berperan sebagai mitra manajemen yang mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan membantu Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal menyatakan kesungguhannya untuk bekerja sesuai standar baku yang berlaku dan mematuhi kode etik profesional yang telah ditetapkan.

Kode Etik SPI

Seluruh personil SPI wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan pokok-pokok Kode Etik profesi auditor internal sebagaimana telah ditetapkan perseroan, antara lain:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi Perusahaan dan Internal Audit Perusahaan.
3. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan SPI senantiasa harus mempertahankan sikap independen.
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi SPI atau Perusahaan.
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas/ kewajiban secara objektif.
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional SPI.
7. Mematuhi sepenuhnya standar profesional SPI, code of conduct Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
8. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Perusahaan.
9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apa pun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra Perusahaan.

Director;

6. Conducting audits in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT); and
7. Carrying out special audit assignments according to the President Director's assignment.

IAU Independency

All IAU personnel work professionally, independently and objectively, and act as management partners who are able to provide added value to the Company and assist the Board of Directors in implementing GCG principles. In carrying out their duties, internal auditors express their sincerity to work according to applicable standards and comply with the established professional code of conduct.

IAU Code of Conduct

All IAU personnel are required to act and behave in accordance with the main points of the internal auditor's professional code of conduct as determined by the Company, including:

1. Behave and be honest, objective, careful in carrying out their duties and responsibilities.
2. Have high integrity and loyalty to the Company's profession and the Company's Internal Audit.
3. All matters relating to the IAU assignment must always maintain an independent attitude.
4. Avoid activities or actions that are detrimental or reasonably suspected to be detrimental to the IAU profession or the Company.
5. Avoid activities that conflict with the interests of the Company or result in being unable to carry out their duties/obligations objectively.
6. Do not accept gifts in any form and from anyone, either directly or indirectly, including from the object of the assignment, clients, customers, suppliers, partners and/or parties with an interest in the Company that interfere or are reasonably suspected to interfere with IAU's professional judgment.
7. Fully comply with IAU professional standards, the Company's code of conduct and laws and regulations.
8. Maintain the morals and dignity of the Company.
9. Do not use the information obtained for personal interests or gains or other matters for any reason that can cause or is reasonably suspected to cause harm to the Company, in terms of financial and in terms of the image of the Company.



10. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apa pun yang diketahuinya karena menjalankan tugas SPI kepada siapa pun, kecuali melalui izin tertulis dari Direktur Utama.
11. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.

10. It is not allowed to disclose any information about IAU duties to anyone, except through written permission from the President Director.

11. Report all material assignment results by disclosing the truth according to existing facts and do not hide things that may harm the Company and or may constitute a violation of the law.

Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI Tahun 2022

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berfungsi sebagai landasan dan acuan kerja bagi seluruh personil SPI dalam menjalankan kegiatan audit internal. PKPT yang disusun oleh SPI harus mendapat persetujuan Direktur Utama dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum resmi ditetapkan. Penyusunan kerangka PKPT dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based sehingga dalam hal ini SPI berkoordinasi aktif dengan Komite Manajemen Risiko.

Berikut ini adalah uraian realisasi PKPT SPI Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

IAU Annual Audit Work Program 2022

The Annual Audit Work Program (PKPT) serves as the basis and work reference for all IAU personnel in carrying out internal audit activities. The PKPT prepared by IAU must be approved by the President Director and submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee for consideration and advice before being officially stipulated. The preparation of the PKPT framework is carried out using a risk or risk-based approach so that in this case IAU is actively coordinating with the Risk Management Committee.

The following is a description of the realization of the 2022 IAU PKPT:

Realisasi PKPT vs Target PKPT Realization vs Target						
No.	Objek Kegiatan Activities	Realisasi Audit / Audit Realization			Target	%
		Regular	Remote	Total		
1	Audit Kinerja/Operasional Kantor Cabang Branch Office Performance/ Operational Audit	6	-	6	8	75
2	Audit Tematik Thematic Audit	3	-	3	4	75
3	Audit Kinerja/Operasional Anak Perusahaan Performance/Operational Audit of Subsidiaries	1	-	1	1	100
4	Pendampingan Audit KAP PAF Audit Assistance	2	-	2	2	100
5	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	1	-	1	1	100
6	Pengembangan Manajemen SPI IAU Management Development	4	-	4	4	100
7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Monitoring Follow-up of Audit Results	8	-	8	8	100



8	Kegiatan Konsultasi Consultation Activities	14	-	14	10	140
9	Desk Reviu Kegiatan Cabang Usaha Desk Review of Business Branch Activities	24	-	24	24	100
10	Pemeriksaan Khusus/PDPT Special Examination/PDPT	5	-	5	2	250
11	Kegiatan Lainnya Diluar PKPT Other Activities Outside PKPT	5	-	5	0	-

Laporan Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2022

Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak proses audit dalam melaksanakan pemeriksaan/audit ke Unit Kerja khususnya Kantor Cabang. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI tidak dapat berjalan optimal dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksa dan juga akibat dari penerapan kebijakan pandemi COVID-19.

Walau berhadapan dengan keterbatasan, SPI tetap melaksanakan sejumlah program kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikut ini adalah realisasi program kerja SPI Perseroan Tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

Report on IAU Duty Implementation in 2022

The COVID-19 pandemic that occurred this year had an impact on the limited space for the audit process in carrying out inspections/audits to Work Units, especially Branch Offices. Thus, the realization of the IAU Annual Audit Work Program (PKPT) could not run optimally due to the limited number of examiners and also as a result of the implementation of the COVID-19 pandemic policy.

Despite facing limitations, IAU continues to carry out a number of work programs while still implementing very strict health protocols. The following is the realization of the Company's IAU work program in 2022:

No	Kegiatan Activities	Waktu Date	Realisasi Pelaksanaan Realization
Kegiatan Audit Audit Program			
1	Audit Kinerja/ Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Ambon Performance/Operational Audit of Business Activities at Ambon Branch	Mei-Juni May-June	Juli-Agustus July-August
2	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Yogyakarta Performance/Operational Audit of Business Activities in Yogyakarta Branch	Juni-Juli June-July	September-Oktober September-October
3	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Kupang Performance/Operational Audit of Business Activities at Kupang	November-Desember November-December	Oktober-Desember October-December
4	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Pangkal Pinang Performance/Operational Audit of Business Activities in Pangkal Pinang Branch	Mei-Juni May-June	Juli-Agustus July-August



5	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Palembang Performance/Operational Audit of Business Activities at Palembang Branch	Agustus-September August-September	September-Oktober September-October
6	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Jakarta Performance/Operational Audit of Business Activities in Jakarta Branch	November-Desember November-December	-
7	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Pare-Pare Performance/Operational Audit of Business Activities in Pare-Pare Branch	Agustus-September August-September	-
8	Audit Kinerja/Operasional atas Kegiatan Usaha di Cabang Cirebon Performance/Operational Audit of Business Activities at Cirebon Branch	Juni-Juli June-July	Oktober-November October-November
9	Audit Tematik Pengelolaan Aset PT PPI Thematic Audit of PT PPI Asset Management	Januari-Februari January-February	Februari-April February-April
10	Audit Tematik Pengadaan Barang dan Jasa Non Barangan Dagangan Thematic Audit of Procurement of Non-Merchandise Goods and Services	Januari-Februari January-February	-
11	Audit Kinerja/Operasional PT PPI Industri Performance/Operational Audit of PT PPI Industri	Maret-April March-April	April-Agustus April-August
12	Audit Tematik Pengelolaan WIS Thematic Audit of WIS Management	September-November September-November	November-Desember November-December
13	Audit Tematik Pengelolaan Warung Pangan Thematic Audit of Warung Pangan Management	September-November September-November	November-Desember November-December
Kegiatan Non-Audit Non-Audit Program			
1	Audit Kinerja/Operasional PT PPI Industri KAP Audit Assistance	Maret-April March-April	April-Agustus April-August
2	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	Februari February	Februari February
3	Pengembangan Manajemen Dep. SPI (IACM, Perbaikan SOP, dan lain-lain) Management Development Dep. SPI (IACM, SOP Improvement, etc.)	Maret-Desember March-December	Maret-Desember March-December
4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Monitoring Follow-up of Internal Audit Results	Januari, April, Juli, Oktober January, April, July, October	Januari, April, Juli, Oktober January, April, July, October



5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Monitoring Follow-up of External Audit Results	Januari, April, Juli, Oktober January, April, July, October	Januari, April, Juli, Oktober January, April, July, October
6	Kegiatan Konsultasi Consultation Activities	Februari-November February-November	Februari-November February-November
7	Desk Reviu Kegiatan Cabang Usaha Desk Review of Business Branch Activities	Maret-Desember March-December	Maret-Desember March-December
8	Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Persediaan Surabaya Special Inspection of Surabaya Inventory Management	-	Januari-Maret January-March
9	Pemeriksaan Khusus Unit Pengolahan Pupuk Medan dan Lampung Pemeriksaan Khusus Unit Pengolahan Pupuk Medan dan Lampung	-	Mei-September May-September
10	Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Persediaan Surabaya (Jember) Special Inspection of Inventory Management Surabaya (Jember)	-	Agustus-September August-September
11	Reviu Cashflow Cashflow Review	-	November-Desember November-December
12	Pendampingan Audit P3DN dari BPKP P3DN Audit Assistance from BPKP	-	Agustus-September August-September
13	Pendampingan Audit Investigasi SPI BLI SPI BLI Investigation Audit Assistance	-	November-Desember November-December

Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Pada tahun 2022, PPI tidak memiliki komite-komite di bawah direksi. Semua tugas dan kewenangan yang umumnya ada pada komite direksi dapat ditangani langsung oleh direksi. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi transparansi, etika, dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan Perusahaan. Selain itu, PPI juga memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap menjadi prioritas utama.

In 2022, PPI will not have committees under the board of directors. All duties and authorities that are generally on the board of directors committee can be handled directly by the directors. However, this does not reduce transparency, ethics and compliance in the Company's decision making. In addition, PPI also ensures that the interests of shareholders remain a top priority.



Akuntan Publik

Public Accountant

Laporan Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai pihak eksternal yang bekerja secara independen untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui mekanisme RUPS Tahunan.

Mekanisme penunjukan KAP dimuat di dalam Board Manual serta sudah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pembahasan terkait penunjukan calon Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan perusahaan dengan melibatkan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap calon Auditor Eksternal dalam proses penunjukannya.

Hal ini tercantum di dalam Memo Dinas Komite Dewan Komisaris Nomor: 10/KA/VI/2020 dan 10/KMR/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Usulan Penetapan Kembali KAP Dalam Rangka General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI (Tahun Buku 2021). Berdasarkan Memo Dinas tersebut diketahui bahwa Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap kinerja KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang telah melakukan audit pada tahun buku sebelumnya untuk selanjutnya diusulkan kembali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penetapan KAP dan Akuntan Publik Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Report on IAU Duty Implementation Appointment Mechanism of Public Accounting Firm (KAP)

The Company uses the services of a Public Accounting Firm ("KAP") as an external party that works independently to provide opinions regarding the suitability of the presentation of the Company's financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. The appointment of a Public Accountant and KAP to audit the Consolidated Financial Statements and PKBL Financial Statements is proposed by the Board of Commissioners for further submission and approval of shareholders through the Annual GMS mechanism.

The mechanism for appointing KAP is contained in the Board Manual and has been established as part of the 2021 Board of Commissioners' Work Program. In its implementation, the Board of Commissioners conducts discussions regarding the appointment of prospective External Auditors who will audit the company's financial statements by involving the Audit Committee and the Risk Management Committee. Through the Audit Committee, the Board of Commissioners evaluates candidates for External Auditor in the process of their appointment.

This is stated in the Office Memo of the Committee of the Board of Commissioners Number: 10/KA/VI/2020 and 10/KMR/VI/2020 dated June 11, 2020 regarding Proposal for Re-appointment of KAP in the Context of General Audit of the 2021 Consolidated Financial Statements of PT PPI. Based on the Service Memo, it is known that the Audit Committee has evaluated the performance of KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners who had audited in the previous fiscal year to be proposed again to audit the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and PKBL Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021.

Implementation of External Audit Function

The determination of KAP and the Company's Public Accountant refers to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 article 3 paragraph 1 which states that the provision of general audit services on the financial statements of an entity is carried out by KAP for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant no later than for 3 (three) consecutive fiscal years.



Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komunikasi yang terjalin di antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit, dan Manajemen senantiasa berjalan efektif dan efisien. Selama proses audit berlangsung, KAP berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Oleh karena itu, auditor eksternal dan Komite Audit secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Pada saat menjalankan kegiatan audit, Komite Audit dan KAP melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan menyampaikan hasil auditnya saat *exit meeting*.

Coordination of External Auditor and Audit Committee

The communication between the Public Accounting Firm (KAP), the Audit Committee, and the Management always runs effectively and efficiently. During the audit process, KAP coordinates with the Audit Committee to request input/suggestions on areas that receive special attention from the Audit Committee. Therefore, the external auditor and the Audit Committee regularly meet to discuss several significant important issues. When carrying out audit activities, the Audit Committee and KAP conduct discussions regarding the findings obtained by the KAP and submit the audit results at the exit meeting.

Lingkup Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Eksternal

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Scope of Responsibilities of Management and External Auditor

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements in accordance with the principles of SAK applicable in Indonesia as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Meanwhile, the external auditor is responsible for providing an audit opinion on the financial statements that have been prepared by management based on auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Daftar Akuntan Publik Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai daftar KAP, Akuntan Publik, serta jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

List of Public Accountants in the Last 5 (Five) Years

The following is complete information regarding the list of KAPs, Public Accountants, as well as services provided and fees charged to the Company in the past 5 (five) years, namely:





Tahun Buku Fiscal Year	Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya (Rp) Fee (Rp)	Jasa Audit Audit Service	Opini Audit Audit Opinion
2022	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Bandana, S.E., AK., CA., CPA., Asean CPA	Rp 874.090.909	a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021. b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. c) Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI. d) Audit Keuangan a) Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PPI and Subsidiaries for the 2021 Financial Year. b) Compliance Audit of laws and regulations and internal control system. c) Review services for PT PPI Performance Evaluation Report. d) Financial Audit	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2021	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Bandana, S.E., AK., CA., CPA., Asean CPA	Rp485.000.000	a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021. b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. c) Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI. d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2021. a) Auditing Consolidated Financial Statements of PT PPI and Subsidiaries for Fiscal Year 2021. b) Auditing Compliance with laws and regulations and internal control system. c) Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2021.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2020	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("Kreston HHES")	Welly Adrianto, CPA	Rp660.000.000	a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2020. b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. c) Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI. d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2020. a) Auditing the Consolidated Financial Statements of PT PPI and its Subsidiaries for Fiscal Year 2020. b) Auditing compliance with laws and regulations and internal control system. c) Reviewing services on the Performance Evaluation Report of PT PPI. d) Auditing PKBL Financial Statements for Fiscal Year 2020.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects



2019	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo ("Kreston HHES")	Welly Adrianto, CPA	Rp645.000.000	a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2019. b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. c) Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI. d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2019.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Djoko Sutardjo	Rp610.000.000	a) Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPI dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2018. b) Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. c) Jasa review atas Laporan Evaluasi Kinerja PT PPI. d) Audit Keuangan PKBL Tahun Buku 2018.	Wajar dalam semua hal yang material Reasonable in all material respects

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Selama pelaksanaan audit, KAP tidak memberikan jasa lain kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selain jasa audit. Pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Other Services Provided by the Public Accounting Firm

During the audit, KAP did not provide other services to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia other than audit services. The implementation of the audit process is independent and there is no conflict of interest.



Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Auditor

Findings and Follow Up on Auditor Findings

Resume Laporan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal

Resume of External Auditor Findings Follow-up Report

Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK

Completion and Follow-up Monitoring of BPK Findings and Recommendations

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 dan Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia per 30 Juni 2022:

Follow-up of BPK audit results based on the Report on the Results of Monitoring Follow-up of Audit Recommendations for the Year 2022 dated September 9, 2022 and the Resume of Monitoring Follow-up of Audit Recommendations at PT Perusahaan Perdagangan Indonesia as of June 30, 2022:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

- a. Telah sesuai rekomendasi; 36 rekomendasi
- b. Sebanyak 7 belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut.
- c. Belum ditindaklanjuti; 0 rekomendasi

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

- a. Has been in accordance with the recommendations; 36 recommendations
- b. A total of 7 are not in accordance with the recommendations and are in the process of follow-up.
- c. Not yet followed up; 0 recommendations

Eks PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)

- a. Telah sesuai rekomendasi; 29 rekomendasi
- b. Sebanyak 5 belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut.
- c. Belum ditindaklanjuti; 0 rekomendasi

Former PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)

- a. Has complied with recommendations; 29 recommendations
- b. A total of 5 are not in accordance with the recommendations and are in the process of follow-up.
- c. Not yet followed up; 0 recommendations





Manajemen Risiko

Risk Management

Kebijakan Manajemen Risiko

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta tugas dari pemerintah, PPI menghadapi tantangan, hambatan, dan rintangan dari internal maupun eksternal perusahaan, serta adanya perubahan kondisi bisnis, ekonomi, dan politik nasional dan internasional yang bergerak sangat cepat dan dinamis. Dengan adanya penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan, maka identifikasi dan penanganan terhadap tantangan, hambatan dan rintangan dapat dilakukan secara sistematis agar dampak/risikonya terhadap perusahaan dapat dieliminasi dan diminimalisasi. Dengan demikian misi Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan visi Perusahaan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai panduan teknis dalam penerapan manajemen risiko, PPI telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko berdasarkan dokumen Nomor F-10/POB/PPI/IX/2018 yang bertujuan sebagai acuan dan panduan bagi pimpinan dan karyawan dalam melaksanakan penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko untuk menunjang keberhasilan operasional Perusahaan agar dapat menghilangkan atau meminimalkan risiko yang kemungkinan akan terjadi.

Kebijakan Manajemen Risiko

PPI berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko yang berkelanjutan dengan menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018.

Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua unit kerja di lingkungan PPI wajib melaksanakan Manajemen Risiko untuk semua aktivitas bisnis dan untuk kepentingan perusahaan.
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu (Enterprise Risk Management).
3. Manajemen Risiko merupakan bagian dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang baik.
4. Semua unit kerja agar terlibat dalam proses penyusunan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta monitoring risiko, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada setiap tahun anggaran.
5. Pengelolaan Risiko merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) semua unit kerja di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Risk Management Policy

To achieve the vision and conduct the mission and duties of the government, PPI faces challenges, obstacles and hindrances from internal and external companies, as well as changes in business, economic, and national and international political conditions as well that move very quickly and dynamically. With the implementation of Risk Management in the Company, the identification and handling of challenges, obstacles and hindrances can be conducted systematically so that the impact/risk on the company can be eliminated and minimized. Thus, the Company's mission can be performed well and the Company's vision can be achieved according to the set targets.

As a technical guideline in implementing risk management, PPI has developed Risk Management Policies and Guidelines based on document Number F-10/POB/PP/IX/2018 which aims at serving as a reference and guide for leaders and employees in implementing and developing Risk Management to support success. Company operations in order to eliminate or minimize risks that are likely to occur.

PPI is committed to implementing sustainable Risk Management by compiling a Risk Management Policy that has been set by the President Director based on the Decree of the Board of Directors No.15/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018.

Risk Management Policy is implemented with the following conditions:

1. All work units within PPI are required to conduct Risk Management for all business activities and for the benefit of the company.
2. The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees are required to implement integrated Risk Management (Enterprise Risk Management).
3. Risk management is a part of the implementation of good Good Corporate Governance (GCG).
4. All work units should be involved in the process of preparing identification, analysis, evaluation, control, and risk monitoring, which are integrated with the Company's Work Plan and Budget (CWPB) in each fiscal year.
5. Risk Management is one of the Key Performance Indicators (KPI) of all work units within PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.



Kebijakan Manajemen Risiko

Risk Management Policy



Prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan oleh PPI mengacu pada ISO 31000:2009

The Risk Management Principles Applied By PPI refer to ISO 31000: 2009

Prinsip Manajemen Risiko Principles of Risk Management	Penjelasan Description
Menciptakan Nilai Tambah Creating Added Value	Manajemen Risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan performansi perusahaan. Risk management contributes to achieving goals and improving company's performance.
Bagian Terpadu dari Proses Organisasi As an Integrated Part of the Organizational Process	Manajemen Risiko bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, terpisah dari aktivitas dan proses utama perusahaan, namun menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian penting dari perusahaan. Risk management is not a stand-alone activity, separate from the company's main activities and processes, but is a part of management responsibility and an important part of the company.
Bagian dari Pengambilan Keputusan As a Part of Decision Making	Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan yang terinfo, memprioritaskan aksi dan membedakan antar beberapa pilihan jalur alternatif. Risk Management helps decision makers get informed choices, prioritize actions and differentiate between alternative pathway options.
Secara Eksplisit Menangani Ketidakpastian Dealing with Uncertainty Explicitly	Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut dan cara menangani ketidakpastian tersebut. Risk Management explicitly takes into account uncertainty, the nature of the uncertainty and the way it is handled.



Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Tepat Waktu Systematic, Structured and Timely	Pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu pada manajemen risiko membantu efisiensi dan mendapatkan hasil yang konsisten, komparabel dan reliabel. A systematic, structured and timely approach to risk management helps efficiency and produces consistent, comparable and reliable results.
Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia Based on the Best Available Information	Masukan proses manajemen risiko berdasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman umpan balik <i>stakeholders</i>, pengamatan, perkiraan, dan pertimbangan pakar. Input of the risk management process based on sources of information such as historical data, stakeholder feedback experiences, observations, estimates, and expert judgment.
Disesuaikan Customized	Manajemen Risiko diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal perusahaan, beserta profil risiko perusahaan. Risk management is aligned with the company's internal and external context, as well as the company's risk profile.
Mempertimbangkan Faktor Manusia dan Budaya Considering Human and Cultural Factors	Manajemen Risiko mempertimbangkan kemampuan persepsi dan tujuan manusia, baik di dalam maupun di luar perusahaan, baik yang dapat memudahkan maupun menyulitkan pencapaian tujuan perusahaan. Risk Management considers the ability of perceptions and human goals, both inside and outside the company, which can facilitate or complicate the achievement of company's goals.
Bersifat Transparan dan Inklusif Be Transparent and Inclusive	Keterlibatan secara tepat waktu <i>stakeholder</i> dan khususnya pengambil keputusan pada seluruh tingkatan perusahaan memasukkan manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Timely involvement of stakeholders and particularly decision makers at all levels of the company to make risk management remains relevant and current.
Bersifat Dinamis, Berulang, dan Responsif terhadap Perubahan Be Dynamic, Repetitive, and Responsive to Change	Manajemen Risiko terus-menerus merasakan dan merespon perubahan. Risk Management is continually sensing and responding to change.
Membantu Peningkatan Organisasi Secara Terus-Menerus Helping Sustainable Organizational Improvement	Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kedewasaan manajemen risiko perusahaan, disamping seluruh aspek lain dalam perusahaan. Organizations must develop and implement strategies to improve the maturity of corporate risk management, in addition to all other aspects of the company.



Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerja manajemen risiko. Untuk itu, Perusahaan telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif. Kerangka kerja manajemen risiko diperlukan untuk menjadi dasar pelaksanaan seluruh aktivitas manajemen risiko di semua tingkatan perusahaan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko tergantung pada keefektifan kerangka kerja manajemen untuk menyediakan pedoman yang diterapkan pada keseluruhan level perusahaan.

Kerangka kerja memastikan informasi tentang risiko yang diturunkan dari proses manajemen risiko dilaporkan secara layak dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta akuntabilitas pada seluruh tingkatan perusahaan. Adapun skema kerangka kerja Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

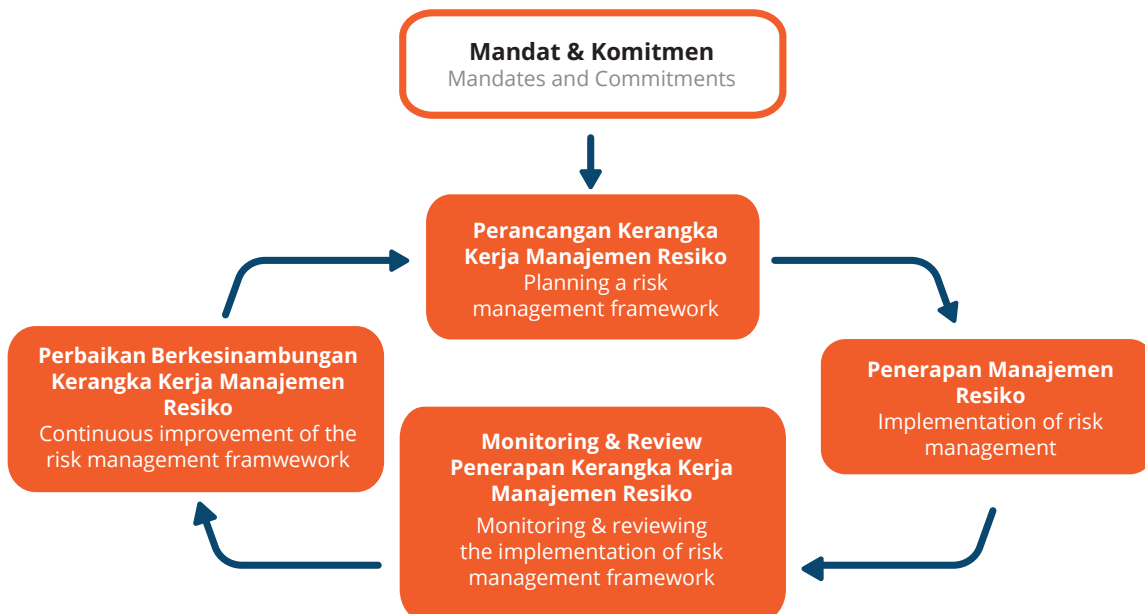
Framework of Risk Management

The success of risk management implementation depends on the effectiveness of risk management work. To that end, the Company has developed a risk management framework so that the implementation of risk management is able to run effectively. A risk management framework is needed to form the basis for the implementation of all risk management activities at all levels of the company. The successful implementation of risk management depends on the effectiveness of the management framework to provide guidance that is applicable to all levels of the company.

The framework ensures that information about risks derived from the risk management process is properly reported and used as the basis for decision making and accountability at all levels of the company. The Company's risk management framework scheme is as follows:

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan

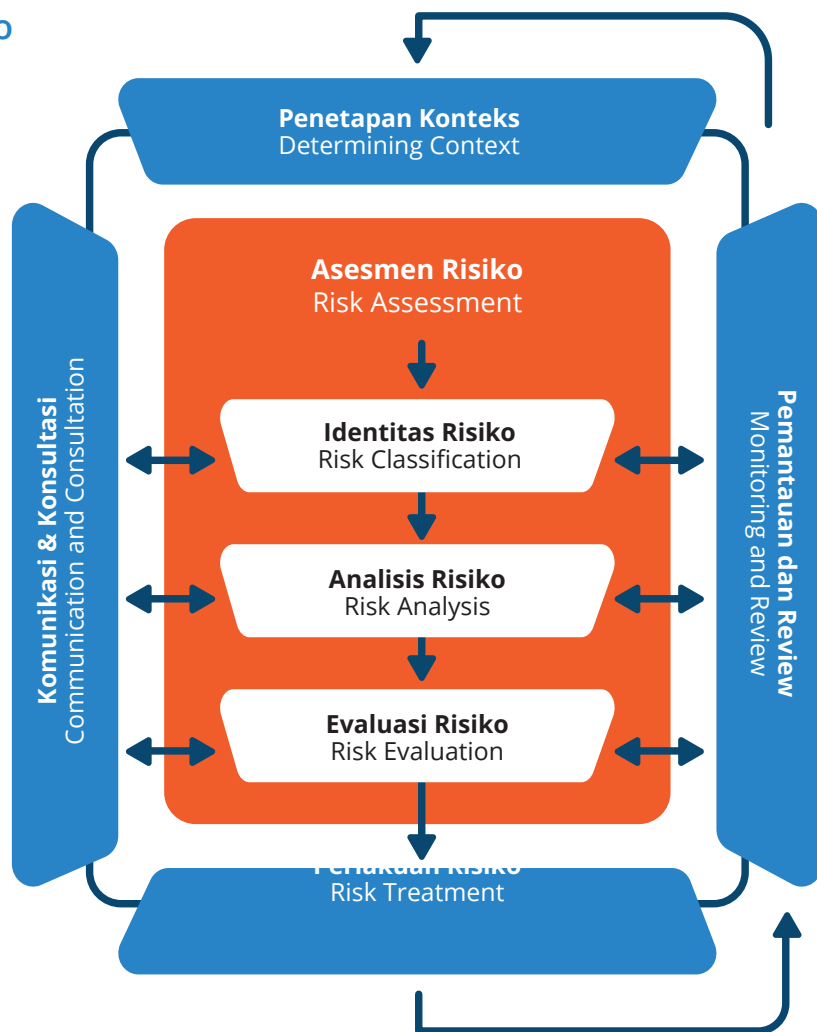
Planning A Risk Management Framework





Proses Manajemen Risiko

Process of Risk Management



Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko di PPI dimulai dari penetapan konteks dengan mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan sekitar sasaran yang akan dicapai, stakeholder yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Kemudian dilakukan asesmen risiko yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko serta perlakuan risiko yang dilakukan dengan perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Adapun proses komunikasi dan konsultasi dilakukan untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Process of Risk Management

The risk management process at PPI starts from setting the context by identifying and disclosing organizational goals, the environment around the targets to be achieved, interested stakeholders and the diversity of risk criteria. Then it is conducted a risk assessment consisting of identification, analysis and evaluation of risks and risk treatment done by planning for mitigating risks to obtain alternative solutions so that they can be applied effectively and efficiently.

The process of communication and consultation is conducted to ensure the availability of adequate support for each risk management activity and to enable each activity to achieve its targets precisely.



Selanjutnya proses *monitoring* dan review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan serta dengan audit manajemen risiko. Proses *monitoring* dan *review* dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari kebijakan pelaksanaan manajemen sehingga Manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko.

Furthermore, the monitoring and review process is performed through evaluation and examination of ongoing business processes as well as by risk management audits. The monitoring and review process can be done by internal and external parties with the aim of finding out the weaknesses of management implementation policies so that management can make updates to risk management policies.

Profil & Mitigasi Risiko

Perusahaan telah menetapkan profil dan langkah mitigasi risiko Tahun 2022 sebagai berikut:

Framework of Risk Management

The company has set the profile and risk mitigation steps for 2022 as follows:

Profil Risiko Perusahaan		
No.	Risiko	Realisasi Penanganan Risiko
1	Risiko target EBITDA kurang dari target Manajemen EBITDA target risk less than Management's target	a. Untuk komoditi Bahan Kimia telah dilakukan proses importasi dan telah diterima oleh Perusahaan di Gudang Stockpoint; For Chemical commodities, the importation process has been carried out and has been received by the Company at the Stockpoint Warehouse; b. Pupuk: Fertilizers: • Pada bulan Agustus manajemen puncak telah melakukan pertemuan dengan manajemen puncak PIHC untuk peninjauan status kedistributoran PPI sebagai Distributor Eksekutif (DE) pupuk non subsidi sebagai pengganti Distributor Utama, serta melakukan penawaran menjadi importir bahan kimia untuk kebutuhan anak perusahaan PIHC; • Pada bulan September sedang dilakukan evaluasi pada beberapa Kantor Cabang untuk pemenuhan persyaratan atas penunjukan Distributor Eksekutif (DE) prinsipal pupuk Petrokimia Gresik (PKG), Distributor Retail (DR) prinsipal pupuk Kujang dan Distributor Prioritas (DP) prinsipal Pupuk Kalimantan Timur (PKT). • Sampai dengan bulan Desember, pengajuan status kedistributoran pupuk non subsidi sebagai antisipasi perubahan regulasi distributor pupuk subsidi. • In August, top management met with PIHC top management to explore PPI's distribution status as an Executive Distributor (ED) of non-subsidized fertilizers as a substitute for the Principal Distributor, as well as to offer to become an importer of chemicals for the needs of PIHC subsidiaries; • In September, several Branch Offices are being evaluated to meet the requirements for the appointment of Executive Distributor (ED) of fertilizer principal Petrokimia Gresik (PKG), Retail Distributor (DR) of fertilizer principal Kujang and Priority Distributor (DP) of fertilizer principal East Kalimantan (PKT). • Until December, the submission of non-subsidized fertilizer distribution status in anticipation of changes in the regulation of subsidized fertilizer distributors.



c. Dharmabrand: | Dharmabrand:

- Kebijakan strata harga saat ini dalam persetujuan sirkuler dan akan berlaku pada bulan Juli 2022. diharapkan dengan adanya strata harga, Kantor Cabang dapat menyusun strategi penetrasi penjualan;
- Pada bulan Agustus telah mendapatkan persetujuan oleh Direksi atas kajian di antaranya program cashback, program bundling dan program branding kios tani;
- The price strata policy is currently under circular approval and will take effect in July 2022. It is expected that with the price strata, Branch Offices can develop sales penetration strategies;
- In August, the Board of Directors approved the review of the cashback program, bundling program and kiosk branding program;

d. Untuk program terobosan: | For breakthrough programs:

- Komoditi Hortikultura
- Komoditi Beras Khusus
- Horticultural Commodities
- Special Rice Commodity

2. Risiko piutang lewat jatuh tempo

Risk of past due receivables

Perusahaan berencana untuk melakukan optimalisasi performa pencairan piutang lewat jatuh tempo dan pada tahun 2022, penanganan yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

The Company plans to optimize the performance of overdue receivables disbursement and by 2022, the handling that has been carried out by the Company

3. Risiko ketersediaan bahan kimia (B2 dan Non B2)

Risk of past due receivables

a. Dalam proses penjajakan dan korespondensi sumber supply alternatif komoditi Bahan Kimia;

In the process of exploring and correspondence of alternative supply sources of commodity chemicals;

b. Dalam proses perpanjangan kerja sama dengan supplier komoditi Borax Decahydrate, Borax Pentahydrate dan Boric Acid. Sampai dengan bulan Desember:

- Sampai dengan bulan Desember, telah mendapatkan kesepakatan alokasi produk Borax Pentahydrate;
- Sampai dengan bulan Desember, untuk Borax Decahydrate masih melakukan negosiasi alokasi kuota.

In the process of extending cooperation with commodity suppliers of Borax Decahydrate, Borax Pentahydrate and Boric Acid. Until December:

- As of December, Borax Pentahydrate product allocation agreement has been obtained;
- As of December, Borax Decahydrate is still negotiating quota allocation.

c. Pada bulan Maret, telah berkoordinasi dengan pemasok alternatif Sodium Cyanide dari Australia dan Cina serta Borax dari Amerika Serikat, Cina dan India;

In March, coordinated with alternative suppliers of Sodium Cyanide from Australia and China and Borax from the United States, China and India;

d. Pada bulan November telah menyampaikan forecast alokasi untuk tahun 2023 dan dalam proses evaluasi oleh supplier Borax dari Amerika Serikat;

In November, has submitted allocation forecast for 2023 and in the process of evaluation by Borax supplier from the United States;



4. **Risiko volume penjualan komoditas Pupuk Subsidi dan Non Subsidi di bawah target**

Risk of sales volume of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizer commodities below target

- a. Melakukan upaya perluasan pasar di sektor perkebunan di mana potensi perkebunan masih terbuka namun PPI saat ini masih fokus pada sektor pertanian;

Make efforts to expand the market in the plantation sector where the potential for plantations is still open but PPI is currently still focused on the agricultural sector;

- b. Mengikuti program tender Pemerintah untuk penyaluran pupuk;

Participate in the Government tender program for fertilizer distribution

- c. Penambahan tenaga administrasi salesman untuk perluasan pasar di sektor perkebunan;

Addition of salesman administration personnel for market expansion in the plantation sector;

- d. Melakukan review modal kerja untuk pembelian persediaan Pupuk Non Subsidi;

Reviewing working capital for the purchase of Non-Subsidized Fertilizer supplies;

- e. Berdasarkan keputusan prinsipal PIHC bahwa satu entitas tidak dapat menjadi distributor utama Pupuk Subsidi dan Pupuk Non Subsidi, sehingga Perusahaan mengambil langkah strategis dengan melakukan pengalihan status kedistributoran utama Pupuk Non Subsidi ke PT PPI Industri.

Based on the decision of PIHC principals that one entity cannot be the main distributor of Subsidized Fertilizer and Non-Subsidized Fertilizer, so the Company took a strategic step by transferring the status of the main distributor of Non-Subsidized Fertilizer to PT PPI Industri.

5. **Risiko tingkat profitabilitas komoditas Pupuk Subsidi dan Non Subsidi di bawah target**

Risk of profitability levels of Subsidized and Non-Subsidized Fertilizer commodities below target

- a. Telah ditunjuk sebagai distributor Wilmar untuk Cabang Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung dan Medan dengan tujuan untuk mendapatkan harga jual yang kompetitif dan meningkatkan gross profit margin;

Has been appointed as Wilmar distributor for Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung and Medan Branches with the aim of obtaining competitive selling prices and increasing gross profit margin;

- b. Pada bulan Maret, PT PPI telah ditunjuk sebagai distributor pupuk SP-26 (PIHC) untuk Cabang Jambi dan Banda Aceh;

In March, PT PPI has been appointed as SP-26 fertilizer distributor (PIHC) for Jambi and Banda Aceh Branches;

- c. Pada bulan Maret, PT PPI telah mendapatkan penawaran harga party dari prinsipal pupuk KCI (Non PIHC);

In March, PT PPI has received a party quote from the principal of KCI fertilizer (Non PIHC);

- d. Pada bulan Maret, PT PPI telah melakukan sentralisasi pengadaan pupuk ZA (Non PIHC) untuk 9 Cabang (Cabang Purwokerto, Palu, Mataram. Malang, Makassar, Denpasar, Semarang, Kupang, dan Yogyakarta);

In March, PT PPI has centralized the procurement of ZA fertilizer (Non PIHC) for 9 Branches (Purwokerto Branch, Palu, Mataram. Malang, Makassar, Denpasar, Semarang, Kupang, and Yogyakarta);



- | | | |
|---|---|--|
| 6 | Risiko produk Dharmabrand tidak kompetitif

Risk that Dharmabrand products are not competitive | a. Menyusun program penjualan untuk meningkatkan pendapatan produk Dharmabrand;
Developed sales programs to increase revenue for Dharmabrand products;

b. Membentuk standarisasi program untuk key account management untuk menyusun strategi pendekatan dan maintainance relationship dengan customer;
Establish a standardized program for key account management to develop a strategy for approaching and maintaining relationships with customers;

c. Melakukan penambahan varian produk Dharmabrand;
Adding variants of Dharmabrand products;

d. Menyusun program promosi untuk kios pestisida dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan;
Develop a promotional program for pesticide kiosks with the aim of increasing demand; |
| 7 | Risiko ketersediaan pasokan dan kenaikan COGS produk Dharmabrand

Risk of supply availability and increase in COGS of Dharmabrand products | a. Melakukan pemetaan sebaran tanaman dan serangan hama di wilayah pemasaran guna menentukan strata harga produk Dharmabrand yang tepat untuk dipasarkan di masing-masing wilayah;
Mapping the distribution of crops and pest attacks in marketing areas to determine the right price strata for Dharmabrand products to be marketed in each region;

b. Melakukan forecast kebutuhan rutin untuk mengharmonisasi permintaan dan produksi dalam mengamankan ketersediaan dan harga produk;
Conducting routine demand forecasts to harmonize demand and production in securing product availability and prices;

c. Pada bulan Juni dalam proses persetujuan sirkuler dan akan berlaku pada bulan Juli 2022. diharapkan dengan adanya strata harga, margin dan biaya dapat dikendalikan dan terstandarisasi;
In June in the process of circular approval and will take effect in July 2022. it is expected that with the price strata, margins and costs can be controlled and standardized;

d. Pada bulan Juli telah terbit Surat Edaran Direksi No 02/DKP/SE/PPI/VII/2022 tentang Strata Harga Jual Dharmabrand periode Agustus – Desember 2022 dan Cover Area Distribusi Produk Dharmabrand;
In July, the Board of Directors Circular No. 02/DKP/SE/PPI/VII/2022 was issued regarding the Dharmabrand Selling Price Strata for the period August - December 2022 and the Dharmabrand Product Distribution Area Cover; |
| 8 | Risiko ketersediaan aset yang dapat dikomersialisasi | a. Melakukan penyesuaian harga sewa aset dengan memperhatikan kondisi aset saat ini;
Make adjustments to asset rental prices by taking into account the current condition of the asset;

b. Desentralisasi pengelolaan aset kepada Cabang untuk memudahkan melakukan pemeliharaan aset yang berada di wilayah kerja Cabang tersebut;
Decentralizing asset management to Branches to facilitate the maintenance of assets located in the Branch's working area; |



- c. Melakukan kerja sama dengan agen properti sebagai salah satu upaya memasarkan aset – aset yang akan dioptimalisasi;
Cooperating with property agents in an effort to market assets that will be optimized;
- d. Melakukan perbaikan ruang di Graha PPI yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 untuk selanjutnya agar dapat disewakan;
Repairing the space at Graha PPI which will be carried out in August 2022 so that it can be rented out;

Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pernyataan Direksi terkait kecukupan sistem manajemen risiko yang disampaikan melalui Peraturan Direksi Nomor 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah bahwa Perusahaan telah memetakan risiko, menetapkan risk appetite dan risk tolerance, melakukan monitoring risiko yang dilakukan setiap bulan, melakukan pengukuran tingkat kematangan risiko perusahaan, dan menambahkan kompetensi terkait manajemen risiko top to bottom pelatihan manajemen. Perihal pelatihan manajemen risiko ini juga ditunjukkan dengan penerapan pelatihan bersertifikasi kepada Kepala Divisi dan Manager bagian Manajemen Risiko serta Kepala Divisi dan Manager Satuan Pengawas Internal, hal ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko di dalam perusahaan.

System Adequacy of Risk Management

The Board of Directors' statement regarding the adequacy of the risk management system conveyed through Directors Regulation Number 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 concerning Risk Management Guidelines for PT Indonesian Trading Companies is that the Company has mapped risks, established risk appetite and risk tolerance, carried out appropriate risk monitoring. carried out every month, measuring the company's risk maturity level, and adding competencies related to top-to-bottom risk management management training. Regarding risk management training, this is also demonstrated by the implementation of certified training for Division Heads and Risk Management Managers as well as Division Heads and Internal Supervisory Unit Managers, this is a form of management's commitment to implementing Risk Management within the company.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Salah satu upaya perseroan dalam mendukung pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur perseroan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Aktivitas pengendalian internal pada lingkup perseroan secara garis besar bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja perseroan, memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Komitmen Direksi dan manajemen akan hal tersebut tercantum di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Internal Control System Policy

One of the Company's efforts to support the achievement of operational effectiveness and efficiency is by implementing a comprehensive Internal Control System involving elements of the Company, such as the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. Internal control activities within the Company broadly aim to assist management in supporting the achievement of the Company's performance objectives, providing adequate assurance regarding the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, risk management, effectiveness and efficiency of operations as well as to safeguard the Company's assets at every level of the organization. The commitment of the Board of Directors and management to this matter is stated in the Corporate Governance Guidelines.



Perseroan telah mengesahkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tanggal 15 September 2017. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja perseroan dalam menjalankan tata laksana sistem pengendalian internal pada lingkup perseroan serta dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan sistem deteksi dini perseroan.

Perseroan secara rutin mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada semua level, baik dalam hal penerapan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta pengelolaan risiko. Bagi perseroan, hasil evaluasi pengendalian internal tersebut berguna sebagai salah satu dasar untuk menentukan langkahlangkah perbaikan dan penyempurnaan yang harus

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Aktivitas pengendalian internal yang diterapkan PPI mengadopsi pendekatan standar internasional - COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) yang dirancang untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perseroan dalam rangka mencapai tujuan PPI.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan

PPI menjamin ketersediaan laporan yang wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kepatuhan Terhadap Perundangan- Undangan

PPI memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh PPI. Berlandaskan pada kerangka COSO, maka unsur-unsur pengendalian internal perseroan mencakup 5 (lima) komponen berikut ini:

1) Lingkungan Pengendalian

Komponen ini menjadi landasan utama bagi komponen pengendalian yang lain karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal serta mencerminkan komitmen, perilaku, dan kesadaran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan sistem pengendalian internal.

2) Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko

Kegiatan ini mengawali proses pengendalian internal

The Company has ratified the General Guidelines for the Internal Control System through the Decree of the Board of Directors Number: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 dated September 15, 2017. These guidelines are used as a reference for all work units of the Company in carrying out the internal control system management within the Company and in order to encourage implementation of the Company's responsibilities and early detection system.

The Company routinely evaluates the effectiveness of internal control at all levels, in terms of implementing policies, procedures, internal control and risk management. For the Company, the results of the evaluation of internal control are useful as a basis for determining corrective and improvement steps that must be taken to enable management to carry out

Conformity of the Internal Control System with the COSO Framework

The internal control activities implemented by the Company adopt an international standard approach - COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) which is designed to achieve 3 (three) main objectives, namely:

1. Operational Effectiveness and Efficiency

This activity is intended to improve the effectiveness and efficiency of the Company's resource management in order to achieve PPI's objectives.

2. Reliability of Financial Reporting

PPI guarantees the availability of fair, timely and relevant reports, as the basis for making appropriate and accountable decisions.

3. Compliance with Legislation

PPI ensures that all activities carried out always comply with the applicable laws and regulations, as well as in accordance with the internal procedures established by PPI. Based on the COSO framework, the elements of the Company's internal control include the following 5 (five) components:

1) Control Environment

This component is the main basis for other control components because it greatly influences the effectiveness of internal control and reflects the commitment, behavior, and awareness of the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing the internal control system.

2) Risk Identification, Measurement and Management

This activity starts the overall internal control process



secara keseluruhan karena sangat menentukan bentuk design sistem pengendalian yang dibutuhkan serta menentukan apakah suatu pengendalian diperlukan atau tidak bagi perusahaan.

3) Aktivitas Pengendalian

Pada lingkup aktivitas pengendalian, manajemen memastikan bahwa perseroan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian ini dituangkan dalam dokumen tertulis baik berupa kebijakan ataupun prosedur yang harus ditaati oleh seluruh insan PPI. Aktivitas pengendalian melibatkan semua tingkatan manajemen mulai level Direksi sampai dengan individu (first line of defence) yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

4) Sistem Informasi dan Komunikasi

PPI menjamin ketersediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi semua lini manajemen hingga individu yang berada di posisi first line of defense. Selain itu, komponen ini juga mendorong perseroan untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal PPI secara keseluruhan.

5) Pemantauan

Aktivitas pemantauan merupakan komponen yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengendalian internal perseroan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh first line of defence dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Auditor Internal/ Eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal senantiasa berjalan efektif.

because it really determines the form of control system design needed and determines whether a control is needed or not for the company.

3) Control Activities

In the scope of control activities, management ensures that the Company has taken appropriate action to prevent the occurrence of a risk event. This control activity is stated in a written document in the form of policies or procedures that must be adhered to by all Company personnel. Control activities involve all levels of management from the Board of Directors level to individuals (first line of defense) who are in charge of carrying out daily operational activities.

4) Information and Communication Systems

PPI ensures the availability of relevant, accurate, and timely information for all management lines to individuals who are in the first line of defense. In addition, this component also encourages the Company to ensure the reliability of financial reporting, as well as compliance with applicable regulations. The information and communication components are a vital part of PPI's overall internal control system.

5) Monitoring

Monitoring activity is a very important component in the Company's overall internal control system. These activities are carried out routinely by the first line of defense and their superiors, as well as separate evaluations by the Board of Directors, Board of Commissioners, or Internal/External Auditors. This is done to ensure that the internal control system is always running effectively.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PPI mencakup aspek Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan. Implementasi pengendalian internal dari sisi operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan baik berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja. Selain itu, PPI juga melakukan pemeriksaan fisik aset secara ketat guna mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan.

Sementara itu, upaya pengendalian internal pada aspek Akuntansi/Keuangan dilakukan dengan melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pemborosan.

Financial and Operational Control System

Internal control activities carried out by PPI cover aspects of Operations, Accounting/Finance and Compliance. Implementation of internal control in terms of operations is further elaborated into various policies in the form of Guidelines, Operational Instructions, and Work Instructions. In addition, the Company conducts a strict physical inspection of assets to secure and protect the Company's assets.

Meanwhile, internal control efforts in the Accounting/ Finance aspect are carried out by separating functions, duties, and responsibilities to prevent fraud and waste. PPI also uses reliable accounting software to ensure



PPI juga menggunakan software Akuntansi yang dapat diandalkan untuk menjamin akurasi pencatatan atas transaksi yang terjadi serta menyiapkan dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

Selain menguji pengendalian pada aspek Operasional dan Akuntansi / Keuangan, PPI juga menjaga derajat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan lini bisnisnya sebagai entitas BUMN yang bergerak di sektor perdagangan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya

Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif pada setiap jenjang organisasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, PPI mendapati sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen antara lain:

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal menunjukkan bahwa masih terdapat 82 rekomendasi yang masih dalam proses/ belum ditindaklanjuti oleh manajemen. Pada Tahun 2022 dalam pemeriksaan Kantor Cabang, Divisi SPI menemukan adanya *fraud* yang dilakukan oleh oknum pegawai di Kantor Cabang Surabaya. Permasalahan yang ditemukan di antaranya adalah pembayaran uang omzet/piutang yang tidak disetorkan oleh oknum salesman kepada Kantor Cabang Surabaya dan tidak difakturkannya persediaan yang telah dijual dengan nilai total kerugian sebesar kurang lebih Rp5,2 M.

the accuracy of recording transactions that occur and prepares good documentation of control events and transactions.

In addition to testing controls on Operational and Accounting / Financial aspects, the Company also maintains its degree of compliance with laws and regulations relevant to its line of business as an SOE entity engaged in the trading sector.

Financial and Operational Control

Finance

The implementation of internal control in the financial sector focuses on accounting and reporting of financial transactions, including commitments, authorizations, and receipts and disbursements of money.

Operational Field

Implementation of internal control in the operational field focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient manner to fulfill the mission and objectives of the Company.

Compliance with Legislation

Implementation of internal control in the field of compliance focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies and procedures.

Evaluation of the Implementation of the 2022 Internal Control System and its Follow-up

The Internal Supervisory Unit (SPI) conducts thorough testing of the adequacy of a reliable and effective Internal Control System at every level of the organization. Based on the evaluation that has been carried out during 2022, PPI found a number of improvement recommendations that must be followed up by management, among others:

1. Monitoring Follow-up of Internal Audit Results.

Based on the results of monitoring follow-up on the results of internal examinations, it shows that there are still 82 recommendations that are still in process / have not been followed up by management. In 2022, during the inspection of the Branch Office, the SPI Division found fraud committed by unscrupulous employees at the Surabaya Branch Office. The problems found included the payment of turnover / receivables that were not deposited by unscrupulous salesmen to the Surabaya Branch Office and the non-factualization of inventories that had been sold with a total loss of approximately Rp5.2 million. For



Terhadap hal tersebut telah diberikan sanksi kepada yang bersangkutan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan diproses secara perdata di Pengadilan.

2. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan data yang SPI terima dari Unit Kerja dan validasi dari Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK, sampai dengan bulan Desember 2022 diketahui dari 14 Temuan dan 43 rekomendasi, tersisa 5 temuan dengan 8 rekomendasi yang masih dalam status dalam proses/belum sesuai rekomendasi. Terhadap temuan tersebut, manajemen telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjutinya namun belum seluruhnya terselesaikan.

3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP.

Sesuai dengan data hasil monitoring atas hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik sampai dengan bulan Desember 2022, masih terdapat beberapa temuan yang masih dalam proses atau belum selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

a. Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 temuan (2019 s.d. 2021) masih terdapat 3 temuan yang masih dalam proses atau belum selesai ditindaklanjuti oleh Manajemen antara lain:

- 1) HGB yang habis masa berlakunya;
- 2) Kontrak JOTRC yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 3) Terdapat aset tanah dan bangunan yang belum ada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Terhadap temuan tersebut, manajemen telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjutinya, namun belum seluruhnya terselesaikan.

b. Temuan Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 27 temuan (2019 s.d. 2021) masih terdapat 8 temuan yang masih dalam proses atau belum selesai ditindaklanjuti, antara lain terkait:

- 1) Sistem ERP yang belum berjalan dengan optimal;
- 2) Terdapat rangkap jabatan;
- 3) Terdapat penyetoran penerimaan tagihan piutang yang tidak sesuai SOP;
- 4) Pemberian kredit kepada pelanggan yang melebihi batas maksimal pemberian transaksi;
- 5) Kurang tertibnya administrasi sesuai SOP "Ketentuan Dan Prosedur Penagihan"
- 6) Uang muka pembelian Jagung Pipil kepada PT Sarrotama Dharma Kalpariksa yang belum diselesaikan;

this matter, sanctions have been given to the person concerned in the form of Termination of Employment (PHK) and processed civilly in court.

2. Monitoring the follow-up of BPK audit results.

Based on the data received by SPI from the Work Unit and validation from the BPK Follow-up Monitoring Team, as of December 2022, it is known that out of 14 findings and 43 recommendations, there are 5 findings with 8 recommendations that are still in process / not yet in accordance with the recommendations, against these findings, management has made efforts to follow up, but not all have been resolved.

3. Monitoring the follow-up of KAP audit results.

In accordance with the monitoring data on the results of the examination of the Public Accounting Firm, until December 2022, there are still several findings that are still in process or have not been followed up with the following details:

a. Findings of Compliance with Applicable Laws and Regulations

Based on the data obtained, out of 10 findings (2019 to 2021) there are still 3 findings that are still in process or have not been completed by Management, among others:

- 1) HGB that expires;
- 2) JOTRC contracts that are not in accordance with the provisions in the Contract;
- 3) There are land and building assets that have no payment of Land and Building Tax (PBB);

Against these findings, management has made efforts to follow up, but not yet fully resolved.

b. Findings on Compliance with Internal Control System

Based on the data obtained, out of 27 findings (2019 to 2021) there are still 8 findings that are still in process or have not been completed, among others related to:

- 1) ERP system that has not run optimally;
- 2) There are duplicate positions;
- 3) There is a deposit of receipts of receivables that is not in accordance with the SOP;
- 4) Providing credit to customers that exceed the maximum limit for granting transactions;
- 5) Lack of orderly administration in accordance with the SOP "Billing Provisions and Procedures"
- 6) Unsettled advance purchase of Pipil Corn to PT Sarrotama Dharma Kalpariksa;



- 7) Aset yang dikuasai oleh Pihak Lain;
- 8) Proses penagihan piutang pada Sub Cabang Bandar Jaya dan Tulang Bawang yang tidak sesuai prosedur Surat Keputusan Direksi No 08 /DU/SKD/PPI/III/2015.

Terhadap temuan tersebut, manajemen telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjutinya, namun belum secara tuntas terselesaikan permasalahan tersebut.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan SPI telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan perseroan di sepanjang tahun 2022.

Akses Data Dan Informasi Perusahaan

Pengelolaan informasi korporasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dilakukan secara profesional di bawah pengawasan Sekretaris Perusahaan guna mencegah terjadinya *misleading information* yang dapat berdampak negatif bagi citra perusahaan. Dalam hal ini, PPI membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan keterbukaan informasi dalam batasan yang diatur oleh perundang-undangan dan kebijakan internal perseroan.

Situs Web PPI

PPI telah menyediakan kanal informasi melalui situs web www.ptppi.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan investor. PPI mengoptimalkan pemanfaatan situs web tersebut sebagai media komunikasi dengan pihak eksternal yang memuat berbagai informasi umum mengenai perseroan, seperti Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Laporan Keuangan, dan informasi korporasi lainnya. Seluruh informasi tersebut disajikan secara faktual, serta ditinjau dan diperbaharui secara berkala relevansinya untuk meningkatkan kualitas distribusi informasi PPI.

Sementara untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai PPI, publik ataupun investor dapat mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi ataupun mengunjungi kantor pusat secara langsung yang beralamat di:

- 7) Assets controlled by other parties;
- 8) The process of collecting receivables at Bandar Jaya and Tulang Bawang Sub-Branche is not in accordance with the procedures of the Board of Directors Decree No. 08 /DU/SKD/PPI/III/2015.

Regarding these findings, management has made efforts to follow up, but the problem has not been completely resolved.

Evaluation of the Implementation of the 2022 Internal Control System and its Follow-up

The Board of Directors considers that the work units under the Board of Directors have carried out their functions and roles well and have achieved effective and efficient performance. The Corporate Secretary and IAU have carried out their duties well as a supporting unit for the performance of the Board of Directors and have assisted the Board of Directors in carrying out their responsibilities in managing the Company throughout 2022.

Access To Company Data And Information

The management of corporate information of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is carried out professionally under the supervision of the Corporate Secretary to prevent the occurrence of misleading information that can have a negative impact on the Company's image. In this case, PPI opens the widest possible access to information to the public while still taking into account the provisions of confidentiality and disclosure of information within the limits regulated by the legislation and the Company's internal policies.

PPI Website

PPI has provided an information channel through the website www.ptppi.co.id which can be easily accessed by the public and investors. PPI optimizes the use of the website as a medium of communication with external parties that contains various general information about the Company, such as Company Profile, Organizational Structure, Financial Statements, and other corporate information. All of the information is presented factually, and its relevance is reviewed and updated regularly to improve the quality of PPI's information distribution.

Meanwhile, to obtain more comprehensive information about PPI, the public or investors can submit a written request addressed to the Board of Directors or visit the head office directly at:



PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRAHA PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
Tel: +6221 3862141
Fax: +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

Media Lainnya

Selain mengkomunikasikan kebijakan dan informasi penting melalui website, penyebaran informasi perseroan juga dilakukan melalui buletin PPI, *press release*, media sosial, dan papan-papan pengumuman yang terdapat di lingkungan perseroan. Selain itu, PPI juga mengadakan pertemuan (*gathering*) bersama stakeholders yang diselenggarakan secara berkala.

Siaran Pers Tahun 2022

Penyebarluasan informasi Perseroan kepada publik salah satunya dilakukan melalui siaran pers. Selama tahun 2022, siaran pers yang telah dilakukan perseroan, antara lain:

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRAHA PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, 10160
Tel: +6221 3862141
Fax: +62 21 3862143
Email: ppi.info@ptppi.co.id

Other Media

In addition to communicating important policies and information through the website, information dissemination of the Company is also carried out through PPI bulletins, press releases, social media, and announcement boards located within the Company. In addition, PPI also holds regular gatherings with stakeholders.

2022 Press Release

One of the ways to disseminate information about the Company to the public is through press releases. During 2022, the Company conducted the following press releases:

No	Tanggal Date	Judul Headline
1	7 Januari 22 January 7, 22	PPI Tanda Tangan Akta Inbreng BUMN Holding Pangan PPI Signs Deed of Inbreng for Food Holding SOEs
2	10 Januari 22 January 10, 22	PPI Sediakan Logistik Pangan Kementerian Luar Negeri untuk Bantuan Kemanusiaan PPI Provides Ministry of Foreign Affairs Food Logistics for Humanitarian Aid
3	12 Januari 22 January 12, 22	Launching Holding BUMN Pangan, PPI Resmi Jadi Member ID Food Trading & Logistik Launching SOE Food Holding, PPI is Officially a Member of ID Food Trading & Logistics
4	12 Januari 22 January 12, 22	Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan Kunjungan Kunjungi Command Center BLI dan Aset PPI di Kota Tua Jakarta Minister of SOEs and Minister of Trade Visit BLI Command Center and PPI Assets in Kota Tua Jakarta
5	13 Januari 22 January 13, 22	PPI Siap Distribusi dan Pasarkan Produk PTPN Group PPI is ready to distribute and market PTPN Group products
6	15 Januari 22 January 15, 22	Awali Tahun 2022, PPI Teken Kontrak Ekspor Kopi 3000 Ton Secara Regular Starting 2022, PPI Signed a Contract to Export 3000 Tons of Coffee Regularly
7	17 Februari 22 February 17, 22	Berperan sebagai Offtaker dalam PMO Kopi Nusantara, PPI Jajaki Petani Kopi di Jawa Barat Serving as an Offtaker in the Nusantara Coffee PMO, PPI Explores Coffee Farmers in West Java
8	18 Februari 22 February 18, 22	Pengiriman Perdana Minyak Goreng ke Anggota Warteg Kharisma Bahari First Delivery of Cooking Oil to Members of Warteg Kharisma Bahari



9	19 Februari 22 February 19, 22	Konsisten Distribusikan Minyak Goreng, PPI Member of ID Food Terus Guyur Ratusan Ribu Liter ke Pedagang Tradisional Consistently Distributing Cooking Oil, PPI Member of ID Food continues to pour hundreds of thousands of liters to traditional traders.
10	21 Februari 22 February 21, 22	PPI Member ID Food Bersama Menteri Erick dan Menteri Lutfi Lakukan Pemenuhan Minyak Goreng di Pasar Jateng PPI Member ID Food Together with Minister Erick and Minister Lutfi to Fulfill Cooking Oil in Central Java Market
11	3 Maret 22 March 3, 22	PPI telah Distribusikan Setengah Juta Liter Lebih di Masyarakat, Turut Dalam Tinjauan Pasar Minyak Goreng Bersama Menteri Perdagangan PPI has Distributed Over Half a Million Liters in the Community, Participated in Cooking Oil Market Review with the Minister of Trade
12	4 Maret 22 March 4, 22	PPI Member ID Food secara Berkelanjutan Tuntaskan Program Tahap ke 5 Pengentasan Stunting di NTB PPI Member ID Food Continues to Complete the 5th Phase of Stunting Eradication Program in NTB
13	6 Maret 22 March 6, 22	Menteri Perdagangan Tinjau Pendistribusian Minyak Goreng oleh PPI ke Pedagang Pasar Minister of Trade Reviews Distribution of Cooking Oil by PPI to Market Traders
14	9 Maret 22 March 9, 22	Lewati Target Penjualan Pupuk, PPI Member ID Food Diganjar Hadiah Mobil Operasional oleh Petrokimia Gresik Passing Fertilizer Sales Target, PPI Member ID Food Rewarded with Operational Car by Petrokimia Gresik
15	16 Maret 22 March 16, 22	PPI Member ID Food Secara Digitalisasi Lakukan Monitoring Pendistribusian Minyak Goreng PPI Member ID Food Digitally Monitoring the Distribution of Cooking Oil
16	17 Maret 22 March 17, 22	Sabet 2 Kategori dalam Anugerah BUMN 2022, PPI Member ID Food Focus GCG dan Service Excellent Won 2 Categories in SOE Award 2022, PPI Member ID Food Focus GCG and Service Excellent
17	24 Maret 22 March 24, 22	PPI Pasarkan Kopi dan Produk Indonesia Lainnya dalam Dubai Expo 2022 PPI Markets Indonesian Coffee and Other Products in Dubai Expo 2022
18	25 Maret 22 March 25, 22	PPI Kembali Memperoleh Penghargaan Dalam PR Indonesia Award 2022 PPI receives another award in PR Indonesia Award 2022
19	29 Maret 22 March 29, 22	Direksi PPI Tinjau Pendistribusikan Minyak Goreng di Pasar Gedebage Bandung PPI Directors Review the Distribution of Cooking Oil in Gedebage Market Bandung
20	11-Apr-22 April 11, 22	PPI melalui BLI Support Logistik Penyediaan Sapi Bakalan Untuk HBKN PPI through BLI Supports Logistics Provision of Feeder Cattle for HBKN
21	13-Apr-22 April 13, 22	Dampingi Hulu Produksi Kopi Arabika Rakyat Jabar, Bukti PPI Komitmen Kembangkan Kopi Nusantara Assisting the Upstream Production of West Java Arabica Coffee, Proof of PPI's Commitment to Developing the Archipelago's Coffee



22	21-Apr-22 April 21, 22	PPI Dan Srikandi BUMN Pangan Id Food Grup Dorong Peran Kartini Masa Kini Melalui Respectful Workplace PPI and Srikandi BUMN Food Id Food Group Encourage the Role of Today's Kartini Through Respectful Workplace
23	25-Apr-22 April 25, 22	Gerakan Bersih Memberi Dan Mengasihi, PPI Sampaikan Santunan Anak Yatim Dan Tenaga Pendukung Clean Movement of Giving and Loving, PPI Delivering Orphan and Support Personnel Compensation
24	27-Apr-22 April 27, 22	PPI Terus Gelontorkan Ribuan Paket Sembako Ramadan PPI Continues to Distribute Thousands of Ramadan Food Packages
25	29-Apr-22 April 29, 22	Lebih Dari 25 Ribu Paket Pangan Disalurkan PPI Di Jabodetabek Selama Ramadhan More than 25,000 Food Packages Distributed by PPI in Jabodetabek During Ramadan
26	30-Apr-22 April 30, 22	Jelang Idul Fitri PPI Distribusikan Hampir 12 Juta Liter Minyak Goreng Di Ahead of Eid al-Fitr PPI Distributes Nearly 12 Million Liters of Cooking Oil in
27	11 Mei 22 May 11, 22	Pasar – Pasar Tradisional Pasar – Pasar Tradisional
28	11 Mei 22 May 11, 22	Silaturahmi ke Santri, Menteri Erick BUMN Berdayakan Ekosistem Pangan dengan Keluarga Santri. Minister Erick SOEs Empower Food Ecosystem with Santri's Family
29	14 Mei 22 May 14, 22	Di Tengah Kunjungan Menteri BUMN, PT PPI Gelar Pasar Murah Sebagai Rangkaian HUT PPI Ke 19 Amidst the Visit of the Minister of SOEs, PT PPI Holds a Cheap Market as a Series of PPI's 19th Anniversary
30	17 Mei 22 May 17, 22	Wamen Pahala Tinjau Mitra Warung Pangan PPI, Sebagai Pilot Project Distribusi Minyak Goreng Harga 14 Ribu/Liter Ke 5000 Titik Lokasi Deputy Minister Pahala Reviews PPI Food Stall Partners, as Pilot Project for the Distribution of Cooking Oil at 14 Thousand/Liter to 5000 Locations
31	23 Mei 22 May 23, 22	Program Minyak Goreng Rakyat Rp14.000/liter Siap Meluncur untuk Masyarakat People's Cooking Oil Program Rp14,000/liter Ready to Launch for the Community
32	25 Mei 22 May 25, 22	2 Hari Diluncurkan, Platform Digital Warung Pangan PPI Sudah Mendistribusikan Migor Ke 512 Titik Lokasi 2 Days Launched, Warung Pangan PPI Digital Platform Has Distributed Migor to 512 Locations
33	30 Mei 22 May 30, 22	Kejar Target 5000 Titik, Begini Salah Satu Cara PPI Sosialisasikan Aplikasi Warung Pangan Pursuing the Target of 5000 Points, Here's One Way PPI Socializes the Food Stall Application
34	30 Mei 22 May 30, 22	PPI Bantu Mitra UMKM melalui Program Bedah Warung Pangan PPI Helps MSME Partners through Food Stall Surgery Program
35	19 Juni 22 June 19, 22	PPI Tak Berhenti Gelontorkan Paket Pangan Murah untuk Masyarakat PPI Doesn't Stop Distributing Cheap Food Packages to the Community



36	22 Juni 22 June 22, 22	Sambut HUT ke19, PPI Gelar Soft Launching Produk Minyak Goreng, Beras dan Sabun Pencuci Piring Welcoming the 19th Anniversary, PPI Holds Soft Launching of Cooking Oil, Rice and Dish Soap Products
37	22 Juni 22 June 22, 22	PPI melalui aplikasi Warung Pangan Raih Marketeers OMNI Brands Of The Year 2022 PPI through Warung Pangan app wins Marketeers OMNI Brands Of The Year 2022
38	10 Juli 22 July 10, 22	Penandatanganan MoU Kerjasama Ekspor Beras PPI dengan Menteri Pertanian MoU Signing of PPI Rice Export Cooperation with the Minister of Agriculture
39	13 Juli 22 July 13, 22	PPI Tingkatkan Inklusivitas Petani Kopi, Ekspor Regular Terus Dijalankan. PPI Improves Coffee Farmers' Inclusiveness, Regular Exports Continue to Run.
40	14 Juli 22 July 14, 22	Langkah PPI Dalam Ketersediaan Pangan, Sediakan Paket Murah Di Ujung Barat Indonesia. PPI Steps in Food Availability, Providing Cheap Packages in the West End of Indonesia.
41	16 Juli 22 July 16, 22	Pembangunan ruang kelas santri di Klaten, PPI jalankan program CSR untuk mendorong value added. Building a classroom for students in Klaten, PPI runs a CSR program to encourage value added.
42	17 Juli 22 July 17, 22	Skill komunikasi terus ditingkatkan dalam mendukung kapabilitas trading logistik di lingkungan PT PPI. Communication skills continue to be improved in supporting logistics trading capabilities within PT PPI.
43	18 Juli 22 July 18, 22	Sambangi Balikpapan, Mendag Tinjau Warung Pangan PPI mitra penjualan Minyak Goreng Curah. Visit Balikpapan, Minister of Trade reviews PPI food stalls for partners selling bulk cooking oil.
44	21 Juli 22 July 21, 22	Penertiban lahan di Makassar, PPI serius tangani tatakelola asset. Land control in Makassar, PPI takes asset management seriously.
45	29 Juli 22 July 29, 22	PPI Gandeng Kementerian Perdagangan Dalam Mensosialisasikan Permendag No.7/2022 Tentang Bahan Berbahaya Kepada DT-B2. PPI Collaborates with the Ministry of Trade in Socializing Permendag No.7/2022 on Hazardous Materials to DT-B2.
46	29 Juli 22 July 29, 22	PPI Borong Dua Penghargaan Di Ajang GRC & Performance Excellence Award 2022, Sebagai Komitmen Penuh Manajemen Terhadap GRC. PPI Receives Two Awards at the GRC & Performance Excellence Award 2022, as Management's Full Commitment to GRC.
47	29 Juli 22 July 29, 22	Giliran Sawahlunto, Jadi Lokasi PPI Sediakan Paket Sembako Murah dalam Pasar Murah BUMN. It's Sawahlunto's turn to be the location for PPI to provide cheap food packages in the BUMN Cheap Market.
48	22 Agustus 22 August 22, 22	Total Distribusi Migor Rakyat PPI tutup di angka 22 Juta Liter pada Semester I/2022. Total distribution of People's Migor PPI closed at 22 million liters in the first semester of 2022.



49	19 Agustus 22 August 19, 22	PPI Hadirkan Kemudahan Di Pasar – Pasar Tradisional Dalam Hut 2 Tahun Warung Pangan. PPI Presents Convenience in Traditional Markets in Warung Pangan's 2nd Anniversary.
50	31 Agustus 22 August 31, 22	Dukung Hasil Rekrutmen Bersama Bumh ID Food Group, PPI Sampaikan Transformasi Trading Logistik Terdigitalisasi. Supporting the Joint Recruitment Results of Bumh ID Food Group, PPI Delivers Digitized Logistics Trading Transformation.
51	31 Agustus 22 August 31, 22	PPI dan Razeedland Agrotech Brunei Jajaki Kerja Sama Ekspor dan Impor. PPI and Razeedland Agrotech Brunei Explore Export and Import Cooperation.
52	31 Agustus 22 August 31, 22	PPI Berpartisipasi dalam Pameran Pasar Kopi di Eropa PPI Participates in Coffee Market Exhibition in Europe
53	1-Sep-22 September 1, 22	Direktur Operasi PPI Paparkan Peluang, Sinergi, dan Potensi Kerja Sama PPI Bagi Pensiunan ASN PPI Operations Director Exposes Opportunities, Synergies, and Potential PPI Cooperation for ASN Retirees
54	6-Sep-22 September 6, 22	PPI Berikan Beasiswa untuk Anak Karyawan PPI provides scholarships for employees' children
55	7-Sep-22 September 17, 22	PPI Salurkan Bantuan Pangan untuk Korban Terdampak Banjir di Bengkulu PPI Distributes Food Aid for Flood Affected Victims in Bengkulu
56	8-Sep-22 September 8, 22	PPI dan Pasar Induk Nusantara Siap Kerja Sama Ihwal Distribusi Produk Hortikultura PPI and Pasar Induk Nusantara Ready to Cooperate on the Distribution of Horticultural Products
57	11-Sep-22 September 11, 22	PPI Gandeng PITC untuk Jajaki Pasar Filipina PPI Partners with PITC to Explore Philippine Market
58	23-Sep-22 September 23, 22	PPI Kembali Serap Panen Livebird di Jawa Barat PPI Reabsorbs Livebird Harvest in West Java
59	23-Sep-22 September 23, 22	Warung Pangan PPI & Nasabah Mekaar Terus Bersinergi, Giatkan Inklusivitas UMKM PPI Food Stalls & Mekaar Customers Continue to Synergize, Promoting MSME Inclusiveness
60	24-Sep-22 September 24, 22	Sediakan Ribuan Paket Sembako Murah, PPI Dukung Pasar Rakyat BUMN di Purwakarta Providing Thousands of Cheap Food Packages, PPI Supports BUMN People's Market in Purwakarta
61	19 Oktober 22 October 19, 22	BGR Logistik Indonesia Berpartisipasi dalam Pendistribusian Minyakita ke Maluku Utara BGR Logistik Indonesia Participates in the Distribution of Minyakita to North Maluku
62	28 Oktober 22 October 28, 22	Berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2022, PPI Geber Pasar Mancanegara Participating in Trade Expo Indonesia 2022, PPI Promotes Foreign Market
63	29 Oktober 22 October 29, 22	Bantu Mitra UMKM, PPI Kembali Jalankan Program Bedah Warung Pangan Helping MSME Partners, PPI Re-runs Food Stall Surgery Program
64	2-Nov-22 November 2, 22	Warung Pangan PPI & Nasabah Mekaar Tak Berhenti Giatkan Inklusivitas UMKM PPI Food Stalls & Mekaar Customers Promote MSME Inclusiveness



65	20-Nov-22 November 20, 22	PPI Salurkan Bantuan Peralatan Teknologi Informasi & Komunikasi PPI Distributes Information & Communication Technology Equipment Assistance
66	22-Nov-22 November 22, 22	PPI Helat Demspray, Penyuluhan Budidaya Padi, dan Serahkan Bantuan Pertanian untuk Petani Malang PPI Holds Demspray, Rice Cultivation Counseling, and Donates Agricultural Aid to Malang Farmers
67	25-Nov-22 November 25, 22	Gelar Rapat Kerja RKAP 2023 dengan Tema 'Embracing Change and Transformation to Achieve The Excellent Performance' Holds 2023 RKAP Work Meeting with the Theme 'Embracing Change and Transformation to Achieve Superior Performance'
68	28-Nov-22 November 28, 22	PPI Bersama ID Food Group Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Cianjur. PPI and ID Food Group Distribute Humanitarian Aid for Cianjur Earthquake Victims.
69	29-Nov-22 November 29, 22	PPI Berpartisipasi dalam Kemendag Peduli, Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur. PPI Participates in Kemendag Peduli, Distributes Aid to Cianjur Earthquake Victims.
70	29-Nov-22 November 29, 22	EXTRA Bahas Pengembangan Bisnis melalui Pemanfaatan Rumput Laut Indonesia sebagai Komoditas Unggulan Ekspor. EXTRA Discusses Business Development through the Utilization of Indonesian Seaweed as an Export Leading Commodity.
71	3 Desember 22 December 3, 22	ULTRA Mengenalkan Produk Baru Dharmatomil 40SP. ULTRA Introduces New Product Dharmatomil 40SP.
72	6 Desember 22 December 6, 22	Transformasi PPI 1 tahun Pasca Penggabungan. PPI Transformation 1 year Post Merger.
73	6 Desember 22 December 6, 22	PPI dan Starbucks Jalin Kolaborasi Strategis, Wujudkan Gerai Pertama di Tegal. PPI and Starbucks Establish Strategic Collaboration, Realize First Outlet in Tegal.
74	9 Desember 22 December 9, 22	Perluas Jaringan Internasional, PPI Gandeng KQ1000 Ihwal Representative Office di Belanda. Expanding International Network, PPI Collaborates with KQ1000 on Representative Office in the Netherlands.
75	15 Desember 22 December 15, 22	Ketua Serikat Pekerja PPI Resmi Dikukuhkan. Chairman of PPI Workers Union Officially Inaugurated.
76	17 Desember 22 December 17, 22	PPI Kembali Gelar Demspray, Penyuluhan Budidaya Padi, dan Serahkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian untuk Petani Demak. PPI Holds Demspray, Rice Cultivation Counseling, and Donates Agricultural Production Facilities for Demak Farmers.
77	23 Desember 22 December 23, 22	PPI Salurkan Bibit Pohon Buah untuk Pelestarian Lingkungan di Bantu. PPI distributes fruit tree seedlings for environmental conservation in Bantul.
78	30 Desember 22 December 30, 22	PPI Siap Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Komoditi Momen Nataru. PPI Ready to Maintain Price Stability and Availability of Commodities for Nataru Moment.



Perkara Penting Tahun 2022

Legal Cases In 2022

Perkara Penting Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

Perkara Penting Dihadapi Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, Entitas Anak PPI tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun, baik kasus perdata maupun pidana.

Legal Cases Encountered by the Board of Commissioners and Board Directors

Throughout 2022, PPI's Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any legal cases, both civil and criminal cases.

Legal Cases Encountered by Subsidiaries

Throughout 2022, PPI's Subsidiaries were not involved in any legal cases, both civil and criminal cases.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat sanksi administrasi dalam bentuk apa pun yang dikenakan pihak regulator kepada PPI.

Until the end of 2022, there were no administrative sanctions imposed by the regulator on PPI.

Pedoman Etika Perusahaan

Corporate Ethics Guidelines

Komitmen Pelaksanaan Kode Etik

PPI menyadari bahwa pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional dan mengacu pada prinsip-prinsip GCG merupakan syarat utama yang dibutuhkan agar dapat memenangkan kompetisi usaha baik pada skala nasional maupun global. Penerapan GCG secara disiplin di tengah masa-masa sulit sekarang ini menjadi suatu kebutuhan dan keharusan sehingga dapat tercipta landasan dan fondasi yang tangguh dan berkelanjutan.

Berangkat dari kesadaran penuh tersebut, PPI menyadari dan berkepentingan untuk menyusun suatu Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (Board Manual), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, Code of Conduct, Whistleblowing System, dan Pedoman GCG.

Commitment to Implementing the Code of Conduct

The Company realizes that professional management of the Company which refers to the principles of GCG is the main requirement to win business competitions both on a national and global scale. The implementation of GCG in a disciplined manner in the midst of today's difficult times has become a necessity so a strong and sustainable foundation can be created.

Departing from this full awareness, the Company is aware of and has an interest in compiling a Code of Conduct which has been stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 10a/DU/SKD/PPI/ VI/2018 dated June 4, 2018 regarding First Amendment on the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy on Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.



Code of Conduct adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis dan standar perilaku bagi setiap insan PPI yang disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan mengarahkan tingkah laku termasuk saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga tercapai *outcome* yang diharapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya PPI.

Code of Conduct is a set of commitments consisting of business ethics and standards of behavior for every Person in the Company which is structured to influence, shape, regulate and direct behavior including when interacting with stakeholders so that the expected outcome is achieved and in accordance with PPI values and culture.

Pokok-Pokok Kode Etik

Secara garis besar, pokok-pokok Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis PPI memuat hal-hal berikut ini:

Code of Conduct Main Points

In general, the main points of PPI's Ethics and Business Conduct Policy contain the matters:

Bab Chapter	Aspek yang Diatur Aspects	Penjelasan Description
I	Pendahuluan Introduction	Bab ini berisikan: 1. Latar Belakang 2. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan 3. Pengertian 4. Maksud Dan Tujuan 5. Daftar Istilah This chapter contains: 1. Background 2. Vision, Mission and Corporate Values 3. Understanding 4. Purpose and Objective 5. Glossary
II	Etika Usaha Perusahaan Company Business Ethics	Bab ini mengatur hubungan dan komitmen Perusahaan dalam berhubungan dengan stakeholders, yaitu: 1. Hubungan Dengan Pemegang Saham 2. Hubungan Dengan Pekerja 3. Hubungan Dengan Pelanggan 4. Hubungan Dengan Pesaing 5. Hubungan Dengan Penyedia Barang dan Jasa 6. Hubungan Dengan Mitra Kerja 7. Hubungan Dengan Kreditur 8. Hubungan Dengan Investor 9. Hubungan Dengan Pemerintah 10. Hubungan Dengan Masyarakat 11. Hubungan Dengan Media Massa 12. Hubungan Dengan Organisasi Profesi.



This chapter regulates the Company's relationship and commitment in dealing with stakeholders, namely:

1. Relations with Shareholders
2. Relations with Employees
3. Relations with Customers
4. Relations with Competitors
5. Relations with Goods and Service Providers
6. Relations with Partners
7. Relations with Creditors
8. Relations with Investors
9. Relations with the Government
10. Relations with Community
11. Relations With Mass Media
12. Relations With Professional Organizations.

III Standar Tata Perilaku Code of Conduct

Bab Ini Menjelaskan standar perilaku terbaik bagi Insan PPI yang berlandaskan pada prinsip - prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya Budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan.

Bab ini antara lain memuat:

1. Hubungan Kerja
 - Hubungan Dan Kerjasama Antar Pekerja
 - Hubungan Atasan Dan Bawahan
2. Integritas Dan Komitmen
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
4. Kerahasiaan Data dan Informasi
5. Penggunaan Komunikasi Elektronik
6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
7. Hadiah/Cinderamata, Jamuan Bisnis/Hiburan Dan Lainnya (Gratifikasi)
8. Penyuapan
9. Aktivitas Politik
10. Aktivitas Sosial
11. Perlindungan Dan Penggunaan Aset Perusahaan
12. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi
14. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian
15. Citra Perusahaan



This Chapter Describes the best standard of behavior for PPI's personnel based on the principles of GCG so as to encourage the establishment of a Corporate Culture which is expected to, either directly or indirectly, increase the value of the Company.

This chapter includes:

1. Working Relationship
 - Relations and Cooperation among Employees
 - Boss and Subordinate Relationship
2. Integrity And Commitment
3. Compliance with Laws and Legislation
4. Confidentiality of Data and Information
5. Use of Electronic Communication
6. Conflict of Interest and Abuse of Position
7. Gifts/Souvenirs, Business Meals/Entertainment and Others (Gratuities)
8. Bribery
9. Political Activities
10. Social Activities
11. Protection and Use of Company Assets
12. Occupational Health and Safety (OHS)
13. Data Recording, Reporting and Documentation
14. Abuse of Narcotics, Drugs, Alcohol and Gambling
15. Company Image

IV	Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku Implementation of Business Ethics and Code of Conduct	Bab ini mengatur Organisasi, Penegakan Pedoman Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelaporan, Penanganan Dan Sanksi Pelanggaran. This chapter regulates the Organization, Code of Conduct Enforcement, Socialization and Internalization, Reporting, Handling and Sanctions for Violations.
V	Penutup Closing	Berisikan penjelasan terkait pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku dan Penjelasan Pernyataan Pegawai. This provides an explanation regarding the update/revision of business ethics and code of conduct and an explanation of employee statements.

Penerapan Code of Conduct

Penerapan Code of Conduct menjadi tanggung jawab seluruh Insan PPI. Akan tetapi, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Code of Conduct di lingkungan perseroan. Sementara, para Kepala Divisi, Kepala Cabang, Manager dan pejabat setingkatnya bertanggung jawab atas penerapan Code of Conduct di lingkungan unit kerja masing-masing.

Code of Conduct Implementation

The implementation of the Code of Conduct is the responsibility of all PPI's personnel. However, the Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the implementation of the Code of Conduct within the Company. Meanwhile, Division Heads, Branch Heads, Managers and equivalent officials are responsible for the implementation of the Code of Conduct in their respective work units.



Pernyataan bahwa Code of Conduct Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

PPI menegaskan bahwa pokok-pokok Code of Conduct berlaku setara bagi seluruh insan PPI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Dengan adanya Code of Conduct, PPI berharap setiap individu semakin memiliki kesadaran tinggi untuk bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan membawa dampak positif terhadap citra PPI.

Komitmen perseroan akan hal ini ditunjukkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk membaca, memahami, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Code of Conduct dan menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang dilakukan secara berkala atau setiap tahun. Pada tahun 2022, penandatanganan lembar pernyataan tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022.

Sosialisasi dan Internalisasi

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi pokok-pokok Code of Conduct menjadi tanggung jawab Tim GCG. PPI berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi Code of Conduct kepada seluruh Insan Perseroan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala;
- Setiap Pejabat dan Pegawai Perseroan mendapatkan sosialisasi dan menerima satu salinan Code of Conduct, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Code of Conduct;
- Code of Conduct diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh Pejabat dan Pegawai Perseroan, serta didokumentasikan oleh Tim GCG sebagai koordinator dan penanggung jawab; dan
- Mengevaluasi pencapaian atau pemahaman seluruh Insan Perseroan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja;
- Mengkaji Code of Conduct secara berkala dalam rangka mengembangkan Code of Conduct dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

Pada tahun ini, kegiatan sosialisasi Code of Conduct dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Lembar Pernyataan Komitmen Insan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Desember 2022. Informasi lebih lanjut mengenai Code of Conduct perseroan dapat diunduh pada situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>.

Statement that the Code of Conduct applies to all levels of the organization

PPI emphasizes that the main points of the Code of Conduct apply equally to all employees of PPI, namely the Board of Commissioners, Board of Directors and employees. With the Code of Conduct, PPI expects that every individual have a high awareness to behave in accordance with good ethical values so they can support the establishment of a harmonious working relationship and have a positive impact on PPI's image.

The Company's commitment to this is demonstrated by requiring that every employee read, understand, and comply with the provisions set out in the Code of Conduct and sign the PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Personnel Commitment Statement Sheet which is carried out periodically or annually. In 2022, the signing of the statement sheet has been carried out on December 21, 2022.

Socialization and Internalization

The socialization and internalization of the main points of the Code of Conduct are the responsibility of the GCG Team. PPI is committed to conducting socialization effectively and thoroughly with the following provisions:

- Socializing the Code of Conduct to all Company Personnel, Customers and Business Partners as well as conducting periodic refreshers;
- Every Officer and Employee of the Company receives socialization and receives one copy of the Code of Conduct, as well as signs a commitment statement form to comply with and implement the Code of Conduct;
- The Code of Conduct is updated and re-signed annually by the Officials and Employees of the Company, and documented by the GCG Team as coordinator and person in charge; and
- Evaluating the achievement or understanding of all the Company's personnel, both during orientation and working period;
- Reviewing the Code of Conduct on a regular basis to develop a Code of Conduct and if necessary it can be further elaborated in various company policies and regulations.

This year, the socialization of the Code of Conduct was carried out in conjunction with the signing of the Statement of Commitment Sheet for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Personnel dated December 21, 2022. Further information regarding the Company's Code of Conduct can be downloaded on the Company's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/goodcorporate-governance/>.



Pelaporan, Penanganan, dan Sanksi Pelanggaran

PPI mendorong seluruh karyawan ataupun pihak eksternal apabila mereka menemukan adanya tindakan ataupun dugaan terjadinya pelanggaran terhadap (yang dikembangkan oleh perseroan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses penegakan Code of Conduct di PPI.

Perseroan telah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar pokok-pokok Code of Conduct. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada kebijakan kepegawaian yang berlaku di perseroan.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, perseroan tidak menemukan adanya laporan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh insan perseroan.

Whistleblowing, Handling, and Sanctions

PPI encourages all employees or external parties if they find any action or alleged violation of the Code of Conduct, they can report it through the Whistleblowing System mechanism developed by the Company as a sanctions for anyone who is proven to have violated the main points of the Code of Conduct.

The types of sanctions and the mechanism for imposing sanctions refer to the employment policies applicable in the Company.

Number of Violations in 2022

Throughout 2022, the Company did not find any reports of complaints regarding violations of the Code of Conduct committed by the Company's personnel.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Corporate Ethics Guidelines

Latar Belakang dan Kebijakan WBS

Sebagai warga BUMN yang sangat peduli dengan penegakkan praktik bisnis korporasi sehat, perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan seluruh karyawan terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran.

Oleh karena itu, perseroan telah merancang dan membangun sebuah mekanisme pelaporan yang dikenal dengan nama Sistem pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/"WBS") yang diatur dalam sebuah kebijakan melalui Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (Board Manual), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, *Code of Conduct*, *Whistleblowing System*, dan Pedoman GCG.

WBS Background and Policy

As an SOE who is very concerned with the enforcement of sound corporate business practices, the Company is committed to continuously improving the compliance of all employees with applicable regulations and ethical standards as well as preventing violations from occurring.

Therefore, the Company has designed and built a reporting mechanism known as the Whistleblowing System ("WBS") which is regulated in a policy through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 dated June 4, 2018 regarding First Amendment to the Board Manual, Policy on Classification and Management of Company Information, Policy for Accepting and Giving Gifts, Code of Conduct, Whistleblowing System, and GCG Guidelines.



Pada prinsipnya, WBS digunakan sebagai media untuk melaporkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, *Code of Conduct*, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kehadiran WBS di Perseroan menjadi bentuk nyata atas komitmen penuh Perseroan dalam menghadirkan iklim kerja yang kondusif dan bebas dari praktik *bad governance* bagi seluruh karyawan.

Secara umum, Kebijakan WBS perseroan mengatur hal-hal berikut ini:

1. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran
2. Kebijakan Perlindungan Pelapor
3. Apresiasi Pelapor
4. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
5. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran
6. Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran
7. Administrasi Pelaporan
8. Pemantauan Tindak Lanjut
9. Penyampaian Tanggapan
10. Publikasi dan Sosialisasi

Dengan adanya WBS, PPI berharap seluruh karyawan menjadi lebih terdorong untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan atas pelanggaran tanpa ada rasa takut atau keragu-raguan sepanjang pelaporan tersebut didukung dengan kecukupan bukti awal yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan WBS PPI dapat diunduh pada situs web perseroan: <https://www.ptppi.co.id/tatakelola/good-corporate-governance/>.

Lingkup Pelaporan WBS PPI

Sebagaimana diatur dalam Kebijakan WBS, berikut ini adalah jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, antara lain:

- Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
- Code of Conduct
- Prinsip-prinsip GCG
- Kecurangan • Gratifikasi
- Peraturan Perusahaan
- Peraturan Perundang-Undangan
- Regulasi normatif lain yang relevan dengan bidang usaha PPI.

In principle, WBS is used as a medium to report violations of the principles of GCG, Code of Conduct, company regulations and applicable laws and regulations by PPI's personnel that may harm the Company and its stakeholders. The presence of WBS in PPI is a tangible form of PPI's full commitment in providing a conducive working climate free from bad governance practices for all employees.

In general, the Company's WBS Policy regulates the following:

1. Policy on Receiving and Resolving Violation Reports
2. Whistleblower Protection Policy
3. Whistleblower Appreciation
4. Whistleblowing Team
5. Receipt of Violation Reports
6. Process for Handling Violation Reports
7. Reporting Administration
8. Follow-up Monitoring
9. Submission of Feedback
10. Publication and Outreach

With the WBS, the Company expects that all employees be more motivated to report any violations or allegations of violations without any fear or hesitation as long as the reporting is supported by sufficient initial evidence that is strong and can be accounted for. Further information regarding the Company's WBS Policy can be downloaded on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tatakelola/good-corporate-governance/>.

Scope of the Company's WBS System

As stipulated in the WBS Policy, the following are the types of alleged violations that can be reported through WBS, including:

- Corruption, Collusion, Nepotism (KKN)
- Code of conduct
- GCG principles
- Cheating
- Gratuities
- Company regulations
- Legislation
- Other normative regulations relevant to PPI's line of business.



Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

PPI secara konsisten melakukan berbagai upaya agar sosialisasi Kebijakan WBS dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan *stakeholders* eksternal. Internalisasi Kebijakan WBS bagi karyawan dilakukan dengan membagikan buku saku mengenai Kebijakan WBS kepada seluruh Unit Kerja. Sementara itu, sosialisasi kebijakan WBS bagi *stakeholder* eksternal dilakukan dengan mencantumkan kebijakan WBS di dalam situs perseroan serta mengoptimalkan fungsi media sosial perseroan sebagai tools untuk meningkatkan *awareness* para pemangku kepentingan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

- Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja ditujukan kepada Direksi.
- Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pihak eksternal (*stakeholders*) baik secara lisan maupun tertulis.
- Perseroan dalam hal ini melalui Tim GCG, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pihak eksternal (*stakeholders*) mengajukan pelaporan pelanggaran.
- Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - Disampaikan melalui: PO BOX 1195
 - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat:
- Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

**Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160**

**Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160**

Socialization on Whistleblowing System

PPI consistently makes various efforts so that the socialization of the WBS Policy can be well received and understood by all employees and external stakeholders. Internalization of WBS Policy for employees is carried out by distributing pocket books on WBS Policy to all Work Units. Meanwhile, socialization of WBS policies for external stakeholders is carried out by including WBS policies on the Company's website and optimizing the function of the Company's social media as tools to increase stakeholder awareness.

Whistleblowing Mechanism

- Reports of alleged violations by employees are reported to the Board of Directors.
- Reports of alleged violations by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are reported to the Board of Commissioners.
- The Company accepts every violation report submitted by external parties (*stakeholders*) either orally or in writing.
- The Company, in this case through the GCG Team, provides an explanation of the policies and procedures for the settlement of reporting violations when external parties (*stakeholders*) submit reports of violations.
- Reporting of alleged violations by the Worker as referred to in letter a) above can be carried out using the following mechanisms:

- Via: PO BOX 1195
- Via an official letter addressed to the Board of Directors by means of direct delivery or by post to the address:

**Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160**

- Via: PO BOX 1195
- Via an official letter addressed to the Board of Directors by means of direct delivery or by post to the address:

**Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
up. Tim Good Corporate Governance (GCG)
Graha PPI
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta 10160**



- g) Pelaporan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- h) Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan tindakan/transaksi yang dilakukan dan/ atau pelanggaran yang akan disampaikan.

- g) Written violation reports should be accompanied by photocopies of identity and supporting evidence such as documents related to the actions/transactions carried out and/or violation reports to be submitted.
- h) Written violation reports without identity (anonymous) must be accompanied by supporting evidence such as documents related to the actions/transactions carried out and/or the violations to be submitted.

Proses Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- a) Tim GCG melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Selanjutnya, Tim GCG akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- b) Apabila hasil verifikasi sebagaimana huruf a) di atas menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan terbukti tidak benar dan tidak memiliki kecukupan bukti maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.
- c) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
- d) Sementara itu, pelaporan pelanggaran yang melibatkan Pekerja akan ditindaklanjuti diinvestigasi oleh Tim GCG melalui jalur Direksi.
- e) Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang memerlukan investigasi, akan ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Tim Pengelola Pelanggaran melalui jalur Dewan Komisaris.
- f) Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Apabila terjadi pelaporan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang hanya sebatas melakukan proses verifikasi, sedangkan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim GCG.
- h) Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.
- i) Skema proses pelaporan pelanggaran sebagaimana terlampir.

Handling Violation Report

- a) The GCG team verifies the incoming reports. Furthermore, the GCG Team will decide whether or not an investigation into the violation reporting is necessary within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.
- b) If the verification result as referred to in letter a) shows that the submitted report is proven to be incorrect and does not have sufficient evidence, the report will not be processed further.
- c) If the verification results indicate a violation accompanied by sufficient evidence, the report can be processed to the investigation stage.
- d) Meanwhile, reports of violations involving employees will be followed up and investigated by the GCG Team through the Board of Directors.
- e) Regarding reporting of violations involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners that require investigation, will be followed up and investigated by the Whistleblowing Team through the Board of Commissioners.
- f) Offenders who have been proven based on the results of the investigation, will be processed in accordance with the applicable regulations.
- g) If there is a reporting violation at the Branch Office level, the role of the Branch Office is only limited to carrying out the verification process, while the next process is followed up by the GCG Team.
- h) If the results of the investigation prove that there is a violation that leads to a criminal act, then the applicable legal process to law enforcement agencies can be followed up.
- i) The scheme of the whistleblowing process is as attached.



Perlindungan Bagi Pelapor

PPI berkomitmen akan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik beserta keluarganya. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, faximili, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
2. Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan tanpa identitas (anonim), tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
3. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau PPI. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakuan yang merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga Pelapor.
4. Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

- 1) Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pekerja:
 - a) Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
 - b) Direksi menetapkan Tim GCG sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi.
 - c) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pekerja PPI.
- 2) Kewenangan Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris:

Whistleblower Protection

PPI is committed to maintaining the confidentiality of the Whistleblower's identity and providing protection guarantees to Whistleblowers who have good intentions and their families. Whistleblower protection includes:

1. Guaranteed reporting channel facilities (telephone, facsimile, letter, email) or an independent, free and confidential Ombudsman.
2. Guaranteed protection of the confidentiality of the identity of the whistleblower and the contents of the report. This protection is provided if the Whistleblower provides identity and information that can be used to contact the Whistleblower. Although it is allowed, the submission of anonymous reporting is not recommended. Anonymous reporting makes it difficult for communication to follow up on reporting.
3. Guarantee of protection against countermeasures from the reported party or PPI. Protection from pressure, postponement of promotion, dismissal, lawsuits, property, to physical actions and other adverse treatment. This protection is not only for the whistleblower but can also be extended to members of the whistleblower's family.
4. Guarantee of confidentiality of communication/ information channel with the Whistleblower. Information on follow-up implementation, in the form of when and how and to which institution the follow-up is submitted. This information is conveyed confidentially to the whistleblower who is fully identified.

Whistleblowing Team

- 1) The authorities of the Board of Directors and the Whistleblowing Team are as follows:
 - a) The Board of Directors is responsible for the implementation of the Whistleblowing Policy as stipulated in this Decree.
 - b) The Board of Directors determines the GCG Team as the Whistleblowing Team. This team is also known as Whistleblowing Team for the Board of Directors.
 - c) Whistleblowing Team for the Board of Directors is tasked with following up on reports of violations allegedly committed by PPI's employees.
- 2) The authorities of the Board of Commissioners and Whistleblowing Team for Reporting Violations Allegedly Committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners are as follows:



- a) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini.
- b) Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tim ini juga disebut sebagai Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris.
- c) Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Ketua Komite Audit.
- d) Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

- a) The Board of Commissioners is responsible for the implementation of the Management Policy for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supporting Organs of the Board of Commissioners, as stipulated in this Decree.
- b) The Board of Commissioners establishes a Management Team for Reporting Violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Commissioners, consisting of representatives from the Audit Committee and other parties as needed in accordance with their competence and expertise based on the decisions of the Board of Commissioners. This team is also known as the Whistleblowing Team for Board of Commissioners.
- c) The Chairman of the Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is the Chairman of the Audit Committee.
- d) The Whistleblowing Team for the Board of Commissioners is tasked with following up on reports of violations allegedly committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Jenis Sanksi yang Diberikan

Apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PPI, maupun secara umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Types of Sanction

If the Reported Party is proven to have committed a violation, the sanctions imposed will refer to the provisions in force in PPI, as well as in general in accordance with the applicable laws and regulations.

Jumlah Pelaporan dan Hasil Penanganan Pengaduan WBS Tahun 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui media *Whistleblowing System* sehingga tidak terdapat proses penanganan atau tindak lanjut.

Number of Reports and Results of WBS Complaint Handling in 2022

During 2022, there were no reports of alleged violations submitted through the Whistleblowing System media so there was no handling or follow-up process.

Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2022

PPI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap implementasi WBS untuk memastikan bahwa fungsi WBS senantiasa berjalan dengan baik demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta terbebas dari tindak kecurangan atau hal-hal lain yang berpotensi merugikan Perseroan di kemudian hari. PPI juga terus memperkuat kerja sama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyosialisasikan pilar-pilar WBS kepada seluruh karyawan.

WBS Implementation Evaluation in 2022

PPI consistently evaluates the implementation of WBS to ensure that the WBS function always runs well to create a safe and comfortable work environment and is free from fraud or other things that have the potential to harm PPI in the future. The Company also continues to strengthen cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in disseminating the WBS pillars to all employees.



Kebijakan Anti-Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption And Gratuity Control Policy

Dalam mengelola bisnisnya, PPI berkomitmen akan terus berupaya memberantas segala bentuk tindakan yang mengarah pada praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan menjunjung tinggi hadirnya praktik bisnis sehat yang mengedepankan nilai-nilai persaingan yang fair, sportivitas dan profesionalisme, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, perseroan telah menyusun kebijakan mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/ PPI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kebijakan tersebut memuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan pedoman utama bagi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di PPI dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 10 Juli 2020. Keberadaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di perseroan dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi antara karyawan dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan usaha meliputi penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta unit pengelola dan mekanisme pelaporan.

Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PPI berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi berikut ini:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan KPK No. 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 06 tahun 2015;
4. Surat KPK No. B.143/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
5. Surat Edaran No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang bersih melalui implementasi pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern; Surat Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/ VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia; dan

In managing its business, PPI is committed to continuing to strive to eradicate all forms of actions that lead to the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) by upholding the presence of sound business practices that promote the values of fair competition, sportsmanship and professionalism, and pay attention to the principles of GCG. To achieve this, the Company has developed a policy regarding Guidelines for Gratuity Control which is stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/ PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. The policy contains the commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of the main guidelines for the implementation of Gratification control in PPI and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on July 10, 2020. The Gratuity Control Guidelines in the Company are intended to regulate matters related to the control of gratuities between employees and third parties related to business activities include receiving, giving, and requesting gratuities as well as management units and reporting mechanisms.

Legal Basis

The preparation of PPI's Gratuity Control Guidelines refers to the following laws and regulations:

1. Law no. 28 of 2009 concerning Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
3. KPK Regulation No. 02 of 2014 concerning Guidelines for Reporting and Determination of Gratification Status as amended by KPK Regulation No. 06 of 2015;
4. KPK Letter No. B.143/01-13/03/2017 dated March 15, 2017 concerning Guidelines and Limitations of Gratuity;
5. Circular No. SE-2/MBU/07/2019 dated 29 July 2019 concerning Clean Management of State- Owned Enterprises through the implementation of preventing Corruption, Collusion, Nepotism, and handling conflicts of interest as well as strengthening internal supervision; Decree of the Board of Directors Number: 26/DU/SKD/ PPI/VII/2020 dated July 3, 2020 concerning Guidelines for Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia; and



6. Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PPI telah memuat ketentuan-ketentuan di antaranya yaitu:

1. Ruang Lingkup Gratifikasi
2. Kategori Gratifikasi (Penolakan Gratifikasi, Penerimaan Gratifikasi, Pemberian Gratifikasi, Permintaan Gratifikasi, dan Alternatif Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi)
3. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
4. Implementasi
5. Mekanisme dan Tata Cara Pelaporan
6. Sanksi atas Pelanggaran
7. Perlindungan Pelaporan
8. Ketentuan Tambahan

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

PPI telah mengatur batasan pemberian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diterima oleh insan PPI sehubungan dengan kegiatan penugasan dan jabatannya. Uraian lengkap mengenai kriteria dan ketentuan tersebut sudah diungkapkan secara jelas di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporategovernance/>.

Di samping itu, perseroan juga sudah memiliki Kebijakan ISO Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Setiap tahun, PPI mengkomunikasikan dan menso-sialisasikan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan PPI, di antaranya dengan memuat im-bauan mengenai larangan gratifikasi dalam bentuk *pull up banner* dan poster yang dipasang di lingkungan PPI. Selain itu, PPI juga membagikan buku saku tentang Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah kepada seluruh karyawan sebagai salah satu upaya internalisasi pedoman pengendalian gratifikasi pada lingkup PPI.

6. Statement of Commitment to Implementing Gratuity Control of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Gratuity Control Guidelines

PPI's Gratuity Control Policy contains provisions including:

1. Scope of Gratuity
2. Category of Gratuity (Rejection of Gratuity, Acceptance of Gratification, Granting of Gratuity, Request for Gratuity, and Alternative Utilization of Acceptance of Gratuity)
3. Management of Gratuity Control
4. Implementation
5. Reporting Mechanisms and Procedures
6. Sanctions for Violations
7. Reporting Protection
8. Additional Terms

Gratuity Control Management

The Company has regulated the limits of grants that are allowed and not allowed to be received by the Company's personnel in connection with their assignment activities and positions. A complete description of the criteria and provisions has been clearly disclosed in the Gratuity Control Guidelines which can be accessed through PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/goodcorporate-governance/>.

In addition, the Company also has the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Policy.

Gratification Policy Socialization

Every year, PPI communicates and socializes the gratification control policy to all of the Company's personnel by posting an appeal regarding the prohibition of gratification in the form of pull up banners and posters posted within PPI. In addition, PPI also distributes a pocket book on the Policy for Accepting and Giving Gifts to all employees as one of the efforts to internalize gratification control guidelines within PPI.



Kebijakan *Kickbacks* dan Anti-Penyuapan

Kickbacks and Anti-Bribery Policy

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, PPI senantiasa menerapkan etika bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG. Sebagai bentuk kesungguhan atas komitmen tersebut, perseroan menyusun Kebijakan Anti- Penyuapan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 29/ DU/SKD/PPI/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020. Penyusunan Kebijakan Anti-Penyuapan berpedoman pada perundang-undangan dan regulasi berikut ini: 1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan 3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eksistensi Kebijakan Anti-Penyuapan menjadi salah satu bentuk upaya dan mitigasi yang dilakukan perseroan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. PPI berharap seluruh karyawan dengan kesadaran penuh dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di dalamnya.

In order to achieve the Company's vision, mission, and goals, the Company always implements business ethics based on GCG principles. As a form of seriousness on this commitment, the Company developed an Anti-Bribery Policy which has been approved by the Decree of the Board of Directors No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 dated July 6, 2020. The preparation of the Anti-Bribery Policy refers to the following laws and regulations: 1. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises; 2. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; and 3. Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The existence of the Anti-Bribery Policy is one of the efforts and mitigations carried out by the Company to prevent unexpected actions. PPI hopes that all employees with full awareness can heed the provisions contained therein.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision Of Funds For Social and Political Activities

PPI tidak pernah memberikan dana atau hibah untuk kepentingan kegiatan politik atau kepada partai politik.

PPI has never provided funds or grants for the benefit of political activities or to political parties.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Management Of State Officials Wealth Reports

Sebagai entitas BUMN, PPI mewajibkan pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

As an SOE entity, PPI requires structural officers up to two levels below the Board of Directors to submit a report on their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.



Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. PER. KPK No. 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

Wajib Lapo LHKPN

PPI secara khusus telah memiliki Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor: 28/DU/SKD/POB/PPI/VII/2019 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Mengacu pada pedoman tersebut, perseroan menetapkan pejabat perseroan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, di antaranya:

- Direksi;
- Dewan Komisaris;
- Kepala Divisi
- Branch Manager
- Direksi Anak Perusahaan; dan
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PT PPI.

Per 31 Desember 2022, dari total sebanyak 90 orang pejabat PPI yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, diketahui terdapat 86 orang pejabat yang telah melakukan pelaporan sedangkan 6 orang pejabat lainnya belum melakukan pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendorong ketepatan waktu dalam penyampaian laporan LHKPN, Direksi telah memberikan imbauan kepada pejabat terkait yang belum memenuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor:001/LHKPN/PPI/I/2021 tentang Kewajiban Pengisian E-LHKPN.

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN consists of:

1. Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).
2. Law no. 19 of 2019 concerning Corruption Eradication Commission;
3. PER. KPK No. 02 of 2020 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth.

State Officials Wealth Report

PPI specifically has the Guidelines for Reporting State Officials Wealth (LHKPN) which is stipulated through the Decree of the Board of Directors Number: 29/DU/SKD/POB/PPI/I/2020 dated January 31, 2020 concerning First Amendment to the Resolution of the Board of Directors of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Number: 28/DU/SKD/POB/PPI/VII/2019 concerning Standard Operating Procedures (SOPs), Procedures for Submission of State Officials Wealth Report (LHKPN) of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Referring to these guidelines, the Company stipulates Company officials who are required to submit LHKPN to the KPK, including:

- Board of Directors;
- Board of Commissioners;
- Head of Division
- Branch Manager
- Board of Directors of Subsidiaries; and
- Board of Commissioners of a Subsidiary who does not simultaneously serve as the Board of Directors of PT PPI.

As of December 31, 2022, out of a total of 90 PPI officials who are required to submit LHKPN to the KPK, it is known that there are 86 officials who have reported while other 6 officials have not. In this regard and to encourage timeliness in submitting the LHKPN report, the Board of Directors has given an appeal to relevant officials who have not complied with the LHKPN reporting requirements as stated in the Official Memorandum Number: 001/LHKPN/PPI/I/2021 concerning Obligation to Fill in the E-LHKPN.



Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency Of Bad Governance Practices

Penyelenggaraan kegiatan operasional bisnis PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. PPI memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup perusahaan, antara lain yang berkaitan dengan:

1. Pencemaran lingkungan;
2. Pelanggaran hukum;
3. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak;
4. Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; dan
5. Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Mengenai Pencemaran Lingkungan

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat laporan terkait aktivitas PPI yang diduga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagai warga korporasi BUMN yang menjunjung tinggi penerapan GCG, PPI selalu mematuhi perundangundangan yang berlaku termasuk dalam hal perpajakan sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan PPI tidak pernah memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. Selama tahun 2022, PPI telah memberikan kontribusi kepada kas negara melalui pembayaran pajak dengan nilai sebesar Rp107,44 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

The Company's business operations always comply with the applicable rules and regulations. PPI ensures that there has never been a bad corporate governance practice within the Company, including those related to:

1. Environmental pollution
2. Violation of law
3. Non-compliance with tax obligations
4. Violation of employee rights
5. Incompatibility of financial reporting with applicable regulations.

Report on Environmental Pollution

Throughout 2022, there were no reports related to the Company's activities that were suspected of causing environmental pollution.

Disclosure of Fulfillment of Tax Obligations

As an SOE corporate that upholds the implementation of GCG, the Company always complies with applicable laws and regulations, including in terms of taxation, so until this Annual Report is published, the Company has never had a case related to taxation. During 2022, PPI contributed to the state treasury through tax payments with a value of Rp107.44 billion, increasing from the previous year.

Dalam Jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Kontribusi Perpajakan Tahun 2022 & 2021 Tax Contribution in 2022 & 2021		
Uraian / Description	2022	2021
Kontribusi Pajak / Tax Contribution		
PPh Pasal 4 (2) / Income Tax Article 4 (2)	1.885	794
PPh Pasal 21	11.175	7.960
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	11.840	8.666
PPh Pasal 22 Import / Income Tax Article 22 Import	7.674	4.662



PPH Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.521	1.038
PPH Pasal 25 / Income Tax Article 25	8.767	6.099
PPN	3.772	1.663
PPN – WAPU / VAT-WAPU	50.436	32.857
Jumlah Kontribusi Pajak Total Tax Contribution	97.069	63.739
Kontribusi Pajak Lainnya Other Tax Contribution		
Pajak Bumi & Bangunan / Property Tax	4.522	2.524
Pajak Kendaraan / Vehicle Tax	503	560
Bea Masuk / Customs	5.341	18.807
Jumlah Kontribusi Pajak Lainnya Total Other Tax Contribution	10.366	21.473
JUMLAH TOTAL	107.436	85.631

Ketidakesesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi, analisa dan pembahasan kinerja di dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PPI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Laporan Keuangan konsolidasian perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All presentation of information, analysis and discussion of performance in this annual report refers to the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2022 and December 31, 2021 which have been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners. The Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulations. The applicable regulations include Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/ BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.



Kebijakan Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Perusahaan

Policy On Company Information Classification And Management

PPI memiliki Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang dimaksudkan untuk mengatur pengklasifikasian informasi dan mengatur mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan PPI dan kebutuhan Pemegang Saham serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PPI.

Pengelolaan informasi PPI dilakukan secara profesional dan *prudent* oleh Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun demikian, seluruh Pejabat PPI tetap bertanggung jawab terhadap keamanan informasi PPI yang meliputi pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan atas informasi perseroan di unit kerja masing-masing.

Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi berguna sebagai pedoman dan panduan yang jelas bagi Insan PPI dalam mengklasifikasikan dan memperlakukan informasi perusahaan serta memberikan aturan mengenai mekanisme dalam pengungkapan informasi baik secara internal maupun eksternal sehingga tidak merugikan PPI dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian lengkap mengenai Pedoman Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi dapat diakses melalui situs web PPI: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

PPI has a Policy on Classification and Management of Company Information which is intended to regulate the classification of information and regulate the mechanism of disclosure of information internally and externally in accordance with the interests of PPI and the needs of Shareholders and other parties related to PPI.

The management of PPI information is carried out professionally and prudently by the Corporate Secretary and Public Relations Division, which is directly responsible to the President Director. However, all of PPI's Officers are still responsible for the security of PPI information which includes the arrangement, implementation and management of Company information in their respective work units.

The Policy on Information Classification and Management is useful as a clear guideline and guide for PPI's personnel in classifying and treating company information as well as providing rules regarding the mechanism for disclosing information both internally and externally so as not to harm PPI while still taking into account the applicable laws and regulations.

A complete description of the Guidelines for Policy on Information Classification and Management can be accessed on PPI's website: <https://www.ptppi.co.id/tata-kelola/good-corporate-governance/>.

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Governance

Kebijakan

PPI memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan Surat Peraturan Direksi nomor 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan. Dalam SOP tersebut dijelaskan hal-hal mengenai ketentuan, prosedur dan proses pengadaan.

Policy

The Company has policies related to the procurement of goods and services as determined based on the Decree of the Board of Directors Number: 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 dated July 29, 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Company Operations based on the Company's Operating Standards (SOP) and the Board of Directors Regulation Number 9/DU/Perdir/PPI/X/2021 concerning Guidelines for the Procurement of Merchandise. The SOP describes matters regarding the provisions, procedures and procurement processes.



Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang

PPI senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel dalam proses pengadaan.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Tahun 2022

Secara umum proses pengadaan barang dan jasa perseroan selama tahun buku 2021 telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Perseroan tidak menemukan adanya temuan terkait aspek pengadaan barang dan jasa oleh auditor internal dan eksternal yang signifikan.

Goods Procurement Principles

PPI always refers to the principles of efficient, effective, competitive, transparent, fair, equal and accountable in the procurement process.

Implementation of Procurement Process in 2022

In general, the procurement process for the Company's goods and services during the fiscal year 2021 has been running in accordance with the provisions. The Company did not find any significant findings related to aspects of procurement of goods and services by internal and external auditors.

Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Commitment to Fulfilling The Rights Of Creditors

Perseroan memiliki kebijakan terkait hubungan dengan kreditur sebagaimana telah dijelaskan di dalam:

1. Pedoman GCG, pada bagian Pedoman bagi *Stakeholder*, aspek Kreditur; dan
2. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) pada bagian Etika Usaha Perusahaan, aspek Hubungan dengan Kreditur.

Dalam kebijakan tersebut antara lain dijelaskan bahwa perseroan memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. PPI melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukannya serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal dalam upaya menjaga kepercayaan kreditur.

The Company has a policy related to the relationship with creditors as described in:

1. GCG Guidelines, in the Guidelines for Stakeholders, Creditor aspects; and
2. Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct in the Company's Business Ethics section, aspects of Relationships with Creditors.

In this policy, it is explained that PPI fulfills the rights of creditors according to the agreement. The Company manages loan funds effectively in accordance with their designation and strives for an optimal rate of return to maintain creditor trust.

Kebijakan Seleksi Pemasok

Supplier Selection Policy

PPI memiliki kebijakan dan pedoman yang digunakan sebagai panduan untuk menjalin hubungan dengan pemasok, antara lain diatur dalam:

- 1) Peraturan Direksi Nomor: 036/DU/SKD// PPI/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Barang Dagangan; dan
- 2) Surat Keputusan Direksi Nomor: 9/DU/Perdir/ PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Merchandise

PPI has policies and guidelines that are used as guidelines for establishing relationships with suppliers, which include:

- 1) Regulation of the Board of Directors Number: 036/DU/SKD//PPI/IV/2016 dated April 13, 2016 concerning Changes in Provisions and Procedures for the Procurement of Non- Commercial Goods and Services; and
- 2) Decree of the Board of Directors Number: 9/ DU/Perdir/ PPI/X/2021 concerning Guidelines for Procurement of Merchandise



Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PPI, mulai dari analisa kebutuhan, proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pelaksanaan hubungan dengan pemasok/rekanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seleksi pemasok/rekanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persyaratan yang terukur dan jelas.
- 2) PPI memberikan informasi yang sama kepada setiap rekanan terkait peluang atau rencana pengadaan, persyaratan, tata cara serta melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka sampai dengan penetapan calon pemenang penyedia barang dan/atau jasa. Akses informasi peluang pengadaan barang/jasa dimuat dalam website perseroan.
- 3) PPI memberikan peluang yang sama bagi calon pemasok sepanjang aturan dan ketentuan yang telah ditentukan diikuti oleh calon pemasok. Pemilihan calon pemasok dilakukan PPI berdasarkan proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

PPI melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemasok/rekanan (vendor performance) untuk melihat keterlibatan pemasok/rekanan dalam memberikan dukungan terhadap aktivitas dan kebutuhan perseroan serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perseroan untuk menggunakan kembali rekanan/ pemasok yang bersangkutan.

The procurement of goods and services is carried out in accordance with the provisions and procedures applicable in PPI, starting from the analysis of needs, processes and stages of the procurement of goods/services to payment in accordance with the requirements in the agreement. In practice, the implementation of relationships with suppliers/partners can be explained as follows:

- 1) Selection of suppliers/partners is carried out in accordance with applicable regulations with measurable and clear requirements.
- 2) The Company provides the same information to each partner regarding opportunities or procurement plans, requirements, procedures and implements the process of procurement of goods and services openly until the determination of the winning candidate for the provider of goods and/or services. Access to information on opportunities for procurement of goods/services is published on the Company's website.
- 3) The Company provides equal opportunities for prospective suppliers as long as the rules and conditions that have been determined are followed by the prospective suppliers. The selection of prospective suppliers is carried out by the Company based on the process or stages that have been determined in the Goods and Services Procurement Procedure.

PPI conducts assessments and evaluations of suppliers/partners (vendor performance) to see the engagement of suppliers/partners in providing support to the activities and needs of the Company and to be used as consideration for the Company to reuse the partners/suppliers concerned.





Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR)



Laporan Keuangan
Audited Financial Report



7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)

Corporate Social Responsibility (CSR)





PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD

Bumn UNTUK
INDONESIA

 PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA
member of  ID FOOD





PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui tanggung jawab sosial berlandaskan Triple Bottom Line yang mengaitkan Profit, People, dan Planet. PPI tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu, diharapkan eksistensi PPI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) is committed to community development and environmental preservation through social responsibility based on the Triple Bottom Line linking Profit, People, and Planet. PPI is not only profit-oriented, but the existence of PPI is also expected to provide benefits to the community and the environment.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Policy

Peran nyata PPI dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan merupakan wujud dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepedulian PPI terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2022, perseroan telah melaksanakan berbagai aktivitas yang mendukung kegiatan operasi PPI dengan memperkuat basis hubungan masyarakat di sekitar area bisnis PPI.

PPI menjalankan fungsi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial secara transparan melalui perilaku dalam menjalankan aktivitas PPI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang berkelanjutan, PPI bersama Kantor Pusat turut mengambil peran dalam aktivitas sosial dalam lingkup pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kepada masyarakat.

PPI's role in community development and environmental preservation is a manifestation of compliance with laws and regulations and evidence of PPI's concern for improving the quality of life of the community. Throughout 2022, PPI carried out various activities supporting PPI's operations by strengthening the community relations base around PPI's business areas. As a state-owned enterprise, PPI carries out its function in implementing corporate social responsibility activities in a transparent manner.

As a form of sustainable social responsibility, PPI and the Head Office take part in social activities in the scope of community education, health, and infrastructure.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Activity Implementation Objective

Berdasarkan Peraturan Direksi nomor 05/PERDIR/PPI/II/2023, PPI melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan 4 pilar utama, yakni pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola dengan tujuan:

1. Untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
2. Untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

Based on the Board of Directors Regulation number 05/PERDIR/PPI/II/2023, PPI implements the Corporate Social Responsibility Program based on 4 main pillars, namely the social, environmental, economic, and legal and governance pillars with the following objectives:

1. To achieve the fulfillment of quality basic human rights in a fair and equal manner to improve the welfare of the entire community.
2. For the sustainable management of natural resources and the environment as the support of all life;



3. Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;
4. Untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan.

3. To achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships;
4. To realize legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance to create security stability.

Dasar Hukum

Legal Basis

Dalam pelaksanaan, penyusunan berbagai program kerja CSR, Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

In the implementation, preparation of various CSR work programs, the Company refers to the laws and regulations governing the implementation of social responsibility, among others:

- Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises;
- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- Law No. 25 of 2007 on Capital Investment;
- Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
- Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 on the Achievement of Sustainable Development Goals; and
- Regulation of the Minister of SOEs Number Per-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State Owned Enterprises jo. Per-06/MBU/09/2022.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Scope of Corporate Social Responsibility

Perusahaan menjalankan program TJSL dalam bentuk:

- a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil dengan Program PUMK;
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan berdasarkan analisis dampak Perusahaan dan berorientasi terhadap pencapaian TPB;
- c. Tanggung jawab Perusahaan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program.

The company runs the TJSL program in the form of:

- a. Financing and coaching micro and small businesses with the PUMK Program;
- b. Assistance and/or other activities carried out based on the Company's impact analysis and oriented towards achieving SDGs;
- c. Corporate Responsibility is oriented towards the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000 as a guide for program implementation.



Strategi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility Activity Strategy

Strategi Pelaksanaan TJSL Perusahaan tidak lepas dari *Grand Strategy* Perusahaan. Program TJSL yang dirancang senantiasa mempertimbangkan empat pilar yang termasuk bagian dalam ISO 26000 dan membuat program yang menciptakan nilai bersama (*Creating Shared Value*) baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat sekitar.

Rancangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disusun setelah penetapan *Grand Strategy* oleh Direksi. Setelah itu, tim melakukan penelaahan rencana program tahunan mengacu pada kebutuhan yang selaras dengan *Grand Strategy* tersebut, serta landasan dan kebijakan TJSL Perusahaan.

The Company's JSP implementation strategy cannot be separated from the Company's grand strategy. The TJSL program that is designed always considers the four pillars included in ISO 26000 and creates programs that create shared value for both the company and the surrounding community.

The draft Social and Environmental Responsibility Program is prepared after the establishment of the Grand Strategy by the Board of Directors. After that, the team reviews the annual program plan referring to the needs that are aligned with the grand strategy, as well as the foundation and policies of the Company's CSR.

Struktur Pengelola

Manager Structure

Pengelolaan program TJSL Perusahaan dilakukan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah Direktorat Utama.

The management of the Company's TJSL program is carried out by the Corporate Secretary Division under the President Directorate.





Realisasi Anggaran Biaya

Cost Budget Realization

Untuk memastikan realisasi kegiatan TJSL berjalan sesuai dengan rencana kegiatan manajemen Perusahaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan setiap tahunnya. Hasil penilaian pelaksanaan TJSL Perusahaan di tahun 2022 adalah Baik dan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Perusahaan mengalokasikan dana untuk program TJSL sebesar Rp3.665.000.000,-.

To ensure that the realization of TJSL activities runs in accordance with the activity plan, the Company's management conducts an assessment of the implementation every year. The results of the assessment of the Company's TJSL implementation in 2022 were Good and will be improved again in 2023. In 2022, the Company allocated funds amounting to Rp3.665.000.000,-.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Dengan Hak Asasi Manusia

Social Responsibility Related to Human Rights

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan berkomitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan, dengan berorientasi pada nilai-nilai kesetaraan dan anti-diskriminasi tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan latar belakang budaya.

Kebijakan Perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap HAM mengacu di antaranya *International Labour Organization* (ILO) yang menerbitkan beberapa resolusi terkait pemenuhan HAM bagi tenaga kerja, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan Perusahaan terkait dengan pengelolaan SDM, Pedoman Etika Perusahaan, serta Budaya Perusahaan.

Commitment and Policy

The Company is fully committed to the enforcement of human rights. The Company defines human rights as a fundamental right for every individual involved or affected by the Company's operations and business activities, oriented towards the values of equality and anti-discrimination without discriminating against ethnicity, religion, race, gender, and cultural background.

The Company's policies related to corporate social responsibility towards human rights refer to the International Labor Organization (ILO) which issued several resolutions related to the fulfillment of human rights for workers, Law number 13 of 2003 concerning Manpower, Company policies related to HR management, Corporate Ethics Guidelines, and Corporate Culture.

Rencana Kegiatan dan Capaiannya

Secara spesifik, Perusahaan menekankan pemenuhan prinsip-prinsip HAM terhadap pegawai, pemasok, distributor, pelanggan, serta masyarakat sekitar, sebagai pemangku kepentingan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terkait pemenuhan HAM atas kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan.

Tanggung jawab sosial terkait HAM yang diterapkan di Perusahaan antara lain: (1) Remunerasi yang adil, (2) Pencegahan tenaga kerja anak, (3) Mencegah praktik kerja paksa, (4) HAM terkait kesehatan, (5) Menerapkan Perlakuan Adil dan Setara.

Activity Plan and Outcomes

Specifically, the Company emphasizes the fulfillment of human rights principles towards employees, suppliers, distributors, customers, and the surrounding community, as stakeholders who have a direct or indirect impact on the fulfillment of human rights on operations and business activities carried out by the Company.

Social responsibility related to human rights implemented in the Company include: (1) Fair remuneration, (2) Prevention of child labor, (3) Preventing forced labor practices, (4) Human rights related to health, (5) Implementing Fair and Equal Treatment.



Perusahaan berkomitmen penuh terhadap upaya pemeliharaan dan penerapan HAM melalui kebijakan yang berlaku di Perusahaan, Pedoman Etika Perusahaan, dan Budaya Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan menerapkan etika dan budaya Perusahaan dalam setiap aktivitas pekerjaan.

Pelaksanaan Kegiatan

Remunerasi yang Adil

Penerapan remunerasi yang adil di Perusahaan merupakan salah satu wujud dalam memerhatikan hak dan kesejahteraan pekerja. Perusahaan senantiasa mengkaji ulang penerapan sistem remunerasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan menjaga *competitiveness* industri. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem remunerasi yang baik akan mendukung daya saing Perusahaan.

Pencegahan Tenaga Kerja Anak

Perusahaan memastikan bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di Perusahaan. Hal ini dituangkan dalam persyaratan penerimaan pekerja Perusahaan yang mensyaratkan calon pekerja minimal berusia 21 tahun.

Pencegahan Praktik Kerja Paksa

Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan menetapkan waktu kerja bagi pekerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Perusahaan tidak mendapatkan teguran maupun sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan terkait pelanggaran jam kerja.

Penerapan Perlakuan Adil dan Setara

Perusahaan telah menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Kesetaraan yang dimaksud diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk mengembangkan kariernya di Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga berupaya menciptakan budaya non-diskriminasi terkait perlakuan yang setara dan pemberian kesempatan kerja yang sama.

Perusahaan turut menekankan pada pentingnya pemenuhan prinsip keadilan kepada setiap karyawan melalui pemeliharaan keseimbangan antara bobot kerja yang diemban dengan fasilitas yang diberikan. Dalam hal ini, Perusahaan tidak semata memberikan skema kompensasi yang adil dan kompetitif, tetapi juga waktu kerja yang wajar.

The Company is fully committed to the maintenance and implementation of human rights through the Company's policies, Code of Conduct, and Corporate Culture. In its implementation, the Company involves all stakeholders to jointly maintain and implement the Company's ethics and culture in every work activity.

Activity Implementation

Fair Remuneration

The implementation of fair remuneration in the Company is a form of paying attention to the rights and welfare of workers. The Company constantly reviews the application of the remuneration system in accordance with the needs of the Company and maintains industry competitiveness. It is expected that a good remuneration system will support the Company's competitiveness.

Child Labor Prevention

The Company ensures that there are no underage workers working in the Company. This is outlined in the Company's recruitment requirements which require prospective workers to be at least 21 years old.

Prevention of Forced Labor Practices

Based on Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the Company sets the working time for workers at 40 hours in 1 week. The company has received no reprimands or sanctions from the Manpower Office regarding violations of working hours.

Implementation of Fair and Equal Treatment

The Company has applied the principle of equality in the employee recruitment and development process. The equality in question is realized through providing equal opportunities to everyone, both men and women, to develop their careers in the Company. In addition, the Company also strives to create a culture of non-discrimination regarding equal treatment and equal employment opportunities.

The Company also emphasizes the importance of fulfilling the principle of fairness to each employee through maintaining a balance between the weight of the work carried out and the facilities provided. In this regard, the Company not only provides a fair and competitive compensation scheme, but also reasonable working hours.



Mekanisme dan Prosedur Penerapan HAM

Mekanisme dan prosedur HAM dilaksanakan melalui sikap dan perilaku untuk saling menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia antara insan Perusahaan. Sebab pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia secara luas sebagai hal penting dalam aturan hukum dan konsep keadilan sosial. Maka Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk diskriminasi di tempat kerja terutama untuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Mechanisms and Procedures for Human Rights Implementation

Human rights mechanisms and procedures are implemented through attitudes and behaviors to respect, protect, and fulfill human rights among Company personnel. Because recognition and respect for human rights are widely recognized as important in the rule of law and the concept of social justice. Therefore, the Company is committed to preventing all forms of discrimination in the workplace, especially for groups that are vulnerable to human rights violations.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Dengan Operasi yang Adil Social Responsibility Related to Fair Operations

Salah satu komitmen membangun budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang dilakukan oleh Perusahaan adalah dengan melakukan Kepatuhan pada Kode Etik Bisnis, yang berdasarkan pedoman Kode Etik Perusahaan. Hal ini sebagai wujud komitmen bersama insan Perusahaan terhadap pelaksanaan operasi bisnis yang adil.

Praktik operasi yang adil dalam hal ini termasuk hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator, pemerintah daerah, mitra, pemasok, pelanggan, media massa, serta organisasi terkait. Maka Perusahaan berkomitmen dalam memberlakukan praktik operasi yang adil dalam setiap kegiatan usahanya.

Komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan operasi yang adil dituangkan dalam beberapa kebijakan khususnya kebijakan etika bisnis dalam *code of conduct*, anti korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, keterlibatan politik yang tidak bertanggungjawab, serta persaingan usaha yang sehat.

One of the commitments to build a culture of Good Corporate Governance (GCG) carried out by the Company is to comply with the Code of Business Ethics, which is based on the Company's Code of Ethics guidelines. This is a form of joint commitment of the Company's people to the implementation of fair business operations.

Fair operating practices in this case include relationships between the company and shareholders, regulators, local governments, partners, suppliers, customers, mass media, and related organizations. Therefore, the Company is committed to implementing fair operating practices in each of its business activities.

The Company's commitment and social responsibility policies related to fair operations are outlined in several policies, especially business ethics policies in the code of conduct, anti-corruption, conflict of interest, gratuities, irresponsible political involvement, and fair business competition.





Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Activities Implemented and Achievements

Penerapan Praktik Anti Korupsi

Perusahaan telah memiliki kebijakan Anti Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam *Code of Conduct*. Selain itu, Perusahaan juga memiliki mekanisme pencegahan terjadi tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam *Whistleblowing System* Perusahaan. Dengan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, yang melibatkan pekerja Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Informasi lebih lengkap mengenai *Whistleblowing System* telah disajikan pada bab GCG dalam Laporan Tahunan ini.

Persaingan Usaha yang Sehat

Perusahaan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh etika bisnis, menjalankan bisnis dengan menjunjung persaingan yang sehat, wajar, dan mematuhi prinsip-prinsip mengenai aturan anti persaingan usaha dan praktik monopoli. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang nomor Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kami senantiasa merencanakan inisiatif strategis serta membuat program-program pemasaran yang efektif guna meraih pangsa pasar tanpa adanya praktik persaingan tidak sehat. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat laporan dan tindakan anti-persaingan yang terkait dengan praktik bisnis Perusahaan.

Pengelolaan CSR dalam Rantai Pasok

Terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan CSR, Perusahaan juga mengatur terkait hal-hal yang menjadi evaluasi teknis dalam pengadaan, salah satunya yaitu terkait aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang harus dipenuhi oleh vendor khususnya jasa konstruksi.

Calon vendor harus menyampaikan rencana penerapan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) selama masa konstruksi berlangsung secara lengkap dengan membuat *job sheet analysis/safety plan* yang sudah termasuk identifikasi aspek dampak lingkungan serta monitoring lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL/RKL/RPL.

Implementation of Anti-Corruption Practices

The Company has an Anti-Corruption policy as stated in the Code of Conduct. In addition, the Company also has a mechanism to prevent criminal acts of corruption that is implemented in the Company's Whistleblowing System. With the commitment to prevent corruption, which involves the Company's employees, including the Company's Board of Commissioners and Directors. Further information regarding the Whistleblowing System has been presented in the GCG chapter of this Annual Report.

Fair Competition

The Company is fully committed to complying with all business ethics, conducting business by upholding fair and reasonable competition, and complying with the principles of anti-competitive rules and monopolistic practices. This is stipulated in Law No. 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

We constantly plan strategic initiatives and create effective marketing programs to gain market share without any unfair competitive practices. Throughout 2022, there were no anti-competitive reports and actions related to the Company's business practices.

CSR Management in Supply Chain

Regarding the procurement policy of goods and services in CSR management, the Company also regulates matters that become technical evaluations in procurement, one of which is related to aspects of Health, Safety and Environment (HSE) that must be fulfilled by vendors, especially construction services.

Prospective vendors must submit a plan for implementing the Health, Safety and Environment Management System (SMK3L) during the construction period in full by making a job sheet analysis/safety plan that includes identification of environmental impact aspects and environmental monitoring in accordance with the AMDAL/RKL/RPL document.



Menghormati Hak Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta

Dalam menjalankan bisnis, Perusahaan senantiasa menghargai karya seseorang atau menghormati hak kekayaan intelektual/ hak cipta. Hal tersebut diwujudkan melalui persyaratan adanya *Letter of Authorization* (LOA) dalam perjanjian pada proses pengadaan di setiap cabang Perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen Perusahaan dalam menghargai dan melindungi hak cipta. Perusahaan hanya menggunakan barang-barang berlisensi resmi yang diperoleh dengan cara yang resmi.

CSR Management in Supply Chain

In conducting business, the Company always appreciates one's work or respects intellectual property rights/ copyrights. This is manifested through the requirement of Letter of Authorization (LOA) in the agreement on the procurement process in each branch of the Company. This is the Company's commitment in respecting and protecting copyrights. The Company only uses officially licensed goods obtained by official means.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TJSL)

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER)

Kebijakan Pengelolaan

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia merupakan salah satu Perusahaan yang membawa misi pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional di samping usaha yang dilakukan pihak swasta, koperasi dan semua unsur penggerak sistem ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) adalah dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan yang sehat yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), PT PPI fokus pada konsep pembinaan terpadu dan berkesinambungan yang bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait yang berkompeten dibidangnya.

Rencana Kegiatan

Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan 2 (dua) kegiatan TJSL BUMN, yaitu :

1. Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
2. Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Bantuan

Management Policy

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia is one of the State-Owned Enterprises (SOEs) that carries the government's mission as one of the catalysts for driving the national economy in addition to efforts made by the private sector, cooperatives and all elements of the economic system in Indonesia. The purpose of the Corporate Social & Environmental Responsibility Program (CSER) is to help accelerate the growth of the national economy by encouraging medium and small level economic actors so that there is no gap, so that it is hoped that a healthy partnership will be created whose ultimate goal is for the prosperity of society. In implementing the Corporate Social & Environmental Responsibility Program (CSER), PT PPI focuses on the concept of integrated and sustainable development in collaboration with related institutions / agencies that are competent in their fields.

Action Plan

Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises explains 2 (two) SOE CSER activities, namely:

1. Funding for Micro and Small Enterprises, hereinafter referred to as the UMK Funding Program, is a program to improve the ability of micro and small enterprises to become resilient and independent.
2. SOE Social and Environmental Responsibility Assistance, hereinafter referred to as SOE CSER



TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Landasan Hukum

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didasarkan pada:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembar Negara Nomor 4297)
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/7/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan;
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017, tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan;
- e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beserta perubahannya.
- g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Assistance, is an activity that is a company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, social, environment and law and governance with principles that are more integrated, directed, measurable impact and accountable and are part of the company's business approach.

Legal Basis

The implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility Program is based on:

- a. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Sheet 2003 Number 70; Supplement to State Sheet Number 4297)
- b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/7/2015 dated July 3, 2015, regarding the Partnership Program and Community Development Program;
- c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/7/2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs
- d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER- 02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017, concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/7/2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs;
- e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs of State-Owned Enterprises.
- f. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-05/MBU/04/2021 Regarding the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
- g. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-06/MBU/09/2022 Regarding Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 Regarding Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.



- h. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No: SE-5/MBU/DSI/03/2020 Tentang Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- i. Surat No.: S-348/MBU/DSI/11/2020, dari Kementerian BUMN, tanggal 18 November 2020, perihal Penyusunan RKA TJSL Tahun 2021. Program TJSL merupakan penyempurnaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini sudah dijalankan BUMN.
- j. Surat Keputusan Direksi Nomor 03/DU/SKD/POB/PPI/VII/2017 tahun 2017 Tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- h. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-5/MBU/DSI/03/2020: SE-5/MBU/DSI/03/2020 Regarding Combating the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Through Corporate Social and Environmental Responsibility Activities;
- i. Letter No.: S-348/MBU/DSI/11/2020, from the Ministry of SOEs, dated November 18, 2020, regarding the preparation of RKA TJSL for 2021. The TJSL program is a refinement of the Partnership and Community Development Program (PCDP) and the Corporate Social Responsibility (CSR) Program that have been carried out by SOEs.
- j. Decree of the Board of Directors Number 03/DU/SKD/POB/PPI/VII/2017 of 2017 concerning Standard Operating Procedures (POB) for the Partnership and Community Development Program (PCDP).

Struktur Pengelola

Program TJSL adalah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan merupakan bagian dari program kerja Sekretariat Perusahaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala Sekretariat Perusahaan: Head of the Company Secretariat	: Noverita Anggraeny
Manajer TJSL CSER Manager	: Ike Primaningrum
Staf TJSL: CSER Staff:	: Fadli Rosyad
	: Adityas Prastyo Legowo

Management Structure

The TJSL program is a social community activity that is implemented and is part of the Company Secretariat's work program with the following organizational structure:

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Tersebut

Kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan hidup ditunjukkan dengan menjadikan Perusahaan yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai program yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Bantuan penanganan sampah berupa pemberian gerobak sampah serta penanaman biopori untuk mengurangi banjir untuk wilayah Bandar Jaya, Lampung;
2. Program PPI Peduli Lingkungan berupa pemberian jeriken untuk wadah minyak goreng curah sebagai bentuk kepedulian PT PPI dalam mengurangi sampah plastik dalam penggunaan kemasan sekali pakai untuk wilayah Pekalongan dan Bondowoso;
3. Program pembangunan MCK untuk wilayah DKI;
4. Program pembangunan Talud Jalan Dukuh Banjarsari untuk wilayah Boyolali, Jawa Tengah; dan
5. Program Penanaman Pohon berupa penanaman bibit pohon untuk pelestarian alam di wilayah Bantul, DIY.

Activities Conducted and Quantitative Impact of Such Activities

The Company's concern for the environment is shown by making the Company more environmentally friendly through various programs carried out including the following:

1. Waste management assistance in the form of providing garbage carts and planting biopores to reduce flooding for the Bandar Jaya area, Lampung;
2. PPI Cares for the Environment Program in the form of providing jerry cans for bulk cooking oil containers as a form of PT PPI's concern in reducing plastic waste in the use of disposable packaging for the Pekalongan and Bondowoso areas;
3. MCK construction program for the DKI area;
4. Construction program of Dukuh Banjarsari Road Talud for Boyolali area, Central Java; and
5. Tree Planting Program in the form of planting tree seedlings for nature conservation in Bantul, Yogyakarta.



Pengaduan Masalah Lingkungan

Perusahaan senantiasa mengelola dampak dari kegiatan operasional Perusahaan melalui upaya terstruktur yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan program pengendalian lingkungan hidup yang sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Di samping itu, kami juga terbuka terhadap laporan pengaduan dari masyarakat mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul berkaitan dengan operasional Perusahaan. Pengaduan masalah lingkungan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pusat maupun cabang Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat pengaduan pelanggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun masyarakat. Seluruh hasil proses pengolahan limbah sisa kegiatan produksi perusahaan.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Hingga saat ini, Perusahaan belum memiliki sertifikasi khusus di bidang lingkungan hidup (ISO 14001:2015).

Target/Rencana Kegiatan Tahun 2022

Berikut adalah target/rencana kegiatan tahun 2022:



Complaints on Environmental Issues

The Company always manages the impact of the Company's operational activities through structured efforts related to environmental preservation. This is done by implementing environmental control programs in accordance with applicable regulations.

In addition, we are also open to complaints from the public regarding environmental impacts that may arise related to the Company's operations. Complaints on environmental issues can be submitted directly to the Company's Head Office or branches.

Until the end of 2022, there were no complaints of violations from the Ministry of Environment or the community. The entire waste treatment process results from the company's production activities.

Environmental Certification

Until now, the Company does not have a special certification in the field of environment (ISO 14001: 2015).

Target/Activity Plan for 2022

The following are the targets/activity plans for 2022:





Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PPI memiliki dua kegiatan yang dijalankan diantaranya Bantuan penanganan sampah di wilayah Bandar Jaya. Bantuan tersebut berupa pemberian gerobak sampah serta penanaman biopori untuk mengurangi banjir di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu program pembangunan MCK di wilayah DKI.



Clean and Healthy Living Behavior Program

In the Clean and Healthy Living Behavior Program, PPI has two activities that are carried out, including assistance in handling waste in the Bandar Jaya area. The assistance is in the form of providing garbage carts and planting biopores to reduce flooding in the area. In addition, the activities carried out in this program are the MCK construction program in the DKI area.



Pembangunan Talud Jalan

Pembangunan Talud Jalan untuk Dukuh Banjarsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dibangun dengan tujuan untuk membangun akses jalan yang memadai sebagai akses utama warga untuk jalan antar kota atau kabupaten.

Clean and Healthy Living Behavior Program

The construction of Road Wall for Dukuh Banjarsari, Boyolali Regency, Central Java was built with the aim of building adequate road access as the main access for residents for roads between cities or regencies.



PPI Menanam (Penanaman di Lahan Non Produktif)

Program PPI Menanam dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul, DIY. Penanaman pohon ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pelestarian alam dengan menambah pohon di wilayah Bantul, Yogyakarta dengan menanam 200 pohon.

PPI Planting (Planting on Non-productive Land)

The PPI Planting Program was implemented in the Bantul Regency area, Yogyakarta. This tree planting was carried out with the aim of preserving nature by adding trees in the Bantul area, Yogyakarta by planting 200 trees.



Biaya Pengelolaan

Berikut biaya dan kegiatan TJSL Perusahaan sepanjang tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Management Costs

The following are the costs and activities of the Company's CSER throughout 2022 with the following details:

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach) Scope of ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program Program Name	Nomor TPB TPB Number	Capaian Kuantitatif Quantitative Achievement	Anggaran Program Program Budget	Nilai Penyaluran Distribution Value
Pilar Sosial Social Pillar						
1	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Penurunan Stunting Stunting Reduction Program	TPB 2	153 anak 153 kids	100.000.000	95.955.000
2	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Relief Program	TPB 2	2 kecamatan 2 subdisctrics	75.000.000	25.470.000
3	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Bantuan Bahan Pokok Staples Assistance Program	TPB 2	1000 paket 1000 packages	50.000.000	52.800.000
4	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Amal Kurban Sacrifice Charity Program	TPB 2	5 hewan kurban 5 sacrificial animals	50.000.000	129.294.920
5	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Pemberian Suplemen Supplement Program	TPB 3	50 orang 50 Peoples	5.000.000	3.000.000
6	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Santunan Compensation Program	TPB 3	50 anak 50 Kids	10.000.000	10.000.000
7	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Donor Darah Blood Donation Program	TPB 3	70 kantong darah 70 blood bags	35.000.000	4.958.632
8	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Penanaman Bencana Non Alam/ Penanganan Covid-19 Program for Planting Non-Natural Disasters/ Handling Covid-19	TPB 3	530 orang 530 Peoples	-	526.304.762
9	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Bantuan Pendidikan Pelajar Berprestasi Achievement Student Education Assistance Program	TPB 4	61 pelajar 61 Students	50.000.000	44.750.000



10	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Pemberian Sarana TIK ICT Facility Provision Program	TPB 4	5 TIK 5 ICT	50.000.000	25.600.000
11	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Pembangunan Ruang Kelas Classroom Development Program	TPB 4	1 ruang kelas 1 Class Room	80.000.000	80.000.000
12	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Pelatihan Tertsertifikasi dan Public Training Certified Training Program and Public Training	TPB 4	8 sesi 8 Sessions	300.000.000	298.881.000
13	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Magang Bersertifikat Certified Internship Program	TPB 4	12 peserta 12 Participants	400.000.000	213.875.000
Sub Total					1.225.000.000	1.505.930.682
Pilar Ekonomi Economic Pillar						
14	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha UMK Go Export Program to increase the capacity and capability of MSME Go Export businesses	TPB 8	62 UMK 62 UMK	50.000.000	18.555.000
15	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Pembinaan Petani Farmer Development Program	TPB 8	80 Petani 80 Farmers	100.000.000	22.644.000
16	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program Bedah Warung Mitra Warung Pangan Warung Pangan Partner Stalls Renovation Program	TPB 8	3 Mitra Warung Pangan 3 Warung Pangan Partners	100.000.000	34.313.050
17	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program PUMK Mandiri PUMK Independent Program	TPB 8	22 Mitra 22 Partners	700.000.000	1.174.000.000
18	Pengembangan dan Keterlibatan Komunitas Community Development and Engagement	Program PUMK Kolaborasi PUMK Collaborative Program	TPB 8	1 Kolaborasi 1 Collaboration	1.100.000.000	700.000.000
Sub Total					2.050.000.000	1.949.512.050



Pilar Lingkungan | Environmental Pillar

19	Lingkungan Environmet	Program PHBS PHBS Program	TPB 6	1 MCK, 5 Gerobak Sampah, 20 Biopori 1 MCK, 5 waste carts, 20 Biopori	20.000.000	21.367.000
20	Lingkungan Environmet	Program PPI Peduli Lingkungan PPI Cares for the Environment Program	TPB 6	200 jerigen 200 jerry cans	10.000.000	9.750.655
21	Lingkungan Environmet	Pembangunan Talud Jalan Construction of the Road Gap	TPB 11	1 Talud Jalan 1 Talud Street	50.000.000	48.035.210
22	Lingkungan Environmet	Program Penghijauan Green Program	TPB 13	200 pohon 200 trees	20.000.000	16.853.350
Sub Total					140.000.000	96.006.215
Pilar Hukum dan Tata Kelola Pillar of Law and Governance						
23	Tata Kelola Organisasi Organizational Governance	Program GCG GCG Program	TPB 16	1 asesmen 1 Assessment	220.000.000	189.517.500
Sub Total					220.000.000	189.517.500
TOTAL					3.665.000.000	3.745.925.079

Tanggung Jawab Sosial Terkait Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Social Responsibility Related to Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety (OHS)

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan merupakan bagian dari entitas di industri *trading* dan *logistic*. Hal tersebut tentu tidak dapat mengesampingkan peran SDM sebagai Sumber Daya utamanya. Melalui pemahaman tersebut, Perusahaan terus berupaya memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak karyawan, menjamin lingkungan kerja yang aman, nyaman, kondusif, imbal kerja yang sesuai standar industri dan peraturan ketenagakerjaan, serta meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul dari aktivitas kerja.

Commitments and Policies

The Company is part of an entity in the trading and logistic industry. It certainly cannot ignore the role of human resources as its main resource. Through this understanding, the Company continues to strive to fulfill its responsibilities in fulfilling employee rights, ensuring a safe, comfortable, conducive work environment, compensation in accordance with industry standards and labor regulations, and minimizing the potential for work accidents and diseases arising from work activities.



Dalam pemenuhan aspek tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan, Perusahaan yang bergerak di bidang *trading* dan *logistic* membutuhkan pekerja dengan tingkat keahlian tinggi dan keterampilan yang baik. Oleh karena itu, kami senantiasa memastikan bahwa semua pekerja telah terlatih dengan baik sesuai bidangnya. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan Pendidikan sesuai dengan *core business* Perusahaan.

Target/Rencana Kegiatan Tahun 2022

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial untuk aspek Ketenagakerjaan dan K3 dilakukan peninjauan secara berkala agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Di samping itu dalam penerapan K3 diharapkan dapat mencapai nihil kecelakaan kerja (*zero accident*).

Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Kuantitatif Atas Kegiatan

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja melalui berbagai program kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian pelatihan, sosialisasi dan praktik mengenai K3 baik yang dilakukan secara internal perusahaan maupun eksternal dengan mengundang ahli dari luar;
2. Pemenuhan Sistem Tanggap Darurat di area kerja;
3. Kegiatan simulasi tanggap darurat; dan
4. Perayaan Bulan K3 Nasional.

Kesetaraan Gender dan Peluang Kerja

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama, baik pria atau wanita tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, gender ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen Karyawan. Pemberian kesempatan kerja tersebut juga menyesuaikan kebutuhan serta prioritas kompetensi SDM di Perusahaan.

Selain itu, dalam proses rekrutmen Perusahaan senantiasa memastikan bahwa tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja anak atau pekerja di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk komitmen kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 70.

In fulfilling the aspect of responsibility towards Manpower, the Company which is engaged in health services requires workers with high levels of expertise and good skills. Therefore, we always ensure that all workers are well trained in their fields. Therefore, the Company is committed to continuously improving the competence of Human Resources through training and education in accordance with the Company's core business.

Target / Action Plan for 2022

The implementation of Social Responsibility for Labor and OHS aspects is reviewed regularly in order to run effectively, efficiently, and sustainably. In addition, the implementation of OHS is expected to achieve zero accidents.

Activities Conducted and Quantitative Impact of Activities

Throughout 2022, the Company implemented social responsibility programs in the field of employment, including aspects of occupational health and safety through various activity programs, including the following:

1. Providing training, socialization and practice on OHS both internally and externally by inviting outside experts;
2. Fulfillment of Emergency Response System in the work area;
3. Emergency response simulation activities; and
4. Celebration of National OHS Month.

Environmental Certification

The Company provides equal opportunities, both men and women regardless of ethnic differences, religion, race, gender or physical condition to participate in Employee recruitment. The provision of employment opportunities also adjusts the needs and priorities of HR competencies in the Company.

In addition, in the recruitment process, the Company always ensures that there are no forced labor practices and child labor or underage workers. This is a form of commitment to the Company's compliance with Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower Article 70.



Kesetaraan dalam Pengembangan Kompetensi

Perusahaan berkomitmen untuk memiliki karyawan yang andal dan berkualitas. Untuk itu, pengembangan kualitas dan kompetensi karyawan menjadi hal yang penting dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan kinerja Perusahaan.

Perusahaan memberikan kesempatan dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi tanpa memandang perbedaan gender. Sehingga karyawan memiliki potensi yang sama dalam mengembangkan dirinya agar memberikan kinerja yang maksimal. Sepanjang tahun 2022 terdapat 834 karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Informasi lebih lanjut terkait program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan terdapat pada bagian Sumber Daya Manusia di Laporan Tahunan 2022 ini.

Pemberian Remunerasi dan Hak-Hak Pekerja

Remunerasi yang diberikan kepada pegawai merupakan wujud komitmen kepatuhan Perusahaan terhadap kewajiban atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di samping tentunya merupakan upaya Perseroan dalam membangun hubungan kemitraan dengan pegawai sebagai pemangku kepentingan internal. Kebijakan remunerasi pegawai, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan (*fairness*) dan kompetitif (*competitiveness*), dan disesuaikan dengan faktor internal yakni bobot kerja atau jenjang jabatan serta faktor eksternal yaitu peraturan pengupahan pegawai berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam memberikan remunerasi kepada karyawan, Perusahaan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan didasarkan pada Penilaian Performansi Bulanan (P2B) dengan mengedepankan skill, kompetensi dan integritas pekerja. Penetapan remunerasi karyawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor HK.61/1/12/PT.RSP-2018 tentang Penghasilan Pekerja Perusahaan.

Komponen Remunerasi dan Kepatuhan Terhadap Upah Minimum

Dalam hal pemberian gaji/upah, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan upah di atas ketentuan upah minimum yang diterapkan pemerintah. Komponen remunerasi dan fasilitas yang diperoleh karyawan adalah sebagai berikut:

Equality in Competency Development

The Company is committed to having reliable and qualified employees. For this reason, the development of employee quality and competence is important to be carried out continuously as an effort to improve the Company's performance.

The Company provides opportunities to participate in training and competency development regardless of gender differences. So that employees have the same potential in developing themselves to provide maximum performance. Throughout 2022 there were 834 employees who participated in training and competency development. Further information regarding employee training and competency development programs is available in the Human Resources section of this 2022 Annual Report

Remuneration and Employee Rights

Remuneration given to employees is a form of commitment to the Company's compliance with obligations to applicable laws and regulations, in addition to of course the Company's efforts to build partnership relationships with employees as internal stakeholders. The employee remuneration policy is determined based on the principles of fairness and competitiveness, and is adjusted to internal factors, namely work weight or position level and external factors, namely employee wage regulations based on the Regional Minimum Wage (RMW).

In providing remuneration to employees, the Company does not differentiate based on gender, but is based on Monthly Performance Assessment (MPA) by prioritizing skills, competence and integrity of workers. Determination of employee remuneration is based on the Decree of the Company's Board of Directors Number HK.61/1/12/PT.RSP-2018 concerning Company Workers' Income.

Remuneration Components and Minimum Wage Compliance

In terms of providing salaries/wages, the Company is committed to providing wages above the minimum wage provisions applied by the government. The components of remuneration and facilities obtained by employees are as follows:



Fasilitas Cuti Melahirkan

Perusahaan memberikan fasilitas cuti karyawan yang mengacu pada kebijakan pemerintah, antara lain cuti tahunan, cuti besar, cuti keagamaan, cuti karena sakit. Sedangkan khusus bagi karyawan wanita mendapatkan fasilitas cuti hamil atau melahirkan (*maternity leave*) yang dapat diambil sebelum dan setelah melahirkan selama maksimum tiga bulan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan izin meninggalkan pekerjaan kepada pekerja pria apabila istrinya melahirkan (*paternity leave*). Terkait fasilitas tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Hak Cuti Melahirkan.

Program Pensiun

Bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, Perusahaan telah menyiapkan program Pelatihan Pra Purnabakti yang dapat diikuti pekerja berusia 55 tahun sebelum masa pensiun. Hal tersebut sesuai dengan PKB Bab VIII Pasal 42 tentang Pensiun.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menjamin lingkungan kerja yang aman serta meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul dari aktivitas kerja.

Implementasi kebijakan dan program tanggung jawab terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan bertujuan untuk menciptakan iklim dan proses kerja yang aman dan sehat, memperbaiki kinerja HSE, menumbuhkan budaya sadar K3, serta menurunkan tingkat kecelakaan kerja

Guna mencegah terjadinya kecelakaan di area kerja, Perusahaan melengkapi semua area operasional dengan sistem dan peralatan tanggap darurat seperti alat pemadam api ringan (APAR), *hydrant*, kotak P3K, detektor panas & asap, *sprinkler*, tanda evakuasi, tangga & jalur darurat, titik kumpul dan prosedur dan petunjuk keselamatan serta pembentukan tim tanggap darurat. Di samping itu, Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan K3.

Sanitasi dan Lingkungan

Perusahaan juga melaksanakan pelayanan penunjang salah satunya yaitu pelayanan Kesehatan lingkungan atau sanitasi Perusahaan. Sanitasi perkantoran adalah upaya kesehatan lingkungan Perusahaan untuk mencegah terjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber.

Maternity Leave Facilities

The company provides employee leave facilities that refer to government policies, including annual leave, major leave, religious leave, leave due to illness. Meanwhile, female employees receive maternity leave that can be taken before and after giving birth for a maximum of three months. In addition, the Company also gives permission to leave work to male employees if their wives give birth (paternity leave). Related facilities have been regulated in the Collective Labor Agreement (CLA) on Maternity Leave Rights.

Equality in Competency Development

For employees who are retiring, the Company has prepared a Pre-retirement Training program that can be followed by workers aged 55 years before retirement. This is in accordance with the CLA Chapter VIII Article 42 concerning Pensions.

Occupational Health and Safety

The Company is committed to managing human resources in accordance with applicable laws and regulations, including ensuring a safe working environment and minimizing the potential for work accidents and diseases arising from work activities.

The implementation of policies and responsibility programs related to Occupational Health and Safety (OHS) within the Company aims to create a safe and healthy work climate and process, improve HSE performance, foster an OHS-conscious culture, and reduce the rate of work accidents.

In order to prevent accidents in the work area, the Company equips all operational areas with emergency response systems and equipment such as light fire extinguishers (APAR), hydrants, first aid kits, heat & smoke detectors, sprinklers, evacuation signs, emergency stairs & lanes, assembly points and safety procedures and instructions as well as the formation of emergency response teams. In addition, the Company always complies with the applicable provisions, rules and regulations related to OHS.

Sanitation and Environment

In accordance with the Company's operational field, namely health services, the Company also carries out supporting services, one of which is environmental health services or Company sanitation. sanitation is the Company's environmental health efforts to prevent the outbreak of an infectious disease by breaking the chain from the source.



Kegiatan Terkait Sanitasi dan Lingkungan | Sanitation and Environment Related Activities

Sanitasi | Sanitation

Lingkungan aman, bersih dan sehat Safe, clean and healthy environment

Cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau dengan sabun dan air mengalir
Wash hands using hand sanitizer or with soap and running water

Merapikan tempat kerja | Tidy up the workplace

Tidak makan di tempat kerja
Not eating in the workplace

Membuang sampah di tempat sampah
Disposing of garbage in the trash can

Tidak meninggalkan sisa makan
No leftovers

Mematikan semua peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan
Turn off all electronic equipment that is no longer in use

Menjaga kebersihan diri
Maintain personal hygiene

Tidak merokok di area kantor
No smoking in the office area

Kecelakaan Kerja

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasinya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip K3. Oleh karena itu, Perusahaan memastikan lingkungan kerja yang aman dengan menekankan tindakan pencegahan dan pengendalian dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kegiatan aktif dalam mempromosikan budaya sadar K3.

Work Accidents

The Company is committed to conducting its operations by upholding the principles of OHS. Therefore, the Company ensures a safe working environment by emphasizing prevention and control measures of accidents and occupational diseases as well as actively promoting an OHS-conscious culture.

Sosialisasi K3

Agar budaya K3 dapat dipahami dengan baik oleh para pekerja maka perlu dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus. Hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan maupun sakit akibat kerja. Berikut aktivitas sosialisasi membangun budaya K3 (HSE) antara lain:

OHS Socialization

In order for the OSH culture to be well understood by workers, it is necessary to make continuous socialization efforts. This is an effort to minimize the occurrence of accidents and occupational diseases. The following socialization activity builds K3 (HSE) are:

Aktivitas Sosialisasi Budaya K3 | OHS Culture Socialization Activities

Tanggal Date	Pelaksana Organizer	Lokasi Kegiatan Activity Location
10 Januari 2022 January 10, 2022	Sosialisasi Tim Tanggap Darurat (Internal) Socialization of Emergency Response Team (Internal)	Zoom
17 Januari 2022 January 17, 2022	HSE Induction (Internal) HSE Induction (Internal)	Zoom
27 Januari 2022 January 27, 2022	Pelatihan APAR (Internal) Fire extinguisher training (internal)	Graha PPI
11 Februari 2022 February 11, 2022	Webinar K3 (Eksternal dari Badak NGL) OHS Webinar (External from Badak NGL)	Zoom
15 September 2022 September 15, 2022	Awareness SMK3 (Eksternal dari PT Jeap Karya Asih) SMK3 Awareness (External from PT Jeap Karya Asih)	Zoom
14 Oktober 2022 October 14, 2022	Sosialisasi Tim Tanggap Darurat Socialization of Emergency Response Team	Zoom



Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Perusahaan juga memerhatikan pengaduan atau keluhan karyawan dengan menyediakan akses dan sarana bagi pekerja untuk melakukan pelaporan terkait masalah ketenagakerjaan, salah satunya melalui forum dengan Serikat Pekerja. Hal ini juga telah diatur dalam PKB dan Prosedur terkait penyelesaian keluhan karyawan. Penyampaian keluhan karyawan dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk mendapatkan respon dan penyelesaian yang adil.

Mechanism for Handling Conflicts Related to Employment

The Company also pays attention to employee complaints or grievances by providing access and means for workers to make reports related to labor issues, one of which is through a forum with the Labor Union. This has also been regulated in the PKB and Procedures related to employee grievance resolution. Submission of employee complaints is carried out based on a predetermined mechanism to obtain a fair response and resolution with the following stages.

Due Diligence Terhadap Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan

Manajemen melakukan kajian atas berbagai permasalahan dan isu yang berkembang terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, Perusahaan tidak menemukan permasalahan terkait ketenagakerjaan yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan.

Due Diligence on Social Responsibility Related to Employment

Management conducts a review of various problems and issues that develop related to employment. In 2022, the Company did not find any labor-related issues that affect the development of the company's business.

Evaluasi Regulasi Terkait Ketenagakerjaan

Evaluasi regulasi terkait ketenagakerjaan dilakukan secara berkala dengan menimbang berbagai aspek pendukung serta kondisi internal maupun eksternal Perusahaan. Pada tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan evaluasi regulasi terkait ketenagakerjaan.

Evaluation of Labor-Related Regulations

Evaluation of regulations related to employment is carried out periodically by considering various supporting aspects and internal and external conditions of the Company. In 2022, the Company did not evaluate labor-related regulations.



Dampak Kuantitatif terhadap Turnover Karyawan

Lingkungan kerja yang nyaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat turnover karyawan. Hingga akhir tahun 2022, tingkat *turnover* tercatat sebanyak 63 karyawan, di antaranya adalah karyawan pensiun dini sebanyak 4 (empat) orang, habis kontrak sebanyak 8 (delapan) orang, meninggal sebanyak 2 (dua) orang, mengundurkan diri sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, diberhentikan karena melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan data tersebut, tingkat *turnover* karyawan di tahun 2022 masih tergolong rendah sehingga tidak memengaruhi kinerja operasional Perusahaan.

Dampak Kuantitatif Terkait Praktik Ketenagakerjaan dan K3

Perusahaan berkomitmen senantiasa memerhatikan keselamatan, kesehatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penetapan kebijakan dan penerapan praktik Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment*) secara konsisten. Serta menerapkan prosedur kerja yang ketat serta patuh padu hukum dan regulasi terkait K3. Hal tersebut guna memastikan tidak ada kejadian kecelakaan yang diakibatkan kegagalan pada sistem keselamatan karyawan. Sepanjang tahun 2022, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berusaha meminimalisir pekerja di lingkungan Perusahaan agar tidak terpapar Covid-19. Menghadapi hal tersebut, Perusahaan telah melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19 bagi para pekerja.

Quantitative Impact on Employee Turnover

A comfortable work environment has a significant effect on employee turnover rates. Until the end of 2022, the turnover rate was recorded at 63 employees, of which 4 (four) employees retired early, 8 (eight) people expired their contracts, 2 (two) people died, 28 (twenty eight) resigned) people, dismissed for committing violations of 3 (three) people. Based on these data, the employee turnover rate in 2022 is still relatively low so it does not affect the Company's operational performance.

Quantitative Impacts Related to Labor Practices and OHS

The Company is committed to always pay attention to the safety, health and security of workers as its most valuable asset. This commitment is realized in the establishment of policies and consistent implementation of Health, Safety, Security, Environment (HSE) practices. As well as implementing strict work procedures and complying with laws and regulations related to K3. This is to ensure that there are no accidents caused by failures in the employee safety system. Throughout 2022, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tried to minimize workers in the Company's environment from being exposed to Covid-19. Facing this, the Company has taken steps to handle Covid-19 for workers.





Tanggung Jawab Sosial Terkait Sosial Dan Kemasyarakatan

Social Responsibility Related to Social and Community

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan memiliki komitmen agar kehadirannya mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini juga sejalan dengan upaya Perusahaan dalam menciptakan kinerja usaha yang berkesinambungan. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak baik dan positif terhadap masyarakat.

Implementasi TJSL terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan ditargetkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapannya dilakukan dengan program yang berfokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK. Ruang lingkup penyebaran program pengembangan masyarakat dilakukan di semua lokasi kerja Perusahaan, baik di pusat maupun di setiap cabang Perusahaan.

Rencana Kegiatan Tahun 2022

Berikut adalah rencana dan kegiatan tahun 2022:

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Usaha UMK



Komitmen dan Kebijakan

The Company has a commitment that its presence is able to provide benefits to society, both economically and socially. This is also in line with the Company's efforts in creating sustainable business performance. This commitment is realized by organizing programs that have a good and positive impact on society.

The implementation of CSR related to social and community development is targeted to improve the social and economic welfare of the community. The implementation is carried out with programs that focus on the education sector, the environment, and the development of MSEs. The scope of deployment of community development programs is carried out in all work locations of the Company, both at the center and in each branch of the Company.

Action Plan for 2022

The following are plans and activities for 2022:

Increasing the Capacity and Capability of MSE Businesses





Program ini merupakan kebijakan PT PPI untuk membantu UMK menjadi tangguh dan mandiri. Pelaksanaan Program ini meliputi kegiatan pameran mitra binaan PUMK PT PPI di wilayah DKI, pelatihan UMKM Go Digital di wilayah Sumatera Barat, dan Pelatihan *Packaging Product* untuk UMK di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program Bedah Warung Mitra Warung Pangan



Program ini merupakan kebijakan PT PPI dalam memastikan keberlanjutan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis perusahaan. Pelaksanaan Program ini meliputi, renovasi warung mitra warung pangan serta pemberian bantuan peralatan ataupun barang lain untuk melengkapi kebutuhan mitra, seperti etalase, *showcase* atau kebutuhan lainnya. Dengan begitu, mitra dapat melengkapi barang dagangannya dan meningkatkan penjualan mitra yang berdampak meningkatnya omzet Warung Pangan. Program ini telah direalisasikan untuk beberapa mitra warung pangan di wilayah DKI, Yogyakarta dan Klaten.

Program Pelatihan Petani dan Pemberian Alat Pertanian



This program is PT PPI's policy to help MSEs become resilient and independent. The implementation of this program includes exhibition activities for PT PPI's PUMK fostered partners in the DKI area, training for Go Digital MSMEs in the West Sumatra area, and Product Packaging Training for MSEs in the Bantul area, Yogyakarta Special Region.

Renovation of Stall Partners of Warung Pangan



This program is PT PPI's policy in ensuring sustainability to answer the challenges faced by the company's business. The implementation of this program includes renovating food stall partners' stalls and providing assistance with equipment or other items to complement partner needs, such as storefronts, showcases or other needs. That way, partners can complete their merchandise and increase partner sales, which has an impact on increasing Warung Pangan turnover. This program has been realized for several food stall partners in DKI, Yogyakarta and Klaten.

Farmer Training Program and Provision of Agricultural Equipment





Salah satu fokus kegiatan menciptakan manfaat bersama adalah pembangunan masyarakat pedesaan dan pertanian melalui pemberdayaan para mitra petani yang merupakan *end user* produk Dharmabrand. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka melalui pelatihan pertanian yang di antaranya tentang cara menjaga tanaman dari hama dan pemberian alat pertanian untuk kelompok tani di wilayah Malang dan Demak, sehingga para petani mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di pedesaan. Dari sisi Perusahaan, mendapatkan peningkatan penjualan dengan meningkatkan pembelian produk Dharmabrand oleh para petani.

One of the focus of activities to create shared benefits is the development of rural communities and agriculture through the empowerment of partner farmers who are end users of Dharmabrand products. This is done in order to increase the productivity and quality of their agricultural products through agricultural training which includes how to protect plants from pests and the provision of agricultural tools for farmer groups in Malang and Demak, so that farmers are able to increase economic activities in rural areas. From the Company's side, getting an increase in sales by increasing the purchase of Dharmabrand products by farmers.

Beasiswa PPI



PPI Scholarship



PPI melaksanakan program bantuan beasiswa untuk pelajar berprestasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi serta menunjang mutu pendidikan bagi pelajar. Selain itu dengan adanya program bantuan ini bisa meringankan sedikit beban orang tua dari para siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

PPI carries out a scholarship assistance program for outstanding students. The assistance is expected to motivate and support the quality of education for students. In addition, the existence of this assistance program can ease the burden on parents of students in meeting their children's educational needs.



Pemberian Perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)



Program pemberian perangkat TIK merupakan salah satu bagian dari program prioritas dalam bidang pendidikan. Tujuan pemberian bantuan TIK untuk sekolah adalah untuk memudahkan para pelajar dalam mencari informasi untuk pendidikan, selain itu juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi pelajar karena pada era digital saat ini, perangkat TIK dapat menjadi jendela dunia bagi para pelajar.

Provision of ICT (Information and Communication Technology) Devices



The ICT equipment provision program is one part of the priority program in the field of education. The purpose of providing ICT assistance for schools is to facilitate students in finding information for education, but it also aims to broaden students' horizons because in today's digital era, ICT devices can be a window to the world for students.

Pembangunan Prasarana Pendidikan



Dalam upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia, PT PPI melakukan pembangunan sarana pendidikan berupa ruang kelas untuk Pondok Pesantren. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Education Infrastructure Development



In an effort to improve education in Indonesia, PT PPI is building educational facilities in the form of classrooms for Islamic boarding schools. Educational facilities and infrastructure can be useful to support the implementation of the teaching and learning process, both directly and indirectly in order to achieve educational goals.



Realisasi Anggaran CSR

Berikut adalah realisasi anggaran CSR tahun 2022:

CSR Budget Realization

The following is the realization of the 2022 CSR budget:

Kegiatan CSR Kemasyarakatan CSR Community Activities					
No.	Nama Program Program Name	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Status
1	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Usaha UMK Increased Capacity and Capability of MSEs	50.000.000,-	18.555.000,-	DKI, DIY, Padang.	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan Januari dan Agustus 2022 Implemented in January and August 2022
2	Bedah Warung Mitra Warung Pangan	100.000.000,-	31.313.050,-	DKI, Klaten, Yogyakarta	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan Mei dan Oktober 2022 Implemented in May and October 2022
3	Pelatihan Petani Farmer Training	100.000.000,-	22.644.000,-	Malang, Demak	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2022 Implemented in November and December 2022

Sebagai langkah mendukung gerakan Pemerintah mencerdaskan anak bangsa, Perusahaan berkontribusi memberikan sumbangan pendidikan kepada beberapa lembaga pendidikan, antara lain:

As a step to support the Government's movement to educate the nation's children, the Company contributes to providing educational donations to several educational institutions, among others:

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Status
1	Beasiswa PPI PPI Scholarship	50.000.000,-	44.750.000,-	DKI, Palu, Padang, Lampung, Solo, Denpasar	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Agustus 2022 Implemented in June and August 2022
2	Pemberian Perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Provision of ICT (Information and Communication Technology) Devices	50.000.000,-	25.600.000,-	Sigi, Palu	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan November 2022 Implemented in November 2022
3	Pembangunan Prasarana Pendidikan Education Infrastructure Development	80.000.000,-	80.000.000,-	Klaten	Selesai Completed Telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 Implemented in August 2022

Sepanjang tahun 2022 PPI telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan Kemasyarakatan sebesar Rp3.665.000.000,-

Throughout 2022 PPI has distributed social and community responsibility funds amounting to Rp3.665.000.000,-



Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak menerima pengaduan maupun sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap masyarakat serta tidak terjadi konflik sebagai akibat dari aktivitas bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

Di samping itu, Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional dan membina komunikasi dua arah yang baik. Perusahaan juga memiliki Prosedur Pengelolaan Keluhan Pelanggan No. 12/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tanggal 30 September 2018 sehingga seluruh pengaduan yang masuk senantiasa segera ditindaklanjuti oleh Perusahaan melalui penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak Kegiatan

Selama Perusahaan beroperasi dan menjalankan kegiatan CSR, Perusahaan telah memberikan berbagai manfaat positif bagi pengembangan masyarakat berkelanjutan di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Sebab Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan kinerja diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Komitmen Perusahaan diwujudkan salah satunya dengan berbagi dan memberikan penyuluhan tentang pertanian ataupun kesehatan dengan masyarakat setempat, yakni masyarakat di sekitar wilayah operasional. Perusahaan berharap melalui berbagai kegiatan yang telah dijalankan akan memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan serta tingkat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada dampak ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Selain itu juga, terciptanya kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat sekitar sehingga Perusahaan dapat beroperasi secara optimal dalam jangka Panjang.

Handling of Community Complaints

Throughout 2022, the Company did not receive any complaints or sanctions related to non-compliance with the community and no conflicts occurred as a result of the Company's business activities. Therefore, management does not carry out the handling of social community conflicts with any parties who feel disadvantaged or affected.

In addition, the Company always maintains harmonious relationships with communities around its operational areas and fosters good two-way communication. The Company also has a Customer Complaint Management Procedure No. 12/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 dated September 30, 2018 so that all incoming complaints are always immediately followed up by the Company through direct or indirect settlement.

Impact of Activities

During the Company's operations and CSR activities, the Company has provided various positive benefits for sustainable community development around the Company's operational areas. This is because the Company is committed to ensuring that performance growth is followed by an increase in the welfare of the community around the Company's operational areas, both economically and socially.

The Company's commitment is realized, among others, by sharing and providing counseling on agriculture or health with the local community, namely the community around the operational area. The Company hopes that through various activities that have been carried out, it will have a positive impact on improving the welfare and health levels of the community, which in turn will affect the economic and social impact of the community at large. In addition, the creation of trust and cooperation with the surrounding community so that the Company can operate optimally in the long term.



Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan Atau Konsumen

Social Responsibility to Customers or Consumers

Kebijakan Dan Komitmen

Perusahaan berfokus dalam penerapan pelayanan yang prima kepada para pelanggan. Sebab pelanggan merupakan pihak eksternal yang sangat berpengaruh bagi keberlanjutan Perusahaan ke depan. Pelanggan juga termasuk pihak yang menjadi perhatian Perusahaan untuk senantiasa ditunjang dengan pelayanan yang memadai dan memuaskan, sehingga diharapkan terciptanya keterikatan pelanggan.

Perusahaan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi kepuasan pelanggan serta menghadirkan produk dan layanan yang memiliki kualitas dan keamanan yang sesuai dengan standar mutu sebagaimana ketentuan regulator.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan operasi pasar khususnya minyak goreng yang sempat mengalami kelangkaan, menyediakan layanan *home care* di mana pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah di masa pandemi Covid-19. Perusahaan menyadari bahwa kepentingan pelanggan menjadi prioritas utama bagi Perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam industri kesehatan nasional dengan layanan profesional kelas dunia serta misi Perusahaan yaitu menjalankan usaha layanan kesehatan berkualitas, berorientasi pada sinergi sumber daya dan teknologi terkini serta pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

Target/Rencana Kegiatan Tahun 2022

Target dan rencana kegiatan Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan adalah memberikan edukasi kesehatan melalui sosial media.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Perusahaan senantiasa menjaga kesehatan dan memperhatikan keselamatan pelanggan. Kami telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal di setiap Cabang Perusahaan.

Perusahaan juga senantiasa melakukan *monitoring* dan evaluasi secara teratur terhadap Standar Indikator Mutu guna menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan. Adapun Standar Indikator Mutu yang ditetapkan Perusahaan meliputi indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien.

Policy and Commitment

The Company focuses on implementing excellent service to customers. Because customers are external parties that are very influential for the sustainability of the Company in the future. Customers are also among the parties that are of concern to the Company to always be supported by adequate and satisfactory service, so that it is expected to create customer attachment.

The Company is committed to always providing the best service for customer satisfaction and presenting products and services that have quality and safety in accordance with quality standards as stipulated by the regulator.

In 2022, the Company conducted market operations, especially cooking oil which had experienced scarcity, providing home care services where patients still get health services from home during the Covid-19 pandemic. The Company realizes that the interests of customers are the top priority for the Company. This is in accordance with the Company's vision of becoming the best company in the national health industry with world-class professional services and the Company's mission of running a quality health service business, oriented towards resource synergy and the latest technology and sustainable growth of the Company.

Target / Activity Plan for 2022

The Company's target and activity plan related to corporate social responsibility towards customers is to provide health education through social media.

Activities Implemented and Achievements

Maintaining Customer Health and Safety

The Company always maintains the health and safety of its customers. We have established Minimum Service Standards in every branch of the Company.

The Company also conducts regular monitoring and evaluation of Quality Indicator Standards to maintain and improve service quality. The Quality Indicator Standards set by the Company include clinical area indicators, management areas and patient safety targets.



Komunikasi Produk dan Layanan

Perusahaan menyediakan informasi yang lengkap terkait produk dan layanan. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait produk dan layanan Perusahaan melalui website www.ptppi.co.id.

Selain itu, Perusahaan juga menyediakan saluran/ media informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Media informasi tersebut secara lengkap terdapat pada Profil Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Layanan Pengaduan Keluhan Pelanggan

Perusahaan menyediakan saluran untuk menampung keluhan pelanggan sehingga dapat direspon dengan cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara baik.

Alur dan mekanisme layanan dan penanganan keluhan dan pengaduan bagi pelanggan dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Seluruh keluhan pelanggan yang masuk akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Divisi Pemasaran serta diteruskan kepada Unit terkait lainnya. Sepanjang tahun 2022, berdasarkan survey kepuasan pelanggan tahun 2022 yang telah diisi oleh 1.038 responden, terdapat 34 responden yang mengeluhkan kualitas produk yang dijual oleh PT PPI, 76 responden menyarankan agar dilakukan program promosi dan diskon, sebanyak 97 responden mengeluhkan tentang ketersediaan stok barang, serta sebanyak 247 responden memberikan komentar terkait harga produk yang dijual PPI cenderung tinggi dan tidak bersaing di pasaran. selebihnya para responden menyatakan telah cukup puas dengan kinerja PT PPI. Semua saran yang masuk telah diselesaikan dengan baik sehingga menghasilkan satu komitmen yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perusahaan menyadari bahwa aduan yang diberikan merupakan saran yang membangun dalam pengembangan perusahaan dan sebagai upaya membangun sinergitas yang baik antara Perusahaan dan Pelanggan.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Konsumen

Penanganan serta perhatian yang diberikan oleh Perusahaan terkait isu-isu yang dibutuhkan oleh konsumen sejauh ini telah berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hubungan bisnis.

Product and Service Communication

The Company provides complete information regarding products and services. Customers can easily obtain information related to the Company's products and services through the website www.ptppi.co.id.

In addition, the Company also provides information channels/media required by stakeholders. The complete information media is available in the Company Profile in this annual report.

Customer Complaint Service

The Company provides channels to accommodate customer complaints so that they can be responded quickly to incoming complaints and resolved properly.

The flow and mechanism of service and handling of complaints and complaints for customers can be seen in the scheme below.

All incoming customer complaints will be recorded and followed up by the Marketing Division and forwarded to other related units. Throughout 2022, based on the 2022 customer satisfaction survey filled out by 1,038 respondents, there were 34 respondents who complained about the quality of products sold by PT PPI, 76 respondents suggested that promotion and discount programs be carried out, 97 respondents complained about the availability of stock items, and 247 respondents commented on the price of products sold by PPI which tended to be high and not competitive in the market. the rest of the respondents stated that they were quite satisfied with the performance of PT PPI. All incoming suggestions have been resolved properly, resulting in a commitment that is beneficial to both parties. The company realizes that the complaints given are constructive suggestions in the development of the company and as an effort to build good synergy between the Company and the Customer.

Scope of the Company's Influence on Consumer Issues

The handling and attention given by the Company related to issues needed by consumers has been running well so far that it does not have a significant influence on the continuity of business relations.



Dampak Kualitatif Terkait Tanggung Jawab Produk

Dengan didukung kepercayaan konsumen, Perusahaan berhasil meningkatkan kinerja bisnis secara berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan Perusahaan untuk menjaga tanggung jawab produk dan jasa berdampak positif pada kepercayaan konsumen. Hal ini terlihat dari hasil survei kepuasan pelanggan yang menunjukkan nilai indeks sebesar 3,21 dari skala 4.

Survei Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kriteria penting bagi Perusahaan dalam menilai kualitas produk secara keseluruhan. Dalam rangka mengevaluasi kelemahan dan kelebihan produk serta posisinya di antara pelanggan, Perusahaan secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2022, nilai indeks survei kepuasan pelanggan adalah sebesar 3,21 dari skala 4. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap keseluruhan produk dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan.

Qualitative Impacts Related to Product Responsibility

Supported by consumer trust, the Company has successfully improved its business performance in a sustainable manner. Various efforts made by the Company to maintain product and service responsibility have a positive impact on consumer confidence. This can be seen from the results of the customer satisfaction survey which showed an index value of 3.21 on a scale of 4.

Customer Satisfaction Survey

Customer satisfaction is one of the important criteria for the Company in assessing overall product quality. In order to evaluate the weaknesses and strengths of products and their position among customers, the Company regularly conducts customer satisfaction surveys.

In 2022, the customer satisfaction survey index value was 3.21 on a scale of 4. Based on the survey results, it shows that customers are satisfied with the overall products and services provided by the Company.



A large, bold, orange number '8' is positioned in the upper left corner of the page. The background features a light gray textured surface with abstract geometric shapes in blue and orange at the bottom right.

Laporan Keuangan

Audited Financial Report



PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA

member of  ID FOOD



**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak/*and Subsidiaries***

Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

*Financial Statements
for the year ended
December 31, 2022*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditors' Report thereon

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Direksi / *Directors Statement*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian/ *Consolidated Financial Statements*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / <i>Statements of Consolidated Financial Position</i>	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Changes in Equity</i>	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Statements of Consolidated Cash Flows</i>	6

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	7 - 126
---	---------

Lampiran/ *Appendices*

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)/ <i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>	i - ii
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>	iii

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA AND SUBSIDIARIES***

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

- | | |
|---|--|
| 1. Nama/ Name | : Nina Sulistyowati |
| Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat 10160 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : KHI Cluster Asia Tropis Blok AT. 10 No.10 |
| Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : +62 21 386 2141-42 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. Nama/ Name | : Wien Irwanto |
| Alamat Kantor/ <i>Office Address</i> | : Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat 10160 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : Duta Bintaro B-1/9, Pakujaya, Serpong Utara |
| Nomor Telepon/ <i>Phone Number</i> | : +62 21 386 2141-42 |
| Jabatan/ <i>Position</i> | : Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/
<i>Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General</i> |

Menyatakan bahwa:

Stated that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan entitas anak; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and subsidiaries;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan Keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material; | b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material information and fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and subsidiaries internal control system.</i> |

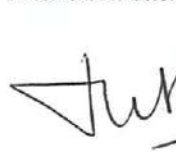
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

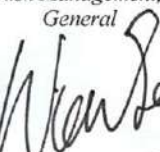
Jakarta, 17 April/ April 17, 2023

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum/
Director of Finance, Risk Management, Human Resources & General


Nina Sulistyowati




Wien Irwanto



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

No. : 00864/2.1133/AU.1/05/1655-2/1/IV/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris
dan Direksi

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Entitas Anaknya ("Grup") yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

*The Shareholders, Commissioner,
and Directors*

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia and its subsidiaries ("the Group") which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards established by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia

Tel +62 21 29932121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 14 atas laporan keuangan, Nilai buku aset tetap sebesar Rp1.959.994.688.400, nilai buku tersebut termasuk Rp48.969.194.198 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan Rp43.140.103.896 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa Kami juga membawa perhatian ke catatan 19 atas laporan Keuangan, nilai buku aset lain-lain (aset tetap yang tidak dimanfaatkan) sebesar Rp417.427.547.028. Nilai buku tersebut termasuk Rp10.264.180.725 yang merupakan tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumen kepemilikan lainnya dan secara fisik dikuasai pihak ketiga, dan Rp213.008.370.719 yang merupakan tanah dan bangunan yang sertifikat Hak Guna Bangunannya telah kedaluwarsa. Manajemen telah dan akan terus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan penguasaan secara fisik dan sertifikat kepemilikan atas aset-aset tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 14 to the financial statement, book value of fixed assets as presented in the accompanying statement of financial position as of December 31, 2022 amounting to Rp1,959,994,688,400. The book value includes Rp48,969,194,198 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp43,140,103,896 of land and buildings whose Right to Use certificates had expired. We also draw attention to Note 19 to the financial statement, book value of Other Assets (Unused fixed asset) amounting to Rp417,427,547,028. The book value includes Rp10,264,180,725 of land and buildings which are not supported by Right to Use certificates or other proof of ownership and are physically occupied by third parties, and Rp213,008,370,719 of land and buildings whose Right to Use certificates had expired. Management has taken measures and will continue its effort to ensure that it secures the physical possession and the ownership certificates of the assets concerned. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit we remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain

Report on Other Legal and Regulatory requirements

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. PHHARP-AL/109/YS/KR/2023 dan No. PHHARP-AL/110/YS/KR/2023 tanggal 17 April 2023.

The reports on compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. PHHARP-AL/109/YS/KR/2023 and No. PHHARP-AL/110/YS/KR/2023 dated April 17, 2023.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA
Register Akuntan Publik/ *Public Accountant Registered No. AP.1655*

17 April / *April 17, 2023*

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Consolidated Statements of Financial Position
As at December 31, 2022
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	3e, 5	181.417.662.371	173.058.934.548	Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka	6	3.000.000.000	21.828.113.040	Time Deposits
Piutang Usaha	3f, 7			Trade Receivables
Pihak Berelasi		155.699.137.591	182.492.528.708	Related Parties
Pihak Ketiga		275.593.638.499	158.847.148.723	Third Parties
Piutang Lain-Lain	8	60.966.897.707	62.737.954.385	Other Receivables
Persediaan	3h, 9	97.027.966.024	74.515.950.367	Inventories
Uang Muka	3i, 10	113.857.090.222	53.030.974.710	Advances
Pajak Dibayar Dimuka	26a	55.841.283.523	30.668.162.431	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	3i, 11	13.035.553.643	36.341.700.162	Prepaid Expenses
Biaya Operasi dalam Proses	12	27.980.946.657	29.749.940.504	Operation Costs in Process
Jumlah Aset Lancar		984.420.176.237	823.271.407.578	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	8.372.650.462	10.422.281.574	Investments in Associates
Aset Tetap	3j, 14	1.959.994.688.400	2.124.488.087.146	Fixed Assets
Aset Tidak Berwujud	15	19.705.899.498	19.523.768.601	Intangible assets
Properti Investasi	3k, 16	1.121.278.365.153	935.866.893.505	Investment Properties
Aset Hak Guna	17	7.344.079.928	477.325.453	Right of Use Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar lainnya	18	-	287.000.000	Other Non-current Financial Assets
Aset Pajak Tangguhan	26c	36.805.214.050	37.473.684.259	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	19	447.446.044.927	459.212.433.427	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.600.946.942.418	3.587.751.473.965	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		4.585.367.118.655	4.411.022.881.543	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries
Consolidated Statements of Financial Position**

(continued)
As at December 31, 2022

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	20			Trade Payable
Pihak Berelasi		52.119.587.840	29.650.183.122	Related Parties
Pihak Ketiga		305.191.151.013	180.296.398.692	Third Parties
Utang Pajak	26b	7.060.350.848	16.458.421.151	Tax Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek				Other Current
Lainnya	21	38.597.913.803	57.877.800.922	Financial Liabilities
Liabilitas Sewa	22	664.204.976	65.287.499	Lease Liabilities
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	69.005.300.485	59.444.566.924	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	3s, 24	126.573.158.904	102.807.301.152	Unearned Revenues
Utang Bank – Jangka Pendek	25	173.802.032.540	143.366.049.385	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	3u, 27	24.061.349.309	26.136.879.641	Current Portion of Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		797.075.049.718	616.102.888.488	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang	27	913.847.714.953	925.217.534.310	Long Term Payables
Liabilitas Sewa	28	54.425.994	1.274.143.419	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	29	38.787.165.185	80.990.668.555	Post-Employment Benefits Obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		952.689.306.132	1.007.482.346.284	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		1.749.764.355.850	1.623.585.234.772	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	3z, 30	942.745.000.000	942.745.000.000	Share Capital
Selisih				Difference from
Transaksi Restrukturisasi				Restructuring Transactions of
Entitas Sepengendali	1e	(231.042.410.552)	(231.042.410.552)	Entities Under Common Control
Saldo laba				Retained Earnings
Telah ditentukan				
Penggunaannya				Appropriated
Cadangan Umum	31	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	32	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan				
Penggunaannya	33	2.010.438.746.181	1.962.307.061.200	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas		2.835.563.683.092	2.787.431.998.111	Total equity attributable to owner of the Entity
Kepentingan nonpengendali	34	39.079.713	5.648.660	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.835.602.762.805	2.787.437.646.771	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.585.367.118.655	4.411.022.881.543	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
**Consolidated Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income**
For the Year ended
December 31, 2022
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Usaha	3r, 35	2.367.519.377.945	1.938.824.894.813	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	36	(1.969.866.797.099)	(1.672.571.418.839)	Cost of Revenues
LABA KOTOR		397.652.580.846	266.253.475.974	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	37	(15.716.466.664)	(16.206.222.672)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	38	(300.867.574.467)	(378.893.388.556)	General and Administration Expenses
Beban Usaha		(316.584.041.131)	(395.099.611.228)	Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA		81.068.539.715	(128.846.135.254)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA				NON OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	39	60.512.312.431	8.744.130.692	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	39	(65.718.170.064)	(57.838.742.589)	Non-Operating Expense
Beban Non-Usaha – Bersih		(5.205.857.633)	(49.094.611.897)	Non-Operating Expense – Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		75.862.682.082	(177.940.747.151)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Penghasilan (Beban) Pajak:				Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	26c	(16.444.673.079)	(15.237.375.000)	Final Tax
Pajak Kini	26c	(9.032.834.641)	(2.029.918.715)	Current Tax
Pajak Tangguhan	26c	(1.296.013.874)	49.913.036.113	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak		(26.773.521.594)	32.645.742.398	Total Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		49.089.160.488	(145.295.004.753)	NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	29	(10.767.528.497)	(25.645.982.358)	Remeasurement of Employee Benefits
Perubahan nilai wajar aset Keuangan		(2.049.631.112)	-	Changes in fair value of Financial assets
Perubahan nilai wajar aset non Keuangan	15, 16, 19	11.265.571.490	341.872.768.000	Changes in fair value of non Financial assets
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi		627.543.665	(69.569.892.841)	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan		(924.044.454)	246.656.892.801	Other Comprehensive Income for Current Year
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		48.165.116.034	101.361.888.048	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT YEAR

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian** (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
**Consolidated Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income** (continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada:				Net Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		49.084.983.601	(145.290.435.842)	Owners of The Entity
Kepentingan Non-pengendali		4.176.887	(4.568.911)	Non-controlling Interest
		49.089.160.488	(145.295.004.753)	
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		48.131.684.981	101.366.456.959	Owners of The Entity
Kepentingan Non pengendali		33.431.053	(4.568.911)	Non-controlling Interest
		48.165.116.034	101.361.888.048	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries
Consolidated Statements of Changes in Equity
For the year ended December 31, 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Description Shares Capital	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control	Saldo Laba (Rugi) / Retained Earnings			Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah/ Total	Description Balance as at December 31, 2020 Total comprehensive income for current period Changes of investment in subsidiaries Difference from restructuring transactions of entites under common control
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
			Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Khusus/ Specific Reserve					
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	942.745.000.000	(114.116.097.080)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.735.670.579.848	2.677.721.830.231	5.330.372.069	2.683.052.202.300	
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	101.366.456.959	101.366.456.959	(4.568.911)	101.361.888.048	
Penyesuaian investasi anak	-	-	-	-	-	-	(5.320.154.498)	(5.320.154.498)	
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(116.926.313.472)	-	-	125.270.024.393	8.343.710.921	-	8.343.710.921	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	1.962.307.061.200	2.787.431.998.111	5.648.660	2.787.437.646.771	
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	48.131.684.981	48.131.684.981	33.431.053	48.165.116.034	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	942.745.000.000	(231.042.410.552)	111.890.435.294	1.531.912.169	2.010.438.746.181	2.835.563.683.092	39.079.713	2.835.602.762.805	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Its Subsidiaries**
Consolidated Statements of Cash Flows
For the year ended
December 31, 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.395.403.333.932	1.901.014.936.498	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(2.341.462.581.398)	(1.948.737.248.791)	Cash payment to vendors and employees
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya	(25.764.062.063)	(18.249.677.474)	Cash payment to operational expenses and others
Pembayaran pajak	(47.449.996.493)	(8.476.775.066)	Tax payment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(19.273.306.022)	(74.448.764.833)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(9.464.781.242)	(59.869.002.949)	Acquisition of fixed assets
Penambahan properti investasi	(463.346.667)	-	Addition of investment property
Penarikan (penempatan) deposito	18.828.113.040	(20.428.113.040)	Withdrawal (placement) deposit
Penambahan aset lain-lain	(2.450.020.124)	(2.516.049.786)	Acquisition of other assets
Penambahan aset tidak berwujud	(885.200.000)	(13.648.357.331)	Acquisition of intangible assets
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	5.564.765.007	(96.461.523.106)	Net cash obtained from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS IN FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka pendek lainnya	35.318.983.155	120.515.639.767	Receipts (payments) of other current financial liabilities
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman jangka Panjang	(13.148.697.683)	(4.758.294.332)	Receipts (payments) of long term payables
Pembayaran liabilitas sewa	(103.016.634)	(2.037.894.954)	Payment of lease liabilities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	22.067.268.838	113.719.450.481	Net cash obtained from financing activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	8.358.727.823	(57.190.837.458)	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent
Kas dan setara kas – pada awal tahun	173.058.934.548	230.249.772.006	Cash and cash equivalent – At the beginning of the year
KAS DAN SETARA KAS – PADA AKHIR TAHUN	181.417.662.371	173.058.934.548	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (“Entitas”) atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Cipta Niaga (Persero), yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor, dan distribusi. Penggabungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Grup Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Pasal 34 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Grup Terbatas serta Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang penggabungan PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero) kedalam PT Cipta Niaga (Persero) yang berganti nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Penggabungan PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Dharma Niaga (Persero) ke dalam PT Cipta Niaga (Persero) disepakati melalui rancangan penggabungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing perusahaan tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2003 yang dikukuhkan dengan akta notaris Betsail Untajana, SH No.4 tanggal 9 Juni 2003. Sedangkan penggabungan ketiga perusahaan tersebut disahkan dengan akta Risalah Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH tanggal 9 Juni 2003 yang antara lain mengesahkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, perubahan anggaran dasar serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No.C-14008 HT.04- TH.2003 tanggal 19 Juni 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75 Tambahan No. 8784 tanggal 19 Juni 2003.

1. G E N E R A L

a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (“The Entity”) or Indonesia Trading Company (ITC) is the merger of three State-Owned Enterprises (BUMN), PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero) and PT Cipta Niaga (Persero), which is engaged in export trade, import and distribution. The merger was conducted under Act No. 1 of 1995 concerning Limited Companies and Government Regulation No.27 of 1998 Article 34 concerning Merger, Consolidation and Takeover of Limited Company and Government Regulation No.22 Year 2003 dated March 31, 2003 regarding merger of PT Dharma Niaga (Persero) and PT Pantja Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) which was renamed PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The merger of PT Pantja Niaga (Persero) and PT Dharma Niaga (Persero) into PT Cipta Niaga (Persero) is agreed through the draft mergerd in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the respective company held on February 4, 2003 certified by notarial deed Betsail Untajana, SH No.4 dated June 9, 2003. While the merger of the three companies was approved by deed of Extraordinary Shareholders Meeting of Notary Public Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No.3 dated June 9, 2003 which among others legalized the change of company’s name to PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, amendment of articles of association and increase of authorized capital, issued and paid-up capital. The amendment of the articles of association was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its Decision Letter No.C-14008 HT.04-TH.2003 dated June 19, 2003 and published in State Gazette No.75 Additional No. 8784 dated June 19, 2003.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kantor pusat Entitas berlokasi di Graha PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Bidang Usaha

Tujuan Entitas melakukan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Entitas untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas. Kegiatan usaha utama Entitas yaitu perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri yang mencakup ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan dan juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan umum, industry, bahan bahan konstruksi, alat-alat Kesehatan, treatment air limbah, pergudangan, penyedia akomodasi, penyedia makanan minuman, real estate, sewa guna dan laboratorium, jasa perdagangan, perdagangan besar farmasi, minyak dan gas serta produk turunannya.

1. G E N E R A L (continued)

**a. Establishment and General Information
(continued)**

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 dated December 2, 2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which is notarized under Deed No.3 dated December 2, 2021 by Aulia Taufani, S.H., Ministry of Stated Own Enterprises agreed to restructure BUMN through the merger of PT Bhanda Ghara Rekso (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The Entity's head office is located at Graha PPI Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

b. Scope of Business

The intent and purpose of the Entity is to conduct business generally in the field of trading, as well as optimize the utilization of resources owned by the Entity to produce high quality goods and/or services with strong competitiveness to generate profit/ by applying the principles of Limited Liability Entity. The Entity's main business activities are international trade and domestic trade covering export, import, inter island, local trade, distribution, representative and agency as well as procurement of agricultural, forestry, plantation, fishery, mining industry, construction materials, medical devices wastewater treatment, warehousing, accommodation providers, food and beverage providers, real estate, leasing and laboratories, trade services, big pharmaceutical trade, oil and gas and its derivative products.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

b. Bidang Usaha (lanjutan)

Disamping kegiatan usaha utama tersebut Entitas dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yaitu sewa gedung, sewa gudang, sewa kantor, sewa ruko, sewa lahan, transportasi, properti, pariwisata dan melaksanakan penugasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Entitas dan peraturan perundang-undangan.

Entitas menjalankan kegiatan usahanya melalui Kantor Pusat di Jakarta dan:

- (1) Kantor Cabang Regional (10 Kantor Cabang Regional);
- (2) Kantor Cabang, (22 Kantor Cabang);
- (3) Kantor Sub Cabang, (2 Kantor Sub Cabang);
- (4) Kantor Depo.

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut (Catatan 49):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Herman Heru Suprobo*)
Muhammad Kapitra Ampera
Hamli
Setiawan Wangsaatmaja

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko, SDM &
Umum
Direktur Komersial &
Pengembangan
Direktur Operasi

Nina Sulistyowati

Wien Irwanto

Andry Tanudjaja
Tri Wahyundo Hariyatno

*) Digantikan oleh Bara Khrisna Hasibuan sejak 20 Januari 2023 (lihat catatan 49)

1. G E N E R A L (continued)

b. Scope of Business (continued)

In addition to the principal business activities, the Entity may conduct business activities in the framework of optimizing the utilization of its own resources, namely building rental, warehouse lease, office rent, rental shop, land rental, transportation, property, tourism and carry out government assignments in accordance with the principles of Entity management and legislation.

The Entity carried out its bussines activites through Head Office in Jakarta and:

- (1) Regional Branch Offices, (10 Regional Branch Offices);*
- (2) Branch Offices, (22 Branch Offices);*
- (3) Sub-Branch Office, (2 Sub-Branch Offices);*
- (4) Depo Office.*

c. The composition of the Board of Commissioners and Directors

The composition of the Entity's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2022 and 2021 are as follows (Note 49):

Board of Commisioner

*President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner*

Board of Director

*President Director
Director of Finance, Risk
Management, HR &
General Affairs
Director of Commercial &
Development
Director of Operation*

**) Replaced by Bara Khrisna Hasibuan effective from January 20, 2023 (see note 49)*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

d. Consolidated Subsidiaries

Kepemilikan Entitas pada entitas anak yang
dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

*The Entity's ownership in consolidated
subsidiaries are as follows:*

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Dimulainya Kegiatan Komersial/ Commencement of Commercial Activities	Jumlah Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Elimination (Rp)	
			2022	2021		2022	2021
PT PPI Industri	Palembang	Manufaktur dan Perdagangan/ Manufacturing and Trading	99,90%	99,90%	18 Sep 1986	64.638.910.187	22.969.245.903
PT BGR Logistik Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai/ formerly known as PT Trisari Veem)	Jakarta Utara	Jasa pengurusan transportasi/ Transportation service	99,96%	99,96%	19 Nov 1963	235.172.049.154	131.159.531.470

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri)**

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri) sebelumnya dikenal
sebagai PT Dharma Niaga Putera Steel
didirikan berdasarkan akta notaris Syamsul
Hadi, SH No. 33 tanggal 18 September 1986.

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri)**

*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Industri (PT PPI Industri) formerly known as
PT Dharma Niaga Putera Steel was established
based on notarial deed of Syamsul Hadi, SH
No.33 dated September 18, 1986.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT BGR Logistic Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT Trisari Veem)

PT Trisari Veem didirikan berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No.49 tanggal 19 November 1963.

Berdasarkan akta notaris Kurnia Ariani, S.H No.20 tanggal 13 Oktober 2021. Entitas menambah kepemilikan dengan membeli 40% saham dari PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham sehingga kepemilikan di PT Tri Sari Veem menjadi 99,9%. Saham tersebut telah dinilai dengan harga pasar berdasarkan perhitungan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto dan Rekan (KJPP AMAR) melalui laporan No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan akta perubahan terakhir oleh Kurnia Ariyani, S.H., No 22 tanggal 13 Oktober 2021, PT Trisari Veem berganti nama menjadi PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

e. Penggabungan Usaha

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-119/MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan, Pemerintah Indonesia berencana menggabungkan sembilan BUMN di Indonesia ke dalam Holding Pangan. BUMN yang akan digabung ke dalam Holding Pangan tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhandha Ghara Reksa (BGR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Garam (Garam).

1. G E N E R A L (continued)

d. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT BGR Logistic Indonesia (formerly known as PT Trisari Veem)

PT Trisari Veem was established based on notarial deed of Eliza Pondaag, S.H., No.49 dated November 19, 1963.

Based on Notarial Deed of Kurnia Ariani, S.H., No.20 dated October 13, 2021 the Entity increased its ownership by acquiring 40% shares from PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk counting of 1,000 shares with a value of Rp 1,000,000 per share, therefore the ownership in PT Tri Sari Veem became 99.9%. Based on the calculation of the valuation carried out by the Public Appraisal Service Office of Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto and Partners (KJPP AMAR) through report No: 00304/2./0038-00/BS/06/0819/0XI/20 dated November 30, 2020.

Based on notarial deed of Kurnia Ariyani, S.H., No. 22 dated October 13, 2021 PT Trisari Veem was renamed PT BGR Logistic Indonesia (BLI).

e. Merger

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No: SK-119/MBU/04/2020 Forming Accelerate Team to Develop Food Industry "Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Industri Pangan", the Government of Indonesia plans to merge nine SOEs in Indonesia into a Food Holding. SOEs that will be merged into Food Holding are: PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani (Pertani), PT Berdikari (Berdikari), PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Bhandha Ghara Reksa (BGR), PT Indonesian Trading Company (PPI) and PT Garam (Garam).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021 menetapkan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan segala hak dan kewajiban serta kekayaan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) beralih karena hukum kepada Entitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.06/2021 tanggal 9 November 2021, nilai kekayaan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) yang digabung ke dalam modal saham Entitas sebesar Rp786.545.000.000.

Pada tanggal 2 Desember 2021, melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan diatas, modal dasar Entitas ditingkatkan menjadi sebesar Rp1.175.877.000.000 terbagi atas 1.175.877 saham yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, 1.175.876 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp1.175.876.000.000.

1. G E N E R A L (continued)

e. Merger (continued)

Subsequently, Government Regulation No. 97 Year 2021 dated September 15, 2021 stipulated that PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) was declared dissolved without liquidation and by law all rights and obligations as well as assets of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) were transferred to the Entity.

Based on Decree of Minister of Finance of the Republic Indonesia No. 460/KMK.06/2021 dated November 9, 2021 the value of the net assets of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) which is merged into the share capital of the Entity amounting to Rp786,545,000,000.

On 2 December 2021, through Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which is notarized under Deed No.3 dated December 2, 2021 by Aulia Taufani, S.H., Ministry of Stated Own Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprise through the merger of PT Bhanda Ghara Rekza (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

In connection with the above merger, the Entity's authorized capital was increased to Rp1,175,877,000,000 divided into 1,175,877 shares consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000, 1,175,876 B series shares each with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp1,175,876,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 942.745 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 942.745.000.000 yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 1.000.000, 942.744 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp942.745.000.000.

100% saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp942.745.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara berikut: Sebesar Rp156.200.000.000 merupakan setoran lama sesuai dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 Juni 2003, Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notaris di Tangerang, dan sebesar Rp786.545.000.000 berasal dari Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksha (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

i) Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Atas penggabungan usaha tersebut di atas Entitas menerapkan PSAK 38: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan mengakui selisih restrukturisasi entitas sepengendali dengan perhitungan sebagai berikut:

2021	
Nilai buku aset bersih BGR	555.502.589.448
Nilai valuasi saham BGR	786.545.000.000
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(231.042.410.552)

1. G E N E R A L (continued)

e. Merger (continued)

Of the authorized capital, 942,745 shares have been issued and subscribed by the Republic of Indonesia with a total nominal value of Rp 942,745,000,000 consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp 1,000,000, 942,744 B series shares each with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp942,745,000,000.

100% of the issued shares above, or a total of Rp942,745,000,000 has been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholder) through the following of: a total of Rp156,200,000,000 represents the old placement in accordance with the Notarial Deed No. 3 dated June 9, 2003 of Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, Notary in Tangerang, and total of Rp786,545,000,000 originating from the Merger of PT Bhanda Ghara Reksha (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

i) Difference in Restructuring of Entities Under Common Control

For the above merger, the Entity applied PSAK 38: "Business Combination of Entities under Common Control" and recognized the difference in restructuring of entities under common control with the following calculation:

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

e. Merger (continued)

2021			
	Dengan penggabungan usaha/ <i>With merger</i>	Tanpa penggabungan usaha/ <i>Without merger</i>	
ASET			ASSETS
Aset Lancar	823.271.407.578	462.969.391.013	<i>Current Assets</i>
Aset Tidak Lancar	3.587.751.473.965	3.065.336.571.181	<i>Non-Current Assets</i>
JUMLAH ASET	4.411.022.881.543	3.528.305.962.194	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek	616.102.888.488	352.845.839.527	<i>Current Liabilities</i>
Liabilitas Jangka Panjang	1.007.482.346.284	933.069.607.686	<i>Non-current Liabilities</i>
Jumlah Liabilitas	1.623.585.234.772	1.285.915.447.213	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham	942.745.000.000	567.745.000.000	<i>Share Capital</i>
Selisih			<i>Difference from</i>
Transaksi Restrukturisasi Entitas			<i>Restructuring Transactions of Entities</i>
Sepengendali	(231.042.410.552)	-	<i>Under Common Control</i>
Saldo laba			<i>Retained Earnings</i>
Telah ditentukan Penggunaannya			<i>Appropriated</i>
Cadangan Umum	111.890.435.294	(107.539.799.006)	<i>General Reserves</i>
Cadangan Khusus	1.531.912.169	1.531.912.169	<i>Specific Reserves</i>
Belum ditentukan Penggunaannya	1.962.307.061.200	1.780.647.753.158	<i>Unappropriated</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan			<i>Total equity</i>
kepada pemilik Entitas	2.787.431.998.111	2.242.384.866.321	<i>attributable to owner of th Entity</i>
Kepentingan nonpengendali	5.648.660	5.648.660	<i>Non-controlling Interests</i>
Jumlah Ekuitas	2.787.437.646.771	2.242.390.514.981	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.411.022.881.543	3.528.305.962.194	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

e. Penggabungan Usaha (lanjutan)

e. Merger (continued)

**ii) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian**

**ii) Consolidated Statements of Income and
Other Comprehensive Income**

	2021		
	Dengan penggabungan usaha/ With merger	Tanpa penggabungan usaha/ Without merger	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Usaha	1.938.824.894.813	1.404.613.488.930	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(1.672.571.418.839)	(1.219.117.562.278)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	266.253.475.974	185.495.926.652	GROSS PROFIT
Beban Usaha	(395.099.611.228)	(190.468.067.826)	Operating Expenses
LABA USAHA	(128.846.135.254)	(4.972.141.174)	OPERATING PROFIT
Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih	(49.094.611.897)	(41.798.782.959)	Non-Operating Expense – Net
LABA (RUGI)			PROFIT (LOSS) BEFORE
SEBELUM PAJAK	(177.940.747.151)	(46.770.924.133)	INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak:			Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	(15.237.375.000)	(2.644.839.419)	Final Tax
Pajak Kini	(2.029.918.715)	(2.029.918.715)	Current Tax
Pajak Tangguhan	49.913.036.113	15.686.530.701	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	32.645.742.398	11.011.772.567	Total Tax Benefit (Expense)
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(145.295.004.753)	(35.759.151.566)	NET LOSS FOR CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif			Other Comprehensive
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	246.656.892.801	264.502.810.746	Other Comprehensive Income For Current Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	101.361.888.048	228.743.659.180	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR CURRENT YEAR
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada:			Net Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(145.290.435.842)	(35.754.582.655)	Owners of the Entity
Kepentingan Non-pengendali	(4.568.911)	(4.568.911)	Non-controlling Interest
	(145.295.004.753)	(35.759.151.566)	
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:			Comprehensive Income (Loss) Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	101.366.456.959	228.748.228.091	Owners of the Entity
Kepentingan Non pengendali	(4.568.911)	(4.568.911)	Non-controlling Interest
	101.361.888.048	228.743.659.180	

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang relevan dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak ("Grup").

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Grup telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tahun 2022 yang dianggap relevan, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK 57 "provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "instrumen keuangan"
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "sewa"

b. Standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan

Standar dibawah ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 1 "penyajian laporan keuangan"
- Amendemen PSAK 1 – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amandemen PSAK 16 "aset tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" – Definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF SAK (ISAK)

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which are considered relevant to the accounting policies of the Entity and its subsidiaries ("the Group").

a. Standards effective in the current year

The Group has adopted the following accounting standards in 2022 which are considered relevant, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements:

- *Amendment PSAK 57 "provision, contingent liabilities, and contingent assets" about onerous contracts - cost of fulfilling contracts*
- *PSAK 71 (Improvements 2020), "financial instruments"*
- *PSAK 73 (Improvements 2020), "lease"*

b. Standards issued not yet adopted

The following standards will become effective on January 1, 2023 and early adoption is permitted:

- *Amendement PSAK 1 "presentation of financial statement"*
- *Disclosure of Accounting Policies – Amendments to PSAK 1*
- *Amendment PSAK 16 "fixed assets" about proceeds before intended use*
- *Amendment PSAK 25 "Accounting Policies, Changes Accounting Estimate and Errors" Definition of Accounting Estimates*
- *The amendment PSAK 46 "Income Taxes" - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan (lanjutan)

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"

Standar dibawah ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar dibawah ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan:

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar amendemen dan penyesuaian tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Grup.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF SAK (ISAK) (continued)

b. Standards issued not yet adopted (continued)

- PSAK 74 "Insurance Contracts"

The following standards will become effective on January 1, 2024 and early adoption is permitted:

- *Amendment of PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant; and*
- *Amendment of PSAK 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The following standards will become effective on January 1, 2025 and early adoption is permitted:

- *PSAK 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of PSAK 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information.*

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these amendments and improvement standard on the consolidated financial statements of the Group.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usaha dijelaskan di bawah ini:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kelangsungan usaha dan dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar biaya perolehan, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup di Indonesia. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies adopted by the Group which influence determination of financial position and results of its operations are explained below:

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared on going concern basis and on an accrual basis, except for the statement of cash flows. The consolidated financial statements are also prepared at cost, unless specifically stated in the respective accounting policies of the respective accounts. The statements of cash flows are prepared using the direct method and present changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Rupiah, which is the functional currency of the Company and its Subsidiaries in Indonesia. Each entity in the Group determines its own functional currency and measures its transactions in its respective functional currency.

All figures in the consolidated financial statements are stated in full Rupiah, unless otherwise stated.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

1. Entitas Anak

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Entitas.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian. Entitas mengendalikan entitas lain ketika Entitas terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Entitas. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Entitas kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup menetapkan setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi atas dasar akuisisi demi akuisisi, baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali dilaporkan sebagai ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation

1. Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of subsidiaries in which the Entity has the ability to directly or indirectly exercise control.

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Entity has control. The Entity controls another entity when the Entity is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Entity. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any noncontrolling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

1. Entitas Anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis dicapai secara bertahap, tanggal akuisisi nilai tercatat dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin memiliki aset ma perubahan nilai kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang ditetapkan ma dalam pendapatan komprehensif lain ditetapkan ma atas dasar yang sama seperti yang disyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepaskan secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas yang dikonsolidasian yang belum di realisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

1. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of each non-controlling interest in the acquiree and the fair value at the acquisition date of the equity interest previously held by the acquirer in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If the amount of the consideration transferred, the recognized non-controlling interest recognized, and the previously held interest of the acquirer is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a discounted purchase, the difference is recognized in the consolidated statements of income.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized change in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was already recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Consolidated transactions, balances and gains between entities that have not been realized have been eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If required, reported values by subsidiary has been changed to conform to the accounting policies adopted by the Group.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

**2. Perubahan kepemilikan tanpa
kehilangan pengendalian**

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

3. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian, setiap kepentingan yang tersisa dalam entitas diukur kembali ke nilai wajarnya pada tanggal ketika pengendalian hilang, dengan perubahan jumlah tercatat yang diakui dalam laba rugi. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk tujuan akuntansi selanjutnya untuk kepentingan yang dipertahankan sebagai entitas asosiasi, ventura bersama, atau aset keuangan. Selain itu, setiap jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Entitas telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya ditetapkan dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

**2. Changes in ownership interests in
subsidiaries without change of control**

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

3. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Entity had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi di entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi di entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi bagi akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Entitas atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates

Associates are all entities over which the Grup has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. Investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Grup's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Grup does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

4. Entitas asosiasi (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas hasil bersih entitas asosiasi" di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi konsolidasian.

5. Penggabungan Usaha

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

4. Associates (continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to "share of profit/(loss) of an associate" in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an Impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from up stream and downstream transactions between the Group and associated are recognised in the Group's financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the consolidated statement of income.

5. Merger

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan keuangan konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia:

	2022	2021	
USD	15.731	14.278	USD
SGD	11.659	10.533	SGD
YUAN	2.257	2.238	YUAN

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Transactions and Balances in Foreign Currencies

The books of accounts of the Group are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. As at the date of the consolidated financial statements, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Bank Indonesia middle rate prevailing at the date of the consolidated financial statements.

Foreign currency gains or losses arising from transactions denominated in foreign currencies and the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year statement of profit or loss.

Foreign currencies are translated at Bank Indonesia middle rate:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup Melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi jika:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut menyelenggarakan suatu program imbalan kerja karyawan untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
 - f) Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam (1).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with Related Parties

In its business activities, the Group has transactions with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 concerning "Related Parties Disclosures".

A party is considered related party if:

- 1) *The person or the immediate family member has a relationship with the Group if the person:*
 - a) *Have control or joint control over the reporting entity;*
 - b) *Have significant influence over the reporting entity; or*
 - c) *Key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.*
- 2) *An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following:*
 - a) *The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - b) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group, which the other entity is a member).*
 - c) *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - d) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - e) *The entity is conducting an employee benefits program for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - f) *Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (1).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

- g) Orang yang diidentifikasi dalam (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- h) Entitas, atau anggota dari Grup di mana entitas merupakan bagian Grup dari Grup tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi Grup dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan yang tidak dibatasi.

f. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with Related Parties

- g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity).
- h) An entity, or a member of a Group of which the entity is part of the Group, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

All transactions with related parties, conducted at normal prices, terms and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the consolidated financial statements.

The Group's transactions with State- Owned Enterprises/ Local Government conducted in the ordinary course of business are disclosed as transactions with related parties.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all-time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not restricted.

f. Trade Receivables

Trade receivables represent receivables arising from the sale of goods and services to the customers in their normal course of business.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, net of allowance for impairment which is established based on objective evidence that a receivable balance is impaired.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) **3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

g. Instrumen Keuangan

g. Financial instrument

Aset keuangan

Financial assets

Grup melakukan penerapan PSAK No. 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan akuntansi lindung nilai.

The Group has applied PSAK No. 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

The Group classifies its financial assets in the following categories:

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- ii. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- i. *Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;*
- ii. *Financial assets at amortised cost.*

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan akan diterima. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

On December 31, 2022 and 2021, the Group has financial assets classified as financial assets at amortised cost. Financial assets at amortised cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and accrued revenue. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as noncurrent.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial assets at amortised cost are recognized initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instrument (continued)

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.

When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and other receivables without significant financing component.

Financial liabilities

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classifies as follows:

- i. *Financial liabilities at amortized cost;*
- ii. *Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).*

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, Beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka Panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Financial instrument (continued)

Financial liabilities (continued)

The Group has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

On December 31, 2022 dan 2021, the Group has financial liabilities measured at amortised cost are trade payables, accrued expenses dan other current liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in the statements of profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

h. Persediaan

Persediaan dibukukan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan persediaan ditentukan menggunakan metode FIFO. Barang dalam perjalanan dinyatakan sebesar FOB Shipping Point. Barang dalam proses dinyatakan sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pemrosesan.

Persediaan yang rusak dikelompokkan kedalam persediaan barang rusak (aset lain-lain), yang merupakan barang-barang yang menurut kondisi fisiknya tidak sesuai lagi dengan isi dan bentuk aslinya dan barang-barang yang masa pemakaiannya sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pabrik (kadaluwarsa). Atas persediaan barang yang rusak disisihkan seluruhnya.

i. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode manfaat yang diharapkan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan di muka untuk barang atau jasa.

Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial instrument (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparties.

h. Inventories

Inventories are recorded at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories is determined using FIFO method. The goods in transit are stated at FOB Shipping Point. Processed goods are expressed at the costs incurred in the processing phase.

Damaged inventories are Grouped into inventory of damaged goods (other assets), which are goods which, according to their physical condition, are no longer in accordance with the original contents and forms and goods whose use has exceeded the period specified by the manufacturer (expired). Full provision is made on the damaged goods.

i. Prepaid Expense and Advances

Prepaid expense is amortized on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Advances is part of contractually due that is paid in advance for goods or services.

Advances are recorded as asset on the consolidated statement of financial position.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Aset Tetap

j. Fixed Assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perolehan juga termasuk estimasi awal biaya pembongkaran.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. The cost also includes an initial estimate of the cost of disassembly.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan menggunakan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are depreciated using the straight-line method, after calculating residual value based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Tarif per Tahun/ Rate per Year	Types of Fixed Assets
Bangunan	2,5% - 5%	Building
Alat-alat berat	12,5%	Heavy equipments
Inventaris kantor	12,5% - 25%	Office plant & equipment
Peralatan lainnya	12,5% - 25%	Other equipment
Kendaraan bermotor	12,5% - 25%	Vehicle

Pada tahun 2022, Grup melakukan peninjauan kembali dan merubah estimasi atas nilai residu aset tetap. Pengaruh dari perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

In 2022, the Group reviewed and changed the estimate of the residual value of fixed assets. The effect of the changes in these estimates is accounted for on a prospective basis.

Dampak dari perubahan estimasi tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan adalah sebesar Rp24.210.450.327 yang diakui sebagai pendapatan non usaha (Catatan 38).

The impact of the change in estimate on the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year amounting to Rp24,210.450,327 was recognized as non-operating income (Note 38).

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs is recognized as an expense at the time of collection. Expenditures that extend the useful life of an asset or that provide an economic benefit in the form of capacity building, production quality, or performance are capitalized and depreciated in accordance with the useful life of the assets.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun terjadinya.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the consolidated financial statements and the resulting gains or losses are recognized in the consolidated statements of income.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset akan diturunkan sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat diperoleh kembali diakui sebagai rugi dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Beban pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi aset tersebut secara substansial telah selesai dan siap digunakan.

k. Properti Investasi

Properti investasi, diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke Grup; dan
- Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Setelah pengakuan, Grup memilih menggunakan model nilai wajar untuk mengukur seluruh properti investasinya.

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat diukur secara andal tetapi memperkirakan nilai wajar properti tersebut dapat diukur secara andal saat pembangunan selesai, maka properti investasi dalam proses pembangunan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau sampai pembangunannya selesai (mana yang lebih awal).

Jika Grup menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan) tidak dapat diukur secara andal atas dasar keberlanjutan, maka entitas mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

If the carrying amount of a property, plant and equipment is greater than the recoverable amount, then the carrying amount of the asset will be reduced by the recoverable amount. The difference between the carrying amount and the recoverable amount is recognized as loss and charged to consolidated statements income for current period.

Borrowing cost that can be directly attributed by acquisition, construction or production of a particular asset are capitalized as part of the cost of the asset. Capitalization of borrowing costs is terminated when activities to acquire, build or produce the asset are substantially complete and ready for use.

k. Investment Property

Investment property, is recognized as an asset if:

- *It is probable that future economic benefits related to investment property will flow to the Group; and*
- *The acquisition cost of investment property can be measured reliably.*

Investment property is initially measured at cost. Transaction fees are included in the initial measurement. After the recognition, the Group elects to use the fair value model to measure the entire investment property.

If the Group determines that the fair value of investment property in the development process cannot be reliably measured but estimates that the fair value of the property can be measured reliably when the construction is completed, the investment property in the development process is measured at cost until its fair value can be measured reliably or until the construction is complete (whichever is earlier).

If the Group determines that the fair value of investment property (other than investment property in the development process) cannot be measured reliably on the basis of sustainability, then the entity measures the investment property using a cost model.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

1. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

PSAK 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Grup mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Grup membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak terpulihkan.

Aset non keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah dipulihkan adalah lebih tinggi dari harga jual bersih aset dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat terendah yang menghasilkan arus kas terpisah (Unit Penghasil Kas). Aset non keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk kemungkinan adanya pemulihan untuk setiap aset yang telah diturunkan nilai nya pada setiap tanggal pelaporan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Impairment of Non Financial Assets

PSAK 48 prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised PSAK requires the Group to recognize an impairment loss. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Assets that have an infinite useful life are not amortized and are tested for impairment annually. Amortized assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Non financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the assets's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are Grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non –financial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

m. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada tanggal 19 September 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan PSAK 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

Berdasarkan PSAK 70, Aset Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), sementara liabilitas terkait diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual sehubungan dengan pembelian aset Pengampunan Pajak. Uang tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba Rugi pada periode saat SKPP diterima.

Selisih antara nilai yang diakui sebagai aset dan liabilitas dicatat pada ekuitas sebagai Tambahan Modal Disetor, dan tidak boleh direklasifikasi sebagai saldo laba atau komponen laba atau rugi tahun berjalan.

Grup diperbolehkan untuk mengukur Kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP.

Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Grup memutuskan untuk mengikuti aturan Pengampunan Pajak dan menerapkan persyaratan pengungkapan PSAK 70 untuk laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2016.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Asset and Liabilities Tax Amnesty

On September 19, 2016, Indonesian Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) issuing PSAK 70: "Asset Accounting and Tax Amnesty".

Based on PSAK 70, the Tax Amnesty assets are measured on the basis of the value reported in the Tax Amnesty Certificate (SKPP), while the related liability is measured based on the cash value or cash equivalent used to settle the contractual obligations with respect to the purchase of the Tax Amnesty assets. Tax settlement amount (the amount of tax payable in accordance with the Tax Amnesty rules) is charged to the income statement in the period in which the SKPP is received.

The difference between the value recognized as an asset and liability Tax amnesty is recorded in equity as Additional Paid-in Capital, and It should not be reclassified as retained earnings or components of the current year's profit or loss.

The Group is allowed to re-measure the assets and liabilities of Tax Amnesty based on fair value in accordance with the provisions of the PSAK at SKPP date.

The difference between the value after the remeasurement and the initial listing value is recognized as an adjustment to the Additional Paid-in Capital.

The Group decided to follow the Tax Amnesty rules and applied the disclosure requirements of PSAK 70 for the consolidated financial statements in 2016.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

n. Hak Atas Tanah

Beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah Ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui sebagai liabilitas, jika ketiga syarat dibawah ini terpenuhi, yaitu:

- 1) Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- 2) Kemungkinan besar (probable) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis; dan
- 3) Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Penggunaan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan dalam hal penentuan provisi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan konsolidasian tersebut, meskipun sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar saldo akun lainnya dalam laporan posisi keuangan. Namun, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, meskipun hal ini jarang terjadi maka liabilitas ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai liabilitas kontinjensi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Landrights

All costs incurred in connection with the acquisition of landrights are recognized as part of the landright's acquisition cost. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of the land. Extension or renewal cost of legal right over land is recognized as intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

o. Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provision

Provision is a liability whose time and amount are uncertain. Provisions are recognized as liabilities, if the following three conditions are met:

- 1) The Group has current obligations (both legal and constructive) as a result of past events;*
- 2) It is probable that the settlement of such obligations results in an outflow of resources containing economic benefits; and*
- 3) Reliable estimates of the amount of these liabilities can be made.*

The use of the best estimate of expenditures required to settle current liabilities at the end of the reporting period in the case of provisioning provision is a fundamental part of the preparation of the consolidated financial statements and does not reduce the reliability of the consolidated financial statements, although it contains higher uncertainty than most other account balances in statements of financial position. However, when reliable estimates cannot be made, although this is rare then these liabilities are disclosed in the notes to the financial statements as contingent liabilities.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**o. Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset
Kontinjensi (lanjutan)**

Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, adalah:

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi lebih pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a) Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban; atau
 - b) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Namun, bilamana arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis kemungkinan kecil terjadi, maka tidak diperlakukan sebagai liabilitas kontinjensi. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir tahun, untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar.

Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan besar (*highly probable*) arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh entitas, dimana aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Meskipun demikian, entitas akan melakukan kajian ulang secara terus menerus sekurang-kurangnya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan konsolidasian.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Provision, Contingent Liabilities and
Contingent Assets (continued)**

Contingent Liabilities

Contingent liabilities disclosed in the notes to the financial statements are as follows:

1. *The potential obligations arising from past events and their existence become more certain with the occurrence or absence of one or more future events not entirely within the entity's control; or*
2. *Current obligations arising as a result of past events, but not recognized because:*
 - a. *There is no possibility of an entity issuing resources containing economic benefits to settle the obligation; or*
 - b. *The amount of these liabilities cannot be measured reliably.*

However, when cash flows of resources containing economic benefits are unlikely to occur, they are not treated as contingent liabilities. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its statement of financial position (balance sheet) at the end of the year, to determine whether the level of probability of an outflow of resources containing economic benefits is increasing to be highly probable.

Contingent Assets

Contingent assets are disclosed in the notes to the consolidated financial statements if there is a high probability of inflow of economic benefits to the entity, in which the contingent asset is a potential asset arising from past events and its existence is confirmed by the occurrence or absence of one or more events at a future that is not entirely within the entity's control. However, the entity shall conduct a continuous review at least at the date of its consolidated statement of financial position at the end of the year to ensure that its development has been properly reflected in the consolidated financial statements.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan

Grup telah menerapkan PSAK 46: Pajak Penghasilan dan Amandemen PSAK 46 tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi konsolidasian, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui diluar laba atau rugi konsolidasian.

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan 'metode liabilitas'. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Income Tax

The Group has implemented to PSAK 46: Income Tax and Amendments to PSAK 46 concerning Recognition of Deferred Tax Assets on Unrealized Losses, which establishes the accounting treatment for income tax in calculating the consequences of current and future taxes on recovery (settlement) of carrying amounts of assets (liabilities) are recognized in the consolidated statement of financial position and other transactions and events of the current period recognized in the consolidated financial statements.

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized as an expense or income in consolidated statement of income, except to the extent that income tax resulting from transactions or events that are recognized outside statement of profit or loss (either in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside consolidated profit or loss.

All temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities and their tax bases are recognized as deferred tax using the 'balance sheet method'. Deferred tax is measured at the tax rates that apply currently or substantively enacted at the statement of financial position (balance sheet). Deferred tax is charged or credited in the statement of profit or loss, unless the deferred tax is charged or credited directly to equity.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, sedangkan aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan manfaat pajak masa mendatang dan saldo rugi fiskal masih dapat dipakai. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final, tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

Pajak Penghasilan Final

Peraturan pajak di Indonesia menetapkan bahwa penghasilan kena pajak tertentu dikenakan pajak final. Pajak final yang diterapkan pada nilai kotor transaksi diterapkan bahkan aset para pihak yang melakukan transaksi mengakui kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 sebagaimana disebutkan di atas, pajak final tidak lagi diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Grup telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak final yang timbul dari pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti investasi sebagai bagian dari pajak kini.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Income Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all deductible temporary differences to the extent possible can be utilized to reduce taxable income in future periods, whereas deferred tax assets from future tax benefits and tax losses to the extent that it is probable that the future taxable profit will be available against which the future tax benefits and tax losses can still be used. Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment (SKP) is received or, if appealed against or appeal, when the decision on the objection or appeal is determined.

In accordance with the tax laws, income subject to final income tax, no longer reported as taxable income and all expenses relating to income subject to final income tax cannot be deducted.

Final Income Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying in the transaction is recognizing losses.

Referring to revised PSAK No 46 as mention above, final tax is no longer governed by PSAK No 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from rental income generated from investment properties as of part of current tax.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pajak pasal 4 (2) tentang pajak final, pendapatan dari sewa tanah dikenakan pajak final 10%.

Penghasilan (beban) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat (i) pajak kini (current tax) dan (ii) pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam laporan laba – rugi komprehensif. Akun ini disajikan dengan merinci unsur-unsur beban pajak kini dan penghasilan (beban) pajak.

Beban pajak kini merupakan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan pada satu tahun fiskal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan memperhitungkan (a) penghasilan neto komersial, (b) penghasilan yang dikenakan PPh. Final dan yang tidak termasuk obyek pajak, (c) penyesuaian fiskal positif dan negatif, dan (d) pengurangan penghasilan neto.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari hasil perhitungan pendapatan (beban). tangguhan disajikan secara neto di posisi keuangan konsolidasian.

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja

Grup memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Income Tax (continued)

Based on Tax Regulation article 4(2) about final tax, income from land rental is subject to final tax of 10%.

Other income (expense) of income tax is the aggregate amount of (i) Current tax (current tax) and (ii) Deferred tax (deferred tax) are considered in the profit – or loss. This account is presented by detailing the elements of current tax expense and deferred income (expense) tax.

Current tax expense is the calculation of corporate income tax liability in a fiscal year in accordance with taxation laws in force in Indonesia, taking into account (a) the commercial net income, (b) income subject to income tax final and that does not include tax object, (c) positive and negative fiscal adjustment, and (d) reduction of net income.

Deferred tax assets and liabilities arising from the calculation of income (expenses) at is present in net amount in the consolidated statement of financial position.

q. Post-Employment Benefits Liabilities

The Group has defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja (lanjutan)

Grup menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengelolaan pesangon karyawan Grup dilakukan oleh pihak ketiga. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuarial adalah metode *projected unit credit* yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, bonus, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

(ii) Imbalan kerja kerja dan imbalan jangka panjang lainnya

Perhitungan liabilitas imbalan kerja terkait dengan program imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Liabilitas neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi berkaitan dengan program imbalan pasti dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Post-Employment Benefits Liabilities
(continued)**

The Group provides employee benefits as per the prevailing Labor Law. Employee retirement benefits has been organized by the third party. The valuation method used by the actuary is the projected unit credit method, which reflects employee services at the time of the appraisal.

(i) Short-term employee benefits liabilities

The short-term employee benefits consist of salary and related remuneration, bonuses, incentives, and other short-term employee benefits which are recognized as expense and are not discounted when the employee has provided services to Group.

(ii) Post-employment benefits and other long-term employee benefits

The calculation of post employment obligation related to post-employment benefits program is carried out by an independent actuary using the projected unit credit method.

The net liability for employee benefits is recognized in the consolidated statements of financial position related to defined benefit plans, and are carried at the present value of estimated employee benefit in the future related to the services in the present and the past, less the fair value of plan assets. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated cash outflows in future using interest rates of government bonds, which are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have a term to maturity nearest to the period of related post-employment benefit obligations. Government bonds are used because there is no active market for high quality corporate bonds.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

q. Liabilitas Imbalan pasca Kerja (lanjutan)

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto), diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) neto dengan tingkat diskonto. Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Post-Employment Benefits Liabilities
(continued)**

Plan assets are assets held by the pension plan. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period. Remeasurement, consisting of actuarial gains and losses, the impact of limitation of assets, excluding the amounts in net interest on the net benefit obligation and the yield of the plan assets (excluding amounts in net interest on the net benefit liability), are recognized in equity through other comprehensive income in the period incurred. Remeasurement is not classified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss on an earlier date between:

- *when the amendments or curtailment program occurs; and*
- *when the Group's restructuring or termination cost are recognized.*

Net interest is calculated by multiplying the net liability (asset) by the discount rate. Gain or loss of curtailment is recognized when there is a commitment to reduce the number of employees significantly covered by a program or when there are changes in regulation in a benefit plan, in which the material part of the services provided by the employee in the future no longer give employee benefits, or lower employee benefits.

Profit or loss of settlement is recognized whenever there is a transaction which abolished all legal or constructive obligations on part or all of the benefits in a benefit program.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Pengakuan Pendapatan

r. Revenue Recognition

Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

The Group has implemented PSAK 72 which requires revenue recognition to fulfill 5 assessment steps:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah sebagian Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri sebagian dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri sebagian diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan bagi kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu bagi pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. *Identify contracts with customers.*
2. *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promised in a contract to transfer different goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.*
5. *Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is, when the customer gains control of the goods or services).*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

r. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui sebagai kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Grup menjual barang impor dan lokal, menyewakan properti, memberikan jasa kepabeaan dan logistik, ekspor dan lainnya.

Untuk barang umum, pendapatan diakui pada suatu waktu atau setelah dikirimkan ke pelanggannya, dan pelanggan memperoleh kendali atas aset yang dijanjikan dan kewajiban pelaksanaan Grup. Indikator kontrol dialihkan ke pelanggan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Grup memiliki hak sekarang untuk pembayaran aset;
- b. Pelanggan memiliki hak legal atas aset;
- c. Grup telah mengalihkan kepemilikan fisik aset;
- d. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan aset; dan
- e. Pelanggan telah menerima aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue Recognition (continued)

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Payment of transaction prices is different for each contract. Contract assets are recognized after the consideration paid by the customer is less than the balance of the fulfillment obligation. Contract liabilities are recognized after the consideration paid by the customer is more than the balance of the fulfillment obligation.

The Group sells imported and local goods, provide rental spaces, rendering custom and freight as well as logistic services, exports and others.

For general goods, revenue is recognized at point in time or upon delivery to its customer, and the customer obtains control of a promised asset and the Group's performance obligation. Indicators of control is transferred to customer include but not limited to the following:

- a. The Group has a present right to payment of the asset;*
- b. The Customer has legal title to the asset;*
- c. The Group has transferred physical of the asset;*
- d. The Customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset;*
- e. The Customer has received the asset.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)	3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Pengakuan Pendapatan (lanjutan)	r. Revenue Recognition (continued)
Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan.	<i>Service income is recognized when the service is provided.</i>
Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.	<i>Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.</i>
s. Pendapatan Diterima Dimuka	s. Unearned Income
Sewa dan biaya layanan yang diterima di muka dari penyewa dikreditkan ke "Pendapatan Diterima Dimuka" dalam laporan posisi Keuangan konsolidasian dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.	<i>Space rental and service charge received in advance from tenant are credited to "Unearned Income" in the consolidated statements of financial position and recognized as income on a straight-line basis over the lease term.</i>
t. Sewa	t. Leases
Pemberi sewa mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.	<i>A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.</i>
Pemberi sewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau sistematis lainnya. Lessor menerapkan dasar sistematis lain jika basis tersebut lebih mewakili pola di mana manfaat dari penggunaan aset yang mendasarinya berkurang.	<i>A lessor shall recognize lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis. The lessor shall apply another systematic basis if that basis is more representative of the pattern in which benefit from the use of the underlying asset is diminished.</i>
Pemberi sewa mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang terjadi dalam memperoleh pendapatan sewa sebagai beban.	<i>A lessor shall recognize costs, including depreciation, incurred in earning the lease income as an expense.</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Sewa (lanjutan)

Pemberi sewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam memperoleh sewa operasi ke nilai tercatat aset yang mendasarinya dan mengakui biaya tersebut sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kebijakan penyusutan untuk aset dasar yang dapat didepresiasi yang dikenakan sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal lessor untuk aset serupa. Lessor menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16.

Pemberi sewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset yang mendasari sewa operasi mengalami penurunan nilai dan mencatat setiap kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Leases (continued)

A lessor shall add initial direct costs incurred in obtaining an operating lease to the carrying amount of the underlying asset and recognize those costs as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.

The depreciation policy for depreciable underlying assets subject to operating leases shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets. A lessor shall calculate depreciation in accordance with PSAK 16.

A lessor shall apply PSAK 48 to determine whether an underlying asset subject to an operating lease is impaired and to account for any impairment loss identified.

Determining whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement itself and assessing whether fulfillment of the agreement depends on the use of certain assets or assets, and whether the agreement conveys the right to use the assets.

The Group leases various fixed assets. Lease contracts are usually drawn up for a fixed period of 1 to 3 years but may have extension options.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Sewa (lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak guna didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa ebagian yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu.
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran sebagian untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Leases (continued)

Lease terms are negotiated individually and contain a variety of different terms and conditions. The lease agreement does not impose any agreement other than collateral for borrowing purposes.

Leases are recognized as use rights of use assets and related liabilities on the date on which the leased assets are available for use by the Group. Each lease payment is allocated between a liability and finance cost. Finance costs are charged to profit or loss over the lease term, resulting in a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period. Rights of use assets are depreciated over the shorter period between the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method.

Assets and liabilities arising from leases are initially measured on the present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including fixed payments in substance), less lease incentive receivables.*
- *variable lease payments which are based on an index or rate, initially measured using an index or rate at the start date.*
- *the amount expected to be paid by the lessee based on a guaranteed residual value.*
- *the exercise price of the purchase option if the lessee is confident enough to exercise the option, and*
- *payment of penalties for termination of the lease, if the lease term reflects the lessee exercising the option.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman tambahan penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variable berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Leases (continued)

Lease payments that must be made under certain extension options are also included in the measurement of the liability.

Lease payments are discounted using the implicit interest rate in the lease. If the rate cannot be immediately determined, which is generally the case with leases in the Group, the incremental loan interest rate of the lessee is used, namely the rate that must be paid by the lessee to borrow the funds needed to acquire an asset with a value equal to the right of use assets in similar economic environment with similar terms and conditions.

To determine the incremental interest rate, the Group:

- *Where possible, use the most recent third party financing received by individual lessees as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.*
- *Uses a build-up approach starting with a risk-free interest rate adjusted for credit risk, and*
- *Make specific adjustments to leases, such as term, country, currency and security.*

The Group is faced with the potential for future increases in variable lease payments based on index or tariff, which are not included in the lease liability until enacted. When the adjustment of lease payments based on index or interest rates comes into effect, the lease liability is revalued and adjusted according to the right of use assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

t. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara Grup menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung, dan peralatan, Grup memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Leases (continued)

Lease payments are allocated between principal and finance costs. Finance costs are charged to the income statement over the lease term so as to produce a constant periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period.

Right of use assets are measured at cost, which consists of the following:

- *The initial measured amount of the lease liability*
- *Lease payments made on or before the commencement date less rental incentives received*
- *Initial direct costs, and*
- *Restoration costs.*

Rights of use assets are generally depreciated over the shorter of the useful lives of the assets and the lease terms using the straight-line method. If the Group is confident enough to exercise the purchase option, the rights of use assets are depreciated over the useful life of the underlying asset. While the Group reassesses its land and buildings in the property, buildings and equipment, the Group chooses not to do so for the use rights buildings owned by the Group.

Payments related to short-term leases and leases of low value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) **3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

t. Sewa (lanjutan)

t. Leases (continued)

Opsi Ekstensi dan Terminasi

Extension and Termination Options

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases throughout the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of contract management. The majority of extension and termination options that are owned can only be exercised by the Group and not by the respective lessors.

Jaminan Nilai Residu

Residual Value Guarantee

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

To optimize rental costs during the contract period, the Group sometimes provides a residual value guarantee in connection with the equipment lease.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Lease income from leasing operations wherein the Group acts as the lessor is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

u. Restrukturisasi Utang Bermasalah

u. Restructuring

Perlakuan akuntansi atas restrukturisasi utang bermasalah sebagai berikut:

The accounting treatment for the debt restructuring are as follows:

- Pelunasan utang melalui pengalihan aset berupa tanah dan bangunan, aset lain, dan piutang kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh liabilitas; Grup dapat mengakui keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi liabilitas tersebut.
- Keuntungan dihitung dari selisih lebih antara (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga yang terutang dan premi, diskonto, beban keuangan, atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan (b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditor.

- *Debt repayment through the transfer of assets in the form of land and buildings, other assets, and receivables to creditors to settle all liabilities; The Group may recognize gains arising from the restructuring of such liabilities.*
- *Profit is calculated from the excess of (a) the carrying amount of the settled debt (the amount of the nominal minus or plus the interest payable and the unamortized premium, discount, expense, or cost of issuance), with (b) the fair value of the assets transferred to creditor.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

**v. Restrukturisasi Utang Bermasalah
(lanjutan)**

- Restrukturisasi utang bermasalah dapat berupa penyelesaian sebagian utang dengan pengalihan aset debitor atau pemberian saham (atau keduanya) kepada kreditor dan modifikasi persyaratan utang yang masih tersisa.

w. Kuasi Reorganisasi

Berdasarkan PSAK 51 (2003) "Akuntansi Kuasi Reorganisasi", kuasi reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Grup untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya pada nilai wajar tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Dengan melakukan prosedur ini, dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali sehingga entitas diharapkan dapat melanjutkan usahanya seperti baru, dengan laporan posisi keuangan (neraca) yang menunjukkan posisi keuangan yang lebih baik tanpa defisit dari masa lampau.

Saldo akumulasi kerugian, sesuai dengan PSAK tersebut, dieliminasi terhadap akun-akun ekuitas dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Cadangan umum
- Cadangan khusus;
- Selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk didalamnya selisih revaluasi aset tetap);
- Tambahan setoran modal dan sejenisnya;
- Modal saham.

Penentuan nilai wajar aset dan liabilitas Grup dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Restructuring (continued)

- Troubled debt restructuring may be a partial settlement of debt with the transfer of the debtor's assets or the grant of shares (or both) to the creditor and modification of the remaining debt terms.

w. Quasi Reorganization

In accordance with PSAK 51 (2003) "Quasi-Reorganization Accounting", quasi-reorganization is an accounting procedure governing the Group to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all its assets and liabilities at fair value without legal reorganization. By performing this procedure, it may result in an increase or decrease in net assets compared to the carrying amount prior to the revaluation so that the entity is expected to continue its business as new, with a statement of financial position (balance sheet) showing a better financial position without deficits from the past.

The accumulated balance of losses, in accordance with the PSAK, is eliminated against equity accounts in the following order of priority:

- General Reserves;
- Special reserves;
- Difference in valuation of assets and liabilities (including property, plant and equipment revaluation)
- Additional deposits of capital and the like;
- Capital stock.

The determination of the fair value of the Group's assets and liabilities in the quasi-reorganization exercise is based on market value. If market value is unavailable or does not represent actual fair value, fair value estimates are made taking into account the price of similar assets, or with the discounted cashflow model.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

y. Restrukturisasi Utang Bermasalah

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 44, Grup melakukan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 September 2012 mengikuti persyaratan dari PSAK di atas.

Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51 (2013): Akuntansi Kuasi-Reorganisasi, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013, Grup telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian asset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba. (Catatan 44).

z. Modal Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan dengan penerbitan saham biasa diakui sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pengaruh pajak.

aa. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi adalah Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan strategis.

Suatu segmen operasi merupakan suatu komponen di dalam entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Restructuring

As described in Note 44, the Group executing quasi- reorganization on September 30, 2012 following the terms of the above PSAK.

In accordance with PPSAK 10 regarding Revocation of PSAK 51 (2013): Quasi-Reorganization Accounting which is effective on January 1, 2013, the Group has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in the course of quasi reorganization to retained earnings. (Note 44).

z. Share Capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognized as a deduction from equity, net of any tax effects.

aa. Segment Operation

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision- maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as Board of Directors that makes strategic decisions.

An operating segment is a component of an entity:

1. *that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);*
2. *whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and;*
3. *for which discrete financial information is available.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENTING (lanjutan)**

ab. Peristiwa setelah tanggal pelaporan

Peristiwa pasca akhir tahun yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa yang memerlukan) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian jika jumlahnya material. Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Hasil bagi mungkin berbeda dari taksiran ini. Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi diakui pada periode saat estimasi tersebut direvisi dan pada periode mendatang yang terpengaruh.

Estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam 12 bulan ke depan dibahas di bawah ini.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

ab. Subsequent event

Post year-end events that provide additional information about the Group position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION**

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with PSAK requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen telah membuat penilaian berikut, selain dari yang termasuk estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang lingkungan ekonomi utama tempat setiap entitas beroperasi. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya, antara lain, mata uang yang terutama memengaruhi pendapatan, biaya, dan aktivitas pendanaan, serta mata uang yang biasanya digunakan untuk penerimaan dari kegiatan operasi. Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan yang mendasari yang relevan bagi Grup, mata uang fungsional telah ditentukan menjadi Rupiah Indonesia (Rp).

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement

In the process of applying the accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. The Entity considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained. Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Grup, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (Rp).

**Allowance for Impairment Losses on
Receivables**

The implementation of PSAK 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to provision for loss impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas Dalam hal ini, selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi memerlukan penyisihan khusus, memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar. Dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang diakui masing-masing sebesar Rp381.239.280.062 dan Rp381.571.179.732 (catatan 7) dan cadangan penurunan nilai piutang lain-lain masing-masing Rp178.197.125.137 dan Rp158.799.489.724 (catatan 8).

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Based on factors that affect collectability, In order to do this, for special provisions to receivables for individual by significantly, the Group also recognizes a collective impairment for debtors' credit risk which Grouped based on the same credit characteristics, and although not specifically identified as requiring special provisions, for it have a bigger failed pay risk for have receivables than sharing receivables which is given at the first time by the debtor.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognized a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are Grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

As of December 31, 2022 and 2021, allowance for impairment losses on trade receivables amounting to Rp381,239,280,062 and Rp381,571,179,732 respectively (note 7) and allowance for impairment losses on other receivable amounting to Rp178,197,125,137 and Rp158,799,489,724 respectively (note 8).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Nilai Realisasi Bersih Persediaan

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) dari persediaan, Grup mempertimbangkan persediaan usang, kerusakan, kerusakan fisik, perubahan tingkat harga, perubahan permintaan konsumen, atau penyebab lain untuk mengidentifikasi persediaan yang akan dituliskan ke NRV. Grup menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dianggap memadai untuk mencerminkan penurunan pasar dalam nilai persediaan.

Pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan atas penjualan barang dan jasa selama tahun berjalan. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan produk jika pelanggan merasa tidak puas. Berdasarkan pengalaman masa lampau atas penjualan yang serupa, Grup yakin bahwa tingkat ketidakpuasan tidak akan lebih dari 0,029%. Oleh karena itu, Grup tidak mengakui pendapatan dikurangi dengan provisi atas estimasi retur.

Penentuan umur sewa

Dalam menentukan umur sewa, manajemen mempertimbangkan fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomi untuk mengambil opsi perpanjangan, atau tidak mengambil opsi pembatalan. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi pembatalan) hanya dimasukkan dalam masa sewa jika secara meyakinkan diperpanjang (atau tidak dibatalkan).

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Net Realizable Value of Inventories

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Group considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, changes in price levels, changes in consumer demands, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Group adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories.

Revenue recognition

The Group has recognized revenue for sales of goods and services during the year. The buyer has the right to return the goods if its customers are dissatisfied. Based on past experience with similar sales, the Group believes that the dissatisfaction rate will not exceed 0.029%. The Group has, therefore, does not recognized revenue on this transaction with a corresponding provision against revenue for estimated returns.

Determining lease term

In determining the lease term, management considers facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan umur sewa (lanjutan)

Untuk sewa bangunan dan peralatan, faktor-faktor berikut biasanya paling relevan:

- jika ada denda signifikan untuk membatalkan (atau untuk memperpanjang), Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Jika ada leasehold improvement yang diperkirakan memiliki nilai sisa yang signifikan, Grup yakin untuk memperpanjang (atau tidak membatalkan).
- Selain dari itu, Grup mempertimbangkan factor mencakup sejarah durasi sewa dan biaya serta halangan bisnis untuk menggantikan aset sewa.

Mayoritas opsi perpanjangan untuk sewa kantor dan kendaraan tidak dimasukkan ke dalam liabilitas sewa, karena Grup dapat mengganti asset tanpa biaya signifikan atau halangan bisnis

Umur sewa dinilai Kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Determining lease term (continued)

For leases of properties and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

Most extension options in offices and vehicles leases have not been included in the lease liability, because the Group could replace the assets without significant cost or business disruption.

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Tetap

PSAK mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan terhadap aset tetap ketika peristiwa atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan dari estimasi membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan dihasilkan dari penggunaan berkelanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Sementara diyakini bahwa asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai wajar yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, perubahan signifikan dalam asumsi ini dapat secara material mempengaruhi penilaian jumlah terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memiliki dampak material yang merugikan pada hasil operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada aset tetap Grup masing-masing sebesar Rp60.783.616.979 dan nihil. (Catatan 14)

b. Asumsi dan Estimasi

Asumsi penting mengenai masa depan dan sumber utama lainnya dalam ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan dijabarkan di bawah ini.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

a. Judgement (continued)

Impairment of fixed assets

PSAK requires that an impairment review be performed on fixed assets when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Determining the net recoverable amount of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. While it is believed that the assumptions used in the estimation of fair values reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the valuation of recoverable amounts and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the result of operations.

On December 31, 2022 and 2021, allowance for impairment losses recognized on the Group's fixed assets are amounting to Rp60,783,616,979 and nil respectively. (Note 14)

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen
Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian,
termasuk model diskonto arus kas dalam
mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan
dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian,
Manajemen memanfaatkan input pasar
semaksimal mungkin, dan menggunakan
estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin,
sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh
pelaku pasar akan digunakan di dalam
penentuan harga instrumen. Dalam hal data
yang berlaku tidak dapat dicermati, maka
manajemen akan menggunakan estimasi
terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh
pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda
dengan harga sebenarnya yang akan dicapai
dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

Estimasi Masa Manfaat atas aset tetap dan aset
tidak berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset
tetap dan aset tidak berwujud berdasarkan pada
ekspektasi dari penggunaan aset seperti yang
dituangkan di dalam rencana dan strategi bisnis
serta juga mempertimbangkan perkembangan
teknologi dan pelaku pasar yang diharapkan di
masa yang akan datang. Estimasi mengenai
masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak
berwujud didasarkan pada penilaian kolektif
Grup terhadap praktik industri. Evaluasi teknik
internal dan pengalaman pada aset yang
sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah
setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika
ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya
akibat pemakaian dan kerusakan fisik. Teknis
atau usang dan adanya keterbatasan hukum
atau lainnya atas penggunaan aset tersebut.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

*Determining Fair Value of Financial
Instruments*

*Management uses valuation techniques,
including the discounted cash flow model in
measuring the fair value of financial
instruments where active market quotes are not
available.*

*In applying the valuation techniques,
management makes maximum use of market
inputs, and uses estimates and assumptions
that are, as far as possible, consistent with
observable data that market participants
would use in pricing the instrument. Where
applicable data is not observable, management
uses its best estimate about the assumptions
that market participants would make. These
estimates may vary from the actual prices that
would be achieved in an arm's length
transaction at the reporting date.*

*Estimating Useful Lives of fixed assets and
intangible assets*

*The Group estimates the useful lives of its fixed
assets and intangible assets based on expected
asset utilization as anchored on business plans
and strategies that also consider expected
future technological developments and market
behavior. The estimation of the useful lives of
fixed assets and intangible assets is based on
the Group collective assessment of industry
practice, internal technical evaluation and
experience with similar assets. The estimated
useful lives are reviewed at least each financial
year and are updated if expectations differ
from previous estimates due to physical wear
and tear, technical or commercial
obsolescence and legal or other limitations on
the use of the assets.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat atas aset tetap dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Hal ini dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat terpengaruh secara material oleh perubahan atas perkiraan yang timbul yang diakibatkan dalam faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode dipengaruhi oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud pada Grup akan meningkatkan biaya operasi yang dicatat dan menurunkan nilai dari aset tidak lancar. Perpanjangan masa manfaat dari aset tetap dan aset tidak berwujud pada Grup akan menurunkan biaya operasi yang dicatat dan meningkatkan nilai dari aset tidak lancar.

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat imbalan pasca kerja. Tingkat diskonto merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan estimasi nilai kini atas arus kas keluar di masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji, Grup mengumpulkan semua data historis yang berhubungan dengan perubahan dasar gaji dan mengoreksinya di dalam rencana bisnis di masa yang akan datang.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating useful lives of fixed assets and intangible assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets increases the recorded operating expenses and decreases non-current assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets and intangible assets decreases the recorded operating expenses and increases non-current assets.

Estimation of Pension and Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on factors that are determined on an actuarial basis using several assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Estimasi atas Pensiun dan Imbalan Kerja
(lanjutan)

Asumsi utama liabilitas imbalan pasca kerja
ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Informasi tambahan telah dipaparkan di
Catatan 29.

Realisasi Aset Pajak Tangguhan dan estimasi
pajak penghasilan

Dalam menentukan provisi atas pajak
penghasilan badan, manajemen diwajibkan
untuk membuat pertimbangan yang signifikan.
Transaksi dan perhitungan tertentu dalam
penentuan pajak yang pada akhirnya tidak pasti
sepanjang kegiatan usaha normal. Grup
mengakui liabilitas atas pajak penghasilan
badan berdasarkan estimasi apakah akan
terdapat tambahan pajak penghasilan. Jika
hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang
sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi
aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan
pada periode ditentukannya hasil pajak
tersebut.

Grup menelaah aset pajak tangguhan pada
setiap tanggal pelaporan dengan mengurangi
nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan
bahwa laba kena pajak memadai untuk
mengkompensasi sebagian atau seluruh aset
pajak tangguhan. Perusahaan dan Entitas Anak
juga menelaah pengakuan aset pajak
tangguhan untuk menyesuaikan pemulihan
dari perbedaan temporer berdasarkan level
dan waktu dalam estimasi pendapatan pajak di
periode pelaporan yang akan datang.

Estimasi didasarkan pada pengalaman Grup di
masa lampau dan harapan di masa yang akan
datang terhadap pendapatan dan pengeluaran,
seperti strategi perencanaan pajak di masa yang
akan datang. Tetapi tidak ada kepastian bahwa
Grup dapat menghasilkan pendapatan kena
pajak yang memadai untuk digunakan sebagai
bagian atau seluruhnya dari aset pajak
tangguhan.

**4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTION (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

*Estimation of Pension and Employee Benefits
(continued)*

*Other key assumptions for pension obligations
are based in part on current market conditions.
Additional information is disclosed in Note 29.*

*Realization of Deferred Tax Assets and
Estimation of income tax*

*Determining provision for corporate income
tax requires significant judgment by
management. There are certain transactions
and computation for which the ultimate tax
determination is uncertain during the ordinary
course of business. The Group recognizes
liabilities for expected corporate income tax
issues based on estimates of whether additional
corporate income tax will be due. Where the
final tax outcome of these matters is different
from the amount that are initially recorded,
such differences will have an impact on the
current and deferred tax assets and liabilities
in the period in which such determination is
made.*

*The Group conducted a review of the carrying
amount of deferred tax assets at every
reporting period and reduce the value of such
assets by as much as possible cannot be
realized, where the availability of taxable
income allow to use all or part of the deferred
tax assets. Group' review on the recognition of
deferred tax assets for deductible temporary
difference can be deductible based on the level
and timing from the estimated taxable income
for the next reporting period.*

*The estimation is based on the achievement of
the Group in the past and future expectation
toward income and expenses, as well as with
the tax planning strategies in the future. But
there is no certainty that the Group can
generate sufficient taxable income to allow to
use part or all of these deferred tax assets.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

b. Asumsi dan Estimasi (lanjutan)

Provisi dan Kontijensi

Grup, dalam menjalankan bisnis biasa, menetapkan ketentuan yang sesuai untuk kewajiban hukum atau kewajiban konstruktifnya saat ini, jika ada, sesuai dengan kebijakannya tentang ketentuan dan kontinjensi. Dalam mengenali dan mengukur provisi, manajemen memperhitungkan risiko dan ketidakpastian.

4. MANAGEMENT'S USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTION (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The account consist of:

	2022	2021	
Kas	1.280.625.979	1.213.707.636	Cash on hand
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	109.974.861.380	95.313.230.985	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	27.220.536.803	26.111.882.622	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	15.634.066.046	11.902.825.633	Bank Rakyat Indonesia
BPD Jabar Banten	213.896.787	729.646.840	BPD Jabar Banten
BPD Sulselbar	187.383.441	72.138.128	BPD Sulselbar
Bank Tabungan Negara	54.176.184	446.971.228	Bank Tabungan Negara
BPD Jatim	17.460.698	17.770.084	BPD Jatim
BPD NTT	14.988.168	15.197.971	BPD NTT
BPD Lampung	-	450.000	BPD Lampung
USD			USD
Bank Mandiri	2.959.127.775	4.789.403.770	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	2.195.622.391	-	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	42.644.696	2.663.729.238	Bank Negara Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Bank Permata	5.759.600.000	-	Bank Permata
Bank Central Asia	378.470.141	90.749.312	Bank Cental Asia
Bank Mandiri Syariah	334.201.882	41.231.101	Bank Mandiri Syariah
Subjumlah	164.987.036.392	142.195.226.912	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2022	2021	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Bank Negara Indonesia	10.200.000.000	15.200.000.000	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	4.950.000.000	14.450.000.000	Bank Mandiri
Subjumlah	15.150.000.000	29.650.000.000	Subtotal
Jumlah	181.417.662.371	173.058.934.548	Total

Rupiah	2,25% - 3,25%	Rupiah
Jatuh tempo deposito berjangka	1 - 3 bulan/month	Term of time deposits

6. DEPOSITO BERJANGKA

6. TIME DEPOSITS

Akun ini terdiri dari:

The account consist of:

	2022	2021	
Pihak berelasi:			Related parties:
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri	3.000.000.000	3.000.000.000	Bank Mandiri
USD			USD
Bank Negara Indonesia	-	18.828.113.040	Bank Negara Indonesia
Jumlah	3.000.000.000	21.828.113.040	Total

Deposito berjangka sebesar Rp3.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas perjanjian jual-beli dengan PT Sentana Adidaya Pratama dan PT Wilmar Chemical Indonesia.

Time deposits amounting Rp3.000.000.000 are placed as collaterals for trading agreement with PT Sentana Adidaya Pratama and PT Wilmar Chemical Indonesia.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

The account consist of:

	2022	2021	
Pihak berelasi:			Related parties:
Ditjen Migas ¹⁾	88.669.740.008	88.669.740.008	Ditjen Migas ¹⁾
PT Petrokimia Gresik	24.986.496.466	27.349.524.104	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kaltim	15.396.582.159	21.826.453.988	PT Pupuk Kaltim
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	13.995.754.578	14.152.128.253	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Sang Hyang Seri	10.982.341.610	12.403.033.197	PT Sang Hyang Seri
PT Timah Tbk	9.999.322.093	15.175.387.749	PT Timah Tbk
PT Pupuk Iskandar Muda	7.557.990.235	6.144.712.527	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	7.119.812.508	3.927.186.360	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Rumah Sakit umum Daerah	6.654.819.598	7.335.053.036	Regional public hospital
PT Pertamina (Persero)	6.566.100.130	20.365.998	PT Pertamina (Persero)
PT Len Industri (Persero)	5.271.697.016	5.521.697.016	PT Len Industri (Persero)
PT Pupuk Kujang	4.500.225.748	3.722.288.912	PT Pupuk Kujang
PT Pabrik Gula Rajawali	4.754.500.000	-	PT Pabrik Gula Rajawali
PT Adhi Karya	2.849.054.970	966.901.177	PT Adhi Karya
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	3.185.480.146	360.133.758	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
PT Rajawali Nusindo	3.100.725.262	88.967.688	PT Rajawali Nusindo
PT Waskita Beton Precast	2.994.107.317	1.731.237.107	PT Waskita Beton Precast
Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.868.250.000	2.868.250.000	Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	2.722.625.686	5.485.682.326	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.316.067.303	3.711.135.966	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PT Perkebunan Nusantara	1.290.882.249	3.122.080.224	PT Perkebunan Nusantara
PT Pembangkit Jawa Bali	538.115.300	3.650.580.000	PT Pembangkit Jawa Bali
Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	504.731.891	2.681.781.692	Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
Lainnya (dibawah Rp2Milyar)	15.543.455.326	40.247.947.630	Others (below Rp2billion)
Sub jumlah piutang usaha pihak berelasi	244.368.877.599	271.162.268.716	Sub total trade receivables – related parties
Penyisihan penurunan nilai	(88.669.740.008)	(88.669.740.008)	Allowance for impairment
Piutang usaha pihak berelasi – Bersih	155.699.137.591	182.492.528.708	Trade receivables related parties – Nett

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

	2022	2021	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Telepoin Nusantara ⁽ⁱⁱ⁾	75.546.921.225	75.546.921.225	PT Telepoin Nusantara ⁽ⁱⁱ⁾
PT Agro Chemindo Niagatama	28.697.388.316	28.697.388.316	PT Agro Chemindo Niagatama
CV Minahasa Jaya Bersama	25.628.624.000	1.837.440.000	CV Minahasa Jaya Bersama
PT Graha Jaya Pratama Kinerja	20.903.875.200	-	PT Graha Jaya Pratama Kinerja
JOTRC	10.389.642.335	6.731.015.868	JOTRC
PT Aneka Pupuk Compon	9.881.740.553	9.881.740.553	PT Aneka Pupuk Compon
PT Krakatau Pipe Industries	9.856.774.056	8.173.439.453	PT Krakatau Pipe Industries
PT Bukaka Teknik Utama	6.282.650.000	6.282.650.000	PT Bukaka Teknik Utama
PT Pab. Pipa Indonesia	6.157.556.628	6.157.556.628	PT Pab. Pipa Indonesia
PT ZTE Indonesia	4.261.346.705	4.303.976.705	PT ZTE Indonesia
PT Falcon Cargo	4.256.500.000	4.256.500.000	PT Falcon Cargo
PT Jakarta Sereal	4.041.910.239	-	PT Jakarta Sereal
PT Wilmar Chemical Indonesia	3.982.355.502	2.243.712.282	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Sari Gunung Polowijo	3.473.554.672	3.473.554.672	PT Sari Gunung Polowijo
PT Cemindo Gemilang	3.471.804.797	3.471.804.797	PT Cemindo Gemilang
PT Permata Agro Persada	3.401.995.615	1.502.182.793	PT Permata Agro Persada
Koperasi Ternak Terpadu Indonesia	3.142.795.400	3.142.795.400	Koperasi Ternak Terpadu Indonesia
PT Manggala Prabu Pratama	3.108.770.000	-	PT Manggala Prabu Pratama
PT Unilever Indonesia Tbk	3.059.975.711	2.062.100.233	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Hajar Aswad Tani Indonesia	2.808.232.000	-	PT Hajar Aswad Tani Indonesia
Eastindo Utama Ind Corp	2.765.538.106	2.765.538.106	Eastindo Utama Ind Corp
PT Anugrah Sinar Samudra	2.559.500.000	2.559.500.000	PT Anugrah Sinar Samudra
CV Rifaby Gustham	2.525.500.000	2.525.500.000	CV Rifaby Gustham
PT Surya Lintas Gemilang	2.386.225.000	2.386.225.000	PT Surya Lintas Gemilang
PT Tanah Selaras Mandiri	2.344.450.000	2.344.450.000	PT Tanah Selaras Mandiri
PT Cipta Andika Teladan	2.343.105.520	2.343.105.520	PT Cipta Andika Teladan
CV Putra Kutaraja	2.336.191.500	2.336.191.500	CV Putra Kutaraja
PT Signa Husada	2.246.687.175	-	PT Signa Husada
PT Virgo Sari	2.131.731.860	2.131.731.860	PT Virgo Sari
PT Semen Jawa	2.064.919.241	2.064.919.241	PT Semen Jawa
PT Bintang Daud Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Bintang Daud Indonesia
PT Synnex Metrodata Indonesia	1.707.085.157	3.506.395.111	PT Synnex Metrodata Indonesia
PT Agri Indoma	1.456.496.453	3.348.065.034	PT Agri Indoma
PT Anugerah Pharmindo Lestari	784.626.766	3.242.977.416	PT Anugerah Pharmindo Lestari
Corteva Agriscience Seeds Indonesia	193.676.398	2.538.900.753	Corteva Agriscience Seeds Indonesia
PT Sinar Jaya Makmur	-	6.198.792.458	PT Sinar Jaya Makmur
PT Inti Kemilau Alam	-	5.270.500.000	PT Inti Kemilau Alam
PT Inti Alam Kimia	-	4.365.672.900	PT Inti Alam Kimia
Haggat Import Company	-	3.519.698.508	Haggat Import Company
Debitur lainnya ⁽ⁱⁱⁱ⁾	108.339.023.374	108.339.023.374	Other debtors ⁽ⁱⁱⁱ⁾
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar)	197.624.009.049	120.196.622.741	Others (balance below Rp2 billion)
Sub Jumlah piutang usaha pihak ketiga	568.163.178.553	451.748.588.447	Subtotal trade receivables third parties
Penyisihan Penurunan Nilai	(292.569.540.054)	(292.901.439.724)	Allowance for impairment
Piutang usaha pihak ketiga - bersih	275.593.638.499	158.847.148.723	Trade Receivables third parties - nett
Total Piutang Usaha - Bersih	431.292.776.090	341.339.677.431	Total Trade Receivables - Nett

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

i) Piutang Ditjen Migas

Pada tanggal 5 Februari 2015 Entitas melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN dengan Kementerian ESDM dan Dirjen Anggaran. Hasil dari pembahasan penyelesaian tagihan tersebut, Entitas mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015. Pada tanggal 12 April 2017, Entitas mendapatkan undangan pertemuan dengan Kementerian ESDM dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan gedung Migas Center termasuk kewajiban kepada Entitas.

Piutang Ditjen Migas telah disisihkan secara penuh.

ii) Piutang PT Telepoin Nusantara

Saldo piutang PT Telepoin Nusantara sebesar Rp75.546.921.225 (termasuk denda). Piutang ini timbul dari kontrak kerjasama impor CT-2 dan handset-nya sesuai Surat Perjanjian No.24.DNT/K/95 tanggal 29 September 1995 dan No.228.A/DTK tanggal 10 Mei 1996 dimana eks PT Dharma Niaga (Persero) membuka L/C dan PT Telepoin Nusantara memasarkannya dengan liabilitas melunasi L/C pada saat jatuh tempo. Dalam realisasinya, penjualan CT-2 dan handset-nya mengalami kegagalan yang berakibat PT Telepoin Nusantara tidak dapat melunasi L/C yang telah jatuh tempo tersebut.

Sejak tahun 2015, tidak terdapat penerimaan dari PT Telepoin Nusantara.

Piutang PT Telepoin Nusantara telah disisihkan secara penuh.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

i) Trade Receivable from Ditjen Migas

On February 5, 2015, the Entity had a meeting facilitated by the Ministry of SOEs with the Ministry of ESDM and the Director General of Budget. The result from the discussion of the settlement of the claims, the Entity sent a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources No.19/DU/Eks/PPI/II/2015 dated February 20, 2015. On April 12, 2017, the Entity received an invitation to meet with the Ministry of Energy and Mineral Resources in an effort to solve the problem of building the Oil and Gas Center including the obligations to the Entity.

Receivables from Ditjen Migas had been fully provisioned.

ii) Receivables from PT Telepoin Nusantara

The balance of receivables from PT Telepoin Nusantara amounting to Rp75,546,921,225 (including penalties). This receivable arises from the contract of cooperation of import of CT-2 and its handset by Letter of Agreement No.24.DNT/K/95 dated September 29, 1995 and No.228.A/DTK dated May 10, 1996 where ex. PT Dharma Niaga (Persero) opened L/C and PT Telepoin Nusantara marketed it with the obligation to pay off L/C at maturity. In realization, the sales of CT-2 and handset failed which resulted in PT Telepoin Nusantara unable to repay the L/C.

Since 2015, there had been no receivables collected from PT Telepoin Nusantara.

Account receivables PT Telepoin Nusantara had been fully provisioned.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

iii) Debitur Lainnya

iii) Other Debtors

Merupakan piutang usaha yang berasal dari penggabungan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

Represents trade receivables originating from the merger of the 3 (three) State-Owned Enterprises (SOE) the details as follows:

	2022	2021	
Debitur eks. PT Dharma Niaga	55.257.769.425	55.257.769.425	Debtor ex. PT Dharma Niaga
Debitur eks. PT Cipta Niaga	20.838.760.575	20.838.760.575	Debtor ex. PT Cipta Niaga
Debitur eks. PT Pantja Niaga	4.455.753.714	4.455.753.714	Debtor ex. PT Pantja Niaga
Lainnya	27.786.739.660	27.786.739.660	Others
Jumlah	108.339.023.374	108.339.023.374	Total

Debitur lainnya telah disisihkan secara penuh.

Other debtors had been fully provisioned.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the provision for impairment is adequate.

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Movements of Allowance for Impairment Losses

	2022	2021	
Saldo Awal	381.571.179.732	361.444.571.930	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	20.326.488.939	22.601.482.811	Current year provision
Pemulihan	(10.407.465.678)	(2.474.875.009)	Recovery
Reklasifikasi ke piutang lain-lain	(10.250.922.931)	-	Reclassification to other receivables
Saldo Akhir	381.239.280.062	381.571.179.732	Ending balance

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
SPKPBM Minol	117.709.880.717	117.709.880.717	SPKPBM Minol
Perum Pembangunan Perumahan Nasional	58.280.615.659	58.280.615.659	Perum Pembangunan Perumahan Nasional
PT Ficorp	20.556.276.100	20.556.276.100	PT Ficorp
Piutang pegawai	10.118.869.515	8.966.365.210	Employee receivable
PT Berkat Manunggal Jaya	5.196.270.874	-	PT Berkat Manunggal Jaya
PT Sarotama Kalpariksa	2.988.056.370	2.988.056.370	PT Sarotama Kalpariksa
PT Agrochemindo Niagatama	2.868.699.532	2.868.699.532	PT Agrochemindo Niagatama
Piutang klaim	466.496.978	3.398.739.654	Claims receivable
Lain-lain	20.978.857.099	6.768.810.867	Others
Jumlah	239.164.022.844	221.537.444.109	Total
Penyisihan:			Allowance:
Saldo awal	(158.799.489.724)	(155.058.886.281)	Beginning provision
Penyisihan tahun berjalan	(9.146.712.482)	(3.740.603.443)	Current year provision
Reklasifikasi dari piutang usaha	(10.250.922.931)	-	Reclassification from trade receivables
Saldo akhir	(178.197.125.137)	(158.799.489.724)	Ending balance
Jumlah Bersih	60.966.897.707	62.737.954.385	Net Amount

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Piutang distributor atas SPKPBM Minol

Distributors' receivables for SPKPBM Minol

	2022	2021	
PT Indovinos	56.491.277.066	56.491.277.066	PT Indovinos
PT Muliatama Mitra Sentosa	23.521.553.670	23.521.553.670	PT Muliatama Mitra Sentosa
PT Geka Nara Sutra	9.241.686.791	9.241.686.791	PT Geka Nara Sutra
PT Bimasena Cipta Caraka	7.631.344.405	7.631.344.405	PT Bimasena Cipta Caraka
PT Citra Surya Gemilang	7.387.340.939	7.387.340.939	PT Citra Surya Gemilang
PT Danisa Texindo	5.544.742.235	5.544.742.235	PT Danisa Texindo
PT Megaguna Semesta	3.268.483.338	3.268.483.338	PT Megaguna Semesta
PT Esham Dima	2.566.539.045	2.566.539.045	PT Esham Dima
PT Duta Permata Synergy	2.056.913.228	2.056.913.228	PT Duta Permata Synergy
Jumlah	117.709.880.717	117.709.880.717	Total

Merupakan tagihan kepada para distributor yang timbul dari terbitnya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), Cukai Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pendistribusian Minuman Beralkohol antara Grup dengan para distributor yang terkait dengan importasi Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) tahun 2006.

Represent receivables from distributors arising from the issuance of the Letter of Import Duty shortage Notification (SPKPBM), Excise of Administration Fines and Taxes in the Framework of Imports and in accordance with the Distribution Agreement of Alcoholic Drinks between the Company and the distributors related to the import of Beverages Containing Ethyl Alcohol (MMEA) in 2006.

Piutang distributor atas SPKPBM Minol telah disisihkan secara penuh.

Receivables from distributor SPKPBM Minol had been fully provisioned.

Piutang pegawai

Employee receivables

Piutang pegawai merupakan pinjaman pegawai untuk biaya perawatan dan pinjaman lainnya yang pengembaliannya dilakukan dengan pemotongan atas gaji yang bersangkutan, atas piutang pegawai.

Employee receivables represent employee loans for maintenance and other borrowings whose repayments are made by deductions on the respective wages, on employees' accounts receivable.

Piutang klaim

Claims receivable

Piutang klaim merupakan klaim kepada pihak ketiga dan perorangan atas produk Grup, setoran inkaso, retur barang dan lain sebagainya, serta klaim biaya promosi kepada pemasok.

Claims receivable represent claims to third parties and individuals on Group products, collection deposits, return of goods, etc., and claims supplier for promotion expenses.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Barang dalam gudang:			Goods in warehouse:
Produk kimia berbahaya	25.622.538.609	20.022.618.074	Hazardous chemical products
Produk pupuk dan pestisida	29.533.578.574	35.183.380.736	Fertilizer and pesticide products
Produk Unilever	6.873.491.535	6.356.160.316	Unilever product
Produk farmasi dan alat Kesehatan	9.232.410.310	10.030.067.902	Pharmaceutical products and medical devices
			Consumption and basic commodities
Produk konsumsi dan bahan pokok	25.024.749.341	1.401.778.369	products
Produk bahan bangunan lainnya	1.011.217.204	501.789.565	Other building material products
Produk/jasa lainnya	112.425.086	213.778.840	Other products/services
Sub Jumlah	97.410.410.659	73.709.573.802	Subtotal
Perlengkapan:			Supplies:
Alat tulis kantor	806.012.694	205.869.305	Office stationery
Suku cadang kendaraan	283.444.436	600.507.260	Spare part
Sub Jumlah	1.089.457.130	806.376.565	Subtotal
Jumlah Persediaan	98.499.867.789	74.515.950.367	Total Inventory
Akumulasi penurunan nilai	(1.471.901.765)	-	Accumulated impairment
Jumlah Pesediaan - Bersih	97.027.966.024	74.515.950.367	Total Inventory - Net

Pada tahun 2022 dan 2021 persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasindo dan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp291.575.699.588 dan Rp227.757.885.786 terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebakaran, kehilangan, bencana alam, kerusakan dan risiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

In 2022 and 2021 the inventories were insured to PT Asuransi Jasindo with total insured amounting to Rp291,575,699,588 and Rp227,757,885,786, respectively, against the risk of losses that might occur as a result of fire, loss, natural disasters, riots and other risks. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

Persediaan usang dan rusak dipindahkan dari persediaan ke persediaan barang rusak (Catatan 19).

Outdated and damaged inventory is transferred from inventory to inventory of damaged goods (Note 19).

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Uang muka pembelian	88.472.692.915	41.343.473.433	Advances
Uang muka operasional	6.130.202.677	2.199.212.614	Operating advance
Uang muka lain-lain	19.254.194.630	9.488.288.663	Other advances
Jumlah	113.857.090.222	53.030.974.710	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Operasional	9.936.462.738	33.746.333.487	Operational
Umum dan administrasi	1.904.949.342	1.620.319.159	General & administration
Asuransi	867.504.790	588.690.817	Insurance
			Warehouse/office/home
Sewa gudang/ kantor/rumah	326.636.773	381.796.156	rentals
Lainnya	-	4.560.543	Others
Jumlah	13.035.553.643	36.341.700.162	Total

12. BIAYA OPERASI DALAM PROSES

12. OPERATING COSTS IN PROCESS

Akun ini terdiri dari :

The account are as follows:

	2022	2021	
Jasa pergudangan	12.205.939.653	17.928.824.485	Warehousing services
Jasa logistik	15.728.235.904	11.821.116.019	Logistic services
Waste integrated system	46.771.100	-	Waste integrated system
Jumlah	27.980.946.657	29.749.940.504	Total

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Akun ini terdiri dari :

The account are as follows:

	% Kepemilikan/ Ownership	2022	2021
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	221.636.125	221.636.125
Akumulasi penurunan nilai/Accumulated impairment			
Perusahaan Asosiasi/Associate Company			
• PT Kias Intertrada	40,00	(221.636.125)	(221.636.125)
Sub jumlah / Subtotal		-	-
Penyertaan saham/Investment in			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	250.000.000	250.000.000
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	160.000.000	160.000.000
BV Nederland Unipro	1,70	45.936.640	45.936.640
PT Tropican Utama Furniture	10,00	38.251.125	38.251.125
Unipro Amsterdam	2,84	32.125.754	32.125.754
PT Djengger Tour	3,38	3.385.000	3.385.000
Unipro Singapore	2,84	1.605.450	1.605.450
Multi Niaga, Amsterdam	-	18	18
Obligasi RI tahun 1959/ Bonds RI in 1959	-	33	33
Sub jumlah / Subtotal		10.531.304.020	10.531.304.020

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI **13. INVESTMENT IN ASSOCIATES** (continued)
(lanjutan)

	% Kepemilikan/ Ownership	2022	2021
Akumulasi penurunan nilai / Accumulated impairment			
PT Mitra BUMDes Nusantara	10,00	(1.877.349.538)	119.535.628
PT Manajemen CBT Nusantara	6,10	-	52.745.946
PT Sumatera Utara Perkasa Semen	3,98	(160.000.000)	(160.000.000)
BV Nederland Unipro	1,70	(45.936.640)	(45.936.640)
PT Tropican Utama Furniture	10,00	(38.251.125)	(38.251.125)
Unipro Amsterdam	2,84	(32.125.754)	(32.125.754)
PT Djengger Tour	3,38	(3.385.000)	(3.385.000)
Unipro Singapore	2,84	(1.605.450)	(1.605.450)
Multi Niaga, Amsterdam	-	(18)	(18)
Obligasi RI tahun 1959/ Bonds RI in 1959	-	(33)	(33)
Sub jumlah / Subtotal		(2.158.653.558)	(109.022.446)
Nilai Tercatat / Carrying Value		8.372.650.462	10.422.281.574

Entitas memiliki keyakinan bahwa, tidak ada kewajiban dalam bentuk *constructive obligation* di masa datang terkait kepemilikan tersebut.

Penyertaan pada Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, dan BV Nederland Unipro nilainya disisihkan secara permanen karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

Pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-204/MBU/03.2017 perihal persetujuan Pendirian Anak Grup Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara dan surat dari Entitas No FI/DU/Int/PPI/V/2017 Perihal Pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara, Entitas menyeter sebesar Rp10.000.000.000 sebagai penyertaan saham di PT Mitra BUMDes Nusantara atau sebesar 10 % dari komposisi modal dasar PT Mitra BUMDes Nusantara.

The Entity believes that there is no obligation in the form of future constructive obligations related to such ownership.

Investments in Unipro Singapore, Unipro Amsterdam, PT Kias Intertrada, and BV Nederland Unipro were impaired permanently as these companies are longer in operation.

On March 24, 2017 pursuant to the letter from the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-204/MBU/03.2017 concerning the approval of the Establishment of Subsidiary of Perum Bulog PT Mitra BUMDes Nusantara and the letter from the Entity No FI/DU/Int/PPI/V/2017 concerning the Establishment of PT Mitra BUMDes Nusantara, the Entity paid a total of Rp10,000,000,000 as investment in PT Mitra BUMDes Nusantara or 10% of the composition of the authorized capital of PT Mitra BUMDes Nusantara.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

2022						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Increase</i>	Pengurangan/ <i>Decrease</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi / <i>Adjustment and Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost:
Tanah	1.697.362.152.396	-	-	(78.709.333.636)	1.618.652.818.760	Land
Bangunan	315.977.977.632	78.000.000	-	(17.716.246.935)	298.339.730.697	Buildings
Kendaraan	224.232.416.929	452.901.980	1.144.500.000		223.540.818.909	Vehicle
Inventaris kantor	100.923.802.361	2.806.930.174	-	1.533.280.644	105.264.013.179	Office Equipment
Emplasement & pagar	58.781.344.401	668.000.000	-	-	59.449.344.401	Emplacement & fence
Peralatan lainnya	13.324.214.412	344.159.835	-	(2.418.491.531)	11.249.882.716	Other Equipment
Aset dalam pelaksanaan:						Assets in Progress
Bangunan	99.576.379.319	5.114.789.158	-	(4.526.916.524)	100.164.251.953	Building
Jumlah harga perolehan	2.510.178.287.450	9.464.781.147	1.144.500.000	(101.837.707.982)	2.416.660.860.615	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation:
Bangunan	96.859.725.810	7.043.955.915	-	(15.243.579.598)	88.660.102.126	Buildings
Kendaraan	159.895.067.095	16.346.203.531	1.144.500.000	(9.956.871.755)	165.139.898.871	Vehicle
Inventaris Kantor	73.719.619.136	13.064.887.070	-	(3.955.756.536)	82.828.749.670	Office Equipment
Peralatan Lainnya	11.159.058.668	313.730.417	-	(1.075.586.407)	10.397.202.679	Other Equipment
Emplasement & pagar	44.056.729.595	4.799.872.295	-	-	48.856.601.890	Emplacement & fence
Jumlah akumulasi penyusutan	385.690.200.304	41.568.649.228	1.144.500.000	(30.231.794.296)	395.882.555.236	Total accumulated depreciation
Akumulasi penurunan nilai:						Accumulated impairment:
Tanah	-	60.096.600.000	-	-	60.096.600.000	Buildings
Bangunan	-	687.016.979	-	-	687.016.979	Vehicle
Jumlah akumulasi penurunan nilai	-	60.783.616.979	-	-	60.783.616.979	Total accumulated impairment
Nilai Buku	2.124.488.087.146				1.959.994.688.400	Book Value

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

2021						
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Increase</i>	Pengurangan / <i>Decrease</i>	Penyesuaian dan Reklasifikasi / <i>Adjustment and Reclassification</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Harga perolehan						Acquisition cost:
Tanah	1.914.384.802.396	438.800.000	-	(217.461.450.000)	1.697.362.152.396	Land
Bangunan	361.163.294.197	3.247.210.037	-	(48.432.526.602)	315.977.977.632	Buildings
Kendaraan	212.786.319.127	915.977.664	(245.000.000)	10.775.120.138	224.232.416.929	Vehicle
Inventaris Kantor	95.045.043.651	30.318.125.222	-	(24.439.366.512)	100.923.802.361	Office Equipment
Emplacement & pagar	52.939.751.153	5.841.593.248	-	-	58.781.344.401	Emplacement & Fence
Peralatan Lainnya	5.620.598.443	501.355.099	-	7.202.260.870	13.324.214.412	Other Equipment
Aset sewa pembiayaan:						Lease Asset
Kendaraan	8.334.381.332	2.440.738.806	-	(10.775.120.138)	-	Vehicle
Aset dalam pelaksanaan:						Assets in Progress:
Bangunan	83.411.176.446	16.165.202.873	-	-	99.576.379.319	Building
Jumlah harga Perolehan	2.733.685.366.745	59.869.002.949	(245.000.000)	(283.131.082.244)	2.510.178.287.450	Total Acquisition Cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	104.035.382.171	10.193.438.241	-	(17.369.094.602)	96.859.725.810	Buildings
Kendaraan	140.245.853.808	15.465.123.257	(245.000.000)	4.429.090.030	159.895.067.095	Vehicle
Inventaris kantor	73.449.536.500	8.907.724.038	-	(8.637.641.402)	73.719.619.136	Office Equipment
Peralatan lainnya	4.121.038.233	257.803.056	-	6.780.217.379	11.159.058.668	Other Equipment
Emplacement & pagar	39.966.404.784	4.090.324.811	-	-	44.056.729.595	Emplacement & fence
Aset sewa pembiayaan						Lease asset:
Kendaraan	2.366.677.709	2.062.412.321	-	(4.429.090.030)	-	Vehicle
Jumlah akumulasi penyusutan	364.184.893.205	40.976.825.724	(245.000.000)	(19.226.518.625)	385.690.200.304	Total accumulated Depreciation
Nilai Buku	2.369.500.473.540				2.124.488.087.146	Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2022, bangunan dan kendaraan diasuransikan kepada PT Binagriya, PT Ramayana, PT Tripe, Asuransi Buana Indah Independent dan PT Jasindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp184.401.318.053. Entitas berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Pada tahun 2022, Grup mengakui penurunan nilai sebesar Rp58.111.014.979 yang dibukukan sebagai Penghasilan Komprehensif Lain dan sebesar Rp2.672.602.000 yang dibukukan sebagai bagian dari Beban Non-Usaha.

Penyusutan atas aset tetap Grup tahun 2022 dan 2021 telah dibukukan dalam laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp41.568.649.228 dan Rp40.976.825.724 yang diakui sebagai Beban Administrasi dan Umum (Catatan 37).

On December 31, 2022, buildings and vehicles were insured to PT Binagriya, PT Ramayana, PT Tripe, Asuransi Buana Indah Independent and PT Jasindo with a total liability of Rp184,401,318,053. The Entity believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses.

In 2022, the Group recognizes impairment amounting to Rp58,111,014,979 which is recorded as Other Comprehensive Income and amounting to Rp2,672,602,000 which is recorded as part of Non-Operating expenses.

The depreciation of the Group's fixed assets in 2022 and 2021 has been recorded in the income statement amounting to Rp41,568,649,228 and Rp40,976,825,724 respectively, which is recognizes as General and Administration Expenses (Note 37).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Rincian atas reklasifikasi aset tetap pada tahun
2022 adalah sebagai berikut

The details of the reclassification of fixed assets in
2022 are as follows:

Harga Perolehan/ Acquisition Cost				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke) Properti Investasi (Catatan 16)				Reclassification from(to) Investment Property (Note 16)
Tanah	35.249.943.505	(116.412.567.141)	(81.162.623.636)	Land
Bangunan	-	(20.044.301.159)	(20.044.301.159)	Building
Subjumlah	35.249.943.505	(136.456.868.300)	(101.206.924.795)	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke) Aset Lain-lain (Catatan 19)				Reclassification from(to) Other Assets (Note 19)
Tanah	2.453.290.000	-	2.453.290.000	Land
Bangunan	135.880.000	-	135.880.000	Building
Aset dalam pelaksanaan	-	(2.334.742.300)	(2.334.742.300)	Assets in progress
Subjumlah	2.589.170.000	(2.334.742.300)	254.427.700	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke) Aset Tak Berwujud (Catatan 15)				Reclassification from(to) Intangible Assets (Note 15)
Peralatan kantor	-	(885.210.887)	(885.210.887)	Office equipment
Subjumlah	-	(885.210.887)	(885.210.887)	Subtotal
Jumlah	37.839.113.505	(139.676.821.487)	(101.837.707.982)	Total
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation				
	Dari/ From	Ke/ To	Jumlah/ Total	
Reklasifikasi dari (ke) Properti Investasi (Catatan 16)				Reclassification from(to) Investment Property (Note 16)
Bangunan	-	(4.792.830.205)	(4.792.830.205)	Building
Subjumlah	-	(4.792.830.205)	(4.792.830.205)	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke) Aset Lain-lain (Catatan 19)				Reclassification from(to) Other Assets (Note 19)
Bangunan	47.758.336	-	47.758.336	Building
Subjumlah	47.758.336	-	47.758.336	Subtotal
Reklasifikasi dari (ke) Aset Tak Berwujud (Catatan 15)				Reclassification from(to) Intangible Assets (Note 15)
Peralatan kantor	-	(5.031.342.942)	(5.031.342.942)	Office equipment
Subjumlah	-	(5.031.342.942)	(5.031.342.942)	Subtotal
Jumlah	47.758.336	(9.824.173.147)	(9.776.414.811)	Total

Pada tahun 2022, Grup menerapkan perubahan kebijakan estimasi nilai residu dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian yang mengurangi akumulasi penyusutan bangunan dan kendaraan masing-masing sebesar Rp10.498.507.729 dan Rp9.958.340.024.

In 2022, the Group implemented a change in the estimation of residual value policy in calculating the depreciation of fixed assets which resulted in an adjustment that decrease the accumulated depreciation of buildings and vehicles amounting to Rp10,498,507,729 and Rp9,958,340,024, respectively.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

15. ASET TIDAK BERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021	
Software	37.937.169.682	31.641.627.382	Software
Akumulasi Penyusutan – Software	(21.531.270.184)	(15.417.858.781)	Accumulative depreciation- Software
Goodwill	3.300.000.000	3.300.000.000	Goodwill
Jumlah	19.705.899.498	19.523.768.601	Total

Penambahan aset tidak berwujud pada tahun 2022 termasuk reklasifikasi Biaya Development IT (ERP) dari Aset Lain-lain sebesar Rp5.410.342.300 sehubungan dengan telah selesainya pengembangan ERP Microsoft Dynamics. (Catatan 19)

Pada tahun 2022, dilakukan reklasifikasi dari aset tetap dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp885.210.887 dan Rp5.031.342.942 (Catatan 14).

The account consist of:

Addition of intangible assets in 2022 includes reclassification of Development IT Cost (ERP) from Other Assets amounting to Rp5.410.342.300 in connection with completion of ERP Microsoft Dynamics development. (Note 19)

In 2022, had been reclassified of property and equipment has been carried out with the acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp.885,210,887 and Rp.5,031,342,942, respectively (Note 14).

16. PROPERTI INVESTASI

16. INVESTMENT PROPERTIES

	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					At cost
Tanah	363.976.612.505	121.765.965.392	(35.249.943.505)	450.492.634.392	Land
Bangunan	43.551.147.312	14.101.061.725	-	57.652.209.037	Building
	407.527.759.817	135.867.027.117	(35.249.943.505)	508.144.843.429	
Perubahan nilai wajar					Changes in fair value
Tanah	535.526.391.000	88.172.900.608	-	623.699.291.608	Land
Bangunan	(7.187.257.312)	(3.378.512.572)	-	(10.565.769.884)	Building
	528.339.133.688	84.794.388.036	-	613.133.521.724	
Jumlah	935.866.893.505			1.121.278.365.153	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

16. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

16. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

2021					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Harga perolehan					At cost
Tanah	146.106.999.240	217.869.613.265	-	363.976.612.505	Land
Bangunan	12.487.715.312	31.063.432.000	-	43.551.147.312	Building
	158.594.714.552	248.933.045.265	-	407.527.759.817	
Perubahan nilai wajar					Changes in fair value
Tanah	177.792.881.000	357.733.510.000	-	535.526.391.000	Land
Bangunan	5.351.024.688	(12.538.282.000)	-	(7.187.257.312)	Building
	183.143.905.688	345.195.228.000	-	528.339.133.688	
Jumlah	341.738.620.240			935.866.893.505	Total

Penambahan dan pengurangan properti investasi merupakan reklasifikasi dari/ke aset tetap (Catatan 14 dan 19). Atas penambahan di tahun 2022 dan 2021, Group mengakui perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp69.425.363.883 dan Rp341.872.768.000 yang dibukukan sebagai Penghasilan Komprehensif Lain.

Addition and deduction of property investment in represents reclassification from fixed assets (Notes 14 and 19). Relating to the addition in 2022 and 2021, the Group recognises changes in fair value amounting to Rp69,425,363,883 and Rp341,872,768,000, respectively, which is recorded as Other Comprehensive Income.

Perubahan nilai wajar atas properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.369.024.153 dan Rp3.322.460.000 dibukukan sebagai bagian dari Pendapatan Non-Usaha (Catatan 39).

Changes in fair value of property investment as at Deember 31, 2022 and 2021 amounting to Rp15,369,024,153 and Rp3,322,460,000, respectively, recorded as part of Non-Operating Income (Note 39).

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 didasarkan pada laporan penilai yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira dan Rekan.

Fair value of the investment property as of December 31, 2022 and December 31, 2021 based on appraisal valuation prepared by Dasa'at Yudistira and Partner an independent appraisal registered.

Properti investasi per 31 Desember 2021 termasuk tanah yang berlokasi di Kelapa Gading, DKI Jakarta yang dicatat berdasarkan harga perolehan Rp35.249.943.505. Tanah tersebut merupakan obyek kerjasama optimalisasi aset lahan strategis dengan PERUMNAS. Pada tahun 2022, tanah tersebut telah direklasifikasi ke aset tetap (Catatan 14).

Investment property as at December 31, 2021 includes land located in Kelapa Gading, DKI Jakarta which is recorded at acquisition cost of Rp35.249.943.505. The land represents object of Cooperation in the optimizing strategic land assets with PERUMNAS. In 2022, the land had been reclassified to fixed assets (Note 14).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

17. ASET HAK GUNA

17. RIGHT OF USE ASSETS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurang/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances		Acquisition Cost
Harga Perolehan						Building
Bangunan	2.265.574.146	8.901.046.992	-	11.166.621.138		Building
Kendaraan	-	1.193.771.136	-	1.193.771.136		Building
Jumlah	2.265.574.146	10.094.818.128	-	12.360.392.274		Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.788.248.693	2.482.401.485	-	4.270.650.178		Building
Kendaraan	-	745.662.168	-	745.662.168		Building
Jumlah	1.788.248.693	3.228.063.653		5.016.312.346		Total
Nilai buku Bersih	477.325.453			7.344.079.928		Net book Value
2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak PSAK 73/ Impact of PSAK 73	yang d disesuaikan / Adjusted beginning	Saldo awal Penambahan/ Additions	Pengurang/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balances
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	1.974.067.975	-	-	291.506.171	-	2.265.574.146
Jumlah	1.974.067.975	-	-	291.506.171	-	2.265.574.146
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.280.832.319	-	-	507.416.374	-	1.788.248.693
Jumlah	1.280.832.319	-	-	507.416.374	-	1.788.248.693
Nilai buku Bersih	693.235.656					477.325.453

18. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar nihil dan Rp287.000.000 merupakan bank garansi dari Bank BNI.

The account as of December 31, 2022 and 2021 amounting to nil and Rp287,000,000, respectively, represent bank guarantee from Bank BNI.

19. ASET LAIN-LAIN

19. OTHER ASSETS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Aset tetap yang tidak dimanfaatkan	417.427.547.028	419.925.316.185	Unused fixed assets
Beban tangguhkan	15.859.640.976	15.279.381.036	Deferred Expenses
Aset lainnya	9.307.262.167	11.445.895.980	Other asset
Biaya development IT (Catatan 15)	-	5.410.342.300	IT development cost (ERP) (Note 15)
Uang jaminan	1.590.476.027	1.590.476.027	Deposits
Lain-lain	3.261.118.729	5.561.021.899	Others
Jumlah	447.446.044.927	459.212.433.427	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

19. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

19. OTHER ASSETS (continued)

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan

Aset tetap yang tidak dimanfaatkan merupakan reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Unused fixed assets

Unused fixed assets are reclassification of property, plant and equipment which are not used in business, with details as follows:

	2022	2021	
Tanah	416.171.239.738	418.624.529.706	Land
Bangunan	27.708.446.157	27.844.326.157	Building
Akumulasi Penyusutan			Accumulated depreciation
Bangunan	(26.452.138.867)	(26.543.539.678)	Building
Jumlah	417.427.547.028	419.925.316.185	Total

Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan perpanjangan hak atas tanah serta pengembangan dan pemeliharaan. Beban perpanjangan hak atas tanah diamortisasi selama 20 tahun dan biaya lainnya disisihkan sesuai masa manfaatnya, dengan rincian sebagai berikut:

Deferred expenses

Deferred expenses represent expenses incurred in connection with the extension of land rights and development and maintenance costs. Land rights extension expenses are amortized over 20 years and the other costs are set aside for their useful life, with details are as follows:

	2022	2021	
Beban hak atas tanah	20.853.983.787	20.844.325.907	Deferred expenses
Biaya pengembangan dan pemeliharaan	15.975.470.259	11.723.201.501	Development and maintenance expenses
Amortisasi	(20.969.813.070)	(17.288.146.372)	Amortization
Jumlah	15.859.640.976	15.279.381.036	Total

Lain-lain

Others

	2022	2021	
Persediaan barang rusak	21.510.060.105	21.181.380.876	Inventory of damaged goods
Cadangan persediaan barang rusak	(21.510.060.105)	(21.181.380.876)	Reserves inventory damaged
Pos dalam penyelesaian	34.133.150.235	34.133.150.235	Posts in progress
Akumulasi amortisasi pos dalam penyelesaian	(33.431.674.936)	(32.944.788.724)	Accumulated amortization post in progress
Lainnya	2.559.643.430	4.372.660.388	Others
Jumlah	3.261.118.729	5.561.021.899	Total

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries**
Notes to the Consolidated Financial Statements
(continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

20. UTANG USAHA

20. TRADE PAYABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Nindya Karya	10.765.141.982	10.765.141.982	PT Nindya Karya
PT Petrosida Gresik	10.169.852.951	6.949.946.117	PT Petrosida Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.917.511.163	-	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Timah	5.569.408.620	5.463.130.680	PT Timah
PT Petrokimia Gresik	4.531.992.790	-	PT Petrokimia Gresik
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3.433.973.644	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Lainnya (saldo dibawah Rp 2 Milyar)	11.731.706.690	6.471.964.343	Others (Balance below Rp 2 Billion)
Sub Jumlah	52.119.587.840	29.650.183.122	Subtotal
Pihak ketiga:			Third parties:
OCI (Hongkong) Ltd	26.761.230.408	38.650.784.760	OCI (Hongkong) Ltd
PT Industri Nabati Lestari	21.444.642.294	-	PT Industri Nabati Lestari
PT Satoria Aneka Industri	15.525.497.104	10.533.599.061	PT Satoria Aneka Industri
PT Unilever Indonesia	14.829.442.664	7.636.374.107	PT Unilever Indonesia
PT Emjebe Pharma	13.508.949.158	6.600.652.157	PT Emjebe Pharma
PT Esha Sumber Hidayat Agung	11.555.050.900	-	PT Esha Sumber Hidayat Agung
Tan Thanh An Co Ltd	10.066.074.380	-	Tan Thanh An Co Ltd
Xiamen Ditai Import and Export Co Ltd.	7.968.715.000	-	Xiamen Ditai Import and Export Co Ltd.
PT Permata Hijau Palm Oleo	7.332.787.247	-	PT Permata Hijau Palm Oleo
PT Mustika Ratubuana Internasional	6.932.315.000	-	PT Mustika Ratubuana Internasional
PT Prima Karya Sarana	6.824.073.998	10.979.602.542	PT Prima Karya Sarana
PT Tiga A	6.621.724.769	2.972.299.835	PT Tiga A
PT Multi Bangun Abadi	5.652.180.510	3.317.686.940	PT Multi Bangun Abadi
Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh	5.336.402.500	-	Cong Ty Tnhh Mtv Cong Thanh
PT Wilmar Chemical Indonesia	4.744.005.895	-	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Widatra Bhakti	4.635.504.989	2.798.485.683	PT Widatra Bhakti
PT Inti Everspring Indonesia	4.570.320.885	-	PT Inti Everspring Indonesia
PT Karya Putra Dumai Mandiri	4.001.622.979	4.108.528.600	PT Karya Putra Dumai Mandiri
PT Airindo Teknologi Perkasa	3.975.000.000	-	PT Airindo Teknologi Perkasa
PT Angkasa Biru Laut	3.874.882.681	2.975.614.242	PT Angkasa Biru Laut
Surya Trans Pte Ltd	3.488.840.000	-	Surya Trans Pte Ltd
PT Sigma cipta caraka	3.207.803.593	5.196.757.111	PT Sigma cipta caraka
PT LDC East Indonesia	2.970.539.145	-	PT LDC East Indonesia
Primus Sanus Cooking Oil Industrial	2.922.058.281	-	Primus Sanus Cooking Oil Industrial
Sanmik Group Ltd.	2.679.129.819	-	Sanmik Group Ltd.
Beecom Inc. Corporation	2.520.359.100	-	Beecom Inc. Corporation
PT Inovasi Global Solusindo	1.828.812.997	3.333.098.054	Pt. Inovasi Global Solusindo
PT Wahyu Putra Jaya	1.032.666.576	2.122.908.702	PT Wahyu Putra Jaya
PT. Jasa Prima Logistik Bulog	943.685.223	2.278.004.100	PT. Jasa Prima Logistik Bulog
PT Varia Usaha Lintas Segara	-	2.840.000.000	PT Varia Usaha Lintas Segara
Lainnya (saldo di bawah Rp 2 milyar)	97.436.832.918	73.952.002.798	Others (balance below Rp 2 billion)
Sub Jumlah	305.191.151.013	180.296.398.692	Subtotal
Jumlah	357.310.738.853	209.946.581.814	Total

**21. LIABILITAS KEUANGAN
PENDEK LAINNYA**

21. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

Akun ini terdiri dari :

The account are as follows:

	2022	2021	
Deposit Pelanggan	11.214.482.146	7.715.477.020	Customers Deposits
PT Telkom	2.890.982.418	2.890.982.418	PT Telkom
PT Mitra Steel Indonesia	1.620.753.444	1.620.753.444	PT Mitra Steel Indonesia
Lainnya	22.871.695.796	45.650.588.040	Others
Jumlah	38.597.913.804	57.877.800.922	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

21. LIABILITAS SEWA

Liabilitas sewa merupakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp664.204.976 dan Rp65.287.499 dan merupakan utang sewa kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan rata-rata 36 bulan dengan tingkat bunga berkisar 5,84% - 14,05%.

21. LEASE LIABILITIES

Lease liabilities as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp664,204,976 and Rp65,287,499 respectively represent leases payable of vehicles with an average financing period of 36 months with an interest rate of 5.84% - 14.05%.

22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

22. ACCRUED EXPENSES

The account are as follows:

	2022	2021	
Beban kantor	18.891.210.084	18.030.207.194	Office expenses
Beban pegawai	13.941.632	774.922.311	Employee expenses
Beban operasi	48.843.004.421	36.558.782.772	Operating expenses
Beban lainnya	1.257.144.348	4.080.654.647	Other expenses
Jumlah	69.005.300.485	59.444.566.924	Total

23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

23. UNEARNED REVENUES

The account consist of:

	2022	2021	
Pendapatan sewa	17.670.862.494	6.379.867.789	Rental income
Uang muka penjualan produk	51.953.147.436	49.811.257.215	Advance for product sales
Jasa pergudangan	55.418.569.655	46.209.770.778	Warehouse services
Jasa logistik	-	10.522.500	Logistic services
Lainnya	1.530.579.319	395.882.870	Others
Jumlah	126.573.158.904	102.807.301.152	Total

24. UTANG BANK – JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari

24. SHORT TERM – BANK LOAN

The account consist of:

	2022	2021	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
KMK No B.5794/KC- V/ADK/05/2017	69.420.698.580	62.473.223.144	KMK No B.5794/KC- V/ADK/05/2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
HBK.GI2/SPPK.17/2020	79.700.000.000	64.200.000.000	HBK.GI2/SPPK.17/2020
HBK.GI2/SPPK.003/2021	24.681.333.960	16.692.826.241	HBK.GI2/SPPK.003/2021
Jumlah	173.802.032.540	143.366.049.385	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017
(lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, Grup (ex-PT BGR) memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (atau KMK) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp50.000.000.000
Tingkat bunga	9.75%
Jangka waktu	12 bulan/ months
Jatuh tempo	4 Mei/ May 2018

Perjanjian ini diubah setiap tahun, perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. R.II.194-CRO/COD/LAS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Persyaratan fasilitas kredit diubah menjadi sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp70.000.000.000
Tingkat bunga	9%
Jangka waktu	12 bulan/ months
Jatuh tempo	31 Mei/ May 2023

Jaminan:

- Piutang dagang sebesar Rp 80.000.000.000.
- Persediaan sebesar Rp 70.000.000.000
- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. RE Martadinata, Kota Palembang, Sumatera Selatan, senilai Rp 77.000.000.000

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. HBK.GI2/SPPK.17/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Grup (ex-PT BGR) memperoleh fasilitas Kredit Investasi (atau KI) dari Bank Mandiri.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp75.000.000.000
Tingkat bunga	8.25%
Jangka waktu	48 bulan/ months
Jatuh tempo	23 Desember/ December 2021

a. KMK No. B.5794/KC-V/ADK/05/2017
(continued)

Based on Loan Agreement number B.5794/KC-V/ADK/05/2017 dated May 4, 2017, the Group (ex-PT BGR) obtains Working Capital Loan Facility (KMK) from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date

This agreement is amended annually, most recently through Loan Agreement No. R.II.194-CRO/COD/LAS/10/2022 dated October 18, 2022. The terms and conditions of the credit facility were amended as follows:

Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date

Collateral

- Trade receivables amounting to Rp80,000,000,000.
- Inventories amounting to Rp70,000,000,000
- A land plot with Building Rights Title (SHGB) including building thereon located in Jl. RE Martadinata, Palembang City, South Sumatra, valued at Rp 77,000,000,000.

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020

Based on the Credit Agreement No. HBK.GI2/SPPK.17/2020 dated August 10, 2020, the Group (ex-PT BGR) obtained an Investment Credit (or KI) facility from Bank Mandiri.

Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. UTANG BANK JANGKA P ENDEK (lanjutan)

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (lanjutan)

b. HBK.GI2/SPPK.17/2020 (continued)

Perjanjian ini telah diubah sesuai dengan addendum yang dibuat pada tanggal 28 April 2022. Persyaratan fasilitas kredit diubah menjadi sebagai berikut:

The agreement has been amended based on the Addendum made on April 28, 2022. The terms and conditions of the credit facility were amended as follows:

Pagu kredit	Rp80.000.000.000
Tingkat bunga	7,75%%
Jangka waktu	48 bulan/ months
Jatuh tempo	26 April/April 26, 2023

*Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date*

Jaminan

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang seluas 190.239m² dengan SHGB No. 737 terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Medan Peringkat I senilai Rp306.258.323.253.
- Sebidang tanah seluas 36.420 m² dengan SHGB No. 444 dan No. 477 berikut bangunan dan gudang di atasnya di Bandar Lampung senilai Rp42.467.203.505.
- Piutang dagang sebesar Rp90.000.000.000
- Seluruh obyek yang dibiayai dari fasilitas kredit investasi berupa mesin dan peralatan cold storage DKI Jakarta Divre VI Warehouse on Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, North Jakarta

Collateral

- *A plot of land along with the building on it with an area of 190,239 sqm with SHGB No. 737 located in Rengas Pulau, Medan amounting to Rp306,258,323,253.*
- *A plot of land with an area of 36,420 sqm with SHGB No. 444 and No. 477 along with the building and warehouse thereon in Bandar Lampung worth Rp42,467,203,505.*
- *Trade receivables amounting to Rp90,000,000,000,000.*
- *All objects financed from credit facilities in the form of cold storage machines and equipment in Divre VI warehouse on Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, North Jakarta.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

25. UTANG BANK JANGKA P ENDEK (lanjutan)

25. BANK LOAN- SHORT TERM (continued)

c. HBK.G12/SPPK.003/2021

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. HBK.G12/SPPK.003/2021 tanggal 27 April 2021, Grup (ex-PT BGR) memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (atau KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp25.000.000.000
Tingkat bunga	7.25%
Jangka waktu	12 bulan/ months
Jatuh tempo	2 Mei/ May 2022

Perjanjian ini telah diubah sesuai dengan addendum yang dibuat pada tanggal 28 April 2022. Persyaratan fasilitas kredit diubah menjadi sebagai berikut:

Pagu kredit	Rp25.000.000.000
Tingkat bunga	7.25%
Jangka waktu	12 bulan/ months
Jatuh tempo	27 April/ April 27, 2023

Jaminan

- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Medan senilai Rp50.408.531.253.
- Sebidang tanah SHGB berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Srengsem, Lampung senilai Rp42.467.203.505.
- Piutang dagang sebesar Rp90.000.000.000.

c. HBK.G12/SPPK.003/2021

Based on the Credit Agreement No.HBK.G12/SPPK.003/2021 dated April 27, 2021, the Group (ex-PT BGR) obtained an Investment Credit (or KI) facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the Loan Agreement above, the terms and conditions are as follows:

Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date

The agreement has been amended based on the Addendum made on April 28, 2022. The terms and conditions of the credit facility were amended as follows:

Credit limit
Interest rate
Tenor
Due date

Collateral

- A plot of SHGB land along with the building on it, located in Rengas Pulau Village, Medan, valued at Rp50,408,531,253.
- A plot of SHGB land along with the building on it which is located in Srengsem Village, Lampung, valued at Rp42,467,203,505.
- Trade receivables amounting to Rp90,000,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN

26. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

Akun ini terdiri dari:

The account are as follows:

	2022	2021	
Entitas			Entity
PPh pasal 21	-	99.867.450	Income Tax article 21
PPh pasal 23	-	795.629.391	Income Tax article 23
PPh pasal 28A			Income tax article 28A
2021	29.211.260.458	29.211.260.458	2021
2022	20.307.505.514	-	2022
PPN	147.263.177	257.559.931	VAT
Subjumlah	49.666.029.149	30.364.317.230	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN	633.397.423	303.845.201	VAT
Pajak final	5.541.856.951	-	Final tax
Subjumlah	6.175.254.374	303.845.201	Subtotal
Jumlah	55.841.283.523	30.668.162.431	Total

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Entitas			The Entity
PPN Keluaran	395.087.763	9.632.544.232	VAT Out
PPN Masukan (WAPU)	160.043.400	257.559.931	VAT In (WAPU)
PPh pasal 21	1.451.722.792	1.214.296.592	Income Tax Art. 21
PPh pasal 22	1.003.086.020	-	Income Tax Art. 22
PPh pasal 23	160.084.391	1.224.287.899	Income Tax Art. 23
PPh pasal 25	762.339.854	381.169.927	Income Tax Art. 25
PPh pasal 4(2)	10.666.664	291.007.188	Income Tax Art. 4(2)
Sub Jumlah	3.943.030.884	13.000.865.769	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
PPN Keluaran	1.182.346.001	1.619.674.621	VAT out
PPh 15	1.590.600	604.800	Income Tax Art. 15
PPh pasal 21	470.294.458	278.417.390	Income Tax Art. 21
PPh pasal 22	-	4.636	Income Tax Art. 22
PPh pasal 23	405.358.597	6.766.704	Income Tax Art. 23
PPh pasal 25	95.533.055	-	Income Tax Art. 25
PPh pasal 29	630.097.300	1.513.613.721	Income Tax Art. 29
PPh pasal 4(2)	332.099.953	38.473.510	Income Tax Art. 4(2)
Sub Jumlah	3.117.319.964	3.457.555.382	Subtotal
Jumlah	7.060.350.848	16.458.421.151	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Taxes

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Entitas			The Entity
Pajak final	(1.624.797.568)	(14.387.748.685)	Final tax
Beban pajak kini	-	-	Current income tax expense
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Final	(14.819.875.511)	(849.626.315)	Final tax
Beban pajak kini	(9.032.834.641)	(2.029.918.715)	Current income tax expense
Jumlah pajak kini	(25.477.507.720)	(17.267.293.715)	Total current tax
Pajak tangguhan	(1.296.013.874)	49.913.036.113	Deferred tax
Jumlah	(26.773.521.594)	32.645.742.398	Total

i) Pajak Kini

i) Current Tax

Rekonsiliasi antara laba rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laba komersial dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income before income loss tax between commercial income with taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum pajak dalam laporan laba rugi konsolidasi	75.862.682.068	(177.940.747.151)	Profit (loss) before tax consolidated statement of profit loss
Dikurangi:			Less:
Laba (rugi) sebelum pajak anak Perseroan	61.496.280.077	9.843.904.345	Profit (loss) before income subsidiary
Laba komersil sebelum pajak penghasilan – Entitas	14.366.401.991	(187.784.651.496)	Commercial income before income tax – the Entity
Beda Waktu			Timing Difference
Penyisihan persediaan	1.800.580.994	545.057.833	Provision for inventories
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain – bersih	17.142.783.338	20.939.052.404	Allowance for account receivables and other receivable – net
Penyusutan aset lain-lain	2.024.280.456	9.068.314.412	Depreciation of other assets
Penyusutan aset tetap	(12.306.628.544)	11.066.870.045	Depreciation of fixed assets
Penurunan nilai aset tetap	2.672.602.000	-	Impairment of fixed assets
Liabilitas imbalan pasca kerja	(52.815.836.212)	5.509.877.285	Post-employment benefits obligations
Penurunan nilai aset yang tidak dimanfaatkan	-	10.450.000.000	Impairment of unused assets
Lainnya	-	201.636.125	Others
Jumlah Beda Waktu	(41.482.217.968)	57.780.808.104	Total Timing Difference

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

i) Pajak Kini (lanjutan)

i) Current Tax (continued)

	2022	2021	
Beda Tetap:			Permanent Difference
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	12.764.205.949	10.157.368.657	Non deductible expense
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak final	27.066.837.248	30.818.149.572	Expense of revenue subjects to final tax
Pendapatan bunga – final	(765.033.904)	(2.553.725.185)	Interest income – final
Pendapatan sewa – final	(21.998.582.408)	(70.006.815.009)	Rental income – final
Pendapatan final – lain	(23.018.466.773)	(56.414.532)	Other Income
Surplus properti investasi	(15.369.024.153)	(3.322.460.000)	Investment Property Surplus
Jumlah Beda Tetap	(21.320.064.041)	(34.963.896.497)	Total Permanent Difference
Rugi Fiskal Entitas – dibulatkan	(48.435.880.000)	(164.967.739.889)	The Entity's taxable profit (loss)- rounded
Kompensasi rugi fiskal	-	-	Fiscal loss compensation
Akumulasi rugi fiskal	(213.403.619.889)	(164.967.739.889)	Accumulated fiscal loss
Taksiran Pajak Kini Entitas (22 %)	-	-	Estimated Current Tax of the Entity
Pajak Kini Entitas Anak	9.032.834.641	2.029.918.715	Current tax of Subsidiaries
Taksiran Pajak Kini	9.032.834.641	2.029.918.715	Total Current Tax
SKPLB tahun 2018	-	-	SKPLB year 2018
Beban pajak	9.032.834.641	2.029.918.715	Tax expense
Dikurangi kredit pajak dibayar dimuka			Less tax credit:
PPh Pasal 22	(19.100.079)	(795.629.391)	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	(7.540.577.957)	-	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	(843.059.463)	-	Income Tax Article 25
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	630.097.142	1.234.289.324	Under (Over) Payment of Corporate Income Tax

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan

ii) Deferred Tax Assets

	2022							
	Saldo Awal 31 Des 2021 / Total Beginning Balance 31 Dec 2021	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation PSAK 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian ke laporan laba rugi/ Adjustment to profit (Loss)	Penyesuaian ke Pendapatan Komprehensif Lain / Adjustment to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des 2022/ Ending Balance 31 Dec 2022	
Entitas								The Entity
Estimasi kerugian fiscal	33.176.585.024	-	10.655.893.600	-	3.116.317.751	-	46.948.796.375	Estimated fiscal loss
Penyisihan Persediaan	4.641.008.556	-	396.127.819	-	-	-	5.037.136.375	Provision for Inventories
Penyisihan Piutang Usaha	83.497.400.734	-	1.793.906.654	-	(2.255.203.045)	-	83.036.104.344	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan Piutang lain-lain	33.363.810.052	-	1.977.505.680	-	3.822.592.532	-	39.163.908.264	Allowance for impairment of others Receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(27.993.511.994)	-	(2.707.458.280)	-	-	-	(30.700.970.274)	Accumulated depreciation of Fixed Assets
Penyisihan aset tetap	-	-	587.972.440	-	-	-	587.972.440	Allowance for Fixed Assets
Penyisihan aset lain-lain	3.707.859.291	-	445.341.700	-	(536.342.598)	-	3.616.858.393	Allowance for other receivables
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	48.759.948	-	-	439.314.737	-	-	488.074.685	Allowance for impairment of investment
Manfaat Karyawan	17.604.988.429	-	(11.619.483.966)	2.377.861.563	-	-	8.363.366.026	Employee Benefits
Bonus dan Tantiem	6.648.619.667	-	-	-	(6.648.619.667)	-	-	Bonus and tantiem
Efek perubahan tarif pajak	957.109.987	-	-	-	(957.109.987)	-	-	Effects of changing tax rates
Pendapatan komprehensif lainnya	(638.724.062)	-	-	-	352.529.783	286.194.279	-	Comprehensive income
Penilaian kembali atas properti investasi	(75.212.008.960)	-	-	5.772.749.164	-	-	(69.439.259.796)	Revaluation of property investment
Penilaian kembali atas property investasi (penyajian kembali)	(43.045.664.512)	-	-	-	-	-	(43.045.664.512)	Revaluation of property investment (restate)
Sub jumlah	36.756.232.160	-	1.529.805.647	8.589.925.464	(3.105.835.231)	286.194.279	44.056.322.320	Subtotal

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries
Notes To The Consolidated Financial Statements (continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	2022						
	Saldo Awal 31 Des 2021 / Beginning Balance 31 Dec 2021	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation PSAK 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian ke Laporan Laba (Rugi)/ Adjustment to Profit (Loss)	Penyesuaian ke Penghasilan Komprehensif Lainnya / Adjustment to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir 31 Des 2022/ Ending Balance 31 Dec 2022
Entitas anak							
Penyusutan dan amortisasi	32.706.481	-	(74.173.711)	-	-	-	(41.467.230)
Manfaat karyawan	212.904.651	-	(34.089.043)	(9.005.294)	-	-	169.810.314
Sewa dengan hak opsi	78.222.830	-	-	-	-	-	78.222.830
Penyisihan Piutang usaha	393.618.137	-	388.278.463	-	-	-	781.896.600
Penilaian kembali properti investasi	-	-	-	(8.251.174.892)	-	-	(8.251.174.892)
Penurunan nilai investasi	-	-	-	11.604.108	-	-	11.604.108
Sub jumlah	717.452.099	-	280.015.709	(8.248.576.078)	-	-	(7.251.108.270)
Jumlah aset pajak tangguhan	37.473.684.259						36.805.214.050

Subsidiaries
Depreciation and amortization
Employee benefit
Leasing with options
Allowance for Accounts Receivable
Impairment of investment

Subtotal
Total deferred tax assets

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries
Notes To The Consolidated Financial Statements (continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	2021							
	Saldo Awal 31 Des 2020 / Beginning Balance 31 Dec 2020	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation PSAK 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprehensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya/ Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2021/ Ending Balance 31 Dec 2021	
Entitas								The Entity
Estimasi kerugian fiskal	(3.116.317.751)	-	36.292.902.775	-	-	-	33.176.585.024	Estimated fiscal loss
Penyisihan Persediaan	4.501.090.123	-	139.918.433	-	-	-	4.641.008.556	Provision for Inventories
Penyisihan Piutang Usaha	78.328.457.365	-	5.168.943.369	-	-	-	83.497.400.734	Allowance for impairment of Receivables
Penyisihan Piutang lain-lain	33.185.850.662	-	177.959.390	-	-	-	33.363.810.052	Allowance for impairment of others Receivables
Akumulasi penyusutan aset tetap	(32.727.223.404)	-	4.733.711.410	-	-	-	(27.993.511.994)	Allowance for Fixed Assets
Penyisihan aset lain-lain	1.712.830.120	-	1.995.029.171	-	-	-	3.707.859.291	Allowance for other receivables
Penyisihan penurunan nilai penyertaan saham	-	-	48.759.948	-	-	-	48.759.948	Allowance for impairment of investment
Manfaat Karyawan	10.458.263.005	-	1.377.729.463	5.768.995.961	-	-	17.604.988.429	Employee Benefits
Bonus dan Tantiem	6.648.619.667	-	-	-	-	-	6.648.619.667	Bonus and tantiem
Efek perubahan tarif pajak	957.109.987	-	-	-	-	-	957.109.987	Effects of changing tax rates
Pendapatan komprehensif lainnya	(638.724.062)	-	-	-	-	-	(638.724.062)	Comprehensive income
Penilaian kembali atas properti investasi	-	-	-	(75.212.008.960)	-	-	(75.212.008.960)	Revaluation of property investment
Penilaian kembali atas property investasi (penyajian kembali)	(43.045.664.512)	-	-	-	-	-	(43.045.664.512)	Revaluation of property investment (restate)
Sub jumlah	56.264.291.200	-	49.934.953.959	(69.443.012.999)	-	-	36.756.232.160	Subtotal

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
and Subsidiaries
Notes To The Consolidated Financial Statements (continued)
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

26. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Taxes (continued)

ii) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii) Deferred Tax Assets (continued)

	2021							
	Saldo Awal 31 Des. 2020 / Beginning Balance 31 Dec. 2020	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ Effect of Initial Implementation PSAK 71	Dibebankan ke laporan Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Pedapatan Komprensif Lainnya / Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya / Changes in income Tax Rate and Others	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir 31 Des 2021/ Ending Balance 31 Dec 2021	
Entitas anak								Subsidiaries
Penyusutan dan amortisasi	-	-	32.706.481	-	-	-	32.706.481	Depreciation and amortization
Manfaat karyawan	409.056.236	-	(69.271.743)	(126.879.842)	-	-	212.904.651	Employee benefit
Sewa dengan hak opsi	81.850.282	-	(3.627.452)	-	-	-	78.222.830	Leasing with options
Penyisihan Piutang usaha	375.343.269	-	18.274.868	-	-	-	393.618.137	Allowance for Accounts Receivable
Sub jumlah	866.249.787	-	(21.917.844)	(126.879.842)	-	-	717.452.099	Subtotal
Jumlah aset pajak tangguhan	57.130.540.987	-	49.913.036.113	(69.569.892.841)	-	-	37.473.684.259	Total deferred tax assets

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG

27. LONG TERM PAYABLES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Utang Jangka Panjang			Long Term Payables
a. Eks BPPN			a. Ex BPPN
Eks BPPN	609.660.827.108	609.660.827.108	Ex BPPN
Sub jumlah	609.660.827.108	609.660.827.108	Subtotal
b. Bappenas			b. Bappenas
Bappenas (kedelai)	23.687.544.118	23.687.544.118	Bappenas (soybeans)
Sub jumlah	23.687.544.118	23.687.544.118	Subtotal
c. Rekening Dana Investasi			c. Investment Fund Account
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	192.202.716.631	192.202.716.631	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	64.870.305.071	64.870.305.071	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	16.652.927.396	16.652.927.396	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
Sub jumlah	273.725.949.098	273.725.949.098	Subtotal
d. Kredit Investasi			d. Investment Loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020	30.834.743.938	44.280.093.627	PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020
Sub jumlah	30.834.743.938	44.280.093.627	Subtotal
Jumlah Utang	937.909.064.262	951.354.413.951	Total Payables
Bagian Utang Jangka Panjang yang Jatuh tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long Term Payables
Rekening Dana Investasi			Investment Fund Account
RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017	6.069.559.473	8.092.745.964	RDI No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017
RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017	2.048.535.948	2.731.381.265	RDI No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017
RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017	525.881.916	701.175.885	RDI No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017
Kredit Investasi			Investment Loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020	15.417.371.972	14.611.576.527	PT Bank Mandiri Persero Tbk No.HBK.G12/SPPK.017/2020
Sub jumlah	24.061.349.309	26.136.879.641	Subtotal
Jumlah Utang Jangka Panjang	913.847.714.953	925.217.534.310	Total Long Term Payables

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Utang Eks BPPN

Utang kepada eks BPPN merupakan hasil Restrukturisasi utang (Kredit BDN, Bank Exim dan Bank Tamara) Eks PT Dharma Niaga (Persero) berdasarkan Perjanjian Pokok Restrukturisasi Utang, Perjanjian Pembayaran Tunai dan Pinjaman Berjangka serta perjanjian Obligasi sesuai dengan akta No. 14/L/2002, 15/L/2002, dan 16/L/2002 tanggal 17 Oktober 2002 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH, dimana saldo utang yang disepakati bersama per 31 Maret 2002 (tanggal pengalihan) adalah sebesar Rp436.546.439.765 dan USD 16.282.652 dengan kurs USD 1 = Rp9.264,00 atau setara dengan Rp150.842.492.760, sehingga jumlah utang seluruhnya adalah sebesar Rp587.388.932.525.

Jumlah utang kepada Eks BPPN tersebut direstrukturisasi menjadi 3 (tiga) tranche sebagai berikut:

1. Tranche A: Pembayaran Tunai sebesar Rp45.000.000.000

Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan sumber pelunasannya berasal dari hasil penjualan aset non produktif milik Eks PT Dharma Niaga (Persero)

2. Tranche B: Pinjaman Berjangka sebesar Rp22.000.000.000

Jangka waktu pinjaman 9 tahun dengan grace period 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian, dan tingkat bunga adalah suku bunga rata-rata dari tingkat deposito berjangka 3 bulan Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB dan Citibank ditambah 3% (tiga persen).

a. Ex. BPPN Debts

The debt to the ex BPPN is a debt arising from the debt restructuring (BDN Credit, Exim Bank and Tamara Bank) Ex. PT Dharma Niaga (Persero) as outlined in the Principal Agreement on Debt Restructuring No. 14/L/2002, No. 15/L/2002 and No. 16/L/2002 dated October 17, 2002, of Notary Lenny Janis Ishak, SH., whereby it was mutually agreed that the balance of the debt as of March 31, 2002 (date of transfer) was Rp436,546,439,765 and USD 16,282,653 at an exchange rate of USD 1 = Rp 9,264 or equivalent to Rp150,842,492,760 resulting in the total amount of debt of Rp587,388,932,525.

The amount of debt to the ex BPPN was restructured into 3 (three) tranches as follows:

1. *Tranche A: Cash Payment of Rp45,000,000,000*

The maximum loan period is 1 year from the signing of the agreement and the source of the repayment comes from the sale of non-productive assets of Ex. PT Dharma Niaga (Persero).

2. *Tranche B: Term Loan of Rp22,000,000,000*

The loan term is 9 years with a grace period of 1 year from the signing of the agreement, and the interest rate is the average interest rate of the 3-month time deposit rates of Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Mandiri, SCB and Citibank plus 3% (three percent).

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

Jumlah utang kepada Eks BPPN tersebut direstrukturisasi menjadi 3 (tiga) tranche sebagai berikut: (lanjutan)

3. Tranche C: Obligasi Straight Bond sebesar Rp520.388.932.525. Jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga yang berlaku adalah zero coupon dan yield to maturity menggunakan rate Sertifikat Bank Indonesia triwulanan atau sebesar 13,12%. Jumlah Sertifikat Obligasi yang akan diterbitkan adalah 1.040 lembar Sertifikat Obligasi Atas Nama dengan nilai nominal masing-masing Rp500.000.000 dan satu lembar sertifikat Obligasi Atas Nama dengan nominal Rp388.932.525.

Sejak perjanjian ditandatangani, Sertifikat Obligasi tersebut belum diterbitkan.

Eks PT Dharma Niaga (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pokok restrukturisasi utang tersebut diatas, sehingga kewajiban-kewajiban tersebut selanjutnya beralih kepada Entitas.

Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 9 Februari 2010 mengenai Penyelesaian Piutang Negara yang dihadiri oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Biro Hukum Departemen Keuangan, Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA)/eks BPPN dan Entitas, utang Eks BPPN yang dikelola oleh PPA telah diserahkan pengelolaannya kepada DJKN dengan berita acara serah terima No: BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009. Berdasarkan BAST tersebut jumlah utang Eks BPPN adalah sebagai berikut:

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Ex. BPPN Debts (continued)

The amount of debt to the ex BPPN was restructured into 3 (three) tranches as follows:: (continued)

3. *Tranche C: Straight Bond, amounting to Rp520,388,932,525. The tenor is 10 years, the applicable interest rate is zero coupon and the yield to maturity uses the quarterly Bank Indonesia Certificate rate or 13.12%. The total number of Bond Certificates to be issued was 1,040 Registered and Bearer Bonds with nominal value of Rp500,000,000 each and one Registered and Bearer Bond with a nominal value of Rp388,932,525.*

Since the agreement was signed, the Bond Certificates had not been issued.

Ex PT Dharma Niaga (Persero) was unable to fulfill the obligations in the principal debt restructuring agreement above, therefore these obligations were subsequently transferred to the Entity.

Based on the Minutes of Meeting dated February 9, 2010 regarding the Settlement of State Receivables attended by the Directorate of Investment Management Systems, the Director General of State Assets (DJKN), the Legal Bureau of the Ministry of Finance, the Ministry of BUMN, PT Asset Management Company (PPA) / ex BPPN and the Entity, the management of Ex BPPN debts by PPA has been handed over to the DJKN with an official handover report No: BAST-002/PPA/0209 dated February 27, 2009. Based on the BAST, the balance of Ex BPPN debts are as follows:

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

a. Utang Eks BPPN (lanjutan)

a. Ex. BPPN Debts (continued)

No	Pinjaman / Loan	Pokok / Principal	Bunga / Interest	Denda / Penalty	Total / Total
1	Tranche A	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000
2	Tranche B	22.000.000.000	4.981.928.648	-	26.981.928.648
3	Tranche C	520.388.932.525	93.415.047.591	1.221.727.259	615.025.707.374
Jumlah / Total		587.388.932.525	98.396.976.238	1.221.727.259	687.007.636.022

Pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dilakukan pencairan deposito jaminan (Eks Bank Tamara) sebesar USD5.470.458 atau setara dengan Rp77.346.808.913 dan digunakan sebagai pembayaran sebagian utang Eks BPPN.

On October 11, 2019, the guarantee deposit (Ex Bank Tamara) amounting to USD5,470,458 equivalent to Rp77,346,808,913 were withdrawn and used as a partial payment of Ex BPPN debts.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Kredit Eks BPPN pada PT PPI (Persero) No.BAR-01/2020/11/REKON/BPPN/KN.5.2/2020 tanggal 16 November 2020 antara Entitas dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, saldo utang Eks BPPN per tanggal cut off date 16 November 2020 adalah sebagai berikut:

Based on Reconciliation of Assets ex. BPPN at PT PPI (Persero) No. BAR-01/2020/11/REKON/BPPN/KN.5.2/2020 dated November 16, 2020, the ex BPPN debt balance as of the cut off date of November 16, 2020 was as follows:

Kewajiban Pokok	Rp587.388.932.525	Principal loan
Kewajiban Lainnya		Other loan
- Bunga	Rp21.050.167.324	Interest -
- Denda	Rp1.221.727.259	Penalty -
JUMLAH	Rp609.660.827.108	TOTAL

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-598/MK.06/2022 tanggal 21 Juli 2022, Kementerian Keuangan menyetujui novasi utang eks BPPN Entitas sebesar Rp609.660.827.108 menjadi utang PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku induk Holding Pangan.

Based on the letter of the Minister of Finance to the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-598/MK.06/2022 dated July 21, 2022, the Ministry of Finance agreed to the novation of ex. BPPN debt of the Entity amounting to Rp609,666,827,108 to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the parent company of ID Food.

Perjanjian novasi antara Pemerintah Republik Indonesia, PT RNI dan Entitas telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2023 dengan Nomor perjanjian PRJ-3/KN/2023.

The novation agreement between the Government of the Republic of Indonesia, PT RNI, and the Entity has been signed on March 31, 2023 with the agreement No.PRJ-3/KN/2023.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Bappenas

Utang Bappenas berasal dari pemanfaatan sebagian dana Non- Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 sebesar JPY.3.000.000.000 (tiga milyar Yen Jepang) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimpor kedelai yang disalurkan oleh distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 2005, Grup tidak melakukan angsuran lagi.

c. Utang Rekening Dana Investasi

i) Rekening Dana Investasi No.AMA-188/RDI- 371/DSMI/2017

Rekening Dana Investasi merupakan pinjaman dari Pemerintah Indonesia berupa fasilitas Kredit Modal Kerja untuk pembelian pupuk impor sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman antara eks PT Dharma Niaga (Persero) dengan Pemerintah Indonesia c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.RDI- 371/013/1999 tanggal 11 Agustus 1999. Jumlah pinjaman sebesar USD18.740.170 dengan jangka waktu sejak Agustus 1999 sampai dengan Desember 1999. Sejak bulan Februari 2002, Eks PT Dharma Niaga (Persero) tidak membayar baik angsuran pokok maupun tunggakan bunganya.

Pada tanggal 30 Januari 2015, Perjanjian Pinjaman No. RDI-371/DP3/1999 telah dipebaharui dengan perjanjian No. RDI-400/DSMI/2015 sehubungan dengan pengalihan seluruh kewajiban Eks PT Dharma Niaga kepada Entitas

Pada tanggal 10 November 2017, Perjanjian Pinjaman No. RDI-371/DP3/1999 telah diperbaharui lebih lanjut dengan perjanjian No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

b. Bappenas

Bappenas' debt originated from the utilization of part of the Non-Project Type Grand Assistance (NPTGA) 2001 fund of JPY.3,000,000,000 (three billion Japanese Yen) from the Government of Japan to the Government of Indonesia to import soybeans for distribution by distributors appointed by the Government of Indonesia.

Since 2005, the Group has not made any further installments.

c. Investment Fund Debt Account

i) Investment Fund Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017

The Investment Fund Account is a loan from the Government of Indonesia in the form of Working Capital Credit facility for the purchase of imported fertilizer in accordance with the Letter of Loan Agreement between ex PT Dharma Niaga (Persero) and the Government of Indonesia c.q. Director General of Financial Institutions No.RDI-371/013/1999 dated August 11, 1999. The loan amounted to USD18,740,170 with the period from August 1999 to December 1999. Since February 2002, Ex. PT Dharma Niaga (Persero) had ceased to pay both principal and interest in arrears.

On January 30, 2015, the Loan Agreement No. RDI- 371/DP3/1999 was amended through agreement No. RDI-400/DSMI/2015 in connection with the transfer of Ex. PT Dharma Niaga's debt to the Entity.

On November 10, 2017, the Loan Agreement No. RDI- 371/DP3/1999 was further amended by agreement No. AMA-188/RDI 371/DSMI/2017.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

i) Rekening Dana Investasi No.AMA-188/RDI- 371/DSMI/2017 (lanjutan)

i) Investment Fund Account No. AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 (continued)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-325/KP.1210/2022 pada tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/ Posisi Pinjaman Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp192.202.716.631 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-325/KP.1210/2022 dated April 7, 2022, The Government's Charge/Lending Position as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp192,202,716,631, respectively with details as follows:

	2022	2021	
Pinjaman Pokok	106.534.687.612	106.534.687.612	Principal Loan
Pinjaman Non-pokok	85.668.029.019	85.668.029.019	Non-principal Loan
Subjumlah	192.202.716.631	192.202.716.631	Subtotal

ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI/- 299/DSMI/2017

ii) Investment Fund Account No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017

Berdasarkan perjanjian pinjaman No.RDI-299/DP3/1996 tanggal 20 Mei 1996, Pemerintah RI memberikan pinjaman kepada Eks PT Cipta Niaga untuk pembiayaan pengoperasian Terminal Semen Terapung Tanjung Wangi.

Based on a loan agreement No. RDI-299/DP3/1996 on May 20, 1996, the Government of Indonesia provided loan to Ex. PT Cipta Niaga for financing the operation of the Tanjung Wangi Floating Cement Terminal.

Pada tanggal 30 Januari 2015, Perjanjian Pinjaman No. RDI-299/DP3/1996 telah dipebarui dengan perjanjian No. RDI-399/DSMI/2015 sehubungan dengan pengalihan seluruh kewajiban Eks PT Cipta Niaga kepada Entitas

On January 30, 2015, the Loan Agreement No. RDI- 299/DP3/1996 was amended through agreement No. RDI-399/DSMI/2015 in connection with the transfer of Ex. PT Cipta Niaga's debt to the Entity.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-699/MK.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017, telah dilakukan penjadwalan kembali pembayaran utang sebagai berikut:

Based on the letter from the Minister of Finance No. S-699/MK.05/2017 dated August 31, 2017 the debt repayment has been rescheduled as follows:

Pinjaman Pokok	25.531.700.000	Principal Loan
Pinjaman Non-pokok	42.752.831.050	Non-principal Loan
Jumlah	68.284.531.050	Total

a. Pembayaran selama 20 tahun menggunakan cara balloon payment dengan persentase angsuran per tahun:

a. Repayment in 20 years using balloon payment method with percentage of installment per year:

Tahun/Year	2017 – 2019	2020 – 2022	2023 – 2025	2026 – 2027	2028 – 2029	2030 – 2031	2032 – 2033	2034 – 2036
Angsuran	1%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	9%

b. Perubahan tingkat suku bunga menjadi 0%.

b. Change of interest rate to 0%

c. Perubahan mata uang pinjaman yang semula USD menjadi rupiah, berdasarkan kurs BI.

c. Conversion of USD debt into IDR Debt, based on BI exchange rate.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

ii) Rekening Dana Investasi No. AMA-187/RDI/- 299/DSMI/2017 (lanjutan)

ii) Investment Fund Account No. AMA-187/RDI/-299/DSMI/2017 (continued)

Pada tanggal 10 November 2017, Perjanjian Pinjaman No. RDI-299/DP3/1996371/DP3/1999 telah diperbaharui lebih lanjut dengan perjanjian No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017.

On November 10, 2017, the Loan Agreement No. RDI-299/DP3/1996 was further amended by agreement No. AMA-187/RDI-299/DSMI/2017.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-324/KP.1210/2022 tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/ Posisi Pinjaman Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp64.870.305.070 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-324/KP.1210/2022 dated April 7, 2022, the Government's Charge/Lending Position as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp64.870.305.070 respectively with details as follows:

	2022	2021	
Pinjaman Pokok	24.255.115.000	24.255.115.000	Principal Loan
Pinjaman Non Pokok	40.615.190.070	40.615.190.070	Non-principal Loan
Jumlah	64.870.305.070	64.870.305.070	Total

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

Berdasarkan perjanjian pinjaman No RDI.006/DDI/1986, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan memberikan pinjaman kepada Eks PT Pantja Niaga berupa kredit modal kerja khusus untuk membiayai pengadaan stock penyangga kertas koran dalam negeri.

Based on a loan agreement No.RDI.006/DDI/1986 the Government c.q. Minister of Finance provided loan to Ex PT Pantja Niaga in the form of special working capital loan to finance the procurement of domestic paper stock buffer.

Pada tanggal 30 Januari 2015, Perjanjian Pinjaman No.RDI.006/DDI/1986. telah diperbaharui dengan perjanjian No. No. RDI- 398/DSMI/2015 sehubungan dengan pengalihan seluruh kewajiban eks PT Pantja Niaga kepada Entitas.

On January 30, 2015, the Loan Agreement No. No.RDI.006/DDI/1986 was amended through agreemen No. RDI-398/DSMI/2015 in connection with the transfer of Ex. PT Pantja Niaga's debt to the Entity.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

27. LONG TERM PAYABLES(continued)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

iii) Rekening Dana Investasi No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (lanjutan)

iii) Investment Fund Account No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 (continued)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S- 699/MK.05/2017 tanggal 31 Agustus 2017, telah dilakukan penjadwalan kembali pembayaran utang sebagai berikut:

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S- 699/MK.05/2017 dated August 31, 2017, the debt repayment has been rescheduled as follows:

2017		
Pinjaman Pokok	6.601.562.500	Principal Loan
Pinjaman Non Pokok	10.927.834.763	Non-principal Loan
Jumlah	17.529.397.263	Total

Pembayaran selama 20 tahun menggunakan cara *balloon payment* dengan persentase angsuran per tahun:

Repayment in 20 years using *balloon payment method* with percentage of installment per year:

Tahun/Year	2017-2019	2020-2022	2023-2025	2026-2027	2028-2029	2030-2031	2032-2033	2034-2036
Angsuran	1%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	9%

Pada tanggal 10 November 2017, Perjanjian Pinjaman No. No.RDI.006/DDI/1986 telah diperbaharui lebih lanjut dengan perjanjian No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

On November 10, 2017, the Loan Agreement No RDI.006/DDI/1986 was further amended by agreement No. AMA-186/RDI-006/DSMI/2017

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No. BA-323/KP.1210/2022 tanggal 7 April 2022, Hak Tagih Pemerintah/Posisi Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.302.339.452 dengan rincian sebagai berikut:

Based on the reconciliation No. BA-323/KP.1210/2022 dated April 7, 2022, the Government's Charge/Lending Position as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp16,302,339,452 respectively with details as follows:

2022		2021	
Pinjaman Pokok	6.271.484.377	6.271.484.377	Principal Loan
Pinjaman Non Pokok	10.381.443.019	10.381.443.019	Non-principal Loan
Jumlah	16.652.927.396	16.652.927.396	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

27. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-559/MK.05/2022 tanggal 30 Juni 2022, Kementerian Keuangan menyetujui novasi utang RDI dan SLA anggota Holding Pangan menjadi utang PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku induk Holding Pangan.

Jumlah utang RDI Entitas sebesar Rp273.725.949.098 termasuk dalam jumlah utang anggota Holding Pangan yang akan dinovasi ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai dengan surat Menteri Keuangan di atas.

Perjanjian novasi antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas saat ini masih dalam proses.

28. UTANG SEWA

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp54.425.994 dan Rp1.274.143.419 merupakan utang sewa kendaraan jangka panjang.

27. LONG TERM PAYABLES (continued)

c. Investment Fund Debt Account (continued)

Based on the letter of the Minister of Finance to the President Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. S-559/MK.05/2022 dated June 30, 2022, the Ministry of Finance agreed to the novation of RDI and SLA debt of ID Food members to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the parent company of ID Food.

The total of the Entity's RDI debt amounting to Rp273,725,949,098 is included in the total debt of ID Food members to be novated to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as per the above the Minister of Finance letter.

The novation agreement between the Government of the Republic of Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), and the Entity is currently still in process.

28. LEASE PAYABLES

Balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting Rp54,425,994 and Rp1,274,143,419 respectively represent long term payables for vehicle lease.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

**29. POST EMPLOYMENT BENEFITS
OBLIGATIONS**

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Kewajiban pension	-	134.817.783	Pension obligations
Kewajiban pasca kerja lainnya	38.787.165.185	52.450.216.344	Other post employment benefit obligationsa
Kewajiban pensiun dini	-	28.405.634.428	Early retirement obligations
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	38.787.165.185	80.990.668.555	Total post employment benefit obligations

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja menurut
perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

Post-Employment Benefit Liabilities based on
actuary calculations are as follows:

(i) Kewajiban pension

(i) Pensions obligations

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan
ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of
financial position are determined as follows:

	2022	2021	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	-	10.416.062.907	Present value of the defined benefit obligationa
Nilai wajar aset program	-	(10.281.245.124)	Fair value of plan asset
Status pendanaan	-	134.817.783	Funding status
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	-	Unrecognized past service cost
Keuntungan/kerugian aktuarial	-	-	Unrecognized actuarial
Yang belum diakui	-	-	Gain / losses

**Liabilitas (aset) yang diakui di
Laporan posisi keuangan**

**Liability (aset) recognized in
The statement of financial
Position**

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi adalah
sebagai berikut:

The amounts recognized in the income
statement are as follows :

	2022	2021	
Biaya jasa kini	-	3.664.897.916	Current service cost
Biaya bunga	-	491.012.053	Interest cost
Hasil diharapkan dari	-	-	Expected return
Aset program	-	(562.762.891)	On plan assets
Kerugian aktuarial yang diakui	-	-	Net actuarial losses recognized in year
Amortisasi biaya jasa lalu	-	-	Amortization of past service cost
Jumlah beban Imbalan karyawan	-	3.593.147.078	Total of employee benefit cost
Dampak kurtailmen	-	1.790.173.196	Effect of curtailment
Rugi/ laba imbalan karyawan	-	5.383.320.274	Expense/ income to be Recognized for the period

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 29. POST EMPLOYMENT BENEFITS
(lanjutan) **OBLIGATIONS (continued)**

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

(i) Pensions obligations (continued)

Mutasi saldo liabilitas yang diakui dalam
laporan posisi keuangan:

*Movement in the liability recognized in the
statement of financial position:*

	2022	2021	
Liabilitas pada awal tahun	134.817.783	89.015.661	<i>Beginning balance liabilities</i>
Beban manfaat karyawan tahun berjalan	-	5.383.320.274	<i>Employee benefit cost for the year</i>
Pendapatan komprehensif lainnya aset program	-	(102.839.628)	<i>Other comprehensive income Expected return on plan assets</i>
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(134.817.783)	(5.234.678.524)	<i>Employee benefit paid for the year</i>
Liabilitas pada Akhir Tahun	-	134.817.783	<i>Liabilities Ending Balance</i>

Asumsi yang digunakan oleh Aktuaria tahun
2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Assumptions used by Actuary year 2022 and
2021 are as follows:*

	2022	2021	
Tingkat diskonto	-	5,20%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	-	6,00%	<i>Expectation increase rate</i>
Tingkat pengunduran diri	-	2,50%	<i>Resignation rate</i>
Usia pensiun normal	-	56 tahun	<i>Discount rate</i>

(ii) Kewajiban pasca kerja lainnya

(ii) Other post employment benefit obligations

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan
ditentukan sebagai berikut:

*The amounts recognized in the statement of
financial position are determined as follows:*

	2022	2021	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	61.848.745.352	76.657.272.181	<i>Present value of the defined benefit obligation</i>
Nilai wajar aset program	(23.833.445.234)	(25.175.049.716)	<i>Fair value of plan asset</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	38.015.300.118	51.482.222.465	<i>Liability recognized in the statement of financial position</i>
Entitas Anak	771.865.068	967.993.879	<i>Subsidiaries</i>
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	38.787.165.186	52.450.216.344	<i>Liability recognized in the statement of financial position</i>

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

29. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA **29. POST EMPLOYMENT BENEFITS**
(lanjutan) **OBLIGATIONS (continued)**

(ii) Kewajiban pasca kerja lainnya (lanjutan)

(ii) Other post employment benefit obligations (continued)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the income statement are as follows :

	2022	2021	
Biaya jasa kini	7.432.932.564	7.662.703.280	Current service cost
Biaya bunga	3.526.020.849	3.516.055.756	Interest cost
Biaya jasa lalu	(6.250.341.339)	(312.494.483)	Past service cost
Hasil diharapkan dari aset program	(1.862.953.679)	(608.064.036)	Expected return on plan assets
Kerugian aktuarial yang diakui	(2.086.359.610)	-	Net actuarial losses recognized in year
Dampak IFRIC	(8.472.456.479)	-	Impact of IFRIC
Amortisasi biaya jasa lalu	-	-	Amortization of past service cost
Jumlah rugi/ laba	(7.713.157.694)	10.258.200.517	Expense/income to be recognized
Dampak kurtailmen	-	3.542.774.772	Effect of curtailment
Rugi/ laba imbalan karyawan	(7.713.157.694)	13.800.975.289	Expense/ income to be recognized for the period

Mutasi saldo liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

Movement in the liability recognized in the statement of financial position:

	2022	2021	
Liabilitas pada awal tahun – Perusahaan	51.482.222.465	48.201.072.816	Liability at beginning of year – the Company
Beban manfaat karyawan tahun berjalan	(7.713.157.694)	13.800.975.289	Employee benefit cost for the year
Beban/ pendapatan komprehensif lainnya	10.808.461.651	26.325.548.542	Expenses/ Other comprehensive Income
Kontribusi perusahaan	(673.332.943)	(16.205.228.915)	Fair value of plan asset
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(15.888.893.361)	(20.640.145.267)	Employee benefit paid for the year
Entitas anak			Subsidiaries
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	771.865.068	967.993.879	Present value of the defined benefit obligation
Jumlah	38.787.165.186	52.450.216.344	Total

Asumsi yang digunakan oleh Aktuaria tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Assumptions used by Actuary year 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	5,52% - 7,44%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Expectation increase rate
Tingkat pengunduran diri	2,50%	2,50%	Resignation rate

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

Usia pensiun normal 55 tahun 55 tahun Discount rate

30. MODAL SAHAM

Modal dasar Entitas berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No. 3 tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp575.000.000.000 terbagi atas 575.000 lembar saham yang terdiri dari:

- 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.
- 574.999 saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 2 Desember 2021, melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:S-922/MBU/12/2021 tentang Persetujuan Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Desember 2021 oleh Aulia Taufani, S.H., Menteri BUMN selaku Pembina BUMN menyetujui untuk melakukan restrukturisasi BUMN melalui penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Modal dasar ditetapkan sebesar Rp 1.175.877.000.000 terbagi atas 1.175.877 saham yang terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, 1.175.876 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp1.175.876.000.000.

Dari modal dasar tersebut, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 942.745 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp942.745.000.000 terdiri dari:

30. SHARES CAPITAL

The Entity's authorized capital based on Notarial Deed Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No.3 dated June 19, 2003 amounting to Rp575,000,000,000 is divided into 575,000 consisting of:

- *1 A series Dwiwarna shares, with a nominal value of Rp1,000,000.*
- *574,999 B series shares, each with a nominal value of Rp1,000,000*

On December 2, 2021, through Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: S-922/MBU/12/2021 concerning the Approval of the Merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia which is notarized under Deed No.3 dated December 2, 2021 by Aulia Taufani, S.H., Ministry of Stated Own Enterprises agreed to restructure State Owned Enterprise through the merger of PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) into PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

The authorized capital is stipulated at Rp1,175,877,000,000 divided into 1,175,877 shares consisting of: 1 A series Dwiwarna share, with a nominal value of Rp1,000,000, 1,175,876 B series shares each with a nominal value of Rp1,000,000 or a total of Rp1,175,876,000,000.

Of the authorized capital, 942,745 shares have been subscribed and fully paid by the Republic of Indonesia with a total nominal value of Rp942,745,000,000 consisting of:

Pemegang saham/ Shareholder	Lembar saham/ Shares	Nilai perlembar saham/ Value per share	Nilai nominal/ Nominal value
Saham Seri A/ A Series Shares	1	1.000.000	1.000.000
Saham Seri B/ B Series Shares	942.744	1.000.000	942.744.000.000
	942.745		942.745.000.000

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

31. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2019 yang diaktakan dalam Akta No. 12 tanggal 15 Mei 2019 oleh Notaris Tris Nur Patrini Notaris di Bogor, laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 disisihkan sebagai cadangan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Cadangan umum Grup masing-masing sebesar Rp111.890.435.294.

32. CADANGAN KHUSUS

Utang dividen yang hingga sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan belum diselesaikan sebesar Rp1.531.912.169 dan oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 73 sehingga jumlah sebesar tersebut direklasifikasi ke cadangan khusus.

33. SALDO LABA - BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Saldo laba ditahan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.010.438.746.181 dan Rp1.962.307.061.200.

Grup melaksanakan kuasi reorganisasi pada 30 September 2012. Sesuai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, bahwa akuntansi kuasi reorganisasi (PSAK 51) dinyatakan tidak berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, yang diterapkan secara prospektif dengan ketentuan bahwa, saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi direklasifikasi secara langsung ke saldo laba.

31. GENERAL RESERVES

Based on the General Meeting of Shareholders on May 15, 2019, which was documented under deed No. 12 dated May 15, 2019 by Notary Tris Nur Patrini Notary in Bogor, the consolidated net income for the 2018 Fiscal Year was set a side as general reserves.

As of December 31, 2022 and 2021, the Group's general reserves amounting to Rp111,890,435,294 respectively.

32. SPECIFIC RESERVES

Debt of dividends up to the date of this report has not yet been finalized amounting to Rp1,531,912,169 and therefore in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company article 73 the said amount is reclassified to special reserves.

33. RETAINED EARNINGS - UNAPPROPRIATED

Retained earnings as of as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp2,010,438,746,181 and Rp1,962,307,061,200 respectively.

The Group conducted quasi reorganization on September 30, 2012. In accordance with Revocation of PSAK 51: Accounting for Quasi Reorganization, that quasi reorganization accounting (PSAK 51) is declared as ineffective effective since January 1, 2013, which is applied prospectively provided that the balance of asset and liabilities valuation in the quasi-reorganization is reclassified directly to retained earnings.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

34. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	% 2022	% 2021	Nilai tercatat / <i>Carrying amount</i>		Bagian laba (rugi) / <i>Share of profit (loss)</i>	
			2022	2021	2022	2021
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri	0,1	0,1	39.079.713	5.648.660	33.431.053	4.568.911
PT BLI Logistik Indonesia	0,04	0,04	-	-	-	-
Jumlah/ Total			39.079.713	5.648.660	33.431.053	4.568.911

35. PENDAPATAN USAHA

35. REVENUES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Perdagangan	1.676.306.287.415	1.307.600.632.450	<i>Trading</i>
Jasa Pergudangan	299.555.599.682	303.309.620.109	<i>Warehousing Services</i>
Jasa Logistik	335.464.920.451	265.825.538.241	<i>Logistic Seviles</i>
Jasa WIS	34.193.987.989	41.846.383.970	<i>Waste Integrated System</i>
Jasa Penyewaan Properti	21.998.582.408	20.242.720.043	<i>Rented Property</i>
Jumlah	2.367.519.377.945	1.938.824.894.813	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	2022	2021	
Impor	559.684.364.480	487.886.700.779	<i>Import</i>
Lokal	969.545.034.443	777.557.814.319	<i>Local</i>
Ekspor	8.878.415.920	6.401.694.588	<i>Export</i>
Warung pangan	41.938.938.390	6.811.991.641	<i>E commerces</i>
Lainnya	96.259.534.182	28.942.431.123	<i>Others</i>
Sub jumlah	1.676.306.287.415	1.307.600.632.450	Subtotal

b. Jasa Pergudangan

b. Warehousing Services

	2022	2021	
Gudang sendiri	111.297.594.972	112.692.372.587	<i>Entity's warehouse</i>
Gudang sewa	136.743.173.488	138.456.834.214	<i>Rented warehouse</i>
<i>Collateral management Services</i>	5.285.437.463	5.351.674.383	<i>Collateral management services</i>
Gudang manajemen	30.517.658.179	30.900.104.417	<i>Management warehouse</i>
Gudang terbuka	5.641.265.720	5.711.961.867	<i>Open storages warehouse</i>
<i>Record management center</i>	10.070.469.861	10.196.672.641	<i>Record management center</i>
Sub jumlah	299.555.599.682	303.309.620.109	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

35. REVENUES (continued)

c. Jasa Logistik

c. Logistic Services

	2022	2021	
Jasa kepabeanan dan angkutan	-	22.393.850.313	Customs and freight services
Jasa logistik darat	112.506.674.170	81.388.102.496	Land logistic services
Jasa logistik laut	63.934.513.420	42.034.023.209	Sea logistic services
Logistik terpadu	159.023.732.861	120.009.562.223	Integrated logistic
Subjumlah	335.464.920.451	265.825.538.241	Subtotal

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN

36. COST OF REVENUES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Perdagangan	1.461.386.679.992	1.166.784.623.373	Trading
Jasa Pergudangan	192.662.067.344	235.057.813.890	Warehousing Services
Jasa Logistik	285.630.565.693	231.834.653.127	Logistic Sevices
Jasa WIS dan jasa lainnya	30.161.957.145	38.698.320.776	Waste Integrated System
Jasa Penyewaan Properti	25.526.925	196.007.673	Building Rental
Jumlah	1.969.866.797.099	1.672.571.418.839	Total

a. Perdagangan

a. Trading

	2022	2021	
Impor	413.962.336.422	420.028.713.232	Import
Lokal	910.689.760.493	703.932.246.963	Local
Ekspor	8.540.816.678	6.175.478.160	Export
Warung pangan	36.495.561.644	7.736.087.118	E-commerce
Lainnya	91.698.204.755	28.912.097.900	Others
Subjumlah	1.461.386.679.992	1.166.784.623.373	Subtotal

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

36. COST OF REVENUES (continued)

b. Jasa Pergudangan

b. Warehouses services

	2022	2021	
Gudang sewa	76.872.611.883	144.888.211.194	Rented warehouses
Gudang sendiri	63.064.529.695	51.315.305.176	Entity's warehouses
Gudang manajemen	38.027.799.161	30.425.251.631	Management warehouses
Gudang terbuka	10.333.446.653	4.350.899.366	Open Storage warehouses
Collateral Management services	1.331.465.138	3.490.237.694	Collateral Management Services
Record Management Center	3.032.214.814	587.908.829	Record Management Center
Subjumlah	192.662.067.344	235.057.813.890	Subtotal

c. Jasa logistik

c. Logistic services

	2022	2021	
Logistik terpadu	130.290.106.816	109.326.204.441	Coordinated logistics
Logistik darat	98.048.247.916	74.867.392.412	Land logistics
Logistik laut	57.292.210.961	47.641.056.274	Sea logistics
Subjumlah	285.630.565.693	231.834.653.127	Subtotal

37. BEBAN PENJUALAN DAN DISTRIBUSI

37. DISTRIBUTION AND SELLING EXPENSES

Akun ini merupakan beban penjualan dan distribusi lokal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp15.716.466.664 dan Rp16.206.222.672.

This account represents local sales and distribution expenses for the years ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp15,716,466,664 and Rp16,206,222,672.

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

38. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Pegawai	148.979.066.049	167.930.274.147	Employee salaries
Perlengkapan dan utilitas	45.734.183.151	38.022.472.157	Equipment and utilities
Penyusutan	41.568.649.228	40.976.825.724	Depreciation
Manfaat karyawan	(10.424.349.850)	51.456.376.588	Employee benefits
Biaya professional	9.148.513.922	10.794.405.321	Professional fee
Transportasi	8.211.371.769	6.596.052.577	Transportation
Perjalanan dinas	9.928.461.593	5.428.078.261	Travel expense
Amortisasi	8.405.486.438	6.838.171.057	Amortization
Umum dan administrasi lainnya	39.316.192.167	50.850.732.724	General and other administration
Jumlah	300.867.574.467	378.893.388.556	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

39. PENDAPATAN/(BEBAN) NON USAHA

39. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)

Akun ini terdiri dari :

The account consist of:

	2022	2021	
Pendapatan Non Usaha:			Non Operating Income:
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 16)	15.369.024.153	3.322.460.000	Investment property fair value increase (Note 16)
Pendapatan bunga	1.092.522.867	2.915.367.723	Interest income
Pemulihan piutang ragu-ragu	10.407.465.678	2.474.875.009	Recovery bad debt exp
Dampak perubahan estimasi nilai residu aset tetap (Catatan 3j)	24.210.450.327	-	Effect of changes on residual value estimation of fixed assets (Note 3j)
Lainnya	9.432.849.406	31.427.960	Others
Sub Jumlah	60.512.312.431	8.744.130.692	Subtotal
Beban Non Usaha:			Non Operating Expenses:
Biaya penyisihan piutang dan piutang lain	(29.473.201.421)	(30.736.096.827)	Allowance for receivables and other receivables
Beban penurunan nilai aset non keuangan	(6.168.804.141)	(10.450.000.000)	Impairment of Non financial assets
Beban bunga dan provisi bank	(22.372.093.001)	(9.361.959.801)	Interest expenses and bank provision
Lainnya	(7.704.071.501)	(7.290.685.961)	Others
Sub Jumlah	(65.718.170.064)	(57.838.742.589)	Subtotal
Jumlah	(5.205.857.633)	(49.094.611.897)	Total

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Grup mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

In its business activities, the Group entered into transactions with related parties. The Group's policy stipulates that the pricing of these transactions is the same as for transactions made with third parties. The following are significant agreements/transactions with related parties:

a. Hubungan sebagai Pemegang Saham

a. Relationship as Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia

Government of the Republic of Indonesia

Perusahaan mempunyai liabilitas dana pinjaman rekening dana investasi kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan liabilitas kepada pada eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Group has an obligation to settle the investment fund account to the Directorate of Investment Management System of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and liabilities to the former Indonesian Bank Restructuring Agency to the Directorate General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

**b. Hubungan Kepemilikan dan atau
Kepengurusan**

Transaksi dengan seluruh BUMN dan lainnya yang mempunyai hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi, yaitu:

- i. Transaksi bisnis dengan Perusahaan milik negara yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.
- ii. Grup mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Jumlah penempatan Grup pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka masing-masing berjumlah Rp173.231.035.275 dan Rp170.878.043.476 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing mencerminkan 3,78% dan 3,87% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

**b. Relationship of Ownership and/or
Management**

Transactions with all BUMN and others with ownership and or management relationships are treated as transactions with related parties, namely:

- i. *Business transactions with a State-owned Entities are treated the same way as a transaction with a third party.*
- ii. *The Group has current accounts and time deposits with several state-owned banks. The Group's placements with state-owned banks in the form of current accounts and time deposits amounting to Rp173.231.035.275 and Rp170.878.043.476 as of December 31, 2022 and 2021, respectively representing 3.78% and 3.87% of total assets as of December 31, 2022 and 2021.*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

c. Hubungan Manajemen Kunci Perusahaan

c. Key Corporate Management Relationships

Manajemen kunci mencakup komisaris dan direksi. Kompensasi yang diberikan pada manajemen kunci dalam hubungan dengan pemberian jasa sebagai berikut:

Key management includes commissioners and directors. The compensation given to key management in relation to the provision of services are as follows:

	2022	2021	
Dewan Komisaris:			Board of Commissioner:
Gaji dan imbalan jangka pendek	4.344.210.000	3.821.896.568	Salaries and rewards short-term
Direksi:			Directors:
Gaji dan imbalan jangka pendek	6.430.586.948	7.260.438.609	Salaries and rewards short-term
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	1.718.707.500	Termination benefits employment contract

d. Ikhtisar

d. Overview

	2022	2021	
Penjualan			Sales
Pupuk dan Pestisida			Fertilizer and Pesticides
Badan Usaha Milik Desa	3.472.741.956	5.094.647.265	Village-Owned Enterprise
Dinas pertanian dan Peternakan	8.143.717.553	2.669.587.271	Department of Agriculture and Livestock
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	-	2.250.907.636	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
PT Dahana	1.987.627.750	1.317.854.548	PT Dahana
PT Petrosida Gresik	98.000.000	1.640.920.001	PT Petrosida Gresik
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	149.000.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	-	15.340.909	Research and Assessment of Agricultural Technology
PT Pertani (Persero)	-	-	PT Pertani (Persero)
Jumlah	13.702.087.259	13.138.257.630	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2022	2021	
Penjualan (lanjutan)			Sales (continued)
Bahan Kimia Berbahaya			Hazardous Chemicals
PT Pertani (Persero)		-	PT Pertani (Persero)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	89.832.012	60.381.819	Regional Water Company
Jumlah	89.832.012	60.381.819	Total
Produk Farmasi			Pharmaceutical Products
RSUD Cideres	577.462.270	26.875.813.842	RSUD Cideres
Dinas Kesehatan	2.086.475.889	3.351.615.809	Department of Health
PT Kimia Farma Tbk	128.213.608	248.006.451	PT Kimia Farma Tbk
PT Rajawali Nusindo Indonesia	2.823.977	716.768.114	PT Rajawali Nusindo Indonesia
PT Pertamina (Persero)	388.669.021	164.451.683	PT Pertamina (Persero)
Dinas pertanian dan Peternakan	-	58.209.091	Department of Agriculture and Livestock
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	-	61.818.100	The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia
Jumlah	3.183.644.765	31.476.683.090	Total
Produk Konsumsi			Consumer Products
Kementerian Sosial Republik Indonesia	-	646.956.400	Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	266.995.545	Department of Food Crops and Horticulture
Dinas Sosial	-	218.911.556	Social service
Dinas Pangan	304.783.220	194.640.000	Food service
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	329.057.500	34.950.227	Department of Industry and Commerce
Perum Bulog	572.220.000	11.454.545	Perum Bulog
Kepolisian Resor (POLRES)	-	3.518.181	Police Department
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.954.547	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Reksa Multi Usaha	22.530.500	-	PT Reksa Multi Usaha
Jumlah	1.228.591.220	1.379.381.001	Total
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik			Rent, Warehousing and Logistics Products
PT Petrokimia Gresik	157.301.030.294	178.667.945.182	PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	64.879.679.379	74.731.905.367	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	35.944.271.628	32.843.001.160	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19.108.108	25.939.826.588	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda	25.043.873.641	20.156.980.995	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Rajawali Nusindo	1.523.758.834	17.079.583.082	PT Rajawali Nusindo
PT Pembangunan Jawa Bali	-	14.032.510.500	PT Pembangunan Jawa Bali
PT Wijaya Karya Beton	1.705.194.451	10.229.040.892	PT Wijaya Karya Beton
PT Timah, Tbk	-	7.557.828.052	PT Timah, Tbk
Saldo dipindahkan	286.416.916.335	381.238.621.818	Balance carried

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI **40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**
(lanjutan) (continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2022	2021	
Penjualan (lanjutan)			Sales (continued)
Produk Penyewaan, Pergudangan dan Logistik (lanjutan)			Rent, Warehousing and Logistics Products (continued)
Saldo pindahan	286.416.916.335	381.238.621.818	Balance brought forward
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	7.487.240.462	National Agency for Disaster Countermeasure
PT Pupuk Kujang	11.429.092.022	5.422.101.336	PT Pupuk Kujang
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	-	PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
PT Perkebunan Nusantara VIII	5.437.287.928	5.286.250.916	PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Semen Padang	174.689.840	4.074.321.080	PT Semen Padang
Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	3.933.795.580	3.884.950.278	Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Len Industri (Persero)	-	3.646.195.504	PT Len Industri (Persero)
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi	1.085.471.662	3.788.434.516	PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
Kementerian Sosial	-	-	The Ministry of Social
PT Perum Pembangunan Nasional	-	-	PT Perum Pembangunan Nasional
Yayasan Bumh Untuk Indonesia	1.593.091.500	-	Yayasan Bumh Untuk Indonesia
PT Pembangunan Perumahan Presisi	79.500.000	-	PT Pembangunan Perumahan Presisi
PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia	-	-	PT Ppen Rajawali Nusantara Indonesia
Lainnya	50.967.337.095	7.862.291.384	Others
Jumlah	361.117.181.962	422.690.407.294	Total
Jumlah Penjualan Pihak Berelasi (a)	379.321.337.216	468.745.708.114	Related Parties Sales Total (a)
Penjualan (b)	2.367.519.377.945	1.938.824.894.814	Sales (b)
Presentase (a): (b)	16,02%	24,18%	Percentage (a): (b)
Pembelian			Purchase
Pupuk dan Pestisida			Fertilizer and Pesticides
PT Petro Kimia Gresik	190.369.663.092	252.108.336.626	PT Petro Kimia Gresik
PT Pupuk Kalimantan Timur	110.060.366.558	120.317.046.563	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	60.251.213.434	44.114.823.328	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Indonesia Pangan	-	22.937.302.831	PT Pupuk Indonesia Pangan
PT Petrosida Gresik	6.309.142.676	7.461.907.403	PT Petrosida Gresik
PT Pupuk Kujang	40.650.663.530	10.589.042.510	PT Pupuk Kujang
PT Pupuk Iskandar Muda	15.567.722.960	16.185.014.671	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Mega Eltra	1.241.216.216	3.198.549.474	PT Mega Eltra
PT Pertani	248.544.600	1.485.227.273	PT Pertani
Jumlah	424.698.533.066	478.397.250.679	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

d. Ikhtisar (lanjutan)

d. Overview (continued)

	2022	2021	
Produk Pertanian			Agriculture Products
PT Pertani	-	11.997.500	PT Pertani
Jumlah	-	11.997.500	Total
Produk Konsumer			Consumer Products
Perum Bulog	403.025.115	108.450.120	Perum Bulog
PT Rajawali Nusindo	6.823.716.903	35.886.908	PT Rajawali Nusindo
PT Garam	59.082.000	2.350.920	PT Garam
PT Pertani	649.079.054	33.630.000	PT Pertani
Jumlah	7.498.903.072	180.317.948	Total
Farmasi			Pharmacy
PT Biofarma (Persero)	1.450.824.132	86.011.317	PT Biofarma (Persero)
PT Indofarma Global Medica	11.902.942	737.129.416	PT Indofarma Global Medica
PT Kimia Farma		681.406.838	PT Kimia Farma
PT Kimia Farma Trading & Distribution	1.664.426.766	1.271.710.710	PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Pyridam Farma	-	614.315.253	PT Pyridam Farma
Jumlah	3.127.153.840	3.390.573.534	Total
Produk Bahan Bangunan			Building Material Products
PT Semen Padang	8.924.804.037	8.175.749.820	PT Semen Padang
Jumlah	8.924.804.037	8.175.749.820	Total
Stasiun Pompa Bensin umum			General Petrol Pump Station
PT Pertamina (Persero)	21.933.705.256	18.583.250.116	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	21.933.705.256	18.583.250.116	Total
Jumlah Pembelian Pihak Berelasi (a)	496.122.671.518	508.739.139.597	Total Purchases Related Parties (a)
Pembelian (b)	1.445.239.367.971	811.045.788.186	Purchases (b)
Presentase (a): (b)	34,33%	62,73%	Percentage (a): (b)

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

Saldo aset dan liabilitas per 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021 dengan pihak berelasi
sebagai berikut:

The balances of assets and liabilities as of
December 31, 2022 and 31 Desember 2021 with
related parties are:

	2022	2021	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	173.231.035.275	173.058.934.548	Cash and cash equivalents
Deposito dijaminkan	3.000.000.000	21.828.113.040	Guaranteed deposit
Piutang usaha	155.699.137.591	341.339.677.431	Trade receivables
Investasi pada Entitas Asosiasi	8.372.650.462	10.422.281.574	Investments in Associates
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	287.000.000	Other non current financial Asset
Jumlah	340.302.823.328	546.936.006.593	Total
	2022	2021	
Liabilitas jangka pendek			Short-term liabilities
Utang usaha	52.119.587.840	209.946.581.814	Trade payables
Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	24.061.349.309	26.136.879.641	Current portion of long term liabilities
Liabilitas jangka Panjang	913.847.714.953	925.217.534.310	Long-term liabilities
Jumlah	990.028.652.102	1.161.300.995.765	Total

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

41. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

41. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating between segments of the Group are set out in the tables below:

2022						
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/ Warehouse	Logistik/ Logistics	Penyewaan property/ Building rental services	WIS/ WIS	Jumlah/ Total
Hasil Segmen/ Segment Result						
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	1.676.306.287.415	299.555.599.682	335.464.920.451	21.998.582.408	34.193.987.989	2.367.519.377.945
Beban Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	1.461.386.679.992	192.662.067.344	285.630.565.693	25.526.925	30.161.957.145	1.969.866.797.099
Laba Kotor/ Gross Profit	214.919.607.423	106.893.532.338	49.834.354.758	21.973.055.483	4.032.030.844	397.652.580.846
Beban Usaha / Operating Expenses						
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	8.494.291.269	4.224.764.829	1.969.608.681	868.443.487	159.358.398	15.716.466.664
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	162.610.137.857	80.876.622.836	37.705.127.952	16.625.014.460	3.050.671.361	300.867.574.466
Jumlah Beban Usaha/ Total Operating Expense	171.104.429.126	85.101.387.665	39.674.736.633	17.493.457.947	3.210.029.759	316.584.041.130
Laba Usaha/ Operating Profit	43.815.178.297	21.792.144.673	10.159.618.125	4.479.597.536	822.001.085	81.068.539.716
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	(2.813.614.026)	(1.399.393.687)	(652.405.061)	(287.659.641)	(52.785.219)	(5.205.857.634)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	41.001.564.271	20.392.750.986	9.507.213.064	4.191.937.895	769.215.866	75.862.682.082
2021						
	Perdagangan/Trading	Pergudangan/ Warehouse	Logistik/ Logistics	Penyewaan property/ Building rental services	WIS / WIS	Jumlah/ Total
Hasil Segmen/ Segment Result						
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	1.307.600.632.450	303.309.620.109	265.825.538.241	20.242.720.043	41.846.383.970	1.938.824.894.813
Beban Pokok Penjualan/ Cost of Goods Sold	1.166.784.623.373	235.057.813.890	231.834.653.127	196.007.673	38.698.320.776	1.672.571.418.839
Laba Kotor/ Gross Profit	140.816.009.077	68.251.806.219	33.990.885.114	20.046.712.370	3.148.063.194	266.253.475.974
Beban Usaha / Operating Expenses						
Beban Penjualan & distribusi/ Sales & distribution expenses	9.886.313.870	2.882.758.443	1.896.759.450	1.407.425.845	132.965.064	16.206.222.672
Biaya Administrasi dan Umum/ General and Administrative Expense	141.347.574.228	154.209.872.715	75.646.381.338	576.745.958	7.112.814.317	378.893.388.556
Jumlah Beban Usaha/ Total Operating Expense	151.233.888.098	157.092.631.158	77.543.140.788	1.984.171.803	7.245.779.381	395.099.611.228
Laba Usaha/ Operating Profit	(10.417.879.021)	(88.840.824.939)	(43.552.255.674)	18.062.540.567	(4.097.716.187)	(128.846.135.254)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	(25.965.134.499)	(12.584.984.761)	(6.267.596.344)	(3.696.423.343)	(580.472.950)	(49.094.611.897)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	(36.383.013.520)	(101.425.809.700)	(49.819.852.018)	14.366.117.224	(4.678.189.137)	(177.940.747.151)

42. PENYESUAIAN INVESTASI ANAK

Pada tanggal 13 Oktober 2021, Entitas mengakuisisi 40 % kepemilikan saham PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yang ada di PT Trisari Veem. Jumlah tercatat dari kepentingan non pengendali PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk pada tanggal akuisisi adalah sebesar Rp5.320.510.818. Imbalan yang dibayarkan atas akuisisi saham adalah sebesar Rp1.000.000.000.

42. CHANGES OF INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

On October 13, 2021, the Entity acquired 40% ownership of PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk in PT Trisari Veem. The carrying amount of the non-controlling interest of PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk on the acquisition date is Rp5,320,510,818. The amount paid for the acquisition of shares is Rp1,000,000,000.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan Manajemen Risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta dalam memantau dan mengandalkan penerapan penanganan risiko. Tujuan Manajemen Risiko adalah untuk meningkatkan jaminan pencapaian target Grup.

Secara ringkas, risiko yang dihadapi Grup dan langkah-langkah mitigasinya sebagai berikut:

a) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai ketidak mampuan Grup untuk memenuhi liabilitas keuangannya yang selanjutnya mengakibatkan Grup tidak dapat memanfaatkan peluang investasi atau tidak memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya mengakibatkan default.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risk Management Policy is a structured and systematic guide in identifying, measuring, mapping and developing risk management alternatives, as well as in monitoring and relying on the application of risk management. The purpose of Risk Management is to increase assurance of achieving the Grup's target.

In summary, the risks faced by the Grup and its mitigation measures are:

a) Liquidity Risk

Liquidity Risk is defined as the Grup's inability to meet its financial liabilities which subsequently resulted in the Grup not being able to take advantage of investment opportunities or not fulfill short-term financial liabilities that ultimately result in default.

In managing liquidity risk, the Grup monitors and maintains the level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Grup's operations and to overcome the impact of fluctuations in cash flows.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity Grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.

	2022		2021	
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>Over 1 year</i>
Utang Bank Jangka Pendek/ <i>Short Term Bank Loan</i>	173.802.032.540	-	143.366.049.385	-
Utang usaha/ <i>Trade payables</i>	357.310.738.853	-	209.946.581.814	-
Biaya yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expense</i>	69.005.300.485	-	59.444.566.924	-
Liabilitas jangka pendek lainnya/ <i>Other current financial liabilities</i>	38.597.913.804	-	57.877.800.922	-
Utang jangka panjang/ <i>Long-term payable</i>	24.061.349.309	913.847.714.953	26.136.879.641	925.217.534.310
Utang sewa pembiayaan/ <i>Lease payables</i>	664.204.976	54.425.995	65.287.499	1.274.143.419
Jumlah/Total	663.441.539.967	913.902.140.948	496.837.166.185	926.491.677.729

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) **43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

b) Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi Grup adalah risiko ketidakmampuan dari pihak-pihak yang berutang (debitur) untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada penilaian Grup, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk dan jasa kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai pembayaran atas gagal bayar tersebut.

b) Credit Risk

The credit risk faced by the Grup is the risk of the inability of debtors to comply their obligations in accordance with mutually agreed terms.

Based on the Group's valuation, a special allowance may be made if the receivables are considered uncollectible. To mitigate credit risk, the Group will terminate the distribution of all products and services to the customer in the event of a delay and/or default and will use the advance/customer guarantee as payment for the default.

	2022		2021	
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / Over 1 year
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>	181.417.662.371	-	173.058.934.548	-
Deposito dijamin/ <i>Guarantee Deposit</i>	3.000.000.000	-	21.828.113.040	-
Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>				
Pihak ketiga/ <i>Third party</i>	568.163.178.553	-	451.748.588.447	-
Pihak berelasi/ <i>Related Parties</i>	244.368.877.599	-	271.162.268.716	-
Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	60.966.897.707	-	62.737.954.385	-
Aset keuangan tidak lancar lainnya/ <i>Other non current financial asset</i>	-	-	-	287.000.000
Jumlah/Total	1.057.916.616.230	-	980.535.859.136	287.000.000

Grup memiliki jenis aset keuangan berikut yang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian:

- Piutang usaha
- Piutang lain lain
- Deposito dijamin

Sementara kas dan setara kas sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71. Kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

Grup menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha dan aset kontrak.

The Grup has following types of financial assets that are subject to the expected credit loss model:

- *Trade receivables*
- *Other receivables*
- *Guarantee deposit*

While cash and cash equivalents are also subject to impairment requirements of PSAK 71. The identified impairment loss was immaterial.

The Grup applies the PSAK 71 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables and contract assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

43. INFORMASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)	43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
---	--

c) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Grup harus menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing secara pelaporan terutama berasal dari transaksi impor komoditi dalam mata uang asing, ketidakseimbangan dalam hal waktu pembelian dan penjualan akan mempengaruhi harga jual.

Kebijakan berkaitan dengan risiko nilai tukar yang saat ini dijalankan adalah secara natural (tanpa lindung nilai) yaitu:

- Grup melakukan pembelian komoditi impor dalam mata uang asing, dimana saat transaksi penjualan komoditi tersebut dilakukan, penetapan harga selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup.
- Grup mengatur risiko dengan berusaha menyelaraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap jenis mata uang.

d) Risiko Komoditas

Dampak risiko komoditas yang dihadapi Grup terutama sehubungan dengan pembelian atau pengadaan barang dagangan yang berkelanjutan, ketersediaan komoditas secara langsung dipengaruhi oleh tingkat produksi, tingkat permintaan dan penawaran pasar serta angkutan barang. Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko tersebut dengan menjaga tingkat persediaan secara optimal untuk meyakinkan penjualan dan distribusi yang berkelanjutan kepada para pelanggan.

c) Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is defined as a decrease in asset/income or increase in value of liabilities/expenses caused by fluctuations in foreign currency exchange rates. Group should face foreign exchange risk exposure by reporting mainly from the transactions on imports of commodities in foreign currency, an imbalance in terms of time of purchase and sale will affect the selling price.

Policies relating to exchange rate risk currently being executed are natural (without hedging), namely:

- *The Group purchases imported commodities in foreign currency, whereby when the sale of the commodity is executed, the pricing shall always take into account the rates favorable to the Group.*
- *The Group manage risk by trying to harmonize receipts and payments for each type of currency.*

d) Commodity Risk

The impact of commodity risks faced by the Group is primarily related to the purchase or procurement of sustainable merchandise, the availability of commodities directly affected by the level of production, the level of demand and supply of the market and the transportation of goods. The Group policy to minimize such risks by maintaining optimal inventory levels to ensure sustainable sales and distribution to customers.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

44. KUASI REORGANISASI

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan oleh melemahnya secara drastis nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa faktor makro ekonomi lainnya seperti meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta turunnya tingkat kepercayaan investor memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada waktu itu. Akumulasi saldo rugi per tanggal 30 September 2012 (sebelum kuasi reorganisasi) sebesar Rp581.917.351.573. Meskipun saldo defisit Grup masih berjumlah signifikan, Grup telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp127.485.626.056 sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Direksi berkeyakinan bahwa Grup memiliki prospek usaha yang baik di masa depan dan mempunyai potensi pendapatan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya sebagaimana tercakup dalam rencana usaha jangka panjang Grup. Sehubungan dengan itu, Grup melakukan kuasi-reorganisasi untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 51 (revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi- Reorganisasi ("PSAK 51") dengan menggunakan neraca tanggal 30 September 2012.

Langkah kuasi-reorganisasi tersebut di atas merupakan awal dari serangkaian langkah yang akan ditempuh Grup dalam mengupayakan kesinambungan usaha maupun pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Grup berkeyakinan bahwa kuasi reorganisasi akan memberikan dampak positif dan prospek yang baik terhadap Grup di masa mendatang, antara lain:

- Memulai awal baru dengan neraca yang menunjukkan posisi keuangan dan struktur modal yang lebih baik tanpa dibebani defisit masa lampau;
- Meningkatkan kemampuan dalam perolehan pendanaan dalam rangka pengembangan usaha;

44. QUASI REORGANIZATION

The economic crisis that occurred in mid 1997 caused by the drastic weakening of the Rupiah value against foreign currencies and other macroeconomic factors such as rising lending rates, tight liquidity, and lower investor confidence had a negative impact on the Indonesian economy at the time that. Position of Accumulated losses as of September 30, 2012 (before quasi-reorganization) amounted Rp581,917,351,573. Although the Group deficit balance is still significant, the Group had recorded a net profit of Rp127,485,626,056 from 2006 to 2011. The Board of Directors believed that the Group has good business prospects in the future and has potential revenues to be earned in the future comes with its strengths and resources as covered by the Group's long-term business plan. Accordingly, the Group conducted quasi-reorganization to restructure its equity by eliminating deficits and reassessing all of its assets and liabilities, in accordance with PSAK 51 (revised 2003) on Quasi-Reorganization Accounting ("PSAK 51") using the balance sheet dated 30 September 2012.

The above-mentioned quasi-reorganization step is the beginning of a series of steps that the Group would take in pursuing business continuity as well as sustainable long-term growth. The Group believed that quasi-reorganization would have a positive impact and good prospects for the the Group in the future, including:

- *Starting with a balance sheet showing better financial position and capital structure without being burdened with past deficits;*
- *Improving the ability to obtain funding in the framework of business development;*

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

44. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

Kuasi-reorganisasi yang telah dilaksanakan Grup menghasilkan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset sebesar Rp1.853.363.433.290 yang terdiri dari aset tetap sebesar Rp1.443.622.410.205 dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sebesar Rp409.741.023.083.

Dengan kuasi-reorganisasi tersebut, Grup mengeliminasi saldo akumulasi kerugian per tanggal 30 September 2012 sebesar Rp581.917.351.573, untuk komponen ekuitas sebagai berikut:

Akumulasi kerugian Rp581.917.351.573 Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset Rp1.853.363.433.290 Cadangan umum Rp19.296.469.106.

Penentuan dari nilai wajar aset Grup didasarkan pada penilaian pada tanggal 30 September 2012 yang dilakukan oleh penilai independen dalam laporan KJPP Husni, Joediono dan Rekan No.238-HJR/PPILR/IV/2013 dan No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No.295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No.268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No.030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No.M.P.P.13.11.0135 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk aset tanah dan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk aset bukan tanah.

44. QUASI REORGANIZATION (continued)

The quasi-reorganization of the Group resulted in an increase in the revaluation of the fair value of assets amounting to Rp1,853,363,433,290 consisting of fixed assets amounting to Rp1,443,622,410,205 and noncurrent assets which will be abandoned amounting to Rp409,741,023,083.

With the quasi-reorganization, the Group eliminated the accumulated losses as of September 30, 2012 amounting to Rp581,917,351,573, for the following equity components:

Accumulated losses Rp581,917,351,573 Increase in revaluation of asset fair value Rp1,853,363,433,290 General reserves Rp19,296,469,106.

The determination of the fair value of the Group assets is based on the valuation as of 30 September 2012 conducted by an independent appraiser in KJPP Husni, Joediono and Associates under its reports No.238-HJR/PPILR/IV/2013 and No.007-HJR/PP-LR/IV/2013, KJPP Gunawan No.295/KBP/PPFIV/2013, KJPP Latief Hanif No.268.LAP.KJPP.LHR.13, KJPP Kampianus Roman No.030/KJPP-KR/LL/PL-KL/BgrN/2013, KJPP Toto Suharto No.MPP13.11.0135 using a market data comparison approach to land assets and the method of replacement cost depreciates for non-land assets.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

44. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

44. QUASI REORGANIZATION (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup sebelum dan setelah kuasi reorganisasi per tanggal 30 September 2012 sebagai berikut:

The consolidated financial position of the Grup before and after quasi-reorganization as of September 30, 2012 are as follows:

	Sebelum Kuasi / <i>Before the Quasi</i>	Penyesuaian / <i>Adjustment</i>	Setelah Kuasi / <i>After the Quasi</i>	
Aset lancar	849.677.694.787	-	849.677.694.787	Current assets
Aset tidak lancar	408.462.437.325	1.853.363.433.290	2.261.825.870.615	Non-current assets
Total aset	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total assets
Liabilitas lancar	1.089.094.456.779	-	1.089.094.456.779	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	574.642.483.059	-	574.642.483.059	Non-current liabilities
Modal saham	156.200.000.000	-	156.200.000.000	Capital stock
Penyertaan modal pemerintah	86.248.756	-	86.248.756	Government equity participation
Cadangan umum	19.269.469.106	(19.269.469.106)	-	General reserves
Selisih penilaian aset dan liabilitas	-	1.290.715.550.823	1.290.715.550.823	Difference in valuation of assets and liabilities
Saldo laba (rugi)	(581.917.351.573)	581.917.351.573	-	Retained earnings (loss)
Kepentingan nonpengendali	764.825.985	-	764.825.985	Non-controlling interests
Total liabilitas & ekuitas	1.258.140.132.112	1.853.363.433.290	3.111.503.565.402	Total liabilities & equity

Berdasarkan PPSAK 10 mengenai Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi, Grup telah mereklasifikasi saldo selisih penilaian aset dan liabilitas dalam rangka kuasi reorganisasi ke saldo laba.

Based on PPSAK 10 regarding Revocation of PSAK 51: Quasi-Reorganization Accounting, the Grup has reclassified the balance of the difference in valuation of assets and liabilities in the course of quasi reorganization to retained earnings.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

45. KONTINJENSI (lanjutan)

45. CONTINGENCY (continued)

a) Gugatan perdata PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak atas pekerjaan pembangunan *cold storage* dengan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera telah menggugat perdata (PT BGR Logistik Indonesia), Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Jakarta Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan gugatan nilai kerugian sebesar Rp11.868.720.000 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah). PT BGR Logistik Indonesia mengajukan gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) senilai Rp9.798.546.000 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dan empat puluh enam ribu Rupiah). Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 546/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 8 Oktober 2018 gugatan PT Wisanggeni Mitra Sejahtera tersebut ditolak.

Pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 19 Oktober 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses hukum tersebut di atas belum diketahui.

a) Civil lawsuit of PT Wisanggeni Mitra Sejahtera

Currently, the Group is facing a lawsuit on the contract regarding cold storage construction work with PT Wisanggeni Mitra Sejahtera. PT Wisanggeni Mitra Sejahtera have filled a civil lawsuit against (PT BGR Logistik Indonesia), Government of Republic of Indonesia Cq Mayor of North Jakarta, Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) with total compensation amounting to Rp11,868,720,000 (eleven billion eight hundred sixty-eight million seven hundred and twenty thousand Rupiah). PT BGR Logistik Indonesia filled a lawsuit for Reconvention (Counterclaim) amounting to Rp9,798,546,000 (Nine billion seven hundred ninety-eight million five hundred and forty-six thousand Rupiah). Based on decision of the District Court of West Jakarta No 546/Pdt.G/2017/ PN.JKT.BRT dated October 8, 2018 the lawsuit PT Wisageni Mitra Sejahtera was rejected.

On October 15, 2018, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal on the court decision. Based on decision of the High Court DKI Jakarta No. 336/Pdt/2020/PTDKI uphealed the decision of the District Court of West Jakarta. On October 19, 2020, PT Wisanggeni Mitra Sejahtera has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Up to the date of this report, the result of this legal processes is not known yet.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

45. KONTINJENSI (lanjutan)

b) Gugatan perdata Agrocorp International Pte Ltd

Grup saat ini sedang menghadapi permasalahan kontrak tripartit atas pekerjaan *Collateral Management Services* dengan para pihak yaitu: Agrocorp International Pte Ltd dan LH Asia. PT Coffindo dan Entitas.

Agrocorp International Pte Ltd telah menggugat perdata PT Coffindo dan Entitas di *Singapore International Arbitration Center* (SIAC). SIAC telah memutuskan bahwa PT Coffindo harus membayar ganti rugi sebesar USD 4.566.697 kepada Agrocorp International Pte Ltd. Jika PT Coffindo gagal melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, maka akan menjadi beban Entitas. Entitas juga harus membayar kerugian Agrocorp International Pte Ltd sebesar USD 98.464. Selain itu, Entitas dan PT Coffindo secara bersama-sama harus menanggung biaya perkara sebesar USD 75.036.

Permohonan Agrocorp International Pte Ltd untuk melakukan eksekusi keputusan SIAC di atas, telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 28 Januari 2019. Karena putusan tersebut belum bersifat final dan mengikat (*inkracht*), Entitas telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan eksekusi.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2023, Entitas mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas. Sampai dengan tanggal laporan ini, hasil dari proses hukum ini belum diketahui.

45. CONTINGENCY (continued)

b) Civil lawsuit of Agrocorp International Pte Ltd

Currently, the Group is facing a lawsuit on the tri-partite contract regarding Collateral Management Services whose parties are Agrocorp International Pte Ltd and LH Asia. PT Coffindo and the Entity. Agrocorp International Pte Ltd and LH Asia have filed a civil lawsuit against PT Coffindo and the Entity at Singapore International Arbitration Center (SIAC). SIAC had ruled that PT Coffindo should pay indemnity amounting to USD 4,566,697 to Agrocorp International Pte Ltd. If PT Coffindo failed to make the indemnity payment, it should be borne by the Entity. The Entity should also pay the indemnity to Agrocorp International Pte Ltd amounting to USD 98,464. In addition, the Entity together with PT Coffindo should pay the court fee amounting to USD 75,036.

*The request by Agrocorp International Pte Ltd to execute the SIAC's ruling had been granted by the District Court of Central Jakarta on January 28, 2019. As the court's decision is not final and binding yet (*inkracht*), the Entity is taking legal action by lodging a request to revoke the execution approval..*

Subsequently, on March 29, 2023, the Entity filed a memory of cassation against the above Central Jakarta District Court Decision. Up to the date of this report, the result of this legal processes is not known yet.

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

45. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

The table below is the carrying amount and fair value of financial assets and financial liabilities in the statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020.

	2022		2021	
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value
Aset Keuangan/Financial Assets				
Pinjaman dan piutang: / Loans and receivables:				
Kas dan bank/Cash and Cash Equivalent	181.417.662.371	181.417.662.371	173.058.934.548	173.058.934.548
Daposisi dijaminkan/Guarantee Deposit	3.000.000.000	3.000.000.000	21.828.113.040	21.828.113.040
Piutang usaha/Trade receivables	431.292.776.090	431.292.776.090	341.339.677.431	341.339.677.431
Piutang lain-lain/Other receivables	60.966.897.707	60.966.897.707	62.737.954.385	62.737.954.385
Aset keuangan tidak lancar lainnya/Other non-current financial assets	-	-	287.000.000	287.000.000
Jumlah/Total	676.677.336.168	676.677.336.168	599.251.679.404	599.251.679.404
Liabilitas keuangan lain-lain: / Other financial liabilities:				
Utang usaha/Trade payable	357.310.738.853	357.310.738.853	209.946.581.814	209.946.581.814
Utang Bank/Bank Loan	173.802.032.540	173.802.032.540	143.366.049.385	143.366.049.385
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya /Other current financial liabilities	38.597.913.804	38.597.913.804	57.877.800.924	57.877.800.924
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Current Portion of Long- Term Liabilities	24.061.349.309	24.061.349.309	26.136.879.636	26.136.879.636
Utang Jangka Panjang/ Long Term Payables	913.847.714.953	913.847.714.953	925.217.534.307	925.217.534.307
Utang sewa/Leases liabilities	718.630.970	718.630.970	1.274.143.419	1.274.143.419
Jumlah/Total	1.508.338.380.429	1.508.338.380.429	1.363.818.989.485	1.363.818.989.485

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset Keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan deposito yang dijamin adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar bank dibatasi penggunaannya mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala untuk merefleksikan suku bunga pasar.

Liabilitas Keuangan

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang bank, utang usaha, utang sewa utang lain-lain dan akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya karena sifatnya yang jangka pendek.

47. ESTIMASI NILAI WAJAR

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan harus diestimasi untuk pengakuan dan pengukuran atau untuk tujuan pengungkapan.

PSAK 60: Instrumen Keuangan: "Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkat hierarki pengukuran nilai wajar berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (level 1).
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan harga pasar kuotasi pada tanggal pelaporan. Harga pasar yang dikutip digunakan dalam harga penawaran saat ini, sedangkan liabilitas keuangan menggunakan harga permintaan.
2. Input selain harga kuotasi termasuk dalam level 1 yang dapat diamati untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (berasal dari harga) (level 2), dan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Financial Assets

The fair value of the underlying financial assets (generally less than one year), such as cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, and guarantee deposit is carried at carrying amount due to the approximate value of the warehouse.

The fair value of the bank is limited to its carrying value close to the carrying amount because the interest rate changes are periodically assessed to reflect the market interest rate.

Financial Liabilities

The carrying amount of financial liabilities, such as bank debt, trade payable, lease liabilities, other debts and accruals are close to the estimated value of the fair value due to its short-term nature.

47. FAIR VALUE ESTIMATION

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60: Financial Instruments: "Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

1. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1).
The fair value of financial instrument traded in active market based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used in the current bid price, while financial liabilities use ask price.*
2. *Inputs other than quoted price included within level 1 that are observable for the assets or the liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and the fair value of financial instruments that are not traded in active market is determined using valuation*

47. ESTIMASI NILAI WAJAR (lanjutan)

Penilaian ini memaksimalkan penggunaan jika data pasar yang dapat diobservasi di mana itu adalah nilai yang tersedia dan bergantung sesedikit mungkin pada perkiraan. Jika semua input signifikan mensyaratkan nilai wajar suatu instrumen dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam level 2.

3. Input untuk aset dan kewajiban yang sedikit berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (level 3) Jika satu atau lebih input signifikan tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen termasuk dalam level 3.

Teknik penilaian khusus yang digunakan untuk menilai instrumen keuangan meliputi:

- (a) Penggunaan kuotasi harga pasar atau penawaran dealer untuk instrumen serupa, dan
(b) Teknik lain, seperti analisis arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tersisa.

Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui menggunakan pengukuran nilai wajar level 2.

48. KONDISI EKONOMI

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan, operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi Group yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektivitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran virus Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Group.

Grup berkeyakinan bahwa pandemi COVID -19 saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis Grup, namun terdapat ketidakpastian yang

47. FAIR VALUE ESTIMATION (continued)

techniques. These valuations maximize the use if observable market data where it is value available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs requires to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

3. *Inputs for the assets and liability that are little based on observable market data (unobservable inputs) (level 3) If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.*

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- (a) *The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments, and*
(b) *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognized using the fair value measurement of level 2.

48. ECONOMIC CONDITION

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of Covid-19 virus, has resulted to adverse effects including adverse in economic growth, decline in capital market, increase in credit risks, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operation, which may continue and result on unfavourable financial and operation of the Group. The ability of Indonesia to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy, is largely dependent on the effectiveness of policies and actions responses issued by the Government of Republic of Indonesia on the eradicate the spread of the Covid-19 virus, as well as the fiscal and other measures that are being taken by the Government authorities. The effectiveness of the policy including actions and events are beyond the Group's control.

The Group's management believes that the pandemic COVID-19 at this time has an insignificant impact on the Group's business performance, however there is significant

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

signifikan mengenai dampak kondisi saat ini terhadap bisnis Grup di masa yang akan datang.

uncertainty about the impact of the current condition on the Group's business in the future.

49. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

49. SUBSEQUENT EVENT

a. Perubahan Dewan Komisaris

a. Change in the Composition of the Entity's Board of Commissioner

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, SH. No. 40 tanggal 20 Januari 2023, susunan dewan komisaris dan direksi entitas adalah sebagai berikut:

Based on the notarial deed of Aulia Taufani, SH, No. 40 dated January 20, 2023, the composition of the Entity's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Bara Khrisna Hasibuan
Muhammad Kapitra Ampera
Hamli
Setiawan Wangsaatmaja

Board of Commissioner

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama

Nina Sulistyowati

Board of Director

President Director

Direktur Keuangan, Manajemen
Risiko, SDM & Umum
Direktur Komersial &
Pengembangan
Direktur Operasi

Wien Irwanto
Andry Tanudjaja
Tri Wahyundo Hariyatno

Director of Finance, Risk
Management, HR & General
Affairs
Director of Commercial &
Development
Director of Operation

b. Perjanjian novasi utang Eks BPPN

b. Novation Agreement of Ex BPPN debt

Berdasarkan Perjanjian Novasi Nomor: PRJ-3/KN/2023 tanggal 31 Maret 2023 antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas, utang Eks BPPN sejumlah Rp609.660.827.208 dialihkan dari Entitas ke PT RNI (Catatan 27a).

Based on novation agreement No. PRJ-3/KN/2023 dated March 31, 2023 between the Government of the Republic of Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the Entity, ex BPPN debts amounting to Rp609,660,827,208 has been transferred from the Entity to PT RNI (Note 27a).

LAMPIRAN

Lampiran - 1

Appendix -1

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)
Laporan Posisi Keuangan
 Pada tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)
Statements of Financial Position
 As at December 31, 2022
 (Expressed in Rupiah)

	2022	2021	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	126.601.091.588	156.680.935.768	Cash and Cash Equivalents
Deposito Berjangka	3.000.000.000	21.828.113.040	Time Deposits
Piutang Usaha	346.509.133.632	308.967.689.787	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	59.604.980.733	62.720.107.782	Other Receivables
Persediaan	84.090.893.444	64.897.950.356	Inventories
Uang Muka	105.951.453.836	50.430.893.130	Advances
Pajak Dibayar Dimuka	49.666.029.149	30.364.317.229	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	1.681.771.186	13.606.799.133	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	777.105.353.568	709.496.806.225	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar			Non-Current Assets
Investasi pada Entitas Anak	3.498.000.000	3.498.000.000	Investments in Subsidiaries
Investasi pada Entitas Asosiasi	8.122.650.462	10.119.535.628	Investments in Associates
Aset Tetap	1.853.775.553.011	2.035.333.571.905	Fixed Assets
Aset Tidak Berwujud	19.705.899.498	3.300.000.000	Intangible assets
Properti Investasi	1.083.150.675.153	935.866.893.505	Investment Properties
Aset Hak Guna	844.358.969	477.325.453	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	44.056.322.320	36.756.232.159	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	547.304.756.903	557.833.929.667	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.560.458.216.316	3.583.185.488.317	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	4.337.563.569.884	4.292.682.294.542	TOTAL ASSETS

Lampiran – 1

Appendix - 1

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
 Pada tanggal 31 Desember 2022

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)
Statements of Financial Position (continued)
 As at December 31, 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2022	2021	
LIABILITAS			LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek			Current Liabilities
Utang Usaha	319.364.843.210	194.114.646.551	Trade Payable
Utang Pajak	3.943.030.884	13.447.244.211	Tax Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	28.005.947.821	59.089.045.006	Other Current Financial Liabilities
Liabilitas Sewa	-	65.287.499	Lease Liabilities
Beban Yang Masih Harus Dibayar	12.154.210.666	17.696.540.033	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	69.596.129.835	61.633.681.968	Unearned Revenues
Utang Bank – Jangka Pendek	173.802.032.540	143.366.049.385	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	24.061.349.309	26.136.879.641	Current Portion of Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	630.927.544.265	515.549.374.294	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang			Non-Current Liabilities
Utang Jangka Panjang	913.847.714.953	924.920.882.303	Long Term Payables
Utang Sewa	-	37.729.135	Lease Payables
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	38.015.300.117	80.022.674.676	Post-Employment Benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	951.863.015.070	1.004.981.286.114	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.582.790.559.335	1.520.530.660.408	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham	942.745.000.000	942.745.000.000	Share Capital
Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(231.042.410.552)	(231.042.410.552)	Difference from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
Saldo laba			Retained Earnings
Telah ditentukan Penggunaannya			Appropriated
Cadangan Umum	111.890.435.294	111.890.435.294	General Reserves
Cadangan Khusus	1.531.912.169	1.531.912.169	Specific Reserves
Belum ditentukan Penggunaannya	1.929.648.073.638	1.947.026.697.234	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	2.754.773.010.549	2.772.151.634.145	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.337.563.569.884	4.292.682.294.542	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Entitas Induk)**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprensif Lain**

Untuk tahun yang berakhir Pada
tanggal 31 Desember 2022

**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Parent Entity)**

**Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive
Income**

For the year ended
December 31, 2022

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2022	2021	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Usaha	1.649.358.064.707	1.868.658.639.825	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(1.420.291.089.418)	(1.626.202.794.303)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	229.066.975.289	242.455.845.522	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan dan Distribusi	(11.913.861.329)	(15.356.202.006)	Distribution and Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(194.212.489.602)	(365.637.980.632)	General and Administration Expenses
Beban Usaha	(206.126.350.931)	(380.994.182.638)	Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA	22.940.624.358	(138.538.337.116)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA			NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non-Usaha	51.215.461.388	10.368.932.810	Non-Operating Income
Beban Non-Usaha	(58.164.886.187)	(56.735.247.189)	Non-Operating Expense
Beban Non-Usaha – Bersih	(6.949.424.799)	(46.366.314.379)	Non-Operating Expense – Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	15.991.199.559	(184.904.651.495)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Penghasilan (Beban) Pajak:			Tax Benefit (Expense):
Pajak Final	(1.624.797.568)	(14.387.748.300)	Final Tax
Pajak Kini	-	-	Current Tax
Pajak Tangguhan	(1.576.029.583)	49.934.953.959	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	(3.200.827.151)	35.547.205.659	Total Tax Benefit (Expense)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	12.790.372.408	(149.357.445.836)	NET PROFIT (LOSS) FOR CURRENT PERIOD
Penghasilan Komprensif Lain:			Other Comprehensive Income:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi			Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(10.808.461.651)	(26.222.708.913)	Remeasurement of Employee Benefits
Perubahan nilai wajar aset Keuangan	(1.996.885.166)	-	Changes in fair value of Financial assets
Perubahan nilai wajar aset non Keuangan	(26.239.768.929)	341.872.768.000	Changes in fair value of non Financial assets
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	8.876.119.743	(69.443.012.999)	Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Loss
Laba (Rugi) Komprensif Lain Periode Berjalan	(30.168.996.003)	246.207.046.088	Other Comprehensive Income (loss) for Current Period
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESHENSIF PERIODE BERJALAN	(17.378.623.595)	96.849.600.252	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR CURRENT PERIOD



BUMI UNTUK
INDONESIA



PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

GRAHA PPI

Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, 10160

Tel.: (021) 3862141

Fax.: (021) 3862143

email: ppi.info@ptppi.co.id

Website: www.ptppi.co.id